DISERTASI

KEKUASAAN SOEHARTO DALAM PERSPEKTIF BIOPOLITIK NEO DARWINIS PERIODE 1965 -1971

SETA BASRI

196701519003

www.setabasri.org

UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
JAKARTA
2022

DISERTASI

KEKUASAAN SOEHARTO DALAM PERSPEKTIF BIOPOLITIK NEO DARWINIS PERIODE 1965 -1971

SETA BASRI

196701519003

Disertasi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Politik

www.setabasri.org

UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
JAKARTA

2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Promotor.
3. Di dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 2022

Yang Membuat Pernyataan

(Seta Basri)
196701519003

www.setabasri.org

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI
(TERBUKA)

Judul Disertasi **KEKUASAAN SOEHARTO DALAM PERSPEKTIF BIOPOLITIK NEO DARWINIS PERIODE 1965-1971**
Promotor, **Dr. Firdaus Syam** Co-Promotor, **Dr. Mohammad Noer**
Mengetahui, Program Doktor Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Koordinator, **(Dr. TB. Massa Djafar)** Tanggal ;
Nama : Seta Basri **NPM : 196701519003**

www.setabasri.org

ABSTRAK

Universitas Nasional
Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik
DISERTASI, 2022

A. Seta Basri
B. 196701519003
C. KEKUASAAN SOEHARTO DALAM PERSPEKTIF BIOPOLITIK NEO DARWINIS PERIODE 1965-1971
D. xxiii, 421, 2022
E. Disertasi ini berusaha membuktikan bahwa perspektif Biopolitik Neo Darwinis dapat digunakan untuk menganalisis kekuasaan Soeharto dalam periode 1965-1971. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dalam bentuk kajian kepustakaan yang digunakan untuk mendukung penjelasan teoretis baru atas suatu fenomena yang diteliti. Data-data yang digunakan diambil melalui aneka buku, jurnal, dokumen, berita surat kabar, baik yang tersedia secara luring maupun daring. Peneliti mengasumsikan bahwa aneka data sekunder mengenai kekuasaan Soeharto dalam periode penelitian tersedia secara cukup banyak. Guna menjelaskan kekuasaan Soeharto menggunakan teori Biopolitik Neo Darwinis, peneliti mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana Soeharto membangun kekuasaan antara 1965 hingga 1968 dikaitkan dengan konsep bonding, formasi koalisi, dan hirarki dyadic. Kedua, bagaimana upaya Soeharto melakukan dominasi politik nasional dikaitkan dengan konsep reproduksi kekuasaan dalam hirarki kompleks, dan mekanisme *inclusive fitness*. Ketiga, mengapa dominasi asimetris Soeharto atas aneka hirarki politik yang ada memungkinkannya menciptakan *political obedience* yang memungkinkan Pemilu 1971 dapat mendukung kekuasaannya untuk menjamin prediktabilitas spesies. Novelti disertasi adalah bahwa di dalam mengembangkan kekuasaannya, Soeharto berbeda dengan Sukarno, yang dalam cara pandang Biopolitik maka Soeharto cenderung menyerap (mengabsorpsi) aneka hirarki kompleks yang ada ke dalam kekuasaannya sementara Sukarno cenderung melakukan sentralisasi kekuasaan dengan mana fokusnya adalah mengalahkan kekuatan politik yang menentangnya secara frontal. Otoritarianisme yang dikembangkan Soeharto bersifat pilihan otomatis (*default option*) dan menyebabkan negara terhindar dari anarki akibat terjadinya persaingan terus-menerus antar kekuatan politik seperti masa Sukarno.
F. 100 buku, 89 jurnal, 8 majalah, 105 surat kabar, 8 disertasi, 15 publikasi elektronik, 41 peraturan perundangan dan dokumen.
G. Assoc. Prof. Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D.; Dr. Mohammad Noer, M.A.

www.setokasri.org

ABSTRACT

Universitas Nasional
Graduate School Doctor of Political Science Program
DISSERTATION, 2022

A. Seta Basri
B. 196701519003
C. SUHARTO'S POWER IN THE NEO-DARWINIST BIOPOLITICAL PERSPECTIVE OF THE 1965-1971 PERIOD
D. xxiii, 421, 2022
E. This dissertation seeks to prove that the Neo-Darwinist biopolitical perspective can be used to analyze Suharto's power in the period 1965-1971. The methodology used is qualitative in the form of literature studies that are used to support new theoretical explanations of a phenomenon under study. The data used are taken through various books, journals, documents, and newspaper news, both available offline and online. Researchers assume that a variety of secondary data on Suharto's power in the study period is available in sufficient quantity. To explain Suharto's rule using Neo-Darwinist biopolitical theory, the researcher asked three research questions. First, how Suharto built power between 1965 and 1968 is associated with the concept of bonding, coalition formation, and dyadic hierarchy. Second, how Suharto's efforts to dominate national politics are associated with the concept of reproduction of power in a complex hierarchy, and inclusive fitness mechanisms. Third, Why did Suharto's asymmetric dominance over the various political hierarchies allow him to create political obedience that allowed the 1971 election to support his power to ensure the predictability of the species. The dissertation novel is that in developing his power, Suharto was different from Sukarno, who in the biopolitical perspective Soeharto tended to absorb various complex hierarchies into his power while Sukarno tended to centralize power by which the focus was on defeating political forces that opposed him frontally. The authoritarianism developed by Suharto was an automatic choice (default option) and caused the country to avoid anarchy due to constant competition between political forces such as Sukarno's time.
F. 100 books, 89 journals, 8 magazines, 105 newspapers, 8 dissertations, 15 electronic publications, 41 laws and documents
G. Assoc. Prof. Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D.; Dr. Mohammad Noer, MA.

www.setabasri.org

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Seta Basri
Tempat Lahir	: Jakarta
Tanggal Lahir	: 17 – 10 – 1976
Pendidikan Sarjana	: Ilmu Politik Universitas Nasional
Pendidikan Magister	: Ilmu Politik Universitas Indonesia
Pendidikan Doktoral	: Ilmu Politik Universitas Nasional

www.setabasri.org

HAK CIPTA

Hak cipta disertasi ini berada pada penulis dan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi disertasi ini dalam bentuk apa pun, termasuk ilustrasi, tanpa izin dari penulis dan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.

www.setabasri.org

DAFTAR SINGKATAN

AD	:	Angkatan Darat
AK	:	Angkatan Kepolisian
AL	:	Angkatan Laut
APSA	:	*American Political Science Association*
AS	:	Amerika Serikat
ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations*
ASPRI	:	Asisten Pribadi
AU	:	Angkatan Udara
Bakin	:	Badan Koordinasi Intelijen Negara
Birda	:	Biro Daerah
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BTI	:	Barisan Tani Indonesia
CC-PKI	:	Comite Central Partai Komunis Indonesia
CDB	:	Comite Daerah Besar
DDII	:	Dewan Dakwah Islam Indonesia
Detga	:	Detasemen Gerilya
DNA	:	*Deoxyribonucleic Acid*
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FPN	:	Front Persatuan Nasional
G30S/PKI	:	Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
Gerda	:	Gerilya Desa
Gerwani	:	Gerakan Wanita Indonesia
Hansip	:	Pertahanan Sipil
IP-KI	:	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPSA	:	*International Political Science Association*
KAMI	:	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	:	Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KAPPKI	:	Kesatuan Aksi Pembela Partai Komunis Indonesia
KKO	:	Korps Komando
Kodam	:	Komando Daerah Militer
Kodim	:	Komando Distrik Militer
Kompro	:	Komite Proyek
Koramil	:	Komando Rayon Militer
Korem	:	Komando Resimen Militer
Kostrad	:	Komando Strategis Angkatan Darat
LM	:	Leninisme-Marhaenisme
LPRI	:	Laskar Pembebasan Rakyat Indonesia
Masyumi	:	Majelis Syura' Muslimin Indonesia
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Nasakom	:	Nasionalis Agama Komunis

www.sejarahasli.org

Nasakomil	:	Nasionalis Agama Komunis Militer
NU	:	Nahdlatul Ulama
Opsus	:	Operasi Khusus
Pangab	:	Panglima Angkatan Bersenjata
PNMI	:	Partai Nasional Merah Indonesia
Paraku	:	Pasukan Rakyat Kalimantan Utara
Parkindo	:	Partai Kristen Indonesia
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Perjuta	:	Perlawanan Rakyat Semesta
PGRS/Paraku	:	Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PNI	:	Partai Nasional Indonesia
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PRRI	:	Presiden Republik Rakyat Indonesia
PRRI/Permesta	:	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta
PSI	:	Partai Sosialis Indonesia
RPKAD	:	Resimen Para Komando Angkatan Darat
Sekber Golkar	:	Sekretariat Bersama Golongan Karya
Seskoad	:	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
Sobsi	:	Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
Soksi	:	Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia
SPR	:	Sekolah Perlawanan Rakyat
SPRI	:	Staf Pribadi
SSKAD	:	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat
Supersemar	:	Surat Perintah Sebelas Maret
TAP	:	Ketetapan
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI-AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI-AK	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Kepolisian
TNI-AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI-AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNKU	:	Tentara Nasional Kalimantan Utara
TPRI	:	Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia
Triko	:	Trio Kota
UU	:	Undang-undang
UUD 1945	:	Undang-undang Dasar 1945
Wanra	:	Perlawanan Rakyat

www.sejarah-nasional.org

GLOSARI

Abangan	:	Bentuk perilaku beragama sinkretis antara animisme, Hinduisme, dan elemen Islam.
Aggression	:	Agresi; Tindakan atau prosedur memaksa (seperti serangan tanpa alasan) terutama dimaksudkan untuk mendominasi atau menguasai.
Aksi Sepihak	:	Tindakan menguasai lahan tanpa melalui Pengadilan *Landreform*; Banyak dilakukan elemen terkait PKI seperti Barisan Tani Indonesia.
Aliansi	:	Keadaan bersekutu; Aksi bersekutu.
Alpha Male	:	Hewan jantan dominan dalam kelompok; Seorang laki-laki yang cenderung mengambil peran dominan atau dominan dalam situasi sosial atau profesional.
Angkatan Kelima	:	Buruh dan tani yang dipersenjatai; Awal 1965 Mao Tse-tung menawarkan Sukarno bantuan senjata; Asmu, Ketua BTI dan anggota Politbiro PKI, menuntut massa rakyat dipersenjatai sesuai janji bantuan Mao; Aidit mempertegas usulan Asmu pada pidato Februari 1965 untuk membentuk Angkatan Kelima yang dipersenjatai.
Asimetris	:	Memiliki dua sisi atau bagian yang tidak sama.
Biogram	:	Seperangkat interaksi yang bisa diprediksi dan menunjukkan bagaimana spesies berinteraksi secara berurutan, bisa dimodifikasi, bagaimana kondisi penerapannya, juga bagaimana ia membantu spesies bertahan hidup.
Biogrammar	:	Aturan memahami bahasa perilaku.
Biolog	:	Ahli ilmu Biologi.
Biologi	:	Ilmu tentang kehidupan.
Biopolitik	:	Gagasan bahwa aneka konsep Biologi dapat membantu penjelasan fenomena politik; Salah satu bidang kajian ilmu politik dalam IPSA yang dijalankan Komite Riset 12.
Bonding	:	Ikatan dalam kelompok.
Coalition	:	Koalisi; Aliansi sementara dari pihak, orang, atau negara berbeda untuk bertindak bersama.
Coalition formation	:	Formasi koalisi; Cara suatu koalisi terbentuk.
Competition	:	Pertandingan antar rival.
Constraint	:	Keadaan dipaksa, dibatasi, atau dipaksa menghindari atau melakukan tindakan tertentu.
Deception	:	Fakta atau kondisi ditipu.
Deduktif	:	Menggunakan deduksi dalam penalaran.
Default option	:	Pilihan yang biasanya dibuat secara otomatis atau tanpa pertimbangan aktif.

www.setiabasir.org

Demokrasi Terpimpin	:	Demokrasi yang menekankan peran seorang pemimpin dalam membuat keputusan; Sistem politik Indonesia kurun 1959-1965 dengan Sukarno sebagai pemimpin.
Dependence	:	Bergantung; Kualitas atau keadaan dipengaruhi atau ditentukan oleh atau tunduk pada pihak lain.
Display	:	Menunjukkan secara mencolok.
Dispute settlement	:	Proses penyelesaian perselisihan antar pihak.
Dominasi	:	Pola hubungan, di antara para anggota suatu spesies, dalam mana kemungkinan hewan dominan punya akses preferensial atas sejumlah komoditas yang juga diinginkan oleh anggota spesies lainnya.
Dyadic	:	Hubungan antara dua orang atau dua pihak.
Economic resuscitation	:	Penyelamatan ekonomi.
Eliminasi	:	Tindakan menghilangkan.
Etologi	:	Ilmu perilaku hewan.
Evolusi	:	Perubahan karakteristik suatu spesies selama beberapa generasi dan bergantung pada proses seleksi alam.
Fenotipe	:	Karakteristik atau sifat yang dapat diamati dari suatu organisme yang dihasilkan oleh interaksi genotipe dan lingkungan; Ekspresi fisik dari satu atau lebih gen.
Fight	:	Bersaing dalam perkelahian atau pertempuran fisik
Flight	:	Tindakan melarikan diri.
Floating Mass	:	Massa mengambang
Fokus	:	Pusat aktivitas, daya tarik, atau perhatian.
Force	:	Kekerasan, kewajiban, atau paksaan yang diberikan pada atau terhadap seseorang atau sesuatu.
Ganyang Kabir	:	Hancurkan Kapitalis-Birokrat.
Gen	:	Urutan nukleotida tertentu dalam DNA atau RNA yang biasanya terletak pada kromosom dan merupakan unit fungsional pewarisan yang mengendalikan transmisi dan ekspresi satu atau lebih sifat dengan menentukan struktur polipeptida tertentu dan terutama protein atau mengendalikan fungsi materi genetik lainnya.
Genetik	:	Berkaitan dengan atau ditentukan oleh asal-usul, perkembangan, atau anteseden kausal dari sesuatu.
Genotipe	:	Seluruh atau sebagian konstitusi genetik individu atau kelompok.
Hipotalamus	:	Wilayah kecil otak, letaknya di dasar otak, dekat kelenjar pituitari; Fungsinya melepaskan hormon, mengatur suhu tubuh, mempertahankan siklus fisiologis harian, mengendalikan nafsu makan, mengatur perilaku seksual, mengatur respons emosional.
Hirarki	:	Susunan bergradasi atau terperingkat.
Hirarki *Dyadic*	:	Hirarki tempat dua individu bersaing.
Hirarki Kompleks	:	Kondisi lebih dari satu hirarki.

www.setapasri.org

Homo sapiens	:	Manusia.
Ideologi	:	Cara atau isi berpikir yang menjadi ciri khas individu, kelompok, atau budaya.
Ideologis	:	Bersifat ideologi.
Inclusive fitness	:	Konsistensi kecenderungan hewan (juga manusia) yang secara individual selalu menyesuaikan perilaku mereka demi keberhasilan reproduksi maksimal dalam jangka panjang; Salah satu wujud perilaku *inclusive fitness* adalah kooperasi (kerja sama).
Individual personalities	:	Kepribadian individu.
Induktif	:	Menggunakan induksi dalam penalaran.
Innate	:	Ditentukan oleh faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang sejak lahir.
Instingtif	:	Didorong oleh naluri atau kecenderungan alami; Muncul secara spontan.
Interactive Brain Model of Behaviour	:	Model yang menjelaskan perilaku ditentukan interaksi genetik dan lingkungan di dalam otak.
Kelenjar Adrenal	:	Struktur kecil yang melekat pada bagian atas setiap ginjal. Tubuh manusia memiliki dua kelenjar adrenal yang melepaskan bahan kimia yang disebut hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini mempengaruhi banyak bagian tubuh manusia.
Kelenjar Gonad	:	Kelenjar reproduksi primer yang menghasilkan sel-sel reproduksi (gamet). Pada laki-laki gonad disebut testis; Gonad pada wanita disebut ovarium.
Klien	:	Seseorang yang berada di bawah perlindungan orang lain; Bergantung.
Koalisi	:	Aliansi sementara dari pihak, orang, atau negara berbeda untuk bertindak bersama.
Komite Riset 12	:	Badan penelitian di *International Political Science Association* yang menaungi studi Biopolitik.
Komoditas	:	Sesuatu yang berguna atau berharga.
Kronologis	:	Bersifat pengaturan (pada peristiwa) dalam urutan terjadinya.
Landreform	:	Perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah bukan hanya dalam pengertian politik tetapi juga pengertian teknis sesuai Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Library research	:	Penelitian kepustakaan.
Limbik	:	Bagian dari otak yang terlibat dalam hal perilaku yang kita butuhkan untuk bertahan hidup: makan, reproduksi dan merawat anak, dan respons melawan atau lari.
Lokus	:	Tempat di mana sesuatu berada atau terjadi.
Mikro Politik	:	Politik dalam skala kecil atau lokal; terutama (studi

www.setabasri.org

		tentang) prinsip-prinsip politik yang mengatur atau masalah yang timbul dari interaksi kelompok sosial yang relatif kecil, aspek perilaku yang terbatas, ketimbang masyarakat secara keseluruhan.
Nature	:	Kualitas suatu organisme yang dikendalikan secara genetik.
Neo-Darwinis	:	Kelompok ahli Biologi yang menggunakan teori evolusi yang merupakan sintesis teori Darwin dalam hal seleksi alam dengan genetika populasi modern.
Neokorteks	:	Bagian korteks serebral otak manusia di mana fungsi kognitif yang lebih tinggi diperkirakan berasal.
Neurobiologi	:	Cabang ilmu kehidupan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, dan patologi sistem saraf.
Nurture	:	Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan sifat yang diekspresikan oleh organisme.
Oligark	:	Anggota atau pendukung oligarki.
Oligarki	:	Pemerintahan di mana sekelompok kecil menjalankan kendali terutama untuk tujuan korup dan kepedulian terhadap kesejahteraan atau keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan orang lain.
Ordo	:	Peringkat taksonomi makhluk hidup yang terletak di antara kelas dan keluarga (famili).
Otoritarian	:	Berkenaan dengan pemberlakuan kendali ketat. [Kata sifat]
Otoritarianisme	:	Teori bahwa pemerintah harus mengatur rakyatnya secara ketat. [Kata benda]
Outsider	:	Seseorang yang tidak termasuk dalam kelompok tertentu.
Patron	:	Seseorang yang memberikan dukungan finansial atau lainnya kepada seseorang, organisasi, atau tujuan tertentu.
Patron-Klien	:	Hubungan antara seorang patron dengan seorang klien secara *dyadic.*
Perspektif	:	Penampakan obyek yang dilihat sehubungan dengan posisi relatif, jarak dari pemirsa.
Political Obedience	:	Tindakan yang diambil oleh subordinat dalam menyikapi aneka perintah, baik tersirat maupun tersurat, atau dari mereka yang menempati posisi atas dalam hirarki politik (atau terkadang militer); Sejauh hirarki ini diyakini sebagai "legitimate" maka secara genetik kecenderungan manusia adalah mematuhinya.
Political Order	:	Ketertiban politik.
Praetorian Polities	:	Negara pretorian; Militer selaku penjaga juga sekaligus pemberi pengaruh politik.
Prediktabilitas	:	Mampu diprediksi.
Prediktabilitas Spesies	:	Menurut Albert Somit dan Steven A. Peterson,

www.setabasri.org

		Prediktabilitas Spesies adalah kepastian posisi setiap individu di dalam mengakses aneka sumber daya dan melakukan reproduksi. Setiap pihak cenderung memahami posisi masing-masing serta kelayakan mereka dalam hal akses atas komoditas bernilai, termasuk juga reproduksi dalam kondisi hirarkis yang jelas. Dengan prediktabilitas spesies maka tidak ada lagi pertikaian berlarut-larut, terbuangnya energi yang bersifat terus-menerus, risiko luka fisik, bahkan kematian.
Primata	:	Salah satu ordo mamalia yang dicirikan perkembangan maju dalam hal penglihatan binokular yang menghasilkan persepsi kedalaman stereoskopik, spesialisasi tangan dan kaki untuk menggenggam, dan pembesaran belahan otak; Mencakup manusia, kera, monyet, lemur, dan tarsus.
Priayi	:	Bentuk perilaku yang berakar pada Hinduisme, terutama kaum elit turun-temurun;
Reassurance	:	Tindakan menghilangkan keraguan atau ketakutan seseorang.
Reproduksi	:	Tindakan atau proses menyalin sesuatu.
Resources	:	Sumber pasokan atau dukungan; Sarana yang tersedia.
Rural	:	Berkaitan dengan orang pedesaan atau kehidupan pertanian.
Santri	:	Bentuk perilaku berdasarkan ritual, sosial, amal, dan terkait organisasi Islam.
Santri Modernis	:	Santri yang mengikuti pembaruan Islam, misalnya Muhammadiyah; Mengislamkan kemajuan Barat.
Santri Tradisional	:	Santri yang tidak mengikuti pembaruan Islam, misalnya Nahdlatul Ulama; Berpegang pada tradisi keagamaan yang berpusat pada Ulama.
Selfish	:	Kepedulian terhadap kesejahteraan atau keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan orang lain.
Sex	:	Berkenaan dengan jenis kelamin.
Sharing	:	Mengambil bagian, menggunakan, mengalami, menempati, atau menikmati dengan orang lain.
Simetris	:	Terdiri dari bagian-bagian yang persis sama yang saling berhadapan atau di sekitar sumbu.
Social control	:	Kendali sosial.
Social roles	:	Peran sosial.
Soeharto sentris	:	Para perwira yang memiliki kesamaan pandangan dan nilai dengan Soeharto.
Spesies	:	Kategori peringkat klasifikasi biologis tepat di bawah genus atau subgenus.
Status quo	:	Keadaan yang kini ada.
Status quo ante		Keadaan yang ada sebelumnya.

www.setabasri.org

Stratifikasi	:	Tindakan atau proses stratifikasi.
Submisi	:	Keadaan tunduk, rendah, atau patuh.
Subordinat	:	Tunduk atau dikendalikan oleh otoritas.
Subordination	:	Penempatan di kelas, pangkat, atau posisi yang lebih rendah.
Survival of the Fittest	:	Kelangsungan hidup organisme yang paling baik adaptasinya dengan lingkungan, diiringi kepunahan organisme lain.
Threat	:	Ancaman; Pernyataan niat untuk menimbulkan rasa sakit, cedera, kerusakan, atau tindakan bermusuhan lainnya pada seseorang sebagai pembalasan atas sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan.
Trade-off	:	Keseimbangan yang dicapai antara dua fitur yang diinginkan tetapi tidak kompatibel; Sebuah kompromi.
Tujuh Setan Desa	:	Menurut Dipa Nusantara Aidit adalah strata atas desa yang merupakan kelas pengeksploitasi, terdiri atas: (1) Tuan tanah Indonesia; (2) Tuan tanah asing; (3) Petani Kaya; (4) Lintah Darat; (5) Tukang Ijon; (6) Tengkulak; dan (7) Birokrat Kapitalis, yaitu pengurus desa yang cuma menguntungkan dirinya saja.
Turmoil	:	Pergolakan; Keadaan atau kondisi kebingungan, hasutan, atau keributan ekstrem.
Urban	:	Karakteristik berkenaan dengan kota.

www.setabasir.org

KATA PENGANTAR

Disertasi ini menganalisis *power relations* Soeharto dalam kurun 1965 hingga 1971 di Indonesia. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Biopolitik Neo Darwinis. Teori ini menekankan bahwa dominasi-submisi adalah prasyarat untuk menciptakan kepatuhan politik sehingga mampu tercipta sebuah hirarki dominan yang mampu menjamin prediktabilitas politik dalam kelompok manusia.

Disertasi ini juga berupaya untuk memberikan argumentasi bahwa Otoritarianisme yang dikembangkan Soeharto pada periode penelitian adalah pilihan otomatis, diperlukan, dan memiliki sisi positif bagi kelangsungan hidup sistem politik Indonesia. Namun, tentu saja ekses dari Otoritarianisme yang dikembangkan tersebut tidak dapat ditolak kehadirannya dan tidak menjadi fokus disertasi ini. Disertasi ini berpusat pada cara membangun analisis perpolitikan Indonesia 1965-1971 dari sudut pandang Soeharto yang berposisi sebagai individu dominan yang terlibat upaya *survival of the fittest* berhadapan dengan aneka hirarki kekuatan politik aktual saat itu.

Disertasi ini merekam bahwa perilaku politik yang Soeharto tunjukkan dalam periode penelitian merupakan perpaduan antara unsur *nature* dan *nurture.* Unsur *nature* di dalam perspektif Biopolitik Neo Darwinis adalah inheren karena merupakan bawaan proses evolusi. Perilaku-perilaku dominasi-submisi, pembentukan hirarki, perebutan akses sumber daya, pembentukan aliansi-koalisi, dan kecenderungan spesies untuk menghentikan konflik agar proses reproduksi

www.setabasri.org

dapat berjalan merupakan sejumlah unsur *nature* yang juga ditunjukkan melalui perilaku politik Soeharto. Perilaku-perilaku *nature* seperti telah disebutkan merupakan pola alamiah yang juga ditunjukkan oleh kelompok-kelompok primata besar non manusia seperti gorilla, simpanse ataupun bonobo.

Namun, kemampuan *homo sapiens* (manusia) berbeda dengan primata-primata besar berkelompok lain karena memiliki kemampuan bahasa yang sangat kompleks. Hal ini merupakan pengaruh dari aspek *nurture* bahwa aspek-aspek *natural* manusia lebih disempurnakan sehingga mampu membuat serangkaian aturan kompleks tertulis yang tidak mampu ditunjukkan oleh primata besar non manusia. Perilaku *nurture* ini diantaranya ditunjukkan Soeharto dengan menggunakan konsep Trilogi Pembangunan sebagai alat pembenar politik yang bisa dipahami dan harus disepakati oleh aneka kekuatan politik aktual. Selain itu pula kecenderungan Soeharto untuk menempuh jalur konstitusional ketimbang *trande-off* dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan nasional dengan Sukarno juga menunjukkan kecenderungan *nurture* ini. Perpaduan antara unsur *nature* dan *nurture* ini mampu dibawakan Soeharto secara nyaris sempurna sehingga pergolakan politik sejak akhir 1965 tidak berujung pada pertumpahan darah berlarut-larut dengan keberhasilannya menyelenggarakan Pemilu 1971 dengan dirinya sebagai *alpha male* yang harus diterima semua pihak.

Tersusunnya disertasi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung telah mendukung penulis, baik dalam hal sistematisasi dan pembangunan argumentasi, logika yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian, maupun aneka dokumen yang sangat berharga

www.setabasri.org

sebagai sumber data penelitian. Untuk itu maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional; Prof. Dr. Endang Sukara selaku Penguji; Assoc. Prof. Dr. T.B. Massa Djafar, M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional; Assoc. Prof. Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D. selaku Promotor yang banyak memberikan masukan serta arahan mengenai substansi disertasi ini; Dr. Mohammad Noer, MA. selaku Kopromotor yang banyak memberikan masukan serta arahan mengenai kaidah teknis penulisan laporan ilmiah disertasi ini; dan Ibu Emma, Pak Bambang, Pak Ade, dan Pak Wanto dari Sekretariat Program Doktoral Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional yang membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun sidang-sidang disertasi ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Truly Wangsalegawa, Ph.D. yang memberi dukungan dengan menyatakan bahwa tinjauan atas kekuasaan yang saya gunakan ternyata belum pernah ada yang menggunakannya di Indonesia.Penilaian kritis dari Bu Truly tersebutlah yang membuat penulis yang awalnya ragu berubah menjadi percaya diri untuk melanjutkan penggunaan perspektif Biopolitik Neo Darwinis dalam disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sejumlah pionir studi Biopolitik Neo Darwinis. Pertama, kepada Prof. Albert Somit, Ph.D. (*Rest in Peace*: 2 Agustus 2020) dari Southern Illinois University selaku akademisi yang mampu membuat Komite Riset 12 yang fokus pada studi Biologi dan Politik berhasil diakui oleh Internatioanal Political Science Association. Karya-karya

www.setabasri.org

Profesor Somit merupakan fundasi utama dari perspektif Biopolitik yang digunakan di dalam disertasi ini. Kedua, kepada Prof. Steven Ames Peterson, Ph.D. dari Pennsylvania State University-Harrisburg (*Rest in Peace* 10 Desember 2021). Penulis sempat berkorespondensi dengan Prof. Peterson selama bulan Juli 2021 seputar konsep-konsep penting dalam Biopolitik Neo Darwinis dan bagaimana melakukan analisa berdasarkan turunan aneka konsep tersebut. Karya-karya kolaborasi Prof. Peterson dan Prof. Somit sangat mempengaruhi cara berpikir penulis di dalam disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan seangkatan penulis seperti Dasril, A. Chumaedy, A. Gaus, Arzetti Bilbina, Amrullah M. Ridha, Abner Jitmau, Dinda P. Djojonegoro, dan Vitri Aryanti yang telah menjadi teman diskusi dan motivator sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. *Sungkem* secara khusus selalu dihaturkan kepada kedua orang tua penulis yaitu H. Abdullah Basri dan Hj. Awang Sundawangsih, yang dukungan dan doanya melumuri perjuangan penulis dalam menyelesaikan studi doktoral yang panjang dan berliku ini. Juga, ungkapan sayang tak terhingga penulis utarakan kepada Siti Fatimah, istri penulis, yang sabar dalam menghadapi aneka gejolak selama penyelesaian studi ini. Tidak lupa penghargaan sebesar-besarnya kepada pihak Yayasan Pendidikan Kita (Sandikta) yang membantu pendanaan studi doktoral penulis dari awal Sidang Promosi. Tentu saja, segala kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam disertasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Jakarta, Juli 2022
Seta Basri

www.setabasri.org

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
ABSTRAK..... iv
ABSTRACT..... v
RIWAYAT HIDUP..... vi
HAK CIPTA..... vii
DAFTAR SINGKATAN..... viii
GLOSARI..... x
KATA PENGANTAR..... xvi
DAFTAR ISI..... xviii
DAFTAR TABEL..... xxii
DAFTAR GAMBAR..... xxiii
DAFTAR LAMPIRAN..... xxiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Masalah Penelitian dan Kerangka Analisis..... 5
1. Masalah Penelitian..... 5
2. Kerangka Analisis..... 28
3. Operasionalisasi Konsep..... 29
4. Tujuan Penelitian..... 31
5. Manfaat Penelitian..... 31
6. Batasan Penelitian..... 32
C. Pertanyaan Penelitian..... 34
D. Kajian Literatur dan Kerangka Teori..... 35
1. Kajian Literatur..... 35
2. Kerangka Teori..... 38
a. Kekuasaan..... 38
b. Pandangan Biopolitik atas Otoritarianisme..... 41
c. Kekuasaan Soeharto dalam Perspektif Biopolitik..... 46
E. Metode Penelitian..... 59
F. Sistematika Penulisan..... 61

BAB II SOEHARTO DAN *BONDING*-NYA
A. Sukarno dan Prediktabilitas Spesies..... 62
B. Soeharto dan *Bonding*-nya..... 70

www.setabasri.org

C. Lingkaran Soeharto Sentris..... 86
D. Lingkungan Sipil-Militer Seskoad..... 91
E. Lingkaran Pater Beek..... 101

BAB III SOEHARTO DAN REPRODUKSI KEKUASAAN
A. Reproduksi Kekuasaan Melalui Reorganisasi Angkatan Bersenjata..... 114
1. Reproduksi Kekuasaan di Tubuh TNI-AD Pasca 1965..... 116
2. Reproduksi Kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata 123
B. Reproduksi Kekuasaan dalam Partai Politik..... 132
1. Dominasi atas Masyumi..... 132
2. Dominasi atas PNI..... 151
C. Pemberdayaan Sekber Golkar..... 160

BAB IV KEKUASAAN SOEHARTO PERIODE 1965-1971 DALAM PERSPEKTIF BIOPOLITIK
A. Dominasi dan Hirarki *Dyadic*..... 173
1. Eliminasi Aliansi Sukarno..... 174
a. Kelompok Sipil Anti Komunis..... 182
b. *Physical Force*..... 194
c. Pembersihan Kabinet, Parlemen, dan TNI-AD..... 211
d. Aturan Konstitusional Pembubaran PKI..... 217
2. Dominasi dalam Hirarki *Dyadic*..... 220
B. Dominasi dalam Hirarki Kompleks..... 237
1. *Alpha Male* Baru dan Hirarki Kompleks..... 238
a. Penyingkiran Individu Dominan..... 245
b. Akses Preferensial..... 257
c. Rekayasa Hirarki..... 263
2. UU Pemilu dan Susunan Anggota Parlemen..... 269
3. Mekanisme *Inclusive Firness*..... 287
C. Political Obedience menuju Prediktabilitas Spesies..... 323
1. Komando Pemilu..... 323
2. Proses Pemilu..... 331
3. Prediktabilitas Spesies dalam Dominasi Soeharto... 347

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 369
B. Implikasi Teori..... 383
C. Reflektif..... 394

DAFTAR PUSTAKA..... 400
LAMPIRAN..... 422

www.setabasi.org

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Operasionalisasi Konsep..... 29
Tabel.2. Kajian Literatur..... 36
Tabel.3. Komposisi Pengurus Parmusi..... 136
Tabel.4. Struktur Parmusi sesuai Kehendak Soeharto..... 139
Tabel.5. Struktur Parmusi Hasil Kongres Malang..... 144
Tabel.6. Personil Sipil Militer dalam Gerakan 30 September..... 199
Tabel.7. Struktur Organisasi Pimpinan PKI September 1965..... 204
Tabel.8. Kabinet Dwikora Reshuffle Kedua..... 212
Tabel.9. Recall Anggota Ormas di DPR-GR 1968..... 281
Tabel.10. Perolehan Suara Pemilu 1955 dan 1971..... 349
Tabel.11. Produksi Beras Pasca Keterlibatan Soeharto dalam Kekuasaan..... 357

www.setabasri.org

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.Dua Kelompok Biopolitik..... 9
Gambar.2.Interactive Brain Model of Behaviour..... 10
Gambar.3.Kerangka Analisis..... 28
Gambar.4.Dominasi dalam Hirarki Dyadic Sukarno-Soeharto..... 236
Gambar.5.Dominasi dalam Hirarki Kompleks..... 322

www.setabasri.org

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:
Tulisan Tangan Soeharto tanggal 27 Oktober 1965 Masih Mendukung Politik Kiri Sukarno.

Lampiran 2:
Reproduksi Kekuasaan Awal dalam Hirarki TNI-AD

Lampiran 3:
Reproduksi Kekuasaan dalam Hirarki TNI-AD setelah Soeharto Menjabat Presiden

Lampiran 4:
Hasil Reproduksi Kekuasaan dalam TNI-AD setelah 5 Oktober 1969

Lampiran 5:
Kabinet Dwikora *Reshuffle* Ketiga

www.setabasri.org

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sukarno berkuasa atas dasar perimbangan kekuatan politik.[1] Sebagian kekuatan Islam setengah hati mendukung, sebagian lain menentangnya.[2] Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) bersaing agresif dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam menentang tuntutan pembentukan Angkatan Kelima. Pimpinan dan massa Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah pedesaan terlibat pertikaian dengan massa PKI akibat penafsiran atas reformasi agraria (*landreform*).[3] Perbenturan seluruh unsur kekuatan tersebut membuat situasi politik Indonesia berada dalam kondisi pergolakan (*turmoil*) sehingga berimbas pada kurang terurusnya pembangunan ekonomi.

Pergolakan yang melingkupi kekuasaan Sukarno sebagian besar dipicu oleh pertentangan yang berdampak pada ketegangan ideologi antar kekuatan politik.[4] Pertentangan tersebut terutama bersumber dari doktrin Nasakom yang paradoks.[5]

www.setabasri.org

[1] Ewa T. Pauker, "Has the Sukarno Regime Weakened the PKI?" *Asian Survey.* 1964. Vol. 4, No. 9 (Sep.) pp. 1058-1070, p. 1059

[2] J.A.C. Mackie, "Indonesian Politics under Guide Democracy." 1961. *Australian Outlook.* 15:3, pp. 260-279. p.262-3.

[3] Olle Tornquist, *Penghancuran PKI.* Penerjemah: Harsutejo. Depok: Komunitas Bambu, 2017. h. 159-176. Selo Soemardjan menulis bahwa masalah *landreform* ini juga ditengarai berasal dari kurang antisipatifnya Pengadilan *Landreform* dalam mengatasi gejolak yang muncul akibat penafsiran atas Undang-undang Pokok Agraria yang disusun pemerintah, dengan PKI selaku pendukung utamanya. Lihat Selo Soemardjan. Landreform in Indonesia. 1962. Asian Survey. Vol. 1, No. 12 (Feb.) pp. 23-30, p. 30.

[4] Hingga saat ini, rujukan utama persaingan ideologi di Indonesia 1960-an didasarkan Herbert Feith and Lance Castle, eds., *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Itacha and London: Cornell University Press, 1970.

[5] Apabila Nasakomil ditambahkan kekuatan militer maka menjadi Nasakomil, suatu istilah yang diajukan J.A.C. Mackie. Lihat Mackie, "Indonesian …" *op. cit.*, p. 264.

Di kalangan kekuatan nasionalis dan Islam muncul kecurigaan terhadap loyalitas politik PKI di dalam kehidupan politik bangsa. Kelompok agama ternyata sulit untuk hidup berdampingan dengan kelompok komunis.[6] Pada paruh awal 1960-an, konflik horizontal antara massa PKI melawan massa NU serta Majelis Syura' Muslimin Indonesia (Masyumi) marak terjadi.[7] Kendati NU bersedia menjadi pilar Nasakom, tetapi kesediaan mereka lebih bersifat terpaksa ketimbang mendukung.[8] Gagasan *landreform* yang ditafsirkan secara sepihak oleh PKI semakin agresif terhadap pemilik tanah santri (terafiliasi dengan NU dan Masyumi) juga *priayi* (terafiliasi dengan PNI).[9]

Selain *landreform,* kampanye PKI lainnya seperti *Ganyang Kabir* maupun pembasmian *Tujuh Setan Desa* juga telah meresahkan masyarakat pedesaan[10] serta mendorong massa NU, Masyumi, dan PNI terlibat dalam aneka bentrokan fisik dengan massa PKI.[11] Sengketa lahan garapan perkebunan atas nama program *landreform* diikuti aksi sepihak PKI mendorong TNI-AD bersikap agresif dalam politik.[12] Mendekati bulan Oktober 1965 konflik antara TNI-AD dan PKI semakin memanas, sementara Sukarno berupaya terus memperkuat posisi dirinya dengan

www.setabasri.org

---

[6] Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. Translated by Jeremy Desmond. Singapore: National University of Singapore, 2015, pp. 212-214.
[7] Justus van der Kroef, "Disunited Indonesia." *Far Eastern Survey,* Vol. 27, No. 4 (Apr., 1958), pp. 49-63. p. 57-8.
[8] Justus M. van der Kroef, ""Guided Democracy" in Indonesia."1957. *Far Eastern Survey.* Vol. 26, No. 8 (Aug.) pp. 113-124., p.115-6.
[9] Rex Mortimer, "Class, Social Cleavage and Indonesian Communism." 1969. *Indonesia.* No. 8 (Oct.) pp. 1-20. p. 11-18.
[10] Ernst Utrecht, "Class Struggle and Politics in Java." 1972. *Journal of Contemporary Asia.* 2:3 pp. 274-282., p. 274.
[11] Massa mengidentifikasi diri dengan partai berdasar aliran. Di Bali ada desa PSI, desa PNI, atau di Jawa dan Bali ada desa "kompak NU" atau "kompak PNI" yang berarti anggota partai lain tidak diterima beroperasi di sana. Lihat Ernst Utrecht, "Class Struggle …, *op. cit.,* p. 277-8.
[12] Justus van der Kroef, "Peasant and Land Reform in Indonesian Communism." *Journal of Southeast Asian History.* 1963. Vol. 4, No. 1 (Mar.) pp. 31-67., p. 54.

cara mendukung PKI guna mengatasi membesarnya pengaruh TNI-AD.[13] Basis kekuasaan Sukarno yang rapuh kemudian runtuh dipicu G30S/PKI dan Soeharto memulai kekuasaannya.

Peran kekuasaan Soeharto dalam politik Indonesia diperkuat dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Posisi Jenderal Soeharto juga diperkuat Seminar II Angkatan Darat di Bandung, yang menggariskan konsep Dwifungsi ABRI, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Kekuasaan Soeharto juga mendapat dukungan aneka kekuatan politik sipil anti PKI serta Amerika Serikat (AS).[14]

Jenderal Soeharto dan lingkaran TNI-AD-nya belum mampu mereproduksi kekuasaan hingga ke tingkat organisasi politik sipil peserta Pemilu yang direncanakan untuk diadakan pada tahun 1969. Pada perkembangannya Pemilu itu sendiri ditunda dan baru dapat diselenggarakan tahun 1971. Penundaan tersebut tidak terlepas dari upaya kekuatan politik di bawah pimpinan Jenderal Soeharto untuk melakukan konsolidasi politik dengan memanfaatkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Basis paling nyata kekuatan Jenderal Soeharto berada di TNI-AD. Namun, korps militer tidak bisa menjadi kontestan Pemilu. Pada sisi lain, kekuatan rezim Orde Lama (Orla) kendati kekuasaannya telah terlucuti, tetapi figur Sukarno cenderung masih populer di sebagian kalangan rakyat, khususnya dalam kantong-kantong padat penduduk di Jawa.

www.setabasri.org

---

[13] Martin Ebon, "Indonesian Communism: From Failure to Success." *The Review of Politics.* 1963. Vol. 25, No. 1 (Jan.), pp. 91-109. p.104.

[14] John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto.* Penerjemah: Hersri Setiawan. Jakarta: ISSI & Hasta Mitra, 2008.

Penundaan Pemilu memberi waktu bagi Soeharto guna mereproduksi kekuasaan. Selain memastikan Sekber Golkar berada di bawah dominasinya, ia pun mereorganisasi angkatan bersenjata.[15] Setelahnya ia memanfaatkan gagasan golongan fungsional yang telah diimplementasikan sejak era Sukarno. Hal yang paling penting adalah Soeharto benar-benar menggunakan pasal-pasal dalam UUD 1945 untuk memperkuat posisi politik presiden. Semua hal ini dilakukan karena Jenderal Soeharto sadar bahwa tidak selamanya kekuasaan dapat bersandar pada paksaan senjata. Jika hirarki politik dapat ia bangun melalui reproduksi kekuasaan secara organisasional dan aturan berlegitimasi, maka keandalannya akan lebih terjamin. Asumsi semacam ini terungkap dalam analisis atas tingkah laku politik Jenderal Soeharto yang dijelaskan sebagai berikut:

> "… pemantapan kekuasaan Soeharto pun dilakukan secara bertahap dengan halus serta sedapat mungkin memiliki dasar konstitusional dan yuridis. Kehati-hatian dan kewaspadaannya ini yang diduga berpengaruh besar pada kemampuannya menyusun strategi yang komprehensif, detil dan kompleks … Ia mengedepankan norma-norma, pandangan hidup, standar baik dan buruk, benar dan salah, indah dan tidak indah, sampai tata cara birokrasi dan pola tingkah laku … ini dilakukan *di luar cara kekerasan*."[16]

Deskripsi mengenai Soeharto di atas untuk satu sisi menjelaskan perilaku yang didorong oleh faktor lingkungan (*nurture*) atas kekuasaan Soeharto. Namun, terdapat aspek "kekerasan" yang sifatnya alamiah (*nature*) dalam kekuasaan manusia umumnya, dan Soeharto khususnya, yang perlu dijelaskan secara khusus.

www.setabasri.org

---

[15] David Reeve, *Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika*. Penerjemah: Gatot Triwira. Depok: Komunitas Bambu, 2013.

[16] Bagus Takwin, Niniek L. Karim, dan Hamdi Muluk, *Soeharto Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liat: Sebuah Kajian terhadap Hubungan antara Faktor-faktor Kepribadian dan Tingkah Laku Politik Soeharto.* Jakarta: Komunitas Bambu, 2001. h. 27-8. Cetak miring oleh penulis disertasi.

Oleh karena itu merupakan hal yang menarik guna membahas kekuasaan yang berkaitan dengan perpaduan unsur *nature* dan *nurture* dalam perilaku politik Soeharto dalam menguasai politik Indonesia.

B. Masalah Penelitian dan Kerangka Analisis

1. Masalah Penelitian

Sejumlah teori sebenarnya dapat menganalisis kekuasaan Soeharto, misalnya kekuasaan dalam budaya Jawa yang diajukan Benedict Anderson.[17] Penggunaan perspektif ini menarik, tetapi kurang merespons unsur insting manusia. Jika kekuasaan Soeharto hanya dipandang dari perspektif budaya saja, maka tentu akan mendorong dominannya unsur di luar diri manusia (*nurture*) dalam menganalisis perilaku politik individu. Sementara sama seperti lumrahnya kekuasaan, praktik kekuasaan Soeharto sulit untuk menghindari penggunaan kekerasan dan manipulasi dengan mana hal tersebut sifatnya alamiah (*nature*) dalam kekuasaan di dalam kelompok manusia.

Perspektif lain adalah pandangan Samuel P. Huntington perihal *political order*.[18] Dalam perspektif ini Soeharto dipandang tengah melakukan tiga hal yaitu menekan partisipasi politik, memperkuat pelembagaan politik, dan melakukan pembangunan ekonomi untuk menciptakan stabilitas politik sehingga modernisasi bangsa bisa dilakukan. Kekuasaan politik militer (*praetorian polities*)

www.setabasri.org

[17] Benedict R. O'G. Anderson, "*The Idea of Power in Javanese Culture*" dalam *Culture and Politics in Indonesia,* Claire Holt, ed., Singapore: Equinox Publishing, 2007. pp. 1-69., p. 7-8. Bagi Anderson, kekuasaan dalam budaya Jawa berbeda dengan Barat. Artikel Anderson dapat menjelaskan bagaimana Soeharto memandang kekuasaan, kendati dorongan yang sifatnya biologis tentu di luar konsepsi Anderson untuk menjelaskan.

[18] Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies.* Yale: Yale University Press, 2006. Publikasi pertama karya ini tahun 1968 oleh Yale University. Konsep-konsep yang ditawarkan Huntington dalam karya ini cukup berpengaruh dalam menganalisis perpolitikan Orde Baru di bawah Suharto.

dipergunakan sebagai pengendali politik negara. Dengan demikian tidak terlalu keliru menganalisis kekuasaan Soeharto pada kurun 1965 hingga 1971 melalui perspektif ini. Namun, analisis Huntington lebih fokus pada entitas kelembagaan, juga pola partisipasi politik aneka komunitas. Pada lain pihak tujuan disertasi ini lebih menekankan pada dimensi personal, yaitu bahwa Soeharto berkuasa tidak semata melalui jalur kelembagaan, melainkan juga terselubung melalui ikatan personal dan kecenderungan sikap individual.

Perspektif lain adalah oligarki dan variannya.[19] Dalam analisis ini Indonesia diasumsikan tengah dikuasai oleh oligarki militer, dan Soeharto berposisi sebagai sumber kekuasaan dari oligarki yang terbangun, melalui persekutuan bisnis antara unsur sipil dan militer di sekelilingnya. Oligarki ditandai pula oleh munculnya para kroni yang punya kedekatan hubungan dengan Soeharto.[20] Instrumen mereka dalam memperkaya diri secara ekonomi adalah izin Soeharto guna menambah kemakmuran, melalui intimidasi, demi mengakses sumber daya ekonomi. Kekuasaan kemudian direproduksi menjadi instrumen akumulasi kekayaan material. Perspektif oligarki cukup menarik, tetapi dikhawatirkan mendorong analisis lebih tertuju pada pola-pola hubungan *dyadic* Soeharto dengan masing-masing kroni serta keuntungan ekonomi bagi pengikutnya. Berbeda dengan fokus

www.setabasri.org

[19] Jeffrey A. Winters. *Oligarki*. Penerjemah: Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. Dalam analisis perilaku kekuasaan Soeharto pasca transisi politik 1998, konsepsi Oligarki banyak digunakan dalam studi tidak hanya Soeharto tetapi meluas pada dinasti-dinasti politik level pusat maupun politik lokal.

[20] Studi para jenderal dalam orbit Soeharto secara lengkap dapat dilihat dalam David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983.* Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesian Project, 1984. Mengenai oligarki bisnis Soeharto telah dikupas dalam Richard Robison, *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerjemah Harsutejo. Depok: Komunitas Bambu, 2012. Edisi awal bahasa Inggris terbit tahun 1986 oleh Allen & Unwin.

teori oligarki, penelitian ini bukan hendak menganalisis oligarki Soeharto dan kroninya, melainkan mengaitkan kekuasaan Soeharto dan dampaknya bagi sistem politik Indonesia. Hubungan-hubungan *dyadic* antara Soeharto dan oligarki yang terbentuk hanya dijadikan sebagai pelengkap, bukan sebagai tujuan utama penelitian.

Perspektif lain adalah patron-klien seperti dijelaskan James C. Scott.[21] Jika perspektif ini digunakan maka Soeharto diposisikan sebagai patron sementara perwira militer lingkarannya adalah klien yang berharap imbalan. Dalam hubungan patron-klien ini Soeharto berposisi sebagai patron, sementara Ali Moertopo, Yoga Sugama, Soedjono Hoemardhani, dan perwira lainnya berposisi sebagai klien. Para klien menawarkan "layanan pribadi" berupa pelaksanaan tugas-tugas "khusus" di bidang ekonomi dan politik. Posisi klien sepenuhnya bergantung pada sejauh mana mereka bisa memuaskan patron sehingga imbalan yang diharapkan dapat diterima oleh mereka. Teori patron-klien ini menarik karena kekuasaan Soeharto sebagian besar bergantung kepada para klien ini.

Namun, Soeharto tidak hanya menjalin hubungan dengan para klien, tetapi juga aneka kelompok militer dan sipil di luar klik "Diponegoro" atau "Kostrad" yang Soeharto tidak terlampau dekat dengan mereka, sehingga konsep patron-klien dikhawatirkan kurang mampu secara komprehensif menjelaskan pola

www.setabasri.org

[21] Penjelasan Scott mengenai patron-klien adalah: "*The patron-client relationship-an exchange relationship between roles-may be defined as a special case of dyadic (two-person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron*." Lihat James C. Scott, "Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972) pp. 91-113, p. 1.

kekuasaan Soeharto. Analisa patron-klien juga dikhawatirkan sulit menganalisis dorongan instingtif Soeharto dalam bertahan hidup (mempertahankan kekuasaan), pertama dalam hubungan dominasi-submisi, dan kedua dalam penciptaan hirarki dominan dalam hirarki kompleks yang masing-masing kemungkinan besar memiliki relasi "patron-kliennya" masing-masing.

Dengan demikian, perlu dicari perspektif yang dapat menjelaskan persoalan dominasi, penciptaan hirarki dominan Suharto, yang berkaitan dengan terpeliharanya sistem politik Indonesia. Perspektif tersebut juga harus mampu menjelaskan tingkah laku politik Soeharto secara rinci, dengan memadukan aneka unsur instingtif (*nature*) dan budaya (*nurture*) dalam bertahan hidup. Sebab itu, disertasi ini memilih untuk mempergunakan perspektif Biopolitik.[22]

Kunci dalam memahami Biopolitik adalah konsep kelangsungan hidup pihak yang paling mampu menyesuaikan diri (*survival of the fittest*) dari Charles Darwin yang dimodifikasi oleh para ilmuwan Biologi yang dikenal sebagai Neo-Darwinis.[23] Konsep-konsep para biolog Neo-Darwinis ini kemudian digunakan para ilmuwan politik sebagai alat analisis perilaku politik. Lokus studi terletak pada perilaku politik pada tingkatan yang kecil (*level mikro*), tetapi memberi

www.setabasri.org

[22] Istilah Biopolitik pertama kali digunakan tahun 1938 oleh Morley Roberts. Ilmuwan politik pertama yang menggunakan adalah Lynton Caldwell tahun 1964. Atas sponsor IPSA tahun 1975 sekelompok ilmuwan pimpinan Albert Somit mempresentasikan *paper* bertajuk *Biology and Politics.* Secara organisasi, pusat studi Biopolitik didirikan Thomas Wiegele tahun 1980 di *Northern Illinois University* bernama *Center for Biopolitics* lewat pendanaan *Scaife Foundation*. Pusat studi ini menyelenggarakan program magister dan doktoral Biopolitik. Lihat Robert H. Blank and Samuel M. Hines Jr., *Biology and Political Science.* London: Routledge, 2001. p. 6-8.

[23] Konsep *survival of the fittest* memang dipopulerkan oleh Charles Darwin. Namun, orang yang pertama kali membahas konsep tersebut adalah Herbert Spencer dalam karyanya *The Synthetic Philosophy* (1886). Lihat Farizqa Ayuluqyana Putri, "Apa Itu Survival of the Fittest dan Maksudnya di Teori Evolusi" 21 Desember 2020. Diakses dari < https://tirto.id/apa-itu-survival-of-the-fittest-dan-maksudnya-di-teori-evolusi-f8oZ> tanggal 27 Juni 2021 pukul 14:02.

dampak pada efek makronya yaitu kelompok manusia dalam sistem politik. Dalam khazanah ilmu politik, Biopolitik kini terbagi ke dalam dua arus besar seperti dideskripsikan dalam **Gambar 1** *Dua Kelompok Biopolitik*.

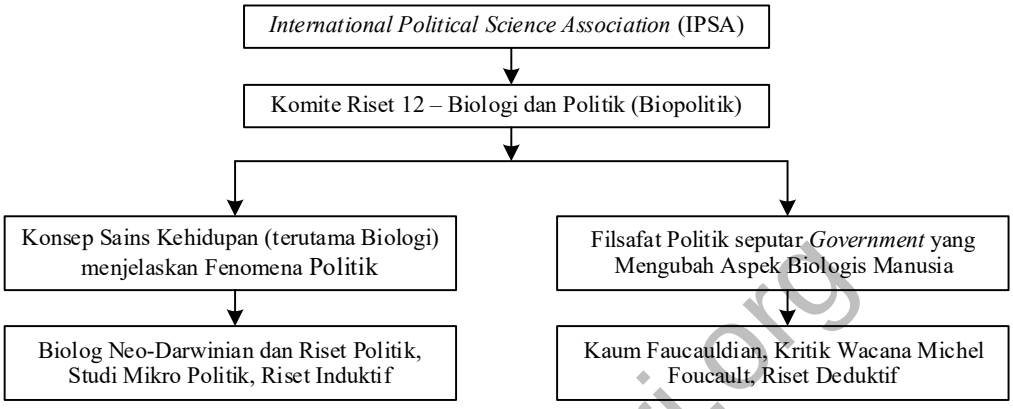
International Political Science Association (IPSA)
Komite Riset 12 – Biologi dan Politik (Biopolitik)
Konsep Sains Kehidupan (terutama Biologi) menjelaskan Fenomena Politik
Filsafat Politik seputar *Government* yang Mengubah Aspek Biologis Manusia
Biolog Neo-Darwinian dan Riset Politik, Studi Mikro Politik, Riset Induktif
Kaum Faucauldian, Kritik Wacana Michel Foucault, Riset Deduktif

Gambar 1 Dua Kelompok Biopolitik

Terdapat dua kelompok Biopolitik, dengan mana satu kelompok memanfaatkan temuan dan teknik riset para biolog Neo-Darwinis untuk menganalisis gejala politik, sementara kelompok lainnya memanfaatkan filsafat Michel Foucault untuk mendeduksi pengaruh pemerintah, baik regulasi maupun tindakan mereka, atas kondisi biologis warganegara.[24] Biopolitik dalam disertasi ini termasuk ke dalam kategori pertama, yaitu menggunakan aneka hasil riset biolog Neo-Darwinis dalam menganalisis perilaku politik.

Dalam Biopolitik Neo-Darwinis (selanjutnya disebut Biopolitik saja), interaksi antara konsep Biologi dan Politik paling umum dijelaskan melalui konsep neurobiologi yaitu *Interactive Brain Model of Behaviour*, yang diajukan oleh Robert H. Blank dan Samuel J. Hines seperti tersaji dalam **Gambar 2**.[25]

www.setaba-ri.org

[24] **Gambar 1** dibuat untuk memberi gambaran umum kedua dua kelompok Biopolitik.
[25] Robert H. Blank and Samuel M. Hines, Jr., *Biology and Political Science.* London: Routledge, 2001. pp. 83-5.

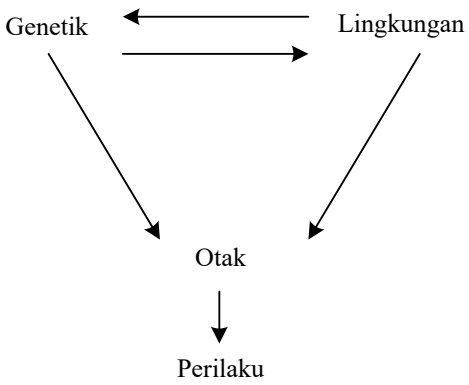

Gambar 2 ***Interactive Brain Model of Behaviour***
Sumber Gambar: Robert H. Blank and Samuel M. Hines, Jr., *Biology and Political Science.* London: Routledge, 2001. p. 85.

www.setabasri.org

Di dalam skema dalam konteks neurobiologi tersebut, maka disebutkan bahwa pusat kendali dari perilaku makhluk hidup adalah otak. Agar otak dapat terus berkembang maka ia selalu memerlukan rangsangan yang bersifat konstan dari lingkungan. Tanpa input sensoris dan tantangan intelektual dari lingkungan, maka potensi alamiah (*nature*) otak tidak akan berkembang secara maksimal. Selain memerlukan rangsangan lingkungan, perkembangan otak juga dikendalikan oleh faktor alamiah (*nature*) yang bersifat genetik.

Faktor genetik yang berkaitan dengan unsur bawaan (*innate*) cetak birunya terdapat dalam *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) spesies. Para biolog Neo-Darwinis berbeda pendapat dengan Charles Darwin karena mereka berasumsi bahwa ciri fisik dan sifat gen akan berubah manakala terjadi interaksi dengan lingkungan.[26] Hasil interaksi gen dengan lingkungan akan memunculkan unsur baru yang

[26] Ini adalah perbedaan antara Charles Darwin dengan Biolog Neo Darwinis. Darwin pada masanya belum menganalisis masalah genetika, sementara Biolog Neo Darwinis telah menggunakan genetika populasi guna memperkuat teori evolusi dari Darwin.

disebut fenotipe, yaitu adaptasi gen atas lingkungan. Pada lain pihak, gen yang sudah berinteraksi dengan lingkungan (genotipe) akan tetap terekam di dalam DNA untuk kemudian diturunkan dari generasi ke generasi secara evolutif.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa unsur gen yang berubah inilah yang memberi pengaruh kepada otak saat mengatur tindakan. Pada lain pihak, pengaruh lingkungan juga tersimpan dalam salah satu unsur gen yang disebut fenotipe seperti telah dijelaskan sebelumnya. Unsur fenotipe juga turut memberi pengaruh tertentu terhadap kinerja otak, tetapi tidak sekuat genotipe yang sifatnya lebih tahan lama. Hasil interaksi antara faktor genetik (genotipe, yang mempertahankan *nature*, sifatnya tertutup tetapi tidak steril pengaruh lingkungan) dan lingkungan (fenotipe, yang bersifat terbuka terhadap lingkungan tetapi tidak bisa lepas dari faktor genetik) berlaku sebagai pemicu alamiah tindakan makhluk hidup, khususnya primata besar baik Homo Sapiens maupun non Homo Sapiens.[27] Studi Blank dan Hines inilah yang kemudian dijadikan dasar analisis Biopolitik seputar pemicu awal perilaku politik manusia.[28]

Masih dalam alur penjelasan dalam hal gagasan bahwa otak merupakan pusat pengatur perilaku tindakan, Arnold M. Ludwig juga menjelaskan bahwa aliran proses informasi politik di dalam otak, secara spesifik terjadi di dalam

www.setabasri.org

[27] Akibat pengaruh kedua aspek ini membuat makhluk hidup menunjukkan perilaku campuran antara aspek *nature* sekaligus *nurture*. Sebab itu, simpul Blank dan Hines, otak adalah mediator utama yang fungsinya bergantung pada aspek genotipe dan fenotipe.

[28] Studi motivasi *innate* dan aspek *nature* perilaku manusia dirujuk dari Irenaus Eibl-Eibesfeldt. Lihat Irenaus Eibl-Eibesfeldt, *Human Ethology.* London and New York: Routledge, 2017. Studi ini pertama kali diterbitkan Transaction Publishers tahun 1989.

sistem limbik dan hipotalamus.[29] Berbeda dengan struktur neokorteks,[30] sistem limbik merupakan bagian paling purba dari struktur otak manusia dan sama-sama dimiliki oleh seluruh mamalia.

Mengenai keterkaitan antara sistem limbik dan hipotalamus dengan perilaku politik manusia, Ludwig menjelaskannya sebagai berikut:

> "… *politics seems to be the one most rooted in primitive primate behavior … the striving for political power seems fueled more by secretions from man's nether parts – his gonads and adrenal glands – as well as activity from within the limbic system and hypothalamus, the most ancient parts of the brain, all of which deal with such instinctive responses as fight-or-flight, territoriality, aggression, sex, and survival … many would-be rulers seem to rely more on cunning, courage, physical prowess, deception, and power tactics to ascend the social hierarchy and gain ultimate power … becoming a ruler requires no special academic training … or superior intellect … that is why charisma, oratory, manipulation, and intimidation are often more important than wisdom, special expertise, and administrative experience.*"[31]

> "… Politik tampak sebagai perilaku primitif primata yang berakar dalam … perjuangan mencapai kekuasaan politik tampak lebih didorong sekresi bagian bawah [otak] manusia – kelenjar *gonad* dan *adrenal* – serta aktivitas dalam sistem limbik dan hipotalamus, bagian paling primitif otak, seluruhnya berkenaan dengan respons naluriah seperti bertarung-atau-lari, teritorial, agresi, seks, dan bertahan hidup ... banyak calon penguasa terlihat lebih mengandalkan kelicikan, keberanian, kecakapan fisik, penipuan, dan kekuatan taktik untuk menaiki hirarki sosial dan memperoleh kekuasaan tertinggi… untuk menjadi penguasa tidak perlu menempuh pelatihan akademis khusus… atau kecerdasan superior… itu pula sebabnya mengapa karisma, orasi, manipulasi, dan intimidasi sering kali lebih penting daripada kebijaksanaan, kepakaran khusus, dan pengalaman administratif."

www.setaraasri.org

[29] Arnold M. Ludwig, *Kings of the Mountain: The Nature of Political Leadership*. Lexington: The University Press of Kentucky, 2002, p. 4-5. Khususnya kelenjar gonad dan adrenal.
[30] Neokorteks adalah hasil lebih maju evolusi otak manusia, primata besar lain tidak semaju itu. Neokorteks berkenaan dengan ilmu pengetahuan (pengumpulan informasi, penyelesaian masalah, dan penalaran) atau seni (ekpresi kreatif, intuisi, dan aneka keahlian khusus), termasuk budaya. Studi yang menggambarkan superioritas Homo Sapiens akibat perpaduan *nature* dan *nurture* dapat dilihat dalam Yuval Noah Harari, *Sapiens*. Penerjemah: Yanto Mustopha. Cetakan 1. Tangerang Selatan: Alvabet, 2017.
[31] Arnold M. Ludwig, Kings …, *op. cit.,* p. 4-5.

Politik sebagai tindakan termasuk perilaku tertua yang digerakkan oleh struktur otak yang juga tertua. Politik berkenaan dengan aneka respons naluriah individu dalam rangka mempertahankan hidupnya di dalam suatu kelompok. Banyak penguasa mencapai kekuasaan melalui insting bertindak berupa keberanian, kelicikan, penipuan, dan kekuatan taktik, sehingga mampu merebut kekuasaan.[32]

Dalam konteks perilaku kekuasaan Soeharto, maka dari sudut pandang Biopolitik, Jenderal Soeharto pasca G30S/PKI dapat diasumsikan lebih berani dan manipulatif dalam bertindak ketimbang para perwira tinggi lain yang berpengaruh pada masa itu, termasuk Nasution. Kendati Nasution dapat saja secara individual lebih cerdas, konseptual, dan lebih intelektual, tetapi ia tidak banyak bertindak di saat-saat kritis pasca 1 Oktober 1965. Proses pengelolaan informasi di dalam sistem limbik Jenderal Soeharto tampak bekerja lebih dominan, sehingga ia berani menghadapi individu politik paling dominan (*alpha male*) saat itu yaitu Sukarno, juga PKI, partai yang dilindunginya. Saat menghadapi Sukarno maupun PKI, pilihan Jenderal Soeharto hanya dua yaitu bertarung atau lari (*fight or flight*) dan ia memilih yang pertama.

Selain menggunakan studi neurobiologi, di dalam Biopolitik maka penjelasan mengenai kekuasaan Soeharto dapat dilengkapi melalui studi etologi seperti diungkapkan oleh Blank *and* Hines sebagai berikut:

www.setabasri.org

[32] Dalam studi, Ludwig dalam buku yang telah disebutkan, menganalisis perilaku politik dari 1941 orang penguasa sebelum sampai pada kesimpulan ini. Hal yang hendak ditekankan Ludwig adalah, bahwa dalam kenyataan, politik selalu berkenaan dengan kondisi-kondisi kritis, mereka yang memiliki kecenderungan naluriah besar umumnya dapat lebih sukses ketimbang yang banyak melakukan pertimbangan.

> "*... the most important theoretical source for this paradigm is contemporary neo-Darwinian evolutionary theory ... ethology and the newly emergent disciplines of behavioural ethology and neurobiology have much to contribute to a fully developed naturalism in political science. This paradigm stresses the powerful connection between biology, and the life sciences more generally, and politics. To understand politics, it is necessary that we apply the knowledge generated through the study of the natural world. It is also essential that we recognise that man is a part of – not apart from – that natural world. The study of politics thus encompasses the full range of political behaviour among those species that are capable of exhibiting such behaviour.*" [33]

> " … sumber teoretis terpenting paradigma ini adalah teori evolusi Neo-Darwinis kontemporer … etologi dan sejumlah disiplin yang baru-baru saja muncul yaitu etologi perilaku dan neurobiologi yang banyak berkontribusi atas kemajuan naturalisme dalam ilmu politik. Paradigma ini menekankan kuatnya hubungan antara biologi …. dan politik. Untuk memahami politik, perlu diterapkan pengetahuan turunan dari studi atas dunia alamiah … juga penting kita mengakui bahwa manusia adalah bagian dari – tidak terpisah atas – dunia alamiah. Oleh karena itu studi politik melintasi aneka perilaku setiap spesies yang sama-sama menunjukkan perilaku tersebut."

Bagi Blank *and* Hines, Biopolitik mengasumsikan manusia sebagai makhluk alamiah yang memiliki kecenderungan serupa dengan anggota ordo primata lain, terutama primata besar berkelompok seperti gorila, bonobo, dan simpanse. Biopolitik juga mengakui terdapatnya unsur *nurture* di samping unsur *nature* sehingga tentu saja, selain persamaan, juga terdapat perbedaan perilaku manusia dengan anggota ordo primata lain.

Pengaruh konsep-konsep Biologi terhadap ilmu politik ini juga di antaranya dijelaskan melalui pendapat Roger D. Masters, yang mendefinisikan politik sebagai:

> "*…behavior that simultaneously partakes of the attributes of bonding, dominance, and submission* (*which the human primate shares with many*

[33] Robert H. Blank and Samuel M. Hines, Jnr. *Biology and Political Science.* London and New York: Routledge, 2001. p. 2.

www.setabasri.org

> *other mammals*) *and those of legal or customary regulation of social life* (*characteristic of human groups endowed with language*) *.... Political behavior ... comprises actions in which the rivalry for perpetuation of social dominance and loyalty impinges on the legal or customary rules governing a group .... political science has a peculiar status; for it lies at the intersection of ethology and anthropology ...*" [34]
>
> " … perilaku yang secara simultan mengambil bagian atas aneka atribut seperti ikatan dalam kelompok (*bonding*), dominasi, dan submisi (dengan mana primata manusia saling berbagi dengan banyak mamalia lain) dan aneka peraturan hukum ataupun adat kehidupan sosial (merupakan karakteristik aneka kelompok manusia yang diberkahi kemampuan bahasa) … Perilaku politik … terdiri atas aneka tindakan di mana persaingan untuk melanggengkan dominasi dan loyalitas sosial berbenturan dengan aturan hukum atau adat yang mengatur suatu kelompok … ilmu politik memiliki status yang khas; karena ia terletak di persimpangan antara etologi dan antropologi …"

Secara khusus, studi etologi berupaya menjawab pertanyaan apa saja aspek alamiah (*nature*) yang mendorong perilaku manusia.[35] Bagi Masters aspek alamiah (*nature*) dari perilaku politik adalah keterlibatan terus-menerus spesies dalam membentuk ikatan (*bonding*), dominasi, dan submisi manusia di dalam kelompok. Masters juga menjelaskan bahwa perilaku politik manusia selalu bersifat bawaan (*innate*) evolusi dan termanifestasi, baik ke dalam tindakan individual maupun kelompok. Biopolitik juga menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku yang bersifat *innate* tersebut akan selalu mendorong terjadinya

www.setabasri.org

[34] Roger D. Masters, *The Nature of Politics.* New Haven and London: Yale University Press, 1989. p. 140

[35] Albert Somit, "Introduction" dalam *Biology and Politics: Recent Explorations,* International Social Science Council. Mouton-The Hague-Paris: International Social Science Council, No. 19, 1976. p. 6. Secara khusus, studi etologi dan politik berupaya menjawab pertanyaan apa saja aspek *nature* manusia yang mendorong perilaku mereka. Etologi dan politik mencari jawaban atas lewat serangkaian pengamatan atas perilaku sejumlah hewan berkelompok yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Transmisi antar generasi juga terjadi pada manusia. Selain masalah genetis, studi etologi juga mengidentifikasi sejumlah perilaku manusia yang terbentuk baik lewat proses belajar maupun lingkungan.

perbenturan antara tindakan aktual manusia dengan aneka aturan sosial, baik tertulis maupun konvensi, melalui kecenderungan *trade-off*.[36]

Dengan demikian maka dari sudut pandang etologi, aspek budaya (*nurture*) seperti aturan perundangan hanya bersifat sementara (temporer) di dalam mengekang naluri alamiah manusia. Sebab itulah maka aneka peraturan dan etika perilaku politik – yang bersifat *nurture* – harus terus diciptakan juga dimodifikasi guna mengekang kecenderungan perilaku manusia yang menampakan bias sifat-sifat *nature* hasil bawaan proses evolusi.

Eksponen Biopolitik lain dalam studi etologi adalah Johan M.G. van der Dennen yang cukup banyak mengobservasi perilaku kelompok primata besar langsung di dalam habitat asli mereka. Dennen berkesimpulan bahwa pola kehidupan kelompok kera besar mirip dengan perilaku politik nyata yang diindikasikan adanya pola stratifikasi sosial, mekanisme dominasi-submisi, perjuangan lestari merebut kekuasaan, upaya memelihara *status-quo*, upaya menghancurkan *status-quo*, juga inherennya konflik kepentingan antar individu di

www.setabasri.org

[36] Karena kecenderungan alamiah dalam proses evolusi, manusia lebih menyukai mekanisme *trade-off* ketimbang pencarian solusi saat menghadapi masalah. Secara genetis manusia mencari "*apa penyelesaian termudah*" bukan "*bagaimana seharusnya diselesaikan.*" Proses evolusi mendorong pembesaran ukuran otak yang berakibat manusia terbebani masalah lebih kompleks. Akibatnya, saat menghadapi masalah mereka lebih mencari penyelesaian yang bersifat cepat dan tidak menyakitkan, dan berpikir keras itu cenderung menyakitkan. Penyelesaian masalah yang bersifat cepat dan mudah diperoleh dari rekaman memori genetik hasil evolusi dan terdapat dalam sistem limbik otak. Korupsi adalah manifestasi *trade-off* yang sejalan dengan dorongan alamiah untuk memperoleh *resources* besar dengan cara mudah dalam penyelesaian masalah rumit (mendanai Pemilu) dan ini warisan genetis manusia. Albert Somit and Steven A. Peterson menulis " *… those who share an evolutionary perspective are more likely to be wary of ready "solutions" and to seek, instead, a course that seems to offer, on balance, the greatest promise of a positive pay-off.*" Lihat Albert Somit and Steven A. Peterson, "From Human Nature to Public Policy: Evolutionary Theory Challenges the "Standard Model" dalam *Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach*, Albert Somit and Steven A. Peterson. New York: Palgrave Macmillan, 2003. pp. 10-1. Analisis ini juga digunakan dalam gagalnya larangan alkohol, penyelundupan obat bius, *human trafficking* dan larangan tembakau di Amerika Serikat, termasuk pula studi mengapa praktik prostitusi sulit dihilangkan.

dalam unit-unit organis yang sepatutnya bekerja sama.[37] Setelah mengamati hubungan intra dan antar kelompok primata besar yang bersifat kompetitif, Dennen juga menarik kesimpulan lain yaitu terdapatnya mekanisme pewarisan genetik.[38] Ia juga menyatakan bahwa pewarisan genetik dari tingkah laku yang ia temukan sebagai semacam "beban tak terlepaskan" selama proses evolusi manusia.[39]

Roger D. Masters mengidentifikasi tujuh perilaku politik manusia yang sebagian di antaranya merupakan perpaduan antara aspek *nature* dan *nurture* yang terindikasi baik pada kalangan primata besar non manusia (gorila, bonobo, ataupun simpanse) maupun manusia. Temuan Masters – juga pandangan ahli Biopolitik lain – seputar perilaku politik primata ini menarik untuk merumuskan masalah penelitian di dalam disertasi ini, yang di dalam penjelasannya, akan dikaitkan dengan perilaku Soeharto saat berkuasa.

Perilaku pertama adalah *bonding* atau ikatan sosial yaitu kecenderungan manusia untuk membentuk ikatan dengan anggota lain yang dianggap dekat di dalam suatu kelompok.[40] Dalam sudut pandang evolusi, manusia adalah serupa dengan kera-kera besar lainnya yang punya kecenderungan bekerja sama. Satu kera dominan di dalam suatu kelompok tidak bertindak secara individualistik

www.setabasri.org

---

[37] Johan M.G. van der Dennen, "The Biopolitics of the Primates" dalam *Biology and Politics: The Cutting Edge,* Steven A. Peterson and Albert Somit, eds. Bingley: Emerald Group Publishing, 2011. pp. 53-96.
[38] Johan M.G. van der Dennen, "The Biopolitics …, *op.cit.*
[39] *ibid.*
[40] Perilaku ini mendorong individu lebih mengidentifikasi diri mereka hanya dengan individu lain yang dianggap dekat saja untuk kemudian menunjukkan sikap curiga terhadap para individu yang dianggap sebagai "orang luar." Lihat Roger D. Masters, "*Conclusion*" dalam *Primate Politics,* Glendon Schubert and Roger D. Masters, eds. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois *University Press*, 1991. p. 234.

melainkan selalu dikelilingi oleh sejumlah kera lain yang tunduk pada dominasinya dan menuruti kehendaknya. Jika dipelajari perilaku Soeharto sejak masa Revolusi Fisik hingga mulai berkuasa di Indonesia, ia selalu berupaya untuk membentuk "klik kecil" perwira loyalis yang lebih minor darinya dan hal ini disandarkan pada naluri *bonding* ini.[41] Sebagai individu dominan dalam kelompok Soeharto melihat bahwa kelompok lain di luar dirinya memiliki individu dominan pula lengkap dengan pengikutnya. Oleh sebab itu Soeharto perlu pula mengelili dirinya dengan sejumlah pengikut yang tidak lebih dominan dari dirinya, tetapi dianggap mampu "membentengi" dirinya agar dapat selalu dalam posisi kuat tatkala menghadapi aneka individu dominan dari kelompok lain.

Perilaku kedua adalah persaingan (*competition*) dan agresi (*aggression*).[42] Persaingan adalah fenomena manakala terdapat individu baru yang berupaya untuk merebut dominasi dari individu dominan. Secara Biopolitik, persaingan ini bersifat lestari karena tentunya satu individu dominan pada suatu ketika dominasinya akan melemah akibat usia, cacat fisik, atau ditinggalkan oleh aliansi. Dalam persaingan merebut dominasi, sikap agresi lebih nyata ditunjukkan oleh individu yang hendak merebut dominasi. Individu penantang ini selalu menunjukkan sikap lebih agresif ketimbang individu dominan yang ia hendak rebut dominasinya. Persaingan dan agresi, menurut pendapat Masters, justru akan memperkuat ikatan dalam kelompok manusia (*bonding*) sebab persaingan dan agresi seluruh primata besar (termasuk manusia) selalu melibatkan pengikut.

www.setabasri.org

---

[41] *Bonding* ini secara formal dikenal sebagai Staf Pribadi (Spri). Lihat Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 307. Sebelumnya, ia membentuk klik saat memimpin divisi Diponegoro. Juga saat memimpin Operasi Mandala ia membentuk klik Kostrad.

[42] Lihat Roger D. Masters, "Conclusion" … *loc.cit.*

Dalam memulai kekuasaannya, Soeharto lebih banyak melakukan tindakan-tindakah aktif. Bersama *bonding* dan aliansi pendukungnya ia segera menghabisi kekuatan bersenjata Gerakan 30 September. Setelah itu ia, melalui pada pendukung tindakannya, melakukan kampanye nasional pembubaran PKI kendati hal tersebut bertentangan dengan kepentingan politik Sukarno. Terlebih setelah Surat Perintah 11 Maret 1966 diserahkan Sukarno kepadanya, tindakan-tindakan Soeharto tampak lebih agresif lagi yang diantara resmi membubarkan PKI, menangkapi para pendukung Sukarno yang dianggap pro kepada G30S, serta mengambil aneka keputusan politik yang bertolak belakang dengan kehendak Sukarno misalnya menghentikan Konfrontasi Malaysia.

Perilaku ketiga adalah penyelesaian perselisihan (*dispute settlement*), pemberian jaminan (*reassurance*), dan saling berbagi (*sharing*).[43] Penyelesaian perselisihan menjadi unsur naluriah individu karena adanya kecenderungan perilaku menderita (agonistik) spesies di dalam populasi. Perilaku menderita ini selalu muncul sebagai dampak persaingan yang selalu berlangsung di dalam kelompok. Tidak ada satupun individu di dalam populasi yang mampu terus-menerus mempertahankan perilaku agonistik dan sebab itulah maka setiap

www.setabasri.org

[43] Respons penghiburan dan kohesi sosial lebih dicirikan pengulangan (repertoar) perilaku perempuan pada manusia (atau betina pada primata besar lain). Dengan demikian ketiga perilaku cenderung bersifat feminin. Ketiga sifat muncul akibat lamanya individu berada di bawah bayang kompetisi dan upaya dominasi yang melelahkan dan menghabiskan sumber daya. Individu perempuan lebih memandang aneka proses sosial dari sudut pandang dua jenis kelamin (koeksistensi). Para etolog menyebut ketiga sifat ini bernuansa feminin karena lebih nyata ditemukan di primata betina. Namun, kendati tidak begitu meyakinkan ketiganya juga kadang ditampakkan oleh primata jantan. Lihat Roger D. Masters, "Conclusion" … *loc.cit.*

individu dalam kelompok selalu menerima mekanisme *dispute settlement*, dan ini secara alamiah muncul untuk mengakhiri masalah agonistik.[44]

Mekanisme penyelesaian perselisihan dilakukan melalui cara pemberian jaminan dan saling berbagi. Pemberian jaminan dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai, bahwa individu pemenang akan memperoleh posisi dominan, tetapi ia tetap memberikan sejumlah akses kepada individu yang kalah berupa sumber daya yang telah ditentukan batasan-batasannya. Di dalam hal pemberian jaminan ini terkandung makna saling berbagi yaitu bahwa baik pihak yang menang maupun kalah sama-sama dapat mengakses sumber daya berharga kendati akses tersebut selalu bersifat asimetris, dalam pengertian pihak yang menang akan selalu memperoleh akses lebih besar ketimbang yang kalah.

Demikian pula halnya Soeharto, bahwa di dalam melakukan dominasi, Soeharto maupun rivalnya sama-sama menunjukkan kecenderungan penyelesaian perselisihan, pemberian jaminan, dan saling berbagi kekuasaan, berupa sumber daya seperti jabatan, insentif material, atau status sosial. Misalnya, Soeharto tidak mau mempermalukan Sukarno dengan cara menyeretnya ke dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk menjelaskan keterlibatannya di dalam Gerakan 30 September. Namun, Sukarno pun harus menurut Soeharto dengan tidak lagi memprovokasi publik untuk kembali memperkuat posisi politiknya. Hasil utama dari mekanisme *dispute settlement* , *reassurance* , dan *sharing* ini

www.setabasri.org

[44] Sumber yang sangat kaya mengenai bagaimana proses-proses penghentian perselisihan di kalangan primata yang terjadi khas di antara primata dengan spesies berbeda terdapat di dalam Franz de Waal, *Peacemaking among Primates.* Cambridge and London: Harvard University Presss, 1989. Karya de Waal ini ditutup oleh sebuah bab khusus bagaimana proses penghentian pertikaian di kalangan manusia di dalam Bab Enam “Humans.” Lihat halaman 229-272.

adalah tidak pecahnya Perang Sipil terbuka antara para pendukung Soeharto melawan para pendukung Sukarno. Secara naluriah semua pihak saling memahami bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh pertikaian konstan harus segera diakhiri agar mekanisme bertahan hidup seluruh pihak dapat terjamin.

Perilaku keempat adalah dominasi (*dominance*) dan kendali sosial (*social control*).[45] Dominasi adalah kemampuan satu individu untuk menjadi penentu pemberian akses berharga di dalam suatu kelompok. Bahwa upaya perebutan akses atas sumber daya berharga adalah lestari di dalam suatu kelompok dan memicu pergolakan di dalamnya. Upaya perebutan yang memicu situasi pergolakan dalam kelompok hanya dapat terhenti (kendati sifatnya temporer) apabila muncul satu individu dominan yang kuat. Dominasi oleh satu individu dominan ini mendorong dirinya mampu menciptakan kendali sosial. Kendali sosial ini adalah suatu keadaan di mana ketertiban sosial muncul akibat setiap individu di dalam kelompok memahami posisi dirinya di dalam kelompok itu di bawah kepemimpinan satu individu dominan.

Berdasarkan konsep dominasi ini, maka upaya Soeharto mendominasi baik Sukarno maupun aneka hirarki politik yang menentang atau berpotensi menentangnya adalah memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah agar suatu kendali sosial dapat dilakukan sehingga kondisi kelompok terhindar dari situasi pergolakan. Dengan dominasi yang ia peroleh, Soeharto duduk sebagai

www.setabasri.org

[45] Keduanya muncul sebagai hasil hubungan asimetris atas akses menuju *resources* bernilai, yang dalam konteks penelitian ini adalah kekuasaan. Hubungan asimetris terjadi manakala individu dominan selalu punya kemampuan lebih besar dalam hal akses *resources* dan kesempatan reproduksi ketimbang individu non dominan. Lihat Roger D. Masters, "Conclusion" ... *op. cit..,* p. 235.

"distributor" sumber daya dan mengatur bagaimana sumber daya tersebut dapat diakses oleh para individu lain di dalam kelompok, kendati sifatnya selalu asimetris, dalam pengertian Soeharto tentu akan mendapat porsi sumber daya yang lebih besar ketimbang individu lain. Dalam cara berpikir semacam ini maka setiap individu akan mendapatkan keuntungan relatif dari kendali sosial yang diterapkan pihak dominan.

Perilaku kelima adalah subordinasi (*subordination*) dan menghindar (*flight*).[46] Dalam aneka pertikaian yang terjadi, maka individu yang kekuatannya lebih minor akan selalu berupaya menghentikan pertikaian dengan cara menerima posisinya sebagai subordinat. Proses subordinasi adalah perilaku yang berkaitan dengan mekanisme penyerahan diri atau menerima status diri satu individu sebagai minor di hadapan *alpha male*. Manifestasi lainnya adalah perilaku *flight* salah satu pihak dari medan pertikaian. Ini mungkin menjelaskan subordinasi yang ditunjukkan Sukarno dengan tidak menghadapi agresivitas Soeharto melalui pertarungan fisik. Hal serupa juga terjadi atas sejumlah individu dominan partai politik yang "menyerah" dan menerima posisi sebagai subordinat ataupun *flight* akibat ancaman dan unjuk kekuatan Jenderal Soeharto melalui aparatus Opsus-nya. Mereka yang menerima posisi sebagai subordinat kemungkinan besar masih berkesempatan untuk secara minimal berkuasa di dalam kelompok yang berada di luar wilayah kekuasaan Soeharto langsung. Bagi mereka yang melakukan *flight* harus membangun kekuasaan di dalam kelompok yang berada di luar orbit aktivitas kekuasaan Soeharto seperti ditunjukkan oleh Moh. Natsir saat ia

[46] Roger D. Masters, "Conclusion" ... *op. cit..,* p. 235.

www.setabasri.org

mendirikan dan aktif di organisasi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) di Bandung.

Perilaku keenam adalah formasi koalisi (*coalition formation*) dan perilaku strategis (*strategic behavior*).[47] Perilaku sosial primata besar, termasuk manusia, adalah kecenderungan mereka untuk membentuk formasi koalisi yang bersifat sementara, lengkap dengan adanya potensi pengkhianatan (*deception*) yang mengubah formasi tersebut. Hal ini juga termasuk perilaku strategis yang merupakan *biogrammar*[48] manusia dan primata besar lain. Karena kemampuan mereka menguasai bahasa kompleks, termasuk bahasa tulis dan penalaran melalui struktur neokorteks di dalam otak mereka, mengakibatkan *Homo Sapiens* jauh lebih intens dan sadar dalam menunjukkan kedua kecenderungan ini.[49] Perilaku strategis adalah kemampuan individu untuk menentukan apakah perilaku kekuasaannya akan dapat bertahan dalam jangka panjang ataukah tidak. Salah satu contoh dari manifestasi kedua perilaku ini adalah pembentukan formasi koalisi Soeharto 1965-1968 berbeda dengan 1968-1971, karena pengelompokan tersebut cenderung sementara akibat pengkhianatan ataupun saling berebut dominasi antar

www.setabasri.org

[47] Roger D. Masters, "Conclusion" *... op. cit..,* p. 235.
[48] Konsep *Biogrammar* pertama kali diperkenalkan Lionel Tiger dan Robin Fox. Menurut mereka *Biogrammar* adalah aturan memahami bahasa perilaku (*biogram*). Biogram adalah seperangkat pertukaran yang bisa diprediksi dan menunjukkan bagaimana spesies berinteraksi secara berurutan, bisa dimodifikasi, bagaimana kondisi penerapannya, juga bagaimana ia membantu spesies bertahan hidup. Lihat Lionel Tiger and Robin Fox, *The Imperial Animal.* London and New York: Routledge, 2017, p. 6. Contoh dari *biogrammar* adalah: (1) *Bonding;* (2) *Competition and Agression;* (3) *Dispute, settlement, reassurance, and sharing;* (4) *Dominance and Social Control;* (5) *Subordination and Flight;* (6) *Coalition and Strategic Behavior;* dan (7) *Individual 'Personalities', Social Roles, and Sex.* Lihat Roger D. Masters, "Conclusion" *... op. cit.*, p. 234-5.
[49] Dalam kurun 1965 hingga 1968 kekuasaan Soeharto mewujud lewat formasi koalisi dengan kelompok anti komunis dan yang hendak melakukan perubahan kepemimpinan nasional. Selama melakukan dan setelah sukses, Soeharto membagi-bagikan *resources* sebagai wujud "perencanaan strategis" demi mempertahankan formasi koalisi, dengan dirinya tetap di posisi dominan.

anggota koalisi. Soeharto di dalam kelompok sebagai *Homo Sapiens* tentu lebih kompleks ketimbang komunitas gorilla ataupun simpanse. Dalam perilaku strategis, Soeharto mampu menggunakan aneka konsep yang tidak ia buat sendiri seperti *blueprint* pembangunan ekonomi, peraturan konstitusional, untuk memperkuat kekuasaannya.

Perilaku ketujuh adalah "personalitas" individual (*individual 'personalities'*), peran sosial (*social roles*), dan reproduksi (*sex*).[50] Di dalam dunia alamiah, setiap spesies memiliki personalitas individual. Di kalangan primata misalnya, selain terdapat individu dominan juga terdapat individu-individu lain yang bertugas mengasuh anak, mencari sumber makanan baru, individu yang pasifis maupun agresif, ataupun mereka yang fokus pada melakukan penjagaan teritori. Karakter masing-masing individu di dunia primata tersebut kendati berasal dari satu spesies yang sama memiliki perbedaan dalam hal personalitasnya. Perbedaan personalitas ini mendorong terciptanya perbedaan dalam peran sosial mereka seperti telah disebutkan sebelumnya, termasuk dalam masalah reproduksi mereka.[51]

Personalitas Soeharto memungkinkannya untuk menghadapi Sukarno, dan belum tentu dapat dilakukan individu lain semisal Nasution, Sukendro, ataupun H.R. Dharsono. Peran sosial Soeharto selaku "orang kedua Yani" memungkinkannya memimpin TNI-AD tanpa banyak diprotes perwira senior lain.

www.setabasri.org

[50] Roger D. Masters, "Conclusion" ... *op. cit.*, p. 234-5.
[51] Ulasan lengkap mengenai kecenderungan individual dalam spesies primata dapat dilihat dalam Franz de Waal, *Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes*. Revised Edition. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1998. Khususnya di Bab Pertama "*Personalities*" dan Bab Empat "*Sexual Privileges*."

Soeharto yang cenderung dianggap perwira minor dan enggan terlibat polemik membuat dirinya sulit ditebak. Dengan personalitas individual dan peran sosialnya yang dianggap tenang, dingin, dan penuh kalkulasi ini, ternyata kemudian Soeharto mampu mereproduksi kekuasaan ke arah yang nalurinya inginkan.[52]

Berdasarkan perspektif Biopolitik yang telah dielaborasi, maka masalah kini sudah dapat dipersempit. Bahwa sebagai penantang (*contender*), Soeharto cenderung membangun ikatan kelompok (*bonding*) guna menghadapi Sukarno selaku individu paling dominan (*alpha male*) saat itu. Dalam perspektif Biopolitik hal ini perlu dilakukan mengingat Sukarno merupakan individu dominan yang tidak bisa ia hadapi seorang diri. *Bonding* yang dibangun Soeharto dilandasi atas kesamaan pandangan di antara mereka bahwa prediktabilitas spesies di dalam hirarki Sukarno, yaitu tatanan sosial yang stabil sebagai syarat spesies mampu bertahan hidup, tidak signifikan. Kehidupan politik Indonesia diwarnai pertentangan ideologi yang berimbas ke tingkat massa ditandai terjadinya aneka bentrokan antara elemen pro komunis dan anti komunis.

Pembangunan *bonding* ini juga sesuai dengan *individual personalities* yang bersifat bawaan dalam diri Soeharto, yang sejak meniti karir kemiliteran dan hingga menjadi Panglima Mandala, cenderung membangun kelompok kecil di

www.setabasri.org

[52] Di dunia alamiah, setiap individu dalam spesies memperlihatkan karakteristik berbeda dalam hal personalitas individual dan peran sosial. Misalnya, *alpha male* gorila punggung perak berbeda dengan *alpha male* bonobo dalam menarik lawan jenis, dengan kesamaan pada adanya upaya menarik calon pasangan. Bonobo jantan lebih tunduk pada kawanan betina ketimbang gorila jantan punggung perak yang maskulin. Ragam peran sosial, khususnya yang berhubungan dengan jenis kelamin dan usia, dapat diisi aneka individu dengan 'personalitas' atau gaya respons berbeda. Individu senior dalam kelompok fokus di pengasuhan individu muda sementara pejantan muda di penjagaan teritorial habitat kelompok. Banyak ragam perilaku manusia yang awalnya dianggap unik kini ternyata ditemukan di sejumlah spesies primata sehingga dinyatakan ada *biogrammar* yang dimiliki bersama.

dalam upayanya menghadapi aneka pertempuran fisik. Dengan demikian maka saat menghadapi Sukarno di dalam hirarki *dyadic* dan kompleks setelahnya, Jenderal Soeharto pun menunjukkan perilaku serupa yaitu bersandar pada kinerja para *bonding*nya serta membangun koalisi dengan para aliansi dengan kepentingan yang sejalan dengannya.

Selain dengan para *bonding*-nya, Soeharto juga membentuk formasi koalisi dengan para individu dan kelompok di luar *bonding* berdasarkan kesamaan kepentingan. Namun, jika *bonding* Soeharto relatif sama manakala ia tengah melakukan persaingan dalam hirarki *dyadic* dan kompleks, maka formasi koalisinya cenderung berubah. Formasi koalisi saat Soeharto dalam tahap persaingan kekuasaan dalam hirarki *dyadic* (menghadapi Sukarno) adalah dengan kelompok-kelompok Islam baik yang terafiliasi dengan NU maupun Masyumi, mahasiswa, serta para perwira Angkatan Darat seperti Kemal Idris, H.R. Dharsono, maupun Sarwo Edhie Wibowo. Formasi ini berubah saat Soeharto berada dalam konteks persaingan di dalam hirarki kompleks dengan mana formasi koalisinya terbentuk antara Lingkaran Sipil-Militer Seskoad, Lingakaran Soeharto Sentris, dan Lingkaran Pater Beek.

Dalam tahap persaingan di dalam hirarki kompleks, Soeharto berupaya mereproduksi kekuasaannya agar semakin membesar. Reproduksi paling penting dilakukan di dalam basis inti kekuatannya sendiri yaitu TNI-AD. Reproduksi lainnya secara lebih luas berlangsung di tubuh angkatan bersenjata agar dirinya dapat berada di puncak hirarki kemiliteran Indonesia. Selain itu Jenderal Soeharto perlu memastikan bahwa dua kekuatan politik sipil yang memiliki potensi besar

www.setabasri.org

untuk menantangnya yaitu kelompok Islam dan Nasionalis agar mau memberikan submisi politik kepadanya. Pada lain pihak Soeharto mereproduksi kekuasaan di tingkat sipil melalui pemberdayaan Sekber Golkar sebagai basis dukungan politik untuk kebutuhannya dalam menghadapi Pemilu.

Reproduksi kekuasaan Soeharto ke dalam aneka hirarki yang ada ditunjang pula oleh adanya mekanisme *inclusive fitness* yang merupakan dorongan naluriah manusia agar tetap dapat bertahan hidup di tengah lingkungan yang berubah. Lingkungan yang berubah tersebut adalah arus baru dalam politik nasional. Jika di era Sukarno arus tersebut adalah anti Neokolonialisme dan Imperialisme, maka di era Soeharto arus tersebut tersebut adalah Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan menjadi identik dengan politik kekuasaan Soeharto karena ia memberi penekanan bahwa arus tersebut (Trilogi Pembangunan) harus juga dipahami dan didukung oleh seluruh kekuatan politik di Indonesia, yang meliputi pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi, dan stabilitas nasional. Dengan demikian maka jika setiap kekuatan politik hendak terus bertahan hidup di era kekuasaan Soeharto, maka setiap hirarki politik yang ada berikut individu dominan di dalamnya sukarela ataupun terpaksa harus menerima Trilogi Pembangunan yang ditekankan oleh Soeharto tersebut.

Akhirnya, keberhasilan Soeharto dalam mereproduksi kekuasaannya ke dalam aneka hirarki lain mampu menciptakan kepatuhan politik (*political obedience*) yang mana ditampakkan baik oleh serangkaian Undang-undang yang berkenaan dengan Pemilu, praktek-praktek kampanye Sekber Golkar yang didukung oleh Soeharto, serta hasil Pemilu 1971 yang berhasil mengkonfirmasi

www.setabasri.org

kemenangan Sekber Golkar sekaligus wujud dominasi Soeharto dalam politik nasional. *Political obedience* ini kemudian juga dimanfaatkan Soeharto untuk menjamin prediktabilitas spesies dalam kelompok (rakyat Indonesia). Untuk merangkum permasalahan di dalam disertasi ini maka dibuat sebuah kerangka analisis seperti termuat dalam **Gambar 3** *Kerangka Analisis*.

2. Kerangka Analisis

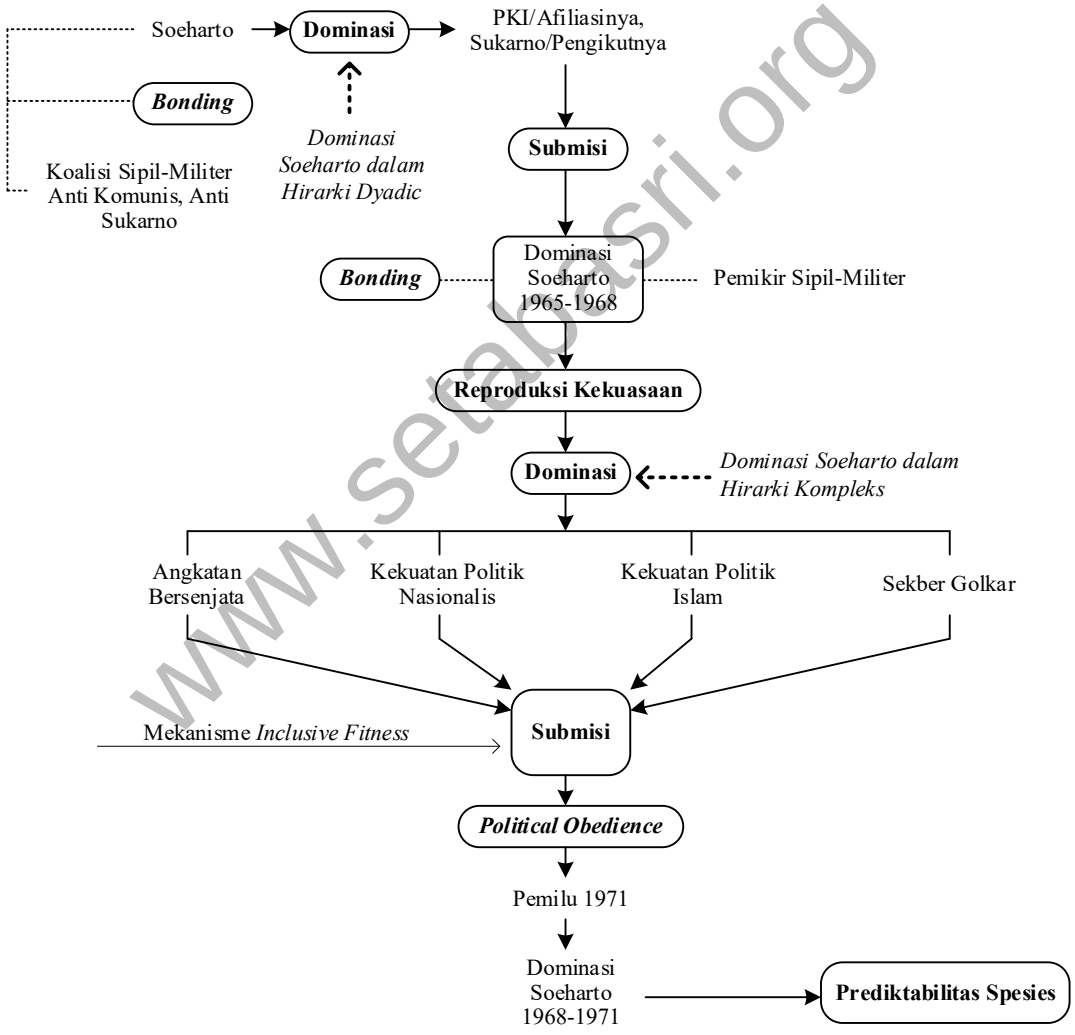

Gambar 3 Kerangka Analisis

www.setabasri.org

3. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Operasionalisasi dalam Penelitian
Bonding	*Bonding* adalah ikatan dalam kelompok yang membedakan antara "kami" dan "mereka" Soeharto. *Bonding* Soeharto yang paling jelas adalah mereka yang tergabung ke dalam Staf Pribadi (SPRI), yang setelah bubar tahun 1968 menjadi Asisten Pribadi (ASPRI).
Formasi Koalisi	Bentuk sementara kekuatan politik Soeharto yang pada kurun 1965-1968 terdiri atas kelompok anti komunis sipil seperti kelompok Islam (misalnya Nahdlatul Ulama, Masyumi, KAMI, KAPPI), kelompok Nasionalis anti Komunis, kelompok Katolik lingkaran Pater Beek, perwira radikal anti komunis dan anti Sukarno (misalnya: Sarwo Edhie Wibowo, Kemal Idris, H.R. Dharsono). Dalam periode 1968-1971 formasi koalisi Soeharto tinggal terdiri atas para perwira Soeharto sentris, lingkaran Pater Beek, dan lingkaran pemikir sipil-militer di Seskoad. (teknokrat ekonomi yang umumnya lulusan Universitas Berkeley dan perwira Seskoad seperti Suwarto).
Dominasi	Pola hubungan di antara para anggota suatu spesies, di mana individu dominan punya akses yang lebih disukai (preferensial) atas sejumlah komoditas yang juga diinginkan oleh anggota spesies lainnya. Dalam periode 1965-1968 Sukarno adalah *alpha male* yang terus menyusut kekuasaannya untuk kemudian digantikan oleh Soeharto selaku *alpha male* baru. Dalam periode 1968-1971 Soeharto adalah *alpha male* dominan yang terus mereproduksi kekuasaannya.
Hirarki *Dyadic*	Hirarki tempat dua individu bersaing, mengacu pada persaingan antara Sukarno dan Soeharto dalam dualisme kepemimpinan nasional era 1965-1968. Kendati sejak 11 Maret 1966 Soeharto mampu mereproduksi kekuasaan secara lebih cepat, Sukarno terus melakukan perlawanan dan menunjukkan kekalahan saat Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden tahun 1967 lalu terhenti sejak Soeharto diangkat sebagai presiden oleh MPRS tahun 1968.
Hirarki Kompleks	Kondisi lebih dari satu hirarki dengan masing-masing memiliki individu dominan. Hirarki kompleks yang dihadapi Soeharto 1968-1971 adalah TNI-AD dan angkatan bersenjata, kekuatan politik Islam (termasuk NU, tetapi dalam disertasi ini dikhususkan pada Partai Muslimin Indonesia), kekuatan politik nasionalis (dikhususkan pada Partai Nasional Indonesia), dan Sekber Golkar.
Dominasi Soeharto dalam Hirarki *Dyadic*	Dominasi dengan mana satu individu berhasil memiliki akses preferensial atas sejumlah komoditas yang juga diinginkan individu pesaing lainnya. Hal ini mengacu pada Soeharto yang berhasil mendominasi Sukarno dalam konteks kepemimpinan politik nasional dengan menghentikan dualisme kepemimpinan di Indonesia.
Submisi	Keadaan rendah, tunduk, atau patuh. Submisi harus diperoleh Soeharto dari siapa pun penantangnya atau yang berpotensi

www.sitabasri.org

Konsep	Operasionalisasi dalam Penelitian
	menantangnya. Submisi terhadap Soeharto ini ditunjukkan baik oleh PKI, Sukarno, perwira TNI-AD, angkatan bersenjata, kelompok Islam, kelompok Nasionalis, dan Sekber Golkar.
Dominasi Soeharto 1965-1968	Berhasilnya Soeharto memperoleh submisi Sukarno lewat dominasi yang dilakukan lewat cara unjuk kekuatan dan ancaman.
Pemikir Sipil-Militer	Lingkaran pemikir sipil-militer di Seskoad (teknokrat ekonomi yang umumnya lulusan Universitas Berkeley dan perwira Seskoad seperti Suwarto), lingkaran Soeharto Sentris, dan Lingkaran Pater Beek.
Reproduksi Kekuasaan	Melipatgandakan kekuasaan yang dimiliki. Reproduksi kekuasaan semakin cepat dilakukan Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966.
Dominasi Soeharto dalam Hirarki Kompleks	Berhasilnya Soeharto mendominasi lebih dari satu hirarki yang masing-masing memiliki individu dominan periode 1968-1971 yang Soeharto tunjukan pada angkatan bersenjata, kekuatan politik Islam (dalam disertasi ini dibatasi hanya pada Partai Muslimin Indonesia sebagai contoh kasus, sementara Nahdlatul Ulama hanya akan disinggung sedikit sebagai pelengkap), kekuatan politik nasionalis (dalam penelitian hanya dibatasi pada Partai Nasional Indonesia), dan Sekber Golkar.
Mekanisme *Inclusive Fitness*	Konsistensi kecenderungan hewan dan manusia, yang secara individual selalu menyesuaikan perilaku mereka demi keberhasilan reproduksi secara maksimal dalam jangka panjang; Salah satu wujud perilaku *inclusive fitness* adalah kooperasi (kerja sama). Upaya Soeharto sehingga mekanisme *inclusive fitness* dapat berjalan adalah penonjolan Trilogi Pembangunan yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Political Obedience	Tindakan yang diambil oleh subordinat dalam menyikapi aneka perintah, baik tersirat maupun tersurat, atau dari mereka yang menempati posisi teratas dalam hirarki politik (atau terkadang militer); Sejauh hirarki ini diyakini sebagai "*legitimate*" maka secara genetik kecenderungan manusia adalah mematuhinya. Dengan dominasinya Soeharto mampu menciptakan *political obedience* sehingga Pemilu 1971 yang ia selenggarakan cenderung diterima baik proses maupun hasilnya kendati terdapat ketidaksetujuan dari sejumlah kelompok.
Prediktabilitas Spesies	Mampu diprediksi, berkaitan dengan kondisi masyarakat yang terhindar dari pergolakan sehingga memungkinkan spesies melakukan reproduksi berupa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Prediktabilitas ini berhasil dicapai Soeharto akibat kemampuannya menciptakan *political obedience.*

www.sejarah.org

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah :

a. Untuk memberikan penjelasan bagaimana sejak 1965 hingga 1968 Soeharto berupaya untuk mendominasi Sukarno dengan menggunakan para *bonding* dan formasi koalisinya guna mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional dalam hirarki *dyadic*, yang sebelum submisi Sukarno dan pendukungnya diperoleh, ia terlebih dahulu mendominasi PKI dan organisasi afiliasinya.

b. Untuk memberikan penjelasan bagaimana setelah berhasil mendominasi Sukarno, sejak 1968 hingga 1971 Soeharto mereproduksi kekuasaan untuk mendominasi hirarki kompleks melalui mekanisme *inclusive fitness* agar dominasinya selalu bersifat asimetris di hadapan aneka individu dominan dalam setiap hirarki dengan bekerja sama dengan *bonding* dan formasi koalisi yang terdiri atas lingkaran Soeharto Sentris, lingkaran sipil-militer di Seskoad, dan lingkaran Pater Beek.

c. Untuk memberikan penjelasan mengapa setelah Soeharto berhasil menciptakan dominasi asimetris atas aneka hirarki politik yang ada, terciptalah *political obedience* yang memungkinkan Pemilu 1971 mampu memastikan dominasinya dalam politik nasional sehingga prediktabilitas spesies dapat terjamin.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian disertasi ini adalah:

www.setabasri.org

a. Secara akademik menyumbangkan informasi dan kerangka analisis baru yaitu Biopolitik untuk dipergunakan dalam menganalisis kekuasaan Soeharto periode 1965-1971, khususnya dan politik umumnya.

b. Secara praktis memberi gambaran komprehensif bagaimana Soeharto membangun fundasi kekuasaan selama 1965-1971 yang pola dasarnya terus bertahan hingga pengunduran dirinya tahun 1998, dan bukan tidak mungkin pola-pola serupa kembali berulang di Indonesia kendati dilakukan individu berbeda.

6. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam disertasi ini sebagai berikut:

a. Disertasi hanya khusus menganalisis kurun akhir 1965 hingga 1971 yang merupakan satu fase pergolakan (*turmoil*) Indonesia dalam konteks dari tatanan politik lama ke tatanan politik baru.

b. Hirarki *dyadic* yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah proses dominasi-submisi antara Sukarno dan Soeharto untuk menghentikan dualisme kepemimpinan politik nasional.

c. Hirarki kompleks yang dimaksud di dalam penelitian ini ditandai hadirnya aneka hirarki seperti angkatan bersenjata, kelompok Islam, kelompok nasionalis, Sekber Golkar dengan mana Soeharto berupaya mendominasi seluruh hirarki ini dan mereproduksi kekuasaan. Khusus untuk kelompok Islam dan Nasionalis peneliti hanya fokus pada satu partai yang dianggap merepresentasikan pola relasi kekuasaan dominan Soeharto. Untuk kelompok Islam diambil studi kasus Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

www.setabasri.org

sementara kelompok nasionalis diambil studi kasus Partai Nasional Indonesia (PNI).

d. Disertasi dibatasi pada dua fokus. Pertama, kurun 1965 - 1968 adalah fase Soeharto melakukan dominasi dan submisi atas Sukarno dalam hirarki *dyadic* yang memungkinkan ia mereproduksi kekuasaan. Kedua, dalam kurun 1968 - 1971 Soeharto melakukan reproduksi kekuasaan melalui dominasi hirarki kompleks yang muncul dari pecahnya formasi koalisi terdahulu. Dalam fase ini pula, reproduksi kekuasaan dilanjutkan untuk menciptakan *political obedience* dan menjamin prediktabilitas spesies.

e. Disertasi ini menyadari bahwa pembagian kurun waktu tidak berlaku ketat. Proses-proses kekuasaan yang terjadi dalam kurun 1968 - 1971 akan berkaitan dengan kurun 1965-1968. Sebab itu pembagian kurun hanya menandai fase hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) yang dihadapi Soeharto, bukan kajian kesejarahan melainkan perjuangan mencapai kekuasaan (*struggle for power*) yang sarat dengan interaksi dinamis antar kekuatan politik. Masa akhir tahun 1965 adalah fase awal dari Soeharto dalam memegang inisiatif kekuasaan dan mulai mereproduksinya. Tahun 1968 adalah saat Soeharto diangkat secara resmi oleh MPRS sebagai presiden "penuh", bukan lagi sebagai pejabat presiden seperti tahun 1967. Tahun 1971 adalah Pemilu pertama di bawah kekuasaannya. Masing-masing dengan relasi-relasi kekuasaan yang berbeda.

www.setabasri.org

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian disertasi ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Soeharto membangun kekuasaan antara 1965 hingga 1968 dikaitkan dengan konsep *bonding*, formasi koalisi, dan hirarki *dyadic* ?
2. Bagaimana upaya Soeharto melakukan dominasi politik nasional dikaitkan dengan konsep reproduksi kekuasaan dalam hirarki kompleks, dan mekanisme *inclusive fitness* ?
3. Mengapa dominasi asimetris Soeharto atas aneka hirarki politik yang ada memungkinkannya menciptakan *political obedience* yang memungkinkan Pemilu 1971 dapat mendukung kekuasaannya untuk menjamin prediktabilitas spesies ?

Berkenaan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan maka tiga proposisi diajukan sebagai asumsi upaya secara sementara menjawab pertanyaan penelitian. Bahwa dalam perspektif Biopolitik, pola kekuasaan Soeharto periode 1965-1971 terbentuk melalui tiga tahap reproduksi kekuasaan yang dinyatakan ke dalam tiga proposisi berikut:

a. Sejak 1965 hingga 1968 Soeharto mendominasi Sukarno dengan memanfaatkan para *bonding* dan formasi koalisinya guna mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional dalam hirarki *dyadic*, yang sebelum memperoleh submisi Sukarno dan pendukungnya, ia terlebih dahulu mendominasi PKI dan organisasi afiliasinya.

www.setabasri.org

b. Setelah berhasil mendominasi Sukarno, maka sejak 1968 hingga 1971 Soeharto mereproduksi kekuasaan guna menciptakan dominasi dalam hirarki kompleks melalui mekanisme *inclusive fitness* agar dominasinya selalu bersifat asimetris di hadapan aneka individu dominan di dalam setiap hirarki melalui kerja sama dengan para *bonding*-nya dan formasi koalisi baru yang terdiri atas lingkaran Soeharto Sentris, lingkaran sipil-militer di Seskoad, dan lingkaran Pater Beek.

c. Setelah Soeharto berhasil menciptakan dominasi asimetris atas aneka hirarki politik yang ada, maka terciptalah *political obedience* yang memungkinkan Pemilu 1971 mampu memastikan dominasinya dalam politik nasional sehingga prediktabilitas bagi spesies dapat terjamin.

D. Kajian Literatur dan Kerangka Teori

1. Kajian Literatur

Hingga saat ini literatur yang secara khusus melakukan kajian atas kekuasaan Soeharto dengan mempergunakan perspektif Biopolitik belum ditemukan. Namun, kajian-kajian yang menggunakan perspektif lain diyakini akan bermanfaat guna memperoleh data dan membantu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian disertasi ini seperti termuat pada **Tabel 2** Kajian Literatur.

www.setabasri.org

Tabel 2 Kajian Literatur

No	Penelitian	Temuan
1	Herbert Feith, "Suharto's Search for a Political Format" 1968. *Indonesia*, No. 6 (Oct.), pp. 88-105.	- Feith menyatakan bahwa pada Maret 1967 Soeharto memandang bahwa Sukarno tidak bisa berkompromi dengan adanya hegemoni militer sehingga pilihannya ada delegitimasi. - Di tahun 1968 ada prospek Pemilu diselenggarakan untuk menuntaskan masalah dominasi politik, masalah adalah seputar apa sistem pemilu yang diterapkan juga sistem kepartaian. - Suharto membangun jaringan dalam SPRI, yaitu para mantan jenderal di Divisi Diponegoro untuk membuat aneka konsesi bagaimana Orde Baru terbentuk. - Masalah lain yang dihadapi Soeharto adalah Neo-Masyumi, PNI, dan PSI. Pola-pola aliansi baru politik Soeharto terbentuk di tahun 1968 dan dilema seputar penggunaan tindakan koersif.
2	R. William Liddle, 1985. "Suharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions." *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 1 (Spring, 1985), pp. 68-90.	- Liddle menyodorkan 6 proposisi dalam penelitiannya. - Pertama, institusionalisasi dimulai untuk menggantikan pemerintahan personal oleh Soeharto. Kedua, terjadi piramida baru kekuasaan Orde Baru yaitu kepresidenan yang dominan, angkatan bersenjata yang aktif dalam politik, proses pembuatan keputusan yang terpusat di birokrasi, dan pola hubungan negara-masyarakat yang kooptatif dan responsif dengan represi. - Ketiga, promotor kunci institusionalisasi di Orde Baru adalah Soeharto sendiri. Keempat, level institusionalisasi rendah dan merupakan kontinuitas dari pemerintahan personal Soeharto. - Kelima, suksesi apabila terjadi akan tetap menjamin kontinuitas program. Keenam, kendati institusionalisasi terjadi dimensi ideosinkretik Soeharto tetap akan memberi warna.
3	R. E. Elson, *Suharto: Sebuah Biografi Politik.* Penerjemah: Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.	- Studi ini cukup lengkap yang tersedia saat ini mengenai perilaku politik Soeharto, tetapi dari sudut pandang kesejarahan dan biografi politik, dan mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 1965 hingga 1971.
4	John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto.* Penerjemah: Hersri Setiawan. Jakarta: ISSI & Hasta Mitra, 2008	- Suharto bukan perencana G30S/PKI, tetapi ia memiliki kemampuan analitis sehingga dalam waktu relatif singkat Soeharto membaca peta politik nasional dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi gejolak politik. Pendekatan penelitian adalah detektif yang mengungkap fakta dengan interaksi antar tokoh dalam penelitian.

www.setiabasri.org

Persamaan disertasi ini dengan karya Feith adalah adanya jalinan kerja sama Soeharto dengan para *bonding*, upayanya mendominasi Sukarno (dan PKI), serta sikap Soeharto atas penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan disertasi ini dengan Feith adalah adanya upaya untuk menjelaskan dominasi Soeharto atas Sukarno sebagai titik krusial dalam reproduksi kekuasaan. Berbeda dengan disertasi ini, Feith juga kurang mendalami bahwa kekuasaan Soeharto itu sesungguhnya bersifat alamiah dan identik dengan perilaku-perilaku yang ditemui di dalam kelompok primata besar lain.

Persamaan disertasi ini dengan karya Liddle adalah fokus pada individu Soeharto dan perannya dalam kekuasaan era Orde Baru. Perbedaan disertasi ini dengan Liddle adalah periode studi, dengan mana studi Liddle adalah setelah Soeharto berupaya melembagakan kekuasaan personalnya pada era 1980an, sementara dalam disertasi ini fokus studi adalah saat Soeharto baru memulai proses personalitas kekuasaan pada awal 1970an.

Persamaan disertasi ini dengan studi Elson adalah fokus pada personal Soeharto dalam konteks politik dalam menghadapi aneka masalah di seputar implementasi kekuasaannya. Perbedaan disertasi ini dengan studi Elson adalah dikarenakan karya Elson lebih merupakan biografi politik ketimbang kajian politik khusus menggunakan konsep yang ketat, dan pula rentang waktu di dalam karya penelitian Elson cukup panjang. Pada lain pihak disertasi ini hanya fokus pada kurang lebih 5 tahun fase awal kekuasaan Soeharto yang dinilai sangat krusial dan menjadi fundasi kekuasaan selanjutnya hingga 1998. Perbedaan lain disertasi ini dengan studi Elson adalah digunakannya sebuah teori untuk

www.setabasri.org

menjelaskan perilaku Soeharto dalam relasi kekuasaan Indonesia 1965-1971, sementara studi Elson (karena merupakan karya biografi) maka lebih fokus pada alur kronologis.

Persamaan disertasi ini dengan studi Roosa adalah adanya rentang waktu penelitian yang relatif pendek, kendati fokus Roosa jauh lebih sempit ketimbang disertasi ini. Perbedaan disertasi ini dengan studi Roosa adalah jika Roosa menggunakan perspektif investigasi detektif dengan tujuan mencari peran-peran para tokoh di sekitar G30S/PKI selain Soeharto, pada lain pihak disertasi ini menggunakan perspektif Biopolitik Neo-Darwinis dengan fokus pada peran Soeharto dalam kurun 1965-1971 dalam perjuangannya mencapai kekuasaan.

Kendati disertasi ini akan banyak menggunakan fakta-fakta berharga yang ada dalam aneka literatur tersebut di atas, tetapi ia memiliki gagasannya sendiri. Penelitian ini fokus pada periode antara 1965 di saat Soeharto muncul dari epilog G30S/PKI, hingga 1971 yaitu saat Pemilu pertama masa kekuasaannya dilaksanakan. Perspektif teoretis yang digunakan adalah kekuasaan, Otoritarianisme, dan Biopolitik.

www.setabasri.org

2. Kerangka Teori

a. Kekuasaan

Kekuasaan dikonsepsikan sebagai "kemampuan seseorang membuat pihak lain bertindak atau melakukan sesuatu" [tindakan *ability of one to get another to do something*].[53] Kekuasaan berlangsung dalam interaksi sosial karena melibatkan

[53] Michael G. Roskin, et.al., *An Introduction to Political Science: An Introduction.* 12th Edition. Boston: Longman, 2012. p. 7.

perilaku dari lebih satu orang. Kekuasaan juga mengandung unsur paksaan seperti didefinisikan Robert A. Dahl sebagai "kekuasaan melibatkan C yang membuat R untuk melakukan sesuatu yang R sendiri sesungguhnya enggan melakukannya" [*power involved C getting R to do something R would otherwise not do*].[54] Dengan kekuasaan seseorang (atau kelompok) dapat membuat pihak lain berbuat sesuai keinginan pemegang kuasa, baik sukarela maupun tidak.

Kekuasaan dipergunakan Soeharto untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu, yakni menyerahkan submisi dan menerima hirarki kekuasaannya. Jika mengikuti konsepsi Robert Dahl sebelumnya, maka terdapat potensi penolakan oleh pihak lain saat kekuasaan tengah diterapkan. Pemegang kekuasaan juga selalu punya maksud seperti dijelaskan Tom Bottomore yaitu:

> "*... the ability of an individual or a social group to pursue a course of action (to make and implement decisions, and more broadly to determine the agenda for decision making) if necessary against the interests, and even against the opposition, of other individuals or groups*." [55]
>
> " … kemampuan individu atau kelompok sosial untuk mengupayakan suatu tindakan (untuk membuat dan melaksanakan keputusan, dan lebih luas lagi untuk menentukan agenda pengambilan keputusan) jika perlu melawan kepentingan, dan bahkan melawan oposisi, dari individu atau kelompok lainnya."

Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok sosial melakukan tindakan dengan cara mempengaruhi pihak lain. Tindakan berkisar pada maksud membuat, melaksanakan, ataupun menentukan agenda pengambilan keputusan.

www.setabasri.org

[54] Robert A. Dahl seperti dikutip oleh Lisa Harrison, et.al., *Politics: The Key Concepts.* London and New York: Routledge, 2015. p. 130.
[55] Tom Bottomore seperti dikutip oleh James McAuley, *An Introduction to Politics, State, and Society.* London, Thousand Oaks New Delhi: Sage Publications, 2001. p. 10.

Dalam aneka maksud tersebut terbuka kemungkinan pihak lain melakukan perlawanan. Sebab itu Hoffman dan Graham menjelaskan bahwa kekuasaan selalu mengandung empat entitas yaitu paksaan (*constraint*), kekuatan (*force*), subordinasi (*subordination*), dan kebergantungan (*dependence*).[56]

Paksaan inheren dalam kekuasaan mengingat pihak lain yang hendak dipengaruhi untuk menurut kerap menunjukkan perlawanan (resistensi). Untuk mengatasinya maka pemegang kekuasaan beranjak pada entitas kedua yakni kekuatan yang dipergunakan sebagai instrumen pemaksa. Setelah berhasil melakukan tindak pemaksaan kemudian muncul entitas ketiga yaitu subordinasi, dengan mana yang diberi pengaruh akan mengakui (sukarela ataupun terpaksa) bahwa posisinya berada di bawah pihak pemaksa atau menjadi subordinat. Setelah secara mekanis ketiga unsur kekuasaan berhasil diimplementasikan akhirnya muncul entitas yang keempat yaitu ketergantungan, dengan mana subordinat eksistensinya telah bergantung pada pemegang kekuasaan baik secara langsung ataupun tidak.

Kekuasaan dipergunakan oleh Soeharto untuk memaksakan dominasinya atas PKI dengan melakukan aksi-aksi kekuatan fisik dan ini berbeda terhadap Sukarno. Kekuatan yang digunakan adalah aneka demonstrasi massa dan para pendukungnya di parlemen menyusun serangkaian aturan yang berpihak kepadanya. Kekuasaan yang terdapat pada dirinya memungkinkan Soeharto melakukan pemaksaan atas Sukarno agar tunduk dan kemudian bergantung.

www.setabasri.org

[56] John Hoffmann and Paul Graham, *Introduction to Political Theory,* 3rd Edition. London and New York: Routledge, 2015. p. 4.

Soeharto juga menggunakan kekuasaan untuk membentuk formasi koalisi dan mereproduksi kekuasaan. Dalam mendominasi aneka hirarki Soeharto menggunakan kekuatan, baik fisik (*physical force*) maupun aturan konstitusional untuk menciptakan subordinasi dan ketergantungan. Ketergantungan pihak lain ini memungkinkan Soeharto menciptakan Otoritarianisme.

b. Pandangan Biopolitik atas Otoritarianisme

Dari sudut pandang Biopolitik, Albert Somit dan Steven Peterson menyatakan bahwa Otoritarianisme adalah pilihan otomatis (*default option*) bentuk pemerintahan suatu negara. Kalau demokrasi sengaja tidak dipilih atau tidak berjalan dengan semestinya maka Otoritarianisme adalah *default option* bentuk pemerintahan.[57] Jika melihat peristiwa keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam politik internal Irak dan Afghanistan untuk mengembangkan demokrasi, maka Somit dan Peterson menyatakan AS telah mengalami kegagalan. Sejumlah prakondisi bagi demokrasi di kedua negara belum tumbuh secara alamiah. Dalam Demokrasi Terpimpin era Sukarno juga antara kurun 1965 hingga 1971 sifat Otoritarian kekuasaan menggejala akibat prakondisi serupa di Irak dan Afghanistan juga belum tumbuh. Karena itu maka Otoritarianisme Sukarno justru dilanjutkan Soeharto secara lebih efektif.

www.setabasri.org

---

[57] Albert Somit and Steven A. Peterson, *The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution.* New York – Hampshire: Palgrave MacMillan, 2005. p. 9. Lihat juga Steven A. Peterson and Albert Somit, "What is Biopolitics" dalam *Handbook of Biology and Politics*, Steven A. Peterson and Albert Somit, eds. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007. pp. 3-17. Juga terdapat dalam Albert Somit and Steven A. Peterson, "From Human Nature to Public Policy: Evolutionary Theory Challenges the 'Standard Model'" dalam *Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach*, Albert Somit and Steven Peterson, eds. New York: Palgrave Macmillan, 2003. pp. 3-18. Dalam Otoritarianisme " … *individual rights are subordinate to the wishes of the state, dan all means necessary are used to maintain political power*." Thomas M. Magstadt, *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues.* 10th Edition. Belmont: Wadsworth, 2013. p. 87.

Mengapa selama 1965 hingga 1971 Soeharto tidak mengembangkan demokrasi? Bagi Biopolitik, demokrasi bukan *default option* sistem pemerintahan manusia karena membutuhkan prakondisi *nurture* agar bisa tumbuh. Tanpa hadirnya aneka prakondisi tersebut maka yang berlaku adalah *default option* yaitu Otoritarianisme.[58] Bahkan kendati sudah kembali mempraktikkan demokrasi sejak 1998 hingga saat ini, tidak ada jaminan demokrasi terus menjadi pilihan kekuasaan di Indonesia. Demokrasi itu rumit, banyak hirarki pemerintahan harus diciptakan, oligarki mudah tumbuh, dan kerap membuat sebagian kekuatan politik menjadi tidak sabar akan lambannya proses pembuatan dalam sistem politik.[59]

Perpaduan unsur *nature* berupa egoisme bertahan hidup serta *nurture* berupa pengaruh kehidupan militer membuat sifat Otoritarian secara potensial ada di dalam diri Soeharto. Sifat Otoritarian dalam penelitian tidak dipandang baik atau buruk, melainkan suatu yang alamiah dalam konteks kekuasaan kelompok.[60] Suatu rezim bersifat Otoritarian apabila diperintah sekelompok kecil orang, bisa berupa partai, diktator, atau angkatan bersenjata.[61] Dalam Otoritarianisme demokrasi bisa saja hadir tetapi hanya aspek konstitusional dan prosedural saja.[62]

www.setabasri.org

---

[58] Sepanjang 1965 hingga 1971 kemiskinan ekonomi warganegara Indonesia lebih nyata ketimbang kemakmuran. Kemiskinan berkorelasi rendahnya tingkat literasi sehingga kognisi rakyat Indonesia mayoritas tidak cukup peduli untuk memahami rumitnya konsep demokrasi.

[59] Seorang pemikir demokrasi langsung seperti Jean-Jacques Rousseau bahkan menyebut demokrasi adalah sistem pemerintahan yang hanya cocok bagi para dewa, bukan manusia karena kerumitan persyaratannya. Lihat Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on Political Economy and The Social Contract.* Translated with an Introduction and Notes by: Christopher Betts. New York: Oxford University Press. p. 102

[60] Suatu rezim bersifat Otoritarian apabila diperintah sekelompok kecil orang, bisa partai, diktator, atau angkatan bersenjata. Lihat Thomas M. Magstadt, Understanding … *op. cit.*, p. 110-1.

[61] Thomas M. Magstadt, Understanding … *op. cit.*, p. 110-1.

[62] Charles Tilly membagi pengertian demokrasi menjadi empat yaitu konstitusional, substantif, prosedural, dan orientasi proses. Dari keempatnya, konstitusional dan prosedural adalah demokrasi "di permukaan" dan inilah yang dipraktikkan pemerintah Otoritarian agar seolah-olah demokratis. Lihat Charles Tilly, *Democracy.* Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 7.

Di dalam Otoritarianisme, Pemilu bisa saja diselenggarakan secara formal dan konstitusi pun bisa saja menggariskan bahwa "Pemilu diselenggarakan secara demokratis." Namun, pada kenyataannya Pemilu selalu ditandai oleh menangnya satu partai dominan yang didukung eksekutif dan ini pula yang terjadi pada awal kekuasaan Soeharto 1965-1971.

Apabila telaah lebih lanjut dilakukan, maka Otoritarianisme ternyata memiliki sejumlah sisi baik (*virtues*) seperti diungkap Magstadt sebagai berikut:[63]

> "*First, it is relatively simple compared with democracy; there is less need to develop complex structures, procedures, and laws. Second, it is streamlined and thus (in theory) efficient. There is no need to bargain or compromise or cajole. Individuals loyal to the regime typically staff the bureaucracy. Recruitment is based on patronage and nepotism, rather than on merit. Third, neither special interest groups nor public opinion can block or blunt state action; a predictably repressive response follows any opposition. Fourth, a strong leader can collect taxes, build infrastructure (canals, roads, bridges), raise armies and rally the nation for defensive purposes like self-preservation or for offensive ones like expansion. Fifth, unlike democracies, dictatorship often remain politically stable for a long time, even in the face of economic failure.*" [64]
>
> "Pertama, ia relatif simpel jika dibanding demokrasi; sedikit kebutuhan membangun aneka produk hukum, prosedur, dan struktur yang rumit. Kedua, karena kesederhanaannya maka (secara teori) ia efisien. Tidak diperlukan tawar-menawar atau kompromi atau bujukan. Aneka individu yang loyal pada rezim akan menempati jabatan birokrasi. Rekrutmen didasarkan patronasi dan nepotisme, ketimbang keahlian. Ketiga, tidak satu pun baik kelompok kepentingan khusus atau opini publik bisa memblok atau menggagalkan tindakan negara; respons represif terukur akan diterapkan atas oposisi. Keempat, pemimpin yang kuat dapat mengumpulkan pajak, membangun infrastruktur (kanal, jalan, jembatan), mengembangkan angkatan bersenjata dalam kampanye pertahanan domestik maupun politik ekspansi ke luar negeri. Kelima, tidak seperti negara demokrasi, kediktatoran kerap lebih stabil untuk jangka panjang bahkan saat terjadi kekeliruan di bidang ekonomi."

[63] Thomas M. Magstadt, Understanding … *op. cit.*, pp. 87-92.
[64] *ibid.*, pp. 87-8.

www.setabasi.org

Berdasarkan pendapat Magstadt maka kurang lebih refleksi sifat Otoritarian Soeharto 1965 – 1971 dapat diidentifikasi. Pertama, sama seperti Sukarno, Soeharto terus mempertahankan UUD 1945 yang simpel dengan mana presiden punya peran besar dalam pembentukan kabinet tanpa batasan periode terpilih dirinya.[65] Hal ini mengentara dari keseriusan Soeharto untuk melanjutkan penggunaan UUD 1945 yang sejak 1959 kembali diberlakukan Sukarno untuk dilanjutkan di dalam masa kekuasaannya. Dalam UUD 1945 posisi presiden dan DPR setara dan berada di bawah MPR. Apabila Soeharto mampu menjadi distributor anggota DPR dan MPR melalui jalur pengangkatan maka ketiga cabang kekuasaan ini dapat disatukan ke dalam pengaruhnya.

Kedua, *bonding* dengan sejumlah loyalis memungkinkan Soeharto membangun basis dukungan politik efisien yang lepas dari publisitas, dengan mana pendukung tersebut selalu berisi orang-orang dekat yang ia percaya secara personal, bukan institusional. Kerja-kerja para *bonding* ini efektif ketika Soeharto perlu melakukan operasi politik di luar lembaga-lembaga resmi negara untuk memperkuat kekuasaannya.

Ketiga, Soeharto melanjutkan sistem politik tanpa oposisi meniru model Demokrasi Terpimpin Sukarno dengan melakukan dominasi atas seluruh hirarki kekuatan politik yang ada agar Pembangunan ekonomi aman dari guncangan politik. Sistem politik tanpa oposisi mengentara ketika Soeharto berupaya

www.setabasri.org

[65] UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden menjabat selama 5 tahun tetapi tidak ada catatan untuk berapa kali periode ia bisa dipilih kembali.

memberdayakan sebuah organisasi politik yang mampu merangkul “semua” kekuatan politik semisal Sekber Golkar.

Keempat, Soeharto menerapkan “perencanaan strategis” berupa rencana pembangunan lima tahun yang dimulai sejak tahun 1969 dan menjadi tolak-ukur bagi upayanya untuk menciptakan prediktabilitas spesies, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Rencana ini merupakan instrumen Soeharto untuk membangun kesepakatan dengan individu lawan politik maupun kekuatan politik yang menentangnya. Kesepakatan tersebut dilandasi pada tawaran Soeharto bahwa pembangunan yang direncanakan adalah kepentingan bagi semua pihak.

Kelima, posisi dominan dalam kepemimpinan politik nasional diperoleh oleh Soeharto dengan cara melakukan dominasi untuk kemudian mereproduksi kekuasaannya atas aneka kekuatan politik, memberdayakan Sekber Golkar, mereorganisasi ABRI, dan menyelenggarakan Pemilu 1971 sedemikian rupa sehingga menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang relatif stabil kendati tekanannya atas masalah ekonomi tidak sepenuhnya tepat.

Perlu juga dinyatakan bahwa pilihan Soeharto untuk menjamin prediktabilitas spesies dalam kurun 1965 hingga 1971 sangat terbatas sehingga tekanannya untuk meredam partisipasi politik dan membuka pasar bagi aliran dana asing pada saat itu harus dapat dipahami.

www.setabasri.org

c. Kekuasaan Soeharto dalam Perspektif Biopolitik

Dominasi pada kelompok hewan dalam derajat tertentu pun berlangsung dalam kelompok manusia. Dominasi dan apa dampaknya bagi spesies secara Biopolitik dijelaskan Albert Somit dan Steven A. Peterson sebagai berikut:[66]

> "*… dominance is normally defined as a relationship, among members of the same species, in which there is a high probability that the dominant animal will have preferential access to some good to which its fellow speciates also aspire. The desired good may be of almost any sort --- food, shelter, a reproductive partner, a territory, a preferred seating place and, by no means least of all, deference.*" [67]
>
> " … dominasi biasanya didefinisikan sebagai pola hubungan, di antara para anggota suatu spesies, dalam mana kemungkinan hewan dominan punya akses istimewa (preferensial) atas sejumlah komoditas yang juga diinginkan oleh anggota spesies lainnya. Komoditas yang dikehendaki tersebut bisa saja berupa aneka nilai --- makanan, tempat perlindungan, mitra reproduksi, teritorial, tempat duduk yang disukai dan, tidak kurang pula, rasa hormat."

Dominasi adalah hubungan antar anggota satu spesies dengan mana individu paling dominan (*alpha male*) selalu punya akses istimewa atas komoditas sosial bernilai dan diinginkan penantang (*contender*). Namun, hanya boleh ada satu *alpha male* sehingga individu lain yang menginginkan akses serupa harus terlebih dahulu merebut dominasi karena *alpha male status quo* tidak akan

www.setabasri.org

[66] Albert Somit menyelesaikan Ph.D. dari Chicago University lalu menjabat sebagai presiden Southern Illinois University yang menawarkan program magister dan doktoral dalam Biopolitik. Ia merupakan ketua pertama Komite Riset 12 tahun 1973 untuk kajian Biologi dan Politik di *International Political Science Association* (IPSA) hingga pengakuan formal studi ini tahun 1975. Ia juga merupakan *editorial board* jurnal *Politics and Life Sciences*. Ia wafat tanggal 2 Agustus 2020 dalam usia 100 tahun. Lihat juga Steven A. Peterson, 2021. "In Memoriam: Albert Somit, PhD." *Politics and Life Sciences*. Spring, Vol. 40, No. 1) pp. 133-4.

[67] Albert Somit and Steven A. Peterson, The Failure … *op. cit.*, p. 11. Individu paling dominan disebut *alpha-male.* Lihat juga *Appendix* pada Albert Somit and Steven A. Peterson, "From Human Nature …, *op. cit.*, pp. 13-15.

memberikannya secara cuma-cuma. Saat merasa siap individu penantang akan melancarkan perebutan dominasi.

Akhir 1965 tentu saja Sukarno masih lebih dominan ketimbang Soeharto. Namun, momentum G30S/PKI membuka kesempatan bagi Soeharto untuk merebut dominasi. Sebagai langkah awal Soeharto menyingkirkan PKI (pendukung kekuasaan Sukarno) lalu bersama formasi koalisinya ia melakukan dominasi atas Sukarno. Dengan Sukarno memberikan submisi maka Soeharto berhasil mengakses kekuasaan yang dahulunya berada di tangan Sukarno sehingga posisinya kini berstatus *alpha male* baru.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Soeharto merebut dominasi tersebut. Albert Somit dan Steven A. Peterson menjelaskan cara-cara tersebut:

> "*Dominance is achieved in a variety of ways, depending upon the species and the specific situation. Taking the animal kingdom as a whole, actual physical combat is perhaps the least common method, since it carries with it the danger of serious injury or death to one or even both of the contestants. More frequently, dominance is established by threat and display, with the smaller of less formidable-looking individual yielding to a larger and more fearsome opponent. This outcome benefits both participants: for the dominant, there is no physical risk; for the subordinate, the short-term loss of status and/or access to a desired good may well be offset, in the long run, by the opportunity to grow older, stronger, and more fearsome --- and perhaps eventually to reverse the relationship ... alliance with one or more fellow con-speciates is yet another technique for achieving a more dominant status.*" [68]

> "Dominasi dapat dicapai lewat sejumlah cara, bergantung pada spesies dan situasi spesifik. Apabila diambil *kingdom animalia* secara umum, pertempuran fisik adalah bentuk paling tidak umum, karena dapat membawa bahaya, cedera serius, bahkan kematian setiap kontestan. Sebab itu lebih sering dominasi dibangun lewat ancaman dan unjuk kekuatan, dengan mana kontestan yang lebih kecil dan kurang tangguh berusaha tampil lebih kuat dalam menghadapi musuh yang lebih besar dan ditakuti. Hasil dari ancaman

[68] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure …, *op. cit.,* p. 11-2.

www.setabasri.org

> dan unjuk kekuatan ini menguntungkan setiap kontestan; bagi pihak dominan, tidak ada risiko fisik; bagi subordinat, hilangnya status dan/atau akses jangka pendek atas komoditas yang dikehendaki mungkin akan bisa diimbangi, dalam jangka panjang, dengan kesempatannya untuk tumbuh lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih menakutkan – dan mungkin akhirnya ia dapat membalikkan hubungan … aliansi dengan satu atau lebih rekan sejawat adalah teknik lain untuk mencapai status yang lebih dominan."

Ada tiga cara dalam mencapai dominasi yaitu melalui pertarungan fisik, unjuk kekuatan dan ancaman, serta membangun aliansi. Pertarungan fisik bisa berdampak pada kerugian maksimal baik bagi *alpha male* maupun penantangnya. Hasil pengamatan yang dilakukan atas kelompok primata memperlihatkan unjuk kekuatan (*display*) dan ancaman (*threat*) adalah cara yang lebih disukai. Ini dikarenakan kerugian bagi kedua pihak cenderung lebih minimal. Cara lain mencapai dominasi adalah melalui pembangunan aliansi yang sering teramati dibangun oleh individu penantang.[69]

Dalam mendominasi Sukarno, submisi diperoleh bukan melalui pertarungan fisik melainkan aksi ancaman, unjuk kekuatan, dan formasi koalisi yang terbentuk melalui aliansi-aliansi akibat persamaan kepentingan. Sama seperti kecenderungan kelompok primata, cara ini lebih kecil risiko kerugiannya sementara keuntungan akan lebih maksimal.[70] Unjuk kekuatan diperlihatkan Soeharto melalui formasi koalisi yang terbangun melalui aneka aliansinya dalam wujud demonstrasi mahasiswa, kelompok Islam, maupun perwira TNI-AD radikal. Ancaman atas Sukarno ditunjukkan Jenderal Soeharto melalui

[69] Roger D. Masters, "Conclusion" ... *loc.cit.*

[70] Di dunia primata unjuk kekuatan dilakukan dengan menegakkan tubuh, mencabut dan melemparkan cabang tanaman, atau menepuk-nepuk dada. Ancaman dilakukan dengan modifikasi mimik wajah, menegakkan bulu tubuh, ataupun manuver gerak tubuh seolah untuk mencederai lawan.

www.setabasri.org

serangkaian aksi penangkapan atas para pimpinan PKI, penangkapan atas para *bonding* Sukarno,[71] serta penyerangan fisik atas para kader PKI dan organisasi afiliasinya. Soeharto hendak memperlihatkan kepada *alpha male status quo* bahwa ia mampu membubarkan PKI yang selama ini dilindungi. Alasan Soeharto mendominasi Sukarno dengan ancaman, unjuk kekuatan, serta jalinan aliansi yang terwujud ke dalam formasi koalisi diakibatkan masih adanya dukungan yang bersifat relatif atas Sukarno.[72] Jika perebutan kekuasaan dilakukan melalui kekuatan fisik (*physical force*), maka Soeharto harus bersiap menerima kerugian lebih besar dengan kemenangan yang masih sulit dipastikan.

Berbeda dengan dominasinya atas PKI yang karena relatif lebih lemah dari Sukarno, maka Soeharto memilih pertempuran fisik.[73] Soeharto memerintahkan serangkaian penangkapan bahkan mungkin pembunuhan atas para pimpinan serta anggota PKI maupun para pimpinan organisasi afiliasinya. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa Soeharto mendominasi Sukarno melalui unjuk kekuatan, ancaman, dan jalinan aliansi, sementara terhadap PKI ia lakukan melalui kekuatan fisik.[74]

Persoalan selanjutnya adalah apa manfaat dari adanya suatu dominasi bagi spesies. Somit dan Peterson menyatakan bahwa dominasi akan mampu

www.setabasri.org

[71] Mereka misalnya Subandrio, Chaerul Saleh, atau Jusuf Muda Dalam.
[72] Sukarno masih cukup populer di sebagian penduduk Jawa dan perwira, terutama KKO, AL, AK, AU, serta sejumlah perwira AD di Divisi Brawijaya dan Diponegoro.
[73] Istilah pertempuran mungkin kurang cocok karena sebagian besar anggota PKI tidak bersenjata. Namun di sejumlah daerah, kelompok komunis melakukan perlawanan bersenjata seperti terjadi dalam Operasi Trisula dan sejumlah operasi militer lain di pulau Kalimantan melawan PGRS/Paraku maupun faksi Rewang-Wijayasastra.
[74] Termasuk ke dalamnya pembunuhan, pengiriman ke kamp konsentrasi, ataupun pemenjaraan dengan atau tanpa proses pengadilan.

menciptakan prediktabilitas sehingga kesempatan bagi spesies melakukan reproduksi lebih dimungkinkan:

> "*Dominance relations yield predictability. Individuals soon learn where they stand with one another with respect to access to valued resources. As consequence, there is no need constantly to dispute who is to get what disputes that, at best, would entail repeated and possibly substantial investments of energy and, at worst, repeated risks of injury or death … Dominance furthers predictability and predictability, in turn, benefits both the dominant and the subordinate. The former gains the desired resource… at no greater cost than a possible threat or two; the subordinate, by yielding, escapes a clash that might otherwise reduce or literally end his/her reproductive possibilities."* [75]

> "Relasi berdasarkan dominasi memungkinkan terciptanya prediktabilitas. Setiap individu segera belajar di mana posisi masing-masing dalam hal akses untuk sama-sama menikmati sumber daya berharga. Sebagai konsekuensinya, tidak perlu lagi pertikaian terus-menerus soal siapa dapat apa, pertikaian yang, paling banter, akan berakibat pengulangan investasi energi yang sia-sia dan, yang terburuk, terulangnya risiko menderita cedera bahkan kematian … Dominasi memungkinkan prediktabilitas dan prediktabilitas, sebagai gantinya, akan menguntungkan baik pihak dominan maupun subordinatnya. Pihak pertama memperoleh sumber daya yang diinginkan tanpa risiko besar kecuali paling-paling satu atau dua kemungkinan ancaman; subordinat, dengan menyerah, lolos dari bentrokan yang bisa mengurangi atau secara harfiah mengakhiri kemungkinannya untuk melakukan reproduksi."

Menurut Somit dan Peterson, dominasi menghasilkan prediktabilitas. Prediktabilitas spesies adalah kepastian posisi setiap individu di dalam mengakses aneka sumber daya dan melakukan reproduksi. Setiap pihak cenderung memahami posisi masing-masing serta kelayakan mereka dalam hal akses atas komoditas bernilai, termasuk juga reproduksi dalam kondisi hirarkis yang jelas. Dengan prediktabilitas spesies maka tidak ada lagi pertikaian berlarut-larut,

[75] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure …, *op. cit.*, p. 12.

www.sofabasri.org

terbuangnya energi yang bersifat terus-menerus, risiko luka fisik, bahkan kematian.

Dualisme kepemimpinan nasional tidak akan menguntungkan spesies yaitu rakyat Indonesia. Dominasi penuh Soeharto atas Sukarnolah yang diyakini mampu menciptakan prediktabilitas. Prediktabilitas ini kemudian menempatkan posisi Soeharto selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata juga penentu susunan kabinet sehingga pembangunan ekonomi dapat terlaksana. Setiap pihak, baik Sukarno maupun Soeharto juga memperoleh kejelasan mengenai posisi diri masing-masing dengan konsekuensi berbedanya akses mereka atas kekuasaan.

Keuntungan bagi adanya dominasi bagi spesies secara umum, atau dalam konteks ini berhasilnya dominasi Soeharto atas Sukarno bagi sistem politik dan rakyat Indonesia, dijelaskan melalui pendapat Somit dan Peterson sebagai berikut:

> "*A society beset with continuing turmoil is not conducive to reproductive success. The more orderly mode of life generated by the type of predictability ... a stable, peaceful society is more apt to lead to individual reproductive success than one in continuing upheaval as a result of constant fighting over status and resources.*" [76]

> "Masyarakat yang terus dilanda gejolak tidak kondusif dalam hal keberhasilan mereka untuk melakukan reproduksi. Semakin tertib cara hidup akibat aneka prediktabilitas … masyarakat yang stabil dan damai lebih mampu memastikan individunya memperoleh keberhasilan reproduksi ketimbang masyarakat yang selalu berada dalam kondisi pergolakan akibat pertikaian konstan atas masalah status dan sumber daya."

Dominasi memungkinkan terselenggaranya reproduksi, baik bagi individu dominan khususnya maupun spesies umumnya. Dengan mengikuti alur pikir

[76] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure …, *loc.cit.*

www.setabasri.org

Somit dan Peterson maka kondisi pergolakan dalam masyarakat diyakini tidak akan pernah menguntungkan spesies dalam suatu populasi. Spesies membutuhkan prediktabilitas dan prediktabilitas hanya dapat tercipta apabila dominasi penuh berhasil ditegakkan. Tanpa adanya dominasi Soeharto, maka Indonesia akan terus berada dalam kondisi pergolakan (*turmoil*) sehingga rakyat Indonesia sulit untuk mengakses sumber daya (pangan, sandang, dan papan) juga melakukan reproduksi (bekerja untuk mencari nafkah).

Masalah jangka pendek yang berusaha diselesaikan Soeharto sejak 1966 adalah penyelamatan ekonomi (*economic resucitation*).[77] Di bawah dominasi Soeharto ini maka para teknokrat ekonomi yang ia kenal sejak belajar di SSKAD berupaya mengatasi empat masalah ekonomi.[78] Untuk memastikan teratasinya persoalan ini maka dibutuhkan kondisi politik yang stabil agar kabinet dapat bekerja melakukan perbaikan.[79] Dengan bekerjanya para teknokrat ekonomi ini maka lonjakan inflasi yang meningkat sejak pertengahan 1961 dan setiap tahun harga komoditas naik dua kali lipat, mulai menampakkan perlambatan.[80]

www.setabasri.org

[77] Terdiri atas penyelesaian stagnasi produksi sandang-pangan seperti makanan, pakaian, termasuk kebutuhan dasar hidup (mungkin seperti sembako). Selain itu upaya lainnya adalah menggencarkan ekspor sambil menangani terjadinya *bottleneck* dalam kegiatan tersebut akibat infrastruktur ekspor yang belum memadai. Perbaikan infrastruktur ekspor mencakup penyediaan bahan mentah, *spare-part*, dan modal dasar minimal untuk sektor ini. Termasuk ke dalam masalah mendesak ini adalah penyediaan *shelter* atau tempat tinggal bagi penduduk.

[78] Selain inflasi, empat masalah ekonomi Indonesia yang paling kritis yaitu suplai makanan, rehabilitasi infrastruktur ekonomi, peningkatan fasilitas ekspor, dan tercukupinya suplai pakaian. Lihat Mohammad Uzair, Economic Development of Indonesia. 1970. *Pakistan Horizon*. Vol. 23, No. 2 (Second Quarter), pp. 123-137, p. 127. Lihat juga Hong Lan Oei, Indonesia's Economic Stabilization and Rehabilitation Program: An Evaluation. 1968. *Indonesia*. Vol. 5, Apr., pp. 135-174., p. 140-141.

[79] Lihat Budget Pemerintah terkait Hubungannya dengan Pendapatan Nasional, 1960-1977 dalam Hong Lan Oei, Indonesia's Economic …, *op. cit.,* p. 143. yaitu berturut-turut: 173,7% (1965); 617,8% (q-1 1966); 411,3% (q-2 1966); 68,9% (q-3 1966); 55,4% (q-4 1966); 7,7% (q-1 1967); dan 14,3% (q-2) 1967.

[80] Tahun 1964 sebesar 118%; tahun 1965 sebesar 380%; tahun 1966 sebesar 860%; tahun 1967 sebesar 170%. Tahun 1966 persentase inflasi melonjak akibat gejolak politik transisi rezim lama

Pada kurun 1968 hingga 1971, reproduksi bagi kekuasaan Soeharto tampak lebih rumit. Elemen pro Sukarno baik di kekuatan politik sipil dan militer diasumsikan masih ada ditambah pecahnya formasi koalisi Soeharto 1965-1968. Pada sisi lain, terjadi kebangkitan Masyumi lama dan PNI, sementara PKI terus melakukan perlawanan sporadis di sejumlah wilayah. Muncul hirarki-hirarki baru yang menantang kekuasaan Soeharto.

Bagi Somit dan Peterson, hirarki adalah kecenderungan stratifikasi dari aneka kelompok primata besar, termasuk manusia. Namun bagi keduanya, hirarki di suatu populasi punya sejumlah variasi yaitu sederhana (*dyadic*) dan rumit (kompleks), dengan penjelasan berikut:

> "*… in simple, small primate societies, dominance usually leads to 'linear' hierarchies, with each animal ranked from up (alpha) to bottom (omega). But in more complex societies … several animals may unite in an alliance or a coalition so that they wind up on top --- even though some of them might otherwise rank much lower purely on the basis of dyadic one-to-onee, simple dominance) relations. Dominance hierarchies in these societies, consequently, are not simply the sum of all dyadic relations … whether a society is characterized by a linear hierarchy or by a more complex coalition structure, the net result is essentially the same.*" [81]

> " … secara sederhana, yaitu masyarakat-masyarakat primata kecil, dominasi biasanya mendorong terciptanya aneka hirarki 'linier', dengan setiap hewan diperingkat dari teratas (*alpha*) hingga terbawah (*omega*). Namun, dalam masyarakat-masyarakat yang lebih rumit … sejumlah hewan bisa saja menyatukan diri dalam sebuah aliansi atau koalisi sedemikian rupa sehingga mereka mampu mencapai posisi teratas – kendatipun sejumlah individu di antara mereka ini terperingkat lebih rendah apabila didasarkan pada hubungan-hubungan satu demi satu, dominasi sederhana (*dyadic*). Aneka

www.sejarahasri.org

ke rezim baru. Warisan Demokrasi Terpimpin adalah 60% anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai pemerintah dan angkatan bersenjata, sisanya baru untuk lain-lain. Oktober 1966 Kabinet Soeharto baru efektif bekerja. Salah satu penyumbang penurunan defisit adalah perampingan kabinet Dwikora oleh Soeharto sejak ia mulai menangkapi para menteri yang dianggap berhaluan komunis. Lihat K.D. Thomas and J. Panglaykim, Indonesia's Development Cabinet, Background to Current Problems and the Five Year Plan. 1969. *Asian Survey*. Vol. 9, No. 4 (Apr.), pp. 223-238., pp. 223-225.

[81] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure …, *loc.cit.*

> hirarki dominan dalam aneka masyarakat seperti ini, sebagai konsekuensinya, tidak bisa dikatakan sederhana hanya sebagai jumlah keseluruhan hubungan-hubungan *dyadic* tersebut … apakah suatu masyarakat ditandai oleh hirarki linier ataupun struktur koalisi yang lebih rumit, hasil akhirnya adalah sama."

Dalam fase 1965-1968 persoalan Soeharto adalah dalam konteks hirarki *dyadic.* Soeharto fokus pada persoalan bagaimana mendominasi Sukarno dengan terlebih dahulu mendominasi PKI. Setelah persoalan dalam hirarki *dyadic* terselesaikan, formasi koalisinya terdahulu membangun hirarki-hirarki baru yang menantang kekuasaanya.

Para aliansinya dahulu kini menciptakan hirarki masing-masing lengkap dengan individu dominan dan pengikutnya sendiri. Pilihan Soeharto bukan mengeliminasi seluruh hirarki yang semakin menonjol tersebut melainkan mendominasinya. Somit dan Peterson menjelaskan bahwa aneka hirarki dalam masyarakat kompleks tidak bisa hanya sederhana dinyatakan sebagai jumlah keseluruhan hubungan *dyadic*. Akibatnya, sulit bagi Soeharto menciptakan sebuah hirarki tunggal yang secara sederhana dinyatakan sebagai hasil penjumlahan seluruh hirarki *dyadic* yang ada. Tidak mungkin hirarki Masyumi, NU, PNI, dapat disatukan ke dalam sebuah hirarki tunggal dengan cara Soeharto membubarkan mereka terlebih dahulu kemudian memimpinnya.[82]

Soeharto tetap membiarkan hirarki lain melanjutkan eksistensinya, tetapi individu dominan di setiap hirarki ia dominasi. Somit dan Peterson menyatakan bahwa dampak dari hirarki *dyadic* maupun kompleks hasilnya akan tetap sama

[82] Jika itu dilakukan maka resistensi akan tinggi dan perang sipil bukan tidak mungkin terjadi.

www.setabasi.org

yakni bahwa setiap individu akan menerima status dominan individu lain maupun status diri mereka sebagai subordinat. Jika Soeharto mampu mendominasi individu dominan di setiap hirarki maka mereka akan mau (baik sukarela maupun terpaksa) berposisi sebagai subordinat. Dengan tunduknya para individu dominan di setiap hirarki maka Soeharto akan mampu mendominasi hirarki kompleks yang ada.

Persoalan mengapa Soeharto perlu menciptakan hirarki dominan di tengah hirarki kompleks, dapat dijelaskan melalui pendapat Somit dan Peterson sebagai berikut:

> "*Hierarchy leads to social stability, and stability – on balance – is conducive to more successful reproduction among members of that society. Hierarchy, an outgrowth of dominance relations among a social species, functions to enhance the likelihood that the individuals who constitute that species will optimize their inclusive fitness. The direct benefit is to the individual – but the group and, ultimately the species may itself also gain thereby.*" [83]

> "Hirarki mendorong pada terciptanya stabilitas sosial, dan stabilitas ini – sebagai imbangannya – akan kondusif bagi reproduksi yang lebih sukses bagi para anggota masyarakat tersebut. Hirarki, sebagai hasil aneka hubungan dominasi di kalangan spesies sosial, berfungsi meningkatkan kemungkinan individu dalam spesies mengoptimalkan kemampuan *inclusive fitness*[84] mereka. Keuntungan langsung bagi individu – selain kelompok dan, akhirnya spesies sebagai keseluruhan juga mendapatkan keuntungan."

www.sabdasri.org

[83] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure …, *op. cit.*, p. 13.

[84] *Inclusive fitness* adalah konsep umum analisis Biopolitik. Maknanya adalah konsistensi kecenderungan hewan (juga manusia) yang secara individual selalu menyesuaikan perilaku mereka demi keberhasilan reproduksi maksimal dalam jangka panjang. Salah satu wujud perilaku *inclusive fitness* adalah kooperasi (kerjasama). Lihat Roger D. Masters, "The Biological Nature of the State." 1983. *World Politics*. Vol. 35, No. 2, Jan., pp. 161 – 193

Sama dengan upaya dominasi dalam hirarki *dyadic,* jawabannya adalah menciptakan stabilitas politik. Namun, cakupan Soeharto bukan hanya hirarkinya sendiri melainkan hirarki lain yang berbeda dengan hirarkinya sendiri. Fase pergolakan (*turmoil*) akan mereda apabila sebuah hirarki dominan berhasil terselenggara. Sebab itu, perlu dijelaskan bagaimana cara Soeharto menciptakan hirarki dominan di tengah hirarki kompleks.

Hirarki dominan adalah hasil hubungan dominasi di dalam masyarakat kompleks seperti menggejala di kurun 1968-1971. Soeharto mungkin menilai potensi konflik akibat pertikaian gagasan yang bersifat ideologis antar hirarki sebagai ancaman bagi upaya menjamin prediktabilitas kehidupan spesies. Individu dominan yang tersebar dalam hirarki kompleks harus dikendalikan. Penciptaan hirarki Soeharto harus dirancang dan ia menempuh cara-cara konstitusional dikombinasikan aksi-aksi manipulatif. Para *contender* Soeharto, yaitu individu dominan di setiap hirarki mungkin tetap dibiarkan hidup atau menjabat posisi tertentu, tetapi kekuasaan mereka dipastikan selalu asimetris dengan yang ia miliki.

Persoalan mengapa mereka – para individu dominan di sejumlah hirarki pesaing Soeharto – mau memberikan submisi padanya adalah hal lain yang harus dijawab. Jawaban tersebut dapat dicari dalam konsep *inclusive fitness.* Dalam mekanisme *inclusive fitness*, maka setiap individu cenderung menyesuaikan perilaku di suatu situasi, agar akses sumber daya dan reproduksi tetap bisa mereka lakukan. Prinsip utama *inclusive fitness* adalah kerja sama. Dalam kerja sama ini maka mereka yang mau memberikan submisi pada Soeharto akan dipersilakan

www.setabasri.org

memimpin hirarkinya masing-masing bahkan diberikan akses atas sumber daya. Individu dominan di dalam hirarki lain masih bisa mereproduksi kekuasaannya kendati mereka subordinat hirarki Soeharto. Mereka yang menolak dominasi Soeharto harus melakukan proses keluar dari gelanggang pertarungan kekuasaan (*flight*).

Hirarki secara alamiah akan selalu terbentuk dalam kelompok-kelompok manusia maupun hewan. Hirarki selalu hadir dalam aneka sektor kehidupan kompleks manusia, baik berupa perusahaan, paguyuban, serikat buruh, asosiasi profesi, termasuk negara. Hirarki selalu ditandai oleh perbedaan status, keuntungan, dan keistimewaan berdasarkan perbedaan posisi (atau peringkat) manusia di dalam kelompok. Hirarki adalah realitas ironis masyarakat manusia, seperti dinyatakan Somit dan Peterson:

> "*There is something paradoxical, if not ironic, about the need to demonstrate the universality among humans of hierarchical structures embodying marked differences of status, benefits, and privilege, or of the manifold material and psychological gains and losses that are associated with these differences. Of all social phenomena, hierarchy is the most pervasive; for almost all of us, the major and minor events of our existence occurs within, and are shaped by, one hierarchy or another.*" [85]

> "Terdapat sesuatu yang paradoks, jika bukan ironis, tentang kebutuhan untuk mendemonstrasikan universalitas di antara manusia mengenai aneka struktur yang bersifat hirarkis yang ditandai perbedaan status, keuntungan, dan hak istimewa, atau berbagai keuntungan dan kerugian materiil maupun psikologis terkait aneka perbedaan ini. Dari semua fenomena sosial, hirarki adalah yang paling merasuk; bagi hampir semua dari kita, peristiwa besar dan kecil dari keberadaan kita terjadi di dalam, dan dibentuk oleh, satu hirarki atau lainnya."

www.setabasri.org

[85] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure ..., *op. cit.*, p. 14.

Hirarki memunculkan pemeringkatan sosial, dan dalam hirarki politik, hirarki dominan menempati posisi distributor sumber daya. Perbedaan status antara Soeharto dengan individu di dalam hirarki lain adalah dimungkinkan dan harus bersifat asimetris dengan mana kekuasaan Soeharto selalu lebih besar. Secara umum, populasi cenderung menerima adanya satu hirarki dominan asalkan mampu menciptakan prediktabilitas.[86]

Soeharto menganggap apabila kekuasaan setiap hirarki yang ada tersebar merata (simetris), tanpa adanya satu hirarki paling dominan (asimetris), maka prediktabilitas di dalam spesies akan tidak menentu seperti terjadi saat Sukarno masih berkuasa. Namun, tentu saja hirarki dominan di tengah hirarki kompleks mempersyaratkan suatu kondisi agar dirinya dapat menyatakan diri yaitu kepatuhan politik (*political obedience*). Mengenai hubungan antara kepatuhan politik dan hirarki kompleks, Somit dan Peterson menjelaskan:

> "*Humans ... live in many hierarchies ... we are concerned only with political obedience, that is, actions taken by subordinates in response to the commands, again implicit or explicit, or those above them in the political (or sometimes military) hierarchy. So long as this hierarchy is perceived as "legitimate" our genetic tendency is to obey. Obedience is thus a behavioral correlate of dominance and hierarchy. If inclusive fitness is to be optimized, a social species must evolve all three behaviors – dominance relations, hierarchical social systems, and obedience. All three, surely, are characteristics of Homo Sapiens*." [87]

www.setabasri.org

[86] Mengenai hirarki dominan dalam hirarki kompleks, Peter Corning menyatakan bahwa hirarki dominan individu yang bersifat stabil memiliki sejumlah fungsi penting bagi kelompok. Peter A. Corning, "The Evolution of Politics: A Biological Approach" dalam Handbook of Biology and Politics, Steven A. Peterson and Albert Somit. Cheltenham & Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2017, pp. 55-84. …" *op. cit.* p. 57. Hirarki dominan stabil tersebut berfungsi untuk: "… *maintaining peace, arbitrating disputes, limiting destructive competition, mobilizing collective action, even defending the group against outside threats.*"

[87] Albert Somit and Steven Peterson, The Failure …, *op. cit.*, p. 17.

> "Manusia … hidup dalam aneka hirarki … kami hanya memaksudkannya dengan kepatuhan politik, yaitu, tindakan yang diambil oleh subordinat dalam menyikapi aneka perintah, baik tersirat maupun tersurat, atau dari mereka yang menempati posisi atas dalam hirarki politik (atau terkadang militer). Sejauh hirarki ini diyakini sebagai berlegitimasi maka secara genetis kecenderungan kita adalah mematuhinya. Kepatuhan sebab itu adalah perilaku yang berhubungan baik dengan dominasi maupun hirarki. Jika *inclusive fitness* hendak dioptimalkan, suatu spesies sosial harus mengembangkan semua dari tiga perilaku – hubungan-hubungan dominasi, sistem sosial hirarkis, dan kepatuhan. Ketiganya, tentu saja, merupakan karakteristik dari *Homo Sapiens.*"

Kepatuhan politik hanya akan terjadi sejauh adanya satu hirarki bersifat lebih dominan ketimbang hirarki lainnya serta dianggap oleh spesies (yang menjadi anggota populasi) sebagai memiliki legitimasi. Somit dan Peterson juga menyatakan terdapatnya keterkaitan antara hubungan dominasi-submisi, sistem sosial hirarkis, dan kepatuhan politik dengan mana ketiganya bersifat bawaan (*innate*) spesies manusia. Saat sebuah hirarki dianggap sebagai berlegitimasi maka individu dominan di hirarki lain atau populasi akan menerimanya. Penerimaan atas adanya satu hirarki dominan adalah langkah kunci bagi kepatuhan politik. Individu *alpha male* dalam hirarki dominan tersebut dapat menggunakan aneka metode, baik bersifat alamiah (instingtif) maupun budaya (*nurture*) untuk mengembangkan kepatuhan tersebut. Saat hirarkinya nyata bersifat dominan, maka Soeharto baru mampu menciptakan kepatuhan politik.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam metodologi penelitian Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata

www.setabasri.org

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[88] Metodologi ini dipilih karena peneliti akan menginterpretasikan data yang ditemukan dalam proses penulisan, sesuai dengan upaya menjawab pertanyaan penelitian. Metodologi ini juga dipilih karena nuansa obyektivitas, yaitu penilaian atas data sesuai dengan alur penelitian, akan berdampak pada interpretasi atas data yang dikumpulkan. Selain itu, metodologi ini digunakan karena unsur kedalaman interpretasi sangat dibutuhkan dalam menganalisis kekuasaan Soeharto dalam Perspektif Biopolitik periode 1965 – 1971.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan (*library research*). Peristiwa yang diteliti sudah cukup lampau yaitu periode 1965 hingga 1971 dan para pelaku di dalam peristiwa tersebut sudah cukup sulit ditemukan dan sebagai akibatnya penelitian ini mengandalkan rekaman-rekaman data, baik itu terdapat di dalam buku-buku, jurnal-jurnal yang terbit di sekitar periode yang diteliti, dokumen-dokumen, surat-surat kabar yang bersirkulasi di sekitar periode yang diteliti, majalah, dan sumber-sumber dari internet yang dianggap berhubungan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

Teknik analisa data atas aneka dokumen tertulis melalui proses perujukan pada pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kemudian data-data yang diperoleh diseleksi. Sebagai hasil seleksi maka data-data yang tidak mendukung upaya pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian ataupun

www.setabasri.org

[88] Steven J. Taylor, Robert Bogdan and Marjorie DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. 4th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2016. pp. 7 – 11.

tidak mendukung sistematika penulisan akan dikesampingkan. Harapannya adalah bahwa hanya data-data yang sesuai dengan alur penelitian saja digunakan dalam penulisan laporan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I diberi judul **Pendahuluan**. Bab ini berisi sub-sub bab Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian dan Kerangka Analisis (termasuk Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Batasan Masalah), Pertanyaan Penelitian, Kajian Literatur dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II diberi judul **Soeharto dan Bonding-nya**. Bab ini dibagi ke dalam sub-sub bab Sukarno dan Prediktabilitas Spesies, Soeharto dan *Bonding*-nya, Lingkaran Soeharto Sentris, Lingkaran Sipil-Militer Seskoad, dan Lingkaran Pater Beek.

Bab III diberi judul **Soeharto dan Reproduksi Kekuasaan**. Bab ini dibagi ke dalam sub-sub bab Reproduksi Kekuasaan melalui Reorganisasi Angkatan Bersenjata, Reproduksi Kekuasaan dalam Partai Politik, dan Pemberdayaan Sekber Golkar.

Bab IV diberi judul **Kekuasaan Soeharto Periode 1965-1971 dalam Perspektif Biopolitik**. Bab ini terdiri atas sub-sub bab: Dominasi dalam Hirarki *Dyadic*, Dominasi dalam Hirarki Kompleks, dan *Political Obedience* menuju Prediktabilitas Spesies.

Bab V diberi judul **Penutup**. Bab ini terdiri atas sub-sub judul Kesimpulan, Implikasi Teori, dan Reflektif.

www.setabasri.org

BAB II
SOEHARTO DAN *BONDING*-NYA

A. Sukarno dan Prediktabilitas Spesies

Masa-masa akhir Demokrasi Terpimpin diwarnai ketidakpastian baik dalam masalah ekonomi, politik, maupun ideologi. Biopolitik Neo-Darwinis memandang Sukarno selaku *alpha male* kurang mampu menjamin prediktabilitas. Ketidakmampuan menjamin prediktabilitas mendorong populasi berada dalam kondisi pergolakan (*turmoil*) yang mengarah pada sulitnya akses atas sumber daya dan penyelenggaraan reproduksi. Lemahnya dominasi *alpha male status quo* mendorong munculnya penantang (*contender*) yang akan mengubah relasi dominasi.

Pada tanggal 13 Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat pemerintahan kepada Sukarno. Dengan inisiatif Nasution pimpinan TNI-AD mengajukan usul untuk kembali kepada UUD 1945. Pada 17 Maret 1958 Sukarno memimpin Dewan Nasional bersidang dan hasilnya adalah rekomendasi untuk kembali kepada UUD 1945.[89] Namun, sebelum Konstituante memberi keputusan, muncul amandemen dari kelompok Islam agar ditambahkan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

[89] Kemudian pada tanggal 22 April 1959 di depan Majelis Konstituante, Sukarno membuat orasi politik dengan judul "*Res Publica, Sekali lagi Res Publica*" menghimbau Konstituante kembali menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Lihat Nugroho Notosusanto, ed. *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Cetakan 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, h. 100.

www.setabasri.org

pemeluknya" (dalam Piagam Jakarta) ke dalam mukadimah UUD 1945.[90] Dalam situasi genting negara maka dengan mengatasnamakan Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu) Jenderal Nasution mengeluarkan Peraturan No. Prt/Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan aneka kegiatan politik.[91] Hanya dengan jaminan Jenderal Nasution inilah Sukarno yakin untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.[92]

Dengan berlakunya UUD 1945 maka presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR, karena keduanya berposisi setara di bawah MPR. Tanggal 13 Juli 1959 Sukarno membentuk Kabinet Kerja yang diketuai oleh Ir. H. Djuanda, membubarkan Dewan Nasional, serta membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 22 Juli 1959. Sementara itu dalam Penetapan Presiden sebelumnya yakni No. 1/1959 telah dinyatakan bahwa DPR hasil Pemilu 1955 boleh terus bekerja akan tetapi harus berpedoman pada UUD 1945 dan disebut "DPR Peralihan."[93]

www.setabasri.org

[90] Pada tanggal 29 Mei 1959 Konstituante melakukan pemungutan suara untuk amandemen tersebut dengan hasil 201 suara setuju dan 265 suara menolak. Setelah itu badan tersebut melangkah pada usulan Sukarno untuk kembali kepada UUD 1945. Dari total 474 anggota Konstituante, dalam voting pertama tanggal 30 Mei 1959, terdapat 269 suara setuju dan 199 suara menolak. Namun, akibat tidak memenuhi kuorum sesuai UUDS 1950, maka kembali dilakukan voting hingga dua kali di waktu berbeda dengan hasil mayoritas setuju tetapi tetap tidak memenuhi kuorum. Setelah Konstituante menjalani masa reses yang dimulai tanggal 3 Juni 1959, badan tersebut tidak pernah mengadakan sidang untuk selama-lamanya. Lihat Nugroho Notosusanto, ed. Prajurit …, *op. cit.,* h. 101.

[91] *ibid.*

[92] Poin pertama Dekrit adalah menetapkan pembubaran Konstituante. Kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi UUDS. Ketiga, pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lihat *ibid.*, h. 102.

[93] Namun, akibat DPR tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah, maka DPR "Peralihan" ini kemudian dibubarkan Sukarno melalui Penetapan Presiden No. 3/1960. Pemerintah kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DPR-GR) melalui Penetapan Presiden No. 4/1960. Lihat *ibid.*, h. 103.

Sukarno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)[94] dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).[95] Manakala anggota DPR-GR dan MPRS dibentuk oleh dan harus mematuhi keputusan-keputusan presiden maka terciptalah Otoritarianisme. Sukarno semakin dominan, tetapi karena tidak memiliki basis politik nyata, maka ia harus melakukan aneka manuver politik guna mengimbangi aneka kekuatan politik. Ketiadaan basis kekuatan politik yang sepenuhnya loyal kepada Sukarno inilah, yang menurut Mietzner, membuat Soeharto tampak mudah menggantikan kepemimpinan nasional.[96]

Rezim Sukarno secara gradual mengalami deklinasi dalam hal *state capacity.*[97] Secara umum diketahui bahwa hingga pertengahan 1960an, ekonomi Indonesia berada dalam masa krisis.[98] Terjadi *hyperinflation* yang berdampak pada hampir terhentinya pertumbuhan ekonomi.[99] Secara politik, Kabinet

www.setabasri.org

[94] Komposisi anggota DPR-GR adalah 44 orang dari PNI, 36 orang dari NU, 30 orang dari PKI, 118 orang dari Golongan Fungsional non ABRI, dan 35 orang dari ABRI. Komposisi ini ditetapkan melalui Keputusan No. 156/1960 tanggal 24 Juni 1960.

[95] Status anggota MPRS ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 yang disesuaikan dengan Penetapan Presiden No. 2/1959 yaitu terdiri atas 283 anggota DPR-GR, 94 orang Utusan Daerah, dan 232 wakil dari Golongan Fungsional. Lihat Nugroho Notosusanto, ed., Prajurit dan Pejuang …, *op. cit.*, h. 103.

[96] Marcus Mietzner, Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy: Phases of Regime Consolidation and Decline in Suharto's Indonesia. 2017. *International Political Science Review* 00 (0)., pp. 1-14., p. 4.

[97] Jumlah pelayan publik berkurang dari 855.000 pada tahun 1953 menjadi 608.000 pada tahun 1963. Fragmentasi ideologi dan tingginya dinamika politik dalam negeri membuat aparatur negara mengalami disfungsionalitas. Dari sisi ekonomi, dengan inflasi di atas 500 persen dan posisi hutang 524% ketimbang nilai ekspor, membuat rezim Sukarno mengalami kebangkrutan. Lihat Marcus Mietzner, Authoritarian Elections … *op.cit.*, p. 4.

[98] Gejala inflasi awal 1950an yang disikapi dengan melakukan akselerasi ekspansi moneter sejak awal 1960an ternyata malah mendorong inflasi mencapai 135% tahun 1964 dan tahun 1965 hampir mendekati 600%. Lihat Kian Wie Thee, Indonesia's Two Deep Economic Crises: The Mid 1960s and Late 1990s. 2009. *Journal of the Asia Pacific Economy*. 14:1, pp. 49-60., p. 51

[99]Situasi di tahun 1965 ini termasuk ke dalam kategori *hyperinflation* sehingga mendorong aneka lembaga keuangan berhenti berkembang – akibat tidak lagi bisa menarik dana – dan sebab itu tidak dapat memberikan pinjaman komersial. Tanpa adanya pinjaman komersial maka aneka usaha baik yang tengah berjalan ataupun baru sulit berkontraksi. Dalam *hyperinflation* pula maka sistem

Dwikora yang berukuran besar menandai bahwa ia bukanlah kabinet kerja melainkan bersifat akomodasionis sebagai media Sukarno untuk menggalang dukungan politik.

Situasi akhir Demokrasi Terpimpin juga ditandai pergeseran terus-menerus dalam hubungan segitiga antara Sukarno, TNI-AD anti komunis, dan PKI, sementara Sukarno tidak mampu secara penuh mendominasi.[100] Sebab itulah maka secara pragmatis ia merangkul PKI. Aliansi antar keduanya terbentuk akibat sejak transisi Demokrasi Terpimpin, TNI-AD terus mengakumulasi kekuasaan.

Perimbangan yang selalu bergeser antar ketiga kekuatan politik mendorong munculnya ketegangan politik nasional, tanpa satu pun dari ketiganya berhasil mendominasi. Dalam Biopolitik, ketiadaan dominasi mendorong pada kondisi *turmoil* yang berujung pada ketiadaan prediktabilitas. Ketiadaan prediktabilitas kemudian berakibat pada ketidakmampuan spesies dalam mengakses komoditas dan melakukan reproduksi. Biopolitik memandang bahwa perlu ada satu kekuatan politik dominan agar prediktabilitas tercipta.

Perimbangan kekuatan juga diperumit campur tangan pihak asing. PKI menjalin aliansi dengan komunis Cina.[101] Pada lain pihak, TNI-AD anti komunis

www.setabasri.org

perbankan yang dikelola oleh Bank Indonesia hanya sekadar mampu membiayai meningkatnya defisit anggaran pemerintah. Lihat dalam Kian Wie Thee, Indonesia's Two Deep Economic Crises …, *op.cit.*, p. 51.

[100] Sukarno tidak punya basis partai politik. Sebab itu maka sejak awal 1960an Sukarno berupaya mengendalikan PNI. Akibatnya PNI terpecah menjadi PNI Ali-Surachman dan PNI Osa Maliki. Masyumi jelas menentang politik Sukarno, terutama konsep Nasakom. NU berhasil ia rangkul tetapi pengaruhnya di NU tidak sekuat di PNI. Akhirnya, pilihan Sukarno jatuh pada PKI. Sukarno bukan seorang komunis, tetapi untuk mengimbangi TNI-AD ia terpaksa harus PKI.

[101] Sejak akhir 1964 hingga September 1965 Cina berupaya menjalankan aneka skenario yang mungkin untuk mewujudkan kepentingan mereka di Indonesia. Penerapan aneka skenario ini dimungkinkan dengan hadirnya rezim Sukarno yang cenderung kiri serta PKI yang mendukung politik agresif Sukarno. Cina juga menawarkan sejumlah bantuan militer, termasuk menjanjikan transfer teknologi nuklir, sesuatu yang dibutuhkan Sukarno untuk memperoleh superioritas militer

mencari aliansi dengan AS, yang tengah menerapkan politik pembendungan komunisme (*containtment politics*) di Asia Timur dan Tenggara. Aliansi TNI-AD dan AS menguat seiring menguatnya posisi PKI. Energi Sukarno selaku *alpha male status quo* terkuras hanya untuk melakukan perimbangan ini.

Isu menurunnya kesehatan Sukarno membuat PKI dan TNI-AD semakin berhadapan secara diametral. Keduanya saling menunggu apakah akan menyerang terlebih dahulu ataukah tidak. Akhirnya Aidit dengan memanfaatkan kerja-kerja *Biro Chusus* Pusat dan Daerahnya melakukan semacam "*preemptive action*" yang terwujud dalam G30S/PKI.[102]

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa konsep Nasakom sengaja digagas Sukarno agar PKI tidak berada dalam posisi yang membahayakan dirinya. Dalam sebuah suratnya kepada Groonevelt, Hatta memperingatkan Sukarno, "Saya telah benar-benar mengingatkan ia [Sukarno] tentang bahaya eksperimen ini … tetapi nasihat saya diabaikannya."[103] Bagi Hatta gagasan Marxisme pasti akan bertabrakan dengan gagasan religius.[104]

www.setabasri.org

dalam Konfrontasi dengan Malaysia. Lihat Taomo Zhou, China and the Thirtieth of September Movement. 2014. *Indonesia.* No. 98 (October) pp. 29-58., pp. 57-58.

[102] Aidit berharap G30S yang dilakukan Untung akan diikuti gerakan massa di seluruh daerah basis PKI seperti rentetan "petasan." Spekulasi Aidit hanya sedikit benar (terjadi letusan di Jawa Tengah dan Sumatera Utara), tetapi mayoritas meleset. Lihat John Roosa. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto.* Penerjemah Hersri Setiawan. Cetakan 1. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008.

[103] Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990, h. 607. Dengan mengutip Kahin, Mavis Rose menulis "*Kahin remarked that Hatta never lost his conviction that "Islam could play a progressive socio-economic role, which would present Indonesia with a superior social justice*." Lihat Mavis Rose, Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1987., p. 216.

[104] Dengan Nasakom Sukarno berharap PKI akan berada dalam posisi sinergis dan bertanggung jawab terhadap negara bersama-sama dengan golongan nasionalis dan agama. Namun, Hatta mensinyalir PKI benar-benar memanfaatkan Nasakom untuk membesarkan dirinya sendiri untuk kemudian lepas sama sekali dari kendali Sukarno. Lihat Deliar Noer, *Mohammad …, op. cit.,* h. 607.

Persoalan Sukarno adalah ketidakmampuannya mendominasi aneka hirarki secara efektif. Ia tidak memiliki basis nyata kekuatan politik bagi dominasinya.[105] Sebagai *alpha male* Sukarno lebih mengandalkan karisma personal serta negosiasi politik antar elit. Kendati ia memiliki kedekatan hubungan dengan PKI tetapi partai tersebut tetap menganggap Sukarno hanya sebagai aliansi taktis dalam menghadapi TNI-AD. PKI selalu siap menunggu pelaksanaan janji Pemilu sejak tahun 1959 untuk memperbesar pengaruhnya. Deliar Noer mencatat bahwa di masa Demokrasi Terpimpin, rencana Pemilu terus diproses sejak tahun 1959. Pada tahun 1962 pernah dibentuk sebuah komisi negara untuk merevisi Undang-undang Pemilihan Umum 1953 dengan Idham Chalid sebagai ketua. Namun karena pihak militer kurang menyetujui, maka Pemilu urung dilakukan.[106]

Partai NU kendati relatif dapat mengakomodasi politik Nasakom Sukarno, tetapi tetap bukan loyalis Sukarno. Demikian pula, kendati Sukarno terus berupaya memecah TNI-AD dengan penempatan para *bonding*-nya di sejumlah posisi, tetapi posisi substantif TNI-AD (terutama Siliwangi) tidak pernah bisa menerima unsur PKI.[107] Satu bagian kekuatan politik besar yaitu Islam modern baik di dalam Masyumi maupun ormas-ormasnya secara terang-terangan menyatakan perseberangan sikap politik dengan Sukarno. Kelompok sosialis

www.setabasri.org

[105] Pada masa kekuasaan Sukarno, setiap matra memiliki panglima masing-masing dan setiapnya otonom dalam melakukan operasi maupun personalia. Kelemahan ini kemudian diatasi Soeharto melalui reorganisasi angkatan bersenjata.

[106] Jika Pemilu diselenggarakan pada masa-masa itu maka jelas dua partai yaitu Masyumi dan PSI tidak bisa ikut serta karena mereka telah dibubarkan Sukarno sejak 1960. Noer mencatat bahwa pemerintah – termasuk tentara – mungkin pula menentang penyelenggaraan Pemilu pada masa tersebut karena ada kemungkinan PKI akan besar suaranya. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*. Cetakan II. Bandung: Mizan, 2010, h. 432-433.

[107] Divisi Siliwangi-lah pasukan yang diandalkan Perdana Menteri Hatta untuk menghabisi pasukan pendukung Musso di Madiun dan sekitarnya pada tahun 1948. Untuk menghantam PKI Musson, Divisi Siliwangi melakukan *long march* dari Bandung menuju Madiun.

dalam PSI yang kendati secara kuantitas massa kecil tetapi punya jaringan kuat di kalangan intelektual dan pejabat pemerintahan, juga bersikap sama seperti Masyumi. PNI kendati memiliki kedekatan historis dengan Sukarno, tetapi secara internal terpecah dalam dukungan atas politik Sukarno.

Dalam upaya menegakkan dominasi tunggal maka Sukarno memutuskan mengakhiri peran partai politik dengan menggagas konsep golongan fungsional.[108] Pada satu sisi Sukarno berupaya melakukan kohesi politik di MPRS, DPR-GR, dan eksekutif. Namun, pada lain sisi upaya tersebut membuat fokus kerja kabinet menjadi terabaikan akibat paradoks kepentingan politik.

Cara Sukarno paling maksimal dalam membentuk kohesi politik adalah melakukan pergeseran individu "di sana dan di sini," seperti mengganti Suryadarma (Marsekal) panglima TNI-AU yang beraliran kiri (juga simpatisan PKI) dengan Omar Dhani yang lebih Sukarnois ketimbang simpatisan PKI. Hal ini Sukarno lakukan untuk memoderasi sikap keras TNI-AD atas TNI-AU. Namun, Sukarno pun melakukan *blunder* politik dengan mengangkat Omar Dhani yang terhitung perwira yunior selaku Panglima Kolaga, dan malah menempatkan perwira senior seperti Soeharto hanya sebagai deputinya. Atas masalah ini Soeharto mengajukan surat resmi untuk mundur dari TNI-AD.

Pergeseran elemen pendukung Sukarno, TNI-AD anti komunis, serta simpatisan PKI di masa Demokrasi Terpimpin memperlihatkan kecenderungan aliansi-koalisi dalam kelompok primata besar dalam habitat aslinya. Individu dominan berupaya menempatkan pengikutnya pada satu posisi, sementara pihak

[108] Upaya ini kelak di kemudian hari juga dipraktikkan oleh Soeharto.

www.setabasri.org

lawan pun melakukan hal serupa. Untuk mengatasi terpecahnya aneka kekuatan politik domestik, Sukarno mencoba untuk membentuk musuh bersama (*common enemy*) yaitu Nekolim melalui kampanye militer Konfrontasi Malaysia.

Hubungan kurang harmonis Sukarno dengan pihak Barat mendorong berkurangnya suplai bahan kebutuhan pokok. Harga-harga komoditas sulit diprediksi karena kerap mengalami kenaikan tanpa negara mampu melakukan pengendalian efektif. Akibatnya muncul keresahan spesies, dan ini terutama diartikulasikan kelompok pelajar dan mahasiswa. Runtuhnya suatu rezim paling banyak dipicu oleh kekeliruan mereka atas pembangunan ekonomi.

Dalam krisis ekonomi, PKI mengambil kesempatan memperbesar dirinya dengan menghasut kalangan miskin kota (urban) dan pedesaan (rural) untuk mengikuti agenda-agenda populis berupa *aksi sefihak,* pemberantasan Tujuh Setan Desa, dan Ganyang KABIR. Sebaliknya para pemilik tanah merasa terancam eksistensinya oleh *landreform* yang dimanfaatkan PKI melalui penafsiran sepihak atas Undang-undang Pokok Agraria.[109]

Berbeda dengan Sukarno, TNI-AD justru mengalami penguatan, di antaranya akibat anggaran kampanye perang dan pengelolaan perusahaan milik negara. Jika jumlah pelayan publik dalam birokrasi sipil negara menurun, maka jumlah tentara dan polisi justru meningkat.[110] Dengan demikian, saat Sukarno

www.setabasri.org

[109] Akuisisi tanah garapan, baik milik sipil maupun perusahaan negara yang diadministrasi oleh para perwira TNI-AD terus dilakukan oleh PKI, dan ini dilakukan tanpa melalui keputusan Pengadilan Landreform, yang menurut Selo Soemardjan terkesan kurang siap mengantisipasi UUPA yang disusun pemerintah dengan mana PKI merupakan pendukung utamanya. Lihat Selo Soemardjan. Landreform in Indonesia. 1962. Asian Survey. Vol. 1, No. 12 (Feb.) pp. 23-30, p. 30.
[110] Antara awal 1950an hingga pertengahan 1960an, jumlah tentara dan polisi meningkat dari sekitar 300.000 menjadi sekitar 505.000. Lihat Marcus Mietzner, Authoritarian …, *op. cit.,* p. 3.

mengalami deklanasi kekuasaan akibat ketidakmampuannya mendominasi kekuatan politik aktual, TNI-AD malah melakukan konsolidasi kekuasaan dan Soeharto adalah bagian darinya. Inilah yang membuat Sukarno cenderung tidak mampu memberikan perlawanan maksimal saat menghadapi ancaman dan unjuk kekuatan Soeharto.[111]

B. Soeharto dan *Bonding*-nya

Selepas lulus sekolah tinggi pertama (*schakelschool*) tahun 1939 dalam usia 17 tahun, Soeharto menjadi asisten pegawai sebuah bank desa (*volksbank*). Setelah berhenti, ia mencari pekerjaan di Solo dan karena tidak kunjung memperoleh kemudian kembali ke Wuryantoro untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Seperti banyak orang pedesaan Jawa saat itu, ia kemudian mendaftarkan diri ke KNIL dan mulai berdinas sejak 1 Juni 1940 hingga kedatangan Jepang. Setelah Belanda dikalahkan, tanggal 1 November 1942 Soeharto lekas berpindah pekerjaan dengan mendaftarkan diri ke kepolisian Jepang. Ia pun diterima sebagai asisten kepala kepolisian Yogyakarta berpangkat *keibuho* (asisten inspektur).[112] Atas saran atasannya, Soeharto bergabung dengan Pembela Tanah Air (Peta) yang dibentuk Oktober 1943. Setelah Jepang kalah, Soeharto bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Republik tanggal 5 Oktober 1945. Di dalam BKR ia punya kedekatan pandangan dengan Sudirman.[113]

www.setabasri.org

[111] Marcus Mietzner, Authoritarian …, *op. cit.,* p. 3.
[112] Dalam posisinya tersebut Soeharto lebih banyak menangani urusan politik ketimbang kriminal.
[113] O. G. Roeder, *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*. Second Revised Edition. Djakarta: Gunung Agung, 1970. Lihat *Biographical Fact Sheet.* Sudirman cenderung kurang simpatik atas tindakan politisi sipil yang dinilai akomodatif terhadap Belanda.

Perjalanan karir ini menggambarkan kecenderungan pragmatis Soeharto untuk bertahan hidup.[114] Namun, apa yang dilakukan Soeharto bukan pula hal di luar kewajaran karena umum pula dilakukan oleh mayoritas penduduk pedesaan Jawa yang sehari-hari bergulat dengan kemiskinan.

Kecenderungan Soeharto dalam membentuk *bonding* pun ditunjukkan sejak masa revolusi fisik. Dengan para *bonding*-nya, Soeharto biasa merencanakan serangan atas target-target yang telah ditetapkan. Satu fase yang menggambarkan kecenderungannya ini adalah saat ia memimpin Divisi Diponegoro. Saat itu Soeharto membangun ikatan dengan para perwira seperti Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Soedjono Hoemardhani, dalam mengelola wilayah.[115] Yusuf Wanandi menjelaskan bahwa saat memimpin divisi ini, Soeharto dan para *bonding*-nya dijuluki sebagai "Tujuh Samurai."[116]

Peran Yoga setidaknya diawali saat menjadi *king makers* Soeharto dalam menjadikannya panglima divisi.[117] Posisi Yoga adalah staf intelijen Bachrun,

www.setabasri.org

[114] Tidak hanya Soeharto, banyak perwira lain semisal Achmad Yani juga berkarir militer di tiga negara berbeda. Yani berkarir hingga pangkat sersan di KNIL. Lihat David Jenkins, Soeharto and the Japanese Occupation. 2009. *Indonesia.* No. 88 (Oct.) pp. 1-103, p. 67.

[115] Wilayah dalam naungan teritorium IV (Diponegoro) adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang keduanya sekaligus basis PKI terkuat. Dari divisi ini pula soliditas ikatan (*bonding*) Soeharto dengan perwira anti komunis terjadi.

[116] Ke-"tujuh samurai" tersebut adalah: (1) Soeharto selaku Panglima Divisi, (2) Yoga Soegama selaku asisten intelijen, (3) Ali Moertopo selaku selaku deputi asisten teritorial, (4) Soedjono Hoemardhani selaku asisten keuangan, dan (5) Munadi selaku asisten keuangan. Munadi kelak menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagai Kepala Komando Kota Semarang. Dua lainnya kemungkinan adalah Darjatmo dan Suryosumpeno. Lihat Yusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Penerjemah Endi Bayuni. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018, h. 100. Dua "samurai" lain kiranya adalah Surjo dan Hernomo.

[117] Kecenderungan Yoga Sugama mirip dengan Zulkifli Lubis yaitu perwira intelijen. Tahun 1942-1945 ia menempuh pendidikan intelijen militer di *Rikugun Shikan Gakko*, Tokyo. Tahun 1945 ia menjadi *Allied Military Translator* di *Criminal Investigation Division,* Tokyo. Tahun 1948-49 ia menjadi Asisten I Staf Teritorium Militer di Banyumas. Tahun 1949-50 menjadi Asisten I Intelijen Brigade Gunung Jati. Tahun 1952-53 mengikuti kursus intelijen di Maresfield, Inggris (MI-6). Tahun 1954-55 belajar di SSKAD. Tahun 1955-59 berdinas di Divisi Diponegoro (1 Maret 1956 Soeharto baru menjadi pangdam). Tahun 1959-60 menjadi Komandan RTP II/Diponegoro di Sumatera Barat. Tahun 1962 tersingkir oleh klik Pranoto di Divisi Diponegoro. Tahun 1962-65

Panglima Divisi sebelum Soeharto. Yoga mengetahui bahwa Bachrun akan digantikan oleh Bambang Supeno yang masuk lingkaran Zulkifli Lubis.[118] Yoga mengenal Lubis, tetapi sekaligus memahami rencana jangka panjangnya. Yoga tidak menginginkan Divisi Diponegoro masuk pusaran konflik politik nasional, sebab itu ia menimbang figur Soeharto lebih pantas menggantikan Bachrun ketimbang Bambang.

Atas inisiatifnya sendiri Yoga kemudian mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwira Diponegoro termasuk Pranoto Reksosamudro dan Ali Moertopo di Kopeng, Jawa Tengah.[119] Pertemuan Kopeng menyepakati bahwa para perwira Diponegoro menolak penunjukan Bambang oleh pusat. Surat pernyataan kemudian disusun dan ditandatangani seorang perwira senior yaitu Soehardi (Kepala Kesehatan Teritorium IV). Yoga dan Suryo Sumpeno kemudian ditugaskan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada pimpinan TNI-AD di Jakarta. Tekanan Yoga akhirnya membatalkan penunjukan Bambang Supeno, dan Soeharto pun diangkat sebagai Panglima Divisi.[120]

www.setabasri.org

menjadi atase militer di Yugoslavia. Tahun 1965-66 menjadi Asisten I Intelijen Kostrad. Tahun 1966-67 Kepala Deputi (G-I)/Intelijen Koti. Tahun 1966 sekaligus menjadi Direktur Strategis Intelijen, Hankam. Tahun 1967 menjadi staf pribadi Soeharto bidang intelijen dan keamanan. Tahun 1968 menjadi Kepala Deputi Bakin. Tahun 1968-69 menjadi Kepala Bakin. Tahun 1970 sekaligus menjadi kepala G-I/Intelijen Hankam dan Asisten I Intelijen Kopkamtib. Tahun 1970-71 Kepala Pusintelstrat Hankam. Lihat Richard Tanter, Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989, with Special Reference to South Korea, 1961-1989. *Doctoral Dissertation*. Monash University, February 1991. Appendix 1, p. 353-4.

[118] Hal ini ditambah pula informasi yang dimiliki Yoga bahwa nama Bambang telah sampai ke Jakarta dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Sukarno. Menurut pandangan pribadi Yoga, Bambang termasuk ke dalam lingkaran dekat Zulkifli Lubis, tokoh intelijen militer cemerlang didikan Jepang. Lihat David Jenkins, Soeharto and the Japanese …, *op. cit.,* p. 68.

[119] Inti pertemuan adalah membicarakan aneka prediksi apabila Bambang Supeno menjadi panglima divisi. Dalam pertemuan hadir sejumlah komandan resimen seperti Sudarmo Djojowiguno, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto Reksosamudro, Suwito Haryoko (Asisten II), Suwarno (Asisten IV), dan Munadi (Asisten V). B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, *Memori Jenderal Yoga*. Cetakan 1. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1990., h. 80.

[120] Pangkatnya kemudian dinaikkan oleh Soeharto menjadi Kolonel.

Saat memimpin Divisi Diponegoro, hubungan antara Soeharto dengan Yoga, Ali Moertopo,[121] dan kemudian Soedjono Hoemardhani menjadi erat. Sejumlah konsep teritorial pun dikembangkan dalam kepemimpinan Soeharto. Misalnya, gagasan Ali untuk membentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) yang dikenal sebagai *Tonarigumi* (sistem pembagian unit masyarakat di Jepang).[122] Atas usul dari Yoga maka Soeharto pun mempekerjakan Ali Moertopo sebagai perwira staf di Divisi Diponegoro kendati pengalaman Ali sendiri adalah perwira tempur.[123]

Sebagai Panglima Divisi Diponegoro, Soeharto membentuk Yayasan Pembinaan Teritorium Empat (YPTE), yang salah satu unit kegiatannya adalah koperasi. Dalam YPTE Soeharto berlatih bagaimana mengelola aspek politik dan ekonomi sebuah teritorial. Untuk menghasilkan uang, Soeharto mengandalkan keahlian Soedjono Hoemardhani guna menjalankan bisnis YPTE dan menjalin

www.setabasri.org

[121] Ali pernah menjadi komandan kompi Bn 431/Banteng Raiders di bawah pimpinan Achmad Yani lalu menjadi kepala staf Yoga di RTP-II/Diponegoro di Sumatera Barat dalam pemadaman PRRI/Permesta. Antara 1959-60 menjadi Asisten V Teritorial Kodam IV Diponegoro. Saat Soeharto memimpin Caduad, Ali dipanggil Soeharto untuk menjadi stafnya. Tahun 1961 Ali memimpin operasi khusus (Opsus) intelijen di Irian Barat dengan Benny Murdani sebagai salah satu anak buahnya. Tahun 1963 menjadi Asisten 1/Intelijen Panglima Mandala. Tahun 1966 menjadi asisten pribadi Soeharto. Tanter menulis mengenai Ali: "Datang ke Angkatan Darat melalui Masyumi Hizbullah … dan bukan … melalui Peta. Beberapa ingin tahu tentang perannya selama revolusi. Pemecah masalah, pembuat skema, dan manipulator. Gaya kepemimpinan yang sangat pribadi yang efektif dalam menarik kelompok yang sangat beragam di Opsus dan Bakin. Karir sejajar dengan Sukendro." Lihat Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.* Lihat Appendix p. 336-7.

[122] B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori …, *op. cit.,* h. 82-83. Tahun-tahun Soeharto menjabat Panglima Divisi Diponegoro adalah era darurat negara di mana pejabat militer (terutama TNI-AD) banyak menjalankan administrasi pemerintahan daerah.

[123] Ada kemungkinan Soeharto mengetahui Ali Moertopo, saat Ali menjadi salah satu komandan di Banteng Raiders (batalion pimpinan Achmad Yani) memadamkan pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah. Saat itu Soeharto masih komandan resimen. Rekrutmen Ali Moertopo sebagai staf Panglima Divisi menimbulkan ketidaksenangan. Ali adalah prajurit tempur, sehingga kemampuannya dalam staf dipandang remeh. Selain itu terdapat pula program Soeharto untuk menghidupkan kembali Waduk Rawa Pening sebagai sumber listrik. Lihat B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori …, *op. cit.,* h. 84.

kerja sama dengan pengusaha, terutama dari kalangan Cina semisal Bob Hasan (anak angkat Gatot Subroto).

Skandal yang kemudian melanda YPTE, dengan mana Soeharto dituduh korupsi, dipicu oleh isu umum yang melanda para perwira TNI-AD dalam bisnis mereka dengan swasta.[124] Terbuka kemungkinan bahwa skandal YTPE tersebut dipicu oleh intrik Pranoto Reksosamudro, sehingga Soeharto ditarik ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) dan Pranoto menggantikan posisinya. Setelah menjadi Pangdam, Pranoto mengucilkan kelompok Soeharto dan Yoga memprotes pengucilan serta menuduh Pranoto berkhianat.[125]

Soeharto mulai belajar di SSKAD Bandung sejak tanggal 1 November 1959 dan mulai menjalin kontak tidak hanya dengan sejumlah perwira TNI-AD anti komunis melainkan juga anti Sukarno. Salah satu instruktur SSKAD yang berpengaruh atasnya adalah Suwarto (Kolonel) yang darinya Soeharto mengetahui terjadinya kontak-kontak antara TNI-AD anti komunis dengan pihak AS dalam persiapan pemerintahan pasca Sukarno (*contigency plan*).[126] Melalui

www.setabasri.org

[124] YPTE berdiri Juli 1957 saat Soeharto menjadi Panglima Diponegoro. Dapat dikatakan YPTE adalah prototipe Soeharto dalam membangun ekonomi Orde Baru. Lihat R.E. Elson, *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Penerjemah: Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005., h. 131-137.

[125] Pranoto termasuk salah satu perwira Diponegoro yang ikut pertemuan Kopeng.

[126]Amerika Serikat dalam masa-masa ini melihat diri mereka berhubungan dengan dua "pemerintahan" yaitu Sukarno di Kabinet Dwikora dan militer. TNI-AD memersepsi Amerika Serikat terdiri atas tiga *"government*" yaitu Pentagon, CIA, dan *State Department.* Hubungan TNI-AD dengan Pentagon diasosiasikan berdasar "*on trust, respect, and a network of deep personal friendship.*" Dengan *State Department* tidak begitu luas sebab dianggap menghalangi tujuan nasional dasar Indonesia. Hubungan dengan CIA belum dideklasifikasi. Lihat Ang Cheng Guan. United States-Indonesia Relations: The 1965 Coup and After. *War & Society*. 2003. 21:1 pp. 119-136. p. 131.

Suwarto pula Soeharto berkenalan dengan teknokrat ekonomi dominan Indonesia.[127]

Harry Tjan Silalahi menulis bahwa Jenderal Nasution pernah menitipkan Soeharto kepada Suwarto dengan istilah "disapih" dengan cara "disekolahkan."[128] Nasution meminta Suwarto memberikan perhatian khusus kepada Soeharto karena pendidikan formalnya cukup sederhana.[129] Sebab itu dapat dikatakan bahwa masa-masa Soeharto di SSKAD Bandung menjadi berkah tersendiri baginya, sebab ia diberi kesempatan untuk mempelajari strategi.[130]

Kendati telah masuk jajaran perwira senior, dalam konfigurasi perwira tinggi saat itu Soeharto tetap merupakan seorang perwira minor. Akibatnya ia lebih banyak ditugaskan di lapangan komando ketimbang staf yang memiliki akses pada proses pembuatan keputusan dalam tubuh matra. Bahkan bekas kepala staf TNI-AD Jenderal TB. Simatupang pernah menyebutnya sebagai "bukan bagian lingkaran intelektual di angkatan bersenjata" [*not part of the intellectual circle in the armed forces*].[131]

www.setabasri.org

[127] Misalnya Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, Emil Salim, Saleh Afiff, dan Johannes Baptista Sumarlin. Lihat Yusuf Wanandi, *Menyibak Tabir ...., op. cit.,* h.. 100-101.
[128] J.B. Soedarmanta. Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi. Cetakan 1. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2004, h. 168.
[129] *ibid.,* h. 169. Ternyata Soeharto mampu menjadi lulusan terbaik pada angkatannya, hanya kalah dari Sutoyo (kawan Soeharto di SSKAD, salah seorang perwira yang di kemudian hari menjadi korban G30S/PKI).
[130] Penempatan Soeharto ke SSKAD atas pengaruh Jenderal Gatot Subroto (ayah angkat Bob Hasan), mantan atasan Soeharto di Yogyakarta saat revolusi fisik. Anak angkat Gator lalu menjadi rekan bisnis Soeharto di YPTE.
[131] Michael R.J.Vatikiotis, *The Rise and Fall of the New Order*. Third Edition. London and New York: Routledge, 1998. p. 17.

Setelah lulus dari SSKAD, Soeharto menjadi Asisten I Kasad (Nasution), Panglima Caduad, dan Panglima Pertahanan Udara TNI-AD.[132] Untuk membantu pelaksanaan tugasnya Soeharto memanggil Ali Moertopo dan menjadikannya Deputi I.[133] Kelak pada saat Soeharto ditugaskan Yani melakukan moderasi ketegangan dengan pihak Malaysia, ia membentuk Operasi Khusus (Opsus).[134] Selain Ali, Soeharto juga memanggil Yoga menjadi kepala intelijennya (Asisten I Kostrad).[135] Achmad Yani juga turut memperhatikan karir Soeharto dengan memberinya sejumlah kesempatan mendampingi Nasution selama bulan Juni 1961 dalam kunjungan luar negeri untuk mencari bantuan senjata[136] dalam rangka kampanye militer Indonesia di Irian Barat.[137]

www.srisabasri.org

[132] O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* p. 205. Pada 18 Desember 1960 Soeharto ditunjuk menjadi ketua komite *ad hoc* untuk *retooling* departemen AD. Pada tanggal 1 Januari 1960 pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal.

[133] R. E. Elson, Suharto …, *op. cit.,* h. 158.

[134] Operasi Khusus atau OPSUS dapat dinyatakan sebagai "sayap kanan" dari Badan Pusat Intelijen (BPI) yang diketuai Soebandrio. OPSUS saat kelahirannya kerap membayangi kerja-kerja BPI. OPSUS dipimpin oleh Ali Moertopo yang merupakan *bonding* Soeharto. OPSUS memiliki spesialisasi dalam melakukan manipulasi atas aneka kelompok politik. Lihat Peter Britton, Indonesia's Neo-Colonial Armed Forces. 1975. *Bulletin of Concerned Asian Scholars,* 7:3, pp. 14-21, p. 15.

[135] R. E. Elson, Suharto …, *op. cit.,* h. 187. Dengan hadirnya Yoga, Opsus menjadi semakin efektif. Yoga adalah alumni yang cukup cemerlang dalam latihan kemiliteran oleh Jepang. Spesialisasinya adalah intelijen.

[136] Hamish McDonald. *Suharto's Indonesia*. Victoria: Fontana Books, 1980, p. 35. Hal ini dipicu kenyataan bahwa bulan Oktober 1960 Presiden Eisenhower menolak permintaan bantuan persenjataan Sukarno, dan sebagai balasannya maka pada bulan Januari 1961 Indonesia menyepakati pasokan militer dari Moskow senilai 400 juta dolar AS dalam bentuk persenjataan hasil kunjungan Nasution.

[137] R. E. Elson, Suharto …, *op. cit.,* h. 161. Nasution menyatakan kunjungannya ke Moskwa adalah bagian dari kebijakan "konfrontasi." Van der Kroef menulis "Perjalanan Nasution di Moskow terutama bernilai politik, sebagai alat untuk menekan AS agar meninggalkan sikap partisannya dalam sengketa Irian Barat." Lihat Justus M. van der Kroef, Nasution, Sukarno and the West New Guinea Dispute. *Asian Survey*. 1961. Vol. 1, No. 6 (Aug.) pp. 20-24., p. 21. Dalam upaya melengkapi persenjataan Indonesia, pada kurun 1958-1959 Nasution menyepakati pembelian pesawat tempur di antaranya Mig-15 trainers, Mig-17 fighters, IL-28 bombers, dan IL-14 transports. Lihat Barry Turner, Nasution: Total People's Resistance and Organicist Thinking in Indonesia. *Doctoral Dissertation*. Swinburne University of Technology Melbourne, December 2005., p. 303. Sebagai upaya mengimbangi, AS lalu melakukan kesepakatan pembelian 50 pesawat tempur dan 10 pesawat pengangkut.

Saat Soeharto menjadi Deputi I Nasution, Alamsjah Ratu Perwiranegara (atas rekomendasi Ibnu Sutowo) kemudian ikut bergabung menjadi staf Soeharto di MBAD. Ibnu Sutowo adalah perwira dengan kecenderungan bisnis, yang oleh Sukarno diserahi tugas mengelola Permina. Sutowo pernah menjadi Pangdam Sriwijaya, dan spesialisasi Alamsjah juga adalah bidang keuangan sekaligus pengusaha di Sumatera Selatan. Dengan hadirnya Alamsjah maka *bonding* Soeharto di bidang perekonomian bertambah. Jenkins menulis bahwa sejak tahun 1960 Alamsjah telah menjadi rekan akrab Soeharto di MBAD.[138]

Sebelum pada tanggal 23 Januari 1962 Soeharto ditunjuk Sukarno sebagai panglima Mandala, ia terlebih dahulu dipercaya Jenderal Nasution sebagai ketua pembentukan Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad).[139] Seperti kebiasaannya dahulu, di Caduad ini pun Soeharto membentuk "tim kecil."[140] Pasukan Caduad diambil dari unit terkuat dari tiga Kodam Jawa (Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya) yang kemudian dilatih kemampuan para komando untuk tugas mendadak. Unit RPKAD[141] berada di bawah komando Caduad, selain

www.setabasri.org

[138] David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesian Project, 1984., p. 22. Alamsjah kelak menjadi koordinator Staf Pribadi (Spri) Soeharto sejak 1966 dan tahun 1968 menjadi Menteri Sekretaris Negara.

[139] Caduad adalah gagasan Nasution, yang berubah nama menjadi Kostrad tanggal 15 Agustus 1963. Caduad dimaksudkan sebagai pasukan dengan mobilitas tinggi dan siap ditempatkan di mana saja. Tanggal 6 Maret 1961 Korps Tentara I/Tjadangan Umum TNI-AD (Korra/Tjaduad) dibentuk dengan Brigjen Soeharto selaku panglima. Tanggal 15 Agustus 1963 Tjaduad dilebur menjadi Komando Tjadangan Strategis TNI-AD (KostradLihat Petrik Matanasi, "Kostrad: Saksi Kecemerlangan Soeharto dan Redupnya Prabowo." [website] Diakses dari: https://tirto.id/kostrad-saksi-kecemerlangan-soeharto-dan-redupnya-prabowo-cFzS Tanggal 14 Mei 2021 pukul 12:32.

[140] Mereka terdiri atas Achmad Wiranatakusumah sebagai Kepala Staf, Amir Machmud sebagai Kepala Staf, Rukman sebagai Panglima Divisi II/Korra I, Munadi, Sruhardoyo, dan Ali Moertopo sebagai Asisten Kepala Staf, termasuk pula Hernomo. Saat *bonding* Caduad terbentuk, Yoga masih bertugas di Yugoslavia.

[141] Tanggal 16 April 1952 melalui Instruksi Panglima Tentara Teritorium III No. 55/Instr/PDS/52 terbentuk Kesatuan Komando Teritorium III. Komandan pertamanya Mayor Moch. Idjon Djanbi. Tahun 1952 berubah nama menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD). Tahun 1955 kembali berubah nama menjadi Resimen Para

unit-unit tempur lain seperti Batalion (Bn) 454 Diponegoro, Bn 530 Brawijaya, dan Bn 328 Kujang Siliwangi.[142]

Sejumlah prestasi tempur Soeharto di masa revolusi fisik mendorong mobilitas vertikalnya.[143] Ia memperlihatkan bakat sebagai *field officer* yang baik dan dari sinilah kemungkinan terbentuk sifat Otoritariannya. Sebelum keputusan diambil, ia biasa bermusyawarah dengan anak buah yang berhubungan dekat dengannya. Namun, setelah mendengarkan seluruh masukan Soeharto membuat keputusan mutlak yang mengikat harus dipatuhi. Selama revolusi fisik, pasukan Soeharto dianggap "mimpi buruk" bagi tentara Belanda.[144] *Individual personalities* inilah yang membuatnya ditunjuk oleh Sukarno sebagai panglima operasional dalam Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, kampanye militer terbesar Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan.[145]

www.setabasri.org

Komando Angkatan Darat (RPKAD). Tahun 1966 berubah namanya menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI-AD (Puspasus TNI-AD). Tahun 1971 berubah kembali namanya menjadi Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha). Akhirnya pada tahun 1985 berubah nama kembali menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) hingga saat ini. Lihat Kopassus, "Sejarah Singkat Komando Pasukan Khusus." [Website] Diakses dari < https://kopassus.mil.id/history/> Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 14:52.

[142] R. E. Elson, Suharto … *op. cit.*, h. 160. Unit-unit ini kemudian memiliki peran dalam 1 Oktober 1965 dan epilognya. Roosa menyatakan bahwa Bn 328 adalah satu-satunya batalion yang bisa langsung digunakan Soeharto untuk memukul balik gerakan Untung. Lihat John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Penerjemah Hersri Setiawan. Jakarta: Institut Sejarah Indonesia & Hasta Mitra, 2008. h. 316.

[143] Misalnya keterlibatan Soeharto dalam peristiwa 3 Juli 1946 saat ia menerima perintah Sukarno untuk menangkap Sudarsono, atasan militernya, dalam kasus penculikan Sutan Sjahrir. Lihat O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* p. 110-112. Juga kepemimpinan lapangan Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949. Lihat juga Barry Turner, A. H. Nasution and Indonesia's Elites: 'People's Resistance in the War of Independence and Postwar Politics. Lanham-Boulder-New York-London: Lexington Books, 2018., p. 107.

[144] Ini pula alasan di balik penunjukan dirinya sebagai Panglima Mandala. Prestasi tempurnya di era revolusi fisik serta kemampuan analitisnya dalam mempersiapkan suatu pertempuran, ditambah kecenderungan apolitis, membuat Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Mandala.

[145] Dalam kampanye ini Soeharto membawahi 42 ribu pasukan gabungan antar matra. Dalam operasi ini pula Soeharto mulai dekat dengan Sudomo dan Benny Moerdani.

Sikap tegas Indonesia atas Irian Barat telah Soeharto pelajari dari Jenderal Nasution bahwa Indonesia tidak ragu menggunakan serangan militer.[146] Mengenai "tim kecil" Soeharto dalam Operasi Trikora, Hamish McDonald menulis:

> *As head of the Strategic Reserve and of the West Irian campaign Suharto gathered a wide circle of military acquaintances into a tight military clique. Based on old Diponegoro Division links, it extended into other units of the army and even into the other services, particularly the navy. A navy colonel, Sudomo, became Suharto's deputy … A young commando officer, Benny Murdani … became one of Suharto's confidants … Ali Moertopo was put in charge of testing a new "combat intelligence' unit … which was evolve into a body notorious for political manipulation under the Suharto government: Special Operations, or Opsus*.[147]
>
> [Sebagai panglima Caduad dan kampanye Irian Barat, Soeharto mengumpulkan luasnya pengikut ke dalam lingkaran klik militer yang erat. Berdasarkan jaringan lamanya di Divisi Diponegoro, ia lalu meluaskannya ke satuan-satuan lain AD dan bahkan sampai dinas-dinas lain, khususnya angkatan laut. Seorang kolonel angkatan laut, Sudomo, menjadi wakil Soeharto… Seorang perwira muda komando, Benny Murdani… menjadi salah satu orang kepercayaan Soeharto… Ali Moertopo ditugaskan untuk menguji sebuah unit "intelijen tempur" baru… yang kemudian berkembang menjadi badan yang terkenal digunakan sebagai alat manipulasi politik di bawah pemerintahan Suharto: Operasi Khusus, atau Opsus.]

Dalam Operasi Trikora, *bonding* Soeharto terdiri atas Sudomo, Ali Moertopo, Rukman, Untung (mantan bawahan Soeharto di Solo, sebagai komandan gerilya), dan Benny Murdani (pengikut Ali Moertopo, sebagai prajurit

www.sejarah.org

[146] Sebelumnya pada Februari 1960 Nasution mendeklarasikan bahwa Indonesia bersiap untuk "perang teritorial" untuk memperoleh Irian Barat. Bulan berikutnya (Agustus) kembali Nasution menekankan "… klaim Irian Barat harus diselesaikan oleh Irian Barat sendiri." Lihat Van der Kroef, Nasution … , *op. cit.*, p. 20.

[147] Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia*. Victoria: Fontana Books, 1980, p. 35-36

gerilya).[148] Operasi Trikora cenderung padu, kendati di saat-saat akhir kemenangan Indonesia lebih ditentukan tekanan politik AS atas Belanda.[149]

Di dalam konteks Konfrontasi Malaysia, tuntutan PKI yang tegas ditolak oleh Yani adalah pembentukan Angkatan Kelima.[150] Inilah faktor kunci konflik Yani dengan Sukarno.[151] Di dalam Konfrontasi Malaysia pula, maka pada 1 Januari 1965 Sukarno menunjuk Soeharto sebagai Wakil Panglima Kolaga dengan Omar Dhani selaku Panglima.[152] Penunjukan dirinya sebagai Wakil Panglima inilah yang memicu Soeharto mengajukan surat pengunduran diri dari TNI-AD kepada Jenderal Nasution per bulan Mei 1965.[153]

www.sejarahbasri.org

[148] Sudomo dan Benny Murdani kelak menjadi *bonding* Soeharto setelah pamor Ali Moertopo meredup pasca konfliknya dengan Sumitro dalam Peristiwa Malari 1974.

[149] R. E. Elson, Suharto …., *op. cit.*, h. 167. Intelijen Belanda mungkin telah mendengar informasi ini dan oleh sebab itu memilih untuk meninggalkan Irian Barat. Kemungkinan lainnya, AS memprediksi apabila AD Indonesia yang anti komunis (Nasution itu anti komunis) habis-habisan menggempur Belanda, *resources* militer mereka tidak akan cukup menghadapi kemungkinan ekspansi komunis PKI yang didukung oleh Cina. Soeharto sendiri menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan serangan besar-besaran "sekali pukul" yang bisa berujung dua akibat: kemenangan atau kekalahan total Indonesia. Lihat O.G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* p. 136-38.

[150] Awal usulan mempersenjatai tani datang dari pimpinan BTI yaitu Asmu. Peking meyakinkan Sukarno untuk membangun Angkatan Kelima dan menawarkan bantuan militer pada Indonesia. Sejak 1963 dan 1964 Cina menggelar pertemuan untuk mengadakan revolusi di Asia Tenggara. Akhir September 1963, Zhou Enlai berangkat ke Conghua (provinsi Guangdong) bertemu dengan pimpinan komunis Indonesia (DN Aidit), Vietnam (Ho Chi Minh, dan Laos. Inti pertemuan, Zhou Enlai meyakinkan kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah perjuangan anti imperialis. Lihat Taomo Zhou, China and the Thirtienth of September Movement. 2014. *Indonesia*. No. 98 (October) pp. 29-58. p. 33. Lihat juga di sumber yang sama bahwa pada Bulan Februari 1965, Subandrio diinformasikan oleh Yao Zhongming (dubes Cina untuk Indonesia) bahwa Sukarno setuju atas senjata ringan yang ditawarkan Cina. Juga pada akhir Juni komodor Andoko yang menemani kesepakatan Sukarno menyatakan Angkatan Udara siap melakukan militerisasi rakyat di sekeliling Lanud Halim sepanjang 50 kilometer.

[151] Sukarno bahkan mulai berpikir mengganti Yani dengan perwira lain yang lebih moderat atas usulan ini. Dengan demikian tidak mengherankan apabila Sukarno menunjuk Pronoto Reksosamudro sebagai *caretaker* Yani, bukan Soeharto.

[152] Penunjukan Omar Dhani, Pangau selaku panglima konfrontasi mungkin mengindikasikan kecurigaan Sukarno bahwa TNI-AD setengah hati mendukung proyeknya.

[153] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 47-48. Terdapat kemungkinan Soeharto merasa tersinggung karena hanya menjadi wakil dari Omar Dhani yang relatif yunior. Surat pengunduran Soeharto berhasil ditahan oleh Soedjono Hoemardhani sehingga tidak jatuh ke tangan Nasution.

Dalam urusan konfrontasi, Soeharto memerlukan dukungan intelijen andal dan sebab itu ia memanggil pulang Yoga Sugama. Ali Moertopo menggunakan Opsus (entitas operasi intelijen bekas Operasi Trikora) untuk membangun kontak bawah tanah dengan para pimpinan Malaysia untuk menyatakan bahwa TNI-AD cenderung mencari solusi non senjata.

Sejak tanggal 23 Juni 1962 Achmad Yani menggantikan Nasution sebagai Menpangad. Jika dalam perebutan Irian Barat TNI-AD relatif bulat di belakang Sukarno, maka dalam Konfrontasi Malaysia terjadi perpecahan antara Nasution dan Yani.[154] Yani menyikapi Konfrontasi Malaysia dengan lebih politis, sementara Nasution lebih profesional.[155] Soeharto melalui Opsus Ali Moertopo kemudian merancang "penggembosan" konfrontasi.

Melalui Ali Moertopo, Soeharto menghubungi sejumlah perwira yang memiliki rekanan bisnis di Malaysia untuk menjalin kontak rahasia dengan pejabat penting Malaysia.[156] Hasil operasi Opsus cukup memuaskan karena Konfrontasi Malaysia seperti "berjalan di tempat" tanpa indikasi kemenangan

www.setabasri.org

[154] Yani memandang Konfrontasi Malaysia adalah dampak politik perimbangan kekuatan internal Indonesia antara TNI-AD, Sukarno, dan PKI. Menurut Nasution, Yani kurang menaruh perhatian pada prinsip yang mendasari konfrontasi (hak rakyat Serawak, Sabah, dan Brunei/Kalimantan Utara untuk menentukan nasib sendiri) ketimbang keuntungan politik dan persenjataan. Dalam konteks Konfrontrasi Malaysia, Crouch menyebut Nasution lebih *hawkish* dengan menyarankan Koti membeli rudal jelajah 40 km untuk ditempatkan di dekat Singapura sebagai intimidasi militer. Harold Crouch, Army and …, *op. cit.,* p. 59-60.

[155] Contohnya dengan langsung menggalang kerja sama dengan A.M. Azahari (pimpinan pemberontak Brunei) yang ia telah lama kenal dan mendapat simpatinya. Kontak dengan AM Azahari dilakukan lewat bekas kepala intelijen Nasution, A.E.J. Magenda (Kolonel). Selain itu, Nasution juga membangun kontak dengan pemberontak di Serawak sejak Februari 1963 lewat pengaruh komandan Kalimantan, Hassan Basri (Kolonel). Lihat *ibid.,* p. 60.

[156] Saluran komunikasi yang digunakan adalah orang-orang yang terlibat PRRI/Permesta seperti Des Alwi, Jerry Sumendap, Welly Pesik, dan Daan Mogot. Lihat Bonnie Triyana, "Taktik Cerdik Misi Diplomatik," *Historia*, No. 9, tahun I, 2013, h. 45.

militer Indonesia, kendati TNI-AU sebelumnya telah menerima bantuan pesawat tempur Uni Soviet.[157]

Opsus tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan Soeharto. Opsus memegang peran kunci dalam melancarkan operasi TrikoRA, menggembosi Konfrontasi Malaysia, integrasi Irian Barat ke Indonesia tahun 1969, intervensi kehidupan internal partai politik, negosiasi politik, pemberdayaan Sekber Golkar, manipulasi Pemilu, serta aneka operasi politik lain. Dengan mengutip Lowry, Kingsbury secara khusus menjelaskan Opsus ini sebagai berikut:

> *It was primarily a task-oriented covert political 'fix-it' agency with no set structure. First formed in 1962, as an executive agency of General Suharto's Mandala command for the Irian campaign, it also played a key role in the negotiations to end Konfrontasi [Sukarno's Confrontation with Malaysia], conducted political lobbying, manipulated elections within political organizations, arranged the outcome of the 'act of free choice' in Irian Jaya in 1969, was a key player in organizing the first New Order elections in 1971.*[158]
>
> [Ia utamanya adalah badan politik rahasia berorientasi tugas 'penyelesaian masalah' tanpa struktur baku. Pertama kali dibentuk pada tahun 1962, sebagai badan eksekutif komando Mandala Jenderal Suharto untuk kampanye Irian, ia juga memainkan peran kunci dalam negosiasi untuk mengakhiri Konfrontasi [Konfrontasi Sukarno dengan Malaysia], melakukan lobi politik, memanipulasi pemilihan umum dalam aneka organisasi politik, mengatur hasil dari jajak pendapat umum di Irian Jaya tahun 1969, juga pemain kunci penyelenggaraan pemilu pertama Orde Baru tahun 1971 …]

www.setabasi.org

[157] Dengan aktivitasnya di dalam konfrontasi, pihak AS bahkan memandang Soeharto sebagai "faksi ketiga" dalam TNI-AD setelah faksi Nasution dan Yani, padahal dalam konfrontasi tersebut Soeharto adalah bagian faksi Yani. Lihat Peter Dale Scott. The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. 1985. *Pacific Affairs*. Vol. 58, No. 2 (Summer), pp. 239-264, p. 256.
[158] Damien Kingsbury, *Power Politics and the Indonesian Military*. New York: RoutledgeCurzon, 2003, pp. 59-60

Selain dengan Malaysia, maka sejak tahun 1964 pun Soeharto telah menjalin kontak dengan Inggris, Jepang, dan AS, yang didorong semacam upaya perimbangan atas cenderung meningkatnya pengaruh PKI atas Sukarno.[159] Peran Yoga dan Ali sebagai *bonding* Soeharto signifikan dalam terbentuknya formasi koalisi anti Sukarno dan anti komunis.[160]

Secara garis besar sejak 1965 hingga 1971, Soeharto memilah dua pekerjaan. Pertama, aneka pekerjaan resmi-konstitusional yang penting bagi dominasi, ia serahkan pada individu yang ia yakini berpihak padanya dan akan menjalankan tugas sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku. Maraden Panggabean, Amir Machmud, Basuki Rachmat, M. Jusuf, atau Sumitro adalah para perwira dalam kategori ini. Kedua, pekerjaan-pekerjaan tidak resmi bersifat ekstra konstitusional tetapi penting untuk dominasi kekuasaannya. Tugas seperti ini hanya ia percayakan kepada para perwira minor seperti Yoga Sugama, Sudjono, Ali Moertopo, atau Alamsjah.

Dalam epilog G30S/PKI, Soeharto dan para *bonding*nya terkesan relatif siap. Ia memiliki loyalis seperti Yoga Sugama dan Ali Moertopo serta wawasan saat belajar di SSKAD (di bawah arahan Kolonel Suwarto) seputar seberapa besar

www.setabasri.org

[159] Peter Dale Scott, The United …, *op. cit.*, p. 251. Kontak CIA dalam operasi PRRI/Permesta adalah Jan Walandouw. Walandouw, seorang veteran PRRI/Permesta (juga Daan Mogot dan Willy Pesik) telah menjalin kontak dengan CIA sejak 1958 bahkan menawarkan Soeharto (kepada CIA) sebagai pimpinan pemberantasan komunis di Indonesia. Lihat catatan kaki nomor 66.

[160] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 190. Kelak di kemudian hari, OPSUS Ali Moertopo mendapat sokongan dari dua sekretaris pribadinya yang sekaligus merupakan kader Pater Beek yaitu Yusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi. Lihat juga Paul M. Monk, Secret Intelligence and Escape Clauses: Australia and the Indonesian Annexation of East Timor 1963-1976. *Critical Asian Studies*. 2001. 33:2, pp. 181-208. p. 181. Antara Agustus hingga Desember 1964, Opsus Ali Moertopo terdiri atas Beni Murdani (baru dipindah dari RPKAD ke Kostrad) dan Letkol Abdul Rachman Ramly. Lihat R. E. Elson, Suharto … *op. cit*. h. 186. Kontak OPSUS terbangun dengan Des Alwi, Sumitro Djojohadikusumo (PSI), Tun Abdul Razak (tokoh senior Malaysia), Ghazalie Shafie (kepala kementerian luar negeri Malaysia).

kekuatan anti komunis dan anti Sukarno. Dalam mendominasi PKI dan Sukarno, Soeharto tidak saja memanfaatkan kinerja para *bonding* melainkan juga para *outsider* seperti Sarwo Edhie Wibowo, H.R. Dharsono, maupun Kemal Idris. Ketiga perwira *outsider* ini memiliki jalan sendiri dalam mencapai tujuan berbeda dengan jalan Soeharto. Secara lihai, Soeharto membiarkan mereka menghabisi PKI dan Sukarno, sementara ia sendiri lebih memilih lebih berhati-hati.

Selain tugas-tugas militer, Soeharto juga membutuhkan Ali Moertopo untuk memetakan kekuatan politik sipil.[161] Ali Moertopo memiliki akses langsung ke dalam KAP-Gestapu juga elemen pimpinan KAMI, menguasai peta kelompok Islam, sosialis (PSI), dan Katolik militan dalam menghancurkan komunisme.[162]

Jika Yoga dan Ali lebih banyak menerima tugas bidang intelijen dan politik, maka Sudjono dan Alamsjah di bidang ekonomi. Alamsjah adalah penghubung Soeharto dengan Ibnu Sutowo, yang kelak hasil usaha minyaknya digunakan untuk membiayai proyek-proyek militer dan politik Soeharto. Sudjono digunakan Soeharto untuk memonitor kinerja para teknokrat ekonomi sebab walau bagaimana pun, para teknokrat intelektual bukan *bonding* alamiah Soeharto.

Soeharto melihat kompetensi dan loyalitas Sudjono saat *bonding*nya itu mengatur bisnis YPTE. Tahun 1964 Sudjono kembali ke Indonesia setelah 10 bulan mengikuti kursus di *US Army's Finance School at Ford Benjamin Harrison,*

www.setabasri.org

[161] Saat Soeharto menjadi Wakil Panglima Kolaga atas nama Kostrad, ia menginstruksikan Ali Moertopo membangun komunikasi bawah tanah dengan pejabat Malaysia. Ali Moertopo lalu membentuk Opsus (Operasi Khusus) keperluan tersebut. Anggota Opsus ini di antaranya Benny Murdani dan kelompok Cina Katolik. Lihat Bonnie Triyana, et.al., "Jalan Mangkyo Dekat Soeharto." *Historia*. No. 9, Tahun 1, 2013., h. 39. Banteng Raiders kemudian menginduk pada Divisi Diponegoro sebagai Bn 431.

[162] Mengenai kelompok Katolik militan akan dibahas dalam Bab III.

Indianapolis.[163] September 1966 Sudjono membantu Soeharto mencari bantuan keuangan menemani Adam Malik dari Belanda, Jepang, dan AS, dan ia pula yang secara pasti mengetahui keputusan Soeharto agar Indonesia kembali masuk PBB.[164] Sudjono adalah perwira dengan kemampuan manajemen keuangan "praktis" sehingga bisa diandalkan Soeharto memenuhi kebutuhan keuangan bagi operasi reproduksi kekuasaan. Malley menyebut Alamsjah dan Sudjono sebagai "*financial generals.*"[165]

Soeharto mengupayakan *bonding*-nya bukanlah perwira terkemuka, tetapi efektif dalam menjalankan tugas, seperti dicatat Michael Vatikiotis bahwa Soeharto mengelilingi dirinya bukan dengan perwira militer arus utama serta cenderung mengumpulkan rekan-rekan dekatnya saat bertugas di Divisi Diponegoro seperti Ali Moertopo dan Yoga Sugama untuk selanjutnya bekerja sama melakukan pembersihan atas PKI.[166]

Mengenai besarnya peran *bonding* Soeharto, pasca 1 Oktober 1965 Nasution menyatakan bahwa secara resmi TNI-AD tidak punya rencana, sehingga pengaruh TNI-AD terhadap Soeharto memudar.[167] Tahun 1966 *bonding* dibakukan Soeharto ke dalam Staf Pribadi (SPRI) dengan setiap personal punya

www.setabasri.org

---

[163] Michael Malley, Soedjono Hoemardhani and Indonesian-Japanese Relations. 1989. *Indonesia*. No. 48 (Oct.) pp. 47-64. p. 48.

[164] Michael Malley, Soedjono …, *op. cit.*, p. 48. Di AS, Sudjono bersama Adam Malik dan Anwar Sani bertemu Presiden Lyndon B. Johnson dan dua penasihatnya (Walt Rostow dan William Jorden), juga Marshal Green dubes AS untuk Indonesia.

[165] *ibid.*, p. 47. Alamsjah masuk lingkaran Soeharto melalui rekomendasi Ibnu Sutowo, orang dekat Soeharto, untuk menjadi pembantu keuangan Soeharto. Alamsjah juga memiliki bisnis besar dan sebab itu saling bertemu kepentingan dengan Soeharto dalam merancang ekonomi Indonesia pasca 1 Oktober 1965.

[166] Michael R.J. Vatikiotis, Indonesia Politics …, *op. cit.,* p. 69..

[167] Sarwo Edhie yang menentang pengaruh Soeharto dikirim ke Medan tahun 1968. Kemal Idris – setelah menjadi Pangkostrad – dikirim ke Makassar. Dharsono setelah menjadi Panglima Divisi Siliwangi lalu dijadikan Duta Besar di Bangkok.

wilayah pertanggungjawaban tugas.[168] Mereka banyak membantu Soeharto dalam mengatasi ketidakpastian politik pasca 1 Oktober 1965. Tanpa *bonding* ini sulit bagi Soeharto untuk mereproduksi kekuasaan.

C. Lingkaran Soeharto Sentris

Mengikuti pandangan Harold Crouch maka para perwira yang dekat dan sepaham dengan Soeharto diberi istilah Soeharto Sentris.[169] Perwira Soeharto sentris terdiri dari atas para *bonding* Soeharto maupun bukan, tetapi punya kesamaan pandangan, yang hendak mempertahankan tradisi Jawa dan cenderung melihat Islam sebagai ancaman atas eksistensi mereka. Soeharto sendiri merupakan bagian dari mereka. Dalam perspektif Biopolitik, *bonding* adalah ikatan dalam kelompok yang membedakan antara "kami" dan "mereka." Lingkaran Soeharto sentris terutama dekat keberadaannya dengan "kami" dan ini sejalan dengan kecenderungan Soeharto membentuk klik kecil.

Penjelasan seputar lingkaran Soeharto Sentris akan lebih tergambarkan apabila dilakukan kontras dengan lingkaran lain yaitu faksi radikal. Jika lingkaran sipil-militer Seskoad merupakan koalisi Soeharto dalam perencanaan strategis politik dan ekonomi – dua strategi yang tidak terlampau dikuasai Soeharto – maka lingkaran Soeharto Sentris adalah koalisi Soeharto untuk mendominasi aneka individu dominan di setiap hirarki. Selain para perwira seperti Alamsjah, Yoga Sugama, Ali Moertopo, ataupun Soedjono Hoemardhani, masuk ke dalam

www.setabasri.org

[168] Susunan lengkap *bonding* ini lihat dalam Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 308

[169] Istilah Soeharto sentris didasarkan pendapat Herbert Feith. Argumentasi Feith, "sentris" adalah kecenderungan Soeharto dalam perubahan politik untuk ada di tengah. Ia diapit dua kelompok perwira, satu berkecenderungan mempercepat perubahan, lainnya berupaya memperlambat perubahan karena masih merasa ada ikatan dengan Sukarno. Lihat Herbert Feith. Suharto's Search for a Political Format. 1968. *Indonesia*. No. 6 (Oct.) pp. 88-105, p. 94.

kategori perwira Soeharto Sentris adalah Amir Machmud, Soedharmono, Ibnu Sutowo, Sumitro, Munadi, Darjatmo, Wahono, maupun Soerono. Rata-rata lingkaran Soeharto ini berkarakter tradisionalisme Jawa dengan kecenderungan Islam abangan.

Dalam lingkaran Soeharto sentris, terdapat kecurigaan akan terjadinya mobilisasi politik rival potensial mereka yaitu Islam politik.[170] Di dalam kelompok militer, pengaruh tradisi Jawa yang terjelma ke dalam aliran priayi dan abangan (Muslim nominal) cukup kuat, termasuk kelompok Kejawen seperti ditulis Allan A. Samson:

> *Many of those army officers who are part of the Javanese cultural tradition remain suspicious of Islam as a rival culture and contend that the success of Islam would come at the expense of the integrity of Javanese culture. Especially in the Diponegoro and Brawidjaja Division of Central and East Java much of the leadership is tied to Javanese culture, which places a high value on order, harmony, and calmness, and is disdainful of what they regard as the exclusiveness and aggressiveness of the fervent Islamic character. President Suharto was a past commander of the Diponegoro Division and several Javanese officers who were his subordinates or personally close to him now occupy influential positions on the general staff as Presidential advisors*.[171]
>
> [Banyak perwira militer yang merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa tetap mencurigai Islam sebagai budaya saingan dan berpendapat bahwa keberhasilan Islam akan mengorbankan keutuhan budaya Jawa. Khususnya di Divisi Diponegoro Jawa Tengah dan Brawijaya Jawa Timur sebagian besar kepemimpinannya terikat pada budaya Jawa, yang menjunjung tinggi keteraturan, kerukunan, dan ketenangan, serta meremehkan sifat eksklusif dan agresif yang mereka anggap melekat pada Islam. Presiden Soeharto pernah menjadi panglima Divisi Diponegoro dan beberapa perwira Jawa yang merupakan bawahannya atau secara pribadi dekat dengannya kini menduduki posisi yang berpengaruh pada staf umum sebagai penasihat Presiden].

[170] Allan A. Samson, Army and Islam in Indonesia, 1972. *Pacific Affairs*. Vol. 44, No. 4 (Winter), pp. 545-565., p. 545.
[171] Allan A. Samson, Army and Islam …, *op.cit.*, p. 545-546.

www.setabasri.org

Dalam tradisi Jawa, masalah harmoni dan keteraturan di dalam hirarki dipandang tinggi. Konsep inti dalam tradisionalisme Jawa adalah pandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara kondisi dalam diri seseorang dengan kapasitasnya untuk mengendalikan lingkungan.[172]

Tradisionalisme Jawa juga memiliki pandangan yang mirip, kendati bukan argumentasi dasarnya, dengan perspektif Biopolitik bahwa duduk di puncak hirarki adalah seorang penguasa yang memerintah dengan sifat "ketuhanan" dengan mana ia memandang bukan wilayah negara melainkan teritori-teritori penting yang ia anggap sebagai lokus hirarki kekuasaannya. Wilayah ibukota, wilayah penyangga, Pulau Jawa dan Madura, ataupun Bali mungkin merupakan realitas teritorial sebagai lokus hirarkinya.[173]

Sejumlah perwira di sekitar Soeharto berkarakter priayi, abangan, dan mempraktikkan Kejawen sehingga lebih menekankan sekularisasi politik negara dengan mendukung Pancasila. Namun, kecenderungan di kalangan militer tidak melulu didominasi oleh Tradisionalis Jawa. Terdapat pula elemen modern-sekuler yang terutama ditunjukkan sejumlah perwira yang terutama berkelompok di

www.setabasri.org

[172] Soedjatmoko. Indonesia: Problems and Opportunities. 1967. *Australian Outlook.* 21:3, pp. 263-286, p. 266.
[173] Soedjatmoko. Indonesia …, *op.cit.*, p. 266. Ini pula yang kemudian membuat Soeharto lebih fokus pada pembangunan Jawa ketimbang luar Jawa.

sekitar Divisi Siliwangi.[174] Mereka membela efisiensi sistem satu partai dominan sehingga modernisasi progresif dapat segera dilakukan.[175]

Dua perbedaan karakter kelompok perwira ini kemudian berimbas pada pandangan mereka atas kekuatan politik Islam. Argumentasi dasar kedua kelompok perwira ini berbeda dalam memersepsi Islam tetapi manifestasinya serupa. Sikap kelompok Diponegoro-Brawijaya lebih didasarkan kecurigaan akan adanya upaya dominasi atas nilai Tradisionalisme Jawa oleh Islam.[176] Dengan demikian masalah bagi kelompok ini adalah eksistensial dalam konteks kebertahanan hidup bagi yang mampu menyesuaikan diri (*survival of the fittest*).[177]

Argumen modernis-sekuler Siliwangi berbeda dengan kelompok Tradisionalis Jawa seputar politik Islam.[178] Baik Siliwangi, Masyumi, dan PSI punya kecenderungan modernis dan pragmatis dalam politik, juga menilai positif rasionalisme dan efisiensi Barat.[179] Namun, peran mereka di Seskoad, yang cukup dipengaruhi PSI, membuat perwira Siliwangi beranggapan demokrasi partai-partai kembali akan memicu politik "aliran" dan primordialisme sehingga

www.setabasri.org

[174] Allan A. Samson, Army and Islam …, *op. cit.,* p. 546. Para perwira ini memiliki pemikiran gaya Barat yang menekankan pada rasionalitas, efisiensi, dan profesionalitas. Siliwangi merupakan elemen radikal yang hendak mengubah manajemen negara era Sukarno dengan model kepemimpinan efisien, rasional, dan tidak memusuhi Barat. Perwira modernis-sekuler juga memandang sistem multi partai gagal dalam menciptakan kebijakan negara yang kohesif dan stabil.
[175] *ibid.,* p. 546. Konsep ini ternyata digunakan Soeharto lewat pemberdayaan Golongan Karya, organisasi non partai politik tetapi dapat mengikuti Pemilu dengan dukungan penuh pihak eksekutif negara.
[176] Tidak seluruh elemen Brawijaya memiliki kecurigaan terhadap Islam. Sekurangnya sejumlah tokoh seperti Sarbini, Sudirman, dan Muchlas Rowi pernah berdinas di Divisi Brawijaya dan mereka adalah *bonding* Nasution.
[177] Brian May, *The Indonesian Tragedy*. Singapore: Routledge, 1978, p. 252.
[178] Zulkifli Lubis, salah satu perwira yang terlibat dalam PRRI/Permesta berasal dari Siliwangi. Ia memiliki kecenderungan beragama mirip Nasution, yaitu puritan.
[179] Allan A. Samson, Army and Islam …, *op. cit.,* p. 547.

menghambat modernisasi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Siliwangi melihat menguatnya politik Islam bukan atas dasar kecurigaan dominasi nilai melainkan lebih pragmatis, yaitu kembalinya potensi konflik ideologis.

Posisi Soeharto di antara dua kubu perwira militer tersebut ada di pihak tradisionalisme Jawa. Soedjono Hoemardhani pun adalah rekan kejawen Soeharto dan memiliki guru Kejawen yang sama.[180] Gelar guru mereka yang mumpuni dalam hal-hal spiritual adalah *Empu* Rama Diyat.[181] Dalam sebuah buklet yang ditemukan M.C. Ricklefs, Empu Rama Diyat menulis "dari pemahaman Tanggap-Warso kita senantiasa ingat kepada keaslian kebudayaan Jawa."[182] Ricklefs menyimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan cara menyiratkan ketidakaslian Islam.[183]

Manifestasi unsur primordial Soeharto dalam era 1965 hingga 1971 adalah Tradisionalisme Jawa dengan mengakui bahwa ia adalah seorang penganut Islam abangan.[184] Kesaksian ini diperoleh Salim Said dari Benny Moerdani yang menyatakan, "*Kok* saya [Benny Moerdani] yang dituduh anti-Islam. Soeharto itu yang anti-Islam."[185] Di masa-masa awal Orde Baru Soeharto menunjukkan sikap alergi terhadap Islam misalnya dengan memelototi seorang santri wanita yang

www.setabasri.org

[180] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.*, h. 48.
[181] M.C. Ricklefs. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang*. Cetakan 1. Penerjemah FX Dono Sunardi & Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2013, h. 211-213. Ricklefs menulis "Empu Rama Diyat kerap memimpin suatu ritual tahunan di tempat bernama Jambe Pitu, yang terletak di Gunung Selok di dekat Cilacap." Terus diperdebatkan apakah setelah menjadi presiden Soeharto masih tetap mengunjungi Jambe Pitu ataukah tidak, yaitu hanya mengutus utusan yang mewakili dirinya. Dalam catatan kakinya, Ricklefs memaparkan bahwa di Jambe Pitu terdapat sebuah potret Soeharto dengan Empu Rama Diyat.
[182] *ibid.*, h. 212.
[183] *ibid*, h. 212-213.
[184] Salim Said, *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian*. Cetakan 2. Bandung: Mizan, 2014, h. 311.
[185] *ibid.,* h. 310.

mengusulkan agar demonstrasi dukungan pada ABRI di halaman Kostrad ditutup dengan doa.[186] Saat Subchan menyampaikan rencana aksi massa anti PKI dengan kata *Insya Allah,* Soeharto cukup terganggu dengan menyatakan "Mengapa harus pakai *Insya Allah*."[187]

Said menarasikan sebuah pertemuan yang dilakukan Soeharto pada tanggal 24 Februari 1966 di MBAD.[188] Salah satu topik pembicaraan adalah manuver NU untuk kembali mengusung Piagam Jakarta dan Kiai Dahlan menjelaskan bahwa dalam piagam tersebut umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Soeharto menanggapi "Apa itu *sarengat*[189] Islam ?" Soeharto menanggapi lebih lanjut dengan berkata, "Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan orang-orang Islam abangan lainnya? Apakah akan dipaksa-paksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?"[190] Setelah itu Soeharto menyimpulkan bahwa persoalan Piagam Jakarta tidak perlu dipersoalkan dan dilanjutkan.[191]

D. Lingkaran Sipil-Militer Seskoad

Reaksi awal atas G30S/PKI keliru ditafsirkan Amerika Serikat sebagai tindakan Nasution, padahal Soeharto-lah yang banyak mengambil inisiatif. Inisiatif yang diambil Soeharto penuh risiko, karena menyerang PKI sama saja dengan melawan Sukarno. Soeharto harus melangkah lebih hati-hati dan sebab itu ia membutuhkan lingkaran pemikir kompeten yang dapat ia jadikan sebagai dasar bagi keputusan dan tindakannya.

www.setabasri.org

---

[186] Salim Said, Dari Gestapu …, *op.cit.*, h. 310.
[187] *ibid.,* h. 311.
[188] *ibid.*
[189] *Sarengat* adalah dialek Jawa untuk syariat.
[190] Salim Said, Dari Gestapu …, *op. cit.,* h. 311.
[191] Pertemuan ini diadakan tahun 1966.

Dalam kurun 1968 hingga 1971 Soeharto tengah menghadapi hirarki kompleks. Ia perlu mendengar lebih banyak masukan dari luar *bonding*-nya akibat kompleksitas masalah pasca Sukarno. Kelompok di dalam lingkaran Seskoad ternyata telah memiliki rencana kontijensi (*contingency plan*) yaitu persiapan kondisi Indonesia pasca Sukarno, bukan dalam arti kudeta, melainkan *blueprint* manajemen negara. Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional adalah serangkaian konsep yang diperoleh Soeharto dari lingkaran Sipil-Militer Seskoad.

Saat di SSKAD Soeharto belajar menganalisis situasi politik di bawah bimbingan Suwarto.[192] Gagasan dua peran militer secara komprehensif diperoleh darinya.[193] Melalui pembinaan Suwarto pula Soeharto berhasil menjadi salah satu peserta yang turut mengembangkan doktrin *Territorial Management* dan *Civic Missions*.[194]

AS pun punya pengaruh besar di SSKAD.[195] Perhatian AS atas politik Indonesia sekurangnya telah berlangsung sejak 1953 melalui terbitnya dokumen NSC 171/1 yang merupakan panduan pembendungan perkembangan komunis di

www.setabasri.org

[192] Suwarto adalah pengajar SSKAD dengan kecenderungan pikiran dekat dengan PSI, pro Amerika Serikat, dan anti komunis. Ada kemungkinan dari Suwarto pula Soeharto mengetahui kompetensi Sumitro Djojohadikusumo dalam masalah perdagangan.

[193] Nasution merintis gagasan ini dengan konsepnya, *middle way,* bahwa militer Indonesia selain sebagai instrumen pertahanan juga aktif dalam pengelolaan negara. Di SSKAD Soeharto juga akrab dengan Sutoyo (anggota staf umum Yani, kemudian menjadi korban peristiwa 1 Oktober 1965).

[194] Hamish McDonald, Suharto's …, *op. cit.,* p. 34. McDonald luput menyebutkan 1 doktrin lagi yaitu *Territorial Warfare* (Perang Wilayah/Teritorial).

[195] Kursus SSKAD pertama kali dibuka oleh Moh. Hatta di Bandung tanggal 17 November 1951, kemudian namanya berubah menjadi Seskoad pada 2 Januari 1961. Lihat Sejarah Seskoad [Website] Diakses dari: https://Seskoad.mil.id/index.php/sejarah tanggal 19 Mei 2021 pukul 03:19.

Indonesia melalui aliansi mereka dengan Masyumi dan PSI.[196] AS turut berperan dalam penyediaan logistik dan senjata dalam PRRI/Permesta 1958.[197] Setelah kegagalan PRRI/Permesta, AS melakukan *upgrade* penetrasi politik dengan target pada pemberdayaan kelompok Nasution agar mampu melaksanakan rencana-rencananya.[198] Dalam upaya inilah maka pada tahun 1962 Guy Pauker membawa Suwarto ke RAND.[199] Pauker pula yang kemudian menjalin hubungan dengan ”sebuah kelompok kecil intelektual PSI dan rekan-rekan mereka di Angkatan Darat.”[200]

Posisi strategis Suwarto dalam SSKAD adalah mengubah paradigma perwira militer “dari fungsi revolusi ke fungsi kontra pemberontakan. [201] Doktrin yang disampaikan adalah yaitu *Territorial Warfare, Territorial Management* dan *Civic Missions.* Crouch menyatakan pilihan Soeharto dalam reproduksi kekuasaan menampakkan pengaruh besar doktrin yang ia pelajari dari Suwarto.[202]

Kendati belum pernah dikirim belajar ke Fort Leavenworth ataupun Fort Bragg di AS, Soeharto hampir satu tahun belajar di SSKAD. Faktor utama yang mungkin paling menarik dari SSKAD adalah aspek analisis situasi, yang tidak hanya memberi tekanan pada dimensi kemiliteran, melainkan pula dimensi ekonomi, politik, ideologi, dan sosial.

www.setabasri.org

---

[196] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 245. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1978 oleh Cornell University Press.
[197] Tahun 1975, Selected Senate Committee menemukan fakta “*some evidence of CIA involvement in plans to assassinate President Sukarno.*” Lihat Harold Crouch, The Army … *op. cit.* h. 246.
[198] Peter Dale Scott, The United States …, *op. cit.,* p. 246.
[199] *ibid*., p. 247. Lihat catatan kaki nomor 41 di sumber ini.
[200] *ibid.,* p. 247.
[201] *ibid*., p. 248.
[202] Harold Crouch seperti dikutip oleh Peter Dale Scott, The United …, *op. cit.*, p. 251.

Sebelum SSKAD berdiri, pelatihan militer paling awal dibuka 28 Oktober 1945 di Yogyakarta.[203] Filosofi utama didirikannya akademi militer adalah sebagai alat pimpinan pusat militer dalam mengendalikan prajurit. Bahkan Nasution sendiri menyatakan gagasan pendidikan militer tidak hanya muncul darinya melainkan juga dari kaum "merah" (komunis).[204] SSKAD kembali menemukan orientasi setelah Achmad Yani kembali dari Fort Leavenworth (Kansas, AS) setelah satu tahun belajar pada tahun 1956. Posisi Yani saat itu adalah Deputi Operasi Nasution (Kasad saat itu).[205] SSKAD berpandangan bahwa pengimplementasian suatu doktrin militer dan ekonomi adalah dibutuhkan untuk membangun sebuah kekuasaan politik yang kuat (*strong political power*). Patologi Demokrasi Terpimpin adalah kuatnya dimensi ideologis yang mendorong pemerintahan menjadi tidak kohesif.

Telah disinggung sebelumnya bahwa saat belajar di SSKAD, Soeharto memperoleh materi seputar konsep *territorial warfare, territorial management,* juga *civic mission* yang prototipenya dikembangkan Nasution sejak revolusi fisik

www.setabasri.org

[203] Saat itu peserta awal 500 orang, bulan November 1948 meluluskan pertama kali 192 letnan dua. Sebanyak 45 peserta awal terbunuh saat masih melakukan pendidikan. Untuk sejarah SSKAD dan perubahan orientasi-orientasi militer dan politik dapat dilihat dalam Ruth McVey, The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II. 1972. *Indonesia*. No. 13 (Apr.), pp. 147-181., p. 163.

[204] Ruth McVey, The Post-Revolutionary …, *op.cit.*, p. 163. Oktober 1945 berdiri Akademi Militer Nasional di Yogyakarta. Di Malang, Sekolah Tentara sengaja didirikan untuk menyuplai prajurit ke pertempuran. Juli 1948, Sekolah Tentara di Malang diintegrasikan dengan AMN Yogyakarta hingga 1950. Karena kurangnya tenaga profesional, maka tahun 1950 AMN ditutup. Peserta diberi pilihan melanjutkan di *Corps of Engineer* di Bandung atau *Royal Netherlands Military Academy* di Breda.

[205] Ideologi SSKAD adalah perpaduan warisan nasional dan gagasan Barat soal profesionalitas. Rumusannya: Nasionalisme adalah tindakan di atas politik partisan, penekanan pada disiplin dan hirarki, dan rasa bangga menjadi organisasi terlatih dan penting. Lihat Ruth McVey, The-Post …, *op. cit.,* p. 166-169.

1945-1949.[206] Inti ketiga konsep tersebut adalah angkatan bersenjata tidak akan berhasil menangkal serangan dari luar atau pemberontakan dari dalam tanpa dukungan rakyat.[207] Ketiga konsep tersebut diformulasikan lebih lanjut ke dalam struktur kurikulum SSKAD.

Ketiga konsep di atas juga digunakan Soeharto sebagai pedomannya dalam menguasai politik Indonesia. Kesuksesan perang teritorial membutuhkan sejumlah syarat seperti stabilisasi politik negara juga kesadaran bahwa Pancasila adalah ideologi dengan satu penafsiran. Perang teritorial juga memprasyaratkan pembangunan terencana di seluruh bidang yang mampu menyediakan sumber daya bagi kebutuhan perang, termasuk *territorial management* yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan wilayah dalam suatu perang teritorial.[208] SSKAD menekankan bahwa selama Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara, dan kebijakan pertahanan berkarakter non-agresif (hanya menyerang apabila diserang), maka *territorial warfare* dapat dijadikan konsep pertahanan Indonesia. Terhitung sejak akhir 1965 maka ketiganya pun adalah konsep yang terus digunakan Soeharto dalam mereproduksi kekuasaan.[209]

www.setabasri.org

---

[206] Konsep Nasution yang menjadi cikal-bakal doktrin *Territorial Warfare* adalah Perlawanan Rakyat Semesta, yang ia terapkan saat revolusi fisik maupun menghabisi PKI Madiun. Dalam konsep ini ia mengusulkan Angkatan Darat dibagi ke dalam tiga kekuatan yaitu: (1) Unit penyerang dengan rasio senjata dan personel 1:1; (2) Elemen teritorial dengan rasio senjata dan personil 1:3, dan; (3) Kekuatan kader teritorial yang akan memimpin perlawanan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Divisi Siliwangi adalah unit penyerang dalam kategori pertama. Barry Turner, Nasution: Total People's Resistance and Organicist Thinking in Indonesia. *Doctoral Dissertation*, Swinburne University of Technology Melbourne, 2005, p. 170. Dalam partai politik, Nasution turut membidani lahirnya IPKI.

[207] Guy J. Pauker, *The Indonesian Doctrine of Territorial Warfare and Territorial Management*. Santa Monica-California: The RAND Corporation, 1963., p. vi. Pemahaman mengenai *Territorial Warfare, Territorial Management,* dan *Civic Mission* dikupas dalam sumber ini.

[208] *ibid.*, p. 55-57.

[209] *ibid.*

Konsep kedua adalah *Territorial Management* (Manajemen Teritorial). Manajemen Teritorial melibatkan dua sub konsep yaitu manajemen dan teritorial. Manajemen meliputi perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian yang efektif. Filosofi dasar Manajemen Teritorial adalah terciptanya struktur sosial masyarakat Indonesia yang mampu mengelola aneka kondisi baik sebelum, selama, dan setelah perang.[210] Dalam upaya melakukan indoktrinasi Pancasila dan UUD 1945 maka Manajemen Teritorial mengajarkan perlunya mewaspadai tiga elemen antagonistis dalam masyarakat. Ketiga elemen tersebut tersebar ke dalam tiga bidang yaitu ideologi, politik, dan sosial-ekonomi.[211] Untuk mengatasi ketiga masalah, TNI-AD mendukung agar Pancasila dipraktikkan sebagai prinsip sehari-hari rakyat Indonesia.[212] Juga dalam kesadaran sosial rakyat harus dijauhkan dari *madon, maling, malas, mabuk*, dan *madat* (5 M).[213]

Konsep ketiga adalah *Civic Mission.* Dalam laporan kepada atasannya di AS, Guy J. Pauker menyatakan "akhir tahun 1962 TNI sudah siap untuk memperluas program aksi sipil."[214] *Civic mission* mirip program Soeharto saat menjadi Pangdam Diponegoro di mana saat itu ia melalui bantuan Ali Moertopo,

www.setabasri.org

[210] Dalam SSKAD dan Seskoad pra 1966, struktur sosial Indonesia harus didasarkan Manipol dan USDEK, dua ajaran Sukarno. Lihat Guy J. Pauker, *The Indonesian Doctrine …*, *op.cit.,* p. 141.
[211] *ibid.,* p. 144. Dalam bidang ideologi Angkatan Darat berhadapan dengan individualisme dan liberalisme, komunisme internasional, sifat negatif fanatisme agama, ateisme, isolasionisme, autarki, dan chauvinisme. Dalam bidang politik antagonisme yang dihadapi adalah imperialisme dan kolonialisme, federalisme dan separatisme, bahaya kediktatoran, serta aspek negatif kedaerahan dan etnosentrisme. Di bidang sosial-ekonomi masalah yang dihadapi adalah kapitalisme, feodalisme, kosmopolitanisme, pengaruh negara budaya asing, reformisme, konservatisme, sinisme, dan apatisme.
[212] *ibid.*, p. 148.
[213] Lihat *Diagram of the Main Steps in War-Readiness Planning* dalam *ibid*., p. 167. Inilah sebab mengapa Angkatan Darat begitu siap, baik dalam hal penjagaan teritorial maupun politik kalangan sipil.
[214] *ibid.,* p. 42.

melakukan pembangunan wilayah melalui proyek pengairan sawah kering dan membangkitkan listrik dengan memanfaatkan tenaga air melalui pemulihan waduk Rawa Pening.

Dalam kuliah yang ia berikan di Seskoal tanggal 16 Juli 1963, Aidit menyerang doktrin *Territorial Warfare* Seskoad sebagai dipengaruhi doktrin revisionis Yugoslavia Jenderal Kveder tahun 1963.[215] Aidit juga menyebut doktrin Seskoad tersebut sebagai "salah dan anti rakyat."[216] Setelah itu PKI terus memprovokasi Sukarno untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia, dengan pelibatan penuh TNI-AD.[217] Sebab itu, TNI-AD memandang penting konsep *civic mission* untuk membendung pergerakan PKI di wilayah pedesaan (rural) dan miskin serta dugaan infiltrasi komunis atas para perwira menengah.

Tidak seperti Seskoal, Seskoad relatif minim pengaruh Sukarno, terlebih PKI, dan salah satunya dimungkinkan akibat lokasinya berada di basis Divisi Siliwangi. Bagi perwira TNI-AD yang belajar di SSKAD, McVey menyebut Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat adalah tujuan favorit perwira yang dikirim belajar ke luar negeri. Kunjungan belajar ke luar negeri ini kemudian menciptakan nilai-nilai patronase, prestise, dan meningkatkan kepercayaan diri para perwira seputar masalah ideologi.[218] Hal yang ironis adalah bahwa selama masa Demokrasi Terpimpin ternyata SSKAD bukan menjadi wadah pembiakan konsepsi Nasakom Sukarno melainkan pembenihan Pancasila, Pembangunan,

www.setabasri.org

[215] Guy J. Pauker, *The Indonesian Doctrine …*, *op.cit.,* p. 46.
[216] *ibid*.
[217] Angkatan Darat mungkin menganggap ini adalah taktik PKI memperlemah kekuatan Angkatan Darat di pulau padat penduduk tersebut, sekaligus basis PKI (terutama Jawa Tengah dan Jawat Timur).
[218] Ruth McVey, The-Post …, *op. cit.,* p. 170.

Dwifungsi, tentu saja Sapta Marga Prajurit, konsep-konsep yang bukan favorit Sukarno, *alpha male* saat itu.

Hubungan kerja sama antara TNI-AD anti komunis dengan AS kerap dikecam di masa-masa kemudian. Namun, bagaimana dengan jalinan kerja sama pelatihan militer PKI dengan pihak asing seperti pengiriman kader-kader PKI ke Cina dan Vietnam Utara untuk mempelajari taktik perang gerilya, penggalian terowongan untuk mobilitas pasukan dan logistik perang, serta strategi militer "politik di ujung bedil" dan "desa mengepung kota" seperti dianjurkan sejumlah pimpinan komunis negara lain.

Jika dipandang dari perspektif Biopolitik, baik TNI-AD maupun PKI sesungguhnya tengah terlibat dalam upaya dominasi-submisi saat itu. Wujud aneka kerja sama keduanya dengan pihak lain justru mendorong situasi semakin bergolak. Secara fisik TNI-AD tentu saja lebih memiliki kesempatan mendominasi PKI dengan kekuatan senjata yang mereka miliki, tetapi tentu saja mereka tidak akan didukung oleh Sukarno melakukan hal tersebut.

Saat menjadi panglima TNI-AD, Yani seperti dijelaskan Guy J. Pauker, mengelilingi dirinya dengan sekelompok perwira Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) dan juga kerap dikenal sebagai *brain trust* Yani.[219] Sama seperti terjadi dengan PKI, maka Yani dan para *brain trust*-nya tengah menyusun strategi kontijensi berupa aneka persiapan apabila Sukarno tidak lagi berkuasa akibat sakit yang diderita. Jika PKI bekerja sama dengan agen-agen Cina dan rezim komunis internasional, Yani menjalin kerja sama dengan AS. Dalam mekanisme dominasi-

[219] David Ransom, Ford Country … *op. cit.*, p. 102.

www.setabasri.org

submisi, setiap pihak yang bertikai cenderung membentuk formasi koalisi untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

Suwarto adalah lulusan Fort Leavenworth tahun 1959 dan tahun 1962.[220] Pauker sempat membawa Suwarto ke RAND yakni sebuah lembaga *think tank* AS. Suwarto melihat RAND berhasil mengorganisir sumber daya akademik selaku konsultan pemerintah[221] dan bagaimana RAND mengorganisir sumber daya akademisi AS sebagai konsultan.[222] Suwarto kemudian mengajak 4 hingga 5 ekonom nomor satu Indonesia untuk memberikan pengajaran seputar masalah ekonomi dan politik Indonesia di SSKAD.[223]

Akademisi yang diajak oleh Suwarto untuk bekerja sama dan kemudian menjadi penasihat sipil para perwira tinggi TNI-AD adalah Miriam Budiardjo (dari kelompok studi MIT dengan mitra Guy J. Pauker) juga Selo Soemardjan (alumni Cornell).[224] Di samping para akademisi, turut juga bergabung para alumni program belajar Amerika Serikat dari unsur PSI dan Masyumi.[225]

Menurut Willis G. Ethel (Kolonel, atase pertahanan AS di Jakarta) peran yang dijalankan para ekonom ini adalah memberikan kursus bagi rencana kontijensi TNI-AD.[226] Rencana kontijensi ini penting karena telah muncul

www.setabasri.org

---

[220] Pauker menyatakan bahwa ia telah mengenal Kolonel Suwarto (deputi komandan Seskoad) sejak ia menjadi Staf Umum Angkatan Darat.
[221] RAND ini pula yang menjadi inspirasi Harry Tjan Silalahi, Liem Bian Kie, dan Liem Bian Koen saat mendirikan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) pada September 1971. CSIS sempat menjadi *think tank* Soeharto sebelum kemudian pecah sejak konflik Soeharto-Benny Murdani tahun 1980-an.
[222] Barry Turner, Nasution …, *op. cit.,* p. 303.
[223] David Ransom, Ford Country … *op. cit.*, 102.
[224] Dalam pembasmian PKI, intelektual ITB membantu pihak AD dengan menciptakan alat telekomunikasi berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari *University of Kentucky.*
[225] David Ransom, Ford Country … *op. cit.*, p. 102.
[226] Kolonel Willis G. Ethel adalah rekan dekat Yani dan perwira tinggi lainnya. Mereka kerap bermain golf bersama. Lihat *ibid.*

indikasi bahwa PKI memulai persiapan perjuangan bersenjata. Tahun 1963 TNI-AD menaksir sekurangnya PKI telah memiliki 3 juta anggota, dan itu belum termasuk 17 juta orang yang menjadi anggota organisasi *onderbouw* mereka.[227]

Pihak TNI-AD, melalui Seskoad kemudian merevisi Doktrin Tri Ubaya Cakti bulan April 1965 di bawah pimpinan bekas instruktur Soeharto di SSKAD, Suwarto.[228] Nasution yang tidak menghadiri Seminar Pertama ini mengkritik doktrin yang lahir (Tri Ubaya Cakti) sebagai masih bernuansa "kiri" dan terpengaruh ajaran Sukarno.[229] Sebagai komandan Seskoad pada Agustus 1966 Suwarto memimpin Seminar Kedua Angkatan Darat yang menghilangkan seluruh konsep bernuansa kiri dan ajaran Sukarno.[230] Konsep Dwifungsi, yang pada Seminar Pertama belum dinyatakan secara eksplisit ditegaskan dalam Seminar Kedua.[231] Sundhaussen menyatakan bahwa hasil Seminar Kedua Angkatan Darat mulai tampak dalam tuntutan Soeharto dalam sebuah pidato di depan Kostrad tanggal 15 Agustus 1966.[232]

Dalam melakukan dominasi dalam hirarki kompleks, Soeharto memosisikan doktrin hasil Seminar Kedua Angkatan Darat sebagai justifikasi bagi militer (TNI-AD) agar dapat secara legal dan berlegitimasi untuk bergerak di bidang politik,

www.setabasri.org

[227] David Ransom, Ford Country … *op. cit.*, p. 104.
[228] Ulf Sundhaussen, Politik Militer …, *op. cit.*, h. 422.
[229] David Jenkins. The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi. 1983. *Southeast Asian Journal of Social Sciences.* Vol. 11, No. 2, pp. 15-30, p. 23-24. Doktrin tersebut ada tiga yaitu Doktrin Kekaryaan TNI, Doktrin Pembinaan Perang Revolusi Indonesia, dan Doktrin Pembinaan Perang Revolusi Indonesia.
[230] David Jenkins. The Evolution of …, *op.cit.*, pp. 15-30.
[231] Ulf Sundhaussen, Politik Militer …, *op.cit.*, h. 422. Kekuasaan yang dipraktikkan Soeharto didasarkan pada hasil Seminar Kedua ini.
[232] *ibid.*, h. 423. Dalam pidato tersebut Soeharto menyatakan "agar Angkatan Darat memainkan peran memimpin dalam segala bidang yang menyangkut kesejahteraan bangsa dan rakyat, dan mengukuhkan tuntutan itu dengan memberikan status doktrin resmi padanya."

ekonomi, sosial, dan ideologi. Dalam Doktrin Tri Ubaya Cakti, Pancasila tidak sekadar menjadi filosofi negara melainkan pedoman bertindak dan ideologi negara.[233] Dengan demikian maka sejak Seminar Kedua ini Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dari TNI-AD, oposisi terhadap Pancasila berarti oposisi terhadap TNI-AD.[234]

Hal menarik dari Seminar Kedua ini adalah ia tidak hanya dihadiri oleh para perwira TNI-AD, melainkan juga Tim Ekonomi Universitas Indonesia hasil didikan AS.[235] Di depan para akademisi terkemuka, Seminar Kedua menyimpulkan negara sangat membutuhkan hubungan sipil-militer yang sehat.[236]

Dari lingkaran sipil-militer Seskoad ini pula dilahirkan konsep pembangunan ekonomi Soeharto yang merupakan hasil olahan para teknokrat ekonomi yang dahulu berperan dalam mendidik perwira dalam masalah "pertahanan ekonomi". Karakter mereka yang non partai juga kepakaran terlatih dan profesional kemudian menggantikan peran para politisi dalam aneka jabatan pembuatan keputusan.[237]

E. Lingkaran Pater Beek

Selain perwira Soeharto sentris, lingkaran pemikir Soeharto lain adalah lingkaran Pater Beek.[238] Brian May menyatakan bahwa rasa terancam kelompok

www.setabasri.org

---

[233] Geoffrey Gunn, Ideology and the Concept of Government in the Indonesian New Order. 1979. *Asian Survey*. Vol. 19, No. 8 (Aug.), pp. 751-769, p. 754
[234] *ibid.,* p. 754.
[235] *ibid.,* p. 753.
[236] David Jenkins, The Evolution …, p. 24.
[237] John James MacDougall, The Tecnocratic Model of Modernization: The Case of Indonesia's New Order. 1976. *Asian Survey.* Vol. 16, No. 12 (Dec.), pp. 1166-1183., p. 1166.
[238] Mengenai kelompok Kristen (termasuk Katolik) dengan mana Raillon menulis bahwa kelompok Kristen (juga Katolik) adalah aliansi potensial. Lihat Francois Raillon, The New Order and Islam, or the Imbroglio of Faith and Politics. 1993. *Indonesia*. No. 57, Archipel (Apr.) pp. 197-217., p. 202

perwira Tradisionalis Jawa atas Islam politik mendorong kelompok ini jatuh ke tangan Kelompok Katolik di bawah *Father* Josephus Gerardus Beek, SJ. (selanjutnya disebut Pater Beek). Bahkan May melanjutkan bahwa rasa terancam tersebut mendorong sejumlah penasihat militer yang dekat dengan Soeharto cenderung menerima cara berpikir Pater Beek ini.[239] Kelompok Katolik lingkaran Pater Beek bergerak di belakang layar dengan memberi aneka masukan kepada perwira Soeharto sentris seputar bagaimana menghadapi kelompok Islam.[240] Kelompok ini minoritas tetapi memiliki sejumlah kader dengan daya analitis mencukupi bagi perencanaan politik Soeharto dan sanggup mengisi kekurangan Soeharto akan strategi politik menghadapi Islam. Sama seperti para perwira Tradisionalis Jawa, kelompok Katolik juga merasa eksistensi mereka tengah memperoleh ancaman atas bangkitnya kekuatan politik Islam.[241]

Koalisi Soeharto Sentris dan Lingkaran Pater Beek bergerak secara *covert* dalam arti menjalankan gerakan dengan semaksimal mungkin menghindari sorotan publik. Medium pertemuan kedua kelompok ini adalah melalui jalur Ali Moertopo dan Sudjono Hoemardhani. Kedua kelompok ini sama-sama menghendaki Pancasila, bukan salah satu agama, sebagai ideologi negara. Militansi para aktivis di lingkaran Pater Beek ini direkam Steenbrink sebagai berikut:

> *… there is the self-confident and even quite aggressive participation of Catholic students under Cosmas Batubara in the demonstrations of October 1965 that toppled the first President, Sukarno. Together with Muslim youth leader Firdous Wadjidi, Cosmas Batubara was a decisive leader of KAMI*

[239] Brian May, *The Indonesian Tragedy*. Singapore: Routledge, 1978, p. 159.
[240] *ibid.,* p. 238.
[241] Dengan demikian adagium *the enemy of my enemy is friend* (musuh dari musuh saya adalah teman saya) berlaku.

www.setabasri.org

> *... which started on 3 October 1965 at Jalan Ratulangi 8, the center for Catholic students in the Menteng district of Jakarta. The Jesuit priest Joop Beek, who as a student moderator had trained and stimulated the Catholic students to fight Communism with good information, a strong and effective strategy and, above all, with great sentiment of unity …*[242]
>
> … Ada partisipasi mahasiswa Katolik yang percaya diri dan bahkan cukup agresif di bawah Cosmas Batubara dalam demonstrasi Oktober 1965 yang menggulingkan Presiden pertama, Sukarno. Bersama tokoh pemuda Muslim Firdous Wadjidi, Cosmas Batubara menjadi pemimpin menentukan dalam KAMI… [kelompok aktivis Katolik ini] dimulai pada tanggal 3 Oktober 1965 di Jalan Ratulangi 8, pusat pelajar Katolik di distrik Menteng Jakarta. Pendeta Jesuit Joop Beek, sebagai moderator mahasiswa telah melatih dan mendorong para mahasiswa Katolik melawan komunisme dengan memberikan aneka informasi bermanfaat, strategi kuat dan efektif, dan yang terpenting, dengan sentimen persatuan yang besar ...

Pater Beek membangun kekuatan anti komunis yang berasal dari kelas menengah Katolik, terutama keturunan Cina. Richard Tanter menyatakan bahwa tokoh mahasiswa seperti Harry Tjan dan Liem bersaudara sangat kuat dipengaruhi oleh Pater Beek dalam arus *Catholic Action.*[243] Beek juga memiliki kontak dengan *Black Pope* seorang kardinal yang menjadi kepala operasi politik Katolik di tingkat internasional, dan pernyataan ini dikonfirmasi oleh Sudjatmoko yang berasal dari lingkaran PSI.[244]

Dalam kesaksiannya, Salim Said bersahabat dengan seorang Katolik bernama Wiratmo Lukito, menyatakan bahwa rekannya tersebut pernah menyatakan bahwa Joop Beek punya hubungan erat dengan CIA melalui

www.setabasri.org

---

[242] Karel Steenbrink, *Catholic in Independent Indonesia: 1945-2010*. Leiden: Brill, 2014., p. xi-xii

[243] Tokoh lain dalam lingkaran pengaruh Beek adalah Harry Tjan Silalahi, Yusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Anto Moedardo Moeliono, Soedjati Djiwandono, dan Kadjat Hartojo. Pemuda lingkaran Beek ini kemudian memperoleh patron seperti Ali Moertopo dan Benny Murdani. Lihat Justin Laba Wejak, Secular, Religious and Supernatural – An Eastern Indonesian Catholic Experience of Fear (Autoethnographic Reflections on the Reading of a New Order-Era Propaganda Text). *Doctoral Dissertation*. The University of Melbourne., p. 85.

[244] Firdaus Syam, *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik*. Cetakan 1. Jakarta: Millennium Publisher, 2004., h. 198.

kontaknya di Hong Kong yaitu Pater Laszlo Ladany. Laszlo adalah pastor Jesuit dari Hongaria yang khusus mengamati Tiongkok.[245]

Pater Beek menganggap terdapat potensi cukup besar bagi Indonesia untuk berubah menjadi negara Islam.[246] Kader-kader Pater Beek baik di Partai Katolik, KAMI, maupun yang dekat dengan *bonding* Soeharto berupaya mempengaruhi agar negara sekurangnya tetap bersifat sekuler, dengan Pancasila sebagai ideologi bersama. Pater Beek bukan hanya pastor Yesuit biasa melainkan aktif secara politik. Kegiatan utama Pater Beek adalah pelatihan bagi kaum muda gereja Katolik yang ia terapkan sekurangnya sejak 1950an. Dalam kegiatan ini ia bekerja sama dengan pastor-pastor Yesuit lain seperti Melchers dan Dijkstra. Sama halnya dengan Beek, keduanya pun memiliki pengaruh cukup kuat di lingkungan politik.[247]

Di akhir Demokrasi Terpimpin, Pater Beek membangun perlawanan bawah tanah atas PKI, sementara rekannya Dijkstra lebih banyak beraktivitas di Front Pancasila. Pater Beek memiliki pandangan politik untuk mendukung orang yang tepat dalam menjalankan negara, dan sebab itu beranggapan hanya orang yang bisa bekerja saja yang perlu diberikan dukungan untuk menjalankan negara. Kecenderungan Pater Beek ini berbeda dengan rekannya yang lebih menekankan pembangunan komunitas sipil di luar negara.[248]

www.setabasri.org

[245] Salim Said, *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian*. Cetakan 2. Bandung: Mizan, 2014, h. 33. Said bahkan menyatakan bahwa rekannya tersebut (Wiratmo Lukito) kemungkinan besar adalah kader Pater Beek pula.
[246] Lihat catatan kaki dalam Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* p. 263.
[247] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* Lihat Appendix 1., p. 319.
[248] *ibid.* Lihat Appendix 1., p. 319.

Richard Tanter juga menulis bahwa Pater Beek secara khusus menilai figur Soeharto memiliki kekurangan, tetapi hanya itulah pilihan yang tersisa bagi gerakan politiknya. Tanter kemudian menyimpulkan bahwa Pater Beek adalah individu yang berada di belakang rivalitas antara intelektual lingkaran PSI dengan lingkaran Katolik.[249]

Selain berorientasi pada politik praktis, tahun 1961 Pater Beek juga mendirikan Biro Dokumentasi. Biro ini dimaksudkan untuk merespons perkembangan politik aktual di sekitar isu komunisme dan PKI.[250] Biro inilah yang menjadi cikal-bakal *Central for Strategic and International Studies* (CSIS) yang didirikan pada bulan September 1971setelah Pemilu 1971 usai.[251]

Salah satu karya tulis yang melukiskan pandangan Beek mengenai Indonesia pasca G30S/PKI adalah *From Madiun.*[252] Menurut Wejak, *From Madiun* yang diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Misi Katolik (dijalankan oleh Serikat Yesuit) adalah narasi sejarah yang terjadi sebelum tulisan tersebut disusun, dengan obyek mengenai bahaya komunisme di masa lalu dan Islam di masa

www.setabasri.org

[249] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* Appendix 1., p. 320. Jika lingkaran intelijen bawah tanah PSI, seperti direpresentasikan oleh Soe Hok Gie (dalam kelompok Gerakan Mahasiswa Sosialis akronim GEMSOS) sel-selnya diasosiasikan dengan Sumitro Djojohadikusumo, maka lingkaran intelijen Katolik (dalam kelompok PMKRI dan Partai Katolik) diasosiasikan dengan Pater Beek ini.

[250] G. Budi Subanar, SJ. *Oase Drijarkara: Tafsir Gerakan Masa Kini*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2013, h. 45

[251] Kesimpulan ini merujuk pada Salim Said, Dari Gestapu …, *op. cit.,* h. 34. Duduk di kepengurusan Biro Dokumentasi adalah Pater Beek selaku pemimpin Biro, Dr. Sudjati Djiwandono dan Kajat Hartoyo sebagai pembantu Beek. Harry Tjan Silalahi dan Liem Bian Kie juga aktif dalam Biro Dokumentasi. Dua nama yang disebut terakhir kemudian dekat hubungannya dengan Ali Moertopo. Sementara dengan Soedjono Hoemardhani, bonding Soeharto lainnya yang lebih dekat hubungannya adalah Liem Bian Khoen (Sofyan Wanandi, saudara kandung Liem Bian Kie) dan banyak berurusan dengan masalah ekonomi.

[252] Justin Laba Wejak, Secular …, *op. cit.,* p. 6. Salah satu figur kuat di Partai Katolik, yaitu Frans Seda, memiliki hubungan dekat dengan Joop Beek. Seda menghadiri "*khasebul*" Beek selama 1960an di mana topik *From Madiun* kerap dibicarakan.

kemudian.[253] Selama Perang Dingin tingkat global, kelompok Yesuit dikenal sebagai *think tank* Gereja Katolik Indonesia, baik dalam masalah sosial maupun politik.[254] Pada paruh kedua tahun 1960an, individu dominan dalam hirarki aktivitas Katolik di Indonesia adalah Pater Beek sendiri.[255]

Kelompok Soeharto sentris dan lingkaran Pater Beek satu pandangan seputar Islam. Mujiburrahman menulis kesamaan sikap ini kemudian mendorong munculnya aliansi Katolik-Militer.[256] Aliansi Katolik-Militer bekerja melalui jalur hubungan antar personal. Mujiburrahman juga menjelaskan bahwa aliansi Katolik-Militer terbangun sekurangnya sejak awal 1960an melalui mediasi Pater Beek.[257] Mengenai pendekatan yang diambil Pater Beek ini, Mujiburrahman menulis:

> *Beek seemed to prefer a top-down approach to influence or even control the political power to secure the Catholics from the Communist threat. According to Beek, the best political power to oppose the Communists at that time was the military ... for this reason that before the coup, Beek had already made contact with Ali Moertopo and other Kostrad officers ... since the early 1950s, Beek worked with students, particularly the university students ... (PMKRI). After the coup, Beek's cadre of the PMKRI like Cosmas Batubara and the three prominent Chinese Catholics, Harry Tjan Silalahi, and the two brothers: Liem Bian Kie and Liem Bian Khoen*.[258]

www.setabasri.org

---

[253] Wejak menulis " … *the religious fear in the text – the implicit level of fear – is primarily concerned with the future – the eschatological fear of judgment in the Afterlife and the fear of the future threat of Muslim power in Indonesia*. Judul asli *From Madiun* adalah "*Dari Madiun ke Lubang Buaya, dari Lubang Buaya ke ...?*". Lihat *ibid.,* p. 33, 83- … Wejak berpendapat *From Madiun* adalah teks bukan untuk menakut-nakuti, melainkan justru teks yang merefleksikan rasa takut dari diri penulisnya, lalu saat dibaca oleh pemirsanya juga menimbulkan rasa takut mereka.
[254] Justin Laba Wejak, Secular …, *op. cit.,* p. 85.
[255] *ibid.*.
[256] Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press, 2006., p. 134.
[257] *ibid.* Mujiburrahman menulis "Aliansi Katolik-Militer terkait erat dengan peran seorang Yesuit yang berpengaruh namun agak misterius, Pastor Joop Beek (1917-1983).
[258] Mujiburrahman, Feeling …, *op. cit.*, p. 135.

> Beek tampak lebih memilih pendekatan *top-down* dalam mempengaruhi atau bahkan mengontrol kekuatan politik guna mengamankan umat Katolik dari ancaman Komunis. Menurut Beek, kekuatan politik terbaik melawan Komunis saat itu adalah militer ... karena alasan ini sebelum kudeta, Beek sudah melakukan kontak dengan Ali Moertopo dan perwira Kostrad lainnya ... sejak awal 1950-an, Beek bekerja dengan mahasiswa, khususnya para mahasiswa… (PMKRI). Pasca kudeta, kader Beek dari PMKRI seperti Cosmas Batubara dan tiga tokoh Katolik Tionghoa, Harry Tjan Silalahi dan dua bersaudara: Liem Bian Kie dan Liem Bian Khoen.[259]

Secara kuantitas kelompok Katolik minoritas dan sebab itu Beek memandang gerakan mereka harus lebih bersifat militan dan terorganisasi baik. Pasca G30S/PKI, Beek melembagakan "kaderisasi satu bulan" atau dikenal sebagai "khalwat sebulan" (*khasebul*) bagi pemuda Katolik yang dipusatkan di Asrama Realino, Yogyakarta.[260]

Dalam hiruk-pikuk perdebatan mengenai pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, Beek kemudian mendirikan pusat kaderisasi di Klender, Jakarta Timur pada tahun 1967.[261] Lingkaran Pater Beek juga bukan sekadar kelompok studi yang menitikberatkan diskursus teori melainkan kelompok aksi karena tindakan politik mereka nyata. Lulusan proyek kaderisasi Pater Beek kemudian diarahkan

www.setabasri.org

---

[259] Tahun 1964 Harry Tjan Silalahi telah berposisi sebagai Sekjen Partai Katolik lalu terpilih sebagai Sekretaris Umum KAP-Gestapu, aliansi sipil yang didukung TNI-AD untuk membasmi kaum komunis. Cosmas Batubara, Liem Bian Kie, dan Liem Bian Khoen masuk ke dalam jajaran pimpinan KAMI.

[260] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* p. 263. Dalam pelatihan, kader dilatih melakukan pidato, menulis, dan dinamika kelompok. Dengan kaderisasi ini, pemuda Katolik pun ikut berpartisipasi dalam operasi pembersihan komunis di Jawa Tengah. Kendati Beek tidak merepresentasikan kelompok Katolik secara utuh – juga di masa mendatang pola gerakannya diprotes kaum Yesuit lain – tetapi lingkaran Pater Beek-lah yang paling mampu mempengaruhi arah politik Soeharto pada umumnya, dan para perwira tradisionalis Jawa khususnya, pada kurun 1968 hingga 1971.

[261] Mujiburrahman menulis pusat kaderisasi di Klender aktif dalam kurun 1967 hingga 1977. Kompleks tersebut terdiri atas 3 blok dengan total 72 ruang dan 144 tempat tidur. Beek mengunjungi pusat kaderisasi 4 kali dalam setahun untuk memantau program *khasebul* yang tiap angkatannya terdiri atas 100 peserta, kendati ada peserta perempuan, tetapi mayoritas laki-laki. Donatur Beek berasal dari Belanda dan Jerman. Lihat Mujiburrahman, Feeling …, *op. cit.,* p. 136.

sesuai bakat dan kompetensi individual mereka seperti menjadi guru, jurnalis, atau aktivis politik.[262] Para "alumni" ini kemudian terlibat satu sama lain dalam sebuah jaringan, kendati organisasi tempat mereka bekerja bisa saja berbeda, baik itu organisasi Katolik atau non Katolik seperti parlemen ataupun lembaga pemerintah lainnya.[263]

Aliansi Katolik-Militer terindikasi menguat pasca hancurnya PKI. Para perwira di lingkaran Soeharto sentris dan para kader Pater Beek sama-sama menganggap bahwa kekuatan politik Islam adalah ancaman bersama. Mengenai dasar pilihan front Katolik untuk beraliansi dengan militer, Brian May menulis "Dengan kaum Komunis bukan lagi kekuatan, tinggal dua kemungkinan pemerintahan, kaum Muslim atau Angkatan Darat. Kami lebih memilih Angkatan Darat."[264] Selain itu Mujiburrahman mencatat: "… rasa takut atas kelompok Muslim mendorong sejumlah penasihat Presiden menggabungkan diri dengan Front Katolik".[265] Dengan demikian terjadi hubungan simbiosis mutualistis antara perwira lingkaran Soeharto sentris dengan lingkaran Pater Beek sehingga sulit untuk diduga siapa memanfaatkan siapa.

Individu perwira dalam lingkaran Soeharto sentris yang menjalin hubungan dengan kelompok Pater Beek adalah Ali Moertopo dan Sudjono Hoemardhani. Bahkan hubungan antara para kader Katolik dengan Ali Moertopo sudah

www.setabasri.org

[262] Mujiburrahman, Feeling …, *op. cit.,* p. 139.
[263] Setelah Beek meninggal, proyek *Khasebul* dilanjutkan oleh Lukas Rustam Alamsyah dan menurut Mujiburrahman terus berlangsung hingga tulisannya diterbitkan (tahun 2006). Kader-kader Beek seperti Harry Tjan Silalahi dan Liem Bian Kie bahkan mendirikan suatu lembaga yang kerap disebut *think tank* Soeharto pada tahun 1971.
[264] Brian May, The Indonesian …, *op. cit.,* p. 238.
[265] Mujiburrahman, Feeling …, *op. cit.,* p. 139. Pernyataan seperti ini juga terdapat dalam Brian May, The Indonesian …, *op. cit.,* p. 238.

berlangsung sebelum G30S/PKI. Kontak-kontak aliansi Katolik-Militer semakin intens sejak 1967, misalnya melalui Liem Bian Kie yang menjadi asisten Ali Moertopo atau Liem Bian Khoen yang menjadi asisten Sudjono Hoemardhani.[266]

Richard Tanter juga melaporkan bahwa pendekatan politik yang diterapkan Pater Beek ditujukan untuk melindungi umat Katolik dan ini dilakukan melalui penempatan kader-kader Katoliknya di pemerintahan.[267] Tanter menulis sikap Pater Beek terhadap Islam:

> *For Beek, the two great enemies of both Indonesia and the churches were communism and Islam, in which he saw many similar, threatening qualities. He had no interest in inter-religious dialogue or cooperation. After 1965, his militantly anti-Islamic position resonated with that of the dominant leadership stream of the Army. He preferred Indonesia was nationalist, and non-Islamic, with Christianity in a favored position, supporting a Golkar-type government ... indeed there was much which was wrong with Suharto's Indonand esia, the unacceptable character of the communist and Islamic alternatives left no choicto e but active support for the lesser evil*.[268]
>
> Bagi Beek, dua musuh besar Indonesia dan gereja adalah komunisme dan Islam, di mana dia melihat banyak kualitas serupa yang mengancam. Dia tidak tertarik pada dialog atau kerja sama antar agama. Setelah 1965, posisinya yang militan anti-Islam bergema dalam arus kepemimpinan dominan Angkatan Darat. Dia lebih menyukai Indonesia berkarakter nasionalis, non-Islam, dengan [penempatan orang] Kristen di posisi berpengaruh, mendukung pemerintahan gaya Golkar ... memang ada banyak yang salah dengan Indonesianya Suharto, tetapi karakter komunis dan Islam secara lebih lanjut tidak dapat diterima sehingga tidak menyisakan pilihan selain memberi dukungan aktif bagi kejahatan yang ia anggap lebih kecil].

Dalam teks *From Madiun* Pater Beek menyatakan setelah komunis runtuh, Islam muncul sebagai ancaman selanjutnya. Ada kemungkinan analisis Pater Beek didasarkan pada kecenderungan saat itu, terutama di dalam penyusunan

[266] Mujiburrahman, Feeling …, *op. cit.,* p. 139.
[267] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* Appendix 1, p. 319. Bandingkan dengan Salim Said, Dari Gestapu …, *op. cit.,* h. 33-34.
[268] *ibid.*, h. 33-34.

www.setabasri.org

GBHN oleh MPRS bahwa Indonesia dikhawatirkan tengah mengarah pada bentuk negara Islam.

Kelompok Beek terdiri atas kaum intelektual dan menguasai sejumlah informasi. Kelompok ini berkompetisi dengan PSI, seperti ditulis Tanter:

> *Beek was also intensely involved in a rivalry in the years before and after 1965 between a Catholic-intelligence stream and a Indonesian Socialist Party (PSI) stream which was also involved in underground intelligence activities. (These PSI activities included cells associated with Professor Sumitro, one member of which was Soe Hok Gie).*[269]
>
> Di tahun-tahun sebelum dan sesudah 1965 Beek juga secara intens terlibat dalam persaingan antara arus intelijen Katolik dan arus Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang juga terlibat dalam kegiatan intelijen bawah tanah. (Kegiatan PSI ini termasuk sel-sel yang terkait dengan Profesor Sumitro, salah satunya adalah Soe Hok Gie).

Beek memandang intelektual sekuler PSI adalah saingan bagi intelijen Katoliknya, sebab mereka sama-sama bermodalkan kekuatan analisis dan informasi, dengan kekuatan kader berjumlah kecil. Pater Beek juga diduga telah mengetahui hubungan antara Seskoad dengan para intelektual PSI saingannya.

Hal yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah nilai berharga apa yang bisa ditawarkan lingkaran Pater Beek bagi dominasi Soeharto. Di sinilah persekutuan Beek (melalui para kadernya) dan Soeharto (melalui para asistennya) terbentuk, yaitu Soeharto belum selesai dalam memastikan hirarki dominannya. Soeharto masih menghadapi kelompok Islam yang hendak mengintegrasikan Islam ke dalam negara, kaum intelektual yang menghendaki demokrasi, partai-partai politik "ideologis" yang mulai membangun kekuatan, ketidakpastian hasil

[269] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* Appendix 1, p. 320.

www.setabasri.org

Pemilu yang belum juga terselenggara, dan yang lebih pasti Soeharto belum memiliki basis kekuatan politik di kelompok sipil.[270]

Hubungan lingkaran Pater Beek dengan Soeharto adalah hubungan temporer saja bukan permanen. Berlanjut atau tidaknya aliansi mereka lebih ditentukan oleh Soeharto sendiri.[271] Hal ini bahkan dinyatakan sendiri oleh Ali Moertopo dengan menyatakan "Soeharto tidak sepenuhnya percaya kepada kita. Dia menggunakan kita, dan itulah tugas kita untuk memberi masukan kepadanya, mempersiapkan segalanya sedemikian rupa sehingga sulit baginya untuk mengabaikan kita."[272]

Sebagai kelanjutan dari aktivitas lingkaran Pater Beek maka pada tahun 1971 terjadi diskusi antara dua kader Pater Beek yaitu Harry Tjan Silalahi dan Liem Bian Kie seputar langkah yang diambil setelah Sekber Golkar memenangkan Pemilu.[273] Ali dan Soedjono menjadi ketua kehormatan CSIS sekaligus pelindung politik. Dua ASPRI Soeharto tersebut juga yang menjadi penyokong dana bagi CSIS melalui pengaruh mereka atas sejumlah pengusaha. Namun, seperti ditulis Yusuf Wanandi bahwa terdapat keinginan Soeharto untuk mendominasi lembaga pemikir tersebut:

> "Dari sudut pandangnya [Soeharto] lebih baik kalau kami berada di bawah kendalinya karena kami akan berhutang budi kepadanya. Tapi hal itu akan membatasi ruang gerak kami. Saya teringat saat itu bahwa Soeharto sungguh pintar. Kalau kami tidak berhati-hati, kami akan berada di bawah

www.setabasri.org

[270] Mujiburrahman, Feeling …, *op. cit.,* p. 139.
[271] Di tahun 1980-an setelah berkonflik dengan Benny Moerdani, Soeharto mulai menjaga jarak dengan kelompok Katolik dan justru mendekati kelompok Islam dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
[272] Yusuf Wanandi. Menyibak …, *op. cit.,* h. 106. Ali menyatakan ini kepada Liem Bian Kie dan kawan-kawan setelah berdirinya Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
[273] Langkah tersebut adalah mendirikan lembaga kajian yaitu *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) yang diupayakan independen dari pemerintah dan Soeharto. Lihat dalam *ibid.,* h. 134-135.

> pengaruhnya. Kami mengatakan bahwa kami akan lebih berguna baginya kalau berada di luar pemerintahan. Sebagai lembaga yang independen, kami akan lebih kredibel di mata masyarakat internasional. Ia menerimanya dan tidak pernah berusaha menyensor kegiatan kami. Apakah ia menerima saran-saran kami sepenuhnya, itu adalah masalah lain sama sekali."[274]

Hingga Bab II ini telah dibahas mengenai Soeharto dan *bonding*nya. Diawali dengan prediktabilitas spesies yang tidak menentu di era akhir dominasi Sukarno, maka sebagai reaksi atasnya Soeharto menjalin ikatan kelompok (*bonding*) dengan sejumlah perwira yang posisinya minor apabila dibandingkan dengan Soeharto. Keminoritasan posisi tersebut memungkinkan Soeharto berlaku sebagai *alpha male* di dalam *bonding* tersebut. Pada lain pihak, tanpa menjalin *bonding* Soeharto tentu tidak akan mampu menghadapi PKI dan kemudian Sukarno. Kerja-kerja para *bonding* ini kemudian diluaskan ke tingkat aneka kekuatan politik potensial yang bersedia beraliansi dengan Soeharto untuk membubarkan PKI maupun diberikan keleluasaan untuk

Selain para *bonding* Soeharto juga membentuk formasi koalisi secara bervariasi. Keputusan koalisi tersebut bersifat taktis yaitu untuk menghadapi tantangan yang dekat, baik secara fisik maupun waktu. *Bonding* Soeharto banyak berasal dari lingkaran Tradisionalis Jawa, sementara formasi koalisi ia bangun dengan lingkaran yang ia tidak terlampau dekat tetapi dinilai mendukung reproduksi kekuasaannya seperti Lingkaran Pater Beek maupun Kelompok Sipil-Militer Seskoad. Untuk lingkaran Pater Beek kerja-kerja para *bonding*-nya cukup kentara sementara untuk lingkaran Sipil-Militer Seskoad Soeharto

[274] Yusuf Wanandi. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik 1965-1998*. Cetakan 1. Penerjemah Endy Bayuni. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018, h.135-136.

www.setabasri.org

menggunakannya hubungan tersebut sebagai instrumen untuk menjustifikasi kekuasaannya.

www.setabasri.org

BAB III

SOEHARTO DAN REPRODUKSI KEKUASAAN

Langkah Soeharto kemudian adalah melakukan reproduksi kekuasaan. Reproduksi ini dimaksudkan untuk menggandakan kekuasaan yang ada di tangannya agar membesar sehingga efektif dalam melakukan fungsi *constraint, force, subordination,* dan menciptakan *dependence* atas pihak lain. Proses reproduksi kekuasaan Soeharto yang diamati berkisar pada lima sasaran yaitu memastikan kekuasaannya atas TNI-AD, melakukan reorganisasi angkatan bersenjata, memastikan submisi kekuatan politik Islam dan Nasionalis, memberdayakan Sekber Golkar, serta melaksanakan Pemilu 1971 dengan hasil yang mampu mengkonfirmasi dominasinya.

A. Reproduksi Kekuasaan melalui Reorganisasi Angkatan Bersenjata

Angkatan bersenjata adalah satu-satunya hirarki yang punya otoritas menggunakan paksaan (*constraint*) dengan kekuatan (*force*) senjata. Sesungguhnya sejak 1966 Soeharto telah memperlihatkan kecenderungan untuk membangun hirarki dominan bagi dirinya sendiri dengan menolak penunjukan Sukarno atas Pranoto Reksosamudro sebagai *caretaker* Achmad Yani. Mengingat angkatan bersenjata punya sumber daya penting maka penting pula bagi Soeharto untuk mereproduksi kekuasaan di dalam hirarki ini. Pada masa lampau Sukarno selalu kesulitan untuk mereproduksi kekuasaannya di tubuh angkatan bersenjata secara menyeluruh. Namun, Soeharto berbeda karena ia sendiri adalah bagian dari kelompok militer.

www.setabasri.org

Disertasi ini hanya fokus pada upaya reproduksi melalui penempatan para perwira kunci dan pembangunan kelembagaan yang dapat menjamin dominasi Soeharto. Pertama dilakukan di dalam hirarki TNI-AD, dan selanjutnya terhadap angkatan bersenjata. Mereka yang tidak menerima dominasinya atau ia curigai loyalitasnya akan ditempatkan pada jabatan yang jauh dari pusaran politik pusat, posisi tanpa kemampuan pengerahan pasukan, atau posisi non militer. Reproduksi kekuasaan di tubuh militer juga penting mengingat telah terjadi pembelahan sikap perwira dalam transisi politik Sukarno ke Soeharto ke dalam tiga faksi.[275]

Faksi pertama adalah perwira anti PKI, tetapi bukan militan anti Sukarno.[276] Faksi kedua adalah golongan pembaru moderat, dalam mana Nasution dan Soeharto termasuk ke dalamnya.[277] Faksi ketiga adalah pembaru radikal yang terdiri atas perwira anti PKI sekaligus anti Sukarno.[278]

Pembagian faksi ke dalam tiga kategori mungkin masih dapat diperdebatkan, tetapi hal yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa proses reproduksi

www.setabasri.org

[275] Ulf Sundhaussen, Politik Militer … , *op. cit.,* p. 390-395. Pembagian faksi didasarkan atas Sundhaussen ini.

[276] Persoalan mereka dengan Sukarno diyakini akan selesai begitu PKI dibubarkan. Kelompok perwira ini terkonsentrasi di TNI-AL, TNI-AU, TNI-AK, dan dua divisi Angkatan Darat (Diponegoro dan Brawijaya).

[277] Konsentrasi perwira ini terdapat dalam Divisi Diponegoro yang merupakan loyalis Soeharto, klik Soeharto di Kostrad, serta para pengikut Nasution. Termasuk ke dalam faksi kedua ini adalah Sudirman dan Basuki Rahmat dari Divisi Brawijaya juga Mayjen Sarbini. Berbeda dengan faksi pertama, maka persoalan mereka dengan Sukarno belum selesai kendati PKI telah bubar, melainkan perlu bagi Sukarno untuk menerapkan politik yang lebih rasional, tidak pro komunis, modern, lebih pragmatis, dan tidak memusuhi Barat. Jika persyaratan tersebut mampu Sukarno penuhi maka ada kemungkinan bahwa para pembaru moderat ini tidak berkeberatan Sukarno terus berkuasa.

[278] Bagi faksi ini maka persoalan dengan Sukarno tidak selesai dengan hanya pembubaran PKI, tetapi Sukarno pun juga harus turun dari kekuasaan agar proses modernisasi dan pragmatisme dalam ekonomi dapat berjalan. Bagi faksi ketiga ini, tidak akan ada pembaruan dalam aneka bidang tanpa Sukarno terlebih dahulu diganti oleh orang lain. Di dalam faksi ini, lingkaran Seskoad pimpinan Suwarto, sebagian perwira di Divisi Siliwangi, serta sejumlah komandan luar Jawa adalah inti penggeraknya.

kekuasaan Jenderal Soeharto tidaklah mudah. Belum lagi rampung Sukarno memberikan submisi kepadanya, perbedaan pendapat di kalangan angkatan bersenjata terjadi.

1. Reproduksi Kekuasaan di Tubuh TNI-AD Pasca 1965

Soeharto memperoleh cukup banyak persoalan dengan faksi pertama dan ketiga. Seperti telah secara teoretis dikemukakan oleh Arnold M. Ludwig, maka tindakan politik banyak ditentukan oleh struktur limbik otak yang mengatur persoalan *survival* suatu spesies. Bagi Ludwig pula keberanian dan kelicikan lebih menentukan sukses atau tidaknya seorang penguasa dalam melancarkan tindakan politik ketimbang kompetensi akademik maupun profesional. Dalam konteks ini, sebab itu, sehubungan dengan karakter Soeharto, Salim Said menyatakan:

> Modal utama kekuasaan Soeharto adalah dukungan tentara dan kemarahan rakyat kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai seorang dengan insting kekuasaan yang ternyata tajam, Soeharto sadar tidak memiliki cukup karisma dan pengalaman politik seperti yang dipunyai pendahulunya. Dengan latar belakang yang demikian, Soeharto yakin kekuasaannya hanya akan tegak dan bertahan jika potensi pesaing di kalangan militer disingkirkan dengan segera.[279]

Untuk itulah maka insting pertama Soeharto adalah memastikan akses kekuasaan di tubuh TNI-AD lebih dahulu terbuka bagi dirinya dengan melakukan penyingkiran atas perwira pesaing. Said menulis bahwa sekurangnya terdapat tiga insting Soeharto dalam membangun dan mempertahankan kekuasaannya.[280] Ketiga

www.tetabasri.org

[279] Salim Haji Said, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Cetakan I. Bandung: Mizan, 2016, h. 10-11.

[280] Said menyebutnya strategi. Namun, peneliti cenderung menyebutkannya sebagai insting karena Soeharto bergantung pada kemampuannya berpikir cepat sesuai instingnya untuk bertahan hidup seperti diarahkan oleh susunan bagian limbik otaknya. *Pertama*, menyingkirkan semua Perwira berorientasi kiri dan Sukarnois. *Kedua*, mempromosikan para jenderal yang dianggapnya tidak punya potensi menggunakan tentara melawan sang Presiden. *Ketiga*, para pendukung yang berjasa bagi kemenangan politik Soeharto, tetapi menonjol dalam masyarakat, atau dianggap mempunyai

insting tersebut adalah khas bagi individu *alpha male* yang tengah memperbesar kekuasaannya. Balas jasa hanya boleh terjadi pada individu yang tidak berpotensi menjadi *alpha male* baru, sementara bagi yang berpotensi akan diambil-alih akses mereka atas reproduksi kekuasaan.

Di tubuh TNI-AD Soeharto melakukan eliminasi atas sejumlah perwira yang terlibat G30S, menyingkirkan faksi pertama, menempatkan perwira dari faksi kedua (kecuali Nasution dan *bonding*-nya) yang ia nilai loyal ke posisi penting, kemudian "membuang" perwira faksi ketiga ke jabatan yang kurang berdaya setelah melakukan pekerjaan bagi dirinya. Taktik ini dilakukan Soeharto agar statusnya selaku *alpha male* menjadi terkonfirmasi.

Sejak awal Soeharto menantang Sukarno dengan tidak hanya menyingkirkan perwira yang menjadi kader *Biro Chusus* PKI melainkan pula yang terhitung sebagai loyalis Sukarno seperti dimuat dalam **Lampiran 2** *Reproduksi Kekuasaan Awal dalam Hirarki TNI-AD*.[281] Soeharto menentang penunjukan Sukarno atas Pranoto sebab secara taktis Soeharto berpikir jika ia tidak tolak maka lambat-laun Sukarno memanfaatkan TNI-AD untuk menghadapi dirinya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Soeharto melakukan *fight* dengan menolak penunjukan Sukarno atas Pranoto. Keberanian ini membuahkan hasil sebab pada tanggal 15 Oktober 1965 akhirnya posisi Menpangad jatuh kepada dirinya. Posisi Pangkostrad tetap ia pegang hingga 7 Desember 1965, saat ia menunjuk Umar Wirahadikusumah selaku pengganti.

www.setabasri.org

agenda sendiri, dengan segera disingkirkan dari posisi-posisi berpengaruh. Lihat Salim Haji Said, Menyaksikan …, *op. cit.,* h. 10.

[281] Untuk kolom Pejabat diterakan Nama, Pangkat, dan asal Divisi atau kesatuannya. Pencantuman divisi karena saat itu primordialisme di kalangan militer masih cukup kuat.

Penunjukan Umar dilakukan mengingat ia adalah perwira pertama yang mendukung langkah-langkah Soeharto, selain memberi dukungan atas pembentukan KAP-Gestapu yang diinisiasi kelompok Islam yang terafiliasi Masyumi pada malam 1 Oktober 1965. Posisi Umar Wirahadikusumah selaku Pangdam Djaya diserahkan Soeharto kepada Amir Machmud. Amir sebenarnya adalah perwira yang dekat dengan Sukarno (bagian dari faksi pertama) tetapi seiring perkembangan politik dan menurunnya kekuasaan Sukarno, ia sepenuhnya menjadi *bonding* Soeharto.

Di waktu kemudian Soeharto membentuk jabatan baru yaitu Deputi Pangad mulai tanggal 15 Agustus 1966.[282] Jabatan ini ia serahkan kepada Maraden Panggabean, anggota SPRI. Panggabean beragama Kristen Protestan yang berasal dari Kodam Sriwijaya tempat aktivitas Ibnu Sutowo. Maraden sekaligus merangkap tugas selaku Deputi II Administrasi Pangad yang ia jabat sejak tanggal 25 Oktober 1965 menggantikan Soeprapto, perwira SUAD yang menjadi korban G30S/PKI.

Untuk jabatan Deputi I Operasi Pangad, Soeharto memutasi Mursyid yang merupakan bagian faksi pertama dan berasal dari Divisi Siliwangi, sama seperti Ibrahim Adjie. Soeharto kemudian mengganti Mursyid dengan Soerono, koleganya sendiri dari Divisi Diponegoro, pada tanggal 26 Mei 1966.

Posisi yang terbilang belum matang dipertimbangkan Soeharto adalah Asisten I Intelijen Pangad dengan mana ia malah menunjuk Sudirgo untuk menggantikan R. Sugih Arto pada 27 April 1966. Kelak Sudirgo ini ditangkap

[282] Soeharto telah menjadi pengemban Supersemar dan tentu sejak Agustus 1966 ia telah disibukkan urusan manajemen negara bersama dua anggota triumvirat lain: Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adam Malik.

www.setabasri.org

dengan tuduhan bercabang yaitu bersikap simpatik atas G30S/PKI serta punya kedekatan dengan Sukarno (tampaknya yang terakhir lebih tepat). Untuk posisi Asisten II Operasi Pangad, Soeharto memasukkan Sumitro menggantikan Djamin Gintings yang memperoleh tugas baru. Sumitro kelak membantu Soeharto untuk mengurus Kopkamtib, di samping nantinya diserahi posisi selaku Pangdam Brawijaya tanggal 17 Juni 1966 menggantikan R. Sunarijadi, bagian dari faksi pertama.

Pada posisi Asisten III Personil, Pranoto Reksosamudro "musuh" pribadi Soeharto yang telah menjabat sejak 30 Juni 1962 digantikan oleh H.R. Dharsono, salah satu eksponen faksi ketiga pada tanggal 25 Oktober 1965. Pranoto adalah bagian dari perwira faksi pertama yang juga memiliki simpati tersendiri atas PKI. Untuk itulah secara kontras Jenderal Soeharto menggantikannya dengan Dharsono, salah satu radikal anti PKI dan anti Sukarno dari Divisi Siliwangi. Kelak Dharsono terus digunakan Soeharto untuk membersihkan pengaruh Sukarno ketika pada tanggal 20 Juli 1966 ditunjuk menggantikan Ibrahim Adjie (bagian faksi pertama) selaku Pangdam Siliwangi.[283]

Darjatmo, seorang *bonding* Soeharto dari klik Diponegoro menggantikan posisi Soedjono selaku Asisten VI yang berhubungan dengan Kelompok Fungsional pada tanggal 25 Oktober 1965.[284] Pada posisi Asisten VII Audit dan

www.setabasri.org

[283] Posisi Asisten III Personil yang dijabat Dharsono digantikan oleh perwira Divisi Siliwangi lainnya yaitu Wahju Hagono pada tanggal 26 Mei 1966. Lihat The Editors, Data on Current Military Elite. 1967. *Indonesia*. No. 3 (Apr.) pp. 205-216.

[284] Di kemudian hari proses reproduksi kekuasaan Soeharto berupa pemberdayaan Sekber Golkar banyak terbantu oleh *bonding*-nya asal Divisi Diponegoro yaitu Darjatmo.

Comptroller, Soeharto tetap mempercayakannya pada Alamsjah, seorang *bonding* yang telah dekat dengan Soeharto sejak tahun 1960.

Reproduksi kekuasaan di tubuh TNI-AD terus dilanjutkan Soeharto setelah ia menjadi pejabat presiden tahun 1967. Penunjukan-penunjukan perwira untuk mengisi posisi strategis dimuat dalam **Lampiran 3** *Reproduksi Kekuasaan dalam Hirarki TNI-AD setelah Soeharto Menjabat Presiden*.[285] Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966, peluang reproduksi kekuasaan Soeharto semakin besar saat ia melakukan formalisasi atas institusi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dengan dirinya sendiri selaku panglima.

Terhitung sejak tanggal 17 Mei 1968, Soeharto menunjuk Maraden Panggabean (Jenderal) sebagai Panglima TNI-AD, posisi yang awalnya dijabat Soeharto sendiri.[286] Sebelum Soeharto menyerahkan jabatan kepada Panggabean, Umar Wirahadikusumah (Letjen) terlebih dahulu dijadikan wakil panglima TNI-AD sejak tanggal 29 Mei 1967 menggantikan posisi Panggabean. Jabatan Umar sebelumnya adalah Pangkostrad menggantikan Kemal Idris (anggota faksi ketiga) yang kurang disukai Soeharto karena gerakan peralihan kekuasaannya yang terlalu "kasar" terhadap Sukarno. Di masa sebelumnya, Umar pernah menolak perintah Sukarno untuk melarang aktivitas Liga Demokrasi saat ia masih menjabat komandan garnisun Jakarta.[287]

www.setabasri.org

---

[285] Format tabel sama seperti tabel sebelumnya yaitu dimuat kepala-kepala kolom Posisi, Pejabat Baru, Mulai Tugas, Jabatan Sebelumnya, dan Pejabat Diganti. Khusus untuk kolom Posisi dimuat nama pejabatnya, pangkatnya, serta asal divisi atau kesatuannya.

[286] Panggabean sesungguhnya mulai menjabat panglima sejak 29 Mei 1967. Jabatan sebelumnya wakil komandan teritorial II Sumatera Selatan. Secara etnis, Panggabean adalah Batak Toba. Lihat The Editors, Current Data on the Indonesian Army Elite. 1969. *Indonesia.* No. 7 (Apr.), pp. 195-201., p. 195.

[287] Liga Demokrasi adalah koalisi untuk menolak keputusan Sukarno untuk mengebiri parlemen. Berdiri 24 Maret 1960. Pendirian Liga disokong 5 tokoh IPKI dan 10 tokoh mewakili Masyumi,

Soeharto terus memantau loyalitas Soemitro (Mayjen) dari Divisi Brawijaya, karena ia tidak termasuk orang yang ikut menandatangani pernyataan dukungan Keluarga Besar Brawijaya atas Sukarno. Sumitro kemudian ditunjuk Soeharto menjadi Deputi I Operasi Pangad pada tanggal 11 Mei 1967. Soemitro menggantikan Surono (Mayjen).

Darjatmo (Mayjen) kembali dipromosikan Soeharto selaku Deputi III Keuangan/Hubungan Sipil Pangad pada tanggal 27 Februari 1968. Posisi Darjatmo sebelumnya adalah Asisten VI Kelompok Fungsional Pangad. Kelak Darjatmo ini menjadi anggota Dewan Pembina Golkar setelah "partai" tersebut memenangkan Pemilu 1971. Darjatmo menggantikan posisi Alamsjah (Mayjen) yang diangkat Soeharto sebagai Menteri Sekretaris Negara.[288] Darjatmo termasuk *bonding* Soeharto sebab ia dulu pernah menjadi anak buahnya saat menjadi komandan batalion 4, Resimen 231, Divisi III.[289]

Dalam menentukan posisi Asisten I Intelijen Pangad, tanggal 11 Mei 1967 Soeharto menempatkan Sutopo Yuwono (Brigjen). Sutopo yang pernah berdinas di Divisi Diponegoro dan Siliwangi ini menggantikan Sudirgo (Mayjen) yang dicurigai sebagai bagian dari faksi pertama. Tahun 1965 Sudirgo pernah belajar di

www.setabasri.org

ormas NU, Partai Katolik, Partai Kristen, dan PSI. Lihat Ulf Sundhaussen, Politik Militer …, *op. cit.,* h. 259. Deliar Noer mencatat secara berbeda yaitu bahwa Liga Demokrasi diinisiasi oleh Rais ke-2 NU yaitu K.H. M. Dahlan dan Ketua Pemuda Anshor Imron Rosyadi, beberapa orang Masyumi, PSI, serta kalangan independen. Liga Demokrasi didirikan tanggal 24 Maret 1960 dengan tujuan "mempertahankan negara, agama, dan masyarakat." Liga Demokrasi sekadar "badan pertemuan" bukan suatu organisasi yang mencari keanggotaan. Musuh dari Liga Demokrasi adalah para pendukung Demokrasi Terpimpin. Lihat Deliar Noer, Partai Islam di Pentas …, *op. cit.,* h. 431-432. Saat itu pangkat Umar masih Kolonel.

[288] Lihat The Editors, Current Data on the Indonesian Army Elite. 1969. *Indonesia.* No. 7 (Apr.), pp. 195-201., p. 196.

[289] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* Appendix 1., p. 322. Tahun 1960 Darjatmo sempat pula bersekolah militer di Fort Leavenworth, AS.

Fort Leavenworth dan tahun 1966 merupakan penasihat sekaligus salah satu pimpinan Seminar Kedua Angkatan Darat.[290]

Posisi Asisten VI Kelompok Fungsional Pangad dipercayakan pada Isman (Mayjen) tanggal 16 Oktober 1968. Isman juga aktif di Sekber Golkar selaku pimpinan salah satu KINO. Isman berasal dari unsur bekas Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan beretnis Jawa, dengan jabatan sebelumnya duta besar untuk *United Arab Republic*. Isman menggantikan posisi Darjatmo (Mayjen).[291] Seperti telah diungkap sebelumnya, Darjatmo adalah *bonding* Soeharto sekaligus penghubung Soeharto dengan aneka golongan fungsional terutama di Sekber Golkar. Soeharto juga menunjuk Wahono (Brigjen) sebagai Pangkostrad menggantikan Kemal Idris (Mayjen) pada tanggal 11 Maret 1969. Kemal ”dibuang” oleh Soeharto ke wilayah luar Jawa, sementara Wahono merupakan salah satu perwira lingkaran Soeharto sentris.

Setelah reproduksi kekuasaan di tubuh staf TNI-AD dianggap cukup, Soeharto melangkah pada aneka posisi Komando Antar Daerah (Koanda). Pada tanggal 18 Mei 1967 Soeharto mengangkat Kusno Utomo Widjojokerto (Mayjen) yang berasal dari Divisi Siliwangi untuk menjadi Deputi Pangad merangkap Koanda Sumatra. Penempatan Kusno ini menarik mengingat ia menggantikan posisi Achmad Junus Mokoginta (Letjen), seorang perwira yang dianggap bagian dari faksi pertama. Di masa setelahnya Mokoginta “dibuang” Soeharto untuk menjadi duta besar di negara lain. Jabatan Kusno sebelumnya Deputi III Keuangan

[290] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* Appendix 1, p. 360. Saat revolusi fisik, Sudirgo termasuk ke dalam kelompok Zulkifli Lubis yang anti komunis.
[291] The Editors, Current Data on the Indonesian Army Elite. 1969. *Indonesia.* No. 7 (Apr.), pp. 195-201, p. 197.

www.setabasri.org

dan Hubungan Sipil Pangad. Dengan mengangkat Kusno, Soeharto hendak memastikan pengaruh Sukarno atas para perwira di Sumatra dapat direduksi sekaligus menjauhkan apa yang ia curigai sebagai bagian faksi pertama agar tidak terkonsentrasi di pulau Jawa.[292] Sementara itu, Kemal Idris (Mayjen) "disingkirkan" oleh Soeharto menjadi Deputi Pangad sekaligus Koanda Indonesia Timur. Kemal menggantikan posisi Askari (Mayjen), dan posisi Kemal sebelum dipindahkan adalah cukup strategis yaitu Pangkostrad.[293]

2. Reproduksi Kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata

Reproduksi kekuasaan secara menyeluruh juga dilakukan Soeharto di tubuh angkatan bersenjata. Sejak 1968 Soeharto menilai bahwa reproduksi kekuasaan semata di tubuh TNI-AD belum cukup guna menjamin hirarki dominannya. Aneka hirarki seperti TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AK juga perlu didominasi agar tunduk. Soeharto juga mungkin berasumsi bahwa masalah utama dalam angkatan bersenjata adalah posisi setiap panglima matra terlampau kuat karena punya kewenangan menggerakkan pasukan dan menunjuk staf umum masing-masing. Soeharto tidak bisa hanya mengandalkan penempatan orang-orang pilihannya di setiap matra sementara masing-masing matra masih memiliki komando yang relatif otonom. Soeharto harus mulai mereproduksi kekuasaan di dalam hirarki angkatan bersenjata secara menyeluruh (*comprehensive*), bukan sekadar parsial berupa pemosisian individu pilihannya ke sejumlah jabatan seperti dahulu pernah dilakukan Sukarno dan gagal menguasai angkatan bersenjata secara keseluruhan. Reproduksi

www.setabasri.org

[292] The Editors, Current Data …, *op.cit.*, p. 198.
[293] *ibid.*

kekuasaan secara komprehensif inilah yang Soeharto lakukan melalui pengumumannya pada tanggal 5 Oktober 1969 tentang reorganisasi angkatan bersenjata.[294]

Dengan menggunakan hasil pikiran Sumitro, Soeharto mengadakan reorganisasi atas aneka hirarki angkatan bersenjata selama bulan November 1969 hingga April 1970.[295] Sumitro (Letjen) selaku Kepala Staf Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) menyatakan bahwa integrasi angkatan bersenjata akan mencegah munculnya situasi seperti di Amerika Latin, dengan mana kudeta selalu dilakukan oleh angkatan bersenjata atau individu-individu di dalamnya."[296]

Namun, inti sesungguhnya dari reorganisasi Soeharto adalah upaya menciptakan pemusatan kendali angkatan bersenjata ke dalam tangannya melalui Departemen Hankam. Pucuk pimpinan di Departemen Hankam akan diduduki perwira TNI-AD yang Soeharto percayai loyalitas sekaligus bergantung kepadanya semisal Maraden Panggabean yang berlatar primordial minoritas (beragama non Islam). Reorganisasi juga membuat ketiga matra lain jatuh di bawah dominasi TNI-AD karena seorang Kepala Staf Hankam ini akan berasal dari TNI-AD.

www.setabasri.org

[294] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970. 1970. *Indonesia*. No. 10 (Oct.) pp. 194-208., p. 195.

[295] Sumitro banyak melakukan reorganisasi agar TNI-AD mampu menjadi "mesin penekan" yang cukup canggih, dan ini ia awali dengan pikirannya mengenai reorganisasi ABRI. Dalam reorganisasi ini terjadi reformasi struktural yang mengintegrasikan seluruh angkatan bersenjata ke dalam dominasi TNI-AD dan melakukan sentralisasi kekuasaan di dalam TNI-AD itu sendiri. Imbas dari reorganisasi ini adalah semakin efektifnya angkatan bersenjata untuk mengendalikan kehidupan sipil. Lihat Peter Britton, Indonesia's Neo-Colonial Armed Forces. 1975. *Bulletin of Concerned Asian Scholars,* 7:3, pp. 14-21., p. 16.

[296] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 195.

Pada tanggal 5 Oktober 1969 Soeharto menciptakan sebuah struktur baru yaitu Deputi Panglima Angkatan Bersenjata (Deputi Pangab).[297] Posisi ini diciptakan akibat Soeharto sendiri mulai disibukkan oleh berbagai tugas selaku Presiden Republik Indonesia tetapi masih menjabat Pangab. Tugas Deputi Pangab adalah pelaksana harian otorisasi angkatan bersenjata yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hankam/Pangab. Selain itu diciptakan pula jabatan Pangkopkamtib untuk menjamin keamanan internal negara.[298] Koordinasi tugas Kopkamtib dilakukan dengan Deputi Pangab. Kopkamtib sendiri merupakan badan otonom dan hanya bertanggung jawab kepada Soeharto melalui Menteri Hankam/Pangab.

Posisi baru lainnya adalah Kepala Staf Umum (Kasum) yang kewenangannya dahulu mirip Deputi III Menhankam. Dalam reproduksi kekuasaan Soeharto, fungsi tersebut dipisahkan tersendiri dengan tanggung jawab utama mengkoordinasikan kegiatan aneka staf.[299] Dipisahkannya aneka tugas tersebut ke tangan seorang Kasum memungkinkan Menhankam fokus pada pengawasan kegiatan di keempat matra. Pada lain pihak, saat hendak memilih sejumlah stafnya kini pimpinan

www.setabasri.org

[297] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …. p. 196.

[298] *ibid.* Menurut Peter Britton Kopkamtib adalah "lengan eksekutif" dari pemerintahan militer Indonesia. Awalnya Kopkamtib dibentuk untuk menumpas komunisme yang selanjutnya memperoleh kekuasaan *extraordinary* yang didelegasikan kepada Pelaksana Khusus Daerah (LAKSUSDA) di setiap daerah. Kopkamtib berbeda dengan Opsus. Jika Opsus bekerja secara informal dan tertutup maka Kopkamtib secara terbuka membawakan kepentingan Departemen Pertahanan dan Keamanan serta menggunakan senjata berupa otoritas militer formal. Lihat Peter Britton, Indonesia's Neo-Colonial Armed Forces. 1975. *Bulletin of Concerned Asian Scholars.* 7:3, pp. 14-21.

[299] Staf-staf ini terdiri atas Staf Intelijen Gabungan keempat matra, Staf Operasi Gabungan, Staf Personel Gabungan, Staf Logistik Gabungan, Staf Teritorial Gabungan, dan Staf Komunikasi dan Elektronik Gabungan. Setiap "gabungan" dikepalai oleh seorang kepala.The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 197

masing-masing matra harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kasum selaku perpanjangan tangan Menhankam. Gambaran lengkap upaya reproduksi kekuasaan Soeharto di dalam hirarki angkatan bersenjata dapat dilihat pada **Lampiran 5** *Reproduksi Kekuasaan Soeharto dalam Tubuh Angkatan Bersenjata Tahun 1969*. Posisi baru lainnya adalah Kepala Staf Departemen yang dahulunya dipegang oleh Deputi I Menhankam.[300]

Selain Kepala Staf Departemen, struktur baru lainnya adalah Staf Hubungan Non-Militer yang dahulu di bawah kewenangan Asisten II Menhankam dan kini dijadikan departemen tersendiri.[301] Untuk mensubordinasi predikat pimpinan matra, Soeharto kini menggunakan predikat baru atas mereka.[302] Soeharto mengganti predikat "panglima" dan kini hanya menyebut jabatan tersebut sebagai Kepala Staf Angkatan seperti Kasal, Kasau, Kasad, dan Kepala Kepolisian. Jabatan menteri *ex-officio* dalam kabinet juga dihilangkan.

Para Kepala Staf Angkatan kini tidak lagi otonom mengelola unit-unit di dalam matranya.[303] Otoritas mereka setara dengan Kepala Staf Umum, Kepala Staf Departemen, dan Kepala Staf Hubungan Non Militer. Atau dengan kata lain, posisi mereka setara dengan para deputi di bawah otoritas Menhankam.[304] Para

www.setabasri.org

[300] Kepala Staf Departemen bertanggung jawab mengkoordinasikan aneka kegiatan Staf Sumber Daya Manusia, Staf Pengembangan Material, Staf Keuangan, Staf Pendidikan, Staf Hukum, serta Staf Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang setiapnya dikepalai oleh seorang Asisten

[301] Tanggung jawab utama Staf Hubungan Non-Militer adalah mengkoordinasi kegiatan para Staf Sosial Politik, Staf Personil dalam Fungsi Non Militer, dan Staf Operasi *Civic Mission*. Sama seperti Kepala Staf Departemen, kestafan ini dikepalai oleh seorang Asisten. Setiapnya dipimpin seorang Asisten. Staf Hubungan Non Militer merupakan salah satu kunci pemberdayaan atas Sekber Golkar. Lihat The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 197.

[302] *ibid.*, p. 197.

[303] *ibid.,* p. 198.

[304] Maraden Panggabean adalah Deputi Pangab dengan kedudukan langsung di bawah Soeharto. Sebelumnya Panggabean menggantikan posisi Soeharto selaku Pangad dua bulan pasca G30S/PKI.

"panglima" matra kini hanya memegang fungsi koordinatif saja.[305] Dengan reproduksi kekuasaan inilah Soeharto berhasil mendominasi angkatan bersenjata secara lebih komprehensif. Pimpinan matra kini berposisi setara dengan Eselon Staf. Para kepala staf keempat angkatan kini harus selalu meminta persetujuan Pangab (Soeharto) melalui deputinya (Panggabean).[306]

Sebagai hasil reorganisasi, hirarki angkatan bersenjata kini terbagi menjadi sejumlah eselon, yaitu Eselon Komando, Eselon Staf, Eselon Matra, Eselon Operasional, dan satu hirarki otonom yang langsung di bawah komandonya Kopkamtib. Soeharto secara teliti menempatkan para perwira di setiap eselon agar anasir faksi pertama dan ketiga tidak lagi punya peran menentukan.

Untuk posisi Kasum, Soeharto menunjuk Subono (Laksdya) terhitung mulai 3 Desember 1969. Jabatan Subono sebelumnya adalah Deputi I Operasi Kasal.[307] Sementara itu untuk posisi Kepala Staf Departemen Soeharto menunjuk Saleh Basarah (Marsda) sejak tanggal 28 November 1969. Jabatan Saleh sebelumnya adalah Asisten Operasi Kasau. Untuk posisi Kepala Staf Hubungan Non Militer,

www.setabasri.org

Lihat The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 198.

[305] Selain aneka posisi kepala staf yang langsung bertanggung jawab pada Menhankam/Pangab dan sehari-hari melalui Deputi Pangab, terdapat empat struktur lain yang langsung dibawahi Soeharto yaitu Komando Strategis Nasional (Kostranas), Komando Pertahanan Maritim Nasional (Koharmarnas), Komando Pertahanan Udara Nasional (Koharnudnas), dan Komando-komando Daerah Militer. Dahulu masing-masing panglima keempat matra punya peran besar terhadap keempat bidang tugas ini. Namun, terhitung sejak 5 Oktober 1969 seluruh kewenangan tersebut dipusatkan pada Presiden melalu Menhankam/Pangab dan Deputinya. Lihat The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 198.

[306] Telah disebutkan sebelumnya bahwa posisi Kasad sejak 29 Mei 1967 ditempati oleh Maraden Panggabean (Jenderal) menggantikan Soeharto. Jabatan Panggabean sebelumnya Deputi Pangad. Tanggal 4 Desember 1969 posisi Panggabean sebagai Kasad digantikan oleh Umar Wirahadikusumah (Jenderal), yang berasal dari Divisi Siliwangi tetapi sejak 1 Oktober 1965 telah menunjukkan posisinya untuk selalu bersama Soeharto dalam menyikapi PKI dan Sukarno. Umar ini beretnis Sunda dengan jabatan sebelumnya Deputi Kasad.

[307] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 196.

Soeharto menunjuk Darjatmo (Letjen) bekas anak buahnya di Diponegoro terhitung sejak 3 Desember 1969. Jabatan Darjatmo sebelumnya adalah Deputi III Hubungan Khusus Kepala Staf TNI-AD.[308]

Panglima TNI-AL telah dijabat R. Mulyadi (Laksamana) sejak 25 Februari 1966 menggantikan R.E. Mardinata yang meninggal dunia. Jabatan Mulyadi sebelumnya adalah Deputi I Kasal. Namun, pada tanggal 16 Desember 1969 Soeharto mengangkat Sudomo (Laksdya) salah satu *bonding*-nya saat Operasi TrikoRA, untuk menggantikan Mulyadi yang dicurigai sebagai bagian faksi pertama.[309] Jabatan Sudomo sebelumnya adalah Komandan Pengawas Wilayah Maritim. Sejak menjadi Kasal tahun 1969 Sudomo melakukan pemecatan atas sekitar 1500 personil TNI-AL yang dianggap terkait dengan faksi pertama ataupun gerakan kiri. Sudomo berkecenderungan Islam abangan dan berkarakter tradisionalisme Jawa sehingga mudah bagi Soeharto untuk dekat dengannya.

Dalam matra TNI-AU, Soeharto menunjuk Rusmin Nurjadin (Marsdya) selaku Kasau sejak 20 Maret 1966. Rusmin beretnis Jawa, dengan jabatan sebelumnya Atase Angkatan Udara di Moskow. Rusmin menggantikan Sri Muljono Herlambang yang dicurigai Soeharto sebagai bagian faksi pertama. Soeharto

www.setabasri.org

[308] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 196. Jabatan ini dapat disebut persiapan menjelang penyelenggaraan Pemilu 1971, dan kelak akan bersinergi dengan Mendagri Amir Machmud dalam memenangkan Golkar.

[309] Pada tahun 1965 Sudomo sempat belajar di Lemhanas dan pada periode antara 1964-1969 merupakan Asisten Komunikasi Menteri Kelautan, Inspektur Jenderal TNI-AL, dan Kepala Wilayah Maritim Pusat. Sudomo kembali mengikuti kursus Para Komando marinir di Surabaya pada tahun 1966 saat usianya telah mencapai 40 tahun. Sejak tahun 1969 ia menjadi Kasal dan tahun 1971 menjadi anggota MPR. Lihat Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.* Appendix 1, p. 360-361.

memasukkan Rusmin selaku Kasau untuk membersihkan TNI-AU dari pengaruh Sukarno, Omar Dhani, dan PKI.[310]

Untuk angkatan kepolisian, sejak 15 Mei 1968 Soeharto menunjuk Hugeng Imam Santoso (Jenderal Polisi). Hugeng yang beretnis Jawa ditunjuk Soeharto menggantikan Sutjipto Judodihardjo (Jenderal Polisi) yang dekat dengan faksi pertama. Jabatan Hugeng sebelumnya adalah Deputi Operasi Panglima Kepolisian.[311]

Eselon lainnya adalah Eselon Operasional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Pangab. Sub-sub dalam Eselon Operasional adalah Kostranas, Koharmarnas, Kohanudnas, dan Kowilhan I hingga VI. Pembentukan Eselon Operasional merupakan upaya Soeharto untuk menciptakan sentralisasi komando sehingga menjamin dominasinya atas hirarki angkatan bersenjata dan mencairkan ego sektoral masing-masing matra.

Satu bagian khusus dari angkatan bersenjata adalah Kopkamtib. Kopkamtib beroperasi sebagai komando *counter-insurgency* terhadap gerakan komunis bawah tanah dan merupakan manifestasi dari doktrin *territorial warfare* yang dikembangkan dalam Seskoad. Posisi ini ditempati sejumlah perwira profesional maupun *bonding*-nya karena Soeharto membutuhkan kinerja baik dan loyal dari Kopkamtib.

www.setabasri.org

---

[310] Pada tahun 1966, Sukarno yang saat itu masih menjabat presiden, sempat menolak penunjukan Rusmin kendati akhirnya terpaksa menerimanya. Di bawah kepemimpinan Rusmin terjadi pembersihan besar-besaran atas personil TNI-AU yang dianggap Sukarnois dan kiri. Lihat Ulf Sundhaussen, Politik Militer …, *op. cit.,* h. 413. Kemudian jabatan Rusmin digantikan oleh Suwoto Sukendar (Marsda) sejak 7 Januari 1970. Suwoto beretnis Jawa, sebelumnya menjabat sebagai Komandan Wilayah IV Udara (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda kecil). Lihat *ibid*.

[311] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 198.

Sejak dibentuk Soeharto pada tanggal 10 Oktober 1965, legalitas kuat atas posisi Kopkamtib diperoleh berdasarkan Supersemar tahun 1966.[312] Kopkamtib awalnya digunakan Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca G30S/PKI. Pada perkembangannya badan ini kemudian lepas dari prosedur resmi angkatan bersenjata dan cenderung bersifat *independent body.* Atas nama melakukan pengamanan Pancasila dan UUD 1945, Kopkamtib dapat melakukan tindakan *extra-judicial* apabila satu individu atau kelompok dianggap membahayakan negara. Sejak tahun 1967 setiap pangdam di tingkat daerah adalah Pelaksana Khusus Kopkamtib (Laksusda Kopkamtib).[313] Panglima pertama Kopkamtib adalah Soeharto sendiri yang menjabat 5 Oktober 1965 hingga 19 November 1969, kemudian digantikan oleh Maraden Panggabean sejak 19 November 1969.[314]

Dalam komposisi pejabat di Kopkamtib Maraden Panggabean (Jenderal) duduk sebagai panglima sejak 19 November 1969. Panggabean juga merangkap sebagai Deputi Pangab. Panggabean termasuk ke dalam kelompok Spri dan setelah dibubarkan 1968, dekat dengan kelompok Aspri (Ali Moertopo, Yoga Sugama, dan Soedjono Hoemardhani).[315]

Sebagai Deputi Pangkopkamtib Soeharto menunjuk Sumitro (Letjen) per tanggal 20 November 1969. Sumitro dahulunya adalah Kepala Staf Menhankam. Sutopo Yuwono (Mayjen) duduk sebagai Sekretaris Pangkopkamtib. Pada awal Januari 1970, Sutopo menggantikan Yoga Sugama sebagai Kepala Badan

www.setabasri.org

[312] Richard Tanter, Intelligence …, *op. cit.,* p. 214.
[313] *ibid..,* p. 215.
[314] *ibid.,* p. 217.
[315] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 309.

Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) yang kemudian diubah namanya menjadi BINEG.

Seorang *bonding* Soeharto, Yoga Sugama (Mayjen) menjabat Asisten Intelijen Kopkamtib sejak 31 Maret 1970. Jabatan Yoga sebelumnya adalah Kepala Bakin. Setelah posisi Yoga di Bakin digantikan oleh Sutopo Yuwono, ia kemudian menggantikan posisi Tjokropranolo (Brigjen) sebagai Kepala G-1 (Staf Intelijen Gabungan) di Dephankam sejak 7 Januari 1970. Tanggal 28 Mei 1970 Yoga juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat) Hankam dan Komandan Satgas Intel Kopkamtib.[316]

Amir Murtono (Brigjen) menjabat sebagai Asisten Hubungan Sosial Politik, sementara posisi Asisten Hubungan Keuangan dijabat oleh R.S. Sastraprawira (Brigjen) dengan tanggal efektif sama yaitu 31 Maret 1970. Jabatan Sastraprawira sebelumnya adalah Inspektur Keuangan TNI-AD.[317] Amir Murtono ini setelah Pemilu 1971 kemudian menjadi anggota Dewan Pembina Golkar.

Dalam melakukan reproduksi kekuasaan di tubuh TNI-AD Soeharto juga mereorganisasi Staf Pusat TNI-AD.[318] Terhitung sejak 5 Oktober 1969 Staf Pusat TNI-AD dikurangi, baik dalam aspek kuantitas personil maupun fungsi.[319] Untuk

www.setabasri.org

---

[316] B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori …, *op. cit.,* h. 494.

[317] The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.,* p. 202.

[318] Basis kekuasaan Soeharto adalah TNI-AD dan sebab itu ia memberi perhatian serius atas komposisi staf di angkatan ini. Lihat *ibid.,* p. 203. Untuk staf pusat 3 matra lainnya tidak dibahas dalam disertasi ini dengan pertimbangan Angkatan Darat dalam era 1968 hingga 1971 adalah yang paling dominan.

[319] Jika sebelumnya terdapat tiga Deputi Kepala Staf maka kini tersisa hanya satu. Selain itu, Soeharto juga mengurangi jumlah asisten kepala staf dari tujuh menjadi lima. Soeharto menunjuk M. Jasin (Mayjen) dari Divisi Brawijaya sebagai Deputi Kasad per 17 Februari 1970 menggantikan Umar Wirahadikusumah (Jenderal). Jabatan Jasin sebelumnya adalah Pangdam VIII. Lihat The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970 …., *op. cit.*

para individu yang menjabat sebagai Asisten, Pangkostrad, serta komandan teritorial dimuat dalam **Lampiran 4** *Hasil Reproduksi Kekuasaan dalam TNI-AD setelah 5 Oktober 1969*.

B. Reproduksi Kekuasaan dalam Partai Politik

Dalam perspektif Biopolitik, istilah reproduksi harfiahnya adalah regenerasi atau berkembang biak. Namun, dalam pola kehidupan berkelompok primata besar termasuk manusia, reproduksi juga dapat dimaknai sebagai penggandaan atas komoditas berharga, semisal teritorial, kekuasaan, pengikut, maupun material (bahan makanan, air minum), juga pasangan hidup.[320] Penggandaan ini dapat dilakukan dengan cara memperkecil kekuasaan hirarki lain baik dengan cara merusaknya atau mengembangkan kekuasaan baru di dalamnya. Dalam sub bab ini akan dipaparkan bagaimana Soeharto menggandakan kekuasaan di luar hirarkinya dengan tujuan menundukkan aneka individu dominan di dalam aneka hirarki tersebut sehingga tidak membahayakan hirarkinya sendiri, atau para individu dominan di dalamnya tidak berpotensi menjadi *alpha male* yang mengambil posisi sebagai penantang (*contender*).

1. Dominasi atas Masyumi

Secara ringkas Soeharto dan kelompoknya berkepentingan untuk mendominasi kekuatan politik Islam, yang dalam sub ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai Masyumi dan Parmusi sebagai bentuk barunya. Sejak akhir 1965, berdirinya tahun 1968, hingga setelahnya, relasi internal Parmusi terus

[320] Untuk bahasan ini dapat dilihat tulisan Glendon Schubert, "Primatological Theory" dalam Glendon Schubert and Roger D. Masters, *Primate Politics*. Illinois: Southern Illionis University, 1991, pp. 21-56.

www.setabasri.org

mengalami intervensi Soeharto. Para tokoh Masyumi seperti Moh. Natsir, Muhammad Roem, dan Prawoto Mangkusasmito dihambat sedemikian rupa untuk memimpin. Pada bulan November 1970 Soeharto menunjuk H.M. Mintaredja selaku ketua Parmusi berdasarkan "skenario" perpecahan internal partai.[321] Dengan duduknya H.M. Mintaredja sebagai Ketua Umum Parmusi maka eksistensi partai tersebut bukan lagi bersandar pada para konstituennya melainkan bergantung kepada Soeharto.

Reproduksi kekuasaan Soeharto di dalam Parmusi dapat ditelusuri sejak berdirinya Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) pada tanggal 16 Desember 1965, yang terdiri atas 16 organisasi Islam yang dahulu terafiliasi dengan Masyumi.[322] Pada tanggal 9 Mei 1966 terjadi pertemuan pribadi antara Pangdam Jaya (Amir Machmud), Kemal Idris, Sutjipto (Ketua Seksi Politik Koti), Alamsjah, dan Ali Moertopo dengan sembilan delegasi Masyumi dan GPII, termasuk Sjarif Usman sebagai presiden Komite Kebangkitan Masyumi.[323] Masyumi menyatakan ketidakterlibatan mereka secara organisasional dalam PRRI/Permesta. Bukti yang

www.setabasri.org

[321] Allan A. Samson. Indonesia 1972: The Solidification of Military Control. 1973. *Asian Survey.* Vol. 13, No. 2 (Feb.), pp. 127-139, p. 130.

[322] Allan A. Samson, Islam in Indonesian Politics. 1968. *Asian Survey*. Vol. 8, No. 12 (Dec.) pp. 1001-1017, p. 1004. Ke-16 organisasi ini adalah Muhammadiyah (sosial-pendidikan), Djamiatul al-Washliyah (sosial-pendidikan), Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia/Gasbiindo (serikat buruh), Persatuan Islam (pendidikan), Nahdlatul Wathan (sosial-pendidikan), Mathl'aul Anwar (sosial-pendidikan), Serikat Nelayan Islam Indonesia (serikat buruh), Kongres Buruh Islam Merdeka (serikat buruh), Persatuan Umat Islam (sosial-pendidikan), Al-Ittihadijah (pendidikan), Persatuan Organisasi-organisasi Buruh se-Indonesia/Porbisi (serikat buruh), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia/PGAIRI (serikat buruh), Himpunan Seni Budaja Islam/HSBI (budaya), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia/PITI (budaya), Al-Irsjad (pendidikan), dan Wanita Islam (sosial-pendidikan). Ke-16 organisasi tersebut menandatangani pakta 1967 mendukung Partai Muslimin. Ada dua organisasi pendukung Partai Muslimin, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Madjelis Seni Budaja Islam (Masbi) tidak ikut serta menandatangani pakta. Lihat Ken Ward. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1970. Appendix 1.

[323] Lihat juga Remy Madinier, The Masyumi …, *op. cit.,* p. 415.

diajukan pihak Masyumi dan GPII adalah pernyataan Perdana Menteri Djuanda bahwa dalam PRRI/Permesta "… meskipun individu yang terlibat dalam pemberontakan menjadi pemimpin partai politik, namun bukan partai tersebut melainkan anggotanyalah yang melanggar hukum."[324] Dalam kesempatan ini pula penulis hendak menyampaikan peran para pimpinan Masyumi, khususnya Mohammad Natsir, yang secara kurang adil dianggap sebagai bagian dari pemberontak PRRI/Permesta.

Perlu penulis nyatakan secara khusus bahwa Mohammad Natsir adalah bukan bagian dari para pemberontak. Justru Natsir dan para pimpinan Masyumi lainnya seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap-lah yang menolak kehendak para pemberontak untuk membentuk negara Sumatera yang artinya memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian adalah kurang koheren apabila terdapat tuduhan atas Natsir bahwa ia mendukung separatisme pemberontakan bersenjata PRRI/Permesta. Para penuduh mungkin lupa bahwa hanya setelah melalui Mosi Integral Natsir-lah, Negara Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argumentasi penulis ini koheren dengan pendapat yang dikemukakan seorang Indonesianis pro Kemerdekaan Indonesia yaitu George McTurnan Kahin. Untuk memperkuat argumentasi ketidakterlibatan Natsir dan pimpinan puncak Masyumi lainnya dalam PRRI/Permesta maka pendapat Kahin akan penulis kutip agak panjang:

> "*It has seemed to me that one of Natsir's major contributions to his country came in the course of the P.R.R.I. rebellion … My own asssesment reflects long study of this episode and recent access to data that have not been*

[324] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 21.

www.setabasri.org

available to other writers. Upon the basis of this, it is very clear that Natsir must be credited with having made an important contribution to the maintenance of Indonesia's territorial integrity. Supported by Sjafruddin Prawiranegara and Burhanuddin Harahap, he carried out an ultimately successful struggle within the P.R.R.I. to block those who favored Sumatra's seceding from Indonesia and becoming a separate state. He insisted on such a course even if doing so meant forfeiting potentially powerful power outside support. It is to a large extent because of Mohammad Natsir that the P.R.R.I.'s struggle was waged within the context of Indonesian unity."[325]

> Telah jelas bagi saya bahwa salah satu kontribusi utama Natsir untuk negaranya terletak dalam masalah pemberontakan PRRI ... Penilaian saya sendiri tercermin melalui studi panjang mengenai episode ini dan akses terbaru kepada data yang belum tersedia bagi para penulis lain. Atas dasar ini, maka sangat jelas bahwa Natsir harus dihargai karena telah memberikan kontribusi penting bagi terpeliharanya integritas wilayah Indonesia. Dengan dukungan Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap, ia melakukan perjuangan yang akhirnya berhasil di dalam PRRI [yaitu] untuk memblokir mereka yang menghendaki pemisahan Sumatra dari Indonesia dan [untuk kemudian] menjadi negara yang terpisah [dari Indonesia]. Dia [Natsir] bersikeras pada upaya seperti itu bahkan jika ia melakukannya berarti akan kehilangan potensi dukungan dari kekuatan luar negeri yang kuat. Sebagian besar itulah perjuangan Mohammad Natsir-lah dalam PRRI dalam konteks Persatuan Indonesia.

Pada tanggal 21 Desember 1966, para komandan angkatan bersenjata mengeluarkan pernyataan bersama bahwa militer merasa dikhianati PKI.[326] Dalam pernyataan jelas angkatan bersenjata menganggap Masyumi menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.[327] Prawoto memprotes Pernyataan Desember tersebut

www.setabasri.org

---

[325] George McTurnan Kahin, "Mohammad Natsir" dalam Yusuf A. Puar, ed. *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan.* Cetakan 1. (Jakarta: Pustaka Antara, 1978) h. 330-335, h. 335.

[326] Allan A. Samson, Islam in …, *op. cit.,* p. 1005. Selain PKI, pemberontakan sebelumnya juga disebut sebagai pengkhianatan.

[327] *ibid.,* p. 551. Secara langsung Soeharto mengirimkan surat bermuatan ini kepada Prawoto Mangkusasmito, seorang pimpinan Masyumi senior yang tidak terlibat PRRI/Permesta. Menurut Soeharto, ABRI telah cukup banyak berkorban dalam memadamkan pemberontakan tersebut. Akibatnya ABRI tidak dapat merehabilitasi Masyumi dengan alasan "yuridis, administratif, dan psikologis." Masyumi bersama NU dan sejumlah partai berbasis Islam kembali mempromosikan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dalam Sidang MPRS Maret 1968, tetapi ditolak oleh oposisi sipil dan militer mereka, saat membicarakan garis besar haluan negara. Draf pembahasan diajukan perwakilan organisasi-organisasi Islam. Maksud dari pemberlakuan kembali Piagam Jakarta adalah

dan melalui sebuah surat meminta pertemuan pribadi dengan Soeharto untuk menjelaskan perlunya rehabilitasi Masyumi.[328] Sikap tegas militer memunculkan tiga opsi bagi BKAM dan para pendukung Masyumi lainnya.[329]

Akhirnya pilihan yang diambil adalah membentuk partai baru dengan tetap berorientasi pada karakter Masyumi. Pada tanggal 7 Mei 1967 para pendukung Masyumi dan delegasi BKAM bersepakat untuk membentuk komite persiapan partai baru yang secara bulat dinamakan Partai Muslimin Indonesia.[330] K.H. Faqih Usman, seorang pimpinan Masyumi yang tidak terlibat PRRI/Permesta, didaulat memimpin Komite-7. Dari 30 kursi Komite Eksekutif yang tersedia, Muhammadiyah menuntut 10 kursi, tetapi setelah negosiasi diputuskan hanya diberikan 9 saja.[331] Hasil negosiasi formasi kepemimpinan Parmusi versi 15 September 1967 dan versi 31 Oktober 1967 tertera pada **Tabel 3** *Komposisi Pengurus Parmusi*.

www.setabasri.org

Tabel 3 Komposisi Pengurus Parmusi
Sumber Tabel: Ken Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1970., p. 34-35.

Komposisi per 15 September		**Komposisi per 31 Oktober**	
Ketua Umum			
Faqih Usman	Masyumi	Faqih Usman	Muhammadijah
Ketua			
A.D. Sjahruddin	Masyumi	Anwar Harjono	Masyumi
Anwar Harjono	Masyumi	HM Sanusi	Muhammadijah
Djarnawi Hadikusumo	Muhammadijah	AD Sjahruddin	Masyumi
Hasan Basri	Masyumi	Agus Sudono	Gasbiindo
E.Z. Muttaqien	Masyumi	Djarnawi Hadikusumo	Muhammadijah

agar orang yang beragama Islam harus menjalankan syariat agama, tetapi umat lain terlepas dari kewajiban tersebut. Lihat *ibid.*, p. 552.

[328] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 25.

[329] Pilihan pertama, melupakan gagasan rehabilitasi Masyumi dalam segala bentuknya. Kedua, melanjutkan perjuangan Masyumi untuk mendapat status rehabilitasi. Ketiga, membentuk satu partai baru tetapi punya orientasi serupa dengan Masyumi. Lihat Allan A. Samson, Islam in …, *op. cit.,* p. 1005-1006.

[330] Allan A. Samson, Islam and …, *op. cit.,* p. 1006. Bandingkan dengan B. J. Boland, The Struggle …, *op. cit.,* p. 152. Juga Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 29-30.

[331] *ibid.,* p. 1007.

Komposisi per 15 September		Komposisi per 31 Oktober	
		E.Z. Muttaqien	Masyumi
Sekretaris Jenderal			
M. Sulaiman	Muhammadijah	M. Sulaiman	Muhammadijah
Sekretaris			
Chadidjah Razak	Wanita Islam	Umaruddin	(?)
Hasbullah	Muhammadijah	Chadidjah Razak	Wanita Islam
Lukman Harun	Muhammadijah	Lukman Harun	Muhammadijah
Umaruddin	(?)	Hasbullah	Muhammadijah
		Maizir Achmadyns	KBIM
Anggota			
Affandi Ridwan	PUI	Affandi Ridwan	PUI
Agus Sudono	Gasbiindo	Aisjah Amini	HSBI
Aisjah Amini	HSBI	A Djuwaeni	Masyumi
Amelz	Masyumi	AW Sujoso	Masyumi
AW Sujoso	Masyumi	Djamaluddin	Masyumi
Daris Tamin	Muhammadijah	Djazman	Muhammadijah
E Sar'an	Persis	Faisal	Al-Irsjad
Faisal	Al-Irsjad	Ismail Hasan Metareum	Alumni HMI
Ismail Hasan Metareum	Alumni HMI	OK Azis	Djamiatul Washliyah
Maftuch Jusuf	Muhammadijah	Omar Tusin	SNII
Maizir Achmadyns	KBIM	Rohana Ahmad	Muhammadijah
HM Sanusi	Muhammadijah	Buchari	(?)
S Buchari	(?)	Sjarif Usman	Porbisi
Sjarif Usman	Porbisi	Uwes Abubakar	Mathl'aul Anwar
Omar Tusin	SNII		
Uwes Abubakar	Mathl'aul Anwar		

Secara umum Soeharto mempersilakan Parmusi berdiri dengan syarat para pemimpin senior Masyumi tidak duduk di dalam kepemimpinan partai.[332] Tujuan Soeharto mengizinkan pendirian Parmusi adalah memberi wadah politik bagi kelompok Islam modernis agar dapat ia arahkan guna mendukung pemerintahan.[333]

www.setabasri.org

[332] Pimpinan Masyumi yang hadir di acara tersebut adalah Sjarifuddin Prawiranegara, Asaat, Prawoto Mangkusasmito, Mohamad Roem, Kasman Singodimedjo, dan Muh. Natsir. Dari acara tersebut muncul tuntutan untuk "rehabilitasi Islam." Prawoto dalam pidatonya menyatakan "rehabilitasi multikompleks." HAMKA, Isa Anshary dan Burhanuddin Harahap sebelumnya pun telah dibebaskan. Lihat B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia.* The Hague: Martinus Nijhoff, 1971., p. 147-148. Pemimpin senior dari Masyumi sangat populer yang ditunjukkan dalam acara tasyakuran pembebasan mereka yang dipimpin HAMKA di Masjid Al Azhar Kebayoran, sejumlah senior Masyumi hadir di depan sekitar 50 ribu pendukungnya.

[333] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 552. Para penggagas Parmusi menerima kenyataan ini karena masih ada kesempatan di masa datang larangan keterlibatan pimpinan senior Masyumi akan melemah seiring berjalannya waktu.

Soeharto sudah mengetahui terdapat keterkaitan antara Nasution dan Sudirman dengan rehabilitasi Masyumi.[334]

Akhirnya dilakukan pertemuan pada tanggal 5 Februari 1968 antara Soeharto dengan anggota Komite-7 dan perwakilan BKAM.[335] Jenderal Soeharto menekankan agar Parmusi tidak merupakan neo-Masyumi. Tekanan ini telah ia lakukan sejak tahun 1966, bahwa jajaran pimpinan partai tidak boleh terdiri atas unsur Masyumi, dengan menambahkan:

> *They can lead from behind. In the future, when you hold a congress and all the Masjumi leaders are returned, that is an internal matter. That is a matter of tsovereigntyign of the people. I would not be able to intervene again. But now I am responsible*.[336]
>
> Mereka [maksudnya para pimpinan Masyumi] bisa memimpin dari belakang. Ke depan, saat Anda mengadakan kongres dan semua pimpinan Masyumi kembali, itu masalah internal. Itu adalah masalah kedaulatan rakyat. Saya tidak akan bisa campur tangan lagi. Tapi sekarang saya yang bertanggung jawab.

Mengenai siapa pimpinan Masyumi yang tidak dikehendaki, dengan agak enggan Soeharto menjawab bahwa mereka adalah Faqih Usman dan Anwar Harjono.[337] Soeharto mempersilakan Parmusi memilih pimpinannya sendiri di kongres pertama yang harus diadakan hanya setelah Pemilu.[338] Karena gagal menyatukan elemen Masyumi dan organisasi BKAM ke dalam satu wadah, Komite

www.setabasri.org

[334] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 106-116
[335] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 36.
[336] *ibid.,* p. 37.
[337] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 36.
[338] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 553. Pertemuan terjadi pada 5 Februari 1968 dan Tap MPRS yang berlaku adalah Tap No. XI/MPRS/1966 yang menjadwalkan Pemilu adalah Juli 1969. Keputusan MPRS menunda Pemilu ke 5 Juli 1971 terjadi tanggal 27 Maret 1968 melalui Tap MPRS No. XLII/MPRS/1968 (nomor 42) tanggal 27 Maret 1968.

7 kemudian bertemu dengan organ-organ pendukungnya pada tanggal 8 Februari 1968 guna mengembalikan mandat. Komite kemudian dirampingkan menjadi lima orang (menjadi Komite-5).[339] Pada saat draf tersebut diserahkan kepada Alamsjah, asisten pribadi Soeharto tersebut tidak puas. Pada perkembangannya kemudian pada tanggal 10 Februari 1968, sikap Alamsjah (mungkin mengikuti pendirian Soeharto) mulai lugas dengan menyatakan bahwa hanya perwakilan BKAM saja yang diperkenankan menjadi pimpinan Parmusi.[340] Dengan demikian maka susunan lengkap pengurus Parmusi tercantum dalam **Tabel 4** *Struktur Parmusi sesuai Kehendak Soeharto.*

Tabel 4 Struktur Parmusi sesuai Kehendak Soeharto
Sumber Tabel: Ken Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1970., p. 38-39

Posisi	Nama	Unsur
Ketua Umum	Djarnawi Hadikusuma	Muhammadiyah
Ketua	Agus Sudono	Gasbiindo
	HM Sanusi	Muhammadiyah
	J. Naro	Djamiatul al-Wahliyah
	Daud Badaruddin	KBIM
	Chadidjah Razak	Wanita Islam
	Omar Tusin	SNII
Sekretaris Jenderal	Lukman Harun	Muhammadiyah
Sekretaris	Amura	HSBI
	Imran Kadir	Al-Ittihadijah
	Siregar Pahu	Djamiatul al-Washliyah
	Anwar Bey	PUI
	Said Suncar	Mathl'aul Anwar
	M Sjariki	Nahdlatul Wathan
	Rafilus Ishak	Porbisi
	Darussamin	PGAIRI
Anggota	Daris Tamin	Muhammadiyah
	Djazman	Muhammadiyah
	Rohana Ahmad	Muhammadiyah
	OK Azis	Djamiatul al-Washliyah
	Ibrahim Usman	Gasbiindo

[339] *ibid..,* p. 1009. dengan Faqih Usman, Anwar Harjono, dan Udin Sjamsuddin selaku penasihat, sementara Komite-5 sendiri terdiri atas Anwar Harjono (sebagai ketua), Agus Sudono, Djarnawi Hadikusumo, Hasan Basri, dan Maizir Achmadyns. Lihat juga Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 37.
[340] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project, 2011, h. 133.

www.sabasri.org

Posisi	Nama	Unsur
	Maizir Achmadyns	KBIM
	Ny. Latjuba	Wanita Islam
	Affandi Ridwan	PUI
	Aisjah Amini	HSBI
	Faisal	Al-Irsjad
	Uwes Abubakar	Mathl'aul Anwar
	Ichsanuddin Iljas	Porbisi
	Abdul Karim	PITI
	Saleh Suaidy	Masbi
	Mohammad Said	Nadlatul Wathan
	Hasbullah	Muhammadiyah
	Gazal	Al-Ittihadiyah
	Ismail Hasan Metareum	Alumni HMI
	Alala	Alumni HMI

Pada tanggal 19 Februari 1968, Ny. Samsuridzal (Latjuba) memimpin delegasi BKAM bertemu Jenderal Soeharto (pejabat presiden).[341] Sebagai kelanjutan pertemuan ini maka pada tanggal 20 Februari 1968 Jenderal Soeharto melegalisasi pendirian Parmusi.[342]

Di dalam tubuh Parmusi terdapat dua unsur utama yaitu pendukung Masyumi dan Muhammadiyah. Jenderal Soeharto lebih condong kepada Muhammadiyah yang kemungkinan besar ia anggap lebih moderat dengan tokohnya seperti Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun.[343] Keduanya terpilih bukan melalui kongres melainkan melalui kesepakatan antar para penggagas Parmusi dan Jenderal Soeharto melalui *bonding*-nya yaitu Alamsjah.[344]

www.setabasri.org

[341] Legalisasi Parmusi lewat Keppres No. 70 tanggal 20 Februari 1968 dengan menyatakan partai terdiri atas kesatuan aneka organisasi Islam yang tidak terafiliasi partai politik. Dengan demikian Parmusi dinilai pemerintah lepas dari pengaruh Masyumi, minimal secara formal. Lihat Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 39.
[342] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 552. Lihat juga Herbert Feith, Suharto's …, *op. cit.,* p. 97.
[343] *ibid.,* p. 553. Djarnawi berasal dari Jawa Tengah.
[344] Bonnie Triyana, et.al. "Desas Desus Operasi Khusus." *Historia*, Nomor 9 Tahun 1, 2013., h. 47.

Namun, sidang MPRS bulan Maret 1968 ternyata memutuskan bahwa Pemilu diundur selama dua tahun menjadi Juli 1971.[345] Dalam MPRS pembahasan mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di mana terjadi upaya kekuatan politik Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta dan Piagam Dasar HAM yang memuat aturan konversi dan penyebaran agama mengalami *deadlock*.[346] Partai-partai Islam menganggap batalnya pembahasan mengenai GBHN dan masalah HAM akibat intervensi kelompok Kristen dan Katolik.[347]

Pada bulan April 1968, Parmusi mengeluarkan sebuah pernyataan politik mengenai adanya ancaman kelompok Kristen.[348] Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa bantuan asing untuk proyek misionaris harus disupervisi oleh negara.[349] Pernyataan politik Parmusi bisa mengarah pada dua sasaran. Pertama, upaya mempertahankan keislaman di tengah para penganutnya. Kedua, sebagai kampanye untuk menarik perhatian konstituen lama Masyumi bahwa Parmusi tetap

www.setabasri.org

[345] Pengunduran Pemilu ini akan dijelaskan kemudian. Soeharto mempersyaratkan bahwa Kongres Parmusi baru boleh dilaksanakan setelah Pemilu, jadi setelah 1971.

[346] Dalam sesi pembahasan terjadi provokasi yang kemungkinan besar dimaksudkan untuk menyudutkan posisi kelompok Islam seperti dijelaskan Silalahi berikut. "Ketika situasi genting karena BP-MPRS membicarakan dan akhirnya menolak Pelengkap Nawaksara yang disampaikan Bung Karno, salah satu anggota BP MPRS K.H. Mahrum mengedarkan usulan yang berisi antara lain, supaya bendera merah putih diberi tulisan kalimat Syahadat, hari libur diubah dari hari Minggu menjadi hari Jumat, Palang Merah Indonesia diubah menjadi Bulan Sabit. Usulan tertulis dan diedarkan untuk meminta dukungan agar dapat dibicarakan dalam Badan Pekerja MPR. UUD 1945 diberi pelengkap dengan menyebutkan rumusan, "*Pancasila merupakan kelanjutan dari Piagam Jakarta*." Melihat usulan itu, Harry bertanya kepada Subchan, "*Kok begini, kenapa tidak ambil tindakan*?" Subchan menjawab, "*Tidak bisa, secara diam-diam saja usulan itu akan ditarik*." … Mar'ie Muhammad dari Fraksi KAMI dalam MPRS memberi komentar bahwa K.H. Mahrum mungkin merupakan selundupan dari Istana untuk memecah belah kekuatan Orde Baru. Usulan itu memang tenggelam begitu saja." Lihat J.B. Soedarmanta. *Tengara Orde Baru: Kisah Hary Tjan Silalahi*. Cetakan 1. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2004, h. 146-147.

[347] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 44.

[348] *ibid.,* p. 47.

[349] Antara 1965 hingga 1968 tercatat lebih dari 2 juta penganut Islam berpindah ke agama Kristen. Penjelasan ini bervariasi misalnya dipicu kebencian akibat sanak keluarga mereka dibunuh oleh kelompok Islam dalam pembantaian 1965-1966, kelompok kejawen terpaksa memilih salah satu agama akibat khawatir dituduh PKI (dan mereka memilih agama di luar Islam), dan mereka melihat "sesuatu" di dalam Kristen atau Katolik. Lihat Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 47.

memperhatikan kepentingan Islam. Natsir juga telah mengantisipasi Kristenisasi melalui pendirian Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) pada 9 Februari 1967.[350]

Namun, kesamaan pandangan politik internal Parmusi antara kubu Masyumi dan BKAM belum tercapai. Untuk memecahkan persoalan ini maka diselenggarakan pertemuan di Cibulan pada bulan Agustus 1968.[351] Pertemuan Cibulan juga merekomendasikan penyelenggaraan kongres secepatnya, yaitu di Malang, pada minggu pertama November 1968.[352] Aneka draf khas Masyumi lama seperti jaminan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah juga dipersiapkan untuk dibahas sebagai agenda kongres.[353]

Seiring persiapan juga telah tersusun empat paket pimpinan Parmusi dari unsur Masyumi sebelum kongres dilangsungkan. Paket paling populer adalah trio Natsir-Prawoto-Roem yang mewakili figur-figur Masyumi dengan basis dukungan kuat di luar Jawa.[354] Sebelum kongres dilaksanakan, maka pada akhir bulan Agustus 1968, Djarnawi Hadikusumo memimpin delegasi Parmusi menghadap Soeharto, dan menurut Djarnawi sendiri Soeharto tidak berkeberatan atas usulan kongres tersebut.[355] Menjelang November 1968 semakin jelas bahwa kongres akan memilih sejumlah pimpinan Masyumi untuk duduk di kursi kepemimpinan

www.setabasri.org

---

[350] Firdaus Syam, *Yusril Ihza ..., op. cit.,* h. 194.

[351] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 49. Dalam pertemuan tersebut hadir para senior Masyumi seperti Natsir, Prawoto, Burhanuddin, Djerman Prawiranegara, Anwar Harjono, dan Achmad Buchori. Selain mereka tentu juga hadir para pimpinan "sementara" Parmusi di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo.

[352] Ini berarti sebelum Pemilu, karena pada Maret 1968 keluar TAP MPRS yang menunda Pemilu menjadi 5 Juli 1971.

[353] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 554.

[354] *ibid.*

[355] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 50. Namun, perlu diingat bahwa pada masa proses legalisasi Parmusi, Soeharto pernah menyatakan bahwa kongres baru boleh diadakan setelah Pemilu usai. Rencana Kongres Malang berlangsung sebelum Pemilu diselenggarakan. Ini merupakan catatan penting bagi sikap Soeharto terhadap hasil Kongres Malang kelak di kemudian hari.

Parmusi.[356] Sebelumnya, Kongres Muhammadiyah di akhir September telah memilih K.H. Faqih Usman sebagai ketua umum, selain itu HAMKA dan H.M. Rasjidi (keduanya juga dari Masyumi) juga duduk sebagai Ketua Muhammadiyah.[357]

Pada bulan September 1968, satu minggu setelah menemui delegasi Muhammadiyah, Soeharto mengatakan kepada Mintaredja[358] bahwa Mintaredja telah lupa menyampaikan pesannya kepada para pimpinan Muhammadiyah bahwa Parmusi tidak boleh melakukan kongres sebelum Pemilu dilangsungkan.[359] Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1968 delegasi Parmusi menghadap Soeharto dan terkejut saat Soeharto menyatakan " … akan lebih baik jika tidak ada perubahan dalam kepemimpinan partai.[360]

Sebelum kongres dimulai, Agus Sudono sebagai pimpinan "sementara" Parmusi yang punya hubungan dekat dengan Alamsjah, Soedjono Hoemardhani, dan Ali Moertopo pada tanggal 2 November 1968, berinisiatif melunakkan sikap

www.setabasri.org

---

[356] *ibid.*
[357] *ibid.*, p. 51. Dengan logika ini, pihak penyelenggara kongres kemungkinan berasumsi bahwa Soeharto tidak berkeberatan apabila Parmusi dipimpin elemen Masyumi.
[358] Jabatan Mintaredja saat itu adalah Menteri Negara Hubungan Parlemen di Kabinet Pembangunan I.
[359] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 554. Lihat catatan kaki nomor 19. Memorandum Soeharto diberikan pada Mintaredja. Mintaredja tidak meneruskan memorandum tersebut pada Parmusi seperti Soeharto kehendaki dengan sejumlah pertimbangan. Karena tidak tahu perihal memorandum tersebut, Dewan Eksekutif Parmusi lalu mengadakan pertemuan dengan Soeharto tanggal 28 Oktober 1968. Namun, Ken Ward menjelaskan sedikit berbeda. Menurut Ward, Soeharto menegur Mintaredja bahwa ia (Mintaredja) lupa memberikan memorandumnya pada pimpinan Muhammadiyah bahwa Parmusi tidak boleh melaksanakan kongres sebelum Pemilu (dahulu Pemilu direncanakan 1969, kini 1971). Ward melanjutkan, Mintaredja lalu berdiskusi dengan sejumlah pimpinan Muhammadiyah (Hasjim, Daris Tamin, dan Sanusi). Sebagai hasil diskusi, Mintaredja mengirim surat pada Muhammadiyah di Yogyakarta. Namun, pimpinan Muhammadiyah di sana tak mau menyampaikan pesan Soeharto ke Parmusi oleh sebab khawatir akan dipersepsi sebagai upaya Muhammadiyah meningkatkan kekuasaannya di Parmusi. Lihat Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 51.
[360] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.* p. 51.

Soeharto. Agus menerima surat dari Ali Moertopo mengenai susunan yang disukai para asisten pribadi Soeharto.[361] Terjadi kemarahan dan kecurigaan atas pemerintah dan Dewan Eksekutif Parmusi yang bertemu Soeharto tanggal 28 Oktober 1968 sebelumnya.[362]

Akhirnya dicapai suatu jalan tengah, dengan mana baik Paket Natsir maupun Anwar tidak duduk sebagai ketua umum, melainkan tokoh moderat Masyumi, yaitu M. Roem selaku Ketua dengan Anwar Harjono serta Hasan Basri sebagai Komite Eksekutif.[363] Bahkan dalam paket "moderat" seperti ini rekomendasi Ali Moertopo (juga mungkin Soeharto) tidak tercerminkan.[364] Susunan organisasi Parmusi hasil Kongres Malang merupakan perpaduan elemen Masyumi dan BKAM, seperti ditunjukkan **Tabel 5** *Struktur Parmusi Hasil Kongres Malang*.

Tabel 5 Struktur Parmusi Hasil Kongres Malang
Sumber Tabel: Ken Ward, The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia. Ithaca: Cornell University, 1970., p. 38-39

-

Posisi	Nama	Unsur
Ketua Umum	Mohammad Rum	Masyumi
Ketua	Anwar Harjono	Masyumi
	Hasan Basri	Masyumi
	Djarnawi Hadikusumo	Muhammadiyah
	Omar Tusin	SNII
Sekretaris Jenderal	Hasbullah	Muhammadiyah

[361] Bahwa yang disukai oleh para asisten pribadi Soeharto sebagai paket pimpinan Parmusi secara berurutan adalah Djarnawi sebagai ketua umum, ketua pertama dan kedua berasal dari Gasbiindo dan Djamiatul al-Washliyah, Anwar Harjono dan Hasan Basri sebagai ketua tiga dan empat, serta Omar Tusin sebagai ketua lima. Lihat Ken Ward, The Foudation …, *op. cit.,* p. 52.
[362] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 555. Agus Sudono yang menghubungi Alamsjah, Sudjono, dan Ali Moertopo.
[363] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 555. Pertimbangan Parmusi saat itu membuat kesepakatan maksimal akibat dua dilema. M. Roem dahulu pernah menjabat Menteri Luar Negeri era Demokrasi Liberal, sikapnya moderat, dan kemungkinan besar tidak akan memancing kemarahan Soeharto. Lihat juga Remy Madinier, The Masyumi …, *op. cit.,* p. 432. Figur-figur yang dekat dengan pemerintah seperti John Naro, Agus Sudono, dan Sanusi diabaikan oleh para delegasi.
[364] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* 52. Akhirnya kongres menominasikan tujuh orang sebagai calon ketua umum: "Djarnawi, Kasman, Natsir, Prawoto, Sanusi, Sjarif Usman, dan Roem." Natsir tengah berada di luar negeri dan tidak memberikan otoritasi pada siapapun untuk menominasikan dirinya. Djarnawi, Kasman, Prawoto, Sanusi, dan Sjarif Usman mundur dari nominasi. Tokoh yang tersisa hanya satu orang, yaitu M. Roem.

www.sejabasri.org

Posisi	Nama	Unsur
Sekretaris	Lukman Harun	Muhammadiyah
	M. Sulaiman	Muhammadiyah
Anggota	Aisjah Aminy	HSBI
	Abdul Mukti	Muhammadiyah
	Alala	Alumni HMI
	Chadidjah Razak	Wanita Islam
	Djamaluddin	Masyumi
	Gusti Abdul Muis	Masyumi
	Ismail Hasan Metareum	Alumni HMI
	Ny. Latjuba	Wanita Islam
	Maizir Achmadyns	KBIM
	Misbach	Masyumi
	Andi Mapasala	Gasbiindo
	Sanusi	Muhammadiyah
	Rohana Ahmad	Muhammadiyah
	Siregar Pahu	Djamiatul al-Washliyah
	Sjarif Usman	Masyumi /PORBISI
	Ny. Sunarjo Mangunpuspito	Masyumi

Atas struktur ini Soeharto pun melakukan unjuk kekuatannya secara terus terang. M. Roem mengeluarkan pernyataan politik bahwa ia tidak akan mengambil posisi Ketua kecuali telah memperoleh kejelasan sikap pemerintah (*clearance*).[365] Pada tanggal 7 November 1968, beberapa jam sebelum penutupan kongres, Alamsjah mengirim radiogram yang menyatakan pemerintah tidak menyetujui terpilihnya M. Roem sebab melanggar Keppres No. 70/1968 tentang legalisasi Parmusi.[366] Pemerintah tetap menyatakan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai pimpinan Parmusi.[367]

M. Roem segera berangkat ke Jakarta untuk menjelaskan bahwa Parmusi tidak bermaksud melakukan konfrontasi dengan pemerintah.[368] Namun, kejelasan sikap pemerintah seperti ditunggu M. Roem atas keterpilihannya tidak kunjung

www.setabasri.org

[365] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 555. Upaya lain M. Roem untuk melunakkan Soeharto adalah menyatakan bahwa kendatipun ia menjadi ketua umum Parmusi, maka waktunya tidak akan sepenuhnya tercurahkan pada partai mengingat ia kini tengah menulis memoarnya seputar periode revolusi.
[366] *ibid.* Kendati moderat, M. Roem dianggap pemerintah masih berkategori pimpinan puncak Masyumi yang dibubarkan Sukarno.
[367] Bonnie Triyana, et.al. "Desas Desus …", *op. cit.,* h. 54.
[368] Kesamaan sikap anti PKI dan membangun Indonesia pasca Sukarno.

diperoleh. Sebagian publik menilai intervensi pemerintah atas kedaulatan kongres Parmusi telah mencederai demokrasi. Namun, Soeharto tidak terlalu memedulikannya sebab baginya dominasi atas hirarki Parmusi lebih penting. R.E. Elson menulis bahwa Ali Moertopo melancarkan operasi politik untuk mengguncang kepemimpinan M. Roem.[369]

Pada tanggal 10 November 1968 Mintaredja berupaya merasionalkan sikap Soeharto. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengubah kebijakannya, sebab dalam pertemuan dengan delegasi Parmusi pada tanggal 5 Februari 1968, Soeharto telah memberi pernyataan kepada perwakilan Muhammadijah, KBIM, Djamiatul al-Washliyah, dan Gasbiindo bahwa Parmusi boleh melaksanakan kongres hanya setelah pemilu diselenggarakan. Jika kongres diadakan sesuai ketentuan, maka Soeharto mempersilakan siapa pun duduk di kepemimpinan partai.[370]

Selama dua tahun sejak Kongres Malang, M. Roem tetap memimpin Parmusi dan menunjukkan sikap moderat. Namun, Soeharto tetap mencurigai aktivitas Parmusi. Selama tiga bulan pertama tahun 1970 diadakan serangkaian pertemuan antara pimpinan Masyumi (Roem, Prawoto, Natsir) dengan para *bonding* Soeharto (Alamsjah, Yoga, Soedjono Hoemardhani).[371]

www.setabasri.org

---

[369] R. E. Elson, *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Penerjemah Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Cetakan II. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005., h. 351. Operasi ini yang kemudian menciptakan faksi Naro dan akhirnya berhasil mendudukkan Mintaredja di kursi kepemimpinan Masyumi.

[370] Ken Ward, The Foundation …, *op. cit.,* p. 55.

[371] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 556. Dalam sejumlah pertemuan tersebut pihak Soeharto mengajukan permintaan kepada pimpinan Masyumi seperti M. Natsir untuk mengeluarkan pernyataan bahwa ia mendukung Repelita. Juga pernyataan agar Sjarifuddin Prawiranegara tidak lagi pernah mengkritik aneka kebijakan pemerintah. Permintaan lainnya adalah bahwa Roem harus mengeluarkan pernyataan yang dapat kondusif untuk menciptakan ketenangan sehubungan dengan "kejelasan" sikap pemerintah.

Saat Pemilu 1971 semakin dekat, M. Roem mulai bergerak kendati belum ada kejelasan sikap dari Soeharto atas kepemimpinannya. Komite Pemilu Parmusi segera dibentuk termasuk penyusunan kandidat calon legislatif Parmusi.[372] Pada lain sisi di daerah-daerah para juru bicara Parmusi rata-rata mengambil sikap yang semakin kritis terhadap pemerintah. Langkah Parmusi ini kemudian mendapat reaksi dari Mendagri Amir Machmud.[373] Amir menyatakan bahwa dalam Pemilu 1971 sebagian besar anggota Masyumi diperbolehkan ikut serta, tetapi sejumlah pimpinan yang "menunjukkan sikap meragukan" tidak diperbolehkan berpartisipasi.[374]

Pada suatu titik terbuka jalan keluar bagi Soeharto untuk mengintervensi Parmusi secara terang-terangan. Hal ini mengingat adanya kenyataan bahwa di dalam Parmusi terdapat dua faksi.[375] Setelah melontarkan kritik atas Roem bahwa terdapat kecenderungannya untuk mengambil sikap konfrontatif dengan pemerintah,[376] dan John Naro kemudian menyatakan faksinya sebagai Komite Eksekutif baru Parmusi.[377] Pada tanggal 17 Oktober 1970 secara tiba-tiba John

www.setabasri.org

---

[372] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 262.
[373] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 557.
[374] *ibid.* Jumlah mereka yang "meragukan" ini cukup besar hingga mencapai 2500 orang.
[375] Faksi pertama terdiri atas pimpinan Masyumi senior maupun junior, termasuk sayap fundamentalis di tubuh Masyumi, suara mereka diwakili surat kabar *Abadi*. Faksi kedua terdiri atas John Naro dan Imron Kadir yang merupakan realis politik.
[376] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 262. Lihat juga Hamish McDonald, Suharto's …, *op. cit.,* p. 103. Selama bulan-bulan sebelumnya, John Naro aktif menjalin hubungan dengan Ali Moertopo.
[377] Sebagai balasan, Naroka menyatakan pembubaran Dewan Eksekutif Djarnawi. Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 558. Pertarungan kedua faksi berlanjut. Pada 19 Oktober 1970 Dewan Eksekutif Parmusi mengeluarkan Naro dan Kadir (Naroka) dari partai. Lihat juga, Utrecht Ernst. Army and Islamic Opposition in Indonesia. 1979. *Journal of Contemporary Asia*. 9:2., pp. 175-186., p. 118. Pada minggu ketiga bulan Oktober 1970, faksi kedua yang dipimpin John Naro mengkritik faksi pertama yang dipimpin oleh M. Roem dengan menyatakan bahwa mereka (yaitu Dewan Eksekutif Parmusi) menunjukkan sikap permusuhan dengan militer. Mengenai kekuatan mana yang berada di balik agresi faksi John Naro publik tentu sudah dapat menduga. Pemilu bulan Juli 1971 tinggal beberapa bulan lagi dan Soeharto harus bersegera untuk menundukkan individu dominan

Naro mengumumkan dirinya telah mengambil-alih posisi Ketua Umum Parmusi dan menunjuk Imran Kadir sebagai Sekretaris Jenderal partai. Bahtiar Effendy menulis bahwa John (Jaelani) Naro ditugaskan Ali Moertopo untuk menciptakan pergolakan internal Parmusi sehingga memudahkan pemerintah (Soeharto) melakukan intervensi dalam masalah kepemimpinan partai.[378] Cara seperti ini telah ada presedennya yaitu saat Soeharto menyelesaikan konflik internal di tubuh PNI antara faksi Ali-Surachman versus Osa-Hardi.[379]

Faksi John Naro di Parmusi terdiri atas Agus Sudono (Gasbiindo), Imran Kadir (Al Ittihadiyah), Sanusi (Muhammadiyah), dan Mintaredja (Muhammadiyah).[380] Kelompok ini mencoba untuk menerapkan mekanisme *dispute settlement* guna mengakhiri "penderitaan" akibat terus berada di bawah bayang persaingan antara Soeharto dan para senior Masyumi. Aneka individu penantang Roem ini berupaya mendominasi pimpinan senior Masyumi karena dianggap meniadakan prediktabilitas dalam Parmusi.

Faksi "pemerintah" ini kemudian bersedia mengakomodasi pemerintahan yang didominasi militer, menghindari polemik, dan secara terbuka menyatakan dukungannya atas angkatan bersenjata.[381] Namun, sebagian besar anggota Parmusi justru menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu fobia bahwa seolah harus ada yang ditakuti dari mereka (Parmusi di bawah M. Roem) padahal pemerintah justru akan lebih mudah dalam melaksanakan Repelita apabila didukung oleh

www.setabasri.org

Masyumi dalam Parmusi. Bonding Soeharto khususnya Ali Moertopo yang memiliki spesialisasi dalam OPSUS dipekerjakan untuk maksud ini.

[378] Bahtiar Effendy, Islam dan …, *op. cit.,* h. 134-135.

[379] Akan di bahas dalam paparan selanjutnya.

[380] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 557.

[381] *ibid.*

kepemimpinan Parmusi di bawah M. Roem. Mereka juga kecewa karena kedaulatan partai untuk memilih pemimpin mereka sendiri telah dilanggar.[382] Namun, dalam konteks Otoritarianisme maka intervensi eksekutif atas aneka lembaga politik adalah sesuatu yang *natural.* Pembiaran atas menguatnya individu dominan di sebuah hirarki akan memicu menguatnya tantangan atas hirarki Soeharto. Soeharto menganggap unjuk kekuatannya atas kepemimpinan M. Roem cukup berhasil, dengan secara resmi menunjuk H.M. Mintaredja sebagai Ketua Umum Parmusi pada tanggal 20 November 1970.[383]

Mintaredja berasal dari sayap akomodasionis Muhammadiyah dan kurang populer apabila diperbandingkan dengan Djarnawi Hadikusumo. Kekuatan Mintaredja adalah dukungan Soeharto.[384] Mintaredja menempati posisi menteri dalam Kabinet Pembangunan I sekaligus kooperator Soeharto sejak lama.[385] Penunjukan Mintaredja merupakan serangan terbuka Soeharto atas unsur Masyumi dalam Parmusi yang mendorong tumbuhnya tiga kelompok di dalam Parmusi.[386]

www.setabasri.org

[382] Pola intervensi Soeharto atas Masyumi juga nantinya terjadi atas kekuatan-kekuatan politik lain. Bahkan di masa-masa kemudian seperti terjadi atas Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, ormas Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.

[383] Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 558. Penunjukan Mintaredja disetujui John Naro lalu mendegradasi kekuatan faksi loyalis Masyumi, dan sebaliknya memperkuat dukungan atas Djarnawi, terutama dari kalangan Muhammadiyah. Harold Crouch mencatat berbeda, Mintaredja ditunjuk tanggal 14 November 1970. Lihat Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 262.

[384] Dalam sebuah pidato, Mintaredja pernah menyatakan partai-partai di Indonesia tidak ada yang hendak mendirikan negara baru atau mengganti Pancasila dan UUD 1945. Lihat Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 558. Namun, Bahtiar Effendy menulis Mintaredja saat mahasiswa adalah Ketua Umum HMI, selain aktivis Muhammadiyah yang menonjol. Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan …, *op. cit.,* h.135. Namun, McDonald menyatakan Mintaredja pernah dihukum di Kalisosok karena kasus korupsi. Lihat Hamish McDonald, Suharto's …, *op. cit.,* p. 104. Jika pernyataan McDonald benar, maka Soeharto menjadikan masa lalu Mintaredja sebagai "sandera" politik agar ia tidak menggerakkan Parmusi ke arah yang tidak ia sukai atau "menggembosi" karakter pimpinan Parmusi.

[385] Ernst Utrecht, Army and Islamic …, *op. cit.,* p.118.

[386] Pertama, kelompok akomodasionis yang menerima penunjukan Mintaredja, mendukung reduksi otonomi dalam Parmusi, dan eliminasi atas peran Masyumi sebagai pengarah Parmusi. Representasi kelompok ini adalah Agus Sudono dari Gasbiindo dan John Naro. Kedua, kelompok garis keras yang menyatakan bahwa militer jelas telah bersikap anti Islam. Mereka berupaya memobilisasi umat Islam untuk melakukan penentangan atas militer berdasarkan solidaritas agama. Gerakan mereka ini

Perubahan kepemimpinan di Dewan Eksekutif Parmusi tidak terlalu berpengaruh di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sebelum Soeharto sempat menunjuk Mintaredja sebagai ketua Parmusi, partai tersebut telah mendaftarkan para calon legislatifnya sehingga diharapkan para pemilih Parmusi seolah masih "merasa" memilih orang-orang Masyumi "asli" ketimbang orang-orang Soeharto. Namun, tentu saja jaringan Soeharto tidak membiarkan bebasnya para kandidat Masyumi. Dalam daftar yang diumumkan tanggal 14 Maret 1971 para kandidat Masyumi yang diajukan Parmusi sudah tidak tercantum lagi.[387] Penghapusan tokoh Masyumi dari daftar kandidat Parmusi, selain wujud xenofobia atas politik Islam, juga etnosentrisme Jawa yang ditunjukkan lingkaran Soeharto.[388]

Secara umum tindakan-tindakan Soeharto yang mengintervensi relasi internal dalam Parmusi merupakan *pre-emptive action* atas mesin suara kalangan Islam modernis di Indonesia.[389] Tujuan utama dari dominasi Soeharto atas hirarki Parmusi adalah memberi jalan bagi Sekber Golkar untuk meraih suara di dalam Pemilu.[390]

www.setabasri.org

sifatnya relatif tertutup, personal, dan didiskusikan secara bawah tanah. Ketiga, kelompok yang menerima penunjukan Soeharto atas Mintaredja, tetapi tetap berorientasi pada kepemimpinan Masyumi, cenderung menjaga diri agar tidak terlibat konfrontasi langsung dengan militer, dan melanjutkan pengorganisasian umat Islam untuk mencapai cita-cita Masyumi. Terhadap kelompok ketiga ini Sudirman (Letjen) menyarankan agar mereka fokus pada pengembangan Muhammadiyah dan Amal Muslimin. Ketiga kelompok ini didasarkan Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 558-559..

[387] Kandidat tersebut adalah Natsir, Burhanuddin Harahap, M. Roem, Yunan Helmi Nasution, dan Kasman Singodimedjo. Lihat Allan A. Samson, Army and …, *op. cit.,* p. 560.

[388] Herbert Feith, Suharto's Search for a Political Format. 1968. Indonesia. No. 6 (Oct.) pp. 88-105., p. 94. Menurut Feith secara etnis Soeharto adalah Jawa abangan, bukan santri. Soeharto melihat upaya de-Sukarnoisasi radikal lebih dimotori oleh kalangan luar Jawa dan Muslim santri Jawa..

[389] Vedi R. Hadiz, Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War. 2011. *Journal of Current Southeast Asian Affairs.* 30, 1, pp. 3-38., p. 18.

[390] *ibid.*, p. 19.

2. Dominasi atas PNI

Hirarki politik lain yang menjadi target dominasi Soeharto adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Berbeda dengan Parmusi, PNI adalah partai sekuler dan merupakan afiliasi politik bagi kalangan priayi dan abangan.[391] Kendatipun PNI bukan merupakan partai Sukarno tetapi keduanya memiliki kedekatan historis. Pada akhir Demokrasi Terpimpin, PNI terbelah dua menjadi sayap kiri dipimpin duet Ali Sastroamidjojo dan Surachman, sementara sayap kanan dipimpin Osa Maliki[392] dan Usep Ranawidjaja.

Terpecahnya PNI menjadi dua sayap bertitik-tolak pada peristiwa yang terjadi tahun 1957 saat PKI berhasil melakukan rekrutmen besar-besaran atas massa PNI di wilayah Jawa dan Sumatera Selatan.[393] Saat PKI tengah memperbesar massa tersebut Hadisubeno tengah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.[394] Namun, realitas politik Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa Sukarno adalah *alpha male.* PNI menyesuaikan sikapnya dengan politik anti Nekolim Sukarno. Pimpinan senior PNI seperti Suwirjo (Ketua Umum) dan Hardi (anggota Dewan Pimpinan Pusat) tidak mampu memuaskan politik kiri agresif Sukarno. Dalam Kongres IX PNI di Solo pada bulan Juli 1960, sejumlah kader muda PNI memulai serangan

www.setabasri.org

[391] Unsur priayi mengemuka dalam hal banyak kader PNI merupakan birokrat pemerintah. Unsur abangan mengemuka dalam kecenderungan keagamaan pendukungnya yang Islam nominal ataupun menganut aliran kebatinan (misalnya *Kejawen*).
[392] Osa Maliki mewakili PNI Jawa Barat, yang banyak pengurusnya dibekukan oleh Ali-Surachman.
[393] Angus McIntyre, Division and Power in the Indonesian National Party, 1965-1966. 1972. *Indonesia*. No. 13 (Apr.) pp. 183-210., p. 183. Hadisubeno menyarankan untuk diubahnya aliansi partai dari dengan PKI menjadi dengan Masyumi dan NU. Konferensi PNI Jawa Tengah sendiri memutuskan pelarangan kerja sama dengan PKI.
[394] *ibid.*, p. 183. PNI 1946 berbeda dengan PNI 1927 yang didirikan Sukarno. PNI "Sukarno" dibubarkan para anggotanya April 1931. Namun, mungkin karena Sukarno adalah presiden, maka PNI "1946" menyatakan bahwa tahun berdirinya 1927. Sukarno sendiri setelah 1945 tidak memiliki basis partai, sama seperti Hatta. Sukarno menyerang sikap Hadisubeno dengan menyatakannya telah kehilangan komitmen atas tujuan kaum sosialis dan marhaenis.

mereka terhadap pimpinan pusat melalui penyebaran brosur bertajuk *Panggilan Juli 1960* atau juga dikenal sebagai *Buku Merah.*[395] Mereka menyerang kelompok Suwirjo yang dipersepsi sebagai kaum feodal, pro-federal, birokratis, kapitalis, dan pendukung elemen tuan tanah yang ingin mendominasi partai.[396]

Namun, faksi nasionalis radikal dalam tubuh PNI tidak bisa mutlak memenangkan pertarungan dalam Kongres Solo.[397] PNI kini mengalami persaingan internal di dalam partainya sendiri yang terjadi antara faksi yang didominasi oleh para pimpinan ormas melawan faksi Hardi yang memperoleh banyak dukungan di Jawa Tengah dan Jawa Barat.[398]

Setelah faksi kiri PNI yang dipimpin Ali Sastroamidjojo dan Ir. Surachman duduk sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, muncul faksi Hardi dan Osa Maliki yang merepresentasikan pandangan para pimpinan yang kritis terhadap pengaruh PKI di dalam PNI. Akibatnya, pimpinan pusat PNI banyak memberikan sanksi atas para pimpinan PNI yang berbeda sikap. Para pimpinan yang terkena sanksi tersebut kemudian mencari dukungan dari sejumlah cabang PNI yang

www.setabasri.org

[395] Angus McIntyre, Division …, *op. cit.,* p. 184. Judul lengkap brosur tersebut *Appeal Djuli 1960 Organisasi-organisasi Karya Front Marhaenis kepada Kongres PNI ke-IX* . Penandatanganannya pimpinan organisasi massa PNI seperti Pemuda Demokrat Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia dan Persatuan Tani Indonesia. Para kader muda PNI menyerukan dihentikannya proses borjuasi dan liberalisasi partai sejak 1946. Mereka juga menyebarkan pamflet *Mencapai Indonesia Merdeka* (tulisan Sukarno) dan rencana restrukturisasi organisasi PNI berdasarkan konsep Lenin.

[396] J. Eliseo Rocamora, The Partai Nasional Indonesia 1963-1965. 1970. *Indonesia*. No. 10 (Oct.) pp. 143-181., p. 151. Para agresor ini banyak berasal dari kelompok lama Sidik, yang berupaya menjegal Suwirjo agar tidak terpilih kembali untuk kemudian mengajukan calon mereka sendiri yaitu Ali Sastroamidjojo.

[397] *ibid.* Kongres IX Solo menandai konflik antara sayap kiri dan kanan (radikal dan konservatif) di dalam tubuh PNI. Sukarno mendukung sayap kiri, dan (kelak) Soeharto mendukung sayap kanan. Hardi kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dan Suwirjo sendiri menjadi Wakil Ketua I. Dengan demikian sayap konservatif PNI masih terwakili di dalam kepemimpinan pusat partai kendati Ali Sastroamidjojo berhasil duduk di kursi Ketua Umum.

[398] *ibid.,* p. 152.

sependapat dengan mereka atas membesarnya pengaruh PKI di tubuh PNI. Faksi Osa mendapat dukungan berupa radiogram yang dikirimkan oleh Sutjipto (Ketua V Seksi Politik Koti) kepada seluruh komandan militer se-Indonesia agar tidak ikut campur dalam konflik internal PNI/Front Marhaenis.[399] Sebaliknya, PNI Ali meminta bantuan pemerintah (Sukarno) untuk melarang aktivitas rivalnya[400] yang pada tanggal 6 September 1965 mendapat sambutan dari Sutjipto Judodihardjo (Panglima Angkatan Kepolisian) yang memerintahkan para komandan polisi lokal untuk melarang aktivitas politik PNI faksi Osa yang disebut sebagai Marhaenis "palsu".[401] Setelah G30S/PKI, perimbangan kekuatan di internal PNI mulai bergeser ke arah yang menguntungkan bagi faksi Osa.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Sutjipto (Brigjen) mengundang seluruh perwakilan partai politik ke Markas Koti. Pimpinan PNI yaitu Ali-Surachman tidak hadir, tetapi Faksi Osa mengikuti pertemuan tersebut. Harian *Suluh Indonesia* (milik PNI) dibredel karena diduga menjadi alat propaganda PKI. Pada tanggal 6 Oktober 1965 faksi Osa menyatakan pelarangan atas aktivitas PNI Ali-Surachman karena sejumlah pimpinannya diduga terlibat dalam G30S/PKI.[402] Bahkan saat itu sudah banyak kader PNI yang melibatkan diri dalam operasi pembersihan PKI di Jakarta dan Jawa Tengah.[403]

www.setabasri.org

---

[399] J. Eliseo Rocamora, The Partai Nasional Indonesia …, *op.cit.*, p. 191.
[400] Daniel S. Lev. Political Parties in Indonesia. 1967. *Journal of Southeast Asian History*. Vol. 8, No. 1 (Mar.) pp. 52-67., p. 65
[401] Angus McIntyre, Division …, *op. cit.,* p. 191.
[402] *ibid.,* p. 193.
[403] Ulf Sundhaussen, Politik Militer …, *op. cit.,* h. 391. Faksi Osa secara sepihak mengumumkan kepemimpinan baru PNI dengan komposisi pimpinan yang terdiri atas Osa Maliki sebagai Ketua Umum, Hardi sebagai Ketua I, Sabilal Rasjad sebagai Ketua II, Isnaeni sebagai Ketua III, Moh. Achmad sebagai Ketua IV, Usep Ranawidjaja sebagai Sekretaris Jenderal, Abadi sebagai Deputi I Sekretaris Jenderal, Gde Djaksa sebagai Deputi II Sekretaris Jenderal, dan Karim M. Doeriat sebagai

TNI-AD kembali menegaskan dukungannya atas Faksi Osa pada pertengahan Oktober 1965.[404] Sutjipto menyerukan kepada para Pangdam seluruh wilayah agar membiarkan faksi Osa membersihkan PNI dari elemen Gestapu.[405] Berdasarkan hal ini maka faksi Osa kemudian menjalin kerja sama dengan KAP Gestapu dan Front Pancasila.

Pada akhir November 1965 harga bahan bakar naik dari Rp. 4 menjadi Rp. 250 per liter, dan bulan berikutnya melonjak hingga menjadi Rp. 1000 per liter. Kenaikan berganda ini membuat tarif transportasi ikut naik signifikan, termasuk merambah ke aneka komoditas pangan sehari-hari. Mahasiswa bergolak, menyasarkan protes mereka pada menteri yang dianggap bertanggung jawab atas hal tersebut. Mereka mulai menyerukan tuntutan pembubaran PKI dan pembersihan kabinet. Situasi politik berbalik dan Sukarno mulai mengalami serangan dari elemen sipil terutama mahasiswa.

Faksi Osa segera menjalin koalisi dengan kekuatan politik yang baru tumbuh, sementara Faksi Ali dengan kekuatan lawannya. Jenderal Soeharto juga mulai banyak mengambil inisiatif politik ketimbang Sukarno. Lima hari setelah ia menerima Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto memanggil para pimpinan pusat PNI baik di bawah Faksi Ali maupun Faksi Osa untuk melakukan pertemuan.[406] Dalam pertemuan ketiga pada tanggal 24 Maret 1966 Jenderal Soeharto mengumumkan bahwa kedua faksi setuju untuk mengadakan Kongres Luar Biasa

www.setabasri.org

Bendahara. Lihat *ibid.,* p. 193. Oleh para pendukungnya sendiri, faksi Osa-Usep berstatus *de facto,* sementara kepemimpinan Ali-Surachman *de jure* karena terpilih lewat kongres yang sah.

[404] *ibid.,* p. 196.

[405] Sutjipto sendiri menyerahkan kepada Osa surat perintahnya pada para panglima daerah tersebut. Secara politik Koti telah mengakui faksi Osa sebagai pimpinan PNI. Lihat *ibid.,* p. 196.

[406] Angus McIntyre, Division …, *op. cit.,* p. 207.

pada 24-27 April 1966 di Bandung seperti dituntut oleh Komite Iskaq dan Osa berbulan-bulan sebelumnya.[407]

Faksi Osa sesungguhnya mulai mendominasi PNI. Pandangan politik faksi Osa mirip dengan Hadisubeno dalam masalah PKI. Pada sisi lain, Jenderal Soeharto membutuhkan PNI untuk mengimbangi kekuatan politik Islam yang juga sedang tumbuh. Namun, tidak seluruh anggota dalam faksi Osa menyetujui inisiatif Soeharto.[408] Salah satu langkah nyata dukungan Soeharto atas faksi Osa adalah dikeluarkannya perintah kepada seluruh komandan militer lokal untuk tidak mengizinkan delegasi PNI menghadiri Kongres Luar Biasa apabila mereka diduga terlibat atau bersimpati kepada Gestapu.[409] Akhirnya faksi Osa memenangkan kursi pimpinan PNI dalam Kongres Bandung.

Kemenangan Faksi Osa adalah berkat aliansinya dengan Jenderal Soeharto. Divisi Siliwangi di bawah panglimanya H.R. Dharsono menjaga ketat kongres tersebut sehingga mampu memberikan tekanan psikologis yang kuat bagi delegasi pendukung Ali (atau Sukarno).[410] Namun, faktor yang paling menentukan adalah persiapan Jenderal Soeharto dalam mengatasi konflik PNI melalui para pejabat

www.setabasri.org

[407] *ibid.* Ali dalam pertemuan sebelumnya menolak, dengan tetap mengadakan Kongres partai biasa, bukan luar biasa. Tapi Soeharto lebih suka menggunakan sebutan "kongres persatuan." Jenderal Soeharto juga mengumumkan bahwa Faksi Osa berhasil memasukkan koalisi mereka ke dalam tiga dari lima posisi pimpinan partai termasuk ketua, yaitu Iskaq Tjokrohadisurjo, Sunawar Sukowati dan, dan S. Rifa'i. Sementara unsur dari Faksi Ali yang masuk jajaran pimpinan adalah Bachtiar Salim Haloho dan Soediro.

[408] Osa sendiri, juga Sabilal Rasjad dan Usep Ranawidjaja termasuk yang tidak menyukai.

[409] Banyak pendukung Ali yang terpaksa pulang kembali setelah sampai lokasi. Delegasi dari Jakarta dan Jawa Barat hanya diizinkan menghadiri upacara pembukaan pada 24 April 1966 dan sesi paripurna pertama. Lainnya seperti Lucien Pahala Hutagaol dan Kartjono ditangkap otoritas militer Jawa Barat saat baru datang di Bandung (tempat penyelenggaraan kongres).

[410] Ulf Sundhaussen, Politik Militer …, *op. cit.,* h. 412.

TNI-AD guna memastikan rival Ali dapat memenangkan seluruh posisi utama dalam kepemimpinan partai.[411]

Kendati pada tingkat pimpinan puncak submisi telah Jenderal Soeharto peroleh, tetapi pada lapisan bawah yaitu di tingkat pimpinan cabang dan massa masih cukup kuat kehendak untuk terus mengaitkan PNI dengan Sukarno. Terlebih lagi Sukarno adalah aset berharga bagi kampanye Pemilu yang harus dilaksanakan Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto tidak mempersoalkan pembersihan PNI yang dilakukan Jasin di Jawa Timur, pengawasan ketat PNI Jawa Barat oleh H.R. Dharsono, dan di Sulawesi Selatan oleh Solihin.[412]

Perlu diungkap mengapa Soeharto terus mempertahankan PNI sementara diketahui partai tersebut dekat sekali hubungannya dengan Sukarno. Pertama, Jenderal Soeharto tidak hendak menciptakan perlawanan yang tidak perlu dari para pengikut Sukarno seperti diprovokasi oleh sejumlah langkah yang diambil Sarwo Edhie dan koleganya dari faksi ketiga yang tidak taktis dan radikal. Kedua, Jenderal Soeharto menyadari bahwa basis massa PNI banyak dari Jawa dan berkarakter abangan sehingga perlu dipertahankan untuk mengimbangi kekuatan politik Islam. Ketiga, masalah dengan PNI adalah jajaran kepemimpinannya bukan massa partainya dan Jenderal Soeharto mengenal terdapat para pimpinan PNI seperti Hadisubeno yang bisa bekerja sama dengannya. Sikap Jenderal Soeharto semacam inilah yang mendorongnya untuk memarginalisasi langkah-langkah perwira dari faksi ketiga (misalnya Sarwo Edhie) yang terlalu keras dalam mengintimidasi PNI.

www.setabasri.org

[411] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 255.
[412] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 235. Namun, saat para Pangdam Iskandar Muda (Aceh), Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan selama 1967 berusaha menekan para pimpinan PNI untuk melakukan pembubaran diri sendiri Jenderal Soeharto tidak terlampau menyetujuinya.

Dalam konteks Pemilu yang akan diselenggarakan 5 Juli 1968 (kelak diundur), maka pada tanggal 21 Desember 1967 para pimpinan pusat PNI menghadap Jenderal Soeharto guna menyampaikan kebulatan tekad mereka, termasuk instruksi kepada para pimpinan partai di daerah untuk mendukung posisi Soeharto. Secara teoretis maka yang menjadi inti kebulatan tekad tersebut adalah submisi yang secara tegas diberikan para pimpinan PNI kepada Jenderal Soeharto.[413] Jenderal Soeharto membalasnya dengan memberikan akses bagi PNI guna melakukan reproduksi kekuasaan melalui Instruksi Presiden No. 17/1967 tanggal 22 Desember 1967.[414] Selain itu Jenderal Soeharto juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak mengganggu konsolidasi organisasional yang tengah dilakukan PNI. Mekanisme *dispute settlement* akhirnya dilakukan oleh para pimpinan PNI karena tanpa itu mereka tidak akan bisa bertahan hidup dan mereproduksi kekuasaan mereka. Front Pancasila yang dipimpin oleh Harry Tjan Silalahi menyambut baik Inpres No. 17/1967 tersebut karena PNI adalah mitra potensial untuk menghadapi kekuatan politik Islam.[415] Namun, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) ternyata berkeberatan dengan Inpres No. 17/1967 sebab mereka masih menyangsikan itikad baik PNI terhadap Orde Baru. Pada lain pihak

www.setabasri.org

[413] Lima kebulatan tekan PNI sebagai berikut: (1) PNI mengambil jarak dengan Sukarno dan menghilangkan gelar Bapak Marhaenisme; (2) PNI bersama Orde Baru akan bekerja sama mengikis sisa-sisa Gestapu/PKI; (3) PNI dan organisasi massa tidak terikat lagi pada ajaran Sukarno; (4) PNI sedia menjalin kemitraan dengan ABRI, pemerintah, dan aparatur negara; dan (5) Asas PNI adalah Marhaenisme, yang dirumuskan sebagai Ketuhanan Yang Mahaesa, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Lihat G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. *Jejak Langkah Pak Harto: 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991., h. 228.

[414] Ada pun inti dari instruksi Jenderal Soeharto tersebut adalah bahwa semua penguasa daerah harus membantu dan memberi kesempatan kepada PNI di dalam proses kristalisasi dan konsolidasi partai mereka ke arah Orde Baru. Lihat *ibid*.

[415] *ibid.*, h. 237

Sarwo Edhie kini mulai memahami dominasi Jenderal Soeharto atas dirinya dan cenderung menurut.[416]

Dominasi Jenderal Soeharto atas hirarki PNI yang diprediksi akan menjadi stabil di bawah kepemimpinan Osa-Usep kembali mendapat persoalan manakala Osa Maliki wafat pada 14 September 1969.[417] Segera terjadi rivalitas internal di dalam hirarki PNI antara dua individu dominan yaitu Hardi versus Hadisubeno. Namun, konflik antara Osa-Hardi berbeda dengan antara Osa versus Ali-Surachman, karena konflik kali ini tidak bernuansa ideologis melainkan pragmatis.[418]

Berbeda dengan tipikal Agus Sudono di Parmusi, Hardi tidak mampu menjalin hubungan dekat dengan para *bonding* Soeharto kendatipun setelah wafatnya Osa Maliki, Hardi-lah yang secara praktis menjalankan kepemimpinan partai. Jenderal Soeharto sendiri kemungkinan menilai bahwa tipikal Hardi terlalu rasional, mengikuti cara berpikir "barat", tidak menyetujui peran besar militer, sehingga kemungkinan akan mudah baginya menjalin aliansi dengan elemen PSI dan kekuatan politik Islam.[419] Sebab itu pula maka Jenderal Soeharto lebih mempercayai Hadisubeno, rekan lama anti PKI-nya di Semarang, untuk memimpin PNI. Hadisubeno memiliki keserupaan etnosentrisme dengan Soeharto sebab ia dinilai sebagai bagian dari Tradisionalisme Jawa.[420]

www.setabasri.org

---

[416] Ia sebagai Pangdam II Bukit Barisan menginstruksikan Danrem 21 hingga 23, serta Brigif 7 RR dan Dandim 0212/Medan Kota menaati dan melaksanakan Inpres tersebut, kendati petunjuk teknisnya belum ia susun. Lihat *ibid.,* h. 237.
[417] Bonnie Triyana, et.al., "Desas …", *op. cit.* h. 47.
[418] *ibid*.
[419] Hamish McDonald, Suharto's …, *op. cit.,* p. 103. Hardi diprediksi akan menjadi rival berbahaya bagi Soeharto sentris.
[420] *ibid.*

Upaya dominasi Soeharto atas hirarki PNI kini dilakukan melalui *bonding*-nya, Ali Moertopo. Kongres XII PNI rencananya akan diselenggarakan di Semarang pada bulan April 1970. Pengaruh Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani sangat jelas di kongres ini.[421] Delegasi luar Jawa yang hendak menuju Semarang banyak yang terlebih dahulu melakukan transit di Jakarta dengan mana banyak pendukung Hardi di sana. Saat para delegasi melakukan transit, Ali Moertopo kemudian memberi "pengarahan" kepada mereka bahwa pada intinya Jenderal Soeharto lebih menyukai Hadisubeno ketimbang Hardi. Apabila Hadisubeno tidak terpilih sebagai Ketua Umum maka PNI akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup.[422]

Saat pada akhirnya kongres berlangsung, Ali Moertopo merasa perlu untuk membangun "pusat komando" yang lokasinya berada di dekat tempat kongres guna memastikan kemenangan Hadisubeno.[423] Namun, berbeda dengan saat Kongres Parmusi, pada Kongres PNI ini Jenderal Soeharto hadir di dalam Pembukaan Kongres XII PNI dengan pernyataan politik bahwa "pemerintah tidak ikut campur urusan internal partai."[424] Seperti telah dapat diduga maka kongres ini mirip seperti Kongres PNI di Bandung pada bulan April 1966, dan sebagai hasilnya Hadisubeno

www.setabasri.org

[421] Bonnie Triyana, et.al., "Desas …", *op. cit.* h. 47.
[422] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 258.
[423] Hamish McDonald, Suharto's …, *op. cit.,* p. 103. McDonald menulis bahwa dalam kongres tidak diadakan pemungutan suara. Delegasi hanya menandatangani pernyataan bahwa kini Hadisubeno menjadi ketua umum PNI.
[424] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 258. Bagi Soeharto, Hadisubeno adalah bekas koalisinya di era "bisnis" YPTE sejak 1958. Soeharto mengenalnya sebagai orang yang tidak mungkin berkonfrontasi dengannya. Soeharto benar-benar menghendaki PNI ada di sisinya untuk mendominasi politik Islam.

berhasil terpilih sebagai Ketua Umum dan Abdul Madjid dari faksi Ali sebagai Sekretaris Jenderal.[425]

Di bawah kepemimpinan Hadisubeno maka PNI terus memperkuat identitas abangan dan priayi yang memang sudah berakar dalam massa PNI. Selain untuk menarik para pendukung Sukarno, Hadisubeno juga mengajak massa PNI agar mewaspadai peningkatan pengaruh golongan santri yang ia anggap hendak mengecilkan peran Pancasila sebagai falsafah bangsa yang digali Sukarno.[426]

C. Pemberdayaan Sekber Golkar

Secara alamiah Soeharto adalah orang yang terbiasa mengandalkan tindakan taktis untuk bertahan hidup. Ia lihai dalam memanfaatkan naluri sehingga lebih tertarik berpikir dalam jangka pendek, menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, kemudian melangkah guna menghadapi masalah lain. Hal seperti ini dipersepsi oleh Yusuf Wanandi seorang aliansinya dari lingkaran Pater Beek:

> Setahun setelah semua kekuasaan Sukarno dilucuti, Soeharto … saya melihat keterbatasannya … walau … unggul dalam taktik, ia tidak terlalu kuat dalam … strategi, karena keterbatasan pendidikannya … Soeharto secara alamiah memang cerdas … ia menjadi presiden penuh selama tiga tahun … banyak mengambil inisiatif dan mampu belajar dengan cepat tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga politik. Ia juga memiliki daya ingat fotografis … tidak melihat masalah-masalah jangka panjang … lebih mengandalkan tindakan-tindakan taktis; jenis orang yang bertahan hidup. Ia seorang yang lihai …[427]

www.setabasri.org

[425] Bonnie Triyana, et.al., "Desas …", *op. cit.* h. 47.
[426] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 259. Selain itu, Hadisubeno juga menekankan hubungan dengan PNI dengan Sukarno dan menyerukan, sama seperti para pendukung Masyumi, pembebasan pimpinan mereka dari penjara. Kini Hadisubeno mulai menyinggung masalah yang cukup sensitif dengan Soeharto.
[427] Yusuf Wanandi, *Menyibak Tabir …, op. cit.,* h. 99-102. Dalam kajian Arnold M. Ludwig, kemungkinan *lihai* ini sebagai cerdik atau licik, yang lebih didorong oleh pengaruh sistem limbik (bagian otak yang menangani masalah politik).

Hal ini selaras seperti dinyatakan Arnold M. Ludwig, bahwa seorang pemimpin tidak mesti kompeten secara administratif atau khusus dilatih untuk itu. Faktor lain yang bersifat *natural* seperti kelicikan dan keberanian yang ditentukan oleh sistem limbik otak kerap lebih menentukan keberhasilan satu individu menjadi penguasa. Secara pendidikan Soeharto adalah minor apabila dibandingkan perwira lain. Namun, kekuatannya adalah tindakan-tindakan taktis demi bertahan hidup seperti dalam pertempuran bersenjata, dan ini memungkinkannya menjadi presiden secara relatif singkat yaitu hanya selama tiga tahun (dari 1965 hingga 1968) dengan mana ini ia lakukan melawan Sukarno yang begitu populer.

Masalah yang dihadapi Soeharto kemudian adalah penyelenggaraan Pemilu.[428] Berkaitan dengan Pemilu maka persoalan Soeharto sama seperti Sukarno, ia bukanlah seorang pimpinan langsung sebuah partai politik. Ali Moertopo sempat menawarkan Soeharto untuk membentuk kelompok "pembangunan" baru yang beroperasi dari desa ke desa baru kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik.[429] Ali menjelaskan bahwa ia akan memberikan dukungan kepada Omar Khajam, seorang intelektual dalam lingkaran PSI, untuk menjalankan proyek tersebut. Soeharto menolak usulan Ali itu karena apabila keterlibatan Omar terdeteksi maka partai baru tersebut dapat secara mudah dicurigai sebagai bentuk baru PSI atau paling tidak berada di bawah pengaruhnya.

www.setabasri.org

[428] Menurut Liddle, sejak Oktober 1965 Soeharto harus mencari legitimasi bagi seluruh tindakannya. Sebab itu ia selalu mengaitkan diri dengan UUD 1945 dan MPRS. Lihat R. William Liddle, Evolution from …, *op. cit.,* p. 289.
[429] Brian May, The Indonesian …, *op. cit.,* p. 236.

Sementara seperti telah diketahui secara umum bahwa partai tersebut telah dinyatakan Sukarno sebagai terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.[430]

Yusuf Wanandi juga menjelaskan bahwa perhatian khusus Soeharto atas Sekber Golkar baru secara serius ia pikirkan setelah menjabat sebagai presiden penuh pada tahun 1968. Dalam menentukan masalah "mesin" politik Pemilu, Soeharto ternyata memiliki solusi sendiri yaitu dengan menugaskan Ali Moertopo untuk mengambil-alih Sekber Golkar.[431] Yusuf Wanandi sempat menyangsikan usulan Soeharto ini karena tidak populernya perilaku para pimpinan Sekber Golkar: satu pimpinannya memiliki klub malam dekat Monas, lainnya mengelola BUMN yang sarat korupsi, dan individu lainnya suka bermain perempuan (*madon*) dan menyelingkuhi istri ajudannya sendiri.[432] Namun, keputusan Soeharto adalah final bahwa ia hendak menggunakan Sekber Golkar sebagai kendaraan politiknya dalam Pemilu.

Apabila diperhatikan rekam jejak Soeharto, maka bahkan sejak masa awal ia telah melakukan pertemuan dengan para Pimpinan Harian Sekber Golkar di Markas Kostrad. Dalam pertemuan tersebut Soeharto menyebut Sekber Golkar sebagai alat revolusi dengan tiga tugas pokok.[433] Demikian pula saat membuka Seminar II

www.setabasri.org

---

[430] *ibid*. Ironisnya, Sumitro Djojohadikusumo pimpinan PSI yang terlibat dalam PRRI/Permesta ia jadikan Menteri Perdagangan dalam kabinetnya.

[431] Brian May, The Indonesian …, *op. cit.,* p. 236. Sekber Golkar sebenarnya telah dibentuk pada tahun 1964 dan saat itu bukan merupakan sebuah organisasi berstruktur komando yang rapi. Sekber Golkar lebih mirip sebuah konfederasi "cair" yang tersusun atas lebih dari 200 ormas fungsional yang dibentuk militer untuk mengimbangi ormas-ormas PKI.

[432] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 126-127.

[433] Ketiga tugas pokok tersebut adalah mengamankan serta mengamalkan Panca Azimat Revolusi. Kedua, mengamankan dalam arti menjaga keselamatan PBR Bung Karno. Serta mengamalkan seluruh ajaran-ajarannya. Ketiga, mengamankan dan mengamalkan penyusunan potensi nasional yang progesif-revolusioner untuk mencapai tiga kerangka tujuan revolusi Indonesia. Lihat G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968., *op. cit.,* h. 26.

Angkatan Darat di Graha Wiyata Yudha Bandung, Soeharto menyatakan bahwa doktrin TNI-AD yaitu Tri Ubaya Cakti hendaknya terus dikembangkan dengan penekanan pada peranan Golongan Karya.[434]

Pada langkah selanjutnya, Soeharto menugaskan Darjatmo (Mayjen), untuk melakukan reorganisasi atas Sekber Golkar.[435] Lingkaran Pater Beek yang dimotori Harry Tjan Silalahi dan Yusuf Wanandi berkonsentrasi di pembangunan pengaruh politik dengan membentuk Gerakan Pembangunan di dalam tubuh Sekber Golkar pada bulan Oktober 1969.[436] Hal yang juga menjadi perdebatan apakah Pater Beek punya peran tertentu di dalam terpilihnya Sekber Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto.[437]

Menurut R. William Liddle, dilema yang dihadapi Soeharto dalam Pemilu yang harus ia selenggarakan adalah bagaimana Pemilu bisa menjamin legitimasi dirinya, memungkinkan doktrin Dwifungsi diterima, dan menolak legitimasi partai-partai politik. Penyelesaian atas dilema tersebut Soeharto temukan dalam pemberdayaan Sekber Golkar.[438] Undang-undang Pemilu tahun 1969 menyatakan bahwa kontestan Pemilu 1971 adalah mereka yang telah memiliki perwakilan di parlemen (DPR-GR), dan dengan demikian Sekber Golkar termasuk ke

www.setabasri.org

[434] *Berita Yudha*, 25 Mei 1966. Peran TNI-AD dalam membina dan mengembangkan golongan ini sangat menentukan.
[435] Darjatmo saat itu menjabat asisten hubungan kelompok fungsional di Staf Umum TNI-AD.
[436] Kelompok sipil ini menginduk pada Ali Moertopo. Anggotanya terdiri atas Liem Bian Koen, Sumiskum, Soegih Arto, Murdopo, dan Sulistro. Kelak individu kelompok lain banyak terlibat di Sekber Golkar seperti Liem Bian Kie, Cosmas Batubara, dan Harry Tjan Silalahi. Selain itu, tokoh mahasiswa dari lingkaran PSI seperti Rahman Tolleng pun ikut terlibat, terutama dalam surat kabar Suara Karya.
[437] Mujiburrahman, Feeling … *op. cit.,* p.140.
[438] R. William Liddle, Evolution from …, *op. cit.*, p. 291.

dalamnya.[439] Masashi Nishihara menyatakan bahwa Sekber Golkar adalah "partai" yang dibentuk dari "atas."

Namun, Soeharto juga tidak hendak kembali menunda Pemilu 1971 karena Pemilu dibutuhkan untuk melegitimasi politik bagi kekuasaannya.[440] Soeharto tidak setuju terhadap siapa pun yang hendak (kembali) menunda Pemilu 1971[441] dan terjadi perbedaan pendapat antara dirinya dengan Ali Moertopo. Bagi Ali, Pemilu sebaiknya ditunda kembali karena struktur politik belum tertata baik dan Sekber Golkar "dianggap belum kuat menjadi mesin politik Soeharto."[442] Pada sesi diskusi dengan kelompok Yusuf Wanandi pada tanggal 31 Desember 1969, Soeharto kembali diminta untuk mengundurkan waktu penyelenggaraan Pemilu 1971. Soeharto berkeras agar Pemilu 1971 berjalan sesuai jadwal karena ia tidak mau memikul kesalahan politik akibat Pemilu yang kembali ditunda. Soeharto juga menuding Yusuf dan kelompoknya sebagai pihak yang sengaja mengulur-ulur waktu pengesahan Undang-undang Pemilu.[443] Harry Tjan Silalahi membela Yusuf dengan menyatakan bahwa salah satu faktor tumbangnya Sukarno karena ia (Sukarno) tidak memiliki "mesin politik yang kuat untuk menopang kekuasaannya."[444] Dalam adu argumentasi antara kedua belah pihak Soeharto menyatakan:

> "Kalau saya mengandalkan kalian, pemilu tidak pernah jadi … kalau rakyat menggantung saya, kalian semua akan bersorak dan bertepuk tangan

www.setabasri.org

[439] *ibid.*
[440] Masashi Nishihara, Golkar and …, *op. cit.,* p. 7.
[441] Tempo, "Setelah Ali Menyikut Sumiskun", 20 Oktober 2013, h. 46.
[442] *ibid.*, h. 46.
[443] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 127.
[444] Tempo, "Setelah Ali …, *op. cit.*, h. 47.

> menertawai saya. Sekarang saya perintahkan … segera mengesahkan undang-undang sesuai … jadwal."[445]

Jusuf menyatakan kepada Soeharto bahwa jika memang Sekber Golkar ternyata menjadi pilihannya maka ia dan kelompoknya harus ditempatkan sebagai pengelola panitia Pemilunya.[446] Soeharto menyetujui tuntutan tersebut dan Ali Moertopo memberikan sebuah gedung (kelak menjadi kantor CSIS) kepada kelompok Yusuf untuk mengelola Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sekber Golkar. Untuk keperluan Bappilu pula Ali Moertopo memberikan dana operasional sebesar 50 juta rupiah.[447]

Setelah pertemuan dengan Soeharto pada tanggal 31 Desember 1969, Ali Moertopo segera menugaskan Yusuf dan kelompoknya untuk menyusun kekuatan. Yusuf melakukan seleksi atas 50 orang yang berasal dari para aktivis sebagai penghubung dengan Sekber Golkar di daerah. Pada tanggal 8 Maret 1971 Ali Moertopo memberi modal guna menerbitkan *Suara Karya,* sebuah surat kabar harian yang khusus diperuntukkan guna mempromosikan Sekber Golkar ke tengah masyarakat.[448] Untuk pendirian *Suara Karya* Ali Moertopo menggelontorkan dana sebesar 50 juta rupiah.[449] Usulan pendirian *Suara Karya* sendiri berasal dari Ali Moertopo dengan asumsi bahwa Sekber Golkar harus memiliki "corong" agar dapat menyatakan eksistensinya di hadapan publik.

www.setabasri.org

---

[445] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 127.
[446] *ibid.,* h. 128.
[447] Tempo, "Setelah Ali …, *op. cit.*
[448] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 128.
[449] Tempo, "Setelah Ali …, *op. cit.*, h. 47.

Namun, Rahman Tolleng yang akhirnya menjadi salah satu redaktur *Suara Karya*, menganggap apabila Sekber Golkar memiliki surat kabar "partai" maka itu merupakan pengulangan gaya Orde Lama.[450] Redaksi *Suara Karya* terdiri atas Sumiskun (Pemimpin Redaksi), Rahman Tolleng (Wakil Pemimpin Redaksi), dan anggota redaksi seperti Syamsul Bisri, Sayuti Melik, David Napitupulu, dan Cosmas Batubara.[451] Agar sirkulasi *Suara Karya* dapat berjalan lancar maka Yusuf mengusulkan kepada Ali Moertopo agar membuat surat kepada para menteri agar mewajibkan para pegawai negeri membeli *Suara Karya.* Setelah kewajiban pembelian surat kabar dilakukan maka oplah harian *Suara Karya* meningkat ke angka 25 ribu eksemplar, dan tahun berikutnya 54 ribu eksemplar per hari, bahkan menjadi salah satu harian dengan oplah terbesar pada masa itu.[452]

Pemicu lain perhatian Soeharto kepada Sekber Golkar adalah berakhirnya "masa darurat" negara 1965-1968 dan dalam periode 1968-1971 Soeharto harus berpolitik secara konstitusional, tidak lagi mengatasnamakan militer.[453] Sekber Golkar tentu saja tidak akan dibiarkan oleh Soeharto untuk semata berkembang sebagai organisasi sipil, melainkan organisasi sipil yang ia mampu dominasi dan mengalami "penghijauan".[454] Cara Soeharto adalah dengan menempatkan orang-orang militer di aneka posisi di dalam Sekber Golkar, baik di dalam organisasi

www.setabasri.org

[450] *ibid.*, h. 48. Kendati akhirnya menerima usulan Ali, Tolleng memprasyaratkan bahwa Suara Karya tidak boleh memiliki rubrik editorial.
[451] Tempo, "Setelah Ali …, *op. cit.*, h. 48. Yusuf Wanandi bercerita *Suara Karya* dijual Rp. 10 per eksemplar, tetapi tidak laku karena semua orang tahu koran itu punya Sekber Golkar, punya Soeharto.
[452] *ibid.*
[453] R. William Liddle, Evolution …, *op. cit.,* p. 289-290.
[454] Dalam arti dimiliterisasi atau sekurangnya militer punya pengaruh besar di dalam Sekber Golkar. Lihat *ibid.*, p. 290.

maupun di dalam parlemen. Dengan demikian cara berpikir Soeharto tidak beranjak jauh dari dunia yang paling ia pahami yaitu kemiliteran.

Sama seperti saat Soeharto mereproduksi kekuasaannya di tubuh angkatan bersenjata sehingga keputusan komando pasukan akhirnya terpusat pada dirinya selaku panglima tertinggi, Sekber Golkar sedapat mungkin distrukturkan semacam itu guna menjamin dominasinya di dalam hirarki tersebut dengan cara mereproduksi kekuasaan personalnya di dalam "partai" baru tersebut. Efektivitas komando harus diterapkan pada Sekber Golkar mengingat terdapatnya ancaman dalam Pemilu yang cukup besar baik dari PNI, NU, dan Parmusi. Ketiga partai tersebut memiliki pengalaman dalam mengorganisir diri dalam Pemilu, memiliki basis massa yang jelas, serta individu dominan di masing-masing hirarki memiliki kemampuan yang telah cukup teruji di dalam mengendalikan partai.[455] Sebaliknya, Sekber Golkar memiliki persoalan pada kohesivitas antar organisasi pembentuknya. Nishihara menulis bahwa jumlah organisasi yang berafiliasi dengan Sekber Golkar pada tahun 1965 tercatat sebesar 64 yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 128 pada tahun 1966, dan melonjak menjadi 252 pada tahun 1967.[456] Nishihara juga menulis bahwa sebelum tahun 1970 Sekber Golkar bahkan hanya memiliki sedikit pengaruh di luar Jakarta.[457]

Namun, secara khusus Soeharto telah memperhitungkan sejak awal mengenai potensi Sekber Golkar sebagai kontestan Pemilu. Agak jauh sebelumnya, yaitu bahkan pada tanggal 10 Desember 1965, dalam sambutan tertulis di Mukernas I

www.setabasri.org

[455] R. William Liddle, Evolution …, *op. cit.,* p. 290.
[456] Masashi Nishihara, Golkar and …, *op. cit.*, p. 18.
[457] *ibid.*, p. 19. Kendati di atas kertas Sekber-Golkar telah memiliki cabang di setiap provinsi.

Sekber Golkar di Cibogo, Soeharto menyatakan bahwa kelompok fungsional ini memiliki kemampuan menjaga revolusi Indonesia agar tetap berjalan di relnya karena mengenali sifat dan hakikat revolusi Pancasila.[458]

Dukungan Soeharto lainnya diberikan melalui penerbitan Instruksi Presiden No. 1/NS/5/127/1966 pada tanggal 9 September 1966 yang menyatakan bahwa seluruh panglima angkatan bersenjata akan membantu dan memberikan aneka fasilitas bagi perkembangan dan perampungan tugas Sekber Golkar baik di tingkat pusat maupun daerah.[459] Ini merupakan wujud nyata dari terdapatnya upaya melebur Sekber Golkar dengan pemerintah. Pada saat Penutupan Penataran Sekber Golkar di Jakarta, Soeharto juga menyatakan bahwa kini masyarakat telah menghendaki bahwa pembangunan perlu ditangani oleh para ahli, yang di masa liberal tersingkir oleh "durnoisme" yaitu karyawan tidak becus tetapi didukung organisasi-organisasi politik.[460] Pernyataan Soeharto tersebut berimplikasi pada asumsinya terhadap partai-partai politik dengan menganggapnya sebagai "gangguan" potensial atas Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang ia rencanakan.

Dukungan lain Soeharto atas Sekber Golkar juga terjadi dalam pidatonya pada saat Mukernas II Sekber Golkar tanggal 2 November 1967 di Cibogo. Secara khusus Soeharto meminta para peserta untuk melakukan konsolidasi organisasi,

www.setabasri.org

[458] *Berita Yudha*, 10 Desember 1965.
[459] *Berita Yudha*, 9 September 1966. Instruksi ini tentang bantuan bagi perkembangan Sekretariat Bersama Golongan Karya pada tingkat pusat dan daerah.
[460] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. *Jejak Langkah… 01 Oktober 1965 – 27 Maret 1968*., *op. cit.,* h. 103-104. Durnoisme berasal dari kata Durno atau Drona, salah satu resi (ahli) perang dalam pewayangan Mahabharata yang mau saja mengorbankan prinsip keahlian yang ada pada dirinya untuk kemudian tunduk pada keinginan dari pihak-pihak yang memberikan keuntungan material kepadanya. Durnoisme berarti paham yang sejalan dengan perilaku Durno atau Dorna.

menyederhanakan struktur dan keanggotaan, dan dengan demikian mereka bisa bergerak leluasa sesuai dengan TAP MPRS tentang Penyederhanaan Kepartaian Keormasan, dan Kekaryaan.[461] Anjuran ini merupakan upaya Soeharto agar Sekber Golkar yang awalnya merupakan koalisi cair sejumlah organisasi agar memulai proses integrasi internal. Selain itu kepada peserta Soeharto mulai menyinggung masalah Pemilu dengan menyatakan bahwa Sekber Golkar bukan golongan yang berafiliasi dengan partai politik melainkan hanya mengikatkan diri pada Pancasila dan UUD 1945 serta sebagai pendukung Kabinet Ampera.[462] Soeharto juga mengharapkan agar Sekber Golkar dapat mengupayakan kemenangan Orde Baru.[463]

Adapun mengenai taktik politik Soeharto sendiri ia tekankan di depan Koordinasi Pemuda Sekber Golkar pada tanggal 26 September 1968. Dalam kesempatan tersebut Soeharto menjelaskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun memerlukan sejumlah persyaratan yaitu stabilisasi politik, stabilisasi ekonomi, aparatur negara yang baik, rencana-rencana kerja yang realistis, kemauan kerja keras, pengerahan dana dari dalam dan luar negeri, serta persatuan bangsa. Kepada para pemuda Sekber Golkar, Soeharto menekankan bahwa di samping peran sebagai pemuda maka tugas mereka adalah, selain belajar untuk menjadi pemimpin, juga harus mau pula belajar untuk dipimpin.[464] "Harus belajar untuk dipimpin"

www.setabasri.org

[461] Presiden Republik Indonesia, Pidato – Amanat Pedjabat Presiden R. I. Djenderal Soeharto pada Musyawarah Kerja Nasional ke-II Sekretariat Bersama Golongan Karya tanggal 2 Nop. 1967 di Cibogo.
[462] Saat itu nama kabinet Soeharto masih Ampera. Tahun 1968 baru nama kabinet berubah menjadi Kabinet Pembangunan I.
[463] Presiden Republik Indonesia, Pidato – Amanat Pedjabat Presiden R. I. …, *op.cit.*
[464] *ibid.*.

adalah pernyataan kemungkinan besar serupa dengan "menjadi subordinasi" pemerintah.

Bersamaan dengan tengah dilakukannya pemberdayaan Sekber Golkar, Soeharto melalui Opsus Ali Moertopo berupaya untuk mendominasi Parmusi, PNI, juga dunia jurnalistik. Dunia jurnalistik ini penting mengingat promosi Sekber Golkar salah satunya dilakukan oleh para wartawan melalui surat kabar masing-masing. Sebab itu menjadi penting bagi Soeharto untuk mendominasi hirarki Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengingat unsur publikasi memegang peranan penting dalam memunculkan *political obedience* atas spesies (rakyat Indonesia). [465]

Sejalan dengan taktik politik Soeharto yang berkenaan dengan pemberdayaan Sekber Golkar, maka sejak bulan Januari 1969 Amir Machmud – melalui Peraturan Mendagri No. 12/1969 – berupaya untuk terus "memurnikan" representasi kelompok fungsional di DPRD-I dan DPRD-II seluruh Indonesia.[466] Amir melakukan ini sebab ia menganggap banyak wakil kelompok fungsional sekaligus merangkap sebagai anggota partai politik. Kekhawatiran Amir adalah bahwa keterlibatan akan bermuara pada meningkatnya pengaruh partai politik di dalam Pemilu 1971.

www.setabasri.org

[465] Masashi Nishihara, Golkar and …, *op. cit.*, p. 21. Selain itu, Soeharto, lewat Ali Moertopo, melakukan upaya dominasi atas dunia jurnalistik, yang pada konvensi Palembang 22 Oktober 1970 berakhir dengan munculnya tiga faksi dalam hirarki Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu faksi Rosihan Anwar (Pedoman), Jacob Utama (Kompas), dan BM Diah (Merdeka). Akhirnya menteri penerangan kabinet Soeharto memutuskan faksi BM Diah yang memperoleh dukungan Opsus sebagai pimpinan PWI yang legal.

[466] Peter McCawley. General Elections-Or an Election of Generals?. 1970. *The Australian Quarterly*. Vol. 42, No. 3 (Sep.), pp. 65- 74., p. 71.

Inti dari Peraturan No. 12/1969 adalah bahwa wakil kelompok fungsional yang menjadi anggota partai politik harus dikeluarkan dari DPRD-I dan DPRD-II untuk kemudian digantikan oleh orang lain yang bukan anggota partai politik.[467] Tentu saja, peraturan Amir ini mendapatkan protes dari partai-partai politik dan juga publik, yang menyatakan bahwa Amir bertindak hanya dengan satu tujuan yaitu memenangkan Sekber Golkar dalam Pemilu. Karena kritik tersebut memang tepat maka tanggapan Amir adalah terus melanjutkan kebijakannya di seputar "pemurnian" kelompok fungsional.

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Sekber Golkar No. 101/VII/Golongan Karya/1971 maka peran dari aneka KINO dan ormas-ormas hanya sekadar membina administrasi teknis sedangkan operasional ormas-ormas tersebut dikendalikan oleh sekretaris-sekretaris Dewan Pimpinan.[468] Juga, istilah KINO-KINO kini sudah tidak dipergunakan lagi.[469]

Paparan di dalam Bab III dimaksudkan untuk memberikan gambaran seputar bagaimana Soeharto melakukan reproduksi kekuasaan. Diawali dengan reproduksi kekuasaan di tubuh TNI-AD, Soeharto yang awalnya merupakan perwira minor secara perlahan mampu mendominasi matra TNI-AD yang strategis tersebut dengan memunculkan dirinya selaku Menpangad. Soeharto juga melakukan reproduksi kekuasaan di tubuh angkatan bersenjata secara umum, baik melalui penempatan *bonding,* sentralisasi komando di tubuh angkatan bersenjata, serta memastikan aneka hirarki seperti TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, juga tentunya kepolisian

www.setabasri.org

[467] *ibid.*, p. 71.
[468] Struktur baru tersebut tidak lagi disebut "Sekber Golkar" melainkan "Golongan Karya." Lihat *Sinar Harapan*, 21 Juli 1971
[469] *ibid*.

tersubordinasi oleh posisi dirinya. Hal serupa juga Soeharto lakukan terhadap organisasi politik sipil seperti Parmusi dan PNI.

Di tingkat organisasi sipil, cara umum yang dilakukan oleh Soeharto dalam melakukan reproduksi kekuasaan adalah dengan membangun suatu jejaring yang terdiri atas orang-orang yang dapat ia percayai, tetapi berstatus lebih minor ketimbang dirinya, guna menciptakan loyalitas bukan terhadap suatu institusi melainkan lebih kepada dirinya secara personal. Soeharto juga hampir tanpa ragu berani melakukan intervensi terhadap kedaulatan internal partai politik, yaitu dengan cara menempatkan orang-orang yang berasal dari internal partai politik tetapi mau menerima dominasinya. Penempatan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mempelajari potensi konflik di dalam internal partai, menugaskan para *bonding*nya untuk membangun kekuatan, untuk kemudian mengambil-alih kepemimpinan suatu partai politik secara tidak langsung memanfaatkan mereka yang sebagian atau sepenuhnya bergantung pada dirinya.

www.setabasri.org

BAB IV
KEKUASAAN SOEHARTO PERIODE 1965-1971 DALAM PERSPEKTIF BIOPOLITIK

Disertasi ini memiliki tiga pertanyaan penelitian yang berupaya untuk dijawab. Pertama, bagaimana Soeharto membangun kekuasaan antara 1965 hingga 1968 dikaitkan dengan konsep bonding, formasi koalisi, dan hirarki *dyadic*. Kedua, bagaimana upaya Soeharto melakukan dominasi politik nasional dikaitkan dengan konsep reproduksi kekuasaan dalam hirarki kompleks, dan mekanisme *inclusive fitness*. Ketiga, mengapa dominasi asimetris Soeharto atas aneka hirarki politik yang ada memungkinkannya menciptakan *political obedience* yang memungkinkan Pemilu 1971 dapat mendukung kekuasaannya untuk menjamin prediktabilitas spesies.

Ketiga pertanyaan penelitian ini akan dibahas ke dalam tiga sub bab yang masing-masing berupaya membahas konsep inti di dalam pertanyaan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah fakta yang dianggap mampu membuktikan konsep tersebut. Seluruh konsep yang dibahas berpangkal pada perspektif Biopolitik yang digunakan sebagai konsep utama yang digunakan dalam disertasi ini.

A. Dominasi dan Hirarki *Dyadic*

Untuk membahas pertanyaan pertama maka akan dibahas konsep dominasi dan hirarki dominan *dyadic.* Kendati berhasil membubarkan PKI, Soeharto tidak bisa langsung menggantikan posisi Sukarno begitu saja. Soeharto memilih untuk terlebih dahulu mendominasi para penyokong kekuasaan Sukarno, dan yang

www.setabasi.org

terpenting adalah PKI selain para *bonding* sipil dan militer Sukarno. Setelah PKI dan para *bonding* Sukarno tersingkir maka yang tersisa adalah dominasi-submisi dalam hirarki *dyadic*: Sukarno dan Soeharto.

1. Eliminasi Aliansi Sukarno

Disertasi ini tidak akan membahas aneka hipotesis seputar siapa perencana G30S/PKI melainkan hanya pada argumen tidak terlibatnya Soeharto dalam gerakan tersebut. Paparan juga tidak akan terlampau mendalam pada saat memaparkan aneka peran penting organisasi-organisasi seperti KAP-Gestapu, NU, KAMI, KAPPI, dan aneka ormas lain dalam proses eliminasi PKI.[470] Fokus disertasi ini adalah pada upaya dominasi yang dilakukan Soeharto atas PKI sebagian besarnya adalah bersifat fisik, dalam pengertian bahwa ia dan anggota koalisinya melakukan pelarangan, penangkapan, sekaligus pembunuhan atas para pimpinan dan anggota PKI serta organisasi afiliasinya baik melalui prosedur pengadilan maupun tidak.

Pada tanggal 14 September 1965, S. Parman (Deputi Intelijen Jenderal Yani, salah satu perwira korban G30S/PKI) menerima sebuah laporan intelijen bahwa terdapat rencana penculikan atas sepuluh orang perwira TNI-AD.[471] Parman meneruskan informsi tersebut kepada Achmad Yani, yang kemudian melaporkan temuan Parman kepada Sukarno bahwa hari "H" penculikan adalah tanggal 18

[470] Telah banyak tulisan yang membahas tentang peran umat Islam dalam eliminasi PKI, terutama di KAP-Gestapu, KAMI, KAPPI, dan aneka ormas seperti GPII dan PII.

[471] Tanggal 14 September, S. Parman (asisten intelijen Yani di SUAD) melapor pada Yani tentang rencana asasinasi atas 10 perwira tinggi AD, selain 7 perwira yang kemudian memang diculik (1 orang lolos, yaitu Nasution) tiga orang lagi adalah Mursyid, Soeharto, dan Sukendro. Penjagaan dilakukan di tanggal termaksud, tetapi karena tidak terjadi hal yang diprediksi, kewaspadaan pun lalu mengendur. Lihat Helen-Louise Hunter*, Sukarno and the Indonesian Coup: The Untold Story*. Connecticut-London: Praeger Security International, 2007., p. 1-7.

www.setabasri.org

September 1965. Namun, ketika pada hari yang dimaksud ternyata tidak terjadi peristiwa apa pun, maka pengamanan pun dikendurkan.

Kabar mengenai penculikan pun kembali muncul, dan kali ini berasal dari Brigjen Sudono (atase militer Indonesia di Peking) yang memberitahukan Haryono MT (anggota SUAD, korban G30S/PKI) bahwa pada akhir September 1965 kembali akan terjadi upaya penculikan. Haryono cenderung tidak mempercayai laporan Sudono, akan tetapi ia pun tetap melakukan pertemuan dengan para anggota SUAD pada tanggal 30 September 1965 di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Saat pertemuan tersebut "Jenderal Sudono dikabarkan menjadi "sasaran percandaan" semua orang yang hadir".[472] Kemudian pada dini hari terjadilah penculikan dan pembunuhan atas enam jenderal TNI-AD (Nasution lolos, ajudannya yang diculik). Pasca gerakan tersebut maka pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 Soeharto mulai bertindak.

Kemunculan Soeharto yang seolah tiba-tiba dari akhir tragedi September 1965 serupa dengan kesukaannya bermain sepakbola di masa lampau. R.E. Elson menulis mengenai Soeharto:

> Di masa remaja Soeharto berteman dengan Kamin dan Warikin dan mereka kerap bermain sepakbola. Warikin menceritakan bahwa posisi favorit Soeharto dalam saat bermain sepakbola adalah sebagai pemain belakang. Kendati demikian, demikian kenang Warikin, Soeharto sering mencetak gol ke gawang lawan. Warikin juga mengenang saat-saat Soeharto tengah bermain sepak bola bahwa "larinya cepat, ototnya keras seperti *penjalin* (rotan), badannya ulet. Dia berani menyerobot bola, mainnya keras."[473]

[472] Helen-Louise Hunter, Sukarno …, *op. cit.,* p. 1. Dalam pertemuan, menurut Sudono, ia mendengar para peserta mendiskusikan apa yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan, tetapi ternyata justru terjadi di malam itu, atas tujuh jenderal yang menjadi sasaran.
[473] R. E. Elson, *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Cetakan 2. Penerjemah: Satrio Wahono dan Harimoerti Bagoesoka. Jakara: Pustaka Minda Utama, 2005. h. 36.

www.setabasri.org

Kenangan Warikin tersebut kurang lebih menggambarkan Soeharto yang tiba-tiba muncul sejak pagi hari 1 Oktober 1965, mereproduksi kekuasaan, banyak mengambil inisiatif, menyingkirkan para saingan, dan menjadi individu dominan dalam politik Indonesia. Bahkan dalam sebuah dokumen analisis pasca gagalnya G30S/PKI yang ditulis tahun 1966, Mustafa Sjarief Supardjo seorang perwira intelektual dalam G30S/PKI, masih saja menganggap Soeharto sebagai perwira minor.[474] Namun, seperti pernah diteliti Robertus Anugerah Purwoko Putro dalam disertasinya, bahwa Soeharto terbiasa menjadi *leader* yang memastikan dirinya dikelilingi suatu tim kecil tetapi kompeten untuk memastikan ketepatan langkah yang ia pilih.[475]

Berdasarkan aneka informasi yang dipelajari Soeharto saat belajar di SSKAD, hubungannya dengan Suwarto, serta kompetensi intelijen Yoga Sugama, maka besar kemungkinan Soeharto telah memiliki *blueprint* manuver taktis sebagai reaksi balik atas G30S/PKI.[476] Soeharto bukan perencana G30S/PKI tetapi ia pun tidak sama sekali buta mengenai peta politik Indonesia saat itu. Namun, bagi karakter Soeharto yang taktis, dingin, dan konservatif, aneka modalitas tersebut mencukupinya untuk bertindak taktis sejak 1 Oktober 1965. Struktur limbik pada otak Soeharto yang terbiasa menjadi komandan tempur sejak masa

www.setabasri.org

[474] Lihat sub bab "G-30-S dan Suharto" dalam John Roosa, Dalih …, *op. cit.,* h. 157-164.
[475] Robertus Anugerah Purwoko Putro, The Professionalisation of the Indonesian Military. *Doctoral Dissertation*. University of New South Wales. 2012. p. 58-59.
[476] TNI-AD anti komunis, dibantu AS telah mempersiapkan *contingency plan* yaitu rencana masa depan Indonesia pasca Sukarno. Rencana tersebut diantaranya diformulasikan dalam SSKAD/Seskoad.

revolusi fisik, tampak lebih dominan ketimbang yang ada para perwira lain saat itu, khususnya Nasution.

Tidak dipungkiri terdapat sejumlah pendapat yang menyatakan keterlibatan Soeharto dalam perencanaan G30S/PKI yang sebagiannya mendasarkan diri pada hubungan dekat Soeharto baik dengan para aktor G30S/PKI maupun CIA.[477] Namun, terdapat pula fakta bahwa Soeharto pun sempat masuk ke dalam daftar target penculikan seperti dilaporkan S. Parman pada Yani tanggal 14 September 1965.[478] Rencana aksi PKI tentu telah menyebar di kalangan TNI-AD anti komunis tetapi mereka tidak tahu perincian persisnya kapan itu akan dilaksanakan. Salah satu argumentasi menarik perihal tidak terlibatnya Soeharto dalam peristiwa penculikan dan kesiapan dirinya untuk memukul balik G30S/PKI disampaikan oleh John Roosa sebagai berikut:

> *Barangkali Suharto sudah tahu sebelumnya* bahwa Latief dan Untung merencanakan suatu aksi, *tapi sukar dipercaya bahwa ia ikut campur dalam merancang G-30-S, apalagi mendalanginya*. Ambruknya G-30-S bisa dijelaskan tanpa mengacu ke hipotesis bahwa Suharto pribadi, atau perwira AD lainnya, sengaja mengorganisasinya untuk gagal. Tanggapan Suharto yang cepat dan efisien terhadap G-30-S merupakan buah dari persiapan jenderal-jenderal AD menghadapi peristiwa yang sudah diperkirakan

www.setabasri.org

[477] Misalnya Eros Jarot, et.al., *Siapa Sebenarnya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI.* Cetakan I. Tangerang: Mediakita, 2006) h. 5-11. W.F. Wertheim mencurigai Soeharto sebagai *dalang* karena ia tidak diculik sementara ia orang kedua Yani, Soeharto mengenal sejumlah sayap militer dan sipil G30S (Syam, Untung, Latief, Supardjo), hanya markas Kostrad tidak dijaga Bn 454 dan 530, Soeharto adalah perwira penting terhitung sejak 1 Oktober 1965, dan Syam memprovokasi PKI agar bertindak dengan sepengetahuan Soeharto; lihat W.F. Wertheim, Suharto and the Untung Coup – the Missing Link. 1970. *Journal of Contemporary Asia.* 1:2, pp. 50-57. Peter Dale Scott menyebut Gestapu sebagai bagian dari tiga langkah jenderal kanan (Soeharto, Basuki Rachmat, dan Sudirman) untuk melenyapkan loyalis Yani-Sukarno; lihat Peter Dale Scott, The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. 1985. *Pacific Affairs.* Vol. 58, No. 2 (Summer), pp. 239-264, p. 240-242.

[478] Selain perwira yang kemudian menjadi korban, dalam laporan Parman nama-nama Soeharto (perwira anti komunis), Sukendro (perwira intelijen Nasution), dan Mursyid (perwira loyalis Sukarno, tetapi anti komunis, sama dengan Yani) juga termasuk.

> sebagai kemungkinan serupa yang terjadi dan dari pengetahuan Suharto sebelumnya tentang G-30-S.[479]

Soeharto memiliki *bonding* seperti Yoga Sugama dan Ali Moertopo yang handal dalam masalah politik dan intelijen. Soeharto tentu lebih mempercayai keduanya ketimbang aneka informasi dari Kolonel Latief. Dengan demikian maka terdapat kemungkinan bahwa Soeharto telah memiliki informasi serupa, tetapi di masa-masa tersebut, aneka isu dan kontra-isu terus terjadi sehingga satu-satunya pembuktian terbaik adalah saat apa yang diisukan benar-benar terjadi.[480]

Dalam konteks sabotase Konfrontasi Malaysia, Soeharto adalah kolaborator Yani dengan mengerahkan Opsus-nya dalam proyek tersebut. Pertemuan Soeharto di Kalimantan dengan Supardjo adalah hal wajar mengingat posisinya sebagai Wakil Panglima Kolaga. Pertemanannya dengan Latief atau datangnya Soeharto ke pernikahan Untung juga hal wajar dalam pergaulan sesama perwira, terlebih Soeharto adalah komandan Untung (juga Beny Moerdani) saat memimpin Operasi

www.setabasri.org

[479] John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Penerjemah Hersri Setiawan. Jakarta: Institut Sejarah Indonesia & Hasta Mitra, 2008. h. 293. Cetak miring oleh penulis disertasi ini. Menurut Roosa, persiapan gerakan Aidit, Biro Khusus, dan perwira menengah tidak komprehensif, penuh ketidaksempurnaan, dan arogansi Syam yang otoriter dan merasa tahu segalanya. Kesimpulan ini diperoleh Roosa setelah mempelajari Dokumen Supardjo.

[480] Dalam tulisannya Ben Anderson menulis bahwa Soeharto secara sengaja membiarkan G30S terjadi, dengan tidak melaporkannya pada Nasution maupun Yani, dan setelah terjadi baru memukul balik Gerakan Untung. Lihat Benedict R. O'G. Anderson, Petrus Dadi Ratu. 2000. *Indonesia.* Vol. 70 (Oct.), pp. 1-7, p. 2-3. Anderson luput membeberkan bahwa telah dua kali isu penculikan disebarkan, pertama 14 September 1965 oleh S. Parman yang lalu melapor pada Yani lalu diteruskan pada Sukarno. Isu kedua telah disampaikan oleh Subeno (Brigjen, atase militer di Peking) pada 30 September 1965. Kedua isu tersebut kemudian disikapi secara biasa. Ada kemungkinan laporan Latief pun apabila disampaikan pada perwira selain Soeharto akan disikapi secara biasa pula, sama seperti tanggapan Soeharto. Apabila memang benar Soeharto sengaja membiarkan G30S/PKI terjadi dalam hubungan dominasi-submisi jelas menguntungkan posisi Soeharto sebab ia otomatis menjadi *alpha male* di tubuh TNI-AD jika benar Yani dan Nasution menjadi target penculikan. Dan jika benar Latief melapor pada Soeharto maka itu adalah laporan "penculikan" bukan "pembunuhan."

Trikora.[481] Kesalahan para perencana G30S adalah mencoret nama Soeharto dari daftar perwira yang hendak diculik versi 14 September 1965 seperti ditemukan S. Parman karena para perencana itu cenderung memandang minor dirinya.

Sehubungan dengan upaya dominasi PKI oleh Soeharto, maka sejak pagi hari pada tanggal 1 Oktober 1965, Yoga telah memastikan bahwa PKI berada di belakang penculikan. Sejumlah perwira Kostrad lain masih ragu, termasuk Ali Moertopo pun mendebat Yoga dalam kutipan dialog berikut:

> "Pak Yoga jangan tergesa-gesa. Nanti bisa keliru", begitu kata Ali Moertopo di halaman markas Kostrad Jl. Merdeka Timur. "Tidak. Ini mesti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya", jawabnya tegas. "*Waduh*, *kok* PKI. Kalau salah nanti bagaimana?" "Sudahlah. [jawab Yoga] Kita harus melakukan persiapan-persiapan".[482]

Analisa Yoga mungkin serupa saat dahulu ia memproyeksikan Soeharto sebagai Panglima Divisi Diponegoro.[483] Menurut Yoga sendiri, suatu kesimpulan cepat di dalam intelijen adalah penting oleh sebab informasi intelijen adalah untuk kepentingan komandan. Komandan Yoga saat itu adalah Soeharto. Setelah kehadiran Yoga, turut berdatangan pula ke Markas Kostrad yaitu Ali Moertopo

www.setabasri.org

---

[481] Soeharto yang gemar membangun klik dari orang-orang yang punya kompetensi kemungkinan hendak merekrut Untung sebagai anak buahnya di Kostrad. Untung adalah prajurit yang baik dan taat pada perintah, unsur inilah yang membuat Soeharto berniat merekrut Untung.

[482] B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori …, *op. cit.,* h. 148. R. E. Elson tidak menulis kesimpulan Yoga Sugama ini saat Soeharto mengambil tanggung jawab untuk melakukan *counter* atas gerakan Untung. Lihat R. E. Elson, Suharto …, *op. cit.,* h. 197-203. Soeharto juga tidak memuat kesimpulan Yoga di biografinya yang ditulis O. G. Roeder, *The Smiling Genera …, op. cit.,* Namun, pengakuan Yoga dibuat saat Soeharto masih berkuasa (1990) memberikan bobot tersendiri atas pengakuan ini.

[483] Yoga menganalisis bahwa Bambang Supeno, nominasi calon Pangdam Diponegoro sebelum Soeharto, masuk lingkaran Zulkifli Lubis. Lubis di kemudian hari ternyata benar terlibat dalam PRRI/Permesta. Yoga pula yang menginisiasi penolakan atas Supeno dan mengusung Soeharto sebagai Pangdam. Namun, penulis seperti John Roosa menyebut G30S adalah tanggung jawab Aidit, anggota Biro Khusus PKI, dan perwira pendukung (Untung, Suyono, Latief, dan Supardjo). PKI sebagai organisasi tidak seharusnya dinyatakan turut bertanggung jawab. Lihat John Roosa, Dalih …, *op. cit.*

dan asistennya Aloysius Sugiyanto (Kapten) guna melakukan persiapan senjata.[484] Setelah melakukan musyawarah internal maka kelompok Kostrad menyimpulkan bahwa PKI berada di belakang gerakan militer Untung dan Soeharto pun kemudian memimpin serangan balik dan mendominasi PKI tanpa ragu.

Tidak mungkin Soeharto menyerang PKI secara langsung karena hal itu sama saja dengan secara terbuka menyerang Sukarno. Pada saat-saat awal ini, Sukarno belum menjadi target dominasi Soeharto. Untuk "memutar jalan" guna menghindari konfrontasi dengan Sukarno maka dominasi Soeharto atas PKI dilakukan melalui empat cara.

Pertama, memanfaatkan aneka kelompok sipil untuk memberi penegasan kepada Sukarno bahwa PKI berada di belakang Gestapu dan setelah itu ia baru menyerang PKI secara langsung. Soeharto dan para *bonding*-nya memanfaatkan permusuhan faktual antara aneka kelompok sipil terhadap PKI khususnya, dan kaum komunis umumnya. Hal ini telah terjadi di sejumlah aktivitas sipil yang terafiliasi dengan Masyumi dan NU, elemen intelektual dalam PSI, maupun kelompok Katolik khususnya lingkaran Pater Beek.[485]

Kedua, melakukan serangan fisik dan penangkapan atas para pimpinan maupun anggota Gerakan 30 September dan PKI, termasuk ke dalamnya para pimpinan organisasi di bawah pengaruh PKI melalui koalisi "luas" sipil-militer

www.setabasri.org

[484] B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori …, *op. cit.,* h. 149. Turut hadir di pagi itu Kepala Staf Kostrad Achmad Wiranatakusuma (Brigjen) dan Satari (Brigjen).
[485] Koalisi militer Soeharto yang terdiri atas perwira anti komunis di unit-unit RPKAD, Divisi Siliwangi, maupun garnisun Jakarta, bersama ikatan kelompok Soeharto (terutama Ali Moertopo) bertindak sebagai kekuatan di latar belakang dan pelindung kelompok sipil pembaharu radikalnya.

dan bantuan AS.[486] Bantuan AS ini di antaranya berlangsung melalui medium Guy J. Pauker, dengan mana Peter Dale Scott menulis: ".. Pauker mendesak kontaknya di militer Indonesia untuk mengambil "tanggung jawab penuh" atas kepemimpinan bangsa mereka, "memenuhi misi," dan karenanya "untuk menyerang, menyapu bersih rumah mereka".[487] Ketiga, melakukan pembersihan Kabinet Dwikora Sukarno dari orang-orang yang punya hubungan dengan PKI sekaligus yang dipandang sebagai simpatisannya. Keempat, memproduksi sejumlah aturan konstitusional guna melegalisasi submisi yang nantinya harus PKI berikan kepada Soeharto.

Keempat cara dominasi Soeharto atas PKI akan dibahas satu per satu kendati semuanya berlangsung secara simultan. Pemanfaatan aneka kelompok sipil oleh Soeharto dan para *bonding*-nya penting agar isu PKI sebagai penggerak G30S/PKI dapat tersebar luas dan menjadi isu nasional. Karena masih enggan berhadapan langsung dengan Sukarno, maka serangan Soeharto atas PKI mengedepankan kelompok sipil.[488] Yoga menulis penggalangan sipil anti komunis lebih banyak diperankan oleh Ali Moertopo.[489]

www.setabasri.org

[486] Koalisi militer dalam mematahkan sayap militer G30S/PKI sama dengan yang melindungi kelompok sipil. Juga, kelompok sipil yang membantu pembersihan anggota PKI di sejumlah daerah terbangun dari para pembaru radikal.
[487] Peter Dale Scott, The U.S. and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. 1985. *Pacific Affairs.* Vol. 58, No. 2 (Summer), pp. 239-264, p. 247.
[488] Ang Cheng Guan, United States-Indonesia Relations: The 1965 Coup and After. 2003. *War & Society*. 21:1. pp. 119-136. p. 132.
[489] B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori …, *op. cit.,* h. 190.

a. Kelompok Sipil Anti Komunis

Di tingkat kalangan sipil, Ali Moertopo merespons gagasan pembentukan KAP-Gestapu yang diinisiasi kelompok Islam, dan membina Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)[490] yang karena militansinya akhirnya dibubarkan Sukarno tanggal 26 Februari 1966 melalui Keputusan No. 41/Kogam/1966.[491] Di tingkat masyarakat sipil anti komunis yang lebih luas, penggalangan kekuatan untuk mengeliminasi PKI jauh lebih mudah. Selama Demokrasi Terpimpin, agresivitas PKI telah menjadi "api dalam sekam" yang tinggal menunggu momentum sebelum menjadi eksplosi partisipasi politik.[492] Penghancuran PKI pun menjadi lebih mudah akibat koalisi Soeharto memperoleh dokumen rinci seputar pimpinan dan anggota PKI dari Robert J. Martens, pejabat politik kedubes AS di Jakarta.[493]

Pelibatan kaum sipil dalam aksi eliminasi PKI secara fisik sekurangnya berlangsung dalam dua lini. Pertama, di tingkat pusat koalisi militer Soeharto menjalin kerja sama dengan KAP-Gestapu dan KAMI dengan sasaran pembubaran PKI dan pengadilan atas para pimpinannya. Kedua, di tingkat daerah Soeharto banyak mempercayakan kepada para Pangdam dengan mana koalisi

www.setabasri.org

---

[490] KAMI berdiri 25 Oktober 1965, dua hari setelah Front Pancasila terbentuk. Jenderal yang berperan dalam pembentukan KAMI adalah Sjarief Thajeb, Menteri PTIP Kabinet Dwikora.
[491] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah Pak Harto: 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968. Cetakan 1. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, h. 47.
[492] Misalnya tanggal 6 Oktober 1965, sebanyak 105 orpol dan ormas di Kalimantan Selatan menuntut presiden membubarkan PKI dan ormas-ormas mereka. Hal yang menarik, ke-105 organisasi tersebut menemukan fakta bahwa sejak 29 September 1965 CDB PKI Kalsel pimpinan AM Hanafiah telah mengetahui rencana gerakan dan kontra-aksinya. Organisasi anti komunis berdiri di Kalsel bernama Komando Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusi (KAPAK). Lihat *Berita Yudha*, 6 Oktober 1965. Amar menemui pangdam Lambung Mangkurat, Amir Machmud (Brigjen) agar menerima penunjukannya sebagai anggota Dewan Revolusi. Namun, Amir Machmud menolak penunjukan tersebut. Lihat juga *Berita Yudha*, 8 Oktober 1965.
[493] Ang Cheng Guan, United States-Indonesia Relations …, *op.cit.*, p. 133.

militer-sipil bersifat agak longgar sehingga menyulitkan tentara dalam penertibannya.

Koalisi sipil militan dalam pembersihan PKI dan komunisme yang adalah Komite Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh (KAP-Gestapu) yang dikemudian hari berubah menjadi Front Pancasila.[494] Awal terbentuknya KAP-Gestapu adalah ketika pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965 sejumlah pimpinan organisasi Islam bertemu untuk menyepakati berdirinya *Moslem Action Command Against Communism* (Komando Aksi Islam anti Komunis).[495] Para inisiator awal tersebut adalah sejumlah elemen masyarakat yang terafiliasi dengan Masyumi dan menjalin kontak dengan Umar Wirahadikusumah (Pangdam Jaya) yang setuju untuk memberikan sejumlah senjata.[496]

Rally pertama mereka pada tanggal 4 Oktober hanya dihadiri ratusan orang. Pada tanggal itu mereka menuntut Sukarno segera melarang PKI berikut organisasi massanya, menutup koran-koran yang mendukung Gestapu, serta membersihkan kabinet dari para menteri dan simpatisan PKI.[497] Inisiasi awal

www.setabasri.org

---

[494] Harold Crouch, The Army and …, *op. cit.,* p. 141. Front Pancasila terbentuk 23 Oktober 1965 berisikan aneka partai politik dan ormas yang menentang G30S/PKI. Lihat Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit …, *op. cit.,* h. 120. Sebagai catatan, tokoh-tokoh Front Nasional sebelumnya juga adalah tokoh di KAP-Gestapu

[495] Donald Hindley, Alirans and the Fall of the Old Order. 1970. *Indonesia*. No. 9 (Apr.) pp. 23-56. p. 40. Saat pertemuan jumlahnya masih sedikit, terdiri atas aktivis HMI, PII, Gasbiindo, dan Muhammadiyah. Sejumlah organisasi ini terafiliasi dengan Masyumi. Satu-satunya elemen partai yang menunjukkan niat bergabung adalah Subchan Zaenuri Ershan dari NU. Saat itu Subchan berusia 33 tahun, pengusaha dengan banyak mitra tentara, lancar berbahasa Inggris, dan pernah menempuh kursus bisnis di Amerika Serikat.

[496] Namun, Umar lebih setuju dinamai KAP-Gestapu ketimbang Komando Aksi Islam anti Komunis yang bernuansa Islam, mungkin dengan alasan agar KAP-Gestapu lebih berkesan lintas kelompok. Hefner menulis bahwa KAP-Gestapu juga diisi oleh aneka tokoh seperti Mar'ie Muhammad dari HMI, Subchan Zaenuri Ershan dari NU, Harry Tjhan Silalahi dari Partai Katolik. Lihat Robert W. Hefner. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Cetakan I. Penerjemah Ahmad Baso. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan The Asia Foundation, 2001., h. 167-168.

[497] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.,* .p. 41.

KAP-Gestapu dari elemen Masyumi ini kemudian meluas, yang terlihat dari para pemberi tanda tangan tuntutan dengan tetap dominannya elemen Masyumi.[498] Sejumlah aksi KAP-Gestapu kemudian mendorong Partai NU secara terbuka menyatakan usulan pembekuan PKI dan organisasi massanya.[499] Aksi KAP-Gestapu pada tanggal 8 Oktober mengalami eskalasi dengan keterlibatan ribuan massa, mereka membakar kantor pusat PKI, merusak gedung Pemuda Rakyat di Jalan Tanah Abang III dan SOBSI di Jalan Kramat V.[500]

Pada tanggal 21 Oktober KAP-Gestapu mengeluarkan pernyataan yang memperkuat tuntutan pada tanggal 4 Oktober sebelumnya. Dalam tuntutan kali ini pernyataan ditandatangani oleh Subchan Zaenuri Ershan selaku Ketua dan Harry Chan Silalahi sebagai Sekretaris Jenderal.[501] Dalam aksi-aksi KAP-Gestapu ini, dua kelompok di luar Islam mulai mengkhawatirkan militansi politik kelompok Islam di masa mendatang.[502]

www.setabasri.org

[498] KAP-Gestapu mengklaim mewakili 25 organisasi, 23 organisasi bercorak santri dan merupakan elemen Masyumi. Hanya dua organisasi di luar itu, yaitu Front Katolik (berasal dari unsur Partai Katolik dan aktivis asuhan Pater Joop Beek) dan IPKI (partai sekuler dengan koneksi militer). Mungkin dari sini para kader Pater Joop Beek mulai melihat militansi kelompok Islam, terutama dari Masyumi. Lihat Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.,* .p. 41.

[499] Secara tidak resmi NU mulai mengarahkan massa mereka di Jawa Timur untuk melakukan pembersihan atas kelompok komunis.

[500] Dalam penyerbuan ke gedung SOBSI, massa menemukan 3 truk beras dan minyak Barco sebanyak 1 truk. *Berita Yudha*, 11 Oktober 1965.

[501] Seluruh partai politik selain PKI dan PNI-Ali ikut menandatangani. PKI sudah jelas alasannya. Sementara PNI terbelah antara PNI Ali dan PNI Osa. PNI Osa dianggap "kanan" oleh Sukarno lalu disingkirkan dari kepemimpinan. Tanggal 5 Oktober 1965 PNI Osa dideklarasikan. PNI Osa ikut berpartisipasi dalam KAP-Gestapu. Parkindo juga tidak ikut menandatangani karena Leimena masih menjadi Waperdam II Sukarno. Sejak awal Parkindo telah khawatir akan militansi kelompok Islam dalam KAP-Gestapu dan kemungkinan besar akan menanjak status politiknya di masa mendatang. Baru tanggal 23 Desember 1965, PNI-Ali secara terbuka mendukung pembubaran PKI. Lihat Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.,* .p. 41-42.

[502] Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, h. 602.

KAMI resmi terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1965, yang merupakan koalisi cair aneka organisasi kemahasiswaan dan individual.[503] Konsentrasi KAMI berada di Jakarta dan Bandung dengan sentralisasi kekuatan di tiga universitas yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Padjadjaran. Hampir serupa dengan KAP-Gestapu, maka di dalam KAMI pun dominasi mahasiswa Islam, baik dari kelompok tradisional (NU) maupun modernis (afiliasi Masyumi) jelas terlihat.[504] Di dalam KAMI unsur-unsur yang paling dekat hubungannya dengan Masyumi dan Partai Katolik bersikap frontal dalam tuntutan pembubaran PKI, sementara yang dekat dengan NU, PSI, dan kelompok Kristen cenderung bertindak lebih berhati-hati.[505]

Jejaring kekuasaan Soeharto dalam KAMI berlangsung melalui Ali Moertopo yang aktif memberikan informasi dan perlindungan kepada para aktivis dari pengejaran Cakrabirawa dengan cara menyembunyikan mereka di kantornya

www.setabasri.org

[503] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.,* . p. 42. Francois Raillon menyatakan inisiatif KAMI justru datang dari militer, yaitu Mayjen Sjarief Thayeb tanggal 25 Oktober 1965 mengundang tokoh mahasiswa anti komunis di rumahnya sebagai "instrumen sipil" untuk menekan baik PKI maupun selanjutnya, Sukarno. Lihat Francis Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Penerjemah Nasir Tamara. Jakarta: LP3ES, 1985. h. 13. Namun, sejak 5 Oktober 1965 sejumlah unsur di dalam KAMI seperti PMII dan GMNI telah mengadakan pertemuan dengan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) untuk memperkuat tekad mengikis habis Gerakan 30 September. Lihat Berita Yudha, 6 Oktober 1965.

[504] HMI adalah unsur paling dominan. Namun, di jajaran pimpinan relatif tersebar, yaitu terdiri atas HMI (dekat dengan Masyumi), PMII (NU), mahasiswa Katolik Roma (PMKRI), mahasiswa yang dekat dengan PSI, Mapanca (IPKI), dan Somal (federasi kelompok mahasiswa dari kampus-kampus lokal). Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.*, p. 42. Kelompok mahasiswa yang terafiliasi dengan PNI dan Parkindo mendukung agak setengah hati.

[505] Sejumlah tokoh KAMI seperti Fahmi Idris (HMI), Johnny Simanjuntak, David Napitupulu, Mar'ie Muhammad (HMI), Liem Bian Koen, Soegeng Sarjadi, Nono Anwar Makarim, Yozar Anwar, Cosmas Batubara (Katolik), Rahman Tolleng (PSI), Zamroni, Harjadi Darmawan, Jacob Tobing, Rohali Sani, Salam Sumangat kemudian masuk parlemen sebagai anggota DPR-GR. Lihat Francois Raillon, Politik …, *op. cit.* h. 60. Khusus untuk NU terbelah dua. Politisi tingkat pusat bersikap hati-hati sementara Kelompok Militan mereka bersikap lebih tegas dalam pembersihan PKI. Lihat Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama …, *op. cit.*, p. 39.

sendiri.[506] Bukan tidak mungkin terjadi kompetisi untuk "meraih hati" kelompok mahasiswa antara kubu loyalis Soeharto dengan rekan koalisinya dari faksi ketiga (radikal), terutama Sarwo Edhie.[507] Aneka protes di Jakarta yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat membawa sejumlah korban seperti Arief Rahman Hakim dari Universitas Indonesia, Zainal Zakse (wartawan Harian KAMI), dan Ikhwan Ridwan Rais (anggota KAPPI).[508]

Ketegangan yang sama juga berlangsung di daerah-daerah. Di Yogyakarta Gerwani bersaing keras dengan Aisiyah dalam sikap mereka terhadap G30S.[509] Di Yogyakarta juga terbentuk Generasi Muda Islam (Gemuis) yang didirikan secara bersama oleh elemen Muhammadiyah dan NU, dengan mana mereka ini bersifat militan anti komunis.[510] Setelah Kolonel Katamso dan Lekol Sugiyono diculik (kemudian diketahui terbunuh) maka pada tanggal 4 Oktober 1965 anggota Gemuis melakukan demonstrasi di Stasiun Tugu untuk menuntut agar Aidit dan anggota Dewan Revolusi dihukum gantung.

www.setabasri.org

[506] Markas Komando Tempur II Kostrad, Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Tempo, "Perintis Jalan Politik Soeharto" 20 Oktober 2013, h. 43.
[507] Peter Dale Scott, The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. 1985. *Pacific Affairs*. Vol. 58, No. 2 (Summer), pp. 239-264. p. 249-250.
[508] Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990., h. 603.
[509] Mark Winward, Capture from Below: Civil-Military Relations during Indonesia's Anticommunist Violence, 1965-1966. 2018. *Indonesia*. Number 106, October, pp. 111-136. p.124. Mereka yang kerap "disembunyikan" itu adalah Sofyan Wanandi (Liem Bian Koen). Para anggota HMI Yogyakarta mengkhawatirkan demonstrasi reguler PKI di Pasar Malioboro. Yogyakarta dilanda demonstrasi dan kontra demonstrasi, terlebih antara HMI versus CGMI. Pihak mahasiswa Islam mensinyalir PKI dan pendukungnya berupaya mendominasi komunitas Muslim, terlebih di level pusat CGMI mendorong pembubaran HMI. Bagi kalangan Islam di daerah, apabila PKI berkuasa di Indonesia maka mereka akan memarginalisasi dan mengeliminasi Islam dari kehidupan publik Indonesia.
[510] *ibid.,* p. 125. Mereka menerima rumor bahwa PKI menerbitkan selebaran berisi daftar pemimpin organisasi Islam yang harus dibunuh oleh Pemuda Rakyat. Banyak aktivis Islam berlindung di aneka masjid sebagai benteng pertahanan.

Dari Stasiun Tugu aktivis Gemuis kemudian mendatangi kantor SOBSI dan melakukan aksi perusakan.[511] Elemen garis keras dalam Gemuis bahkan sempat mendirikan Komando Siaga Islam (Kogalam) yaitu sebuah milisi yang dibangun untuk mempertahankan diri dari serangan PKI, terutama serangan mereka atas properti warga dari upaya pengambilalihan.[512] Kecenderungan militan dan meluasnya koalisi anti komunis dapat dikaji menurut konteks politik – dan hingga tingkat tertentu juga ekonomi – sehingga dapat dirumuskan ke dalam dua daya dorong.

Pertama, Demokrasi Terpimpin telah memarginalisasi pengaruh partai-partai Islam utama dan malah membesarkan pengaruh PKI sehingga masa pasca G30S/PKI dapat diibaratkan pelampiasan rasa terkekang mereka selama ini. Kedua, bahwa sejak tahun 1963 PKI semakin agresif menyerobot lahan orang-orang non PKI melalui *aksi sepihak* dan rekrutmen anggota PKI yang semakin ekstensif.[513]

Kelompok sipil lain yang berperan sebagai kelompok anti komunis yang gigih dalam pembersihan PKI adalah NU, atau paling tidak sebagian dari unsur-unsurnya. Martin van Bruinessen menulis "Kesenjangan budaya dan politik terdalam dalam masyarakat Indonesia, dan yang paling banyak menimbulkan

www.setabasri.org

[511] Setelah ini, hingga kedatangan RPKAD, Gemuis menghentikan sementara aksinya.
[512] Deskripsi atas Gemuis ini digunakan untuk memberi gambaran bahwa kelompok-kelompok sipil secara luas terlibat dalam aksi pembersihan komunisme. Bangkitnya kekuatan Islam di level massa ini kemudian menjadi dasar Soeharto (juga kelompok Katolik) untuk tidak membiarkan Islam muncul sebagai kekuatan politik dominan dalam orde yang hendak ia bangun.
[513] Mark Mark Winward, Capture from …, *op. cit.,* p. 122. Penjelasan untuk yang pertama, marginalisasi partai politik membuat NU kendati besar hanya punya jabatan di kementerian agama, sementara Masyumi (juga kendati besar) malah dihabisi sama sekali jabatannya. Penjelasan kedua, aksi sepihak banyak bersengketa dengan para pemilik tanah baik dari NU, Masyumi, maupun PNI.

emosi dan ketidakpercayaan, adalah antara Islam dan Komunisme."[514] Massa PKI banyak terdapat di wilayah pedesaan (rural) demikian pula massa NU, sehingga begitu terjadi upaya pembersihan PKI oleh Soeharto di pusat, sambutan dari *grass root* terutama di wilayah pedesaan tampak begitu kuat.[515]

Perkembangan pesat PKI selama era 1960-an memperdalam pembelahan di dalam kepemimpinan NU, dan sebagai hasilnya muncul dua kelompok besar yaitu Kelompok Akomodasionis dan Kelompok Militan.[516] Kelompok Akomodasionis memiliki kebijakan pragmatis terhadap Demokrasi Terpimpin dan eksistensi PKI. Kelompok Militan sebaliknya merupakan kelompok anti komunis yang tegas dan gigih menolak PKI.[517]

Kelompok Militan ini sejak tahun 1960an telah mempersiapkan diri untuk melakukan konfrontasi dengan kaum komunis dengan cara memobilisasi aneka organisasi massa yang terafiliasi NU seperti Ansor, Serikat Buruh Muslim Indonesia (Saburmusi), Lesbumi, Muslimat NU, Pertanu, dan PMII. Ormas-ormas tersebut dimobilisasi untuk menghadapi ormas afiliasi PKI seperti Lekra,

www.setabasri.org

[514] Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance. 2010. *Indonesia.* No. 89 (April) pp. 37-60., p. 39.
[515] Bahkan sejak berdirinya tahun 1926 para pimpinan NU telah memperlihatkan sikap antipati terhadap kaum komunis. Bagi para pimpinan NU kaum komunis mempraktekkan doktrin ateisme dan penyembahan atas kesejahteraan dan kepemilikan kolektif. Pada periode 1945 hingga 1949 para pimpinan NU bahkan mulai melihat kaum komunis tidak hanya secara politik melainkan secara fisik yaitu sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi kaum Muslim tradisionalis. Lihat *ibid.*, p. 39.
[516] *ibid.*, p. 41.
[517] Kelompok Akomodasionis diwakili oleh Wahab Chasbullah (*rais am* NU), Idham Chalid (ketua umum), Saifuddin Zuhri (anggota pimpinan pusat), dan Masykur. Sementara itu Kelompok Militan terdiri atas para mantan pejabat TNI-AD atau telah menjalin kerja sama erat dengan para pejabat militer anti PKI, dan termasuk ke dalamnya Yusuf Hasyim (mantan prajurit infanteri dan ketua Ansor), Bisri Syamsuri (deputi *rais am*), Hamid Baidowi (pensiunan perwira intelijen militer dan seorang pengusaha), Munasir Ali (mantan mayor TNI-AD dan sekjen Legiun Veteran), Chalid Mawardi (jurnalis dan sekjen Ansor), dan Subchan Zaenuri Ershan (deputi ketua NU dan pengusaha). Lihat *ibid*.

Gerwani, CGMNI, SOBSI, dan BTI. NU juga telah membangun jaringan anti PKI di tingkat lokal, terutama di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang banyak menggunakan kekuatan massa dari ormas Ansor dan Ikatan Bekas Pejuang Islam (Ikapemi), sebuah organisasi kaum veteran NU.[518]

Di dalam tubuh ormas NU maka Kelompok Militan yang paling gencar dalam menghadapi PKI adalah Barisan Ansor Serba Guna (Banser).[519] Banser didirikan tahun 1962 dengan tugas utama memberikan perlindungan fisik bagi kegiatan partai NU dan para pendukungnya, dan sebab itu menjadi elemen utama dalam konteks persiapan menghadapi serangan PKI. Tokoh yang berada di balik berdirinya Banser adalah Yusuf Hasyim.[520]

Seperti halnya kelompok politik lain, maka NU pun selama bulan Agustus dan September 1965 telah mewaspadai akan terjadinya suatu peristiwa semacam kup, dan sama seperti para perwira di Seskoad, mereka pun menerapkan semacam *contigency plan.* Segera setelah kabar mengenai G30S tersebar, para pimpinan dan aktivis NU berkumpul di dua tempat. Tempat pertama adalah rumah Wahid Hasyim (putra pendiri NU) di kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Tempat kedua adalah rumah kediaman Subchan Zaenuri Ershan di Jalan Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat.[521] Di Matraman inilah banyak berkumpul para pimpinan dan aktivis NU, termasuk Kelompok Militan, dan menjadi pusat respons NU terutama selama

www.setabasri.org

[518] Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama …, *op. cit.*, p. 41.
[519] *ibid.*, p. 42.
[520] Awalnya keanggotaan Banser hanya berlaku bagi anggota lama Ansor atau *santri* terpercaya dari benteng-benteng NU di sejumlah pesantren. Anggota Banser mengikuti pelatihan fisik termasuk seni beladiri tradisional seperti pencak silat. Pelatihan fisik di Banser berlangsung keras melibatkan luka berdarah dan patah tulang. Para anggota Banser juga masih mendengungkan semangat perjuangan saat Revolusi Fisik. Lihat *ibid*.
[521] *ibid.*, p. 42-3.

awal Oktober 1965. Namun, rumah Subchan Zaenuri Ershan juga kerap dikunjungi oleh Kelompok Militan NU terutama yang berasal dari kaum muda.

Sejak tanggal 1 Oktober 1965 aktivis NU seperti Subchan Zaenuri Ershan aktif menghubungi para aliansi Soeharto seperti Umar Wirahadikusumah (Pangdam Jaya) dan Sutjipto (Kepala Seksi Politik Koti).[522] Salah satu anggota Kelompok Militan NU lainnya yaitu Munasir pada tanggal 3 Oktober 1965 bertemu dengan Jenderal Nasution dan memperoleh persetujuan jenderal tersebut untuk melancarkan aksi kekuatan fisik melawan PKI.[523]

Alasan utama para perwira TNI-AD mempercayai NU guna melakukan pembersihan atas PKI adalah asumsi kecilnya kemungkinan NU disusupi oleh para infiltran komunis ketimbang pasukan organis (resmi) militer. Kelompok Militan yang mendominasi di "markas" Matraman kemudian memutuskan telah cukup bukti partisipasi PKI di dalam kudeta dan kini mereka siap melakukan serangan balasan.[524] Salah satu respons Kelompok Militan NU ini adalah membentuk Badan Koordinasi Keamanan Jamiah Nahdlatul Ulama (BKKJNU) pada tanggal 3 Oktober 1965 dengan Munasir sebagai pimpinannya. Tugas utama BKKJNU adalah melancarkan kampanye anti PKI.[525]

Kendati BKKJNU didirikan atas nama Pengurus Besar NU (PBNU) tetapi inisiatifnya murni berasal dari Kelompok Militan tanpa melalui konsultasi terlebih

www.setabasri.org

[522] Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama …, *op. cit.*, p. 43. Oleh Umar Wirahadikusumah, Subchan dimintai bantuan untuk turut melakukan pembersihan atas PKI dan bahkan memberikan senjata genggam kepadanya untuk melindungi diri dari serangan PKI. Para pimpinan NU lainnya juga menerima senjata dan uang dari aneka perwira militer untuk memfasilitasi mereka dalam memobilisasi para anggota NU.
[523] *ibid.,* p. 44.
[524] *ibid.*
[525] *ibid.*, p. 45.

dahulu dengan pimpinan NU saat itu, baik dengan Wahab Chasbullah maupun Idham Chalid.[526] Kelompok Militan tetap berkeras mendirikan BKKJNU karena mendapat dukungan kuat dari Yusuf Hasyim.[527] Banyak pernyataan sikap seputar G30S dari Kelompok Militan NU yang dikeluarkan jarang yang memuat tanda tangan dari Idham Chalid selaku Ketua Umum PBNU saat itu.

Pada tanggal 4 Oktober 1965 Kelompok Militan NU mengambil langkah berani dengan secara resmi mengumumkan keterkaitan antara PKI dengan kudeta yang dilakukan oleh G30S. Pada malam tanggal 5 Oktober 1965, Subchan Zaenuri Ershan memimpin delegasi NU menuju pusat media TNI-AD dan meminta agar pernyataan mereka disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Permintaan Subchan memperoleh persetujuan langsung dari Soeharto untuk disiarkan secara nasional.[528] Pernyataan terbuka dari Subchan dan Kelompok Militan NU menjadi pernyataan resmi pertama di tingkat nasional yang menyatakan keterlibatan PKI dalam G30S.

Setelah pernyataan terbuka Subchan melalui RRI, massa NU di seluruh wilayah seolah mendapat keyakinan posisi mereka terhadap kaum komunis. Pernyataan ini kemudian disusul aneka instruksi tertulis kepada cabang-cabang NU di daerah seputar apa yang harus mereka lakukan terkait dengan kaum

www.setabasri.org

[526] Pada saat G30S terjadi Idham Chalid tengah berada di tempat persembunyian dan selama satu minggu keberadaannya hampir tidak diketahui oleh Kelompok Militan Matraman. Wahab Chasbullah saat BKKJNU didirikan tengah berada di Jombang dan sulit untuk dihubungi. Lihat Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama …, *op. cit.*, p. 45.
[527] *ibid*.
[528] Tanda tangan Idham Chalid di masa-masa ini banyak dipalsukan karena ketidakpastian di mana lokasi dirinya berada. Lihat *ibid*.

Komunis.[529] Apa yang disampaikan tentu saja bukan merupakan hasil rekayasa militer melainkan merupakan *contigency plan* dari Kelompok Militan NU sendiri dengan Yusuf Hasyim sebagai motornya.[530]

Dalam sebuah instruksi tertanggal 9 Oktober 1965 PBNU mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

> *The reckless adventure* [petualangan] *of the counter-revolutionary "30 September Movement," which was masterminded by the communists ... reminds us of the reckless adventure which they undertook on 18 September 1948 in Madiun, and once again proves the brutality* [kekedjaman] *and barbaric nature* [kebiadaban] *of atheists whenever they carry out their terror.*[531]
>
> Petualangan nekat [petualangan] kontra-revolusioner "Gerakan 30 September" yang didalangi oleh komunis ... mengingatkan kita pada petualangan nekat yang mereka lakukan pada 18 September 1948 di Madiun, dan sekali lagi membuktikan kebrutalannya [kekedjaman] dan sifat barbar [kebiadaban] ateis setiap kali mereka melakukan teror.

Kekerasan skala besar yang melibatkan anggota NU berlangsung di pertengahan Oktober 1965. Dalam sebuah pertemuan di Jawa Timur salah seorang pimpinan Ansor, berdasarkan hasil kesepakatan tanggal 10 Oktober 1965, berhasil memperoleh izin dari TNI-AD untuk melakukan *rally* massa pada tanggal 13 Oktober 1965 melintasi provinsi.[532] Dalam *rally* tersebut terjadi perusakan atas

www.setabasri.org

[529] Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama …, *op. cit.*, p. 46. Instruksi-instruksi seperti “menumpas”, “membersihkan”, “menghabiskan”, “mengganyang”, dan “mengikis habis” kaum Komunis tertera di dalam aneka instruksi tertulis yang disebarkan.
[530] *ibid.*, p. 46. Juga disebutkan mereka yang tewas di dalam memenuhi instruksi dari pusat dianggap “gugur dalam pertempuran” dan sebab itu menjadi “syahid.”
[531] *ibid.,* p. 47.
[532] *ibid.*, p. 48.

aneka bangunan milik PKI serta pembunuhan atas para pendukungnya seperti terjadi di Kediri.[533]

Melihat spiral kekerasan yang semakin tidak terkendali maka di akhir bulan Desember 1965 TNI-AD mempertimbangkan untuk menghentikan kekerasan. Para komandan militer di Jawa Tengah dan Jawa Timur memperingatkan para pimpinan organisasi Islam bahwa pertumpahan darah kemudian tidak lagi akan ditoleransi. Mereka akan mengancam para pelakunya dengan tuduhan pembunuhan atau ikut serta berpartisipasi dalam pasukan pembunuh.[534]

PBNU juga berupaya mengurangi tindakan-tindakan fisik anti Komunis dengan mana mereka pada awal Januari 1966 menginstruksikan aneka cabang mereka untuk membantu pejabat pemerintah dalam upaya menciptakan ketenangan dan ketertiban komunitas sambil mencari upaya penyelesaian politik. Namun, muncul resistensi dari sebagian kalangan NU bahwa upaya penghentian ini merupakan upaya PKI agar lawannya dikategorikan bertindak ilegal dan kriminal.[535]

Dalam posisinya sebagai partai, maka NU di dalam sebuah pernyataan pada tanggal 5 Oktober 1965 "memohon" agar presiden (Sukarno) segera membubarkan PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, SOBSI, mencabut izin media

www.setabasri.org

---

[533] Greg Fealy and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama …, *op. cit.*, p. 48. Kekerasan serupa juga terjadi di Banyuwangi tanggal 18 Oktober 1965 dengan mana digali makam massal bagi 35 pendukung PKI yang ditemukan. Beberapa ribu anggota PKI (dan mereka yang dicurigai sebagai simpatisan) kehilangan nyawanya dalam beberapa hari kemudian. Di akhir bulan Oktober 1965 aneka kelompok pemuda termasuk banyak anggota Ansor melakukan pembunuhan massal secara sistematis atas kaum komunis dan para simpatisannya. Di sela-sela *rally* sejumlah anggota unit Banser lokal mendekat kantor PKI dan membunuh 11 orang anggota partai yang coba mempertahankan kantor tersebut

[534] Hal ini disusul pengumuman TNI-AD pada awal Januari 1966 bahwa mereka yang meneruskan tindak pembantaian akan ditembak langsung di tempat. Lihat *ibid.*, p. 50.

[535] *ibid.*, p. 50.

publikasi yang terhubung G30S, dan menyerukan umat Islam untuk mendukung ABRI.[536] NU menganggap kampanye anti komunis akan mampu menghambat atau mampu menghentikan *landreform*.[537] Tanpa adanya PKI selaku pendukung utama, maka reformasi agraria diharapkan akan kehilangan daya dorong.[538]

b. Physical Force

Cara kedua Soeharto dalam mendominasi PKI adalah melalui *physical force.* Seperti yang kerap terjadi dalam dunia primata besar, pertarungan merebut kekuasaan dapat berjalan antara *alpha male status quo* melawan penantang (*contender*) yang setiapnya memiliki aliansi. Pertarungan yang terjadi dapat melibatkan *physical force* dengan mana *contender* yang lebih kuat ternyata melakukan pembasmian total atas baik *alpha male status quo ante* juga para aliansinya. Serangan fisik atas PKI dilakukan Soeharto atas struktur piramida kelompok komunis seperti diutarakan Mohammad Hatta yang menganalisis bahwa G30S sebagai berada di bawah bayang PKI. Bagi Hatta apabila "Peristiwa Gestapu tanggal 1 Oktober itu berhasil maka pembunuhan-pembunuhan lain akan menyusul."[539] Hatta memiliki pengalaman berkaitan dengan kup PKI yaitu saat

www.setabasri.org

---

[536] *Berita Yudha*, 6 Oktober 1965. Pernyataan 5 Oktober 1965 NU ditandatangani oleh PB Partai NU, PP GP Anshor, PP Muslimat NU, PP PMII, PP Serikat Buruh Muslimin Indonesia, PP Pertanian Nahdlatul Ulama, PP Fatayat NU, PP Serikat Nelayan Muslimin Indonesia, dan PP Lesbumi.

[537] W. F. Wertheim, Indonesia Before and after the Untung Coup. 1966. *Pacific Affairs*. Vol. 39, No. ½ (Spring-Summer) pp. 115-127. p. 124. Pada Desember 1965, menteri hubungan pertanahan menyatakan "pelaksanaan *landreform* terhambat akibat Gerakan kontra revolusi 30 September".

[538] *ibid.*, p.124. Ini merupakan kampanye agresif-populis PKI karena jangankan 200 hektar, karena menurut PKI sendiri orang yang memiliki 5 hektar lahan saja sudah disebut "tuan tanah kaya. Apabila reformasi agraria dapat terwujud maka diasumsikan sekitar 32.156.428 hektar lahan yang sebagiannya dimiliki para kiai dan tuan tanah NU (selain tentu saja tuan tanah PNI) akan didistribusikan kepada sekitar 128.534 petani di mana masing-masing petani akan memperoleh lebih dari 200 hektar lahan garapan.

[539] Deliar Noer, Mohammad Hatta …, *op. cit.,* h. 605. Dalam sebuah suratnya kepada Soeharto pada tanggal 12 Oktober 1965 Hatta berkata, "Saya puji tindakan Saudara yang tegas untuk menggulung gerakan dajal itu sampai sehabis-habisnya."

terjadi *Madiun Affair* 1948 di mana saat itu ia tengah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia.[540]

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa Hatta juga memprediksi apabila G30S berhasil maka berupa aneka pembunuhan serupa efek domino lainnya akan terjadi seperti di banyak negara komunis.[541] Secara *apriori* Hatta menganalisis:

> Akan dibunuh di Jakarta para pemimpin agama dan politik serta banyak menteri. Kemudian menyusul lanjutan pembunuhan massa di seluruh Indonesia. Ribuan lubang di seluruh Indonesia telah digali orang-orang PKI. Jakarta akan merupakan pertanda. Bila kup [1 Oktober] itu berhasil, yang lain-lain akan menyusul dalam seri penggorokan berdarah manusia.[542]

Apa yang Hatta sampaikan bukan sekadar kekhawatiran *apriori* semata karena sungguh-sungguh terjadi saat Revolusi Bolshevik terjadi Oktober 1917 di Rusia.[543] Pada tanggal 25 Oktober 1965 Soeharto menyatakan bahwa tidak ada tawar-menawar terhadap kekuatan fisik musuh (PKI). Selain itu Soeharto menegaskan harus ada pengucilan terhadap pimpinan dan anggota PKI baik secara fisik maupun mental.[544] Dalam konteks ini ia dan koalisinya melakukan serangan fisik atas pimpinan G30S maupun para anggota PKI termasuk organisasi yang ada

www.setabasri.org

[540] *ibid.,* h. 606. Hatta mengingatkan Soeharto bahwa Sukarno tentu akan menghalangi aneka langkah Soeharto atas PKI, tetapi Hatta menyatakan kepadanya untuk "jalan terus, rakyat yang banyak berdiri di belakang Saudara."
[541] Ini adalah keyakinan Hatta dalam analisisnya mengenai G30S. Lihat *ibid.,* h. 606-607.
[542] Deliar Noer, Mohammad Hatta …, *op. cit.,* h. 606-607.
[543] Apa yang diperkirakan oleh Hatta bukan sesuatu tanpa dasar. Misalnya akibat kudeta Bolshevik 1917 di Russia maka selain keluarga Tsar Nicholas II dibunuh, pembunuhan atas rakyat Rusia yang berprofesi pemuka agama, guru, dosen, ilmuwan, budayawan, dan sejenisnya terjadi. Operasi pembunuhan tersebut dilakukan oleh Cheka, pasukan paramiliter komunis yang dibentuk oleh politbiro partai komunis (Bolshevik). Lihat Juri Lina. *Under the Sign of Scorpio: The Rise and Fall of the Soviet Empire*. Stockholm: Referent Publishing, 2002.
[544] *Berita Yudha*, 4 November 1965.

di bawah pengaruhnya.[545] Roosa menulis bahwa Yoga Sugama dan Ali Moertopo mungkin saja punya informasi lebih pasti seputar anggota Biro Khusus PKI dan rencana mereka, sehingga mendorong cepatnya Soeharto melakukan serangan balik.[546]

Secara umum penghancuran PKI oleh Soeharto tertuju sekurangnya atas empat entitas yaitu kader PKI, para anggota organisasi yang terafiliasi dengan PKI, anggota keluarga dari para kader PKI ataupun anggota keluarga dari organisasi terafiliasi dengan PKI, dan terakhir rekan-rekan mereka, populasi desa-desa tertentu, serta kalangan Cina.[547] Organisasi yang terafiliasi dengan PKI telah secara resmi diumumkan oleh Soeharto pada tanggal 31 Mei 1966.[548]

Kekuatan militer Soeharto terdiri atas Kostrad yang membawahi Bn 454 Diponegoro, Bn 530 Brawijaya, Bn 328 Kujang Siliwangi, dan RPKAD. Bn 454 dan 530 dicurigai berada di pihak Untung[549] dan Soeharto berusaha meyakinkan diri bahwa Bn 328 Kujang dan RPKAD berada di pihaknya. Pertimbangan Soeharto atas kekuatan militernya sekurangnya ada lima. Pertama, komando pusat TNI-AD telah berada di tangan Soeharto sejak tanggal 15 Oktober 1965.[550]

www.setabasri.org

[545] Pendukung militer G30S adalah Mustafa Syarif Supardjo (Brigjen, Komandan Resimen Divisi Siliwangi, Komandan Tempur IV Kostrad di Borneo Barat), A. Latief (Kolonel, Komandan Brigade Infanteri I Garnisun Jakarta), Suyono (Mayor, Komandan Resimen Keamanan Halim Perdanakusumah). Lihat Leslie Palmier, The 30 September Movement in Indonesia. 1971. *Modern Asian Studies.* Vol. 5, No. 1, pp. 1-20. p. 2-4.
[546] John Roosa, Dalih …., *op. cit.,* h. 307.
[547] Jess Melvin. Mechanics of Mass Murder: A Case for Understanding the Indonesian Killing as Genocide. 2017. *Journal of Genocide Research.* 19:4, pp. 487-511, p. 502-503
[548] *ibid.*, p. 502.
[549] Daniel S. Lev, Indonesia 1965: The Year of the Coup. 1966. *Asian Survey.* Vol. 6, No. 2 (Feb.). pp. 103-110. p. 107
[550] The Editors, Data on the Current Military Elite, *Indonesia*. 1967. No. 3 (Apr.) pp. 205-216. p. 206. Tanggal 15 Agustus 1966 dibentuk Deputi Menteri/Panglima AD oleh Soeharto dengan Letjen Maraden Panggabean (perwira dekatnya) sebagai pemegang jabatan.

Kedua, Divisi Siliwangi yang berada di bawah Pangdam Ibrahim Adjie (Mayjen) yang kendati Sukarnois, tetapi juga menampakkan kecenderungan anti PKI yang cukup jelas.[551] Ketiga, Kostrad sendiri pada perkembangan kemudian ia serahkan komandonya kepada Kemal Idris yang dinilai memiliki kecenderungan anti komunis dan anti Sukarno yang tegas.[552] Keempat, RPKAD di bawah Sarwo Edhie Wibowo memiliki permusuhan pribadi dengan PKI karena Achmad Yani (Menpangad) adalah rekan akrab Sarwo dan turut menjadi korban gerakan mereka. Kelima, para perwira di sekeliling Nasution yang telah menjalani doktrinasi RAND-Berkeley di SSKAD/Seskoad.[553]

Untuk wilayah Jakarta pembersihan PKI relatif cepat sebab sekurangnya pada tanggal 16 Oktober 1965 Pendam V/Jaya mengumumkan bahwa sebanyak 1334 orang yang diyakini terkait G30S telah ditangkap.[554] Untuk mengatasi kekurangan perangkat dan logistik, maka pada akhir bulan Oktober 1965, Sukendro (Brigjen, menteri Koti) mendatangi Kedutaan Besar AS di Jakarta guna meminta bantuan peralatan medis, komunikasi taktis, beras, dan senjata ringan.[555]

www.setabasri.org

[551] The Editors, Data on the Current Military Elite, *Indonesia*. 1967. No. 3 (Apr.) pp. 205-216. p. 206. Kelak Adjie dimutasi lalu diganti Mayjen H.R. Dharsono per 1 Januari 196.
[552] Soeharto berkonsentrasi menggantikan Yani sebagai pejabat Menpangad.
[553] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.*, p. 46. Bn 530 mau dibujuk untuk berpaling dari G30S dan bergabung dengan Kostrad.
[554] *Berita Yudha*, 19 Oktober 1965. Namun, jumlah tersebut sangat kecil dibanding pernyataan Jaksa Agung Sugih Arto yang pada tanggal 22 Mei 1966 menyatakan bahwa dari 2 juta anggota PKI baru 100 ribu yang berhasil diamankan. Lihat *Antara*, 26 Mei 1966.
[555] Ang Cheng Guan. United States-Indonesia Relations: The 1965 Coup and After. 2003. *War & Society*. 21:1., pp. 119-136., p. 131. Permintaan Sukendro ternyata tidak langsung disetujui akibat pihak AS belum meyakini posisi Sukendro dalam konteks faksi Soeharto dan Nasution pasca G30S/PKI. Permintaan juga tersebut tidak lantas disetujui sebab pihak AS masih belum yakin rencana TNI-AD dan apakah Sukendro ini mewakili Nasution atau Soeharto.

Pada tanggal 1 November 1965 Deputi Kepala Misi AS bertemu dengan kontak Indonesia mereka.[556] Dari pertemuan tersebut pihak AS memperoleh penjelasan bahwa pasca G30S/PKI, Soeharto dan Nasution berhubungan secara erat ditambah informasi "mengejutkan" bahwa Soehartolah – bukan Nasution – yang banyak memberikan perintah dan berhadapan dengan Sukarno.[557] Hasil pertemuan menyepakati bahwa Indonesia di bawah Soeharto akan secara gradual mengubah kebijakan luar negeri anti Barat dan anti AS.[558] Pihak AS juga melihat kenyataan bahwa kendati Soeharto bersikap hati-hati dalam aksi pembersihan PKI ia ternyata tengah mengalami kesulitan di dalam mengendalikan aksi para komandan daerah dalam mengeliminasi PKI.[559]

Kembali terjadi perdebatan antar tiga pihak di tubuh pemerintah AS. Sebelum bantuan diberikan, *State Department* AS terlebih dahulu menuntut kejelasan sikap politik TNI-AD atas AS dan bagaimana persepsi mereka atas hubungan kedua negara. Pada lain pihak CIA berpendapat akan terlalu berisiko apabila memberi dukungan secara terbuka kepada TNI-AD Indonesia karena walau bagaimanapun mereka (TNI-AD anti komunis) bukan pemerintahan legal

www.setabasri.org

---

[556] 169. *Telegram from the Embassy in Indonesia to the Department of State*. Djakarta, November 4, 1965, 0845Z. Dari telegram tersebut dapat disimpulkan bahwa kontak Indonesia yang dimaksud adalah Sukendro, perwira yang dikenal sebagai "intelijen Nasution." Selain Sukendro, terdapat kontak lainnya dari Indonesia yaitu Suwito yang cenderung memusuhi Subandrio (kepala BPI). Telegram tersebut juga menyebut RPKAD telah melatih para pemuda Muslim dan menyuplai mereka dengan senjata dengan tujuan mendorong mereka agar terlibat konflik frontal dengan PKI. Telegram juga mengungkap bahwa Soeharto telah berbicara selama 3 jam dengan Sukarno untuk meyakinkan bahwa tindakan keras atas PKI adalah suatu ketegasan dan perlu dilakukan.

[557] Ang Cheng Guan, United States …, *op. cit.*, p. 132. Dari pertemuan tersebut juga diperoleh kesimpulan bahwa TNI-AD sedapat mungkin menghindari *clash* langsung dengan PKI dan mempersiapkan para pemuda Muslim untuk menghabisi PKI.

[558] *ibid.*

[559] *ibid.,* p. 132.

Indonesia.[560] Sementara itu Kedubes AS merekomendasikan untuk melakukan pemberian bantuan yang dimaksud Sukendro.[561] Dalam situasi ketidakpastian saat itu sesungguhnya kekuatan riil pasukan Untung pada 1 Oktober 1965 hanya seperti yang tampak pada **Tabel 6** *Personil Sipil Militer dalam Gerakan 30 September*.

Tabel 6 Personil Sipil Militer dalam Gerakan 30 September
Sumber: John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Penerjemah Hersri Setiawan. Jakarta: Institut Sejarah Indonesia & Hasta Mitra, 2008., h. 67.

Personil	Jumlah
Personil Militer	
Dua peleton Brigade 1, Kodam Jaya, Jakarta	60
Satu kompi Batalion 1, Cakrabirawa	60
Lima kompi Batalion 454, Diponegoro	500
Lima kompi Batalion 530, Brawijaya	500
Satu batalion AURI, Pasukan Pembela Pangkalan Halim (PPP)	1000
Satuan-satuan dan perseorangan dari kesatuan militer lain (polisi militer, para komando)	50
Jumlah personil militer	**2130**
Orang-orang Sipil	
Orang-orang sipil dari PKI dan ormas berafiliasi PKI	2000
Jumlah seluruh Personil	**4130**

Namun, dalam situasi ketidakjelasan saat itu, taksiran atas kekuatan lawan dapat saja berlipat ganda. Kekuatan G30S dengan 2130 personil sendiri cukup besar mengingat di dalam TNI-AD sendiri terjadi pembelahan antara perwira pro dan anti komunis, dan sebagian pasukan TNI-AD tengah berada di Sumatera dan Kalimantan dalam Konfrontasi Malaysia.[562]

www.setabasri.org

[560] Namun, CIA segera menambahkan, risiko justru makin besar apabila bantuan tidak diberikan posisi AD melemah saat melawan PKI. Dengan demikian, maka potensi hubungan baik Indonesia-AS justru menghilang sama sekali. Lihat *ibid.*
[561] *ibid.*, p. 132-133. Akhirnya pada tanggal 17 November 1965 Komite-303 AS menyetujui pemberian bantuan yang akan dilakukan secara anonim. Relatif bersamaan dengan langkah Sukendro, Adam Malik pun mengajukan bantuan kepada AS sebesar Rp. 50.000.000,- yang akan digunakan untuk mendanai aktivitas KAP-Gestapu. Mengenai bantuan AS kepada Malik, Marshall Green menyatakan bahwa itu untuk mengesankan ada keterlibatan sipil dalam peralihan kekuasan.
[562] Pasukan penculik para jenderal adalah gabungan antara tentara dan pemuda sipil PKI sejumlah 4130. Jumlah personil militer Untung adalah 2130.

Instalasi penting yang dikuasai gerakan Untung dan kawan-kawan yaitu RRI dengan cepat diambil-alih. Setelah itu RPKAD bergerak menuju Halim Perdanakusumah guna memberantas para pendukung militer G30S di sana. Soeharto menolak penunjukan Pranoto Reksosamudro oleh Sukarno sebagai *caretaker* Yani dan pada tanggal 3 Oktober 1965 malah balik menyatakan bahwa pejabat Menpangad adalah Sukarno sendiri.[563] Untuk selanjutnya Soeharto banyak memanfaatkan Sarwo sebelum kelak "melepasnya" guna melakukan pembersihan PKI maupun anasir kiri di tubuh PNI.[564]

Pimpinan inti PKI yaitu Aidit kemudian melarikan diri menuju Yogyakarta sekitar pukul 02.30 dini hari tanggal 2 Oktober menggunakan pesawat C-47 milik TNI-AU.[565] Turut serta bersama Aidit adalah Muljono orang ketiga dalam *Biro Chusus*.[566] Di Jawa Tengah Aidit memperoleh dukungan dari Sahirman (atau Suherman, Kolonel), seorang pendukung G30S yang bulan sebelumnya (Agustus

www.setabasri.org

[563] Kendati sebelumnya Sukarno menunjuk Pranoto sebagai *caretaker* Menpangad, pada 3 Oktober Soeharto menyatakan Menpangad dipegang langsung Sukarno. Esok harinya Sukarno menimpali pernyataan Soeharto bahwa untuk sementara ia menunjuk Pranoto sebagai *caretaker* Menpangad, sementara untuk operasi pemulihan keamanan dan ketertiban ia menunjuk Soeharto. Lihat *Berita Yudha*, 4 Oktober 1965. Akhirnya Sukarno pada 14 Oktober 1965 menyatakan akan mengangkat Soeharto sebagai Menpangad dan dilantik pada 15 Oktober 1965. Lihat *Berita Yudha*, 15 Oktober 1965.

[564] Maksud "melepas" di sini adalah memosisikan Sarwo tetap dengan jabatan terhormat, tetapi tidak mengendalikan pasukan tempur. Sarwo adalah rekan akrab Yani sehingga selain sikap anti komunisnya maka daya rusak RPKAD atas PKI mendapat dorongan besar dari rasa kehilangan Sarwo atas terbunuhnya Yani oleh G30S. Lihat Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit*., h. 49. Yani dan Sarwo adalah rekan akrab sejak mengikuti pelatihan Peta. Hubungan akrab ini terus berlanjut hingga 1965, bahkan Yani menunjuk Sarwo menjabat Komandan RPKAD kendati ada calon lain yang lebih baik. Benny Murdani mengajukan protes ini dan dimarahi oleh Yani. Lihat juga David Jenkins, Soeharto and the Japanese …, *op. cit.*, p. 67.

[565] Arthur J. Dommen, The Attemp Coup in Indonesia. 1966. *The China Quarterly.* No. 25 (Jan. – Mar.) pp. 144-170. p. 147. Ia berusaha mengobarkan perlawanan simpatisan PKI di Jawa Tengah, lalu disusul kudeta Letkol Usman atas posisi Brigjen Suryo Sumpeno panglima divisi Diponegoro.

[566] *Kompas*, 27 September 1967. Nama alias Muljono adalah Walujo. Kelak Muljono membangun Comite Daerah Besar (CDB) PKI ilegal di Jawa Tengah, termasuk mendirikan sejumlah Komite Proyek (Kompro) di Semarang. Dalam pelariannya Muljono sempat kembali memasuki Jakarta guna memperoleh dana sekitar 6 juta rupiah guna membiayai pembangunan ulang partai di wilayah Jawa Tengah dan setelah memperoleh dana termaksud ia pun segera kembali ke Semarang.

1965) baru saja pulang dari pelatihan di *Fort* Leavenworth dan Divisi G-3 pimpinan Mardjono (Kolonel). Di Yogyakarta mereka mendeklarasikan berdirinya Dewan Revolusi dengan Mulyono (Mayor) sebagai pejabat teritorial yang berarti mereka mendemisionerkan Suryosumpeno selaku Pangdam Diponegoro.[567] Dua batalyon dari Divisi Diponegoro ikut serta memperkuat Solo di bawah pimpinan wali kotanya yaitu Utomo Ramelan.[568]

Kesulitan di pihak Soeharto untuk mengidentifikasi para pimpinan dan anggota PKI sedikit teratasi karena adanya dokumen dari Robert J. Martens, pejabat politik Kedubes AS di Jakarta.[569] Ia kemudian menyerahkan dua jenis daftar kepada Departemen Dalam Negeri AS pada tanggal 17 Desember 1965 yaitu *Daftar A* dan *Daftar B*. *Daftar A* berisikan 67 nama pimpinan PKI yang ia peroleh berdasarkan informasi sepanjang Bulan Mei 1965.[570] *Daftar B* mendokumentasikan 18 pimpinan PKI yang seluruhnya (kecuali 2 orang) telah tertangkap atau terbunuh.[571]

Semangat pasukan pemberontak menyurut manakala pasukan G-4 Diponegoro pimpinan Kolonel Widodo tiba di Yogyakarta dengan mobil lapis baja, yang tanpa melepas tembakan, segera menginformasikan kepada pasukan

www.setabasri.org

---

[567] Arthur J. Dommen, The Attemp Coup …, *op. cit.,* p. 147.

[568] *ibid*. Utojo Ramelan adalah kader PKI. Aidit sempat terlihat berkeliling kota kemudian meninggalkan Surakarta melalui jalur ke Boyolali untuk akhirnya bergabung dengan Usman, Sahirman, dan Mardjono di lereng Merapi. Rumor disebarkan bahwa PKI di Jakarta telah berkuasa, diiringi aneka demonstrasi anggota PKI dengan yel-yel "*Crush Malaysia*", "*Crush India*", "*Crush U.S*.", "*Crush the Council of Generals*", "*Kill Nasution, Hireling of the CIA*."

[569] Ang Cheng Guan, United States …, *op. cit.,* p. 133. Tugas utama Martens di kedubes adalah melakukan kompilasi dan pembaruan status pejabat PKI di Indonesia.

[570] Mungkin selama prosesi peringatan ulang tahun PKI tanggal 1 Mei 1965.

[571] Martens melakukan dua kali pembaruan atas daftar B, yaitu di bulan Maret dan Agustus 1966. Martens juga membantah lewat *Washington Post* edisi 21 Mei 1990, bahwa ia menyerahkan daftar tersebut atas inisiatif sendiri, bukan atas izin atasannya. Ang Cheng Guan, United States …, *op. cit.,* p. 133.

pemberontak bahwa mereka telah mengalami kesalahan kepemimpinan.[572] Pada lain sisi merebak konflik massa yang dipicu oleh kalangan miskin Pemuda Rakyat yang dengan bersenjatakan katapel, tombak, dan panah melakukan penculikan dan pembunuhan atas massa anti PKI. Terjadilah aksi massa versus massa diikuti pembunuhan[573] yang rincinya telah banyak ditulis di sejumlah jurnal.[574]

Dapat dikatakan bahwa sumber daya militer bagi Soeharto cukup terbatas oleh sebab ia hanya bisa mempercayai pasukan yang ada di Kostrad dan pasukan ini pun tidak memiliki pasukan organik sendiri karena mengandalkan pasukan organik di divisi Siliwangi, Brawijaya, dan Diponegoro.[575] Saat RPKAD baru tiba di Yogyakarta pun hanya tersedia 2200 hingga 2500 pasukan yang terhitung anti komunis.[576]

Dalam menghadapi perlawanan bersenjata sisa-sisa PKI, Soeharto melancarkan tiga jenis operasi militer yaitu operasi tempur, teritorial, dan

www.setabasri.org

[572] Arthur J. Dommen, The Attemp Coup …, *op. cit.,*, p. 149.
[573] Narasi pembantaian dalam sejarah manusia sebagai tidak lepas dari dorongan naluriah bertahan hidup telah diungkap Johan MG van der Dennen dalam disertasinya berjudul The Origin of War mengenai perang primitif. Lihat Johan Matheus Gerardus van der Dennen, The Origin of War: the Evolution of a Male-Coalitional Reproductive Strategy, *Doctoral Dissertation*, University of Groningen, 1995.
[574] Mengenai pembantaian ini dapat dilihat dalam Jess Melvin. Mechanics of Mass Murder: A Case for Understanding the Indonesian Killings as Genocide. 2017. *Journal of Genocide Research.* 19:4., pp. 487-511. Geoffrey Robinson. "Down to the Very Roots": The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965-66. 2017. *Journal of Genocide Research.* 19:4, pp. 465-486. John Roosa. The State of Knowledge about an Open Secret: Indonesia's Mass Disappearances of 1965-66. 2016. *The Journal of Asian Studies.* Vol. 75, No. 2 (May), pp. 281-297.
[575] Kendati ia telah menjabat sementara sebagai pengganti Yani sebagai pejabat panglima AD, tetapi Soeharto belum yakin apakah pihak di luar Kostrad menerima kepemimpinannya sama seperti Yani.
[576] Mark Winward, Capture from … *op. cit.,* p. 121. Pasukan ini harus beroperasi di tengah padatnya penduduk Jawa Tengah yang saat itu mencapai 20 juta jiwa serta belum jelas sebesar apa militansi sebagian penduduknya untuk mendukung PKI. Sebab itu upaya Soeharto untuk mendominasi kelompok militer pendukung G30S di Jawa Tengah harus cepat, efektif, dan efisien. Itulah alasan terjadinya simbiosis mutualistis aliansi pihak militer dengan kelompok sipil anti komunis di wilayah Jawa dan Bali.

intelijen.[577] Secara keseluruhan sekurangnya terdapat 34 unit operasi militer dengan maksud mendominasi PKI secara fisik.[578] Komando G30S terdiri atas tiga perwira militer dan dua orang sipil yaitu Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief, Mayor Soejono, Syam Kamaruzzaman, dan Pono.[579] Data para pimpinan puncak PKI pada September 1965 tercantum pada **Tabel 7** *Struktur Organisasi Pimpinan PKI September 1965*.

Sayap militer langsung dari G30S dapat secara cepat dikuasai tetapi tidak elemen pimpinan partai dan perwira pendukung mereka di daerah. Aidit tertangkap kemudian ditembak mati di sebuah tempat rahasia di Jawa Tengah pada tanggal 22 November 1965.[580] Anggota politbiro PKI lainnya yaitu Muhammad Haris Lukman ditangkap di rumah seorang dokter Tionghoa pada

www.setabasri.org

[577] Operasi tempur untuk mengerjar dan menghancurkan gerakan bersenjata. Operasi teritorial ditujukan untuk menguasai dan membina wilaya. Operasi intelijen lebih tertuju pada aspek pengintaian, propaganda, dan penyidikan. Lihat Andi Widjajanto dan Artantri Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945 – 2004*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung & Pacivis, 2008., h. 82.

[578] Andi Widjajanto dan Artantri Wardhani, Hubungan …, *op. cit.,* h. 83-84. terutama Operasi PGRS-Paraku Tertib, Penegak, Sapu Bersih, dan Saber Kilat (di Kalimantan), Operasi Tegak, Merapi, Trisula, Kikis, Purwodadi, Mera-Merbabu Complex, Saptamarga, Kalong, dan Berantas Sisa (di Jawa), Penegak (di Maluku dan Irian Barat), Waspada dan Penegak (di Sumatera.

[579] Supardjo ditangkap 12 Januari 1967 bersama Anwar Sanusi, calon anggota Politbiro. Lihat Guy J. Pauker, Indonesia: the Year of Transition. 1967. *Asian Survey*. Vol. 7, No. 2, A Survey of Asia in 1966: Part II (Feb.), pp. 138-150, p. 146. Brigjen MS. Supardjo tidak banyak diikutsertakan dalam diskusi-diskusi persiapan gerakan dan baru datang 28 September 1965 dari Kalimantan.

[580] Yoseph Tugio Taher menulis, "Tanggal 2 Oktober 1965, setelah mendengar berita tentang "kup", Kolonel Yasir Hadibroto, waktu itu Komandan Infanteri IV Kostrad di Sumatera Utara, datang, langsung menghadap komandannya di Markas Besar Kostrad di Jakarta, Mayjen. Soeharto. Dia ditanyai oleh Soeharto: "Di mana kamu ketika pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948?" "Saya baru saja dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukan saya diperintahkan untuk menghadapi 3 batalyon komunis di Wonosobo," Yasir menjawab. "Orang yang berontak hari ini adalah keturunan dari PKI Madiun. Pergi, *beresken* mereka semua. D.N. Aidit di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana!" perintah Panglima Kostrad Mayjen. Soeharto. Di Jawa Tengah, D.N. Aidit, Ketua PKI, ditangkap, dibawa ke markas Batalion KOSTRAD di Boyolali dan dibunuh! Pukul 3.00 sore tanggal 24 November 1965, Kolonel Yasir diterima oleh Soeharto di Istana Yogyakarta. Dia melaporkan segala sesuatu berkenaan dengan penangkapan PKI dan cara membereskan Aidit. Setelah memberikan laporannya, Kolonel Yasir memberanikan diri untuk bertanya: "Waktu Bapak mengatakan 'bereska' tentang D.N. Aidit, apakah itu yang Bapak maksud?" Panglima KOSTRAD, Mayjen. Soeharto hanya *tersenyum.* Lihat Yoseph Tugio Taher. *Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia.* Cetakan 1. Bandung: Ultimus, 2010, h. 92-93.

tanggal 29 April 1966 dan akibat melakukan perlawanan, kemudian ditembak oleh prajurit dari Unit Kujang II/Siliwangi.[581]

Tabel 7 Struktur Organisasi Pimpinan PKI September 1965
Sumber: John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Penerjemah Hersri Setiawan. Jakarta: Institut Sejarah Indonesia & Hasta Mitra, 2008, h. 209[582]

Ketua Comite Central Dipa Nusantara Aidit
Dewan Harian Politbiro Dipa Nusantara Aidit, Muhammad Haris Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea **(*5 orang*)**
Politbiro Dipa Nusantara Aidit, Muhammad Haris Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, Sakirman, Njono bin Sastroredjo, Mohamad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang (***12 anggota penuh***) Peris Pardede, Anwar Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi (***4 calon anggota***) Iskandar Subekti (**panitera**)
Comite Central 85 anggota

Nyoto tewas melalui eksekusi diam-diam yang dilakukan pada akhir 1965 setelah dilakukan penangkapan atasnya di rumah Subandrio.[583] Sudisman ditangkap pada bulan Desember 1966 saat bersembunyi di rumah Tan Swie Ling kemudian diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada bulan Juli

www.setabasri.org

[581] *Angkatan Bersendjata*, 4 Mei 1965.
[582] Aidit, Lukman, dan Njoto ditangkap dan dieksekusi Desember 1965. Oloan Hutapea dieksekusi 1968 di Jawa Timur. Pada minggu-minggu menjelang G30S/PKI Njoto disingkirkan dari informasi Biro Khusus karena dinilai lebih Sukarnois ketimbang Komunis.
[583] Guy Pauker menyatakan Nyoto, Deputi II Ketua PKI di tangkap lalu dibunuh awal Desember 1965. Lukman, Deputi I Ketua PKI dibunuh Mei 1966. Sakirman, anggota Politbiru dibunuh Oktober 1966. Namun, Pauker keliru saat menyatakan Rewang tanpa keterangan, pada Juli 1968. Rewang tidak dibunuh melainkan ditangkap pada bulan tersebut. Nyono dan Sudisman sempat diadili Mahmilub lalu dihukum mati yang pelaksanaannya Juli 1968. Anwar Sanusi juga tertangkap, tetapi Pauker tidak menyebut bulan dan tahunnya. Jusuf Adjitorop melarikan diri sebab sejak 1964 ia berada di Peking. Pauker menyimpulkan hanya 1 dari 10 anggota Politbiro yang berhasil lolos. Lihat Guy J. Pauker, The Rise and Fall of The Communist Party of Indonesia, *Memorandum* RM-5753-PR, February 1969., p. 50. Nyoto sempat bersembunyi di rumah Subandrio yang melindunginya. Lihat *Angkatan Bersendjata*, 2 Juni 1966.

1967, dengan vonis hukuman mati dengan eksekusi yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1968 bersama dengan Njono bin Sastroredjo (Ketua Pemuda Rakyat Jakarta Raya).

Oloan Hutapea juga berhasil dieksekusi pada tahun 1968.[584] Pimpinan lain seperti Rewang berhasil ditangkap pada tanggal 20 Juli 1968 kemudian dihukum penjara seumur hidup dan baru dibebaskan tahun 1999. Anggota politbiro lainnya yaitu Jusuf Adjitorop secara otomatis lolos, karena pada saat G30S berlangsung ia tengah berada di Cina sebagai wakil delegasi PKI di acara ulang tahun Partai Komunis Cina.[585]

Selama masa pelariannya Aidit telah meninggalkan dokumen pola kerja "2 x 4 Tahun" untuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan *physical force.*[586] Dalam pelariannya pada tanggal 6 Oktober 1965 Aidit sempat berkirim surat kepada Sukarno yang isinya menyerukan agar penyelesaian G30S sepenuhnya berada di tangan Sukarno serta melarang adanya tuduh-menuduh atau salah-menyalahkan.[587] Di dalam persembunyiannya Aidit terus mempertahankan prinsip kebertahanan hidup partai dengan mengeluarkan *Instruksi Tetap* tertanggal 10 November 1965 dan ditujukan kepada seluruh Comite Daerah Besar

www.setabasri.org

---

[584] John Roosa, Dalih …, *op. cit.,* h. 106. Data Pauker berbeda dengan Roosa karena hanya menyebut Politbiro terdiri atas 10 anggota, padahal menurut Roosa jumlah totalnya 17 (12 anggota penuh, 4 calon anggota, dan 1 panitera). Lihat Tabel 7 *Struktur Organisasi Pimpinan PKI September 1965*.

[585] *Sinar Harapan*, 3 Oktober 1968. Pada Bulan Oktober 1968 Soeharto menolak permintaan grasi atas nama Syam, Supardjo, Wirjomartono, Njono bin Sastroredjo, dan Sudisman sehingga kelimanya yang dijatuhi vonis mati tersebut akan mengalami eksekusi. Selain itu Soeharto juga menolak grasi atas pidana seumur hidup atas Heru Atmodjo, Sri Suwardiningsih (pimpinan Gerwani), Maniso, dan Gatot Sukrisno.

[586] *Antara*, 2 Juni 1966. Dalam *physical force* Aidit menerapkan ajaran Trotsky berupa infiltrasi dan merusak kedisiplinan ABRI. Perwira tinggi yang berhasil didekati adalah Omar Dhani (Pangau), Suparto (Brigjen), Sutarto (Brigjen Polisi), juga Latief (Kolonel).

[587] Nugroho Notosusanto, ed., Prajurit dan Pejuang …, *op. cit.,* h. 122.

(CDB) PKI se-Indonesia.[588] Tidak semua *Instruksi Tetap* Aidit dipatuhi anggota Politbiro. Rewang, Ruslan Wijayasastra, juga Oloan Hutapea ternyata malah menempuh jalan pertempuran fisik.

Sejumlah anggota Politbiro PKI yang sementara berhasil lolos dari kejaran Soeharto kemudian membangun gerakan perlawanan bawah tanah dengan kode PKI Malam,[589] Kucing Hitam, juga Gunung Es.[590] Di wilayah Rembang sebuah unit Kucing Hitam yaitu *Koyok Hitam* berkonsentrasi pada taktik peracunan, penculikan, dan pembunuhan secara tak terduga.[591] Dalam kode Gunung Es, PKI menerapkan strategi rekrutmen kader-kader ilegal.[592] Kader ilegal mereka peroleh melalui infiltrasi atas partai politik, instansi pemerintah, dan ABRI, sehingga dengan demikian kendati kader legal mereka tampak sedikit tetapi sesungguhnya adalah banyak (berasal dari yang ilegal itu) serupa dengan "gunung es."[593]

Sebelum dirinya tertangkap, Sudisman sempat mereorganisasi Central Comite (CC) baru PKI untuk wilayah Jawa Barat sementara Rewang beroperasi di Jawa Tengah dan Timur. Bukti Sudisman melakukan pembangunan kembali partai di Jawa Barat terbongkar antara Juli dan awal Agustus 1968 dengan mana 50 perwira, termasuk seorang jenderal dan dua kolonel dari Divisi Siliwangi

www.setabasri.org

---

[588] *ibid.,* h. 123.
[589] PKI Malam juga diasosiasikan dengan Biro Khusus, baik pusat maupun daerah, yang tugasnya melakukan infiltrasi ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Lihat *Angkatan Bersendjata*, 8 Januari 1967.
[590] Justus M. Van Der Kroef, Indonesia: The Battle of the 'Old' and the 'New' Order. 1967. *Australian Outlook*. 21:1., pp. 18-43, p. 30.
[591] Justus M. Van der Kroef, Indonesian Communism since the 1965 Coup. 1970. *Pacific Affairs.* Vol. 43, No. 1 (Spring), pp. 34-60., p. 36.
[592] Kader ilegal adalah kader dari partai atau organisasi non afiliasi PKI.
[593] *Kompas* 23 Agustus 1968. Contoh dari taktik ini adalah pembentukan gerakan Leninisme-Marhaenisme (LM) di Jawa Tengah untuk lebih menarik simpatisan Sukarno di dalam tubuh ABRI agar berpihak pada gerakan bawah tanah PKI. Lihat *Kompas*, 28 April 1968.

dinyatakan terlibat.[594] Versi lain menyatakan bahwa pasca G30S kepemimpinan PKI terbelah dua. Satu lini dipimpin oleh Sudisman (Politbiro Jakarta) dan lini lainnya mengelompok di sekeliling Ismail Bakri di kawasan Bandung.[595]

Dalam persidangan Mahmilub atas dirinya, Sudisman mengaku telah enam kali melakukan pertemuan dengan Suyono Pradigdo (Kepala Komite Verifikasi Pusat PKI) dan Sukadi (Sekretaris Deputi Komite Regional Jakarta Raya). Dalam aneka pertemuan tersebut mereka berencana untuk membangun kembali PKI secara klandestin.[596] Sudisman bermaksud melakukan rekonstruksi partai dengan berbasiskan sejumlah kelompok yang masing-masingnya terdiri atas tiga orang.[597] Setelah penangkapan Sudisman maka anggota Politbiro PKI yang tersisa di Indonesia adalah Rewang, Ruslan Wijayasastra, Oloan Hutapea, Mohammad Munir, sementara itu Asmu dan Jusuf Adjitorop "terjebak" di Cina.[598]

Perlawanan terselubung PKI tetap relatif kurang jelas, tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan modifikasi atas struktur organisasi partai sebelumnya. Jika dahulu terdapat Comite Daerah Besar (CDB) yang setara dengan tingkat provinsi maka kemudian CDB ini diubah menjadi Biro-biro

www.setabasri.org

---

[594] Mereka adalah wali kota Bandung Djukardi "Didi" Sastradiwiria (Kolonel) yang tertangkap pada tanggal 10 Agustus 1968. Penangkapan Didi terjadi setelah sebelumnya CDB darurat PKI Jawa Barat terbongkar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata Didi telah sejak tahun 1954 dibina oleh Biro Khusus PKI. Lihat *Kompas*, 20 Agustus 1968.

[595] Faksi Rewang sendiri mendukung kelompok Ismail Bakri yang berkedudukan di Bandung ini. Lihat Vannessa Hearman, Guerrilas, Guns, and Knives? Debating Insurgency in South Blitar, East Java, 1967-8. 2010. *Indonesia*. No. 89 (April) pp. 61-91. p. 72.

[596] Ini mungkin mirip yang dilakukan 4 sekawan (Aidit, Lukman, Sudisman, dan Sakirman) yang sejak 1952 kembali membangun PKI dari kehancuran mereka tahun 1948 pasca *Madiun Affair*.

[597] Diskusi antara Sudisman dan rekan-rekan PKI tersebut berlangsung sebelum dilakukan pelarangan secara resmi oleh Soeharto atas PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Lihat Guy J. Pauker, Memorandum …, *op. cit.,* p. 52.

[598] Anggotanya terdiri atas Oloan Hutapea, Munir, Sukatno, dan Sugito. Jusuf ini tengah berada di Peking saat G30S/PKI meletus. Para sisa Politbiro ini lalu mendirikan Central Comite darurat di sekeliling Rewang, dengan Ruslan Wijayasastra selaku ketuanya. Lihat Vanessa Hearman, Guerilla …, *op. cit*., p. 72.

Daerah (Birda) yang bersifat bawah tanah dengan wilayah pertanggungjawaban setara kabupaten bukan lagi provinsi. Setiap Birda bertanggung jawab mengorganisir perlawanan bersenjata di teritorial masing-masing. Mereka juga harus mendirikan Basis Revolusi (Basrev) di wilayah pinggiran atau pedesaan. Basrev beroperasi melalui Kompro yang bersifat wilayah pedesaan dan berstruktur paramiliter. Setiap Kompro juga harus membangun pusat pelatihan gerilya atau Sekolah Perlawanan Rakyat (SPR) serta membentuk unit-unit gerilya daerah yang disebut Detasemen Gerilya (Detga) serta Gerilya Desa (Gerda). Pola-pola ini mengikuti model perlawanan komunis atas AS di Vietnam Selatan yang dipraktikkan Vietcong.[599]

Perlawanan lanjutan PKI juga memikirkan wilayah urban. Konsep CDB yang diterapkan sebelum tanggal 30 September 1965 kemudian diubah menjadi Trio Kota (Triko). Triko bertanggung jawab atas aktivitas bawah tanah PKI di aneka kota seperti pernah dilakukan saat Aidit dalam membangun PKI sejak tahun 1952. Namun, berbeda dengan Birda, Triko tidak bertanggung jawab atas kegiatan gerilya, tidak mendirikan pelatihan gerilya, tidak mengendalikan unit-unit gerilya, sehingga semakin memberi kesan bahwa perjuangan PKI terfokus di wilayah pedesaan.[600] Pada bulan Januari 1966 Amir Machmud (Pangdam Jaya) menyebut baru 90% "CDB Baru" PKI di ibukota yang berhasil ditumpas.[601]

Munculnya perlawanan terorganisir PKI ini dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, bahwa sebelum tanggal 30 September 1965 PKI telah tumbuh menjadi

[599] Guy J. Pauker, Memorandum …, *op. cit.,* p. 60-61.
[600] *ibid.,* p. 61.
[601] *Angkatan Bersendjata*, 6 Juni 1966.

www.setabasri.org

partai yang mengklaim dirinya telah memiliki 2,5 juta anggota dan calon anggota dan itu belum termasuk di aneka organisasi afiliasinya. Kedua, bermunculan sejumlah teror komunis di Jawa Tengah yang cukup luput dari perhatian Soeharto dan pasukannya.

Pada tahun 1967 terjadi sejumlah upaya untuk membangun aneka jalur pengembangan organisasi PKI yang secara cukup gencar dilakukan oleh Faksi Rewang-Wijayasastra. Untuk pembangunan kekuatan ini PKI telah melibatkan lapis kedua mereka.[602] Faksi ini terdiri atas Oloan Hutapea yang dahulunya adalah editor surat kabar *Bintang Merah,* organ teoretis PKI serta calon anggota politbiro.[603] Dalam upaya merekonstruksi ulang PKI mereka berpedoman pada Tripanji Sudisman. Faksi lapis kedua ini menjalin hubungan dengan Faksi Rewang-Wijayasastra. Rewang menjelaskan mengapa mereka memindahkan basis operasi ke Blitar selatan:

> *Our departure to South Blitar was based on the view that there was no longer any legal guarantee for communists. The possibility for peaceful struggle had disappeared. We needed to take up armed resistance, so we decided to relocate the party leadership to South Blitar.*[604]
>
> [Keberangkatan kami menuju Blitar Selatan didasarkan pandangan bahwa tidak ada lagi jaminan legal bagi kaum komunis. Kemungkinan perjuangan damai telah hilang. Kami perlu melakukan perlawanan bersenjata, sebab itulah kami memutuskan memindahkan kepemimpinan partai ke Blitar Selatan].

www.setabasri.org

---

[602] Justus M. Van der Kroef, Indonesian Communism …, *op. cit.,* p. 40.

[603] Selain Oloan juga terdapat Mohammad Munir yang dahulunya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal SOBSI, Sukatno alias Teguh yang dahulunya pimpinan Pemuda Rakyat, dan Sugito yang dahulunya anggota Comite Central, Iskandar Subekti alias Suripto yang dahulunya adalah Panitera Politbiro, para anggota Biro Chusus, dan anggota rahasia Central Comite. Tambahan nama Iskandar Subekti, anggota Biro Khusus, dan anggota rahasia Central Comite ini didasarkan pendapat Guy J. Pauker, Memorandum …, *op. cit.,* p. 60. Selainnya didasarkan pada Justus M. Van der Kroef, Indonesian Communism …, *op. cit.,* p. 40.

[604] Vanessa Hearman, Guerilla …, *op. cit.,* p. 73.

Di Blitar Selatan, Comite Central darurat PKI saling berkomunikasi dengan bantuan para anggota Gerwani.[605] Sebagai contoh, Oloan Hutapea berhasil membangun Central Comite di wilayah Blitar Selatan dengan memanfaatkan para veteran partai dan personil yang mereka rekrut dari anggota militer. Selain itu Oloan juga mampu mendirikan pemerintah tandingan sebagai Presiden Republik Rakyat Indonesia (PRRI) dengan markas di dekat Blitar.[606] Pada akhir tahun 1967, Oloan memilih wilayah antara Jawa Tengah dan Timur sebagai lokasi kamp, pertemuan, perlindungan, dan bungker, yang hebatnya saling terkoneksi melalui terowongan bawah tanah yang identik dengan pola gerilya Vietcong di Vietnam Selatan.[607]

Penjelasan bagi kemampuan PKI dalam menggali terowongan adalah di tahun 1964 PKI pernah mengirimkan sekurangnya 14 kader mereka ke Vietnam Utara untuk mempelajari taktik gerilya. Mereka ini kembali ke Indonesia sebelum pecahnya G30S. Seorang bernama Satir adalah pemimpin dari ke-14 orang kader ini dan ia sendiri pun terbunuh dalam aksi militer Soeharto, bahkan sebelum terbentuknya Faksi Rewang-Wijayasastra dan Oloan Hutapea. Para "alumni" Vietnam Utara ini kemudian mempraktikkan pengetahuan mereka di wilayah Blitar selatan dan kemudian kawasan ini dikenal sebagai "laboratorium." Selain

www.setabasri.org

[605] *ibid.,* p. 74. Selain Blitar Selatan, lokasi persembunyian sisa-sisa PKI di Jawa Timur adalah wilayah Gunung Semeru, Lawu, Raung, Argopuro, Kelud, dan wilayah selatan Malang.
[606] Justus M. Van der Kroef, Indonesian Communism …, *op. cit.,* p. 43. Ini merupakan manifestasi taktik Maois, mendirikan pemerintahan-pemerintahan rakyat di wilayah pinggiran. Oloan memanfaatkan kader-kader militan petani dan front-front aksi baru.
[607] *ibid.,* p. 41. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa PKI telah melakukan persiapan militer bahkan sebelum terjadinya G30S.

itu mereka menyebarkan pengetahuan taktik gerilya Vietcong yang mereka kuasai melalui STPR.[608]

c. Pembersihan Kabinet, Parlemen, dan TNI-AD

Dalam melakukan dominasi atas PKI, Soeharto juga melakukan pembersihan atas pimpinan dan aliansi mereka di tubuh kabinet, parlemen, TNI-AD, dan angkatan bersenjata. Pembersihan Soeharto atas keempat lembaga tersebut berkelindan dengan eliminasi atas orang-orang yang dinilai dekat dengan Sukarno. Akibatnya sulit dibedakan apakah pembersihan tersebut murni ditujukan atas anasir PKI saja ataukah pula meliputi para pendukung Sukarno. Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 370/1965 telah memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang dianggap terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI.[609] Pada tanggal 16 Oktober 1965 Soeharto secara resmi menggantikan Yani sebagai Menteri/Panglima TNI-AD.[610]

Secara lengkap, daftar ke-15 menteri yang ditangkap kemudian diganti secara *ad interim* dimuat dalam **Tabel 8** *Kabinet Dwikora Reshuffle Kedua*. Secara umum, pembersihan kabinet merupakan upaya Soeharto guna memotong akses PKI, juga akhirnya Sukarno pada sumber daya kekuasaan. Dalam *reshuffle* yang kemudian dilakukan, Sri Mulyono Herlambang yang dianggap Sukarnois digantikan oleh Rusmin Nurjadin sebagai *caretaker* Pangau dan dimanfaatkan Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran atas TNI-AU.

www.setabasri.org

---

[608] *ibid.,* p. 41. Sekolah Tentara Pembebasan Rakyat didirikan di Klaten, dengan cabangnya di Blitar Selatan.
[609] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds., *Jejak Langkah Pak Harto: 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968*. Cetakan 1. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, h. 155.
[610] Sri Mulyono ternyata seorang Sukarnois dan di masa kemudian digantikan oleh Rusmin Nurjadin selaku *caretaker* Panglima AU.

Tabel 8 Kabinet Dwikora *Reshuffle* Kedua
Sumber: The Editors, Continuity and Change: Four Indonesian Cabinets since October 1, 165, with Scattered Data on Their Members' Organizational and Ethnic Affiliations, Age and Place of Birth. 1966. *Indonesia*. No. 2. (Oct.) pp. 185-222. p. 198-199.

Anggota Kabinet Ditangkap	Jabatan/Organisasi	Pengganti
Subandrio	Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri	Adam Malik
Chaerul Saleh	Deputi III Perdana Menteri, Murba	K.H. Idham Chalid
Mayjen Achmadi	Deputi Informasi Presidium Kabinet	Rev. W.J. Rumambi
Oei Tjoe Tat	Menteri Negara, BAPERKI	-
Sumarno Sosroatmodjo (Mayjen)	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Raya	Basuki Rachmat (Mayjen)
Achmad Astrawinata	Menteri Kehakiman	Wirjono Prodjodikoro
Teuku Jusuf Muda Dalam	Gubernur Bank Negara Indonesia (PNI Asu)	Soemarno
Sutomo Martopradoto	Menteri Perburuhan (PARTINDO)	Frans Seda (Partai Katolik)
Armunanto	Menteri Pertambangan (PARTINDO)	Mayjen Ibnu Sutowo
Surachman	Menteri Irigasi Publik dan Pembangunan Desa (PNI ASU)	Petrus Canisius Harjo Sudirdjo
A.M. Achadi	Menteri Transmigrasi dan Koperasi	Achmad Sukendro (Brigjen)
Sumardjo	Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PGRI)	Teuku Sjarif Thajeb (Brigjen)
J.K. Tumakaka	Sekjen Front Nasional	K.H. Achmad Sjaichu
Setiadi Reksoprodjo	Menteri Kelistrikan dan Sumber Daya, Pemuda Rakyat	Sutami
Imam Sjafe'I (Letkol)	Menteri Hubungan Keamanan Khusus	-

www.sejarah-nasional.org

Mengenai halnya Chaerul Saleh dan Achmadi (Mayjen), maka sebelumnya mereka telah ditangkap di Istana Bogor pada tanggal 19 Maret 1966 termasuk Imam Sjafe'i (Letkol) yang ditangkap keesokan harinya tanggal 20 Maret 1966 saat tengah berada di daerah Polonia, Jakarta. Kemungkinan besar tokoh yang mengajukan Imam sebagai menteri khusus adalah Subandrio, dengan alasan Imam ini merupakan tokoh yang banyak mengenal seluk-beluk dunia kriminal Jakarta. Tujuan pemasangan Imam sebagai Menteri Urusan Keamanan Rakyat disengaja

untuk merekrut massa dalam menghadapi demonstran anti PKI dan anti Sukarno.[611]

Dalam perkembangan selanjutnya muncul tuntutan agar Sukarno membubarkan Kabinet Dwikora melalui Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Namun, Sukarno tidak kunjung melakukan pembubaran dan lebih memilih untuk menyusun ulang kabinetnya sebagai upayanya melawan aneka tekanan yang dilancarkan oleh para demonstran dan itikad Soeharto untuk membersihkan kabinet dari unsur-unsur komunis dan Sukarnois. Upaya ini dilakukan Sukarno melalui perombakan Kabinet Dwikora tanggal 24 Februari 1966, hanya selang sebulan sejak perombakan terakhir tanggal 30 Maret 1966. Perombakan yang cepat dalam waktu relatif singkat mengindikasikan kuatnya tekanan politik atas dirinya. Kendati demikian Sukarno tetap berupaya mengamankan posisinya dengan memosisikan para loyalisnya di sejumlah jabatan.

Dalam kementerian TNI-AL duduk dua orang loyalis Sukarno yaitu R. Muljadi selaku Menpangal dan Hartono (Mayjen, KKO[612]) selaku Deputi Komandan TNI-AL. Pada posisi Menpangak duduk loyalis lainnya yaitu Sutjipto

www.setabasri.org

[611] Imam juga rajin mencari tokoh-tokoh muda yang bersedia dibayar agar tidak ikut-ikutan "mengganyang" Sukarno. Lihat J.B. Soedarmanta. *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi*. Cetakan 1. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2004, h. 171. Di masa perang kemerdekaan dahulu, Imam pernah membentuk satu kesatuan laskar yang terdiri atas para kriminal Jakarta dan beroperasi di Cirebon. Ia berhasil mengintegrasikan laskarnya tersebut ke dalam TNI dan ia sendiri memperoleh pangkat hingga letnan kolonel sambil tetap memelihara hubungan dengan dunia kriminal Jakarta. Lihat Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Cetakan 1. Penerjemah Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1986.

[612] Pada tanggal 15 November 1945 berdiri Corps Marinier dengan komandannya Mayor Agoes Soebekti. Tanggal 15 November 1950 nama Corps Marinies diganti dengan Korps Komando (KKO) dengan komandan pertama Mayor R. Soehadi. Hartono menjabat sebagai komandan KKO tahun 1961. Akhirnya pada tanggal 15 November 1975 KKO berganti nama menjadi Korps Marinir hingga saat ini. Lihat Petrik Matanasi, "HUT ke-73 Korps Marinir: Sejarah Pangkalan IV Tegal hingga KKO" dalam <https://tirto.id/hut-ke-73-korps-marinir-sejarah-pangkalan-iv-tegal-hingga-kko-c9Wi>. Diakses 25 Maret 2022 pukul 14:35.

Judodihardjo dan Sugih Arto (Brigjen) untuk menduduki posisi Jaksa Agung. Guna menjamin agar posisinya tetap kuat dalam politik dalam negeri, maka Sukarno menempatkan Basuki Rachmat, orang yang cukup dekat dengannya.[613] Ali Sastroamidjojo pun masih menduduki posisi Deputi II Perdana Menteri sekaligus Deputi Ketua MPRS.

Sebagai instrumen penekan politik atas Sukarno, maka demonstran yang merupakan bagian dari formasi koalisi Soeharto terus menjalankan aksi dan sebagai akibatnya maka tanggal 28 Juli 1966 Kabinet Dwikora pun bubar digantikan dengan Kabinet Ampera. Pembubaran ini merupakan wujud dari semakin berangsur menguatnya dominasi Soeharto atas Sukarno.[614]

Sebelumnya, yaitu dalam *reshuffle* kabinet Dwikora kedua pada tanggal 28 Februari 1966, Soeharto semakin agresif dalam menyingkirkan anasir komunis yang kerap saling berkelindan dengan orang dekat Sukarno. Koalisi TNI-AD-nya bertambah empat orang di kementerian dan sebanyak enam orang di DPR-GR. Representasi PNI Ali Sastroamidjojo seluruhnya menghilang untuk kemudian digantikan wakil PNI dari faksi Osa Maliki. Selain itu sejumlah unsur Partai Katolik dan Parkindo juga masuk ke dalam pemerintahan. Unsur NU yang masih ia harapkan dukungannya tetap hadir, tetapi tidak bagi para pimpinan Masyumi. Selain itu kecuali dari TNI-AK, koalisinya dari TNI AL dan TNI-AU mulai menampakkan konfigurasinya.

www.setabasri.org

---

[613] Tiga orang perwira yang dikirim Soeharto menemui Sukarno hingga memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966 dinilai sebagai orang dekat Sukarno. Mereka adalah M. Jusuf, Basuki Rachmat, dan Amir Machmud. Jusuf dan Amir kemudian menjadi andalan Soeharto baik di dunia kemiliteran maupun politik dalam negeri.

[614] Namun, Sukarno terus melakukan perlawanan yang diantaranya dengan berkeras memosisikan Leimena sebagai Waperdam.

Pembentukan Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966 semakin jelas menampakkan wujud dominasi Soeharto. Dalam kabinet ini hampir tanpa satu pun *bonding* Sukarno menjadi anggota. Pemerintahan aktual Sukarno kini dijalankan oleh lima anggota presidium "kekuatan baru" yang terdiri atas Soeharto, Adam Malik, K.H. Idham Chalid, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sanusi Hardjadinata (PNI).[615] Selain melakukan pembersihan atas Kabinet Dwikora, Soeharto pada saat menjelang pengumuman Kabinet Ampera 28 Juli 1966 memasukkan aliansinya dari PNI Osa Maliki ke dalam kabinet. Komposisi Deputi Perdana Menteri/Sukarno kemudian bertambah menjadi enam orang.[616]

Selain para anggota kabinet dari konfigurasi sebelumnya, Soeharto terus memasukkan orang-orang baru ke dalam kabinet hingga tanggal 30 Maret 1966, yang secara rinci termuat dalam **Lampiran 6** *Kabinet Dwikora Reshuffle Ketiga*. Komposisi dari para Deputi Perdana Menteri kini telah relatif utuh mencerminkan formasi koalisi Soeharto sehingga kekuasaan atas pemerintahan secara praktis mulai lepas dari dominasi Sukarno. Selain melakukan perombakan atas kabinet, maka guna memastikan dominasinya, Soeharto juga melakukan penyusunan ulang pejabat militer dan sipil dengan cara membubarkan Cakrabirawa, menangkapi

www.setabasri.org

[615] Soeharto bertindak selaku ketua presidium pimpinan dewan menteri sekaligus kepala menteri urusan pertahanan dan keamanan. Adam Malik dari Murba selaku kepala menteri urusan hubungan politik. K.H. Idham Chalid dari NU selaku kepala menteri urusan kesejahteraan rakyat. Sri Sultan Hamengku Buwono bertindak selaku kepala menteri urusan ekonomi dan hubungan keuangan. Sementara Sanusi Hardjadinata dari PNI "kanan" selaku kepala menteri urusan industri dan pembangunan. Saat Kabinet Ampera dibentuk, Idham Chalid sudah bukan lagi pendukung Sukarno.

[616] Terdiri atas Johannes Leimena (Parkindo, sebagai Deputi I Hubungan Umum), K.H. Idham Chalid (NU, sebagai Deputi II *ad interim* hubungan dengan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara), Roeslan Abdulgani (PNI, sebagai Deputi III untuk lembaga-lembaga politik), Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Deputi IV hubungan ekonomi, keuangan, dan pembangunan), Soeharto (Letjen, sebagai Deputi V *ad interim* pertahanan dan keamanan), dan Adam Malik (Murba, sebagai Deputi VI untuk hubungan sosial dan politik).

sejumlah pejabat TNI-AU, dan legalisasi Soeharto atas PNI Faksi Osa Maliki-Usep Ranawidjaja (bukan PNI Ali-Surachman).[617]

Soeharto juga melakukan pembersihan atas TNI-AK, pada skala kecil di pertengahan tahun 1966, dan secara lebih luas pada tahun 1967. Pada bulan Mei 1966 tiga orang perwira TNI-AD yaitu Ibrahim Adjie, Umar Wirahadikusumah, dan Suryosumpeno dikirim Soeharto untuk belajar di Seskoad. Setelah itu pada bulan Juli 1966 Ibrahim Adjie yang Sukarnois dikirim sebagai Duta Besar ke London dan di bulan yang sama pula Rukman - *bonding* Soeharto di SSKAD dan Caduad – diangkat sebagai staf di Markas Besar TNI-AD. Suryosumpeno, seorang *bonding* Soeharto dari Divisi Diponegoro, dijadikan sebagai Sekretaris Militer Sukarno kemudian setelah itu menjadi pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri.[618] Jabatan Pangdam Divisi Diponegoro yang awalnya dipegang oleh Suryosumpeno digantikan oleh Surono, *bonding* Soeharto yang pernah menjadi anak buahnya di Divisi Diponegoro. Surono kemudian mereduksi kuantitas pasukan divisi tersebut menjadi hanya 2500 orang.[619]

Kendati Hartono (Brigjen KKO) telah menghilang dari kabinet, tetapi R. Muljadi dan Sutjipto Judodihardjo dianggap masih sebagai simpatisan Sukarno yang bercokol di dalam Kabinet.[620] Basuki Rachmat yang menjadi Menteri Dalam

www.setabasri.org

[617] R.E. Elson, Suharto …, h. 269.
[618] *ibid.,* p. 270.
[619] Yusuf Wanandi menulis bahwa Surono adalah seorang loyalis Sukarno. Lihat Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.*
[620] Kelak Soeharto mengganti Sutjipto dengan Hoegeng, dan Muljadi dengan Subono.

Negeri pun sesungguhnya adalah seorang *bonding* Sukarno, yang kelak digantikan oleh Amir Machmud yang telah menunjukkan submisi kepada Soeharto.[621]

Pada pertengahan tahun 1967, dua orang *bonding* Sukarno yaitu Mursyid dan Mokoginta (Letjen), kemudian di*reshuffle* lalu yang terakhir "dibuang" dengan cara diberikan tugas diplomatik.[622] Pada sisi lain, Nasution yang merupakan seorang jenderal senior diangkat menjadi ketua MPRS, sebuah posisi terhormat tetapi sebuah posisi sipil tanpa kemampuan kemiliteran. Para perwira tinggi mungkin lebih suka dipimpin Soeharto yang tidak terlalu mempermasalahkan bisnis tentara ketimbang Nasution.

d. Aturan Konstitusional Pembubaran PKI

Cara keempat yang ditempuh adalah memproduksi sejumlah aturan konstitusional guna melegalisasi submisi PKI. Kendati secara fisik Soeharto berhasil melumpuhkan PKI, tetapi hal tersebut akan sia-sia jika PKI kembali mendapatkan kesempatan untuk bangkit seperti antara 1952 hingga 1965. Sebab itulah maka Soeharto menekankan perlunya aturan konstitusional sehingga dipastikan bahwa PKI tidak mungkin lagi bisa bangkit, bahkan jika Sukarno tetap hendak mempertahankannya.

Pada tanggal 12 Maret 1966 Soeharto mengeluarkan Dekrit Presiden No. 1/3/1966 yang ia tandatangani mengatasnamakan Sukarno yang berisikan

www.setabasri.org

[621] Awalnya Amir Machmud adalah *bonding* Sukarno tetapi kemudian lebih memilih Soeharto karena lebih kuat. Di dalam kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Ampera, formasi kini jauh lebih menguntungkan Soeharto ditandai terdapatnya 32 orang menteri dan para pembantunya yang berasal dari TNI-AD. Sementara dari angkatan lain adalah 8 orang dari TNI-AL, 5 orang dari TNI-AU, dan 3 orang dari TNI-AK.

[622] R. E. Elson, Suharto …, *op. cit.,* p. 270. Mokoginta ditugaskan sebagai duta besar di Republik Persatuan Arab. Lihat Berita Yudha, 19 Juni 1967.

sejumlah substansi. Pertama, bahwa terdapat aksi-aksi bawah tanah dari gerakan kontra revolusioner G30S/PKI. Kedua, aktivitas bawah tanah tersebut berusaha mempersenjatai diri. Ketiga, aksi-aksi bawah tanah tersebut membahayakan revolusi Indonesia secara umum, dan secara khusus menyulitkan pencarian penyelesaian ekonomi bangsa dan konfrontasi dengan proyek Nekolim di Malaysia. Keempat, Soeharto akan mengambil langkah tegas atas PKI. Bahwa keputusan pembubaran PKI dan seluruh elemennya berlaku secara resmi sejak 12 Maret 1966.

Namun, ketidaksetujuan Sukarno atas pembubaran PKI tidak menyurutkan langkah Soeharto. Pada tanggal 18 Maret 1966 melalui Pengumuman No. 5 Soeharto pada intinya akan terus melakukan pembubaran PKI.[623] Keberatan Sukarno mengenai sikap Soeharto terhadap PKI tidak memperoleh perhatian dan Soeharto terus berjalan dengan rencananya yaitu mendominasi PKI.

Pada tanggal 5 Mei 1966 Soeharto mengeluarkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh dirinya dengan para panglima matra lain.[624] Dalam pernyataan ini Soeharto mulai menekankan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan bukan konsep-konsep Sukarno lainnya, kendati dengan halus tetap menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata tetap menghormati Sukarno. Selain Pancasila, Soeharto juga menekankan pentingnya UUD 1945 yang saat itu diterapkan atas posisi Sukarno tetapi di masa kemudian kepada posisinya sendiri.

www.setabasri.org

[623] R. E. Elson, Suharto …, *op. cit.,* p. 229-231.
[624] O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* p. 237-239. Soeharto (selaku Deputi Perdana Menteri Urusan Pertahanan, Keamanan, dan Panglima TNI-AD), Nasution (selaku Deputi Komandan Komando Ganyang Malaysia), Moeljadi (selaku Panglima TNI-AL), Rusmin Nurjadin (selaku Panglima TNI-AU), dan Sutjipto Judodihardjo (selaku Panglima TNI-AK).

Lalu angkatan bersenjata merencanakan untuk mengadakan Pemilu padahal Sukarno masih menjadi presiden seumur hidup dan ketetapan atas hal tersebut belum lagi dicabut.

Langkah-langkah Soeharto dalam membubarkan PKI belum mendapat kekuatan konstitusional dari MPRS. Sebab itulah maka pada tanggal 12 Juni 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang ditandatangani oleh *caretaker* ketua MPRS Mayjen Wilujo Puspojudo bersama wakil-wakilnya Osa Maliki (PNI) dan Subchan Zaenuri Ershan (NU). Dalam ketetapan pertamanya TAP MPRS mengadopsi dan mengkonfirmasi keabsahan Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Sukarno kepada Soeharto. Batas waktu keabsahan Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah hingga MPR baru hasil Pemilu dipilih. Ketetapan MPRS juga kembali menegaskan posisi Soeharto untuk melakukan tindakan "*full discretion*" dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Secara umum keempat cara Soeharto dalam mendominasi PKI seperti telah dipaparkan dapat dinyatakan berhasil. Dalam mengeliminasi PKI, Soeharto seperti tinggal "menunggangi" gelombang kebencian sebagian massa rakyat, terutama kelompok Islam, terhadap PKI. Soeharto juga memiliki koalisi sipil-militer yang tangguh dan dapat diharapkan bantuannya bahkan tanpa ia sendiri harus mengeluarkan terlalu banyak instruksi seputar bagaimana menghancurkan PKI. Terakhir, legalitas konstitusional Soeharto dalam melarang PKI memperoleh keabsahan melalui TAP MPRS No. 9/MPRS/1966 yang menaikkan status Supersemar dari sekadar delegasi kewenangan personal dari Sukarno ke Soeharto menjadi mandat dari MPRS (konstitusional) kepada Soeharto.

www.setabasri.org

2. Dominasi dalam Hirarki *Dyadic*

Kini persoalan masuk ke dalam dominasi dalam hirarki *dyadic* kekuasaan dalam politik nasional. Dua individu dominan dengan salah satu berstatus *alpha male status quo* yaitu Sukarno menghadapi satu lainnya selaku penantang (*contender*) yaitu Soeharto. Persoalan dominasi-submisi antara keduanya adalah yang tersisa setelah Soeharto mampu mendominasi PKI. Pada masa itu persoalan dominasi atas Sukarno tidaklah sesederhana seperti dilihat pada masa kini bahwa seolah mudah bagi Sukarno menyerah pada Soeharto. Perlu keberanian cukup besar bagi individu untuk merebut posisi *alpha male* dari Sukarno.[625]

Warisan politik Sukarno yang memberi keuntungan bagi Soeharto adalah dominasi kepemimpinan nasional yang rapuh akibat hanya mendasarkan diri pada perimbangan antar tiga kekuatan yang selalu bergeser.[626] Dengan demikian penting bagi Soeharto untuk terlebih dahulu memecahkan persoalan perimbangan kekuatan tersebut baru melangkah pada pendominasian Sukarno.

Masalah dualisme kepemimpinan terjadi pada periode 1965-1968 dan dengan demikian menandai eksistensi dari hirarki *dyadic* yang di dalamnya Soeharto menantang hirarki Sukarno selaku *alpha male* di dalamnya. Sub bab ini mengulas bagaimana Soeharto mendominasi dan memastikan diberikannya submisi kepadanya oleh Sukarno, dan apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia secara umum. Jawaban atas aneka pertanyaan tersebut akan dijelaskan

www.setabasri.org

---

[625] Lihat Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 89.

[626] Pada tahun tersebut, agaknya beberapa lama setelah gerakan Untung dan kawan-kawan, Ali Moertopo pernah menanyakan kesediaan Soeharto untuk menggantikan Sukarno. Ini paling tidak mengindikasikan bahwa Soeharto telah mempelajari peluangnya sebagai presiden. Lihat *Tempo*, "Perintis Jalan Politik" Edisi 20 Oktober 2013, h. 42. Namun, menurut pemahaman penulis sukar dipastikan sejak kapan Soeharto mulai menghitung peluangnya sebagai pengganti Sukarno.

menggunakan analisis seputar mekanisme dominasi-submisi, cara melakukan dominasi yang paling menguntungkan, dan dampak dominasi bagi suatu spesies.

Dalam melakukan dominasi dalam hirarki *dyadic* Soeharto menempuh cara berbeda dengan manakala ia melakukan dominasi atas PKI. Terhadap Sukarno maka Soeharto memilih metode unjuk kekuatan dan ancaman bukan *physical force*. Hindley menulis "tindakan drastis atas Sukarno bisa memicu perang saudara".[627] Sebab itulah maka tampaknya Soeharto mendominasi Sukarno melalui empat sisi yaitu dari sisi angkatan bersenjata, aparatur pemerintah, partai politik dan organisasi massa, dan parlemen.[628]

Harry Tjan Silalahi menulis bahwa pada saat awal KAP-Gestapu dibentuk, telah muncul usulan agar Soeharto menggantikan Sukarno guna mengambil-alih situasi. Usulan tersebut disampaikan oleh para kolonel muda yang datang menghadap Soeharto, selanjutnya Harry menulis:

> Tetapi Soeharto tetap berkeyakinan *alon-alon waton kelakon, tinimbang kebut kliwat*. Artinya, perlahan-lahan tetapi pasti, daripada cepat-cepat tetapi malah ada yang terlampaui. Tekanan untuk mengambil tindakan tegas selalu ditolak karena Soeharto mau mengambil jalan konstitusional. Jalan konstitusional menjadi istilah populer. Soeharto pasca G30S/PKI menjadi sosok penting yang sangat diperhatikan, juga oleh Nasution, rekan seniornya dalam AD … Nasution termasuk eksponen yang menganggap Sukarno memang harus keluar dari kancah pemerintahan.[629]

www.setabasri.org

[627] Donald Hindley, Dilemmas of Consensus and Division: Indonesia's Search for a Political Format. 1969. *Government and Opposition*. Volume 4, Issue 1, pp. 70-99., 352
[628] *ibid.,* h. 49.
[629] J.B. Soedarmanta. *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi*. Cetakan 1. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2004, h. 169.

Secara umum terdapat keserupaan formasi koalisi Soeharto saat menghadapi Sukarno dengan saat ia menghadapi PKI.[630] Kelompok TNI-AD menghendaki Sukarno diganti dengan dalih aneka isu politik Sukarno yang agresif telah melupakan hal penting yaitu kemakmuran ekonomi rakyat Indonesia. Sambil melucuti kekuasaan Sukarno, Soeharto menugaskan para *bonding* untuk melakukan penggembosan atas Konfrontasi Malaysia sambil menyusun orang-orangnya mereka di posisi pemerintahan sipil.

Kostrad adalah unit militer yang Soeharto turut terlibat di dalam pembentukannya pada masa kepemimpinan Yani. Pada tahun 1967 Kostrad mampu menggerakkan 50.000 pasukan secara mobil dari sejumlah divisi regional.[631] Setelah G30S/PKI meletus Soeharto menyerahkan jabatan Pangkostrad kepada Kemal Idris, yang serupa dengan Dharsono yaitu memiliki sikap frontal anti komunis sekaligus anti Sukarno.

RPKAD adalah satu-satunya unit tempur di bawah Kostrad yang bukan merupakan bagian divisi regional. Pada tanggal 1 Oktober 1965 RPKAD baru terdiri atas empat batalion dengan dua di antaranya berposisi di Jakarta untuk melakukan pembersihan PKI dan kaum Komunis.[632] Sarwo Edhie berpendirian bahwa Sukarno mendukung komunis dan G30S. Sebab itu, sikap Sarwo serupa dengan Kemal dan Dharsono.

www.setabasri.org

[630] Donald Hindley, Dilemmas …, *op. cit.,* p. 84-86.
[631] *ibid.,* p. 84.
[632] *ibid.,* p. 85. RPKAD berada di bawah komando Sarwo Edhie saat ditugaskan Soeharto melakukan pembersihan PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pada akhir tahun 1967 RPKAD dimekarkan sehingga kekuatannya setara dengan 12 batalion.

Di jajaran aparatur pemerintah, salah satu pendukung Sukarno adalah Subandrio yang hingga tanggal 1 Oktober 1965 masih menjabat sebagai Deputi I Perdana Menteri sekaligus kepala Badan Pusat Intelijen (BPI).[633] Dalam menghadapi aneka demonstrasi dari kesatuan aksi, Soebandrio membentuk pasukan pemuda berbaju hitam.[634] Dalam menyambut seruan Sukarno pada tanggal 20 Januari 1966 untuk membentuk Barisan Sukarno maka aneka kekuatan "Orde Lama" melakukan agitasi terhadap massa PNI/Front Marhaenis dari Faksi Ali-Surachman untuk membalas aneka aksi KAMI serta tindakan teror lainnya.[635]

Bonding lain Sukarno dalam aparatur pemerintah adalah Chaerul Saleh. Secara ideologis Saleh berorientasi politik kiri tetapi menganut garis Tan Malaka – Murba. Sebab itu maka sejak awal ia merupakan kompetitor PKI dalam memperebutkan kepemimpinan kelompok kiri.[636] Selain Soebandrio dan Chaerul

www.setabasri.org

[633] Michael van Langenberg, Dr. Subandrio-An Assessment. 1966. *The Australian Quarterly*. Vol. 38, No. 4 (December) pp. 67-80, p. 67. Subandrio lahir di Kepanjen Jawa Timur Bulan September 1914 dan berlatar keluarga priayi. Ia menikah dengan Hurustiati Budoja seorang aktivis sosialis sekaligus seorang putri Bupati Pasuruan. Setelah selesai menempuh sekolah medis di Jakarta pada tahun 1942 ia kemudian menjadi seorang nasionalis militan.

[634] Deliar Noer, *Mohammad Hatta ..., op. cit.,* h. 603. Pasukan pemuda berbaju hitam populer disebut dengan Pemuda Marhaen dengan tujuan menghadapi demonstrasi KAMI dan KAPPI.

[635] Nugroho Notosusanto, ed., Prajurit dan Pejuang …, *op. cit.,* h. 128. Pada tanggal 28 Februari 1966 dalam acara peringatan ulang tahun Gerakan Siswa Nasional (GSN, ormas di bawah pengaruh PNI Ali-Surachman) Soebandrio menghasut massa marhaen untuk melakukan aksi teror terhadap lawan politiknya.

[636] Di revolusi fisik Saleh pernah dipenjara pada tahun 1946 akibat aktivitasnya bersama Tan Malaka – Sudirman dalam Persatuan Perjuangan (PP). Dalam kabinet Djuanda tahun 1957 ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Veteran. Antara tahun 1959 hingga 1960 ia menjadi Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan di dalam dalam Kabinet Kerja II dan III (1960 – 1963) selain menjabat sebagai Ketua MPRS pada masa antara 1960 – 1965. Kurang begitu jelas alasan Soeharto menangkap Chaerul Saleh, tetapi sejumlah aktivitasnya dalam nasionalisasi perusahaan asing selama Demokrasi Terpimpin tidak sejalan dengan politik "bersahabat" Soeharto dengan Barat. Lihat Akiko Sugiyama, Remembering and Forgetting Indonesia's Madiun Affair: Personal Narratives, Political Transition, and Historiography, 1948-2008. 2011. *Indonesia*. No. 92 (October) pp. 19-41. p. 30

Saleh *bonding* Sukarno lainnya dalam aparatur pemerintah adalah J. Leimena yang namanya tidak lagi muncul dalam Kabinet Ampera Soeharto.[637]

Di kalangan militer *bonding* Sukarno yang cukup penting adalah Ibrahim Adjie (Mayjen) yang menjabat selaku Panglima Divisi Siliwangi dan memiliki sikap anti komunis, tetapi sekaligus seorang Sukarnois. Dengan kekuasaannya Soeharto memerintahkan Adjie meninggalkan komando pasukan untuk kemudian belajar di Seskoad Bandung, kemudian posisinya digantikan oleh H.R. Dharsono (Mayjen).[638] Soeharto memastikan tidak akan terdapat gangguan kebijakan atas Sukarno dari panglima dari divisi yang begitu dekat dengan ibukota.[639]

Pada Divisi Diponegoro, Soeharto juga menugaskan Suryosumpeno yang sempat "dikudeta" oleh G30S Jawa Tengah untuk mengikuti Adjie belajar di Seskoad Bandung. Posisi Suryosumpeno sebagai panglima divisi digantikan oleh Surono Reksodimedjo (Mayjen), seorang *bonding* dan bekas anak buah Soeharto saat menjadi Panglima Diponegoro.[640]

Para perwira di Jawa Timur kendati bersikap anti komunis tetapi cenderung Sukarnois. Sebab itu, Divisi Brawijaya adalah salah satu dari tiga divisi terkuat di Jawa yang mengalami rotasi jabatan. Panglima lamanya yaitu Sunarijadi (Brigjen) Sukarnois. Mereka tidak terlampau berkeberatan dengan langkah-langkah

www.setabasri.org

[637] Telah dijelaskan dalam sub bab mengenai Dominasi atas PKI.
[638] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 208.
[639] Setelah selesai belajar di SSKAD, Ibrahim Adjie dijadikan sebagai Duta Besar di Inggris oleh Soeharto sementara bondingnya sendiri yaitu Suryosumpeno dijadikan Sekretaris Militer Sukarno, mungkin untuk mengawasi konfigurasi sikap para perwira tinggi angkatan bersenjata terhadap Sukarno. Lihat *ibid*.
[640] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 208. Ada pendapat lain menyatakan Surono lebih Sukarnois ketimbang sebagai pengikut Soeharto. Namun pada masa pasca 1971 Surono ini banyak dipercaya Soeharto untuk menjabat jabatan strategis. Sebab itu lebih tepat untuk menyebut Surono sebagai *bonding* Soeharto.

Soeharto terhadap PKI, tetapi tidak pada Sukarno. Rata-rata mereka berasal dari keluarga priayi Jawa Timur dan merasa "gerah" dengan bangkitnya kaum teknokratik Masyumi-PSI di sekeliling Nasution yang indikasi nyatanya mereka lihat di aneka tuntutan aktivis KAMI dan KAPPI atas Sukarno.

Antara tanggal 25 hingga 26 Oktober 1966, para perwira Brawijaya ini melakukan pertemuan untuk merumuskan sikap "Keluarga Besar Brawijaya."[641] Hasil pertemuan tersebut adalah para perwira Brawijaya siap berdiri di belakang Sukarno. Untuk mengimbangi langkah Soeharto yang telah memegang Supersemar, Sukarno merencanakan berkunjung ke Surabaya pada tanggal 1 November 1966. Tidak hanya perwira di Divisi Brawijaya saja, di Surabaya juga terdapat Markas KKO Angkatan Laut yang secara tegas menyatakan sikap setia mereka terhadap Sukarno. Panglima Kepolisian Jawa Timur yaitu Sumarsono (Brigjen) memiliki hubungan kerabat dengan Sukarno, seperti juga Bambang Supeno. Selain itu elemen pro Sukarno dari PNI dan NU di Jawa Timur juga masih cukup besar.[642]

Pendukung Sukarno banyak berasal dari sayap kiri PNI dan organisasi pemudanya termasuk juga Partindo (partai kecil berhaluan kiri) serta Barisan Sukarno. Barisan Sukarno ini berupaya ditandingi oleh Front Pancasila yang bertujuan meminta militer segera menyapu bersih para simpatisan PKI-Gestapu di

www.setabasri.org

[641] *ibid.,* p. 209. Hadir di dalam pertemuan tersebut adalah Brigjen Soenarjadi (Pangdam Brawijaya), Sungkono (Mayjen), Bambang Sugeng (Mayjen), Sudirman (Letjen), Sarbini (Letjen), Basuki Rachmat (Letjen), dan Sumitro (Mayjen, kelak menggantikan Soenarjadi). Motor pertemuan tersebut adalah Kolonel Bambang Supeno, seorang perwira fanatik Sukarno yang mengelilingi dirinya dengan sejumlah perwira menengah yang disebut "Petir" dengan maksud melindungi Sukarno.
[642] *ibid.,* p. 210.

semua level birokrasi pemerintah.[643] Untuk mematahkan argumen para demonstran dan membangun keyakinan di kalangan pendukungnya, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia kini tengah berada di dalam tahap kedua revolusi yaitu tahap sosialis, dengan mana revolusi kini bertujuan untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme.[644]

Dalam sebuah isu yang beredar dikatakan bahwa Bambang Supeno, para perwira Brawijaya, KKO, dan kepolisian, berencana memasukkan Sukarno ke dalam perlindungan mereka dengan mencontoh para pemuda yang menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok dalam persiapan proklamasi. Namun, Sukarno memiliki pertimbangan lain yaitu ia tidak hendak memicu perang sipil.[645] Soeharto juga melarang Sukarno berangkat ke Surabaya guna menghadiri Peringatan hari Pahlawan 10 November 1966.[646]

Pada lain pihak, selain terhadap Subandrio dan Chaerul Saleh (juga Leimena), Soeharto dan koalisinya terus mereduksi akses para *bonding* Sukarno pada kekuasaan. Pada bulan September 1966, Jusuf Muda Dalam divonis hukuman mati.[647] Pada bulan Oktober di tahun yang sama giliran Soebandrio dituntut hukuman mati. Persidangan atas Soebandrio dan Jusuf Muda Dalam

www.setabasri.org

---

[643] *ibid.*

[644] Dampak dari pidato Sukarno ini adalah pada tanggal 20 November 1965 misalnya Deputi Menteri Luar Negeri Suwito Kusumowidagdo menyatakan Indonesia harus terus mempertahankan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Lihat *ibid.,* p. 210.

[645] *ibid.,* p. 211.

[646] Pernyataan Sukarno dilontarkan usai menerima surat dari Menteri Agama Saifuddin Zuhri yang menasihati Sukarno untuk bersabar dalam peminggiran posisinya. Larangan Soeharto ini memicu kemarahan Sukarno, yang ia tunjukkan melalui pernyataannya dalam acara peringatan Isra' Mikraj pada tanggal 9 November 1966 dengan menyatakan, "*Ya, saya akan bersabar… tetapi setelah Nabi mulai mengambil tindakan dan bahkan pergi berperang serta hal-hal lainnya; Saya juga akan mengikuti teladan Nabi Muhammad*." Lihat dalam *ibid.*

[647] Tuduhan atas Yusuf adalah subversi, korupsi, impor ilegal senjata, dan memiliki istri lebih dari yang diizinkan oleh hukum Islam (beristri enam orang).

dijadikan panggung untuk menunjukkan inkompetensi Sukarno dalam mengurus negara. Penyebarluasan persidangan tersebut kemudian disusul rekaman persidangan atas Omar Dhani, perwira TNI-AU kepercayaan Sukarno, pada bulan Desember 1966. Sama seperti persidangan Soebandrio dan Jusuf Muda Dalam bahwa persidangan Omar Dhani lebih difokuskan pada upaya mencari keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI[648] dan dengan demikian merupakan persidangan "politik" tersendiri atas Sukarno sebelum Nawaksara 1967.

Tekanan Soeharto atas Sukarno terus ditingkatkan. Pada sidang MPRS tanggal 5 Juli 1966 jabatan presiden seumur hidup Sukarno direncanakan untuk dicopot, termasuk segala ajarannya, sementara doktrin Marxis-Leninis dinyatakan sebagai ajaran terlarang kecuali untuk kebutuhan akademis.[649] MPRS juga merencanakan Pemilu akan diselenggarakan tidak lebih lama dari bulan Juli 1968.

Jika mengikuti logika perwira radikal semisal Kemal Idris, Dharsono, ataupun Sarwo Edhie, maka kudeta langsung atas Sukarno kemungkinan besar dapat terjadi. Namun, yang tidak bisa diukur oleh ketiganya adalah dampak dari tindakan tersebut. Soeharto tidak memilih itu karena cara mereka dalam jangka panjang justru akan kontraproduktif sebab akan memunculkan kerugian fisik yang besar. Soeharto berada di dalam garis pemikirannya sendiri, dan dengan Supersemar Soeharto kini memandang dirinya telah memiliki kekuasaan yang lebih besar ketimbang kekuatan para perwira lain.[650]

www.setabasri.org

---

[648] *ibid.,* p. 212.
[649] Justus M. Van Der Kroef, Indonesia: …, *op. cit.,* p. 22-23.
[650] Entah diketahui atau tidak oleh Soeharto, Dharsono (Pangdam Siliwangi), Sarwo Edhie (komandan RPKAD), dan Kemal Idris (pejabat Pangkostrad) melakukan pertemuan di Cipayung pada tanggal 25 dan 26 Januari 1967. Mereka merencanakan persiapan militer untuk menghadapi krisis yang tidak menentu. Kesimpulannya adalah "Kesepakatan antara Siliwangi, Kostrad dan

Pada lain pihak, Sukarno terus memberikan perlawanan dan mungkin masih berharap PKI masih bisa dibangkitkan kembali.[651] Kampanye PKI yang efektif di segmen masyarakat miskin, proletariat tak bertanah, pekerja bangunan, pelayan publik bergaji rendah, mahasiswa dan akademisi yang mencari pekerjaan "kerah putih" membuat mereka menjadi pendukung setia partai tersebut.[652] Di Jawa Timur dan Jawa Tengah kerap terjadi *clash* antara kelompok pemuda Muslim versus PNI. Sebagai loyalis Sukarno, maka pada bulan Januari 1967 KKO merancang Komando Regional Timur baru yang berbasis di Surabaya di bawah pimpinan Brigjen Suwadji. Kekuasaan Suwadji meliputi seluruh KKO di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Irian Barat.[653] Suwadji juga berpidato di depan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) untuk mempersoalkan dokumen andalan Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 dengan menyatakan bahwa isinya: "dengan tegas menyatakan bahwa adalah tugas kita untuk melindungi otoritas presiden, panglima angkatan bersenjata dan semua ajarannya".[654]

Di Semarang, Komandan Maritim ke-8 Komodor Sudjadi memperingatkan mengenai adanya kelompok kontra revolusioner kanan yang berupaya

www.setabasri.org

RPKAD diharapkan dapat mempercepat kehancuran Orde Lama". Lihat Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 213.

[651] Justus M. Van Der Kroef, Indonesia: …, op. cit., p. 24. Hingga pertengahan tahun 1965, di Jawa dan Sumatera saja terdapat sekitar 2,5 juta anggota aktif di samping puluhan ribu pendukung di organisasi satelitnya.

[652] *ibid*., p. 24.

[653] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 214. Dalam Peringatan Ulang Tahun KKO Suwadji menyatakan "dirasa perlu untuk memiliki pasukan yang siap berperang kapan saja" [it was felt necessary to have troops ready for battle at any time].

[654] *ibid.*, p. 214. Dengan demikian bagi Suwadji pelaksana Supersemar tidak boleh mendegradasi kekuasaan politik Sukarno sebagaimana ditampakkan melalui perilaku dan langkah-langkah politik Soeharto.

menjungkalkan Sukarno.[655] Di kalangan bawah KKO dan personil sipilnya, figur Sukarno masih cukup kuat.[656] Basis mereka terutama terkonsentrasi di Surabaya dengan mana pengaruh PKI juga masih cukup kuat.[657] Selama bulan Juli 1966 Soeharto bahkan terpaksa menarik beberapa ribu personil TNI-AD yang dinilai berada di pihaknya menuju Jakarta.[658]

Melalui sejumlah kenyataan ini Soeharto berhitung bahwa kunci mendominasi Sukarno adalah tidak secara terbuka menyerang kewibawaannya. Soeharto pun tidak siap menghadapi karakter pasukan Brawijaya, terlebih KKO karena ia sama sekali belum pernah berdinas di sana. Sebab itu Soeharto pun mulai bersikap keras atas aktivitas KAMI dan KAPPI dianggap terlalu frontal sikapnya terhadap Sukarno.

Taktik Soeharto dalam menghadapi gerakan pro Sukarno adalah memoderasi perlakuan terhadap pihak yang terlibat Gestapu. Contohnya pada tanggal 22 Juli 1966 vonis atas Mayor Udara Gatot Sukrisno adalah seumur hidup bukan vonis mati seperti di dalam dakwaan pendahuluan. Vonis atas Sukrisno merupakan upaya "menciptakan keadaan yang meringankan" (*mitigating*

www.setabasri.org

[655] Komandan Kepolisian Regional Jawa Timur Brigjen Sumarsono juga menyatakan, "Bung Karno adalah satu-satunya pemimpin yang sangat disayangi oleh seluruh rakyat Indonesia". Crouch juga menulis bahwa terdapat rumor bahwa pasukan Brawijaya siap untuk menyerbu Jakarta apabila posisi Sukarno terancam. Lihat Harold Crouch, The Army …, *op. cit.*, p. 214.
[656] Justus M. Van Der Kroef, Indonesia: …, *op. cit.,* p. 27.
[657] Cukup sulit untuk membedakan antara mereka yang pro pada Sukarno dengan yang pro pada PKI pada saat itu. Kenyataannya sentimen anti Soeharto yang cukup kuat di tubuh KKO menurut Yusuf Wanandi diakibatkan adanya kenyataan bahwa banyak kadet yang direkrut berasal dari kalangan Pemuda Rakyat. Lihat Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 63.
[658] Ini kemungkinan sebagai upaya antisipasi gerakan militer di luar TNI-AD yang dapat membahayakan posisinya saat sekitar 3000 personil KKO telah menggali parit pertahanan di sekitar markas mereka di Jakarta lalu mengendarai truk berkeliling kota di malam hari saat melewati markas TNI-AD sambil meneriakkan kata-kata "Hidup Sukarno." Lihat Justus M. Van Der Kroef, Indonesia: …, *op. cit.,* p. 27.

circumstances) yaitu upaya Soeharto untuk menurunkan ketegangan politik. Tujuan lainnya adalah menghindari resistensi yang lebih besar dari TNI-AU yang sejak awal posisinya terus terdesak akibat masalah Gestapu ini.

Saat Soeharto, berdasarkan ketetapan MPRS pada tanggal 25 Juli 1966, melakukan perampingan kabinet dan dua orang dekat Sukarno yaitu J. Leimena dan Ruslan Abdulgani tidak termasuk, Sukarno memprotesnya. Setelah membaca draf Soeharto, maka pada tanggal 28 Juli 1966 Sukarno tiba-tiba mengumumkan bahwa Leimena dan Abdulgani harus pula diangkat sebagai menteri. Pidato Sukarno selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Oktober 1966 telah memancing gejolak akibat ajakannya untuk melanjutkan Konfrontasi Malaysia, mempertahankan konsep Nasakom, dan sejumlah ajaran yang berasal dari dirinya.[659]

Ancaman paling nyata diberikan Soeharto atas Sukarno pada saat pertama kali bertemu Marshall Green (Duta Besar AS) pada tanggal 26 Mei 1966. Pada pertemuan itu Soeharto menyatakan keinginannya untuk mengakhiri Konfrontasi Malaysia.[660] Pejabat Kedutaan Besar AS menyarankan untuk membantu Indonesia (Nasution dan Soeharto) dalam menghadapi PKI.[661] Para pimpinan TNI-AD juga memperingatkan Inggris agar tidak mengambil keuntungan dari operasi pembersihan PKI yang tengah mereka lakukan.[662]

www.setabasri.org

---

[659] Pasca pidato tersebut terjadi rangkaian aksi massa antara kelompok mahasiswa yang saling bersaing, kelompok KKO versus TNI-AD pro Soeharto, yang terjadi baik di Jakarta maupun Bandung. Lihat Justus M. Van Der Kroef, Indonesia: …, *op. cit.,* p. 32.

[660] Ang Cheng Guan, United States-Indonesia Relations: The 1965 Coup and After. 2003. *War & Society*. 21:1, pp. 119-136., p. 135.

[661] *ibid.,* p. 128.

[662] Banyak perwira TNI-AD anti komunis yang bersemangat dalam upaya membersihkan PKI dan Nasution adalah garda depannya. Namun, hal yang membuat hambatan bagi Nasution dalam melakukan pembersihan total atas PKI adalah Sukarno. Melakukan pelarangan atas PKI sama dengan melawan Sukarno secara terbuka sebab mereka paham PKI adalah kelompok sipil andalan Sukarno untuk mengimbangi mereka. Lev menulis empat pertimbangan Nasution sebelum

Atas pendekatan yang dibawakan "Keluarga Besar Brawijaya", maka Sukarno mengirimkan surat tawaran kepada Soeharto pada tanggal 8 Februari 1967. Inti surat tersebut adalah ia mau menyerahkan pemerintahan harian kepada Soeharto sementara Sukarno sendiri berperan sebagai pemimpin negara dan memiliki hak untuk menentukan garis besar pemerintahan. Tawaran *trade-off* Sukarno ini kemudian ditolak Soeharto.[663] Secara tepat Harold Crouch menggambarkan pola dominasi-submisi yang paling minimal risiko seperti ditunjukkan Sukarno dan Soeharto sebagai berikut:

> *President Sukarno had refused to respond to the invitation of his most militant followers. who wanted him to lead the resistance from East Java; General Suharto resisted pressure from his militant allies to take action against the president and his supporters that might have provoked Sukarno's followers to rise in his defense*.[664]
>
> [Presiden Sukarno menolak untuk merespons keinginan pengikut militannya, yang menghendaki dirinya untuk memimpin perlawanan dari Jawa Timur; Jenderal Soeharto melawan tekanan dari aliansi militannya untuk segera mengambil tindakan atas presiden dan para pendukungnya yang malah akan memprovokasi pendukung Sukarno meningkatkan pertahanannya].

Soeharto mungkin telah cukup jelas melihat bahwa apabila dominasi Sukarno dilakukan secara konstitusional, maka ia akan menang tanpa kerugian fisik besar. Dalam cara pandang Biopolitik, maka fokus utama Soeharto adalah menghindari dampak merusak dari persaingan kekuasaan secara fisik. Sebab itu

www.sotabasri.org

G30S/PKI atau sesudahnya yang mengakibatkan ia ragu untuk mengambil-alih kepemimpinan dengan cara melancarkan tindakan tegas atas PKI. Lihat *ibid*. Juga dapat dilihat dalam Daniel S. Lev, The Political Role of the Army in Indonesia. 1964. *Pacific Affairs*. Vol. 36, No. 4 (Winter) pp. 349-364., p. 358-359.

[663] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 216.

[664] Harold Crouch, The Army …, *op. cit.,* p. 219.

clash bersenjata antara kelompok pendukung Sukarno yang juga sama-sama anti komunis dengan kelompok Soeharto harus diperkecil kemungkinan terjadinya. Crouch juga menulis bahwa Soeharto mengingatkan para anggota formasi koalisinya bahwa di tubuh "Orde Baru" ada kubu rasional dan irasional. Kubu irasional ini apabila menemukan "pemecatan Sukarno secara tidak hormat" akan bangkit melawan dan kembali berpihak kepada Orde Lama.

Pada lain pihak, di tingkat daerah merebak desakan agar Sukarno segera diberhentikan dan digantikan oleh pemangku Supersemar. Misalnya DPRD-GR Jawa Barat mendesak pimpinan MPRS agar memberhentikan Sukarno dari jabatan Presiden dan menyerahkan pimpinan negara kepada Pemegang Supersemar.[665] Selain itu Soeharto juga meminta Sarbini, (Letjen, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi) agar melakukan pendekatan personal dengan Sukarno dalam menghadapi membesarnya desakan mundur atas dirinya.

Aneka guncangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia akibat pertikaian dominasi Sukarno-Soeharto disepakati diselesaikan melalui pihak ketiga yaitu MPRS, yang dipicu oleh pengumuman Sukarno tanggal 20 Februari 1967. Dalam pengumuman tersebut Sukarno menyatakan bahwa ia akan melakukan sejumlah

www.setabasri.org

[665] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968, *op.cit.*, h. 155

hal.[666] Di kalangan sipil terus hadir suara-suara yang menekan Sukarno untuk sesegera mungkin mengakhiri jabatannya.[667]

Sebelumnya Sukarno telah mengirimkan surat kepada Soeharto untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional.[668] Penolakan Soeharto atas pengumuman Sukarno sesungguhnya setelah melalui serangkaian negosiasi politik antara Sukarno dengan pihak militer.

Pada tanggal 10 Februari 1967 Soeharto dipanggil untuk menghadap Sukarno yang intinya membicarakan penolakan ABRI atas isi surat Presiden tertanggal 7 Februari 1967.[669] Atas jawaban tersebut Sukarno menyatakan tetap akan melakukan "pendekatan" dan meminta pertemuan keesokan harinya dengan para panglima TNI.[670] Pada tanggal 12 Februari 1967 kembali Presiden melakukan pertemuan di Istana Bogor guna membahas cara mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional dan penyerahan kekuasaan negara.[671] Para panglima

www.setabasri.org

[666] Pertama, ia akan mentransfer kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto tanpa mengurangi makna dan semangat UUD 1945. Kedua, Soeharto harus melaporkan pelaksanaan transfer kekuasaan pemerintahan kepada Sukarno setiap saat diperlukan. Ketiga, berpesan agar seluruh pimpinan bangsa baik sipil maupun militer untuk memperkuat kesatuan nasional dalam mendukung transfer kekuasaan pemerintahan yang ia maksudkan. Keempat, bahwa Sukarno mengeluarkan pengumuman ini atas dasar rasa tanggung jawab berdasarkan Pancasila. Presiden Republik Indonesia, Pengumuman, 20 Februari 1967. Lihat O. G. Roeder, The Smiling …, op. cit., p. 243-244.

[667] Pada tanggal 7 Februari 1967 Ketua Umum Partai MURBA, Sukarni Kartodiwiryo, menyatakan bahwa partainya akan membenarkan apabila Soeharto mengambil alih kepemimpinan negara dari Sukarno. G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968, op. cit., h. 156.

[668] Dalam surat tersebut Sukarno mempersoalkan pembagian kekuasaan pemerintahan antara Presiden dan Pemegang Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966 (Soeharto). Sukarno juga menyatakan keinginannya menyerahkan sebuah tugas khusus pada Soeharto apabila memungkinkan. Menurut Sukarno pembagian kewenangan ini sangat penting untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional. Namun, setelah Soeharto membahas surat tersebut dengan para panglima TNI-AU, TNI-AL, dan TNI-AK, Soeharto menyatakan tidak dapat meluluskan keinginan Sukarno tersebut. Lihat *ibid.*, h. 155-156.

[669] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968, op. cit., h. 157.

[670] Pertemuan 11 Februari 1967 juga tidak mencapai kesepakatan. Lihat dalam *ibid.*

[671] *ibid.*

(termasuk Soeharto) menghendaki transfer kepemimpinan nasional harus diselenggarakan melalui jalur konstitusional yakni melalui MPRS. Sukarno tetap bersikukuh akan menempuh mekanisme personal dan meminta para panglima kembali berbicara dengannya pada tanggal 13 Februari 1967. Saat pertemuan 13 Februari 1967 terjadi, pihak ABRI hanya mengirim dua wakil mereka yaitu Sutjipto Judodihardjo (Jenderal Polisi) dan Maraden Panggabean (Letjen TNI-AD). Pembicaraan pun tetap sama yaitu tidak memperoleh kesepakatan dan akhirnya pihak ABRI menghentikan upaya pendekatan transfer kekuasaan secara personal.

Namun Sukarno tidak berhenti melakukan negosiasi. Secara mendadak, pada tanggal 20 Februari 1967 Sukarno memanggil salah satu panglima yang ia anggap dekat yaitu Muljadi (Laksamana/Menpangal) ke Istana Merdeka. Namun, sebelum berangkat Muljadi terlebih dahulu menemui Soeharto yang memberikan sejumlah pesan kepada Sukarno agar disampaikan olehnya. Kepada Muljadi Presiden menyampaikan bahwa ia menerima aneka petunjuk dari Soeharto dan mengundang Soeharto serta ketiga panglima angkatan lainnya untuk menyaksikan penandatanganan penyerahan kekuasaan pada pukul 17:00 di Istana Merdeka.[672]

Pada tanggal 22 Februari 1967 Sukarno mengumumkan kesediaannya untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto selaku Pemegang Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966 yang ia sampaikan secara langsung di hadapan anggota Kabinet Ampera pada pukul 19:30 malam.[673] Sukarno menyatakan keinginannya

www.setabasri.org

[672] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968, op. cit., h. 158.
[673] *ibid.,* h. 159.

menyerahkan submisi kepada Soeharto secara bersyarat, melalui pengumuman berikut:

> "(1) Kami, Presiden Republik Indonesia / Mandataris MPRS / Panglima Tertinggi ABRI, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966, Jenderal TNI Soeharto, sesuai dengan jiwa Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945; (2) Pengemban Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu; (3) Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersenjata untuk terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966 seperti di atas, dan; (4) Menyampaikan dengan rasa penuh tanggungjawab pengumuman ini kepada rakyat dan MPRS."[674]

Aneka proses yang dilalui Soeharto dalam melakukan dominasi, cara, dan hasilnya secara ringkas digambarkan dalam **Gambar 4** *Dominasi dalam Hirarki Dyadic Sukarno-Soeharto*.

www.setabasri.org

[674] *ibid.*

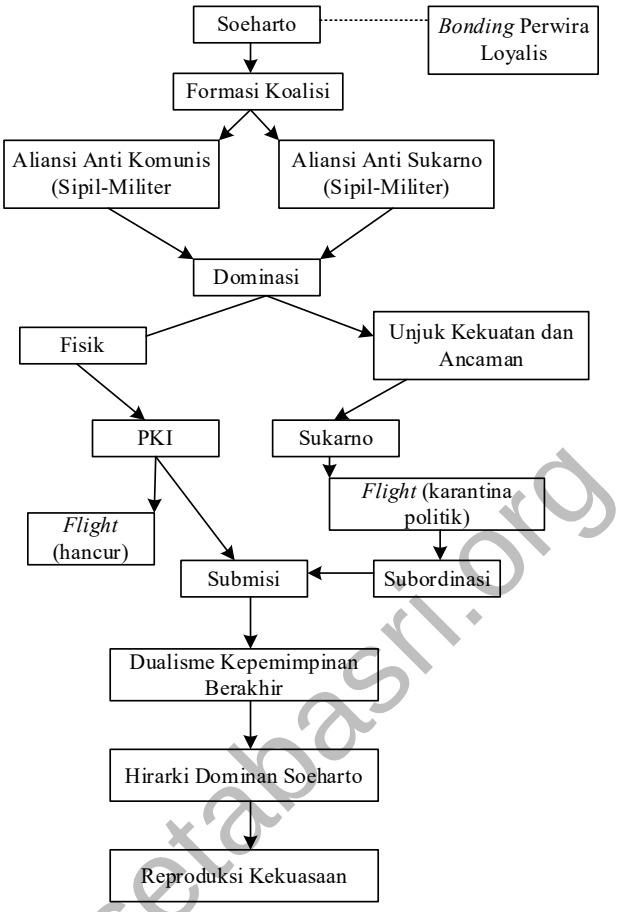

Gambar 4 Dominasi dalam Hirarki Dyadic Sukarno-Soeharto

Secara umum, awalnya Sukarno lebih menekankan mekanisme *dispute settlement* dengan menggunakan penyelesaian yang bersifat *trade-off* yaitu ia selaku Presiden memberi semacam tugas kepada Soeharto untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari tanpa perlu melibatkan MPRS. Namun, dengan instingnya Soeharto tidak ingin masuk perangkap Sukarno karena apabila kekuasaan ditransfer secara demikian, tanpa melibatkan pihak ketiga (MPRS), maka dapat ia akan terus berada di bawah dominasi Sukarno.

Sukarno juga melakukan "*flight*" dalam arti dipaksa untuk menjauh dari pentas politik melalui karantina politik yang didukung oleh TAP MPRS. PKI dan

www.setabasri.org

Sukarno lalu menunjukkan submisinya kepada Soeharto. Dengan munculnya submisi PKI maka salah satu faktor penyumbang instabilitas politik menghilang. Dengan submisi Sukarno, dualisme kepemimpinan nasional bisa diakhiri. Dengan dominasinya Soeharto mulai masuk pada tahap pertama untuk mampu menjamin prediktabilitas bagi populasi guna mengakses sumber daya juga melakukan reproduksi. Namun, persoalan belum selesai karena kini Soeharto berhadapan dengan hirarki kompleks kekuatan politik.

B. Dominasi dalam Hirarki Kompleks

Untuk membahas pertanyaan kedua maka akan dibahas konsep dominasi dalam hirarki kompleks. Sejak 1967 dan semakin pasti tahun 1968 Soeharto merupakan *alpha male.* Dalam kajian Biopolitik maka *alpha male* selalu memiliki monopoli, baik untuk mengakses komoditas atau sumber daya maupun melakukan reproduksi secara lebih leluasa. Namun, reproduksi kekuasaan Soeharto menghadapi persoalan akibat adanya tantangan dari sejumlah hirarki yang dahulu merupakan bagian dari formasi koalisinya dalam merebut dominasi dari Sukarno. Dengan demikian persoalan dominasi kekuasaan Soeharto harus diselesaikan dengan melakukan mekanisme dominasi-submisi di dalam hirarki kompleks.

Menurut Somit dan Peterson baik hirarki *dyadic* maupun hirarki kompleks memiliki kesamaan pada aspek tujuan yaitu bahwa apabila dominasi di kedua jenis hirarki dapat diterapkan maka situasi *turmoil* dalam kehidupan spesies akan terhenti. Dengan terhentinya pergolakan maka akses atas sumber daya dan reproduksi yang hendak dilakukan oleh spesies dapat terselenggara.

www.setabasri.org

Perbedaan penting antara hirarki *dyadic* dengan hirarki kompleks adalah bahwa yang terakhir bukan penjumlahan sederhana dari total hirarki *dyadic* yang ada. Soeharto tidak mungkin mengeliminasi seluruh hirarki karena tidak sesuai dengan dorongan *innate* spesies sehingga di kelompok manusia mana pun, hirarki akan selalu terbentuk. Manakala manusia berkelompok dan kelompok tersebut semakin besar maka muncul hirarki kompleks. Hirarki satu dan lainnya masing-masing memiliki *alpha male* dan pengikut masing-masing. *Alpha male* di satu hirarki belum tentu menerima dominasi *alpha male* hirarki lain. Hal paling maksimal yang mampu dilakukan Soeharto adalah memastikan bahwa ia mampu mendominasi para *alpha male* di masing-masing hirarki aktual yang ada agar ia menjadi *alpha male* paling dominan lintas hirarki.

1. *Alpha Male* Baru dan Hirarki Kompleks

Untuk lebih memetakan posisi aneka hirarki pasca dominasi Soeharto atas Sukarno, Donald Hindley mencatat bahwa pada awal 1968 sekurangnya terdapat empat kelompok yang masing-masing membentuk hirarki dan terlibat upaya saling mendominasi. Keempat hirarki tersebut adalah kelompok radikal di dalam tubuh TNI-AD, Soeharto sentris, kelompok radikal sipil, dan para pimpinan partai politik utama.[675] Keempat hirarki ini menjadi persoalan Soeharto hingga tahun 1971.

Sama seperti Samson, maka Hindley pun memandang kelompok radikal cenderung memandang negatif kekuatan politik Islam tetapi bukan atas dasar

[675] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.*, p. 55. Namun, Hindley menjelaskan bahwa kelompok bersenjata (militer) telah memegang peran menentukan, dan Soeharto bertindak selaku arbiter puncak.

www.setabasri.org

persaingan nilai melainkan kecenderungan moralitas, rasa ingin benar sendiri, dan sikap negatif mereka atas budaya Barat yang bagi kaum radikal justru dianggap punya banyak aspek positif.[676] Kelompok radikal kendatipun merupakan koalisi Soeharto tetapi bukan termasuk *bonding*-nya. Soeharto dapat bersepakat dengan sikap negatif kelompok radikal atas Islam politik tetapi dengan alasan berbeda.

Pertama, sebagai *alpha male* Soeharto harus memperoleh submisi kelompok radikal ini. Kendati sama dengan kelompok radikal dalam hal anti PKI, kelompok Soeharto sentris menganggap manuver kelompok radikal atas Sukarno terlalu frontal. Kelompok Soeharto ini lebih menyukai pendekatan gradual atas Sukarno bukan drastis. Kelompok Soeharto sentris mendapat posisi dominan melalui kepemimpinan Soeharto yang kemudian "menjauhkan" kelompok radikal dari pusat kekuasaan. Energi kelompok radikal dimanfaatkan Soeharto untuk membasmi PKI dan kaum Sukarnois, sementara Soeharto sendiri tetap mengambil posisi moderat.

Kedua, kelompok Soeharto sentris sebagian besar terdiri atas para *bonding* Soeharto, terutama para anak buahnya di Divisi Diponegoro. Kelompok Soeharto sentris juga ditulangpunggungi kelompok abangan dan kejawen. Ali Moertopo sendiri kendati pun berlatar belakangkan santri dari wilayah Pekalongan, tetapi sebagai anak buah Soeharto ia mengambil posisi yang sama dengan pemimpinnya itu.

www.setabasri.org

[676] *ibid.*, p. 56. Divisi Siliwangi termasuk kesatuan yang ikut serta dalam memadamkan pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat periode 1948 hingga 1961.

Ketiga, kelompok radikal sipil serupa dengan kelompok radikal TNI-AD dalam hal sikap terhadap PKI dan Sukarno.[677] Mereka tergabung dalam KAP-Gestapu juga Front Pancasila. Sebagian anggotanya setelah Maret 1967 telah terserap ke dalam partai politik juga masuk ke dalam parlemen (DPR-GR). Pada pokoknya kategorisasi kelompok radikal sipil ini adalah mereka yang beraktivitas di dalam kelompok-kelompok aksi seperti KAP-Gestapu, KAMI, dan KAPPI.[678] Secara umum, kelompok-kelompok ini bercirikan santri dan non santri – kecuali juga berasal dari pulau-pulau luar Jawa dengan kecenderungan gaya pemikiran dekat dengan PSI dan Masyumi.[679]

Keanggotaan aktivis radikal di setiap kesatuan aksi biasanya ganda. Misalnya Zamroni menjabat ketua KAMI sekaligus PMII. Juga Husnie Thamrin yang selain ketua KAPPI sekaligus pula Ketua PII (Pelajar Islam Indonesia). KAPPI juga kemudian pecah dengan salah satu unsurnya membentuk KAPI pada bulan Juni 1966. Basis dukungan KAPI adalah Jakarta dan Bandung yang pada bulan Desember 1967 kepemimpinannya mayoritas bukan berasal dari Jawa.[680] Dengan demikian maka secara primordial, tuntutan dari KAPPI sedikit ataupun banyak menyuarakan sikap spesies yang berasal dari luar Jawa atas masalah kepemimpinan nasional.

www.setabasri.org

---

[677] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.*, p. 57.
[678] Partai Katolik disebut karena elemen sipil radikal cukup kuat afiliasinya dengan Partai Katolik, misalnya mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI.
[679] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.*, p. 58. Dalam KAMI, HMI secara kuantitas dominan, demikian pula dalam KAPPI, dengan mana lebih banyak mereka terafiliasi dengan Masyumi.
[680] *ibid.*, p. 58. Karena pimpinan puncaknya terdiri atas satu orang beretnis Batak Toba, satu orang beretnis Jawa, satu orang beretnis Manado, satu orang beretnis Minangkabau, dan satu orang beretnis Ambon. Empat pimpinan KAPI di Bandung terdiri atas satu orang beretnis Sunda, satu orang beretnis Jawa, satu orang beretnis Batak Karo, dan satu orang adalah peranakan Jerman-Aceh. Pada lain pihak KAPPI Jakarta pimpinannya terdiri atas tiga orang Batak Mandailing dan satu orang Minangkabau.

Sikap politik sejumlah komite aksi pun relatif sama dalam tiga hal. Pertama, sejak TNI-AD mendominasi kekuasaan maka tujuan mereka (komite aksi) adalah serupa yaitu bahwa modernisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia hanya bisa dicapai melalui pemberian dukungan atas TNI-AD. Kedua, anggota komite aksi berasal dari kaum minoritas Indonesia serta pengikut setia aliran politik. Ketiga, sikap anti mereka atas Sukarno lambat-laun akan meredup kecuali mereka diberikan kenyataan bahwa kondisi pos-Sukarno yang dijanjikan benar-benar nyata untuk terwujud.[681]

Kelompok sipil radikal sesungguhnya juga terbelah. Tokoh sipil radikal seperti Subchan Zaenuri Ershan adalah tokoh muda NU. Sementara itu Harry Tjan Silalahi, Liem Bian Kie, Liem Bian Khoen, Cosmas Batubara adalah tokoh muda Katolik. Saat Subhan dan kelompok Islam mulai mempersoalkan kembali posisi Islam dalam rancangan GBHN kelompok sipil radikal ini mulai berselisih jalan dan membentuk hirarki baru. Unsur-unsur santri merasa bahwa kelompok Soeharto sentris cenderung memusuhi Islam dan mereka paling maksimal hanya terserap ke dalam parlemen, tetapi tidak eksekutif. Sebaliknya kelompok Katolik menjalin kerja sama dengan kelompok Soeharto sentris dan lebih mampu mempengaruhi arah kebijakan eksekutif negara.

Keempat adalah kelompok di dalam partai politik. Partai politik berusaha merebut kekuasaan sesuai garis ideologi masing-masing. Dari partai-partai politik yang ada, maka Partai Katolik yang kendati pun kecil tetapi mampu menjalankan peran lebih besar di dalam eksekutif kekuasaan Soeharto. Partai-partai lain seperti

[681] Donald Hindley, Aliran …, *op. cit.*, p. 59.

www.setabasri.org

NU, PNI, Parmusi tidak terlalu berperan di eksekutif yaitu Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan I, kendati hirarki mereka telah memberikan bantuan signifikan saat Soeharto mencapai dominasi dalam hirarki *dyadic.*

Dari keempat kelompok ini maka lingkaran koalisi Soeharto dalam upaya mendominasi hirarki kompleks terbangun atas kelompok Soeharto sentris dan Katolik. Karakter kedua kelompok ini berbeda dengan lingkaran koalisi Soeharto yang berasal dari lingkaran pemikir sipil-militer Seskoad yang relatif bertindak secara terbuka. Koalisi Soeharto Sentris-Katolik sama-sama menghendaki Pancasila dan bukan salah satu agama sebagai ideologi negara serta rasa terancam yang cukup identik atas bangkitnya kekuatan politik Islam. Tidak ada keraguan bagi kedua kelompok ini bahwa militer khususnya TNI-AD yang harus memimpin politik nasional.

Upaya melakukan dominasi atas kekuatan politik Islam termasuk partai-partai politiknya lebih ditentukan oleh karakter Soeharto dan lingkarannya. Terdapat aspek *xenofobia* dan etnosentrisme yang mengemuka. *Xenofobia* terjadi dalam konteks memandang Islam sebagai kekuatan "dari luar" yang akan menghegemoni tradisionalisme Jawa melalui sifat kosmopolitan dan egalitariannya. Kalangan perwira abangan dan kejawen di dalam lingkaran Soeharto sentris khawatir jika kelompok Islam berkuasa maka syariat Islam juga akan ditimpakan atas mereka. Sikap *xenofobia* ini pun cenderung menguat di kelompok Katolik seperti termuat dalam teks *From Madiun* yang diduga ditulis Pater Beek dan tersebar di kalangan para aktivis Katolik. Menjelang Pemilu 1971 Soeharto memasang Aloysius Witono seorang Katolik-Jawa sebagai Pangdam

www.setabasri.org

Siliwangi yang membawahi Jawa Barat dengan mana pengaruh Masyumi cukup kuat di sana. Pada tingkat pusat Soeharto menunjuk Panggabean yang beretnis Batak Karo dan beragama Kristen sebagai pelaksana harian tugas Menhankam yang menyentralisasi seluruh komando pasukan. Karena keminoritasannya, maka Maraden dan Witono akan terpaksa selalu bergantung pada Soeharto.

Aspek primordial seperti etnosentrisme mengemuka dalam penunjukan posisi-posisi staf dan komandan di setiap eselon angkatan bersenjata pasca reorganisasi 5 Oktober 1969. Para perwira Jawa dari Divisi Diponegoro dan Brawijaya mendominasi, kendati ada pula dari Divisi Siliwangi, tetapi mereka terbelah dua, antara yang bisa mengikuti pandangan Soeharto sentris dan yang "terbuang" seperti dialami Kemal, Sarwo, dan Dharsono. Banyaknya perwira Jawa dari Divisi Diponegoro dan Brawijaya di posisi Pangdam mungkin akibat Soeharto hendak membangun dominasi tradisionalisme Jawa dan mencegah "*chauvinisme*" etnis dari wilayah-wilayah luar Jawa seperti terjadi pada pemberontakan PRRI/Permesta di masa Sukarno.

Kedua konsep ini yaitu *xenofobia* dan etnosentrisme di dalam lingkaran Soeharto sentris dan koalisi barunya (kelompok Katolik, teknokrat ekonomi, dan Seskoad) sedapat mungkin digunakan guna mencegah bangkitnya kekuatan politik Islam. Perwira Soeharto sentris menganggap bahwa diri mereka adalah pilar dominasi Soeharto, dan perasaan ini semakin signifikan pasca kembali aktifnya tokoh-tokoh eks Masyumi. Lingkaran Soeharto sentris, Seskoad, kelompok Katolik, juga angkatan bersenjata tidak menghendaki kembalinya polemik dasar negara yang dikhawatirkan menciptakan instabilitas politik.

www.setabasri.org

Salah satu sasaran dominasi Soeharto dalam hirarki kompleks adalah kekuatan politik Islam yang terjelma dalam partai politik.[682] Juga termasuk penghambatan Soeharto atas rencana Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) dengan karakter Islam modernis serta pendukung dari lingkaran Muhammadiyah, bekas para pendukung Masyumi, dan elemen-elemen tidak puas dalam NU[683]dan Hatta pun terutama menekankan pelibatan elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII).[684] Mengenai Masyumi sendiri masih banyak individu dominan di partai ini yang kompetensi dan pengaruhnya cukup besar terutama di Jawa Barat dan pulau-pulau luar Jawa.[685]

Soeharto kini adalah seorang *alpha male* baru pengganti Sukarno tetapi masih dalam proses ke arah dominasi maksimum. Dalam cara pandang Biopolitik unsur *nature* dalam perilaku politik manusia adalah pengkhianatan, pemeliharaan *status quo*, penghancuran *status quo*, juga menjalin aliansi dengan individu lain yang bersedia menjadi pengikut satu individu dominan. Demikian pula dalam

www.setabasri.org

[682] Muslim modernis belum beroleh representasi signifikan sejak Masyumi dibubarkan. Sementara NU masih berdiri dan dalam periode 1968-1971 Soeharto tidak terlampau mempermasalahkan para individu dominan di partai ini, berbeda dengan Masyumi. Sesungguhnya kaum modernis Islam memiliki dua rencana. Pertama, rehabilitasi Masyumi. Kedua, rencana Hatta (proklamator) membentuk Partai Demokrasi Islam Indonesia. Lihat Remy Madinier, The Masyumi …, *op. cit.,* p. 431.

[683] Hatta dan pendukungnya bahkan telah mempersiapkan konstitusi partai serta mempublikasikan struktur dan tujuan partai. Lihat Roger K. Paget. The Military in Indonesian Politics: The Burden of Power. 1968. *Pacific Affairs*. Vol. 40, No. 4/3 (Winter) pp. 294-314., p. 399.

[684] Tujuan Hatta mendirikan PDII adalah memberi contoh bagaimana seharusnya partai berfungsi. Sebab itu Hatta berharap pada generasi muda seperti Mashud Sosrohardjo, Ismail Hasan Metareum, Ustadz H. Abus Salam Djaelani (alumni Kairo pengelola madrasah di Mampang Prapatan), H. Salihin Hasan (alumni Kairo dan Paris), Nuckman Sjarief (pengusaha), Zuber Hussein (pengusaha), Harjono (pengusaha, bekas mahasiswa Hatta di UGM), Januar Hakim (sarjana teknik), Mohammad Daud Ali, Norman Razak, Rosman Anwar, Ibrahim Madyulao (pengusaha), Kami Tjokroaminoto (pernah menjabat bagian Administrasi Universitas Nasional), Kamarlsjah (ahli koperasi), Habibah Daud (dosen UI), Dokter Sulastomo (mantan ketua PB HMI), dan Deliar Noer. Selain itu dibentuk juga sebuah lembaga bernama Lembaga Islam dan Pengetahuan Masyarakat. Lihat Deliar Noer, Mohammad …, *op. cit.,* h. 633.

[685] Mereka adalah M. Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Burhanuddin Harahap, M. Roem, Asaat,

kekuasaan, Soeharto mengikuti jalur alamiah perilaku politik manusia yang tidak jauh dengan sejumlah ciri yang telah disebutkan. Sekurangnya sejak 1968 upaya Soeharto dalam memantapkan dominasi memperoleh tantangan dari sejumlah hirarki.

a. Penyingkiran Individu Dominan

Seperti telah dijelaskan dalam Bab III penyingkiran lawan potensial terutama dilakukan Soeharto di basis kekuasaannya sendiri yaitu TNI-AD. Selanjutnya Soeharto harus memastikan dirinya menjadi satu-satunya *alpha male* pemegang otoritas tempur angkatan bersenjata. Hal yang paling umum diketahui adalah penyingkiran Soeharto atas para *king makers* yaitu trio Sarwo Edhie Wibowo, Kemal Idris, dan H.R. Dharsono. Mengikuti pendapat Hindley ketiga perwira tersebut masuk kategori faksi radikal dalam proses peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Selain ketiganya, Nasution adalah individu dominan lain yang perlu disingkirkan oleh Soeharto.

Ahmad Kemal Idris adalah perwira yang berperan penting dalam menurunkan Sukarno dan menaikkan Soeharto.[686] Di masa Yani menjadi Pangad, Kemal masuk ke dalam Kostrad sebagai anak buah Soeharto dan menempatkan Kemal di Medan selaku Pangkopur Kostrad.[687] Mengingat tugas pencarian upaya damai dengan Malaysia berarti menentang Sukarno maka Kemal tentu perwira yang tepat untuk membantunya.

www.setabasri.org

[686] Salim Haji Said, *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Cetakan 1. Bandung: Mizan, 2016., h. 25.
[687] Namun, Kemal justru melaksanakan aneka tugas dari Soeharto yaitu mencari pemecahan damai dengan pihak Malaysia. Lihat dalam *ibid.,* h. 26-27.

Saat Soeharto menjadi Pangad, Kemal menggantikan dirinya sebagai Pangkostrad. Posisi Kemal yang anti komunis dan Sukarno membuat Soeharto memberikan kepercayaan terukur kepada dirinya. Kemal bersama kedua perwira koleganya adalah pihak yang "merancang, mendukung, bahkan mendesak Soeharto untuk secepatnya menjadi Presiden menggantikan Sukarno."[688] Kemal pula yang menggagas operasi pasukan tanpa tanda pengenal yang mengepung Istana Kepresidenan pada tanggal 11 Maret 1966.[689]

Gagasan Kemal yang membuat sidang kabinet istana bubar, mendorong tiga perwira yang dekat dengan Sukarno yaitu M. Jusuf, Basuki Rachmat, dan Amir Machmud berinisiatif menemui Soeharto. Wanandi menulis bahwa ketiganya bertanya pada Soeharto, "Apa yang harus kami lakukan?"[690] Soeharto kemudian berkata, "Katakan pada Sukarno kalau dia memercayakan kewenangannya kepada saya, saya akan menjamin stabilitas nasional dan keselamatannya."[691] Ketiganya lantas menemui Sukarno di Istana Bogor. Wanandi menyatakan terdapat dua poin penting dari Supersemar. Pertama, yang umum diketahui bahwa ia memberi Soeharto kekuasaan untuk mengambil langkah yang diperlukan guna memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Kedua, yang kurang umum diketahui adalah perintah Sukarno agar Soeharto "memintanya untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya, dan ajarannya."[692]

www.setabasri.org

---

[688] Salim Haji Said, Menyaksikan 30 Tahun …, *op.cit.*, h. 27.
[689] Kemal sebagai penggagas dan Sarwo sebagai pelaksana operasi pengepungan pasukan gelap tersebut.
[690] Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,* .h. 67.
[691] Kata-kata Soeharto semacam ini mengindikasikan adanya kepercayaan diri yang besar bahwa Soeharto seolah telah menguasai keadaan. Lihat *ibid*.
[692] Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,* h. 68. Ketiga perwira utusan Soeharto kembali malam hari dan langsung menemuinya. Alamsjah, *bonding* Soeharto memperlihatkan surat tersebut kepada Wanandi dan kaum anti Sukarno lain. Bersama surat itu juga diperlihatkan keputusan

Secara teoritis satu *alpha male* tidak akan bisa menerima adanya *alpha male* lain, baik aktual maupun potensial, berada di teritorialnya. Jika pun ada maka *alpha male* tersebut harus membangun kelompoknya sendiri jauh dari teritorial pusat *alpha male status quo.* Insting seperti ini melekat pada diri Soeharto sehingga Kemal yang andilnya cukup besar bagi terciptanya kekuasaan Soeharto tetap dianggap sebagai ganjalan, dengan mana Said mendeskripsikannya:

> Sebagai jenderal yang punya insting politik canggih, Soeharto tahu riwayat hidup Kemal, seorang pejuang berwatak pemberang, berpendirian tegas, dan tidak kenal kompromi. Jenderal seperti Kemal Idris itu, bagi Soeharto, keberadaannya di Jakarta hanya akan membahayakan kekuasaan sang Presiden … tibalah giliran Kemal untuk "dibereskan". Melepaskan jabatan Panglima Kostrad, Kemal dikirim ke Makassar menduduki posisi Panglima Komando Wilayah Pertahanan …, lembaga yang baru saja diciptakan tanpa wewenang jelas."[693]

Pada tanggal 17 Februari 1969 jabatan Kemal sebagai Panglima Kostrad diserahkan kepada Wahono, seorang *bonding* Soeharto. Di tanggal tersebut pula Kemal diberikan tugas "menjauh" dari Jakarta yaitu sebagai Deputi Komandan TNI-AD merangkap Komandan Antar Daerah (Koanda) Indonesia Timur.[694]

Seorang *king maker* lainnya adalah Sarwo Edhie Wibowo. Sebagai komandan RPKAD, Sarwo populer di kalangan mahasiswa. Sarwo adalah perwira operasi yang menjalankan gagasan Kemal saat membentuk pasukan tidak dikenal

www.setabasri.org

Pembubaran PKI dan penangkapan atas 14 menteri anggota Kabinet Dwikora. Dalam kesaksiannya Yusuf Wanandi menyatakan bahwa perintah kedua tersebut kemudian dicoret dari Supersemar. Lihat Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,,* h. 68.

[693] Salim Haji Said, Menyaksikan …, *op. cit.,* h. 28.

[694] Setelah menjadi Koanda Indonesia Timur, Kemal dikirim Soeharto sebagai duta besar di Beograd pada September 1972. Kemal menyatakan keberatannya langsung pada Soeharto, tetapi perintah Soeharto tegas dan Kemal tidak bisa menolak. Said menulis bahwa laporan-laporan "buruk" tentang dirinya pada Soeharto berasal dari Ali Moertopo. Lihat *ibid.,* h. 29.

mengepung istana negara. Namun, sejak tanggal 3 Oktober 1965, Soeharto memiliki kecurigaan tersendiri atas Sarwo dan tidak pernah pulih sejak saat itu, seperti dideskripsikan Yusuf Wanandi:

> Pada pagi hari 3 Oktober 1965, Soeharto dipanggil ke Istana Bogor. Ketika itu Angkatan Udara dan LANUD Halim sudah diamankan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Sarwo Edhie Wibowo. Soeharto berangkat ke Bogor pagi itu dan melihat Sarwo Edhie yang baru saja keluar dari pertemuan dengan Presiden. Soeharto bertanya-tanya dalam hati kenapa Sarwo Edhie yang ada di sana dan bukan dirinya? Ia tidak pernah percaya kepada Sarwo Edhie sejak saat itu … Sarwo Edhie dan Soeharto memang tidak pernah dekat. Bagi kami, Sarwo Edhie adalah pahlawan karena pada tahun-tahun berikutnya ia mendukung gerakan mahasiswa anti-PKI.[695]

Sarwo termasuk perwira intelektual dan Soeharto kurang nyaman berada di antara perwira semacam itu. Sama seperti tindakannya atas Kemal, Soeharto pun menjauhkan Sarwo dari "teritorialnya" dengan mengangkatnya sebagai Pangdam II Bukit Barisan pada tanggal 26 Juni 1967. Tidak berhenti di sana saja, pada tanggal 2 Juli 1968 Soeharto kembali memutasi Sarwo Edhie ke ujung timur Indonesia selaku Pangdam XVII Cendrawasih yang meliputi wilayah operasi Irian Barat.[696]

www.setabasri.org

[695] Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,* h. 49. Saat Sarwo Edhie memimpin pasukannya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menghabisi PKI itu lebih didasarkan dendam pribadi karena PKI telah membunuh Yani, perwira yang sudah dianggap kakak oleh Sarwo. Sarwo melakukan itu bukan karena perintah atau demi Soeharto. Said memiliki penjelasan lain mengenai mengapa Sarwo tiba lebih dahulu menghadap Sukarno ketimbang Soeharto. Itu diakibatkan rencana Sarwo melapor pada Soeharto bahwa Lanud Halim sudah dikuasai RPKAD. Tiba di Halim, Sarwo diberitahu Herlambang (Laksamana Muda Udara) bahwa Soeharto ada di Bogor (Istana Bogor). Herlambang menawarkan apabila Sarwo hendak ke Bogor Sarwo dipersilakan terbang bersama dengan helikopter. Ternyata Soeharto masih dalam perjalanan sementara Sarwo tiba terlebih dahulu. Sarwo lalu menemui Sukarno saat Presiden masih menggunakan kopiah dan kaos dan Sarwo kesal bahwa terbunuhnya Yani (sahabatnya) dianggap seperti hal biasa oleh Presiden. Lihat Salim Haji Said, Menyaksikan …, *op. cit.,* h. 35.

[696] Sebelum Sarwo ditugaskan ke Irian Barat sempat diwacanakan agar Sarwo diangkat sebagai Duta Besar di Moskow. Lihat Salim Haji Said, Menyaksikan …, *op. cit.,* h. 28-29.

Jika versi Wanandi bahwa Soeharto tidak menyukai karena Sarwo datang menghadap Sukarno sebelum dirinya, maka versi Salim Said adalah "pembuangan" Soeharto atas Sarwo adalah akibat hasutan Ali Moertopo. Sejak awal Ali dianggap memiliki ambisi menjadi *alpha male* menggantikan Soeharto kelak di kemudian hari, dan sebab itu sejak dini ia menyingkirkan sejumlah perwira yang berpotensi menghalangi langkahnya.[697] Dalam percakapan antara Said dengan Sarwo, Said menulis:

> "Dari mana Bapak pagi-pagi sekali?" tanya saya [Said]… "Dari Cendana," jawab beliau [Sarwo]. Cendana itu tempat kediaman pribadi Presiden Soeharto. Acara penting pertemuan Sarwo Edhie dengan Soeharto pagi itu adalah membicarakan soal isu "Sarwo akan menggulingkan Soeharto." Sarwo bertanya, "Pak Harto, apakah soal itu sudah Bapak cek?" Apa jawab Soeharto?" Beliau hanya tersenyum." Tidak ada komentar Sarwo atas jawaban Soeharto yang menjengkelkan itu.[698]

Sarwo tidak pemberang seperti Kemal atau politis seperti Dharsono. Namun, sebagai *alpha male* yang tengah mengakses sebesar-besar kekuasaan dan mereproduksinya, kalkulasi Soeharto harus ketat dengan tidak membiarkan potensi sekecil apa pun mendapat peluang untuk mengganjal. Sarwo adalah *protégé* Achmad Yani, dan membiarkan pengikut *alpha male* lama TNI-AD adalah sesuatu hal yang berisiko dalam hal loyalitas. Said menyatakan bahwa "Sarwo itu teman Yani, sementara Soeharto tidak suka kepada Yani."[699]

www.setabasri.org

---

[697] Isu yang dihembuskan Ali adalah Sarwo akan "me-Najib-kan" Soeharto seperti terjadi saat Gamal Abdel Nasser menyingkirkan seniornya Kolonel Najib yang sama-sama melengserkan kekuasaan Raja Farouk di Mesir. Lihat *ibid.,* h. 32.

[698] *ibid*.

[699] Pernyataan ini diucapkan seorang wartawan bernama Daud Sinyal yang pernah meliput oprasi RPKAD di Jawa Tengah pada November 1965. Lihat Salim Haji Said, Menyaksikan …, *op. cit.,* h. 37.

Dalam sebuah Rapat Umum di halaman Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia yang kemudian melahirkan Tritura, Sarwo pernah menyempatkan untuk ikut hadir bersama sejumlah stafnya.[700] Sarwo adalah sedikit dari perwira yang menyaksikan secara langsung momentum gerakan mahasiswa Indonesia tersebut dan kemudian ikut mendampingi saat mahasiswa bergerak menuju Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) kemudian menuju ke Sekretariat Negara sambil meneriakkan aneka slogan seperti "*Turunkan harga beras*!", "*Turunkan harga bensin*!", atau "*Singkirkan menteri goblok*!."

H.R. Dharsono bersama Kemal dan Sarwo adalah tiga perwira yang berhasil mendegradasi kewibawaan politik Sukarno. Ketiga perwira tersebut disukai para bawahan mereka.[701] Dharsono pernah menjadi Komandan Batalion dalam Brigade Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948. Karena sikap anti Sukarno-nya, ia pun ditunjuk Soeharto menjadi Pangdam Siliwangi menggantikan Ibrahim Adjie.[702] Berbeda dengan Kemal dan Sarwo, Dharsono cenderung bergerak secara lebih organisasional ketimbang tempur lapangan.[703]

www.setabasri.org

[700] Pada Rapat Umum tanggal 10 Januari 1966 yang dihadiri Sarwo pula, untuk pertama kalinya tiga tuntutan rakyat (Tritura) diperkenalkan yaitu: (1) Bubarkan PKI; (2) Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI; dan, (3) Turunkan harga. Lihat G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 25 Maret 1968, *op. cit.,* h. 39.

[701] Petrik Matanasi, "Tragedi H.R. Dharsono: Kala Soeharto Menistakan Pengkritiknya. 5 Juni 2020. [Website] Diakses dari https://tirto.id/tragedi-hr-dharsono-kala-soeharto-menistakan-pengkritiknya-fDBa tanggal 4 Agustus 2021 pukul 9:35 pm.

[702] Martin Sitompul, "H. R. Dharsono, Jenderal Terpidana." 8 Januari 2018. [Website] Diakses dari https://historia.id/militer/articles/h-r-dharsono-jenderal-terpidana-vZ5qo/page/1 tanggal 4 Agustus 2021 pukul 9:41 am. Dukungan ini dikenal sebagai Ikrar Panglima se-Jawa. Dharsono pula yang bersama dengan Amir Machmud selaku Pangdam Jaya, M. Jasin selaku Pangdam Brawijaya, Kemal Idris selaku Pangkostrad, dan Wijoyo Soejono selaku Komandan RPKAD Malang yang ikut menandatangani dukungan tertulis terhadap kepemimpinan Soeharto.

[703] Pendekatan Dharsono lebih politis dan dekat dengan lingkaran PSI ketimbang Kemal dan Sarwo. Bahkan Dharsono menyediakan Siliwangi sebagai markas kekuatan anti Sukarno di kalangan TNI-AD. Lihat *ibid.*

Loyalitas Dharsono kepada Soeharto tampak saat menjadi Pangdam Siliwangi ia melarang warga Jawa Barat mengunjungi atau dikunjungi oleh Sukarno.[704] Namun, sama halnya dengan Kemal dan Sarwo, maka Dharsono pun akhirnya "dijauhkan" dari Jakarta oleh Soeharto. Faktor utama yang membuat Dharsono dijadikan sebagai Duta Besar di Bangkok oleh Soeharto pada tahun 1969 adalah kedekatannya dengan lingkaran intelektual PSI. Dharsono diketahui adalah pendukung kuat konsep dua partai yang mengimitasi AS. Jika satu partai memerintah maka partai lain menjadi korektornya. Gagasan Barat semacam ini tidak sesuai dengan perencanaan strategis Soeharto sebagai *alpha male* yang hendak mendirikan sebuah hirarki dominan mengatasi aneka hirarki lain.

Pada tanggal 19 April 1969 Soeharto memutuskan untuk mengganti posisi Dharsono selaku Pangdam Siliwangi dengan seorang perwira Katolik bernama A.J. Witono Sarsono (Mayjen). Soeharto jelas lebih merasa aman dengan Witono, karena akibat agama minoritas yang dipeluknya, maka Witono tidak akan berakar dalam Divisi Siliwangi dan Jawa Barat yang kuat keislamannya. Posisi baru Dharsono adalah Duta Besar, sebuah posisi terhormat tetapi tidak lagi berhubungan dengan dunia kemiliteran.[705]

Salah satu jenderal senior yang juga harus diperhitungkan oleh Soeharto adalah Nasution. Dalam tahun-tahun antara 1965 hingga 1971 Nasution adalah seorang militer aktif dan punya pengikut cukup besar. Saat Soeharto menjabat presiden tahun 1967 dan presiden pada tahun 1968, Nasution adalah ketua MPRS

www.setabasri.org

[704] *ibid.*
[705] Fase Dharsono sebagai Duta Besar adalah akhir dari karir militer loyalis Soeharto di saat awal Orde Baru.

yang mampu menilai kinerja presiden. Selain faktor etnis maka terdapat kecenderungan yang saling bertolak-belakang antara Soeharto dan Nasution. Nasution dikenal cenderung menjauhi bisnis tentara, intelektual, serta Muslim santri berkecenderungan modernis dan dekat HAMKA tokoh Masyumi. Dengan latar belakang seperti itu maka lembaga yang dipimpin Nasution, yaitu MPRS, dianggap potensial menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memihak politik Islam.[706] Sebagai bagian dari lingkaran Pater Beek dan dekat dengan Ali Moertopo, Yusuf Wanandi memberi pendapatnya mengenai Nasution:

> "Saya merasa Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan presiden. Mungkin Nasution memiliki ambisi juga, tetapi setelah Soeharto mengkonsolidasikan kekuatannya pada tahun 1967 kesempatan Nasution untuk bersaing dengan Soeharto semakin kecil. Sidang Umum MPRS 1968 menjadi medan pertarungan. Nasution ingin MPRS mengendalikan Soeharto, dengan memastikan agar pimpinan MPRS bersama Badan Pekerja MPRS tetap bekerja dan aktif … dan menuntut agar presiden melapor kepada MPR setiap tahun."[707]

Disertasi ini menganggap bahwa suatu kewajaran apabila Nasution melalui MPRS hendak mengendalikan Soeharto mengingat sebagai orang yang pernah menjadi atasannya, Nasution tentu memahami kecenderungan-kecenderungan bisnis Soeharto.

Indikasi tantangan dari Nasution bagi Soeharto adalah dipersiapkannya amandemen atas UUD 1945 melalui Badan Pekerja MPRS sehingga memungkinkan terbentuknya faksi Nasution yang didukung oleh Subchan Zaenuri Ershan dari NU. Apabila amandemen tersebut diterima, maka dalam

[706] Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,* h. 108.
[707] *ibid.,* h. 108-109.

www.sotabasri.org

Sidang Umum MPRS 1968 kinerja Soeharto dapat dimonitor dan dinilai MPRS. Yusuf Wanandi sendiri menganggap Nasution adalah kandidat kuat presiden untuk tahun 1971.[708]

Nasution mendukung gagasan kelompok Islam yang dimotori Subchan Zaenuri Ershan untuk mengintegrasikan sejumlah nilai syariat Islam ke dalam GBHN.[709] Latar belakang Soeharto yang Islam *abangan* turut membentuk sikapnya dalam mencurigai motivasi Nasution. Intinya adalah bahwa skenario Nasution dalam Sidang Umum MPRS 1968 untuk membentuk GBHN yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam, amandemen UUD 1945 untuk mengendalikan presiden, dan inkorporasi piagam Hak Asasi Manusia harus digagalkan oleh Soeharto. Soeharto semakin berkesimpulan bahwa Nasution tidak boleh diberi akses kekuasaan, dan ini didorong kenyataan bahwa Sidang Umum MPRS 1968 ditandai terbelahnya kelompok menjadi dua yaitu aliansi sekuler-abangan-Katolik (koalisi baru Soeharto) pada satu sisi, melawan aliansi Islam NU dan eks Masyumi berikut aneka ormas afiliasinya pada sisi lain.

Namun, menjadi hal yang wajar pula apabila Nasution dan faksi Islam di MPRS berupaya merancang regulasi yang mampu mengendalikan kebijakan presiden kendati pun akhirnya mereka kalah. Wibawa Nasution sebagai Ketua MPRS yang memimpin rapat paripurna pada tahun 1967 untuk menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden dan tahun 1968 sebagai presiden, serta

www.setabasri.org

[708] Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,* h. 110.
[709] *ibid.,* h. 113. Misal dari nilai-nilai Islam tersebut adalah melarang orang untuk berpindah agama. Hal ini menjadi hot issue saat itu karena akibat pembantaian anggota PKI di sejumlah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak kalangan Islam abangan yang keluar dari Islam dan masuk ke agama selain Islam, terutama Katolik dan Protestan.

popularitas dirinya di kalangan umat Islam mendorong Soeharto berhati-hati dalam melakukan tindakan atas Nasution, dan ini berbeda dengan tindakannya atas Sarwo, Kemal, maupun Dharsono.

Secara personal Soeharto memiliki karakter politik yang berbeda dengan Nasution. Sesuai pendapat Arnold W. Ludwig bahwa secara *natural* seorang penguasa dengan proses di dalam struktur limbik otaknya selalu lekas bertindak apabila diperhadapkan dengan situasi hidup-mati. Dalam situasi krisis pasca G30S/PKI, Soeharto adalah penguasa yang memenuhi persyaratan Ludwig, dan bukan Nasution. Dengan demikian sulit dipungkiri bahwa bahkan sejak awal Nasution memang telah tertinggal langkah-langkah politik taktisnya oleh Soeharto.

Dalam sebuah pengakuannya, Adam Malik menyatakan bahwa pada malam tanggal 1 Oktober 1965 ia sempat menemani Nasution menunggui Ade Irma Suryani di rumah sakit. Malik yang masih kerabat Nasution mendesaknya untuk menemui Soeharto di Markas Kostrad dan mengambil-alih kepemimpinan pasukan dari tangan Soeharto, dengan argumen bahwa Nasution lebih senior ketimbang Soeharto. Nasution menolak dengan menyatakan bahwa ia tetap ingin menunggui anaknya kendati Adam Malik dan istrinya meyakinkan bahwa mereka akan menjagai putrinya.[710] Dengan mengutip David Jenkins, Barry Turner bahkan menyatakan bahwa beberapa kali Soeharto sendiri menawarkan kepada Nasution

www.setabasri.org

[710] Nasution kemudian membantah pernyataan Malik dengan menyatakan bahwa Malik hanya datang ke rumah sakit sekali saja yaitu pada tanggal 5 Oktober 1965 dan tidak ada pembicaraan semacam itu. Namun, Nasution mengakui bahwa pembicaraan Malik seperti dimaksud terjadi pada 11 Maret 1966 setelah Soeharto memperoleh Surat Perintah 11 Maret dari Sukarno. Lihat Barry Turner, *A. H. Nasution and Indonesia's Elites: "People Resistance" in the War of Independence and Postwar Politics*. Lanham: Lexington Book, 2018., p. 262.

posisi untuk mengendalikan keadaan pasca 1965 dan Nasution tetap menolak dengan alasan bahwa sejak 1962-1963 dirinya sudah berada di luar rantai komando pasukan aktif.[711]

Sikap Nasution ini sejalan dengan kajian dalam konteks perilaku manusia yang bersifat *nature* dengan mana status individu di dalam kehidupan primata berkelompok sangat menentukan peran yang ia jalankan. Dalam studi etologi, pejantan yang berkali-kali berkelahi dan menang akan memperoleh status tinggi di mata pejantan lain maupun para betina, demikian pula sebaliknya. Hal seperti ini pun tampak dalam hubungan Nasution dengan Soeharto.

Secara status Soeharto lebih minor ketimbang Nasution.[712] Peran Nasution dalam melawan Belanda berada dalam lingkup strategi perang sementara Soeharto hanya dalam pertempuran kecil. Kendati kelak Soeharto dijadikan Panglima Mandala untuk merebut Irian Barat, secara status tetap saja Nasution berada di atas Soeharto. Namun, dalam saat-saat kritis 1965 justru Soeharto dan pengalaman tempurnya, bukan Nasution, yang justru berkali-kali mengambil inisiatif penggerakan pasukan kontra Gerakan Untung dan kawan-kawan. Keberanian "berkelahi" ini khas dimiliki *alpha male* potensial, dan mendorong degradasi atas status Nasution jika diperhadapkan dengan Soeharto.

Sama dengan pengalamannya atas Sarwo, maka Soeharto pun memiliki pengalaman kurang nyaman dengan Nasution. Nasutionlah yang memerintahkan inspeksi atas seluruh bisnis yang dilakukan panglima-panglima daerah di

www.setabasri.org

[711] *ibid.*, p. 263.
[712] Saat masih berkarir di KNIL pangkat Soeharto hanyalah bintara (sersan) sementara Nasution adalah perwira. Lihat *ibid.*

Indonesia pada tahun 1950an, dan Soeharto salah satu yang tersandung dalam kebijakan tersebut. Nasution pula yang memerintahkan peralihan jabatan panglima divisi dari Soeharto ke Pranoto Reksosamudro dan mengirim Soeharto ke SSKAD.[713]

Kasus kurang nyaman lain antara Soeharto dan Nasution terjadi pasca pemberontakan PRRI/Permesta. Soeharto mengusulkan kepada Nasution yang saat itu menjabat Kasad untuk melakukan penyerbuan bersenjata atas basis-basis pemberontak. Saat Nasution bertanya pasukan siapa yang akan melakukan penyerbuan tersebut maka Soeharto menjawab bahwa ia dan pasukannya yaitu Divisi Diponegoro siap untuk melakukan penyerangan. Namun, sebagai Kasad ternyata Nasution lebih mempercayai Achmad Yani untuk memimpin Divisi Diponegoro dalam Operasi 17 Agustus dan bukan Soeharto. Setelah sukses melaksanakan Operasi tersebut, Sukarno menunjuk Achmad Yani sebagai Kasad menggantikan Nasution sementara Soeharto tersandung kasus YPTE dan "disekolahkan" ke SSKAD.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Nasution mendatangi markas Kostrad yang saat itu masih berada di bawah pimpinan Soeharto selaku panglimanya. Kapasitas Nasution adalah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan.[714] Di Markas Kostrad tersebut Nasution mengadakan serangkaian rapat, dan gaya Nasution ini kemudian memicu rasa tidak suka Soeharto:

www.setabasri.org

[713] Barry Turner, A. H. Nasution …, *op. cit.*, p. 263.
[714] J.B. Soedarmanta. Tengara Orde Baru …, *op. cit.,* h. 170.

> "Soeharto menyindir dengan menyatakan kepada Kastaf-nya, Brigjen Wiranatakusumah bahwa kalau di Kostrad seharusnya dialah yang memimpin rapat, dan bukan Nasution. Ketidaksenangan Soeharto itu akhirnya sampai ke telinga Nasution yang segera mengakhiri kegiatannya di Kostrad … semula Soeharto pun tidak menghendaki posisi untuk memimpin menggantikan Bung Karno … dan … dikemukakan … Soeharto sendiri … tanggal 2 Oktober 1965 pada Nasution, *Jij saja yang pegang pimpinan* … Nasution menyerahkan kepada Soeharto untuk mengambil inisiatif dalam memulihkan keamanan."[715]

Seperti telah disampaikan sebelumnya, Soeharto memiliki daya ingat fotografis sehingga tampilan personal yang melingkupi kejadian di masa lampau mudah terpatri di dalam pikiran Soeharto. Kesan-kesan lama Soeharto atas Nasution serta tindakan seniornya itu kepada dirinya cukup banyak mempengaruhi pilihan tindakan Soeharto di masa kemudian. Sehubungan dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, maka saat berziarah ke Gunung Lawu bersama dengan Sudjono Hoemardhani, Soeharto mendapat *wangsit* bahwa kekuasaan jangan dicari, tetapi apabila diberi jangan ditolak. Bagi Soeharto, setelah Nasution tidak mau menerima komando TNI-AD pasca G30S dan menyerahkan padanya, maka menjadi wajar apabila Soeharto tidak menghendaki Nasution bertindak macam-macam terhadap kekuasaan yang sudah "diberikan" Nasution kepadanya.

b. Akses Preferensial

Juga telah disampaikan sebelumnya bahwa selaku *alpha male* yang menghadapi aneka individu dominan dalam hirarki lain, pilihan Soeharto bukan melenyapkan hirarki yang ada melainkan menundukkan individu dominan yang ada di dalamnya. Selain itu taktik Soeharto adalah menempatkan pengikutnya ke

[715] *ibid.,* h. 170.

www.setabasri.org

dalam hirarki tersebut dengan tujuan membuat hirarki tersebut tunduk pada hirarki Soeharto. Individu dominan berikut pengikut yang mau tunduk akan diberikan akses preferensial atas sumber daya. Selaku *alpha male* kini Soeharto mampu menjamin pengalokasian akses atas komoditas berharga.

Sejak tahun 1968 dapat dikatakan Soeharto telah berhasil membangun kendali di dalam tubuh TNI-AD dan beranjak ke matra angkatan bersenjata lainnya, sehingga pada tahun 1970 Soeharto merangkap tiga jabatan penting sekaligus yaitu: Presiden, Menhankam, dan Pangab.[716] Persoalan umum dari satu individu *alpha male* adalah bagaimana ia mampu menjaga loyalitas para pengikutnya. Persoalan ini penting mengingat tidak semua perwira pengikutnya akan bersikap selalu setia karena selalu akan muncul potensi pembangkangan seperti banyak terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika, maupun Amerika Latin. Juga secara teoretis Biopolitik memandang bahwa ikatan manusia di dalam kelompok selalu diwarnai potensi pengkhianatan bahkan dalam unit-unit organis yang seharusnya bekerja sama. Sebab itu maka dalam menjamin loyalitas para pengikutnya sekurangnya Soeharto melakukan tiga hal.[717]

Pertama, tanpa menghiraukan protes kalangan sipil, Soeharto mengupayakan korps perwira memperoleh *reward* yang cukup atas loyalitas mereka kepadanya. Para perwira ini kemudian diberikan jabatan pada pos-pos non militer seperti gubernur, bupati, wali kota, menteri dalam kabinet, anggota parlemen, anggota MPR, seksi-seksi dalam kementerian, maupun direksi dalam

www.setabasri.org

[716] Donald Hindley. Indonesia 1970: The Workings of Pantjasila Democracy. 1971. *Asian Survey.* Vol. 11, No. 2., A Survey of Asian in 1970: Part II (Feb.), pp. 111-120., p. 111-112.
[717] *ibid.*

BUMN. Dalam pos-pos tersebut mereka dapat menggunakan baik untuk mereproduksi kekuasaan maupun akses atas sumber daya material. Soeharto juga tidak terlampau menghiraukan aneka mekanisme *trade-off* yang dipraktikkan oleh para perwira loyalisnya dalam memperoleh penghasilan tambahan, baik melalui pemerasan, penyelundupan, dan aneka korupsi asalkan tidak menimbulkan perhatian publik terlebih investigasi oleh pers.

Kedua, akses preferensial diberikan Soeharto kepada para loyalisnya melalui hasil reorganisasi angkatan bersenjata November 1969. Dalam reorganisasi tersebut Soeharto mendudukkan dirinya sebagai satu-satunya individu (*alpha male*) yang memiliki kewenangan menggerakkan pasukan. Matra lain seperti TNI-AL dan TNI-AU dihilangkan otonomi pengerahan pasukan juga kepala staf mereka yang lama diganti oleh *bonding* Soeharto seperti Sudomo (TNI-AL) dan Rusmin Nurjadin (TNI-AU).

Hasil reorganisasi telah menempatkan para pengikut Soeharto di sejumlah posisi strategis angkatan bersenjata serta penempatan para komandan untuk enam teritorial baru. Pada bulan Oktober 1970 Soeharto mengumumkan kondisi pensiun atas 86 jenderal yang 54 orang di antaranya berasal dari TNI-AD. Namun, sebagai *reward* bagi para pengikut tersebut Soeharto menyediakan posisi kekaryaan. Keputusan pensiun dijadikan senjata Soeharto untuk menundukkan aneka individu dominan di dalam tubuh angkatan bersenjata. Hal ini telah dikalkulasi oleh Soeharto bahwa kendati telah menjadi *alpha male* Soeharto tetap sadar bahwa dalam cara pandang Biopolitik selalu akan muncul potensi pengkhianatan di dalam unit-unit organisasi yang ia pimpin.

www.setabasri.org

Untuk memberikan *shock therapy* kepada mereka yang memiliki niat untuk mengkhianatinya, maka pada bulan Desember 1969 dan Januari 1970 sejumlah perwira senior TNI-AD dan TNI-AL ditahan dengan tuduhan terlibat dalam Gerakan 30 September.[718] Mereka yang ditahan ini termasuk Mursjid (Mayjen) yang Sukarnois dan pada bulan Februari 1970 sebanyak 27 perwira Divisi Diponegoro dituntut akibat dianggap terlibat gerakan bawah tanah pro komunis, disusul kemudian pada bulan Desember 1970, Somali (Brigjen) yang menjabat Kepala Staf Divisi Siliwangi, ditangkap dengan alasan serupa.

Ketiga, bagi para loyalis sipilnya Soeharto memberikan akses sumber daya pada mereka. Secara politik Soeharto melindungi para teknokrat ekonomi lulusan Berkeley University yang sama sekali tidak memiliki akar di salah satu kekuatan politik, termasuk tentunya mentor mereka Sumitro Djojohadikusumo (dari partai kecil yaitu PSI) yang dianggap oleh Sukarno terlibat dalam PRRI/Permesta. Soeharto memberikan akses bagi mereka untuk menunjukkan keahliannya sambil memberikan perlindungan politik dengan menempatkan para teknokrat tersebut di dalam kabinet yang ia pimpin dan status istimewa.

Selain itu sejumlah loyalis sipil seperti aktivis mahasiswa dan anggota lingkaran Pater Beek diberikan kesempatan mengembangkan karir mereka. Sejumlah aktivis mahasiswa dan intelektual yang dinilai berjasa bagi Soeharto dengan memenangkan Sekber Golkar dalam Pemilu 1971 diberikan akses pada kekuasaan di parlemen. Daftar nama 25 anggota DPR dari golongan fungsional non ABRI tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden No. 107/N/1971 tanggal

www.setabasri.org

[718] *ibid.,* p. 112.

13 Oktober 1971.[719] Diangkatnya para aktivis dan intelektual ke parlemen adalah upaya Soeharto menundukkan hirarki sipil radikal agar mau tunduk di bawah dominasinya. Selain itu, Soeharto juga memberikan *reward* kepada pimpinan NU yaitu K.H. Idham Chalid atas kedekatan hubungannya dengan TNI-AD dan kecenderungan politiknya yang akomodasionis dengan memberikan jabatan Ketua DPR kepadanya pasca Pemilu 1971. Harapan Soeharto adalah hirarki NU akan tunduk ke dalam dominasinya.

Sejak menjabat sebagai Presiden Partai NU, Idham Chalid sejak tahun 1963 bergerak mendukung berdirinya serikat buruh NU yaitu SABURMUSI sebagai tandingan atas SOBSI yang berafiliasi dengan PKI.[720] Idham pula yang menyerukan serikat buruh di bawah NU ini untuk menjalin kerja sama dengan SOKSI yang didukung TNI-AD guna menghadapi lawan bersama mereka yaitu serikat buruh yang berada di bawah pengaruh PKI. Namun, posisi Idham ini kerap berseberangan dengan politisi muda NU yaitu Subchan Zaenuri Ershan.[721]

Juga terdapat kemungkinan K.H. Idham Chalid "dipasang" sebagai Ketua DPR guna menghadapi pembelahan hirarki di tubuh NU, dengan mana Subchan

www.setabasri.org

[719] Terdapat dua puluh lima orang dalam kategori ini seperti Sumiskum (dari Sospol), Murdopo (dari Sospol), Djamal Ali (dari Hukum), Utojo Usman (dari Hukum), David Napitupulu (dari Pemuda), Cosmas Batubara (dari Pemuda), Jacob Tobing (dari Pemuda), Rachman Tolleng (dari Pemuda), Jacob Oetama (dari Wartawan), Ny.Lasmidar (dari Wanita), Ny. Hardjo Pranoto (dari Wanita), Suharno (dari Buruh), Sugiarto (dari Tani), Sugiyarno (dari Nelayan), Wartono (dari Pengusaha), Ediawan (dari Koperasi), Tampubolon (dari Teknik), Median Sirait (dari Kedokteran Farmasi), Johan Simanjuntak (dari Pemuda), KH Kodratullah (dari Agama), Dahlan Nasution (dari Angkatan 45), Smiono (dari HANSIP), Sumarno (dari Veteran), dan Widi Prasasti (dari Purnawirawan). Lihat *Kompas*, 14 Oktober 1971.
[720] Robert W. Hefner. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia.* Penerjemah Ahmad Baso. Cetakan I. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan The Asia Foundation, 2001, h. 164.
[721] *ibid.,* h. 165.

Zaenuri Ershan yang menduduki posisi Wakil Ketua MPRS dekat hubungannya dengan Nasution.

c. Rekayasa Hirarki

Selain melakukan dominasi atas individu dominan hirarki lain, taktik lain yang digunakan Soeharto dalam dominasi hirarki kompleks adalah merekayasa hirarki lain agar mudah dikendalikan. Salah satu sasaran Soeharto adalah hirarki partai politik yang dinilai masih terlampau banyak.

Salah satu cara yang ditempuh Soeharto untuk merekayasa hirarki partai politik adalah dengan melakukan penggabungan. Hirarki partai-partai politik tetap ada, tetapi keberadaan mereka dipersatukan ke dalam hirarki khusus. Soeharto sebenarnya memiliki pembenar konstitusional untuk melakukan penyederhanaan hirarki partai politik yaitu Tap MPRS No. 22/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.[722] Puncak upaya Soeharto dalam rekayasa hirarki partai politik dilakukan pada tanggal 7 Februari 1970 saat ia menyerukan bahwa dalam menghadapi Pemilu 1971, para kontestan (partai-partai politik) saling mengelompokkan diri.[723]

Sebagai evaluasi atas kekalahan yang diderita partai-partai politik oleh Sekber Golkar dalam Pemilu 1971, Amir Machmud memiliki catatan tersendiri. Bahwa hasil Pemilu 1971 semakin memperkuat rencana penyederhanaan partai-

www.setabasri.org

[722] Salah satu keputusan TAP tersebut adalah "Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat UU yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan." Lihat Harry Tjan Silalahi, Tengara …, *op. cit.,* h. 154.

[723] Seperti dijabarkan Harry Tjan Silalahi sebagai "Pertama, kelompok "Materril-spirituil" yaitu PNI, Murba, IP-KI, Partai Katolik, dan Parkindo. Kedua, kelompok "Spirituil-materiil" yang menekankan pembangunan spirituil yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti." Lihat Harry Tjan Silalahi, Tengara …, *op. cit.,* h. 154.

partai politik.[724] Amir berargumentasi bahwa penyederhanaan partai-partai politik adalah kehendak MPRS.[725] Dua partai di sini tentu di luar Sekber Golkar sehingga apabila Pemilu diselenggarakan hanya akan ada 3 kontestan saja.[726]

Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia, menanggapi gagasan Soeharto seputar pengelompokan fraksi dalam DPR menjadi empat yaitu fraksi materiil-spirituil, spirituil-materiil, Golkar, dan ABRI serta gagasan Ali Moertopo dengan dua partai selain Golkar.[727] Mengenai penyederhanaan partai, Hatta menyatakan bahwa sudah sejak awal "kita" ingin tidak terlalu banyak partai politik di dalam negara dan harus ada partai pengoreksi.[728]

Tentu saja konsep Hatta ini tidak seperti yang dikehendaki Soeharto, karena bagi Soeharto apa yang diajukan Hatta akan menghadirkan tantangan bagi hirarkinya. Begitu pula dengan komposisi suara di dalam parlemen harus memastikan tunduknya hirarki lain atas hirarkinya. Karena hanya dengan cara demikian prediktabilitas politik dapat dipastikan oleh Soeharto. Konsep Hatta yang mungkin dapat Soeharto setuju adalah rekayasa hirarki, sementara untuk substansinya ditolak oleh Soeharto. Soeharto ingin merancang agar hirarki di DPR juga direkayasa, dari yang empat, maka dua sudah terdiri atas fraksi ABRI dan Golkar. Dengan demikian apabila hirarki-hirarki partai politik direkayasa ulang, maka jumlahnya tentu hanya dua saja.

www.setabasri.org

---

[724] *Sinar Harapan*, 6 Oktober 1971.
[725] Dalam pernyataannya Amir berkata "apakah djumlah partai nanti 5, 4 atau 3, itu tergantung pada beberapa faktor. Tapi bila ternjata dengan 2 partai akan lebih bermanfaat bagi seluruh bangsa, apa salahnja kita hanja punja 2 partai sadja." Lihat *ibid.*
[726] Mengenai apakah jenis partai tersebut berwujud partai massa atau kader, Amir menjawab "kita tjukup berpengalaman bahwa sistim partai massal ternjata telah gagal." Lihat *Pedoman*, 6 Oktober 1971.
[727] *Nusantara*, 6 Oktober 1971.
[728] *ibid.*

Amir juga menyinggung konsep *floating mass* dengan merujuk pada pendapat Pangdam Diponegoro Widodo (Mayjen) bahwa sebaiknya pengurus-pengurus partai politik hanya beroperasi hingga tingkat ibukota kabupaten saja.[729] Menurut pendapat Amir, selepas Pemilu maka rakyat selesai pula berpolitik dan kembali melakukan reproduksi untuk kelangsungan hidup diri mereka dan keluarganya. Urusan politik sudah mereka serahkan kepada para wakil partai yang telah mereka pilih untuk masa lima tahun.[730]

Untuk menjamin prediktabilitas politik dalam konteks rekayasa hirarki partai politik ini Soeharto tampak cukup serius. Secara mendadak Soeharto mengadakan pertemuan dengan kelompok pimpinan partai politik di Istana Merdeka.[731] Kelompok pertama adalah PNI, Murba, IP-KI, Parkindo serta Partai Katolik (mencerminkan kelompok materiil-spirituil); Kelompok kedua, adalah NU, Parmusi, PSII, dan Perti (mencerminkan kelompok spirituil-materiil); dan Kelompok ketiga adalah Golongan Karya.[732]

Dalam pertemuan tersebut Soeharto menyampaikan harapan bahwa kelak akan terjadi kristalisasi partai politik secara "demokratis" menuju terbentuknya

www.setabasri.org

[729] Dengan demikian maka aneka kegiatan politik partai hanya sekali saja terjadi dalam lima tahun yaitu pada saat Pemilu. Dengan demikian partai-partai politik tidak perlu lagi memiliki massa hingga ke tingkat desa. Lihat *Sinar Harapan*, 6 Oktober 1971.

[730] Amir juga menyinggung masalah ideologi dan menurutnya "masjarakat tidak dibenarkan dikelompok2an berdasarkan ideologi … ideologi seluruh bangsa Indonesia hanja satu, jaitu Pantjasila." Lihat *ibid.*

[731] Keseriusan Soeharto tampak dengan pemanggilannya kembali atas para pimpinan partai politik dan Golongan Karya untuk kedua kalinya ke Istana Negara dengan inti pembicaraan yang sama. Dari hasil pertemuan kedua tersebut Soedharmono (Sekretaris Kabinet) ditanyai oleh wartawan apakah benar ide Soeharto tentang "tiga bendera" dan dijawab Soedharmono "Siapa bilang?" Wartawan melanjutkan "Ada *jang* bilang Pak. Tapi betul begitu?" Soedharmono menjawab lagi "*Ja*, tapi bukan saja *jang* bilang." Lihat *Pos Indonesia*, 8 Oktober 1971.

[732] Dalam pertemuan tersebut Soeharto didampingi oleh Soedharmono (Sekretaris Kabinet) dan Soedjono Hoemardhani (bonding-nya). Lihat *Sinar Harapan* 7 Oktober 1971.

tiga partai politik di Indonesia yang harus terjadi sebelum Pemilu 1976.[733] Soeharto juga menekankan bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila dan itu berlaku baik di DPR maupun MPR. Dengan Demokrasi Pancasila maka oposisi di dalam parlemen tidak diakui karena kesepakatan yang diperoleh dalam parlemen didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh "hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Rencana Soeharto untuk melakukan rekayasa tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPR-GR. A. Sjaichu dari NU menyatakan bahwa penyederhanaan partai politik merupakan Ketetapan MPRS dan sebab itu harus dilaksanakan. Menurut pertimbangan Sjaichu sendiri, maka semakin kecil jumlah partai maka lebih baik dan dengan demikian di DPR semakin sedikit jumlah fraksi maka juga semakin baik.[734] Sjaichu kurang sependapat dengan Hatta mengenai satu partai pemerintah dan satu partai oposisi. Menurut Sjaichu model seperti itu dengan kondisi di Indonesia saat ini belum bisa diterapkan karena saat ini sikap oposisi dapat ditafsirkan sebagai "menentang" terhadap Pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun, Sjaichu juga menekankan bahwa mengenai penyederhanaan jumlah partai tidak boleh dipaksakan dari "atas."[735]

Rekayasa hirarki partai politik berupa penyederhanaan jumlah partai ini juga tidak terlepas dari masalah prediktabilitas. Prediktabilitas yang dimaksud adalah Pembangunan yang menghendaki stabilitas politik berupa dukungan parlemen

www.setabasri.org

[733] Pada realitasnya, Pemilu 1976 diundur satu tahun menjadi 1977 karena sejumlah persoalan.
[734] *Nusantara*, 7 Oktober 1971.
[735] Sjaichu juga melanjutkan penilaiannya mengenai adanya oposisi di Indonesia bahwa tidak ada oposisi permanen di negeri ini karena semua sesuai konteksnya.. Lihat *Sinar Harapan*, 8 Oktober 1971.

secara bulat kepada eksekutif.[736] Sebab itu rekayasa hirarki partai politik harus dipahami sebagai upaya Soeharto menundukkan hirarki-hirarki partai politik yang ada. Soeharto mengharapkan bahwa nantinya hanya akan ada tiga kekuatan politik di Indonesia yaitu ABRI, Golkar, dan partai politik.[737] Soeharto juga menghendaki DPR nantinya dipimpin oleh satu orang ketua dengan empat wakil ketua dan akan efektif pada 28 Oktober 1971.[738]

Pasca Pemilu 1971, pemerintah juga telah mensosialisasikan pembekuan MPRS, karena Pemilu dianggap telah menghasilkan anggota MPR baru, dan sebab itu rival Soeharto yaitu Nasution tidak lagi memiliki posisi penting dalam politik sipil.[739] Sembilan partai politik dan Golongan Karya menyetujui pembekuan MPRS hingga pelantikan DPR hasil Pemilu 1971 tanggal 28 Oktober 1971.[740]

Dominasi dalam hirarki kompleks seperti dikehendaki Soeharto tampaknya semakin nyata. Salah satu partai politik yaitu Parmusi menyatakan bersedia meleburkan diri.[741] Parmusi di bawah kepemimpinan Mintaredja menyatakan bahwa penyederhanaan kepartaian adalah bagian vital upaya pembaruan struktur politik dan merupakan kebutuhan Pembangunan. Sebagai jalan keluar formal dari

www.setabasri.org

[736] Tadjuk Rentjana API. "Penjederhanaan Parpol utk. Sukseskan Pembangunan." *API*, 8 Oktober 1971.
[737] *ibid.*
[738] Sudah pula direncanakan bahwa nantinya ketua DPR akan berasal dari NU, sementara Golkar yang telah mendapat kursi sangat signifikan tidak perlu lagi menjabat ketua DPR, karena seorang ketua harus tunduk pada pendapat mayoritas anggota DPR. Lihat *KAMI*, 8 Oktober 1971.
[739] Gagasan pembekuan MPRS ini sesungguhnya telah dilontarkan oleh Ali Moertopo sejak beberapa masa sebelumnya dengan tujuan untuk menghapus lembaga ketua dan wakil-wakil ketua MPRS. Gagasan Ali Moertopo untuk penghapusan MPRS ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena secara prinsipiil anggota MPR baru sudah terpilih melalui Pemilu 1971. Lihat *ibid.*
[740] *IPMI*, 11 Oktober 1971. Lihat juga Djajakarta, 11 Oktober 1971.
[741] *Kompas*, 8 Oktober 1971.

penyederhanaan ini nantinya dapat dilakukan melalui penerbitan Undang-undang Kepartaian dan Keormasan yang khusus mengaturnya.[742]

Selain Parmusi, partai lainnya yaitu Parkindo juga menyetujui gagasan empat fraksi dari Soeharto, tetapi dengan catatan agar namanya diubah dari Fraksi Materiil-Spirituil menjadi Fraksi Demokrasi Pembangunan.[743] Terdapat hal menarik dari pernyataan Parkindo yaitu mengenai pengambilan keputusan baik di DPR maupun MPR. Menurut mereka voting tidak boleh diberlakukan pada masalah-masalah yang fundamental seperti dasar negara dan persoalan UUD 1945 dan ini menggambarkan kekhawatiran kembali diusungnya masalah Piagam Jakarta.[744]

Untuk menghadapi manuver partai-partai politik, Ali Moertopo menyatakan bahwa Soeharto terlebih dahulu akan melakukan pendekatan persuasif dan edukatif mengenai gagasan penyederhanaan partai politik.[745] Namun, apabila cara tersebut tidak berhasil maka pemerintah akan menempuh cara pengajuan RUU Kepartaian dan Keormasan yang dahulu juga pernah ditolak.[746]

www.setabasri.org

---

[742] Selain itu Parmusi juga menyetujui gagasan Soeharto bahwa nantinya di DPR dan MPR hanya terdiri dari empat fraksi saja sedangkan mengenai nama-nama mereka, akan diserahkan kepada para pimpinan fraksi termaksud. Pernyataan Parmusi tersebut dikukuhkan melalui Pernyataan Sikap Parmusi yang ditandatangani oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Moh. Husnie Thamrin. Lihat *ibid.*

[743] *ibid.*

[744] Namun, untuk persoalan-persoalan yang tidak terlampau prinsipil maka voting dengan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan bisa dilaksanakan. Dukungan atas Soeharto untuk menyederhanakan jumlah partai politik kemudian memperoleh dukungan di kemudian hari yaitu dari PNI, IP-KI, Murba, dan Partai Katolik. Lihat *Berita Buana*, 9 Oktober 1971.

[745] *Kompas*, 9 Oktober 1971.

[746] Pernyataan Ali Moertopo ini sekaligus merupakan ancaman bagi partai politik karena apabila penyelesaian penyederhanaan partai politik dilakukan melalui voting di DPR hasilnya sudah dapat ditebak. Gabungan anggota parlemen dari Golkar dan ABRI sudah cukup untuk menjadi mayoritas suara. Lihat *ibid.*

Masalah lain yang terkait dengan prediktabilitas adalah Piagam Jakarta dan persoalan ini kembali diungkap oleh Ali Moertopo. Di depan Pekan Orientasi 24 Anggota Terpilih DPR Parmusi di Gedung Stanja, Ali menyatakan bahwa saat-saat setelah Pemilu adalah saat di mana "fikiran dan tenaga hendaknja ditudjukan pada 3 sasaran: fungsionalisasi, professionalisasi dan konstitusionalisasi."[747] Sebab itu keluarga besar "Bulan Bintang" hendaknya tidak membuang energi dalam mempersoalkan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta.[748] Ali menyebut bahwa pihak yang hendak kembali menghidupkan Piagam Jakarta sebagai "ilutif" sebab yang kini berlaku adalah Pembukaan UUD 1945 di mana tujuh kata dalam Piagam Jakarta telah dihapus secara konstitusional sejak tahun 1945. Ali menolak pendapat Prawoto Mangkusasmito yang di dalam sebuah bukunya masih mencoba menghidupkan kembali "*Djakarta Charter*." Sebagai pembenar posisinya, Ali menyatakan sependapat dengan Hatta maupun Sajuti Melik, dengan mana mereka (di dalam bukunya masing-masing) menyatakan tidak digunakannya tujuh kata Piagam Jakarta.

Pernyataan Ali Moertopo ini lekas dibalas oleh harian *Abadi*.[749] Harian yang dekat dengan Masyumi tersebut mengkritisi pernyataan Ali Moertopo di Gedung Stanja yang menyatakan agar keluarga besar "Bulan Bintang" tidak lagi membuang energi dengan upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Bagi *Abadi*, penghidupan kembali Piagam Jakarta bukanlah ilusi karena dalam

www.setabasri.org

[747] *KAMI*, 9 Oktober 1971.
[748] *ibid.*
[749] *Abadi*, 13 Oktober 1971.

konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, piagam tersebut disebutkan.[750]

Kembali mengenai upaya Soeharto melakukan rekayasa atas hirarki partai politik. Mengenai gagasan penyederhanaan partai politik Ali Moertopo mencoba meringkas dasar pikir Soeharto seputar menjamin prediktabilitas Indonesia:

> Maka sebaiknja DUA PARTAI POLITIK akan lebih *relevant* didalam *management* politik nasional jang harus menggunakan tiga *kredible* sebagai berikut: (1) Politik sosial jang akan melaksanakan akselerasi, modernisasi 25 tahun pembangunan Indonesia. *Djadi djelasnja* dua partai politik *jang saja* maksud adalah golongan spirituil materiil dengan nama apapun; (2) Golongan politik (partai politik) materiil spirituil dengan nama apapun; (3) Golkar bukan partai politik. *Djuga* hidup didalam masjarakat Indonesia *jang* dibuktikan didalam Pemilu *jang* baru lalu sebagai pembangunan nasional [yaitu] (a.) Dua partai politik, (b) Satu Golongan Karya (bukan parpol), (c) ABRI dengan *Dwifungsinja jang mempunjai* tanggung *djawab djuga* dalam mengisi kemerdekaan kita untuk pertahanan nasional dengan golongan lain. *Djadi* inilah *idee jang* ada didalam *fikiran banjak* pemimpin *menjimpulkannja* supaja lebih *djelas* dan tidak membingungkan *rakjat banjak*."[751]

2. UU Pemilu dan Susunan Anggota Parlemen

Masalah hirarki kompleks juga berupaya didominasi Soeharto melalui aturan konstitusional, yang ia produksi menggunakan kompetensi anggota aliansinya. Dalam penjelasan seputar Soeharto dan *bonding*-nya, maka salah satu

www.setabasri.org

[750] Saat menetapkan Tap MPRS No. 20/MPRS/1966 Nasution mengingatkan adanya upaya pengadudombaan melalui isu Piagam Jakarta. Nasution menyatakan pada para peserta *refreshing cource* Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) tanggal 21 Agustus 1966 agar mewaspadai usaha pemecah-belahan lewat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menurut Dekrit 5 Juli 1959 menjiwai UUD 1945 dan harus ditafsirkan menurut proporsinya. Namun, pihak partai politik menggunakan Piagam Jakarta untuk mengadu domba antara golongan Islam dengan golongan lain. Abadi juga menyatakan Dekrit 5 Juli 1959 diterima secara formal dan aklamatif tanggal 22 Juli 1959 dengan pernyataan resmi wakil-wakil umat Islam dari Masjumi, NU, PSII, dan Perti. Dengan demikian tidak tepat apabila masalah upaya penghidupan kembali Piagam Jakarta dialamatkan Ali Moertopo kepada keluarga besar "Bulan Bintang" saja. Lihat *Abadi*, 13 Oktober 1971.

[751] *Berita Yudha*, 9 Oktober 1971.

aliansi Soeharto adalah lingkaran Pater Beek. Lingkaran Katolik ini sulit dikesampingkan dalam mengarahkan langkah-langkah politik konstitusional Soeharto sejak 1968 hingga 1971.

Harry Tjan Silalahi menyebutkan bahwa Orde Baru memiliki sebuah konsensus politik nasional.[752] Bagian dari lingkaran Pater Beek ini menyebutkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dimufakati oleh masyarakat yang dalam hal politik diposisikan oleh DPR-GR dan eksekutif. Dari sisi Soeharto, pengaturan ini selaras dengan kecenderungannya untuk mendominasi. Sikap tidak patuh terhadap konsensus akan dimaknai sebagai tindakan yang melawan Pancasila dan UUD 1945 yang telah disetujui bersama.

Bagi Silalahi pula, maka sebelum Undang-undang Sistem Pemilu 1971 diratifikasi, telah diperoleh kesepakatan sebelumnya antara DPR-GR dengan eksekutif seputar prinsip mengenai aneka peraturan di dalam undang-undang tersebut yang terdiri atas:

> (1) Jumlah anggota DPR tidak boleh *ngombro-ombro*[753]; (2) Adanya *balance* / perimbangan yang baik antara jumlah perwakilan Pulau Jawa dan luar Jawa; (3) Faktor jumlah penduduk diperhatikan; (4) Adanya anggota yang diangkat di samping anggota yang dipilih; (5) Tiap kabupaten dijamin minimal mendapat 1 (satu) wakil; (6) Persyaratan mengenai domisili dihapus; (7) Yang diangkat adalah perwakilan ABRI dan non-ABRI, yang non-ABRI harus non-massa; (8) Jumlah yang diangkat untuk MPR adalah 1/3 dari seluruh anggota; (9) Jumlah anggota DPR ditetapkan 460 anggota, terdiri dari 360 anggota dipilih melalui pemilihan umum dan 100 anggota diangkat; (10) Sistem pemilihan ialah: *proportional representation* yang

[752] Konsensus tersebut adalah: "permufakatan-permufakatan bidang politik yang dibangun oleh masyarakat untuk mengejawantahkan pelaksanaan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen." Lihat Harry Tjan Silalahi, *Konsensus Politik Nasional Orde Baru: Ortodoksi dan Aktualisasinya*. Jakarta: CSIS, 1990, h. 3.
[753] *Ngombro ombro* kira-kira berarti banyak tertapi tidak bermakna.

www.setabasri.org

sederhana; (11) Stelsel pemilihan ialah: *lifsten-stelsel*;[754] dan (12) Daerah pemilihan adalah: Daerah Tingkat I.[755]

Untuk besaran jumlah anggota DPR Soeharto dan koalisinya memilih jumlah 460 anggota dengan 360 dipilih dalam kontestasi Pemilu dan 100 orang ditunjuk oleh presiden. Soeharto juga melibatkan ABRI agar memiliki perwakilan di dalam DPR dengan mana mereka ini ia angkat sendiri melalui surat keputusan presiden. Sistem Pemilu yang disepakati adalah proporsional karena diikuti oleh banyak partai dan ini berbeda dengan apa yang digagas oleh H.R. Dharsono dan lingkaran PSI yaitu sistem distrik dwi partai. Penggunaan sistem proporsional ini merupakan kesepakatan yang dibuat Soeharto dengan DPR-GR.

Kesepakatan tersebut diperoleh bukan sebagai hasil pendiktean oleh Soeharto melainkan melalui sejumlah perdebatan di DPR-GR. Namun, tentu saja apa yang dihasilkan simetris dengan kepentingan Soeharto untuk mendominasi aneka hirarki lain. Soeharto melalui anggota koalisinya berhasil memaksakan pokok-pokok konsensus di atas sehingga bermuara pada munculnya komoditas konstitusional berupa terbitnya UU No. 15/1969 dan UU No. 16/1969 yang substansinya adalah menciptakan keasimetrisan kekuasaan Soeharto.

Hal yang memicu Soeharto perlu membuat konsensus dengan melibatkan aneka hirarki adalah dilema antara *ortodoksi* dan *aktualisasi* dalam sebuah kekuasaan politik.[756] Persoalan dari Orde Lama adalah pembobotan mereka yang

www.setabasri.org

[754] *Lifsten Stelsel* adalah surat suara dengan gambar partai, bukan nama kandidat.
[755] Harry Tjan Silalahi, Konsensus …, *op. cit.,* h. 4.
[756] Ortodoksi mengacu pada upaya bahwa dalam menghadapi pembaruan, perkembangan, dan perubahan, maka bangsa Indonesia harus tetap merdeka, berdaulat, dan bersatu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aktualisasi mencakup perlunya pembaruan dan perubahan terus-

terlalu besar ada *aktualisasi* terutama aneka perubahan yang dibuat oleh partai-partai politik sehingga melupakan *ortodoksi* yaitu kesinambungan pembangunan antar pemerintahan. Sebagai bagian dari koalisi Soeharto, maka lingkaran Pater Beek menekankan pada masalah *ortodoksi* ini terkait dengan stabilitas politik agar Pembangunan ekonomi dapat berjalan.

Kecenderungan Soeharto untuk mendominasi aneka hirarki politik yang ada pun kemudian dibela oleh Harry Tjan dengan menulis:

> Persoalan kedudukan pemerintah yang kuat kiranya tidak perlu dipertentangkan dengan lemahnya peran DPR. … penyelenggaraan kehidupan nasional tidak didasarkan secara murni pada konsep "Trias Politika" yang berprinsip pada *the separation of powers* dalam badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dalam … fungsi legislatif … badan yang melaksanakan fungsi ini bukan hanya DPR (kalau boleh digolongkan sebagai badan legislatif) tetapi juga presiden (kalau boleh didudukkan sebagai kepala badan eksekutif). Sebab itu, persoalan kuat atau lemahnya kedudukan Pemerintah atau DPR sebenarnya sangat relatif.[757]

Pada saat menjelang Sidang Umum MPRS 1968, Soeharto diperhadapkan oleh masalah BP-MPRS yang anggotanya adalah 10% dari total anggota MPRS dengan tugas utama mengawasi kinerja Soeharto. Bagi Silalahi, posisi BP-MPRS akan mengurangi keleluasaan Soeharto dalam mengeksekusi program kerja kabinet karena presiden akan menghadapi dua jenis pengawasan yaitu dari BP-MPRS sendiri maupun DPR-GR.[758] Dengan lain perkataan dapat saja para individu dominan di dalam hirarki MPRS dan DPR-GR justru menjadi *contender* bagi *alpha male* dan sebab itu harus dilemahkan baik dengan cara dihapus (untuk

www.setabasri.org

menerus agar bangsa Indonesia mampu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan, dan keadaan. Lihat Harry Tjan Silalahi, Konsensus …, *op. cit.,* h. 4-5.

[757] *ibid.,* h. 13.

[758] Harry Tjan Silalahi, Konsensus …, *op. cit.,* h. 25.

BP-MPRS) ataupun Soeharto mereproduksi kekuasaannya di DPR-GR. Dengan demikian koalisi Soeharto berupaya memastikan agar selepas Pemilu 1971, BP-MPR yang mengawasi kinerja keseharian presiden ditiadakan.

Masalah krusial lain yang berdampak pada terhambatnya upaya dominasi Soeharto atas hirarki lain adalah terdapatnya keberatan atas konsensus mengenai anggota DPR dan MPR yang nantinya diangkat presiden.[759] Sebagai hasil Pemilu 1971 nantinya akan terdapat total 460 anggota parlemen, dan dari jumlah tersebut maka 360 orang dipilih melalui Pemilu sementara 100 orang diangkat tidak melalui jalur kontestasi (pemilihan). Dari 100 orang yang diangkat tersebut, maka 75 orang mewakili unsur ABRI dan 25 orang mewakili tiga "non" (non ABRI, non partai politik, dan non organisasi massa).

Adanya pengangkatan dari unsur ABRI dijustifikasi oleh koalisi Soeharto sebagai wujud penerimaan rakyat atas keikutsertaan ABRI dalam kehidupan sosial dan politik nasional sesuai dengan konsep Dwifungsi ABRI. Adanya pengangkatan dari perwakilan tiga "non" oleh presiden dimaksudkan untuk menjamin partisipasi kekuatan dinamik di Indonesia. Untuk MPR sendiri direncanakan akan terdapat sepertiga anggota yang diangkat, dan mereka ini terdiri atas utusan Golongan Karya ABRI dan non ABRI. Alasan mengapa Soeharto dan koalisinya berkeras terdapat sepertiga anggota MPR yang diangkat adalah berhubungan dengan keberadaan UUD 1945 yaitu agar MPR sulit untuk mengamandemennya.[760]

www.setabasri.org

---

[759] *ibid.,* h. 33.

[760] Harry Tjan Silalahi, Konsensus …, *op. cit.,* h. 34. Sehubungan dengan hal ini, Soeharto pernah berkata, "Kita tinggal menculik seorang anggota MPR saja untuk menggagalkan usul perubahan

Penyusunan Undang-undang Pemilu juga Susunan Anggota MPR/DPR merupakan upaya Soeharto untuk mendapat submisi dari individu dominan semua hirarki. Secara khusus, penyusunan UU dimaksudkan Soeharto guna memperoleh submisi kekuatan politik Islam dan nasionalis/sekuler/non Muslim. Para individu dominan di setiap hirarki kini diperhadapkan pada aturan hukum yang suka atau tidak harus mereka terima.

Sebelumnya, di dalam persidangan awal MPRS pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966 telah dikeluarkan TAP MPRS No. 11/MPRS/1966 bahwa Pemilu harus diselenggarakan tanggal 5 Juli 1968.[761] Ketetapan tersebut juga menyatakan bahwa DPR, DPRD, dan MPR baru akan terdiri atas "golongan politik dan karya" yaitu partai-partai politik dan kelompok-kelompok fungsional.[762] TAP tersebut juga menyatakan bahwa Undang-undang Pemilu harus diselesaikan selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal 5 Juli 1966.[763] Perdebatan parlemen baru dimulai tanggal 24 November 1966 setelah presiden mengirimkan draf RUU Pemilu kepada DPRGR.[764] Pada tanggal 27 November 1967 kemudian diputuskan bahwa pembahasan RUU Pemilu akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.[765] Pada bulan Januari 1968 Soeharto melontarkan pernyataan bahwa kurangnya persiapan teknis membuat Pemilu tidak mungkin dilaksanakan tanggal

www.setabasri.org

UUD 1945." Tidak ada keterangan apakah Soeharto tengah melontarkan humor atau serius dalam sumber ini. Harry Tjan Silalahi, Konsensus …, *op. cit.,* h. 34.

[761] Masashi Nishihara. *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*. Modern Indonesia Project. Ithaca: Cornell University, 1972., p. 4-5.

[762] *ibid.*, p. 5.

[763] Masashi Nishihara. *Golkar and …, op.cit.*, p. 5.

[764] *ibid*.

[765] *ibid*.

5 Juli 1968.[766] Mengenai penundaan Pemilu 1968 ini, secara khusus Nazaruddin Sjamsuddin menulis:

> Pertengahan 1968 merupakan waktu bagi pelaksanaan pemilihan umum yang ditetapkan oleh sidang umum keempat MPRS, untuk pertama kalinya. Tetapi kemudian pemerintah memberikan alasan bahwa soal-soal teknis persiapan penyelenggaraannya, seperti undang-undang pemilihan umum, belum lagi selesai dikerjakan oleh DPRGR, sehingga pelaksanaan pemilihan umum itu dengan sendirinya harus ditunda. Di dalam sidang kelima MPRS tahun 1968 usul penundaan pemilihan umum yang diajukan pemerintah telah diterima oleh majelis itu. Dan kemudian oleh MPRS, pemilihan umum ditetapkan akan dilangsungkan pada tahun 1971.[767]

Alasan penundaan Pemilu adalah beban penyelenggaraan Pemilu sangat besar yaitu 40 juta dolar atau setara dengan 5% anggaran negara pada tahun 1968 atau lebih dari 28% biaya pembangunan negara.[768] Alasan lain penundaan Pemilu adalah keamanan yang belum kondusif sebab Soeharto menghendaki turunnya terlebih dahulu ketegangan politik sehingga Pemilu tentu harus ditunda terlebih dahulu.[769] Dalam musim persidangan kelima MPRS antara tanggal 20 – 27 Maret 1968 dikeluarkan TAP MPRS No. 42/MPRS/1968 yang menyatakan bahwa jadwal baru bagi Pemilu adalah 5 Juli 1971.[770]

Setelah MPRS melakukan pengesahan atas penundaan Pemilu, maka komisi parlemen secara khusus melanjutkan pembahasan RUU Pemilu tersebut.[771] Namun, ternyata pembahasan RUU Pemilu lebih banyak menggunakan kompromi

www.setabasri.org

---

[766] *ibid*.
[767] Nazaruddin Sjamsuddin. *PNI dan Kepolitikannya 1963-1969*. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Press, 1984, h. 172-173.
[768] *ibid*.
[769] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 6.
[770] *ibid*.
[771] *ibid.*

di belakang layar dan para politisi di DPR-GR banyak menerima tekanan dari pemerintah yang berkehendak menguatkan legitimasi mereka melalui Pemilu.[772] Koalisi Soeharto berdalih bahwa apabila pembahasan UU Pemilu diserahkan sepenuhnya pada DPR-GR maka prosesnya akan lama dan jumlah anggota DPR yang diangkat akan terus menjadi kontroversi.[773]

Pembahasan terus berlanjut hingga tanggal 22 November 1969 saat UU Pemilu akhirnya disepakati.[774] Namun, UU ini disikapi oleh publik sebagai kembalinya "Orde Lama" dalam pengertian kembalinya esensi Demokrasi Terpimpin yaitu besarnya kekuasaan presiden untuk menentukan wakil rakyat.[775] Selain itu publik pun menilai bahwa UU Pemilu adalah bentuk "tindakan pola lama" oleh para "pemain lama" dan telah berkhianat terhadap semangat perubahan tahun 1966.[776] Rafitifikasi UU Pemilu juga dinilai sebagai kegagalan partai-partai politik dalam menyikapi permasalahan karena UU tersebut tidak akan mengembangkan demokrasi melainkan wujud penyerahan kedaulatan partai-partai politik kepada eksekutif.[777] Inti perdebatan dalam penyusunan UU Pemilu 1971 adalah:

> (1) perimbangan jumlah representasi partai politik dan kelompok fungsional di MPR; (2) perimbangan jumlah representasi militer dan non-militer kelompok fungsional di MPR, DPR, dan DPRD; (3) jumlah anggota DPRD yang diangkat; (4) siapa yang berhak menominasikan anggota non-militer dari kelompok fungsional di MPR, DPR, dan DPR; (5) jumlah delegasi daerah di MPR; (6) pergantian anggota MPR dan DPR; dan (7)

www.setabasri.org

[772] Peter McCawley, General Elections-Or an Election of Generals?. 1970. *The Australian Quarterly*. Vol. 42, No. 3 (Sep.), pp. 65- 74., p. 68.
[773] *ibid*.
[774] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 6.
[775] Peter McCawley, General Elections …, *op. cit.,* p. 67.
[776] *ibid.*
[777] *ibid.,* p. 68.

> status para pejabat pemerintah, baik militer ataupun non-militer, yang menjadi anggota MPR, DPR, dan DPRD.[778]

Setelah UU Pemilu disahkan kemudian juga muncul serangkaian pertanyaan baru, dengan hal utama yang mengemuka adalah siapa yang berhak untuk memilih.[779] Masalah pertama ini juga termasuk organisasi yang dilarang dan sebab itu PSI dan Masyumi masuk ke dalamnya. Perdebatan lain yang juga muncul adalah apakah larangan untuk memilih juga termasuk bagi para anggota Masyumi dan PSI ataukah hanya para pimpinannya saja.[780]

Hal lain yang juga dipermasalahkan adalah "pengelompokan" partai politik.[781] Pernyataan di dalam UU Pemilu bahwa yang dapat mengikuti kontestasi hanya partai politik atau kelompok yang telah memiliki representasi di DPR-GR bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat seperti dikritik oleh Asosiasi Pengacara Indonesia.

Kelompok Soeharto sentris akhirnya adalah pihak yang memenangkan pertarungan dalam penyusunan UU Pemilu dengan mana kelompok fungsional yang diangkat semakin besar yaitu sepertiga dari 920 anggota MPR sehingga meliputi 307 kursi, untuk DPR sebesar 22% dari 460 anggota (meliputi 100 kursi),

www.setabasri.org

---

[778] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 6-7.
[779] Peter McCawley, General …, *op. cit.*, p. 68. Dalam UU dinyatakan bahwa para bekas anggota PKI dan organisasi yang terafiliasi dengannya tidak boleh memilih. Namun, jumlah mereka diperkirakan antara 15 hingga 20 juta sehingga tidak mungkin seluruhnya ditolak hak memilihnya.
[780] Apakah orang-orang seperti Sudjatmoko, Sumitro Djojohadikusumo, Rosihan Anwar, M. Natsir, Prawoto Mangkusasmito, M. Roem, Kasman Singodimedjo tidak boleh memilih sementara mereka dahulunya juga pimpinan Masyumi dan PSI. Masalah kemudian bertambah bahwa eks Masyumi dan PSI dari Kalimantan Barat yang dalam pemilihan daerah tahun 1958 dikeluarkan dari hak pilih juga termasuk kategori serupa yaitu tidak memiliki hak pilih. Lihat *ibid.*, p. 68.
[781] *ibid.,* p. 69.

dan 22% pula keanggotaan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.[782] Soeharto pun terkesan mengulur waktu pembahasan UU Pemilu untuk memberi waktu bagi terselenggaranya konsolidasi di tubuh Sekber Golkar dan berhasilnya penundaan Pemilu dari tanggal 5 Juli 1968 ke tanggal 5 Juli 1971 (kurang lebih tiga tahun) dianggap relatif cukup untuk melakukannya.[783] Tujuan Soeharto melaksanakan Pemilu dalam kata-katanya sendiri adalah:

> Penyelenggaraan Pemilu itu … harus dapat menjamin kemanfaatan tujuan pemilu itu sendiri … untuk menciptakan stabilitas politik … pelaksanaan pemilu harus dapat kita laksanakan demikian rupa sehingga dapat tetap menjamin dipertahankannya Pancasila dan UUD '45, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Repelita dan sekaligus untuk lebih memperkuat stabilitas politik.[784]

Sebuah konsep yang dikenal sebagai demokrasi substansial dalam tujuan Pemilu bagi Soeharto dapat dikatakan tidak dipikirkan. Sebelum UU Pemilu disepakati oleh eksekutif dan DPR-GR, sebelumnya pada tanggal September 1969 Amir Machmud (Mendagri) mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan memulai persiapan Pemilu.[785] Panjangnya perdebatan RUU Pemilu sejak 1966 hingga 1969 antara kelompok fungsional yang didominasi militer melawan partai-partai politik sekaligus mencerminkan ketidakpercayaan diri Soeharto akan popularitas Sekber Golkar.[786]

www.setabasri.org

[782] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 7.
[783] *ibid*.
[784] R. E. Elson. *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Cetakan 2. Penerjemah Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Jakarta: Pustaka Minda, 2005, h. 352.
[785] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 7.
[786] Yaitu dari 53,8% (setara 161 kursi) sebelum Gestapu menjadi 54,9% (setara 133 kursi) di tahun 1966, lalu mencapai 55,5% (setara 194 kursi) pada tahun 1967. Lihat *ibid.*, p. 7.

Sejak tahun 1965 hingga 1967 Soeharto telah mengupayakan penguatan Sekber Golkar sehingga pembagian kursi bagi "partai khusus" tersebut di DPR-GR terus meningkat.[787] Namun pada tahun 1968 proporsi kursi Sekber Golkar berkurang.[788] Tentu saja kondisi ini sangat tidak menguntungkan posisi Soeharto dan para pendukungnya.

Pada akhir tahun 1968 masalah Soeharto untuk menundukkan aneka hirarki mendapat tantangan dari H.R. Dharsono (Mayjen) yang mempromosikan pemberlakuan sistem dua partai yang mengacu pada "sistem dua kelompok" di mana Sekber Golkar sendiri tidak masuk kategori partai politik.[789] Dharsono kemudian mengulangi usulannya pada tahun 1970.[790] Dalam sistem ini maka satu partai adalah partai pemerintah sementara partai lainnya yang tidak berkuasa berlaku sebagai partai pengoreksi atau oposisi. Apa yang diusulkan Dharsono dalam pandangan Soeharto akan menyulitkan upayanya mendominasi hirarki lain.[791] Pada bulan Februari 1970 eksperimen Dharsono ditolak oleh Soeharto.[792]

Sejak awal 1969 Soeharto juga bertentangan dengan Dharsono mengenai konsep restrukturisasi kepartaian dan akhirnya gagasan "dua partai" pun

www.setabasri.org

[787] R. E. Elson. Suharto …, *op. cit.,* p. 7-8.
[788] Menjadi 40,4% (setara 167 kursi) dan partai politik mengambil 59,6% (setara 247 kursi) dan dengan demikian terjadi peningkatan kursi partai politik sebanyak 99 kursi dari tahun 1967. Lihat Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 8.
[789] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 8.
[790] Donald Hindley, Indonesia 1970 …, *op. cit.,* p. 116.
[791] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 9.Pemerintah atau khususnya Divisi Siliwangi bahkan sempat melakukan eksperimen pada bulan Januari 1969 atas DPRD dengan mana diterapkan sistem dua kelompok melalui instruksi langsung Dharsono kepada DPRD-GR Kabupaten Ciamis Jawa Barat.
[792] *ibid.*, p. 10. Soeharto lebih tertarik pada gagasan "tiga kelompok" yang terdiri atas kelompok "pembangunan material" (kelompok nasionalis), "pembangunan spiritual" (kelompok agama), dan Sekber Golkar, tanpa adanya kemungkinan "oposisi" atau "pengoreksi.

menghilang.[793] Soeharto menganggap apabila gagasan Dharsono diimplementasikan maka akan terjadi kondisi simetris kekuasaan antar hirarki sehingga membahayakan hirarki dominan yang hendak dibangunnya.[794]

Surat kabar *Indonesia Raya* menekankan bahwa restrukturisasi politik harus dilakukan sebelum Pemilu karena pemerintah akan sulit menjalankan program kerja apabila mendasarkan diri pada basis koalisi.[795] Akibat keseriusan Dharsono dalam menjalankan konsep yang ternyata bertentangan dengan kehendak Soeharto maka pada tahun 1970 Soeharto mengirimnya sebagai Duta Besar di ASEAN. Apa yang dikonsensuskan antara DPR-GR dan eksekutif kemudian mewujud ke dalam dua Undang-undang yaitu UU No. 15/1969 dan UU No. 16/1969.[796]

Dalam konteks pendominasian dalam hirarki kompleks, DPR-GR adalah salah satu targetnya. Soeharto memastikan bahwa seluruh anggota parlemen lepas dari perseteruan ideologi seperti masa Sukarno yang memancing kondisi *turmoil* politik. Untuk itulah maka pada tanggal 9 Februari 1968, sesaat sebelum ia diangkat sebagai presiden, Soeharto mengumumkan bahwa akan terdapat 124 anggota yang akan di-*recall* dari partai politik.[797] Revitalisasi jumlah anggota

www.setabasri.org

[793] Donald Hindley, Indonesia 1970: The Working of Pantjasila Democracy. 1971. *Asian Survey.* Vol. 11, No. 2 (Feb.), pp. 111-120., p. 116.
[794] *ibid.*, p. 116.
[795] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 9.
Namun, hingga Pemilu 3 Juli 1971 dilaksanakan gagasan tiga kelompok ini belum terjadi. Pemilu diikuti 9 partai politik dan Sekber Golkar. Namun, koalisi ternyata tidak diperlukan karena Sekber Golkar menang secara signifikan (di atas 60%).
[796] UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat. UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
[797] Keputusan tersebut dilakukan setelah Soeharto melakukan diskusi dengan para pimpinan partai politik dan ormas yang memiliki keterwakilan di kamar parlemen tersebut. Soeharto juga sempat mengumumkan bahwa keanggotaan DPR-GR akan ditambah sebanyak 64 orang dari awalnya hanya 347. Rinciannya adalah 347 (lama) ditambah 67 menjadi 414 orang. Konfigurasinya adalah 247 berasal dari partai politik, 20 kursi baru untuk aneka kesatuan aksi, dan selebihnya untuk

DPR-GR ini ditujukan untuk memastikan efektivitas Rancangan Undang-undang anggota-anggota DPR dan MPR.[798] Sasaran dari *recall* ini adalah anggota ormas yang tergabung dalam Sekber Golkar tetapi juga menjadi anggota partai politik dengan rincian pada **Tabel 9** *Recall Anggota Ormas di DPR-GR 1968*.

Tabel 9 Recall Anggota Ormas di DPR-GR 1968
Sumber Tabel: Berita Yudha, 10 Februari 1968

Induk Ormas	Nama Ormas	Jumlah Awal	Recall
Sekber Golkar	SOKSI	21	1
	MKGR	1	1
	Koperasi	2	0
	Buruh	4	3
	Pendidik	1	1
	Pemuda	2	2
	Richani	1	1
	Wartawan	1	0
Lainnya	Irbar (Irian Barat)	8	6
	Hindu Bali	2	2
	Angkatan 45	3	1
	Kowani	1	0
Kesatuan Aksi	KAMI	14	5
	KAWI	1	1
ABRI	TNI-AD	-	4
	TNI-AL	-	4
	TNI-AU	-	4
	TNI-AK	-	4
	Veteran	1	0
	Hansip	1	1
Non Massa	IKAHI	1	1
	Persadja	2	0
	PII	1	1
	IDI	1	0
	Persahi	2	1
	ISPI	1	1
	Persami	1	1
	Tjendikiawan	1	1

www.setabasri.org

Sekber Golkar dan golongan lain yang belum pernah memiliki wakil di DPR-GR. Lihat *Berita Yudha*, 9 Februari 1968.

[798] Soeharto menyebutkan bahwa tindakan recall atas mereka terutama dengan alasan menciptakan stabilitas dan menjalankan program Kabinet Ampera yang ia pimpin. Lihat *Berita Yudha*, 10 Februari 1968.

Recall adalah upaya Soeharto memastikan loyalitas individu dalam hirarki lain atas dominasinya. Dalam membenarkan upaya perombakan jumlah anggota DPR-GR, Soeharto melindungi dirinya dengan UU No. 10/1966. Namun, menurutnya sendiri maka jumlah maksimal 414 orang telah disepakati oleh para wakil partai politik dan ormas yang dari total 414 orang, 90 orang di antaranya diangkat dan 324 dipilih.[799] Perhatian Soeharto untuk memastikan dominasi di DPR-GR terkait dengan rencananya menyusun *zaken* kabinet yang dinamai Kabinet Pembangunan yang diumumkannya pada tanggal 6 Juni 1968, yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan prediktabilitas spesies.[800]

Pada tahun berikutnya, Amir Machmud pada akhir tahun 1969 mengeluarkan aturan No. 12 yang kontroversial dan sebagai Menteri Dalam Negeri, Amir hendak memaksakan peraturan tersebut untuk diimplementasikan.[801] Inti dari peraturan tersebut adalah memurnikan perwakilan golongan fungsional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia. Soeharto dan lingkaran pemikirnya telah mengamati eksistensi anggota golongan fungsional di DPRD yang juga terafiliasi dengan partai politik. Afiliasi

www.setabasri.org

[799] *Berita Yudha*, 14 Februari 1968. Sebelum disahkannya UU Susunan Anggota MPR/DPR Soeharto juga telah memberikan peringatan bahwa nantinya setelah Pemilu 1971 total jumlah anggota DPR hanya terdiri atas 460 orang dengan mana 360 orang yang dipilih dan 100 orang ditunjuk.

[800] *Berita Yudha*, 7 Juni 1968. Kabinet Pembangunan ini lebih ramping ketimbang Kabinet Ampera terlebih lagi Kabinet Dwikora karena hanya terdiri atas 23 menteri dan 5 di antaranya menjabat sebagai menteri negara. Kinerja kabinet ini hanya akan stabil apabila DPR-GR (kelak DPR) juga terjamin konfigurasinya untuk mendukung presiden. Komposisi menteri Kabinet Pembangunan sendiri terdiri atas 8 orang wakil partai politik, 6 orang dari ABRI, dan 9 orang non partai politik dan non ABRI.

[801] Peter McCawley, General Elections …, *op. cit.,* p. 71.

tersebut mendorong menguatnya hirarki partai partai politik di dalam golongan fungsional, sehingga pengaruh partai politik harus dilemahkan.[802]

Dalam sebuah editorialnya, harian *Pedoman* memprotes personalitas Menteri Dalam Negeri karena posisi "keras" Amir Machmud, simplistis pikirannya, dan misi yang ia emban telah diketahui publik yaitu mengamankan kemenangan strategi pemerintah atau strategi TNI-AD.[803] Setelah sempat tertunda selama beberapa tahun, Undang-undang No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat akhirnya diundangkan pada tanggal 19 Desember 1969 oleh Soeharto. Sejumlah pasal dan ayat di dalam UU No. 15/1969 menarik untuk disebutkan karena ada persangkutannya dengan penjaminan kemenangan Sekber Golkar dan terbukanya intervensi Soeharto selain yang bersangkutan dengan masalah PKI.[804]

Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden, dan pada ayat 2 dimungkinkan bahwa hanya presiden saja yang dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemilu tanpa lembaga pengimbang.[805] Presiden melakukan dominasi atas hirarki lain melalui Mendagri.

www.setabasri.org

---

[802] *ibid.* NU sempat memprotes ketentuan ini tetapi Amir Machmud tetap pada pikirannya dan Soeharto karena menguntungkan posisinya, tentu saja membiarkan Amir bertindak. Lihat *ibid.*

[803] Peter McCawley, General Elections …, *op. cit.,* p. 72. Pedoman juga menyebut Amir bertindak seperti komandan lapangan dengan target jelas yaitu mengamankan kemenangan strategi pemerintah dengan memastikan logistik tersedia dan mampu untuk dimobilisasi.

[804] Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam ayat 1. Dengan ayat ini menjadi wajar apabila Soeharto terus berkeras bahwa apabila hendak ikut Pemilu 1971, maka Masyumi harus menggunakan nama baru dan para tokoh Masyumi tidak diberi hak untuk dipilih. Hal demikian berlaku juga untuk PSI kendati pun seorang tokoh pendukung PRRI dari PSI yaitu Sumitro Djojohadikusumo justru telah dijadikan sebagai Menteri Perdagangan oleh Soeharto sejak tahun 1968. Lihat Departemen Penerangan, *Pemilihan Umum 1971: Undang-undang dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannja*. Tjetakan ke II. Djakarta: Pantjuran Tudjuh, 1970, h. 5.

[805] Struktur penyelenggara Pemilu 1971 pada pasal 8 ayat 5 terdiri atas Menteri Dalam Negeri selaku anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selaku anggota sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala

Amir Machmud yang telah secara umum diketahui sebagai penjamin kemenangan Sekber Golkar, berposisi selaku anggota dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia. Secara vertikal maka Amir selaku Mendagri memiliki kekuasaan atas para Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah/Kepala Desa. Netralitas tentu saja bukan konsep yang diperhatikan dalam UU No. 15/1969 ini melainkan bagaimana Sekber Golkar dapat mengukur secara lebih pasti perihal kemenangan mayoritas baginya dalam Pemilu sehingga dominasi Soeharto menjadi terjamin.[806]

Undang-undang Nomor 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diundangkan oleh Soeharto pada tanggal 19 Desember 1969 dan dengan demikian terbit bersamaan dengan UU tentang Pemilu 1971.[807] UU No. 16/1969 ini cukup memberikan perhatian kepada eksistensi golongan fungsional. Misalnya disebutkan bahwa anggota tambahan MPR dari unsur Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya harus ditetapkan berdasarkan imbangan hasil Pemilu.[808]

www.setabasri.org

Daerah Tingkat II selaku anggota sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan selaku anggota sekaligus Ketua Panitia Pemungutan Suara, dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang Setingkat dengan Desa selaku anggota sekaligus Panitia Pendaftaran Pemilih. Lihat *ibid.,* h. 10.

[806] Untuk Daerah Tingkat I dan II diberhentikan mendagri atas usulan Gubernur/setingkat, sementara untuk untuk Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/setingkat atas usulan Camat. Kekuasaan Amir Machmud ini tampak dalam Pasal 8 ayat 6 yang menyatakan bahwa anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri. Lihat *ibid.*, h. 10-11.

[807] Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1971 nantinya akan terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik, dan Golongan Karya. Jumlah anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah anggota DPR. Lihat *ibid.*, h. 57.

[808] Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya yang mengikuti Pemilu, tetapi tidak mendapat wakil di DPR, dijamin satu utusannya berada di MPR asalkan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 10 orang utusan. Bagi Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya non Angkatan Bersenjata ditetapkan berdasarkan pengangkatan. Lihat *ibid.*, h. 58.

Jumlah anggota MPR yang diangkat terdiri atas sepertiga dari anggota MPR dan terdiri atas tiga kategori. Pertama, Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan non Angkatan Bersenjata. Kedua, anggota tambahan MPR dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata dengan surat pengangkatan dari Presiden Soeharto atas usul Menhankam (Soeharto) atau Pangab (Soeharto). Ketiga, anggota tambahan MPR dari Golongan Karya non Angkatan Bersenjata diangkat melalui keputusan Presiden Soeharto atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakarsa Presiden Soeharto. Selain itu, Presiden Soeharto juga berhak menetapkan jumlah Utusan Golongan Karya ABRI dan non ABRI. Pengangkatan-pengangkatan ini tentu saja memperlihatkan kesempatan yang begitu besar bagi Soeharto untuk memastikan dominasinya atas hirarki MPR dan DPR.

Terdapat dua aturan dalam UU No. 16/1969 mengenai penetapan anggota DPR yang diangkat. Pertama, Golongan Karya ABRI pengangkatannya ditetapkan melalui usulan Menhankam / Pangab (Soeharto) dan diresmikan dengan Keputusan Presiden (Soeharto). Kedua, Golongan Karya non ABRI diangkat oleh Presiden Soeharto, baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden Soeharto sendiri.[809]

Soeharto cukup asing dengan konsep demokrasi karena organisasi tempat ia hidup selama ini mempengaruhinya untuk berpikir secara Otoritarian. Apa yang ia pahami adalah rantai komando militer yang efektif. Pemahaman ini kemudian diperluasnya pada upaya untuk mendominasi aneka hirarki yang berpotensi menghambat efektivitas kekuasaan yang tengah ia susun secara hati-hati.

www.setabasri.org

[809] Departemen Penerangan, Pemilihan Umum 1971 …, *op. cit.,* h. 66.

Dalam konteks Pemilu, Soeharto tidak berkeberatan dengan konsep massa mengambang (*floating mass*). Sementara Sekber Golkar kendati juga tetap dilarang aktivitasnya di tingkat desa akan tetapi para birokrat hingga level desa harus memiliki "monoloyalitas" pada Sekber Golkar. Dalam alur pikir lingkaran Pater Beek yang dekat dengan Ali Moertopo, Harry Tjan Silalahi menjelaskan mengenai massa mengambang ini:

> Tetapi jika ditilik dari sejarah lahirnya konsepsi *floating mass*, hakikat konsep itu kiranya dapat dipahami … secara substansiil dimaksudkan agar rakyat jangan secara sepihak dianggap menyatu sebagai anggota suatu partai politik tertentu secara massal. Konsepsi ini lahir karena pengalaman sebelumnya menunjukkan berbagai akibat negatif-destruktif terhadap persatuan-kesatuan bangsa Indonesia dari penyelenggaraan prinsip keanggotaan partai politik yang bersifat massal … peristiwa traumatik tahun 1965/1966 salah satu sebabnya adalah ketidaksadaran orang ikut / menjadi anggota partai politik.[810]

Sama seperti telah diungkap para filosof abad pencerahan semisal Jean Jacques Rousseau bahwa tidak seluruh warga negara dapat melibatkan diri dalam proses politik. Mereka memiliki pekerjaan sendiri-sendiri untuk melakukan reproduksi seperti menjadi petani, petambak, kuli, peternak, atau pedagang. Urusan politik sebaiknya diserahkan kepada suatu badan yang khusus mengerjakan dan dibayar untuk itu.

Dalam logika ini maka konsep *floating mass* tidak sepenuhnya salah karena memang sesuai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang berprofesi sebagai politisi atau sepenuhnya aktif sebagai anggota partai politik. Dalam *floating mass* partisipasi rakyat banyak dalam politik diarahkan terutama pada kegiatan Pemilu.

[810] Hary Tjan Silalahi. Konsensus …, *op. cit.,* h. 36.

www.setabasri.org

Oleh Ali Moertopo bekerja sama dengan Amir Machmud maka diterapkanlah konsep *floating mass*, tetapi bukan dengan tujuan "menyelamatkan rakyat" melainkan menggembosi basis-basis primordial partai politik dan melakukan ekstensifikasi pengaruh Sekber Golkar. Dalam memoarnya Yusuf Wanandi mengakui bahwa salah satu nilai yang bisa dijual oleh Sekber Golkar adalah kedekatannya dengan militer.[811]

3. Mekanisme *Inclusive Fitness* : Trilogi Pembangunan

Inclusive fitness adalah konsistensi individual berupa kecenderungan hewan juga manusia untuk menyesuaikan perilaku mereka terhadap lingkungan demi keberhasilan reproduksi maksimal dalam jangka panjang. Salah satu wujud perilaku *inclusive fitness* adalah kooperasi (kerja sama).[812] Dalam konteks kajian disertasi ini, maka mekanisme *inclusive fitness* berlangsung dalam aktivitas kerjasama sesuai bentuk yang dikehendaki oleh *alpha male*. *Alpha male* dapat menjadi inisiator yang menentukan bentuk kerja sama karena apa pun bentuknya, kerja sama tersebut semata-mata harus tetap menjamin posisi dominasinya.

Soeharto adalah *alpha male* yang sedang menghadapi hirarki kompleks ditandai individu dominan di masing-masingnya. Akibat kompleksitas hirarki ini maka menjadi tidak mungkin bagi Soeharto untuk secara satu per satu mendominasi seluruh hirarki yang ada. Dari sudut pandang Biopolitik, Soeharto cenderung memanfaatkan hasil perkembangan proses evolusi biologis manusia

www.setabasri.org

[811] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir …, *op. cit.,* h. 128-129.
[812] Roger D. Masters, "The Biological Nature of the State." 1983. World Politics. Vol. 35, No. 2, Jan., pp. 161 – 193.

yang disebut dengan imajinasi kolektif.[813] Dengan imajinasi kolektif ini maka *alpha male* dari spesies manusia sanggup mengajukan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh individu-individu non dominan jika ingin tetap bertahan hidup. Para individu selain *alpha male* bisa saja setuju atau tidak setuju dengan konsep yang diajukan, tetapi apabila mereka ingin terus bertahan hidup maka mereka harus mau bekerja sama dengan *alpha male.* Sub ini hanya akan membicarakan empat konsep kerjasama yang harus diterima oleh individu-individu dominan dalam hirarki kompleks yang secara konseptual disebut Trilogi Pembangunan yang terdiri atas Pemerataan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Stabilitas Nasional.[814]

Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi (selanjutnya disebut Pembangunan Ekonomi) adalah prasyarat mekanisme *inclusive fitness* dari Soeharto bagi hirarki lain yang hendak bertahan hidup. Konsep ini diperoleh Soeharto dari hasil kajian Seskoad. Bagi Soeharto sendiri, konsep Pembangunan lebih disikapi sebagai taktik untuk melakukan dominasi atas aneka kekuatan politik yang tidak bersetuju dengannya.

Seperti telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa di dalam Seskoad terjadi formulasi konsep Pembangunan yang nyata, pragmatis, dan berorientasi pada pembukaan pasar dan investasi. Soeharto melihat bahwa konsep Pembangunan

www.setabasri.org

[813] Imajinasi Kolektif adalah gagasan abstrak, sangat terbatas dimiliki primata besar selain manusia, tetapi merupakan langkah termaju bagi *homo sapiens.* Imajinasi Kolektif adalah konsep yang dipahami individu secara sama dalam kuantitas kelompok yang jauh lebih besar ketimbang primata besar non manusia. Lihat Yuval Noah Harari. *Sapiens.* Penerjemah: Yanto Mustopha. Cetakan 1. Tangerang Selatan: Alvabet, 2017., h. 33.
[814] Endang Retnowati. *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila*. Jakarta: LIPI Press, 2018, h.3.

dapat digunakan untuk menjamin dominasinya dengan dirinya selaku inisiator konsep dan penafsir. Akibatnya, hirarki politik lain harus menyesuaikan diri terhadap kekuasaan yang tengah ia bangun.

Salah satu entitas hirarki kompleks yang harus menjalankan mekanisme *inclusive fitness* adalah partai politik. Pembangunan hanya bisa terjadi jika ada stabilitas politik. Semakin banyak partai maka semakin besar potensi perlambatan rencana kerja Pembangunan. Hal ini dengan asumsi proses meratifikasi aneka rencana pemerintah akan mendapat banyak argumentasi berlarut-larut di parlemen. Sebab itulah maka pada tanggal 2 Februari 1970, Soeharto menekankan bahwa kekuatan sosial-ekonomi di Indonesia harus dibagi ke dalam tiga kelompok utama yaitu kelompok spiritual, material, dan fungsional.[815] Namun saat itu (tahun 1970) partai-partai politik menolak peraturan dari Menteri Dalam Negeri yang hendak memformalkan golongan fungsional, karena formalisasi tersebut jelas bertentangan dengan kepentingan mereka untuk memperluas basis massa.

Soeharto terus mempromosikan upayanya untuk merekayasa hirarki kepartaian ke dalam kelompok spiritual dan material dengan alasan utama bahwa "semua partai politik dan kekuatan sosial politik lainnya harus memiliki semangat dan orientasi baru yang *cocok* dengan Pembangunan bangsa."[816] Atas nama Pembangunan pula Soeharto ingin merekayasa sistem kepartaian melalui cara

www.setabasri.org

[815] Geoffrey Gunn, Ideology …, *op. cit.,* p. 759-760. Konsep Soeharto ini sebenarnya diarahkan untuk melakukan rekayasa atas sistem kepartaian Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 1970 NU, Parmusi, PSII, dan Perti mencapai kesepakatan untuk membentuk kelompok kesatuan spiritual. Pada sisi lain aneka partai seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, IP-KI, dan Murba sepakat membentuk kelompok material.
[816] *ibid.,* p. 760

penyederhanaan jumlah partai politik, bukan menghilangkan satu atau sejumlah partai.

Tekanan Soeharto atas konsep Pembangunan sesungguhnya hampir serupa dengan saat ia menekankan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Implikasi konsep Pembangunan adalah stabilitas politik dan ini merupakan peringatan bagi partai-partai politik yang ingin mengulangi instabilitas parlemen seperti era Demokrasi Liberal.

Pada tanggal 13 Januari 1966, dalam amanat tertulis pada pekan ceramah di Universitas Indonesia, Soeharto menyatakan bahwa masalah ekonomi Indonesia sifatnya sangat kompleks dan sebab itu tidak bisa diselesaikan secara teknis-ekonomis belaka melainkan lebih dari itu yaitu harus melihat kondisi obyektif dan suara hati rakyat.[817] Salah satu faktor yang membuat mahasiswa turun ke jalan dan berdemonstrasi adalah akibat masalah Pembangunan ekonomi ini, juga pemerintah menghadapi dilema akibat keluarnya SK No. Aa/D/25/1966.[818]

Pentingnya konsep Pembangunan bagi Soeharto adalah kemampuannya untuk diarahkan sebagai "prinsip yang harus diakui" bagi semua hirarki politik yang ada melalui mekanisme *inclusive fitness*, dan ini ditampakkan pada sebuah momentum yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1966. Saat itu dalam sambutan tertulisnya di depan penutupan Penataran Sekber Golkar di Jakarta, Soeharto menyatakan bahwa masyarakat kini menghendaki pembangunan untuk ditangani

www.setabasri.org

[817] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968., *op. cit.,* h. 39-40.
[818] *ibid.,* h. 45-46. Inti dari SK tersebut adalah untuk menjamin kesinambungan produksi dan distribusi arus barang, maka pemerintah terpaksa menerapkan prinsip *cost accounting* yang berimplikasi atas terjadinya kenaikan harga dan tarif jasa.

oleh para ahli. Namun, pada masa "liberal" dan "durnoisme" mereka yang ahli disingkirkan oleh oknum tidak becus yang didukung organisasi politik.[819] Dengan demikian pelaksanaan nyata Pembangunan – bagi Soeharto – harus diperankan oleh para teknokrat bukan oleh para politisi. Pernyataan ini merupakan peringatan Soeharto yang ditujukan terhadap aneka partai politik yang masih berharap membarter kursi menteri dengan dukungan politik.[820]

Dalam sambutannya di depan Kongres ke-6 Serikat Kerja Direktorat Pajak di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Soeharto kembali menekankan pentingnya Pembangunan.[821] Pembangunan yang dimaksud oleh Soeharto pun tidak terlepas kaitannya dengan stabilitas politik dan sebab itu tugas yang dijalankan oleh Kabinet Ampera yang ia pimpin cukup berat. Bagi Soeharto stabilitas politik dan Pembangunan saling berkaitan. Kesulitan lain yang dihadapi kabinetnya adalah kenyataan adanya semacam gerilya politik dan gerilya ekonomi yang tidak menghendaki keberhasilan program Pembangunan yang direncanakan oleh Kabinet Ampera.

Soeharto juga mengingatkan DPR-GR bahwa dalam hal Pembangunan ekonomi publik, mereka (para politisi) harus bersikap realistis. Posisi ekonomi yang berada di tingkat yang kurang baik sedikitnya membutuhkan dua jenis solusi yang berkenaan dengan bantuan luar negeri. Pertama, penundaan pembayaran

www.setabasri.org

[819] *ibid.,* h. 103-104.
[820] Kabinet Ampera hanya terdiri atas 23 departemen dengan sedikit sekali wakil dari partai politik yaitu hanya meliputi Idham Chalid dan Muhammad Dahlan dari NU serta Frans Seda dari Partai Katolik. Lihat *ibid.*, h. 310.
[821] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968., *op. cit.,* h. 105.

aneka utang lama. Kedua, pencarian kredit baru dari luar negeri.[822] Dengan demikian Pembangunan yang digagas oleh Soeharto memerlukan pemahaman publik dalam negeri bahwa mengalirnya bantuan asing atau bantuan luar negeri tidak bisa dielakkan karena justru memang dibutuhkan bagi Pembangunan ekonomi.[823]

Mekanisme *inclusive fittness* lainnya adalah Stabilitas Nasional. Bahwa setiap kekuatan politik yang ada kini wajib menyesuaikan diri dengan Stabilitas Nasional yang hendak dibangun oleh Soeharto. Stabilitas Nasional ini tidak lain sebagai penyokong kemampuan Soeharto di dalam melakukan Pemerataan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Salah satu cara Soeharto di dalam menciptakan Stabilitas Nasional adalah dengan memanfaatkan keberadaan Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan Surat ini Soeharto memperoleh legitimasi untuk mengambil aneka langkah untuk mengatasi instabilitas politik pasca Sukarno terutama melalui lembaga Kopkamtib. Dengan demikian, Stabilitas Nasional Indonesia pasca Sukarno sulit untuk mengesampingkan peran Supersemar, bahwa Supersemar adalah jalan utama menuju dominasi Soeharto atas hirarki kompleks. Soeharto adalah satu-satunya individu yang memonopoli Supersemar yang kemudian dilegitimasi oleh MPRS melalui sebuah TAP. Dalam surat tersebut presiden yang sah saat itu memberikan kewenangan bagi Soeharto untuk mengambil "langkah apa pun" guna mengembalikan ketertiban dan keamanan negara. Hirarki-hirarki politik

www.setabasri.org

[822] *ibid.,* h. 110.
[823] *ibid.*, h. 125. Di dalam sambutan tertulisnya dalam Seminar II Serikat Sekerja Pos Telepon dan Telekomunikasi yang terintegrasi dengan Sekber Golkar Soeharto menyatakan pentingnya Pembangunan di bidang ekonomi bagi proses stabilitas politik.

selain Soeharto harus mau menerima kenyataan bahwa hanya Soeharto yang memegang kekuasaan dalam Supersemar dan oleh sebab itu mereka harus mau menerima dan bekerja sama atas dasar itu.

Setelah rapat Kabinet Dwikora tanggal 11 Maret 1966 yang dipimpin Sukarno "terancam" oleh kehadiran pasukan tanpa tanda pengenal yang digerakkan oleh Kemal Idris, dimulailah tekanan Soeharto kepada Sukarno untuk menyerahkan kendali keadaan. Soeharto menyampaikan pesan kepada tiga perwira yang terhitung dekat dengan Sukarno yaitu M. Jusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat, yang berniat menghadap Sukarno ke Istana Bogor agar memberi legalitas pada Soeharto untuk mengembalikan ketertiban. Hasil pertemuan ketiga perwira dengan Sukarno inilah yang kemudian melahirkan Supersemar, dan sejak itu reproduksi kekuasaan Soeharto meningkat dengan pesat.

Kendati kini publik banyak mempersoalkan keaslian Supersemar atau bahkan menuding Soeharto melakukan semacam pemalsuan atasnya, disertasi ini berasumsi bahwa Supersemar adalah otentik. Dalam posisinya saat itu sebagai *alpha male*, Sukarno tidak akan begitu saja mendelegasikan kekuasaan kepada Soeharto, sebab ia sendiri bukan tipe orang yang bisa dipaksa. Pemicu lahirnya Supersemar adalah keengganan Sukarno membubarkan PKI. Pada lain pihak, Soeharto dalam posisi terjepit antara demonstran kelompok Islam dan mahasiswa yang menghendaki PKI dibubarkan, kelompok radikal TNI-AD yang ingin Soeharto mengambil langkah drastis atas Sukarno, dan sikap hormat Soeharto

www.setabasri.org

pada Sukarno sebagai pemimpin yang ia sadari atau tidak, tengah ia lawan dominasinya.

Salah satu mitra dialog Soeharto dalam membuat Sukarno bersedia membubarkan PKI adalah M. Jusuf. Sejak awal tahun 1966 Soeharto mengalami kesulitan mempengaruhi Sukarno untuk membubarkan partai tersebut, kendati sejak Desember 1965 Soeharto telah ditunjuk Sukarno selaku pelaksana Kopkamtib.[824] Menurut pengakuan Jusuf, selama periode krusial akhir 1965 hingga 11 Maret 1966 hanya Soeharto dan dirinyalah yang paling sering bertemu dan berdialog dengan Sukarno.[825] Namun, saat substansi pembahasan masuk kepada pembubaran PKI, pembicaraan otomatis terhenti yang terjadi hingga Februari 1966.

Soeharto kemudian menggunakan taktik baru guna mengubah pendirian Sukarno, dengan memerintahkan Alamsjah Ratu Prawiranegara mengirim 2 orang pengusaha yang cukup dekat dengan Sukarno yaitu Hasjim Ning dan Dasaad.[826] Keduanya bersedia menghadap Sukarno ke Istana Bogor, dengan berbekal surat perintah yang isinya menyebutkan bahwa mereka berdua adalah penghubung antara Soeharto dan Sukarno.[827] Ning menjelaskan bahwa pesan Alamsjah pada dirinya bahkan lebih spesifik lagi, yaitu agar mereka meyakinkan Sukarno bahwa situasi akan sulit dikendalikan jika belum ada perintah Sukarno untuk

www.setabasri.org

---

[824] Jusuf dijadikan mitra dialog Soeharto karena kedekatannya dengan presiden. Lihat Atmadji Sumarkidjo, *Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit*. Cetakan 1. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006, h. 156.

[825] Atmadji Sumarkidjo, Jenderal M. Jusuf …, *op.cit.*, h. 128-131, 161. Jusuf, Soeharto, dan Sukarno bahkan sempat berdiskusi di dalam satu mobil yang sama untuk membahas krisis nasional saat. Dalam mobil tersebut Sukarno duduk di tengah, Jusuf di sebelah kiri Sukarno, Soeharto di sebelah kanan Sukarno.

[826] *ibid.*, h. 162.

[827] *ibid*.

membubarkan PKI.[828] Selain itu Alamsjah berpesan kepada keduanya bahwa Soeharto terbukti mampu mengendalikan keadaan karena didukung oleh angkatan bersenjata dan rakyat, sehingga sebaiknya Sukarno mau melimpahkan kekuasaannya secara temporer kepada Soeharto.[829]

Pada tanggal 10 Maret 1966, Dasaad dan Ning datang ke Istana Bogor menemui Sukarno. Ning menyampaikan hal-hal yang telah dijelaskan Alamsjah kepadanya kepada Sukarno. Sukarno marah dan melempar asbak kepada Ning sambil berkata, "Kamu juga sudah pro Soeharto!"[830] Kendati di masa kemudian terjadi perdebatan seputar tanggal kedatangan Ning dan Dasaad menemui Sukarno, tetapi pada intinya adalah apa yang akhirnya disampaikan Sukarno pada Jusuf, Basuki, dan Amir (Supersemar) memang telah dimulai prosesnya bahkan sebelum 11 Maret 1966.[831]

Di saat rapat kabinet 11 Maret 1966 tengah berlangsung, Sabur melaporkan adanya tentara tanpa tanda pengenal yang tengah mengepung istana. Sebagai reaksi atas hal tersebut, maka Sukarno langsung menghentikan sidang dan bersama Soebandrio segera menaiki helikopter menuju ke Istana Bogor. Ternyata komandan dari pasukan tidak dikenal tersebut adalah Kemal Idris, seorang Kepala Staf Kostrad yang berada di bawah otoritas Menpangad yaitu Soeharto. Dapat saja

www.setabasri.org

---

[828] *ibid.*, h. 163.

[829] Sementara Sukarno sendiri disarankan mengambil cuti untuk sementara waktu.Soemarkidjo menulis bahwa Alamsjah mengakui bahwa usulan dikirimnya Ning dan Dasaad adalah dari dirinya. *ibid*.

[830] Atmadji Sumarkidjo, Jenderal M. Jusuf …, *op.cit.*, h. 164.

[831] Atmadji menyimpulkan bahwa terbitnya Supersemar akibat aneka tekanan kompleks atas Sukarno. Tekanan-tekanan tersebut adalah pembicaraan Jusuf dan Soeharto dengan Sukarno seputar pembubaran PKI, pertemuan Sukarno dengan Ning dan Dasaad, serta pengepungan Istana oleh pasukan gelap Kemal Idris. Aneka tekanan tersebut memicu keberhasilan Jusuf, Amir, dan Basuki, atas perintah Soeharto meminta mandat pemulihan situasi. Lihat *ibid.,* h. 165.

diduga Kemal sebelumnya telah melapor kepada Soeharto perihal pengepungan yang ia lakukan karena walau bagaimanapun, Soeharto adalah atasan langsung Kemal saat itu.[832]

"Pengepungan" yang dilakukan Kemal merupakan kulminasi "instabilitas" seperti yang selama ini Soeharto sampaikan kepada Sukarno di setiap pertemuan mereka dengan Jusuf. Amir Machmud (Pangdam Jaya), M. Jusuf (Menteri Perindustrian merangkap pejabat Pangdam Hasanuddin), dan Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi) segera berangkat ke rumah Soeharto menceritakan peristiwa pengepungan Istana oleh pasukan tanpa tanda pengenal. Ketiga perwira yang dekat dengan Sukarno ini kemudian mengambil inisiatif menemui Sukarno ke Istana Bogor dan Soeharto pun menyetujuinya.[833]

Di Istana Bogor, dalam diskusi antara mereka berempat, Sukarno cukup terbuka kecuali satu hal yaitu ia tidak juga mau membubarkan PKI.[834] Berbeda dengan diskusi sebelumnya antara Sukarno, Jusuf, dan Soeharto, diskusi yang berlangsung di Istana Bogor berjalan cukup tegang. Jusuf menggunakan nada yang lebih tegas mengenai masalah instabilitas keamanan. Sukarno kemudian bertanya kepada ketiga perwira tersebut mengenai apa cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan, dan ketika tidak satu pun memberi usulan, akhirnya Sukarno memutuskan memberi wewenang pada Soeharto untuk membereskan situasi.[835] Hal ini adalah kesimpulan paling masuk akal mengenai terbitnya

www.setabasri.org

[832] Namun, dapat pula dinyatakan bahwa itu adalah inisiatif Kemal sendiri, seperti dahulu ia mengarahkan meriam ke Istana Negara tahun 1952 kendati Nasution tidak memerintahkannya.
[833] Ada pendapat lain menyatakan Amir dan Jusuf disukai Sukarno, sementara Basuki tidak. Atmadji Soemarkidjo, Jenderal …, *op. cit.,* h. 172-173.
[834] *ibid.*, h. 176.
[835] *ibid.,* h. 177-178.

Supersemar. Sukarno bukan orang yang mudah ditekan oleh siapa pun, dan penyelesaian masalah penting seperti pelimpahan wewenang semacam Supersemar, tentu akan lebih masuk akal apabila dilakukan secara sukarela oleh Sukarno sendiri. Dengan demikian sedikit kurang relevan apabila dikatakan bahwa Jusuf, Basuki, dan Amir melakukan pemaksaan pada Sukarno untuk membuat Supersemar di bawah paksaan. Setelah naskah Supersemar diketik, Sukarno kemudian bertanya pada para *bonding*nya yang hadir saat itu, yaitu J. Leimena, Chairul Saleh, dan Soebandrio yang masing-masing punya pendapat sendiri mengenai surat tersebut.[836]

Reproduksi pertama Soeharto atas Supersemar adalah Perintah Hariannya pada tanggal 12 Maret 1966 kepada para prajurit, perwira tanpa penugasan, dan perwira TNI-AD khususnya serta Angkatan Bersenjata umumnya.[837] Inti dari perintah harian tersebut adalah mengabarkan bahwa ia (Soeharto) pada tanggal 11 Maret 1966 telah menerima mandat atas nama Presiden Sukarno untuk menjamin keamanan dan ketertiban pemerintahan dan proses revolusi. Di dalam pernyataan harian tersebut Soeharto masih mengajak untuk memelihara ajaran-ajaran Sukarno seperti Amanat Penderitaan Rakyat, anti-feodalisme, anti-kapitalisme, anti-Nekolim, dan mendasarkan diri pada Pancasila.[838]

www.setabasri.org

---

[836] Tanggapan J. Leimena: "*No comment. Ik laat het helemaal aan U over*." Tanggapan Chairul Saleh: "*Het is beter, dat U tot God gaat bidden en vraagt zijn antwoord*." Tanggapan Soebandrio: "*Als U deze brief tekent dan valt U in the trap*." Lihat *ibid.,* h. 182. Untuk selanjutnya ternyata tanggapan Soebandrio-lah yang menjadi kenyataan, karena Soeharto memang mempergunakan Supersemar untuk mereproduksi kekuasaan dirinya bahkan melebihi apa yang dimiliki Sukarno sendiri selaku alpha male saat itu.

[837] O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* h. 219-221.

[838] Harry Tjan Silalahi memiliki bukti otentik berupa tulisan tangan Soeharto yang dimaksudkan sebagai sebuah pamflet. Ini membuktikan kedekatannya dengan revolusi seperti diajarkan oleh Sukarno. Soeharto menulis pamflet tersebut lalu ditandatangani oleh dirinya dan Sukarno pada

Pada tanggal yang sama pula Soeharto mulai berani mengatasnamakan presiden (Sukarno) dalam mengeluarkan Pengumuman Nomor 1 tanggal 12 Maret 1966. Dalam pengumuman tersebut Soeharto menyebutkan bahwa Sukarno telah menginstruksikan dirinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Dengan mengatasnamakan Sukarno pula, Soeharto menghimbau agar matra angkatan bersenjata lain tidak bertindak sendiri-sendiri dan tetap memelihara ketertiban masyarakat dan keamanan.

Berdasarkan Supersemar dan tanpa menghiraukan butir ketiga surat perintah tersebut[839] Soeharto mengeluarkan Dekrit No. 1/3/1966 juga dengan mengatasnamakan Sukarno.[840] Dekrit tersebut memutuskan tiga hal dengan dalih tetap berdasarkan ajaran Sukarno yaitu Panca Azimat Revolusi. Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk segala organisasi yang terafiliasi dengannya dari tingkat pusat hingga daerah serta seluruh organisasi yang punya kesamaan dasar atau berafiliasi dengannya. Kedua, mendeklarasikan Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah otoritas Republik Indonesia. Ketiga, bahwa Dekrit No. 1/3/1966 berlaku terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Dekrit Soeharto ini kemudian dikritik oleh Sukarno melalui Pengumuman No. 1/PRES/1966 tanggal 16 Maret 1966 yang menyebutkan bahwa telah terjadi kekeliruan penafsiran Soeharto atas Supersemar.[841]

www.setabasri.org

tanggal 27 Oktober 1965. Mungkin hal tersebut pula yang mendorong rasa percaya Sukarno kepada Soeharto. Tulisan tangan tersebut dimuat dalam **Lampiran 1**.

[839] Butir ketiga berbunyi "*To report everything connected with this task and resonsibility as mentioned above*." Lihat O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* p. 218.

[840] *ibid.,* p. 224-225.

[841] O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.,* p. 226-228.

Namun, Soeharto tidak menghiraukan kritik Sukarno dengan cara ia mengeluarkan Pengumuman No. 5 (juga mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 18 Maret 1966.[842] Namun, dalam pengumuman tersebut Soeharto pada salah satu konsideransnya tidak menyebut Supersemar, dan kemungkinan hal ini adalah akibat kritik Sukarno sebelumnya. Namun, dengan kecerdikannya dalam Pengumuman ini Soeharto memutuskan penahanan atas 14 orang pejabat tinggi yang sebagian komunis dan sebagian lainnya merupakan *bonding* Sukarno.[843]

Dari sisi Soeharto sendiri maka Supersemar telah memberikan jalan baginya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban melalui aneka operasi fisik terhadap sisa-sisa G30S dan PKI serta membersihkan aparatur pemerintahan dari pengaruh keduanya.[844] Supersemar juga memberikan keleluasaan bagi Soeharto untuk menyusun Kabinet Ampera, dengan mana untuk pembentukan tersebut, Soeharto mendapat mandat dari MPRS yang intinya menugaskan pengemban Supersemar untuk segera membentuk kabinet paling lambat tanggal 18 Agustus 1966. Adapun tugas kabinet Soeharto adalah *dwidarma* yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.[845]

Dengan demikian Soeharto secara cerdas mereproduksi kekuasaannya berdasarkan Supersemar yang ia terima dan secara normatif menyebut tugas-tugas

www.setabasri.org

---

[842] *ibid.,* p. 229-231.
[843] Ke-14 orang tersebut adalah Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oey Tjoe Tat S.H., Ir. Surachman, Jusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martopradoto, Astrawinata S.H., Drs. Achadi, Letkol (Inf.) Imam Sjafe'i, J. Tumakaka, dan Mayjen (TNI-AD) Dr. Sumarno. Untuk penjelasan atas ke-14 orang ini telah dibahas dalam Sub Bab IV.
[844] Nugroho Notosusanto, ed., Prajurit dan Pejuang …, *op. cit.,* h. 133.
[845] *ibid*.

di dalamnya sebagai kewajiban bagi TNI-AD khususnya dan ABRI umumnya. Apa pun tindakan Soeharto, baik atas TNI-AD maupun ABRI, kini memiliki tingkat justifikasi konstitusional yang tinggi yaitu TAP MPRS. Dengan demikian maka semua kekuatan politik yang ada apabila hendak bertahan hidup harus menyesuaikan diri pada kekuasaan Soeharto yang signifikan akibat Supersemar.

Pada tanggal 9 Juni 1966, DPR-GR menyampaikan suatu memorandum mengenai sumber tertib hukum negara, dengan menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, bahkan pula menyebut bahwa Supersemar juga merupakan salah satu sumbernya.[846] Supersemar yang digenggam oleh Soeharto kemudian dinaikkan statusnya menjadi Ketetapan MPRS No. 9/MPRS/1966 pada tanggal 21 Juni 1966. Langkah ini diambil oleh MPRS dalam sesi sidang antara tanggal 20 Juni hingga 6 Juli 1966 (Sidang ke-4) karena melihat adanya kecenderungan Sukarno untuk terus mempertahankan PKI dan sistem Demokrasi Terpimpin.[847] Penanda tangan TAP MPRS tersebut adalah Wilujo Puspojudo (Mayjen TNI-AD) selaku *caretaker* pimpinan MPRS dengan dua wakilnya Osa Maliki (PNI) dan Subchan Zaenuri Ershan (NU).[848]

Saat melantik Maraden Panggabean sebagai Wapangad pada tanggal 16 Agustus 1966, Soeharto menyatakan bahwa Supersemar yang ditetapkan oleh TAP MPRS No. 9/MPRS/1966 bukan kebanggaan pribadi bagi dirinya, melainkan

www.setabasri.org

[846] Nugroho Notosusanto, ed., Prajurit dan Pejuang …, *op. cit.,* h. 132.
[847] *ibid.,* h. 132.
[848] O. G. Roeder, The Smiling …, *op. cit.* p. 240- 242.

lebih sebagai bukti pemberian penghargaan dan kepercayaan Sukarno dan rakyat Indonesia kepada ABRI pada umumnya serta TNI-AD pada khususnya.[849]

TAP MPRS No.9/MPRS/1966 disambut gembira oleh KAMI Pusat, karena bagi mereka Supersemar dapat menjadi jalan untuk merealisasikan Tritura. Selain itu Laskar Ampera yang dipimpin oleh Fahmi Idris dan David Napitupulu dari Presidium KAMI Pusat segera menyampaikan resolusi yang menuntut agar Soeharto segera membentuk Kabinet Ampera dengan Soeharto sendiri sebagai formatur tunggalnya.[850]

Supersemar pula yang mendorong TNI-AD mengadakan Seminar II pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 1966 di Bandung, seminar dengan tujuan memberikan sumbangan pikiran kepada Kabinet Ampera guna menyelamatkan negara dari kekacauan politik dan ekonomi.[851] Terdapat dua pokok sumbangan pikiran hasil seminar tersebut bagi Kabinet Ampera yaitu: (1) Garis-garis besar kebijakan dan rencana pelaksanaan stabilisasi politik, dan (2) Garis-garis besar kebijaksanaan dan rencana pelaksanaan stabilitasi ekonomi. Sumbangan pemikiran tersebut kemudian disampaikan kepada Soeharto pada tanggal 31 Agustus 1966 dalam posisi resminya selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera. Ini kemudian disusul sosialisasi yang dilakukan oleh Soeharto kepada seluruh

www.setabasri.org

[849] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968, *op. cit.,* h. 103-104.
[850] *ibid.,* h. 91.
[851] Nugroho Notosusanto, ed., Prajurit dan Pejuang …, *op. cit.,* h. 133. Seminar tersebut dipimpin oleh Maraden Panggabean (Jenderal) selaku Wakil Panglima TNI-AD.

menterinya pada tanggal 8 September 1966 untuk menggunakan saran-saran yang dihasilkan Seminar II TNI-AD sebagai pedoman kerja kabinet.[852]

Sesaat setelah terbitnya Supersemar Soeharto seolah berhasil menjadi semacam presiden "bayangan" dan menafsirkan pemberian wewenang di dalam Supersemar untuk kepentingan reproduksi kekuasaannya sendiri. Soeharto ibarat pemain "ski air" yang melakukan aneka manuver memanfaatkan "gelombang-gelombang lautan" alamiah yang ada saat itu yang berwujud ketidakpuasan spesies atas kondisi ekonomi dan politik seperti marak direpresentasikan oleh aneka demonstrasi mahasiswa.

Munculnya Orde Baru berarti lahirnya sebuah orde yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sekaligus sebagai justifikasi filosofis dan politisnya. Stabilitas Nasional berhasil diciptakan Soeharto di antaranya dengan menggunakan Pancasila sebagai legitimasi politik untuk menjalankan kekuasaannya manakala ia berhadapan dengan hirarki-hirarki lain agar mau menjalankan mekanisme *inclusive fitness*.[853]

Pancasila adalah satu konsep yang terus-menerus dipromosikan oleh Soeharto. Seperti telah dibahas dalam Bab II bahwa Soeharto berkoalisi dengan

www.setabasri.org

[852] Sejak awal tahun 1967 telah diadakan serangkaian pembicaraan antara Sukarno dengan pimpinan ABRI yang di dalamnya peran tokoh PNI yaitu Hardi sangat membantu. Hasil dari pembicaraan tersebut adalah pada tanggal 20 Februari 1967 Sukarno bersedia menandatangani dokumen penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Supersemar yaitu Soeharto yang telah mengemban TAP No. 9/MPRS/1967. Pada sore hari tanggal 21 Februari 1967 Soeharto memanggil semua menteri Kabinet Ampera ke kantor Presidium Kabinet di Jalan Merdeka Barat No. 15. Selanjutnya dengan bertempat di Istana Negara Sukarno membacakan pengumuman resmi bahwa ia telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada penerima mandat Supersemar yaitu Soeharto. Lihat *ibid.,* h. 134-135.

[853] Mudhofir Abdullah, "Soeharto dan Ideologi Orde Baru." Dalam *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Cetakan 1. Baskara T. Wardaya SJ, et.al. Yogyakarta: Galangpress, 2007., h. 62.

Lingkaran Pater Beek maka dapat dipastikan bahwa posisi Soeharto adalah membela Pancasila tanpa "tujuh kata" versi Piagam Jakarta. Juga di Bab II telah dibahas bagaimana pandangan Pater Beek atas komunisme dan Islam. Hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah mengapa persoalan Pancasila dimasukkan ke dalam mekanisme *inclusive fitness*.

Hal ini berkenaan dengan kelangsungan hidup kekuatan Islam karena mereka jelas mengetahui siapa Soeharto, siapa aliansinya, dan apa pendiriannya atas Piagam Jakarta. Apabila kekuatan politik Islam, termasuk ormas dan partai politiknya, ingin terus memperoleh akses atas komoditas berharga dan melakukan reproduksi kekuasaan yang kini banyak ditentukan Soeharto, maka mereka harus mau bekerja sama dengan cara menyesuaikan filosofi politik organisasinya sehubungan dengan masalah ideologi ini. Mereka juga harus menerima kenyataan bahwa Soeharto bersikeras agar Pancasila menjadi satu-satunya ideologi di dalam negara dan aneka organisasi yang ada di dalamnya.

Pada tanggal 9 Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan sebuah memorandum yang substansinya mengakui bahwa Pancasila adalah sebagai "sumber dari segala sumber hukum." Namun, kekuatan politik Islam di dalam DPR-GR juga memprasyaratkan rujukan pada Dekrit Sukarno yang dikeluarkan 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menyebutkan bahwa Piagam Jakarta juga turut menginspirasikan UUD 1945 sehingga merupakan satu kesatuan dengan konstitusi Indonesia.

Memorandum juga menyatakan bahwa formulasi Pembukaan UUD 1945 sebenarnya didasarkan atas semangat Piagam Jakarta dan bahwa Piagam tersebut pun menjadi *spirit* pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 yang akhirnya diakui sebagai

www.setabasri.org

hari lahirnya Pancasila.[854] Dekrit Sukarno juga menyebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR. Dekrit Sukarno tanggal 5 Juli 1959 yang juga menyebutkan Piagam Jakarta, terus dimanfaatkan oleh kekuatan politik Islam sebagai justifikasi bagi dibukanya kembali wacana untuk melakukan pengakuan atas "tujuh kata" agar dicantumkan di dalam sila pertama Pancasila.

Soeharto kini menghadapi aneka manuver kekuatan politik Islam yang bertujuan untuk melegalisasi Piagam Jakarta sebagai unsur pembangun sila-sila dalam Pancasila. Dalam konteks wacana Piagam Jakarta ini turut berhadapan dua kekuatan politik yang saling berseberangan yaitu kekuatan politik Islam di satu sisi melawan kekuatan politik Katolik, non muslim, nasionalis-sekuler, dan tentunya TNI-AD khususnya dari lingkaran Soeharto sentris.

B. J. Boland menyebutkan bahwa anggota NU dan Parmusi di MPRS "*pressed for legalization of the Djakarta Charter as the preamble to the 1945"* selama sesi MPRS pada Juni 1968.[855] Ada kemungkinan Soeharto kembali dibayangi aneka perdebatan berlarut-larut di Badan Konstituante dan implikasinya di ranah publik akibat kontroversi ini. Namun, perdebatan di masa awal kekuasaan Soeharto berbeda dengan di Badan Konstituante.[856] Secara historis tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan untuk menetapkan konstitusi Indonesia di

www.setabasri.org

[854] Mujiburrahman, Fear …, *op. cit.*, p. 108.
[855] B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.p. 153.
[856] Mujiburrahman, Fear …, *op. cit.,* p. 109. Studi lengkap atas Piagam Jakarta dan pertarungan antara kekuatan politik Islam melawan nasionalis-sekuler terdapat dalam B. J. Boland, The Struggle …*, op. cit.*

tanggal tersebut.[857] Pertemuan informal dengan Hatta dapat meredam – kendati untuk sementara – perdebatan antara kekuatan politik Islam melawan nasionalis-sekuler sehubungan dengan Piagam Jakarta. Perdebatan kembali berlanjut sejak 1955 di Badan Konstituante yang kemudian berakhir dengan dibubarkannya badan tersebut oleh Sukarno melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Saat Soeharto memulai kekuasaannya perdebatan seputar pemberlakuan Piagam Jakarta juga kembali muncul.

Secara Biopolitik, perdebatan Piagam Jakarta adalah masalah kebertahanan hidup antar kelompok, dan Soeharto serta lingkarannya memandang Pancasila sebagai syarat eksistensi mereka. Tentu saja setiap kelompok memiliki argumentasi masing-masing mengenai piagam tersebut. Kelompok Islam menyebut bahwa Piagam Jakarta adalah wujud eksistensi mereka sebagai Muslim dan tidak akan ditimpakan pada kelompok non Muslim. Kelompok non Muslim khususnya aliansi Soeharto sentris dan lingkaran Pater Beek menyatakan Piagam Jakarta mengancam eksistensi mereka karena Indonesia akan beranjak menjadi negara Islam.

Dalam acara peringatan Piagam Jakarta pada bulan Juni 1968, Mohammad Dachlan menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah penggerak serta sumber semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pendapat ini juga dikuatkan pula melalui penegasan M. Roem bahwa kalimat

www.setabasri.org

[857] B. J. Boland, The Struggle …, *op. cit.,* pp. 35-36. Namun, Mujiburrahman menyebutkan bahwa Wachid Hasjim pun tidak hadir karena tengah dalam perjalanan menuju Surabaya. Satu-satunya perwakilan kelompok Islam dalam pertemuan pagi dengan Hatta hanyalah Ki Bagus Hadikusumo yang bukan merupakan anggota sub komite BPUPKI. Lihat juga Mujiburrahman, Fear …, *op. cit.,* p. 110.

pertama teks proklamasi diambil dari Piagam Jakarta.[858] Prawoto Mangkusasmito berargumentasi bahwa sesi sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidaklah representatif jika dibandingkan kesepakatan pada BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 yang mengesahkan Piagam Jakarta.[859]

Di masa awal kekuasaan Soeharto, kelompok minoritas seperti kelompok Katolik tentu saja secara tegas menentang kembalinya Piagam Jakarta. Sasaran kritik kelompok ini terhadap para pendukung Piagam Jakarta terdiri atas empat perkara dan seluruhnya ditanggapi oleh kekuatan politik Islam.[860]

Pertama, kelompok Katolik menyatakan bahwa pernyataan yang menyatakan Piagam Jakarta sebagai inspirasi UUD 1945 hanya disebutkan di dalam konsiderans Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bukan di dalam diktum keputusan Dekrit tersebut. Implikasi hal tersebut adalah Piagam Jakarta tidak memiliki kekuatan hukum. Menanggapi pernyataan ini, Abdullah Sjahir menyatakan bahwa setiap Dekrit seharusnya dipahami sebagai suatu koherensi keseluruhan. Akibatnya kendati Piagam Jakarta hanya disebutkan dalam konsiderans awal dan bukan dalam diktum putusan, maka ia tetap memiliki kekuatan hukum yang legal.

Kedua, kelompok Katolik menyatakan bahwa pernyataan yang menyebut Piagam menginspirasikan UUD 1945 diawali dengan klausa “kita meyakini bahwa”, dan bagi kelompok Katolik kata “kita” merujuk pada diri Presiden Sukarno. Implikasi klausa ini adalah bahwa dijadikannya Piagam Jakarta sebagai

www.setabasri.org

[858] Mujiburrahman, Fear …, *op. cit.,* p. 109.
[859] Dalam sub komite BPUPKI terdapat 4 wakil kekuatan politik Islam yaitu Abdoelkahar Moezakir, Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoerojo, dan Wachid Hasjim. Di kelompok nasional dan non Muslim adalah Soekarto, Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, dan AA Maramis.
[860] Mujiburrahman, Fear …, op. cit., p. 119.

inspirasi hanyalah merupakan bentuk pengakuan Sukarno sebagai pribadi dan sebab itu validitasnya harus dipertanyakan. Menanggapi keberatan ini, Abdullah Sjahir juga merespons dengan menyatakan bahwa klausa "kita" yang menurut kelompok Katolik sekadar merujuk pada personal Sukarno adalah kurang tepat. Argumen Sjahir bahwa Sukarno mencantumkan kata "kita" di dalam sebuah Dekrit yang ia tanda tangani adalah sebagai Presiden Indonesia, bukan pribadi. Kata "kita" dengan demikian bukan bermakna personal tetapi formal yaitu jabatan presiden yang sifatnya institusional.

Ketiga, kelompok Katolik menyatakan bahwa makna kata "inspirasi" atau menjiwai yang mengimplikasikan UUD 1945 sebagai dijiwai Piagam Jakarta adalah minus "tujuh kata." Argumen mereka adalah, jika kata "menjiwai" bermakna bahwa Piagam Jakarta harus diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia, maka klausa yang seharusnya adalah "menggantikan", bukan "menjiwai." Menanggapi keberatan kelompok ini, HAMKA mengutip pernyataan dari ahli hukum dan intelektual sekuler seperti Soepomo, M. Yamin, dan Hazairin yang mengakui tingginya status politis dan yuridis Piagam Jakarta.[861] Prawoto juga menambahkan bahwa terdapat alasan khusus mengapa Sukarno di dalam Dekrit 5 Juli 1959 menyebut Piagam Jakarta, yaitu sebagai responsnya (Sukarno) atas *deadlock* Dewan Konstituante sehingga diterimanya Dekrit Sukarno oleh parlemen pada tanggal 13 Juli 1959 mengindikasikan baik blok nasionalis maupun Islam telah terakomodasi kepentingannya di dalam Dekrit tersebut.[862]

www.setabasri.org

[861] Mujiburrahman, Fear …, *op. cit.,* p. 112.
[862] *ibid*.

Keempat, kelompok Katolik menyatakan bahwa Dekrit Sukarno yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan suatu rangkaian keseluruhan dengan UUD 1945 harus dipahami sebagai penggambaran historis. Bahwa UUD 1945 didahului oleh Piagam Jakarta dan yang terakhir tersebut hadir diawali pidato Sukarno tentang kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Penafsiran kelompok Katolik ini selaras dengan TAP MPRS No. 20/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah kronologi historis, bukan sistem hukum yang legal.[863] Sebaliknya bagi kelompok Islam, Piagam Jakarta bukan sekadar kronologi historis melainkan sumber hukum yang legal. Piagam Jakarta bagi kelompok Islam adalah kompromi politik antara blok Islam dan blok nasionalis dan sebab itu memorandum Nomor 9 dari DPR-GR kepada MPRS yang mempertanyakan status Piagam Jakarta adalah suatu hal yang wajar.

Soeharto tentu mewaspadai kecenderungan konflik ideologis semacam ini. Posisi Soeharto adalah jelas, yaitu "Pancasila minus Piagam Jakarta." Kekuatan politik Islam memperoleh lawan yang cukup berat yaitu penentangan dari Soeharto secara langsung. Gunn menulis bahwa Soeharto adalah seorang Jawa dan sebagai *alpha male* ia memerankan diri sebagai raja Jawa, tetapi bukan dalam arti kultural melainkan disarati oleh aneka kepentingan material praktis.[864] Penggunaan ideologi oleh Soeharto sifatnya adalah konkret, dan dimaksudkan sebagai instrumen nyata untuk mendominasi aneka hirarki politik yang ada

www.setabasri.org

[863] Mujiburrahman, Fear …, *op. cit.,* p. 111-112.
[864] Geoffrey C. Gunn. Ideology and ... *op.cit.*, p. 752.

terutama di kalangan elit birokrasi, teknokrasi, dan perwira militer, untuk kemudian diperluas ke sejumlah hirarki lain terutama kelompok Islam.

Sama seperti Soeharto membiarkan kelompok perwira radikal anti Sukarno untuk mendelegitimasi posisi politik presiden pertama Republik Indonesia, maka demikian pula halnya dengan masalah ideologi. Soeharto membiarkan lingkaran Pater Beek mencari aneka argumentasi guna memupus harapan kekuatan politik Islam untuk memberlakukan Pancasila versi Piagam Jakarta, karena semua upaya itu menguntungkan posisinya.

Seperti pernah disinggung dalam Bab II, Pater Beek memproduksi prosa bertajuk *From Madiun*, yang menurut Wejak mempersamakan antara ancaman terhadap Islam dengan terhadap komunis.[865] "Islamofobi" dikembangkan oleh Pater Beek dalam nada-nada yang cukup emosional. Wejak menekankan bahwa Islam yang dimaksud di sini adalah kekuatan politik Islam yang sifatnya radikal yang hendak mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Padahal di dalam sejarah perpolitikan Indonesia, Masyumi justru pernah berkoalisi dengan Partai Katolik tahun 1950an.

Pater Beek dengan cerdik memanfaatkan aksesnya atas salah satu *bonding*, agar dapat masuk menuju ke inti kekuasaan Soeharto. Sejumlah figur perwira Muslim yang menjadi sasaran serangan aliansi Beek-Moertopo adalah Sarwo Edhie Wibowo dan Sumitro.[866] Dalam *From Madiun* Pater Beek menggambarkan

www.setabasri.org

[865] Justin Laba Wejak, Secular, Religious and Supernatural – An Eastern Indonesian Catholic Experience of Fear (Autoethnographic Reflections on the Reading of a New Order-Era Propaganda Text). *Doctoral Dissertation*. The University of Melbourne., p. 183.
[866] Justin Laba Wejak, Secular …, *op.cit.*, p. 200.

kaum Muslim sebagai *tempter*,[867] poligamis,[868] juga *marangele* atau *head hunters*.[869] Kegelisahan Pater Beek atas Islam periode 1965-1966 dilukiskan oleh tulisannya bagi Partai Katolik tahun 1967 sebagai berikut:

> *The party should not blind themselves to the failures of the work methods of the past: The PNI must become a party that is truly principled and cleanse itself from the infection of Marxism as well as the cult of the individual. The religious groups should leave behind the assumption that only religion can save the nation. Uphold a nation that is godly but do not establish a Religious State! Tolerance in its truest meaning must be revered! In the past, Masyumi was indeed quite democratic. But its tactics and steps it took created the general impression that it intended to created an "Islamic State."*[870]
>
> Partai tidak boleh membutakan diri terhadap kegagalan metode kerja masa lalu: PNI harus menjadi partai yang benar-benar berprinsip dan membersihkan diri dari infeksi Marxisme maupun kultus individu. Kelompok-kelompok agama harus meninggalkan anggapan bahwa hanya agama yang bisa menyelamatkan bangsa. Menjunjung tinggi bangsa yang saleh tetapi tidak mendirikan Negara Agama! Toleransi dalam arti sebenarnya harus dihormati! Dulu, Masyumi memang cukup demokratis. Tetapi taktik dan langkah-langkah yang diambilnya menciptakan kesan umum bahwa mereka bermaksud menciptakan "Negara Islam".

Secara umum pendirian Beek ini cukup serupa dengan para penganut aliran kebatinan atau Islam *abangan* di Indonesia yang memiliki semacam sikap tidak suka atas kelompok Islam, politik Islam, dan juga tentunya syariat Islam. Dapat dikatakan bahwa Pater Beek merepresentasikan garis radikal anti Islam, tetapi secara pragmatis posisi umumnya serupa dengan Soeharto dan lingkaran dekatnya. Tidak ada tindakan apa pun dari Soeharto atas tulisan Pater Beek yang terdistribusi dari gereja ke gereja di seluruh Indonesia. Namun, Soeharto yang saat

www.sejarahasi.org

[867] *ibid.*, p. 204
[868] *ibid.,* p. 210.
[869] *ibid.,* p. 215.
[870] *ibid.*, p. 225-226.

itu merupakan bagian dari Islam abangan dan penganut Kejawen kemudian mencari pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tuntutan integrasi Islam ke dalam negara yaitu dengan mengedepankan Pancasila sebagai mekanisme *inclusive fitness* bagi seluruh pihak yang masih mempermasalahkan posisi sekuler negara. Tanpa menerima Pancasila, maka setiap organisasi apa pun di Indonesia akan dianggap sebagai tidak mendukung Orde Baru, TNI-AD, dan sebab itu menjadi lawan Soeharto.

Soeharto menyatakan bahwa kesadaran atas kebenaran dan keagungan Pancasila sebagai ajaran Bung Karno harus selalu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar tidak kembali terjadi gerakan kaum kontra revolusioner seperti G30S/PKI.[871] Pada kesempatan lain Soeharto juga menyatakan bahwa siapa pun yang menolak keputusan Sidang Umum MPRS yang ke-4, maka sebenarnya ia menentang landasan struktural negara yaitu UUD 1945.[872] Dalam pidato penutupannya di dalam Sidang ke-4 MPRS, Soeharto juga menyatakan bahwa kini Indonesia telah melakukan koreksi atas jalannya revolusi ke jalan yang benar dengan petunjuk dari Pancasila.[873]

Saat terjadi penundaan Sidang MPRS, Soeharto menyatakan bahwa "angkatan bersendjata adalah pengaman dan pengawal revolusi Indonesia, dengan tiga kerangka *tudjuannja* berdasarkan Pancasila, sebagaimana telah dituangkan pula dengan *chidmat* dalam Mukadimah UUD 1945."[874] Dengan pernyataan ini Soeharto menegaskan bahwa Pancasila yang ia maksud adalah seperti yang

www.setabasri.org

[871] *Berita Yudha*, 5 November 1965.
[872] *Angkatan Bersendjata*, 7 Juli 1966.
[873] *ibid.*
[874] *Angkatan Bersendjata*, 6 Mei 1966.

tercantum dalam mukadimah UUD 1945 yaitu tanpa "tujuh kata" seperti dalam Piagam Jakarta.[875]

Soeharto melanjutkan bahwa dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, maka pemberontakan yang menggunakan ideologi selain Pancasila selalu tumbang seperti PKI Musso, DI/TII, juga PRRI/Permesta.[876] Dalam kesempatan lain, yaitu saat Pembukaan Kursus Singkat Angkatan I Seskoad di Bandung, Soeharto menguraikan bahwa Pancasila adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sesungguhnya dapat digunakan sebagai Piagam Universal.[877]

Dalam Upacara Ulang Tahun ke-23 Kodam VII/Brawijaya Soeharto memperingatkan bahwa aneka benih subversi juga ketegangan sosial banyak dikobarkan oleh unsur asing dari luar negeri yang merupakan musuh Pancasila.[878] Soeharto menegaskan bahwa satu-satunya ideologi ABRI adalah Pancasila dan tindakan mengubah Pancasila sama dengan mengubah dasar dan cita-cita kemerdekaan sehingga "ABRI tidak akan membiarkan *Pantjasila berobah* dalam bentuk apapun, bilamanapun dan oleh siapapun."[879]

Konteks pernyataan Soeharto saat itu adalah perdebatan di DPR-GR maupun MPRS tengah diramaikan oleh polemik pengintegrasian Islam ke dalam sistem hukum Indonesia juga upaya untuk kembali mewacanakan Piagam Jakarta, dengan mana kemudian Soeharto menyatakan pendapat otentiknya sendiri:

www.setabasri.org

---

[875] *Angkatan Bersendjata*, 3 Juni 1966. Dalam resepsi peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1966 Soeharto kembali menegaskan: "Dengan sendjata Pantjasila sebagai kebenaran yang universil kita telah melenjapkan pendjadjahan dari bumi Indonesia, bahkan dengan sendjata Pantjasila itu pula kita telah berikrar untuk menghapuskan pendjadjahan dari muka bumi, karena bertentangan dengan kodrat Tuhan.
[876] *ibid*.
[877] *Berita Yudha*, 12 Juli 1966.
[878] *Kompas*, 17 Desember 1968.
[879] *ibid.*

> "karena *berobahnja Pantjasila* berarti *pengchianatan* terhadap kemurnian *perdjuangan* ABRI sendiri TNI/AD *chususnja*. ABRI *umumnja* harus mempertahankan *Pantjasila*, djustru karena *Pantjasila* itu falsafah, pandangan hidup daripada *rakjat* Indonesia, dan karena ABRI adalah bagian daripada *rakjat*, maka ia akan mempertahankan pandangan hidup *rakjat* itu tanpa kompromi."[880]

Sejak awal Soeharto menggunakan Pancasila sebagai prasyarat utama aneka hirarki lain yang hendak menjalankan mekanisme *inclusive fitness* untuk beradaptasi dengan kekuasaannya. Saat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Kongres Luar Biasa pada tanggal 1 November 1965, Soeharto menyatakan yang ada dan dikenal di Indonesia kini hanyalah Pers Pancasila, yaitu pers yang bersumber dan memihak pada Pancasila.[881] Soeharto juga akan menindak tegas siapa pun dan golongan mana pun yang langsung maupun tidak, melakukan tindakan bersifat rasialis dan tidak sesuai Pancasila.[882]

Sebagai wujud pengukuhan Soeharto atas Pancasila, ia mengeluarkan SK No. 977/9/1966 yang menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.[883] Pancasila kini memiliki momentum politiknya sendiri, karena SK Soeharto tersebut menegaskan bahwa setiap tanggal 1 Oktober harus diadakan upacaya yang diikuti seluruh slogarde TNI-AD dengan mengikutsertakan angkatan-angkatan lain dan rakyat. Dasar pikir Soeharto dalam menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila adalah, karena sejak merdeka

www.setabasri.org

[880] *ibid.* Lihat juga *Sinar Harapan*, 17 Desember 1968.
[881] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds., Jejak Langkah … 1 Oktober 1965 – 23 Maret 1968, *op. cit.,* h. 22.
[882] *ibid*., h. 112.
[883] *ibid.,* h. 113.

tahun 1945 Indonesia selalu didera aneka cobaan dari sejumlah ideologi lain, tetapi Pancasila dapat bertahan terhadapnya.

Di dalam mengajukan konsep Stabilitas Nasional, khusus di dalam mendominasi hirarki kompleks, salah satu yang digaungkan oleh Soeharto adalah Dwifungsi ABRI. Konsep ini membuat Soeharto mampu menundukkan aneka hirarki sipil, baik di birokrasi, pemerintahan lokal, maupun organisasi kemasyarakatan. Populasi melihat konsep Dwifungsi ABRI sebagai berlegitimasi karena telah ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. 24/MPRS/1966.[884]

Konsep Dwifungsi ABRI adalah hasil pemikiran lingkaran pemikir sipil-militer di Seskoad, yang intinya menjelaskan bahwa selain sebagai alat pertahanan angkatan bersenjata perlu melibatkan diri dalam kehidupan sosial politik. Herbert Feith pada tahun 1963 menulis bahwa kendati sejak 1957 hingga 1958 terdapat gerakan besar-besaran di dalam tubuh TNI-AD untuk masuk ke dalam politik dan administrasi, tetapi mereka tidak kunjung mengambil-alih kekuasaan. Bagi Feith, baik Jenderal Nasution secara personal maupun pimpinan TNI-AD sebagai kelompok, tidak terlahir untuk menguasai Indonesia. Namun, analisis Feith tersebut otomatis langsung tertolak manakala dua tahun kemudian Soeharto mampu memimpin TNI-AD dalam "merebut" kekuasaan pemerintahan, melembagakan kekuasaan tersebut dengan membentuk ulang sistem politik

www.setabasri.org

[884] Abdoel Fattah. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Cetakan 1. Yogyakarta: LkiS, 2005., h. 146

Indonesia, dan memperluas konsep *Middle Way* Nasution menjadi Dwifungsi ABRI.[885]

Satu tahun sebelum Feith mengeluarkan analisisnya, pada bulan Maret 1962 Seskoad merumuskan Doktrin Perang Wilayah yang memungkinkan tentara menjangkau langsung masyarakat hingga lapis terbawah.[886] Struktur ini secara hirarkis membayangi struktur birokrasi pemerintahan daerah sipil. Dengan konsep semacam ini maka TNI-AD memiliki penguasaan teritorial sipil secara lengkap dan berjenjang. Dalam Seminar Kedua TNI-AD tentara lebih menekankan bidang sosial politik dibandingkan dengan bidang pertahanan dan keamanan.[887]

Setelah perimbangan kekuasaan yang diupayakan Sukarno berakhir dengan kegagalan, TNI-AD muncul sebagai aktor dominan dalam politik negara dan Soeharto bergerak cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya. Jenkins menulis bahwa hanya dalam hitungan bulan, setelah tanggal 30 September 1965, Soeharto berhasil mengisi seluruh posisi kunci dalam staf umum TNI-AD dengan orang-orangnya sendiri dan mulai melakukan penyingkiran atas Nasution.[888] Pernyataan Jenkins secara lengkap adalah sebagai berikut:

www.setabasri.org

---

[885] Marcus Mietzner. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008, p. 49.

[886] Abdoel Fattah. Demiliterisasi …, *op. cit.,* h. 141. Dari doktrin tersebut tentara kemudian membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di tingkat provinsi, Komando Resort Militer (Korem) di tingkat keresidenan, Komando Distrik Militer (Kodim) di tingkat kabupaten, Komando Rayon Militer (Koramil) di tingkat kecamatan, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tingkat desa atau kelurahan.

[887] *ibid..,* h. 142-143. Adapun hasil Seminar Kedua TNI-AD kemudian dibawa pada Seminar Pertahanan dan Keamanan pada bulan November 1966, yang akhirnya menghasilkan Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI yang dinamakan Catur Dharma Eka Karma.

[888] David Jenkins, The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi. 1983. *Southeast Asian Journal of Social Sciences.* Vol. 11, No. 2., pp. 23-24.Jalan menuju Dwifungsi ABRI terbuka lebar dengan keluarnya Tap MPRS No. 24/MPRS/1966 yang

> Dalam penyelenggaraan Dwifungsi ABRI, khususnya kekaryaan dan operasi bakti (*civic mission*), supaya betul-betul dilandaskan dasar manfaat, dan memperhitungkan suasana dan keadaan yang dinilai kembali oleh MPR setiap lima tahun sekali. Fungsi kekaryaan ABRI yang diselenggarakan atas landasan kemanfaatan, mengingat keadaan dan suasana, akan dinilai oleh MPR(S) dalam rangka politik penyediaan kesempatan kerja. Operasi bakti adalah pemanfaatan kemampuan dan keahlian teknis ABRI dalam rangka pembangunan negara dengan tidak mengabaikan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional.[889]

Dwifungsi ini kembali dipertegas saat Seminar II TNI-AD di Bandung tahun 1966, yang menekankan bahwa TNI-AD bukan hanya berhak dan perlu bertanggung jawab di luar lapangan militer tetapi juga "dipaksa" untuk memperluas kegiatan non militernya.[890]

Analisis lain diajukan oleh Mietzner, yang menyebut terdapat tiga faktor pendorong bagi hadirnya Dwifungsi ABRI yang tidak terlepas atas sikap TNI-AD atas perkembangan politik Demokrasi Terpimpin.[891] Dwifungsi ABRI bukan konsep yang mudah diterapkan, karena pemerintahan militer kurang populer di Indonesia sejak 1945. Oleh sebab itu maka penerimaan mayoritas kelompok sipil atas Dwifungsi ABRI sekurangnya didorong oleh tiga faktor. Pertama, adanya momentum G30S/PKI yang merupakan gerakan militer sehingga harus dihadapi secara militer pula. Kedua, banyak kelompok Islam memandang pembersihan PKI

www.setabasri.org

menyebutkan bahwa "fungsi non militer anggota ABRI, selaku warganegara dan revolusioner yang Pancasilais ... harus diakui dan dijamin keberlangsungannya."

[889] Abdul Fattah, Demiliterisasi …, *op. cit.,* h. 147.

[890] David Jenkins, The Evolution …, *op. cit.,* p. 24.

[891] Marcus Mietzner, Military Politics …, *op. cit.,* p. 50. Pertama, pertumbuhan pesat PKI dalam konsolidasi anggota di tingkat *grassroot* dan perlindungan politik Sukarno. Kedua, adanya gejala Sukarno mulai mencampuri urusan internal angkatan bersenjata dengan menempatkan para loyalisnya ke posisi-posisi strategis. Ketiga, TNI-AD memandang Indonesia semakin terisolasi dari dunia internasional akibat Komando Ganyang Malaysia 1963, keluarnya Indonesia dari PBB pada 1965, dan mendekatnya politik luar negeri ke arah blok komunis internasional.

sebagai prioritas, sehingga meluasnya kebencian publik atas PKI mendorong mereka tidak terlampau acuh atas niat sesungguhnya dari TNI-AD yaitu masuk ke dalam masalah pengelolaan negara. Ketiga, spesies Indonesia telah bertahun-tahun didera perpecahan politik, ketegangan sosial, dan menurunnya taraf hidup. TNI-AD dan militer menawarkan perbaikan sehingga spesies dimungkinkan untuk tidak keberatan atas kekuasaan militer, sekurangnya secara temporer.[892]

Militer kini tinggal mencari justifikasi ideologis dan politis bagi kendali mereka atas politik nasional Indonesia. Seminar II Angkatan Darat 1966 kemudian berhasil menghasilkan justifikasi tersebut, yaitu peran militer sebagai penjaga Pancasila dan penegak implementasi UUD 1945. Ideologi semacam ini ternyata efektif dalam menarik spesies agar mau bekerja sama dan menerima posisi militer di dalam kehidupan publik.[893]

Bagi spesies, khususnya kelompok sipil politik dan Islam, mereka harus bekerja sama dalam bentuk menerima dua peran militer dalam negara karena tanpa hal tersebut, hirarki politik sipil yang mereka miliki tidak akan bisa bertahan hidup. Keterlibatan tentara dalam politik sudah merupakan fakta yang tidak bisa dihindarkan lagi. Tidak mungkin dengan saham mereka yang begitu besar dalam pembasmian PKI dan mendegradasi kekuasaan Sukarno, mereka akan begitu saja mau dipinggirkan dari lapangan politik dan kekuasaannya yang digenggam.[894]

www.setabasri.org

---

[892] Keterlibatan militer ini pun dilakukan secara gradual sejak akhir 1965 atau sekitar 2,5 tahun dan baru kukuh setelah Soeharto menjadi presiden penuh. Soeharto secara simbolik melepas baju militernya untuk kemudian mengenakan pakaian sipil berupa jas safari dan kopiah dan hal ini penting untuk menciptakan impresi bagi spesies bahwa kepemimpinannya adalah sipil. Lihat Marcus Mietzner. Military Politics …, *op. cit.,* p. 51.

[893]Marcus Mietzner. Military Politics …, *op. cit.,* p. 51-52.

[894] Di saat awal Orde Baru terdapat 12 dari 23 orang menteri Kabinet Ampera merupakan perwira militer aktif dan kemudian terjadi peningkatan signifikan jumlah militer di aneka birokrasi lokal. Di parlemen sendiri sebanyak 75 perwira menjadi delegasi militer dalam perwakilan rakyat.

Dalam konteks Dwifungsi ABRI hingga 1971, Soeharto baru berkesempatan mengendalikan parlemen secara penuh setelah Pemilu 1971. Soeharto adalah Ketua Umum Dewan Pembina Sekber Golkar sehingga memungkinkannya untuk memilih kandidat Sekber Golkar dalam Pemilu. Soeharto juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata sehingga memiliki otorisasi untuk mencoret nominasi baik para kandidat dari Sekber Golkar maupun partai politik lain. Soeharto juga menjadi kepala negara yang memiliki hak untuk memilih perwakilan golongan fungsional baik ABRI maupun non ABRI sebagai anggota MPR.[895]

Apabila diperhatikan pendapat Salim Said, bahwa aneka teori Barat yang mencoba untuk mengupas hubungan sipil-militer umumnya menyebut keterlibatan militer Indonesia sebagai intervensi atas sipil.[896] Akibatnya untuk kasus Indonesia, aneka teori tersebut jadi kurang memuaskan dalam menjelaskan fenomena Dwifungsi ABRI di awal Orde Baru. Bahkan kalangan intelektual di Indonesia sendiri semisal Juwono Sudarsono menyatakan "satu-satunya kekuatan yang bisa memerintah negeri ini sekarang secara nasional menyeluruh adalah ABRI."[897]

www.setabasri.org

Nasution sendiri yang tidak lain adalah perwira aktif senior adalah pimpinan Sidang MPRS yang melepas kewenangan pemerintahan dari Sukarno tahun 1967 dan menggantikan Sukarno dengan Soeharto sebagai presiden Indonesia tahun 1968. Militer bersinergi dengan Sekber Golkar dalam memastikan kemenangan "partai politik" tersebut dalam Pemilu 1971. Lihat Marcus Mietzner. Military Politics …, *op. cit.,* p. 52-53.

[895] *ibid.,* p. 53.

[896] Salim Salid. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, h. 21.

[897] Menurut Said banyak intelektual lain yang sependapat dengan pernyataan Juwono tersebut. Lihat *ibid.*, h. 21.

Dalam masa awal kekuasaan Soeharto, masuknya legislator berlatar belakang militer ke dalam parlemen tanpa proses pemilihan, bukanlah paksaan Soeharto melainkan hasil negosiasi dengan para politisi partai politik di DPR-GR.[898] Secara khusus pula Soeharto meminta Seskoad agar menempatkan doktrin Tri Ubaya Cakti di dalam kurikulum Kursus Singkat Seskoad.[899] Dengan masuknya doktrin tersebut ke dalam kurikulum Seskoad maka para perwira akan memiliki cara pandang Dwifungsi secara seragam.

Hasil seminar TNI-AD adalah mengupas aneka *mismanagement* negara oleh Orde Lama, untuk kemudian menyusun konsepsi Orde Baru yang berkisar pada jiwa, bentuk, isi, dan pembinaannya.[900] Salah satu *bonding* Soeharto yaitu Alamsjah menyatakan bahwa sukses-tidaknya Kabinet Ampera yang dipimpin Soeharto adalah pertaruhan bagi misi TNI-AD dan dengan demikian ujian bagi Dwifungsi ABRI.[901]

www.setabasri.org

[898] Negosiasi tersebut berawal dari keinginan pihak militer khususnya TNI-AD untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem distrik. Keinginan tersebut berdasarkan hasil analisis lingkaran pemikir sipil-militer Soeharto di Seskoad. Namun, pihak politisi sipil dari partai politik keberatan dengan gagasan sistem distrik dan lebih menghendaki sistem proporsional. Soeharto akhirnya mundur satu langkah untuk kemudian maju satu langkah dengan meminta kompensasi. Kompensasi tersebut adalah masuknya wakil-wakil militer ke dalam parlemen tanpa melalui proses Pemilu. Kompensasi tersebut akhirnya disepakati oleh partai-partai politik sehingga masuk ke dalam Undang-undang No. 16/1969 mengenai Susunan dan Kedudukan Anggota MPR dan DPR. Lihat *ibid.*, h. 22-23.

[899] *Berita Yudha*, 12 Juli 1966.

[900] Jiwa Orde Baru adalah Pancasila dengan tekanan pada sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Bentuknya adalah tata politik dan tata ekonomi menurut UUD 1945 dengan perincian ideal dan operasional dalam Tap MPRS No. 4/MPRS/1966 dengan kepemimpinan kuat tanpa kultus individu. Isinya adalah Pembangunan semesta dengan cara berpikir yang lebih realistis dan pragmatis. Pembinaannya adalah TNI-AD mempunyai tanggung jawab dan menyediakan kekuatan fisik untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Lihat Widya. "Komentar2 atas Seminar Angkatan Darat (2): Spirit Pembinaan Orde Baru."*Angkatan Bersendjata*, 6 September 1966

[901] *Berita Yudha*, 19 Juni 1967.

Masalah Dwifungsi ABRI juga dikaitkan dengan posisi angkatan bersenjata, baik sebagai militer maupun Golongan Karya.[902] Rosihan Anwar menulis bahwa secara historis dan sosiologis Indonesia, tentara bukan alat negara belaka melainkan lebih daripada itu yaitu "ABRI dan TNI-AD lahir dari Revolusi, ia tumbuh dan dibesarkan dalam dan oleh Revolusi serta melaksanakan tugas dharma baktinja hanja untuk Revolusi Rakjat dan Negara."[903]

Sebuah artikel di *Sinar Harapan* dalam memperingati Hari Ulang Tahun ABRI kembali hendak memaknai Dwifungsi ABRI dengan menyatakan bahwa di Indonesia ABRI lahir bersamaan dengan lahirnya kemerdekaan bangsa dan tanah air.[904] Salah satu wujud dari Dwifungsi ABRI dan diterima oleh masyarakat adalah dikerahkannya 100 batalion ABRI untuk mengerjakan aneka proyek pangan dan prasarana pemerintah.[905] Penerimaan atas Dwifungsi juga ditunjukkan oleh kalangan politik, misalnya Durjat dari fraksi Katolik menyatakan Dwifungsi ABRI merupakan sarana penting demi melaksanakan Pembangunan.[906]

Satu artikel di *Angkatan Bersendjata* tanggal 3 Maret 1969 menganalisis pertanyaan hingga kapan Dwifungsi berlangsung, maka jawaban yang diperoleh

www.setabasri.org

---

[902] *Warta Bhakti*, 22 Juni 1967.

[903] Anwar menyimpulkan apabila dilihat magnitudo persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia maka tentara bukan saja berhak menjalankan peranan dalam pemerintahan melainkan "terpaksa" menerima "beban" tersebut dan ini merupakan pertaruhan tersendiri bagi ABRI ataupun TNI-AD. Lihat Rosihan Anwar. "Tentara Berhak Mendjalankan Peranan dalam Pemerintahan." *Kompas*, 11 November 1967.

[904] A.M. Chandra. "Menjambut HUT ABRI ke-23: ABRI Lahir dari Rakjat jang Berdjuang." *Sinar Harapan*, 5 Oktober 1968.

[905] Panoedjoe (Mayjen) Direktur Pembinaan Operasi Bhakti Departemen Hankam mengemukakan pihaknya telah menyusun 90 batalion pertanian dan 10 batalion konstruksi. Saat ini juga sebanyak 2 batalion Zeni Konstruksi dengan peralatan lengkap, 3 batalion Zeni Konstruksi minus peralatan, dan 5 batalion Zeni Tempur telah dikerahkan untuk menunjang aneka proyek pertanian dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Repelita pada April 1968. Bantuan diperoleh dari Amerika Serikat berupa buldoser, truk, dan traktor. Lihat *Angkatan Bersendjata*, 27 Januari 1969.

[906] *Angkatan Bersendjata*, 27 Januari 1969.

selalu akan bersifat akademik bukan praktis.[907] Soeharto sendiri menyatakan bahwa peran ABRI kini bukan militerisme semata melainkan Dwifungsi.[908] Hal ini dikuatkan pula oleh pendapat Nasution bahwa TNI bukan *professional soldiers* yang lahir hanya untuk menghancurkan musuh, akan tetapi TNI di Indonesia memiliki identitas mengabdi untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat. [909]

Dwifungsi sendiri bukannya tanpa memiliki ekses, dan hal tersebut diutarakan oleh Widodo (Brigjen) saat menjadi Pangdam III/17 Agustus Sumatera Barat.[910] Bagi Widodo kehendak agar ABRI kembali pada satu fungsi yaitu pertahanan saja adalah upaya yang hendak mengubah identitas ABRI. Bagi Widodo pula, Dwifungsi adalah identitas ABRI sebab secara historis ABRI bukan hanya alat teknis belaka bagi penguasa politik sipil. Widodo menyampaikan otokritik ini di depan para perwira militer, polisi, pimpinan partai-partai politik, ormas, dan Golongan karya, perguruan tinggi, dan pers saat sebuah ceramah.[911] Salah satu manifestasi dari Dwifungsi ABRI adalah kenyataan terdapatnya 16 orang dari 24 bupati dan wali kota di Jawa Barat yang berasal dari anggota ABRI.[912]

www.setabasri.org

[907] Widya. "Beban Dwi-Fungsi ABRI." *Angkatan Bersendjata*, 3 Maret 1969.
[908] *Kompas*, 2 Juni 1969.
[909] *Angkatan Bersendjata*, 14 Juni 1969.
[910] *Angkatan Bersendjata*, 14 Juni 1969. Ekses-ekses tersebut misalnya militerisme, "penghijauan", *trading* generasi, backing2an, dualisme pemerintahan mendorong sejumlah pihak menghendaki agar ABRI kembali pada "monofungsi." Kelak Widodo ini termasuk ke dalam oposan Soeharto mulai tahun 1980an.
[911] Ceramah berjudul "Tindjauan Historis terhadap Kekarjaan ABRI, Orde Baru, Generasi, dan Kepartaian" di Sasana Karta, Padang, Sumatera Barat. Lihat *Berita Yudha*, 2 Januari 1970.
[912] Adanya pimpinan daerah yang berasal dari unsur ABRI akan memperkuat pemerintah dan menjamin efektivitas kerja karena perwira terbiasa bekerja dengan disiplin dan sistem komando. Lihat *Kompas*, 22 Januari 1970.

Bagi Soeharto sendiri, Dwifungsi ABRI adalah salah satu segi dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia.[913] Soeharto mengkritik kelompok yang tidak menghendaki Dwifungsi ABRI agar menilainya dari sudut pandang sistem politik, sejarah pertumbuhan ABRI, dan sejarah pertumbuhan bangsa, bukan dari sudut pandang pihak luar (Barat) yang ternyata tidak obyektif.[914]

Secara umum dominasi yang Soeharto lakukan di dalam hirarki kompleks cukup berbeda dengan saat dalam hirarki *dyadic* seperti dirangkum di dalam **Gambar 5** *Dominasi dalam Hirarki Kompleks.*

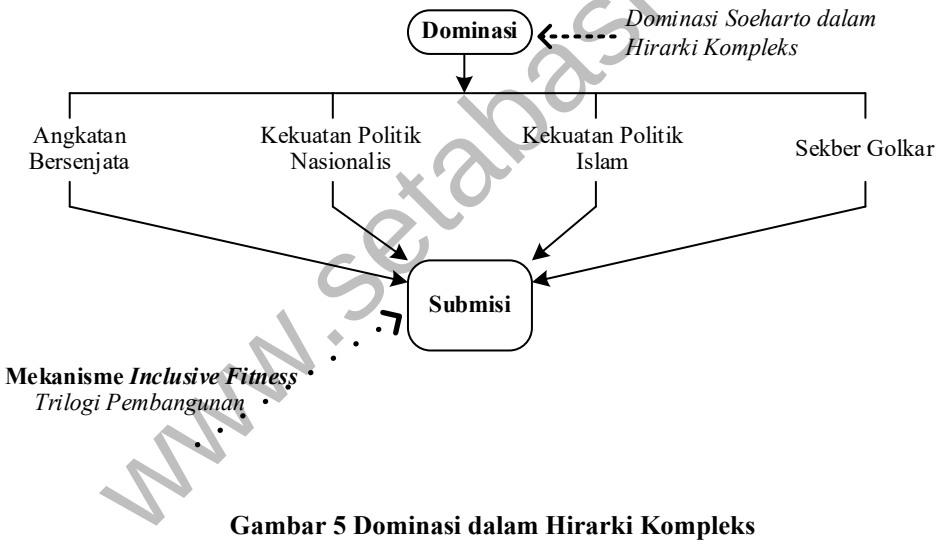

Gambar 5 Dominasi dalam Hirarki Kompleks

Di dalam hirarki kompleks Soeharto melakukan dominasi tidak secara satu per satu atas aneka hirarki yang ada, melainkan secara komprehensif dengan memanfaatkan naluri *inclusive fitness* makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap karakter kekuasaannya. Karakter kekuasaan Soeharto seperti tampak

[913] *Kompas*, 5 Oktober 1970.
[914] *ibid.*

www.setabasri.org

pada **Gambar 5** adalah Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan adalah upaya untuk mencapai: 1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan 3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Soeharto memaksakan Trilogi Pembangunan tersebut sebagai prasyarat bagi seluruh hirarki yang ada di dalam Orde Baru, sekaligus kesepakatan inti bagi mereka yang hendak mempertahankan eksistensi hirarkinya masing-masing.

Sebagai reaksi atas kehendak Soeharto, maka aneka hirarki yang ada kemudian menilai kekuatan dan kelemahan diri masing-masing sehubungan dengan apakah mereka akan terus melawan atau tunduk pada paksaan Soeharto. Pilihan alamiah bagi aneka hirarki lain, apabila hendak bertahan hidup, adalah menerapkan mekanisme *inclusive fitness* terhadap Trilogi Pembangunan tersebut.

C. *Political Obedience* menuju Prediktabilitas Spesies

Untuk membahas pertanyaan ketiga maka akan dibahas konsep *political obedience* menuju prediktabilitas spesies. *Political Obedience* adalah kepatuhan politik, baik ditunjukkan oleh para aktor politik maupun massa rakyat secara keseluruhan, karena menganggap bahwa terdapat sebuah hirarki yang dianggap memiliki legitimasi untuk ditaati. *Political obedience* ini akan dievaluasi menggunakan tiga konsep yaitu komando Pemilu, proses Pemilu 1971, dan prediktabilitas spesies dalam dominasi Soeharto.

1. Komando Pemilu

Kepatuhan politik diraih Soeharto melalui komando Pemilu yang didasarkan atas UU Pemilu dan UU Susunan Anggota MPR/DPR. Dengan

www.setabasri.org

serangkaian upaya yang melibatkan *constraint, force, subordination,* dan *dependence*, Soeharto membuat aneka hirarki lain seperti angkatan bersenjata, kekuatan politik Islam, kekuatan politik (nasionalis/sekuler/non Muslim), dan partai politik harus menunjukkan kepatuhan politik baik sukarela maupun terpaksa. Kepatuhan politik sebagian didasarkan pada aturan konstitusional (UU) dan melalui penyelenggaraan Pemilu 1971.

Sejak awal secara taktis Soeharto berupaya membentuk sistem politik yang meminggirkan peran partai politik dan meleluasakan perkembangan Sekber Golkar.[915] Episentrum sistem ini adalah kelompok militer, khususnya TNI-AD, yang ditempatkan di seluruh infrastruktur negara dan jajaran birokrasi agar mampu memberi tekanan sedemikian rupa sehingga mampu mengondisikan mobilisasi dukungan bagi pemenangan Sekber Golkar.[916] Sebab itu di dalam rangka memenangkan Sekber Golkar terbentuk tiga unsur pelaksana kampanye inti yang berasal dari Depdagri, Dephankam, dan Bappilu Sekber Golkar.[917]

Di dalam UU No. 15/1969 dapat dilihat bahwa administrasi Pemilu secara teoretis menguntungkan Sekber Golkar. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah penanggung jawab utama kegiatan Pemilu sementara lembaga tersebut berada di bawah kekuasaan Depdagri yang dipimpin Amir Machmud.[918] Dalam konteks Pemilu, Amir kini berposisi sebagai *bonding* Soeharto yang penting. Ia juga

www.setabasri.org

[915] Marcus Mietzner, Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy: Phases of Regime Consolidation and Decline in Suharto's Indonesia. 2017. *International Political Science Review.* pp. 1-14, p. 4.
[916] *ibid.,* p. 4.
[917] Depdagri adalah unsur utama pelaksana administrasi Pemilu yang membentuk pelaksana di tiga tingkat pemerintahan. Lihat R. William Liddle, Evolution …, *op. cit.,* p. 291.
[918] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 12.

bertindak selaku *ex officio* Ketua LPU, Ketua Dewan Eksekutif, dan Ketua PPI.[919] Fungsi LPU terutama adalah melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan kerja-kerja komite Pemilu nasional dan lokal yang sehari-harinya menjalankan kegiatan Pemilu.[920] Di Jakarta sendiri, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) terbangun di bawah koordinasi Mendagri.[921] Tugas PPI antara lain adalah "merencanakan dan mengawasi" Pemilu DPR, DPRD I, dan DPRD II dan "mengadministrasi" Pemilu DPR.[922]

Untuk membantu tugas PPI, maka di setiap ibukota provinsi ditetapkan Panitia Pemilu Daerah (PPD-I) yang diketuai oleh gubernur selaku kepala eksekutif provinsi dan di setiap kabupaten/kota didirikan PPD-II yang diketuai oleh bupati atau wali kota.[923] Dalam kampanye di setiap kota atau kabupaten, Bappilu Sekber Golkar memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat setempat untuk mengalami nikmatnya penerbangan menggunakan pesawat kemudian "terbang" di atas kota mereka dengan menggunakan pesawat carteran dari Mandala Airlines.[924]

Di bawah PPD-II, yaitu di lingkup kecamatan yang merupakan level III, ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diketuai oleh camat dan di setiap desa yang merupakan level IV pun ditetapkan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) yang diketuai oleh kepala desa atau lurah.[925] Dalam pemilu 1971 terdapat

www.setabasri.org

[919] *ibid.*, p. 12.
[920] *ibid.* Lihat juga Pasal 8 UU No. 15/1969.
[921] *ibid.*, p. 12.
[922] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 12. Lihat juga Pasal 8 UU No. 15/1969.
[923] *ibid.*
[924] Yusuf Wanandi, Menyibak …, *op. cit.,* h. 129.
[925] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 12-13. Lihat juga Pasal 8 UU No. 15/1969.

sebanyak 26 PPD-I, 281 PPD-II, 3184 PPS, dan 48.471 PPP.[926] Setiap anggota PPD-I, PPD-II, PPS, dan PPP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat di atasnya.[927] Organisasi PPI sebab itu menyerupai hirarki komando militer, dengan mana kepala eksekutif lokal serupa dengan komandan dan komite-komite Pemilu serupa dengan para stafnya.[928] Nasution melontarkan kritik bahwa jika Soeharto berkata bahwa ia ingin 51% suara bagi Sekber Golkar, maka tingkat provinsi akan menyatakan 60%, bupati/wali kota 70%, dan para lurah 90%.[929] Amir Machmud berupaya memutus mata rantai pengaruh PNI dalam birokrasi negara dengan membentuk Korps Karyawan Kementerian Dalam Negeri (Kokarmendagri) yang berafiliasi dengan Sekber Golkar.[930]

Sebelum Pemilu 1971, pemerintah melarang para pelayan publik menjadi anggota partai politik. Namun, pada lain pihak tidak ada larangan bagi mereka untuk bergabung dengan Sekber Golkar karena ia bukan partai politik.[931] Juga sesuai dengan Pasal 5 UU No. 15/1969, maka anggota Dewan Eksekutif LPU terdiri atas Mendagri (Amir Machmud), Menteri Kehakiman (Prof. Umar Senoadji), Menteri Penerangan (Budiarjo), Menteri Keuangan (Prof. Ali Wardhana), Menhankam (Presiden Soeharto, diwakili Panggabean selaku Deputi

www.setabasri.org

[926] *ibid.*, p. 12-13. p. 13.
[927] Dengan mana anggota PPI diangkat dan diberhentikan oleh presiden, anggota PPD-I dan PPD-II oleh Mendagri atas nasehat gubernur, dan anggota PPS dan PPP oleh bupati/wali kota atas nasehat camat.. Lihat *ibid.*
[928] *ibid*.
[929] Brian May, The Indonesian …, *op. cit.,* p. 245.
[930] Keanggotaan di dalam Kokarmendagri adalah wajib bagi seluruh pegawai negeri termasuk para pejabat di tingkat desa dan kampung-kampung. Lihat R. William Liddle, Evolution .., *op. cit.,* p. 292.
[931] Marcus Mietzner, Authoritarian Elections …, *op. cit.,* p. 6.

Pangab dengan status menteri), Menteri Perhubungan (Frans Seda), dan Menteri Luar Negeri (Adam Malik).[932]

Kelompok militer pun kemudian mampu mendominasi administrasi birokrasi sipil penyelenggara Pemilu. Dari 26 anggota PPD-I, maka 20 di antaranya berstatus militer aktif, dan dari 281 satu anggota PPD-II maka 142 di antaranya juga merupakan militer aktif, dengan 26 wali kota dan 116 bupati.[933] Selaras dengan struktur komando Depdagri, yaitu dari Amir Machmud kemudian turun ke level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, maka demikian pula unsur militer terlibat dalam penjaminan posisi kemenangan Sekber Golkar.

Setelah reorganisasi ABRI 1969, Soeharto memegang komando sentral atas seluruh angkatan bersenjata dengan secara hirarkis di setiap provinsi ditandai adanya Panglima Daerah Militer (Pangdam), Komandan Resimen (Danrem), Komandan Distrik Militer (Dandim), Komandan Rayon Militer (Danramil), dan di level desa terdapat Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kerja-kerja struktur Depdagri dapat bersinergi dengan struktur Dephankam seputar upaya membuat Sekber Golkar dapat populer sehingga mampu memenangkan Pemilu.[934] Selain itu Sudharmono, selaku Menteri Sekretaris Kabinet, juga menampakkan peran aktif dalam melakukan proses administrasi pemilihan.[935]

www.setabasri.org

---

[932] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*,. 13.
[933] *ibid.*
[934] *ibid*. Pekerjaan Dephankam juga dibantu oleh Bakin yang diketuai Sutopo Juwono (Mayjen), yang dalam konteks Pemilu bukan hanya mengumpulkan data intelijen bagi keamanan negara, tetapi juga menilai popularitas Sekber Golkar secara kontinu.
[935] *ibid*.

Amir Machmud secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan ragu untuk menerapkan "*foul play*" apabila itu dirasakan perlu untuk menjamin stabilitas bangsa.[936] Tanpa ragu Amir akan memutus rantai ikatan para pegawai negeri dari partai-partai politik, untuk kemudian membangun monoloyalitas pada pemerintah dengan cara mendukung Sekber Golkar. Langkah-langkah Amir kemudian diimitasi oleh para pejabat di bawahnya bahkan hingga level desa ataupun kelurahan demi menjamin kemenangan Sekber Golkar.[937]

Kerja koordinatif baik dengan Bakin maupun LPU tentu saja dilakukan oleh ABRI sebagai organisasi dengan total anggota sebesar 600.000 personil di bawah kendali Dephankam yang diketuai oleh Soeharto dengan tugas utama memelihara ketertiban publik.[938] Kopkamtib yang diketuai Maraden Panggabean dan Deputinya Sumitro bertanggung jawab untuk melakukan *screening* seputar kualifikasi calon pemilih dan kandidat.[939] Keterlibatan Kopkamtib membuka ruang bagi terjadinya intimidasi secara terbuka di suatu wilayah, di mana unit-unit tentara pernah terlibat upaya pembersihan PKI.[940]

Pada praktiknya maka *screening* atas kandidat tidak hanya menjadi tugas Soeharto, Panggabean, dan Sumitro melainkan meluas hingga Amir Machmud (Mendagri), Ali Moertopo, Yoga Sugama (Mayjen, kepala G-I Hankam bidang

www.setabasri.org

[936] Brian May, The Indonesian …, *op. cit.,* p. 245.
[937] May menulis bahwa di level "bawah" upaya teror bagi pemenangan Sekber Golkar tidak ragu untuk dilakukan para elemen militer termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Lihat *ibid*.
[938] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 14.
[939] Ini sesuai Pasal 23 dan 49 UU No. 15/1969 serta Government Ordinance No. 1/1970 dengan pembenaran utama adalah guna mengejar elemen Gestapu. Lihat Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 14.
[940] Intimidasi di antaranya dilakukan dengan cara menyebarkan peringatan seperti "ini akan menjadi seperti 1965 jika Anda tidak memilih Sekber Golkar." Di level daerah Kopkamtib bekerja melalui para Laksusda kemudian turun ke unsur-unsur yang lebih rendah hingga level desa/kelurahan. Lihat Marcus Mietzner, Authoritarian …, *op. cit.,* p. 5.

Intelijen), Darjatmo (Letjen, kepala G-III Hankam Bidang Personil), Sunandar (Mayjen, Sekretaris PPI), dan Wang Suwandi (Brigjen, Kepala Seksi Hubungan Khusus Depdagri).[941] Pada bulan Maret 1971, Yoga Sugama berbicara di depan konferensi pers dengan menyatakan bahwa operasi berskala besar atas kaum komunis tengah dilakukan, situasi tengah "mendidih", dan diprediksi bentrokan antar partai diprediksi terjadi.[942]

Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlawanan Rakyat (Wanra) beroperasi di level desa atau kelurahan untuk menjamin ketertiban publik dan mengamankan lokasi TPS. Jumlah Hansip dan Wanra menjelang Pemilu 1971 tidak kurang dari 2.000.000 dan keduanya bertindak di bawah komando ABRI.[943] Menurut anggota Bappilu Sekber Golkar yaitu Yusuf Wanandi, para Hansip ini dianggap sebagai agen yang paling efektif dalam mengondisikan Pemilu oleh sebab mereka langsung berada di tingkat massa. Mereka mampu bergerak dari rumah ke rumah dengan pesan "Hanya [Sekber] Golkar yang bisa menjamin stabilitas dan pembangunan. Kalau Anda pilih partai lain, berarti Anda anti militer dan mungkin saja pro-PKI."[944]

Ali Moertopo (Brigjen) sejak Juni 1968 diangkat sebagai Asisten Pribadi (Aspri) presiden dan dalam konteks Pemilu menjalankan peran penting signifikan setelah dikeluarkannya Dekrit No. 4 tanggal 15 Januari 1970 untuk membentuk

www.setabasri.org

[941] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 14 dan 25.
[942] Brian May, The Indonesian … , *op. cit.,* p. 247. Dengan nada mengancam Yoga pun memperingatkan "jangan terkejut apabila nanti akan terjadi banyak penangkapan."
[943] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 14.
[944] Yusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru …, *op. cit.,* h. 129. Bappilu Sekber Golkar menggunakan cara ini untuk mempengaruhi pemilih. Lihat Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 24.

Dewan Logistik dan Suplai di dalam naungan LPU, yang personilnya diambil dari pelayan publik atau militer.[945]

Sementara itu di wilayah Jawa yang padat penduduk Amir Machmud berupaya "memegang" para kepala *dukuh* karena di tangan mereka solidaritas masyarakat lapisan terbawah berada.[946] Para kepala *dukuh* ini kemudian menjadi andalan Sekber Golkar, selain para Hansip, untuk memastikan warganya memilih Sekber Golkar. Kepada para kepala *dukuh* ini tim Amir menyatakan bahwa pilihan pada selain Sekber Golkar berarti ketidakloyalan pada pemerintah.[947]

Sebagai persiapan Pemilu, serangkaian kegiatan "pelatihan" dikonduksikan di tingkat nasional, kabupaten, dan kecamatan sejak 15 Februari 1970 hingga 10 Juni 1971 dengan fokus utama pada pelatihan tenaga pelaksana Pemilu, di samping lagu Pemilu yang segera dikomposisi untuk kemudian disebarluaskan melalui radio-radio sejak akhir Juni 1970 dan seterusnya.[948] Di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, para pimpinan daerahnya dilatih untuk memanfaatkan para bekas PKI dengan cara memanggil mereka ke markas untuk kemudian diinstruksikan agar memilih Sekber Golkar.[949] Jalan seperti ini dilakukan juga untuk "menggembosi" PNI karena karakter para bekas PKI dan massa PNI relatif serupa. Aneka ancaman seperti "akan di-Kodim-kan" juga disebarkan bagi mereka yang menolak untuk menjadi pendukung Sekber Golkar dengan

www.setabasri.org

[945] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 14-15. Lihat juga Pasal 7 UU No. 15/1969. Tanggung jawab Ali Moertopo adalah penyediaan dan alokasi material Pemilu seperti transportasi kendaraan, pengapalan, pengetikan, dan transportasi formulir dan dokumen Pemilu membuat posisi Ali menjadi kuat dan menentukan dalam konteks administrasi Pemilu, khususnya mengenai hasilnya nanti.
[946] R. William Liddle, Evolution …, *op. cit.,* p. 298.
[947] *ibid*.
[948] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 15.
[949] R. William Liddle, Evolution …, *op. cit.,* p. 299.

menciptakan nuansa pembantaian massal yang mirip dengan tahun-tahun 1965/1966.

Sejak tanggal 5 Juli 1970, yaitu selama kurang lebih satu bulan, PPP di seluruh Indonesia melakukan survei dari rumah ke rumah guna memperoleh daftar pemilih eligibel.[950] Pada tanggal 23 Mei 1970, melalui Dekrit Presiden No. 43/1970 yang didasarkan atas Pasal 34 UU No.15/1969, sembilan parpol dan kelompok fungsional yang memiliki wakil di DPR-GR ditetapkan sebagai eligibel untuk berpartisipasi dalam Pemilu.[951] Dalam Dekrit termaksud pula, khususnya Pasal 3, diakui bahwa kelompok fungsional hanya berpartisipasi melalui satu organisasi bernama Sekber Golkar[952] Lambang Sekber Golkar mengambil simbol pohon beringin dan padi kapas (sila ketiga dan sila kelima Pancasila). Perlu juga diketahui bahwa simbol beringin adalah juga merupakan simbol Depdagri, sementara bingkai perisai lima sudut serupa dengan simbol Dephankam dan Departemen Kehakiman.[953]

2. Proses Pemilu 1971

Terdapat catatan menarik seputar mengapa akhirnya Pemilu 1971 ini diikuti 9 partai politik ditambah Sekber Golkar, sementara di saat-saat sebelumnya kerap dilontarkan isu bahwa akan hanya ada 3 kontestan Pemilu 1971 yaitu kelompok "partai spirituil-materiil," kelompok "partai materiil-spirituil," dan Sekber Golkar. Pernyataan Soeharto, Ali Moertopo, maupun Sudharmono bahwa Pemilu

www.setabasri.org

[950] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 15-16. dengan mana tercatat dari total 114.972.428 warganegara Indonesia, maka sebanyak 57.750.615 atau 50,2% terdaftar sebagai pemilih eligibel.
[951] Masashi Nishihara, Golkar …, *op. cit.*, p. 16.
[952] *ibid*.
[953] *ibid.* Masalah kesamaan simbol ini memunculkan impresi bahwa Sekber Golkar adalah representasi pemerintah itu sendiri.

1971 akan diikuti oleh dua partai politik dan Sekber Golkar (tiga kontestan) mendapat kritik beragam dari sejumlah partai politik. Bahkan sehubungan dengan perilaku partai-partai politik yang masih cukup banyak dan kerap membuat berlarut-larutnya pembahasan sebuah undang-undang, Ketua MPRS A.H. Nasution mengomentarinya sebagai:

> "masih dalam struktur politik *status quo*, jakni struktur politik Orla minus PKI/kultus individu … untuk melaksanakan *reconstructing* politik itu … ialah dengan suatu sistim distrik dan sistim proporsionil .. dengan sistim inilah usaha pengstrukturan kembali politik itu akan lebih efisien dan demokratis."[954]

Gagasan dua partai politik dan Sekber Golkar, menurut Sekjen PB NU Jusuf Hasjim, hanya bisa disepakati apabila merupakan kemauan rakyat dan bukan pemaksaan dari atas.[955] Kritik juga dilancarkan oleh K.H. A. Sjaichu bahwa gagasan "dwi-group" dapat saja mengganggu stabilitas nasional seperti terjadi di Filipina.[956] Mengenai gagasan Soeharto tentang pembentukan dua kelompok partai dan satu Sekber Golkar, Wakil Presiden LT PSII H.M. Ibrahim, menyatakan "Biarkan sesuatu itu tumbuh setjara wadjar."[957]

Dalam menyikapi gagasan dua kelompok dan satu Sekber Golkar ini, diadakan pertemuan antar tokoh-tokoh partai politik (kecuali Murba) di luar Sekber Golkar guna membahas gagasan pembentukan dua kelompok partai politik, tetapi tidak menemui kata sepakat.[958] Perombakan struktur kepartaian

www.setabasri.org

[954] *Angkatan Bersendjata*, 3 Februari 1969.
[955] *Sinar Harapan*, 25 Maret 1971.
[956] *ibid.*
[957] *ibid*.
[958] *KAMI*, 25 Maret 1971.

menjadi dua kelompok sesuai gagasan Soeharto ternyata tidak memperoleh keputusan apa-apa dari para tokoh partai politik yang hadir di Wisma Mitra Slipi.[959]

PNI juga menyatakan hal senada berupa semacam ketidaksetujuan atas rencana restrukturisasi partai politik. Bagi PNI restrukturisasi partai politik tidak boleh berupa pembubaran partai politik.[960] PNI juga menyuarakan bahwa pengelompokan partai-partai politik bukan jaminan akan tidak adanya polarisasi baru lagi dalam politik nasional.[961] Namun, Partai Katolik menyuarakan pendapat berbeda dengan menyatakan persetujuan mereka atas perombakan struktur politik yang untuk itu mereka bersedia untuk dibubarkan.[962]

Pada lain pihak, partai-partai politik yang dikategorikan sebagai spirituil-materiil, yaitu partai-partai Islam, terjadi persaingan tersendiri, khususnya antara Parmusi dengan NU. Bukti persaingan ini adalah keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1954 akibat terlampau dominannya kelompok Islam modernis dalam mengarahkan kebijakan politik Masyumi kala itu. Rivalitas akibat politik aliran ini yang mendorong sulitnya pengelompokan partai-partai politik Islam. Selain itu penolakan partai-partai politik untuk dikelompokkan sebelum Pemilu 1971 juga diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1970 tentang organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilu.[963]

www.setabasri.org

---

[959] *ibid*.
[960] *Kompas*, 25 Maret 1971. Ada kekhawatiran di tubuh PNI bahwa pengelompokan partai politik ke dalam dua kelompok akan berujung pada dibubarkannya sebuah partai politik sebagai entitas otonom.
[961] *Kompas*, 2 April 1970.
[962] *Sinar Harapan*, 30 Maret 1971. Pernyataan ini merupakan hasil Sidang Dewan Partai Katolik yang berlangsung 26 hingga 28 Maret 1971 di kawasan Klender, Jakarta Timur.
[963] Berdasarkan hasil undian, maka Partai Katolik mendapat nomor urut 1, PSII nomor urut 2, NU nomor urut 3, Parmusi nomor urut 4, Sekber Golkar nomor urut 5, Parkindo nomor urut 6,

Pada hari pemungutan suara tanggal 3 Juli 1971, Indonesia ditandai ketenangan "aneh" yang menimpa pemilih Indonesia dan digambarkan sebagai sebuah "demonstrasi kontrol atas negara yang luar biasa dilakukan pemerintah Soeharto dan aparat birokrasi serta militernya."[964] Mengenai kecenderungan dominasi, hirarki, dan penggunaan kekerasan dalam menciptakan dominasi dalam setiap aspek kehidupan spesies primata, Somit dan Peterson menyatakan:

> *... we describe how Darwinian theory explains the evolution, in Homo sapiens (a social primate species), of such persistent behavioral inclinations as hierarchical social and political structures, with profound differences of status and of the benefits attendant thereon; of nepotism; of tendencies to dominance, on the one hand, and of submission, on the other; and, truly unique among all species, the capacity to create, to accept and often to sacrifice in behalf of religious and secular belief systems which often run counter to these tendencies. Also relevant are contentions that humans, as a result of evolution, resort to violence, exhibit ethnocentrism and xenophobia ...* [965]

> ... kami menjelaskan bagaimana teori Darwin menjelaskan evolusi, dalam *Homo Sapiens* (spesies primata sosial), kecenderungan perilaku yang terus-menerus seperti struktur sosial dan politik hirarkis, dengan perbedaan status yang mendalam dan manfaat yang menyertainya; nepotisme; kecenderungan untuk mendominasi, di satu sisi, dan submisi, di sisi lain; dan, benar-benar unik di antara semua spesies, kemampuan untuk mencipta, menerima dan sering berkorban demi sistem kepercayaan agama dan sekuler yang sering bertentangan dengan kecenderungan ini. Juga relevan adalah anggapan bahwa manusia, sebagai hasil evolusi, menggunakan kekerasan, menunjukkan etnosentrisme dan *xenofobia* ...

www.setaraasri.org

MURBA nomor urut 7, PNI nomor urut 8, PERTI nomor urut 9, dan IP-KI nomor urut 10. yang terdiri atas "IP-KI, MURBA, N.U., P.I. PERTI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Muslimin Indonesia, P.N.I., P.S.I.I., dan Sekber Golkar." Lihat Lembaga Pemilihan Umum, Pemilihan …, *op. cit.,* h. 30-31.

[964] Marcus Mietzner, Authoritarian …, *op. cit.,* p. 5.

[965] Albert Somit and Steven Peterson. *Evolution and Democracy: The Challenge*. Paper at the Conference on Evolutionary Theory and Political Science, European University Institute, Florence, Italy, June 4-5, 2010., pp. 4-5.

Secara relatif jelas Pemilu 1971 menunjukkan karakteristik dominasi-submisi seperti dimaksud oleh Somit dan Peterson. Tidak ada demokrasi substansial dalam Pemilu 1971, melainkan insting dasar yang bersifat bawaan yaitu menjadi pihak dominan adalah paling mengemuka. Praktik Pemilu 1971 adalah pola dasar yang terus berulang selama pemerintahan Soeharto, hingga tahun 1997. Pemilu 1971 memperlihatkan kuatnya dominasi Soeharto, baik terhadap para pengikutnya maupun para lawan politik di aneka hirarki. Bagi Soeharto, target yang telah ditetapkan yaitu kemenangan Sekber Golkar, harus tercapai dan ini identik dengan perencanaan tempur yang dilakukan Soeharto di masa aktifnya sebagai komandan pasukan.

Dalam proses Pemilu 1971, Soeharto melakukan unjuk kekuatan kepada hirarki lain mengenai besarnya kekuatan yang ia miliki, sekaligus berisi pesan kepada para lawan untuk tidak coba-coba menentangnya. Bagi Soeharto Pemilu 1971 adalah persoalan *survival of the fittest.* Di dalam memenangkan Sekber Golkar dalam Pemilu 1971 maka peran Opsus juga tidak dapat diabaikan, seperti ditulis Peter Britton:

> "*Opsus played a very important role in stage-managing and directing the general elections 1971. Golkar, the government-backed federation of non-party organizations, wa a creature of Ali Moertopo's Opsus. The process of cutting away the supports of political parties, and of transforming the people's 'political orientations' into a 'programatic orientation,' was virtually completed when, after the elections, the 'floating mass doctrine' was enunciated*." [966]

> "Opsus memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur panggung dan mengarahkan pemilihan umum 1971. Golkar, federasi organisasi non-

[966] Peter Britton, Indonesia's Neo-Colonial Armed Forces. 1975. *Bulletin of Concerned Asian Scholars.* 7:3, pp. 14-21., p. 15.

www.setabasri.org

> partai yang didukung pemerintah, adalah makhluk dari Opsus Ali Moertopo. Proses pemotongan dukungan partai politik, dan transformasi 'orientasi politik' rakyat menjadi 'orientasi programatik,' hampir selesai ketika, setelah pemilu, 'doktrin massa mengambang' diterapkan. ”

Wakil Ketua Komisi III DPR-GR Ischak Moro menyatakan bahwa metode kampanye yang dilakukan Sekber Golkar mengingatkan pada cara-cara yang pernah dilakukan oleh PKI dan Gestapu.[967] Dalam sebuah kunjungannya ke Sulawesi Tengah, Moro melaporkan bahwa tema-tema kampanye Sekber Golkar dapat dimasukkan ke dalam kategori ancaman dan intimidasi terhadap rakyat misalnya penggunaan kalimat seperti “*Siapa2 jang tidak masuk Golkar akan digantung atau ditembak*.” Moro juga menyatakan bahwa kampanye Sekber Golkar dilindungi oleh keempat angkatan.[968]

Ancaman dan intimidasi yang dilakukan aparatur pemerintah untuk memenangkan Sekber Golkar pun disikapi serius oleh para pimpinan partai politik. Mereka mengadakan pertemuan di Wisma Mitra Slipi dengan dihadiri oleh total 26 orang dari 8 partai politik.[969] Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan menyebutkan bahwa masing-masing partai politik cukup melakukan

www.setabasri.org

---

[967] Moro yang bertugas untuk memimpin pengawasan pelaksanaan Pemilu 1971 menyatakan, bahwa rakyat kini menjadi panik dan dikhawatirkan kekejaman akan meningkat dalam waktu dekat. Lihat *KAMI*, 20 Mei 1971.

[968] Intimidasi lain yang ditemukan Moro adalah anggota-anggota HANSIP bersama kepala kampung aktif memaksa rakyat masuk Golkar dengan cara mereka tidak boleh pergi ke ladang atau sawah, tidak boleh pergi menangkap ikan, tidak boleh pergi berjualan ke pasar, tidak boleh kawin, dan larangan orang bukan Golkar untuk merayakan Maulid Nabi. Lihat *ibid.*

[969] Dalam pertemuan tersebut Partai Murba tidak mengirimkan wakil, sementara Sekber Golkar sengaja tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Inti dari pertemuan adalah keluhan aneka partai politik atas praktik paksaan, intimidasi, dan tekanan yang dilakukan oleh Sekber Golkar di aneka daerah. Subchan Zaenuri Ershan dan Jusuf Hasjim dari NU menyatakan tidak merinci aneka intimidasi Sekber Golkar secara tertulis sebagai hasil pertemuan karena dikhawatirkan akan membuka konfrontasi terbuka dengan Soeharto. Lihat *ibid.*

perincian atas tindak pelanggaran oleh Sekber Golkar dan melaporkannya kepada Soeharto secara langsung.[970]

Pertemuan ke-8 partai politik di Slipi kemudian ditanggapi secara kritis oleh seorang anggota Bappilu Sekber Golkar bergelar sarjana hukum (tampaknya adalah Yusuf Wanandi) dengan coba mengalihkan isu ke arah ideologi.[971] Yusuf justru balik menyerang dengan menyatakan bagaimana bisa aneka partai politik tersebut mengalahkan Sekber Golkar, padahal di tubuh mereka masing-masing terpecah menjadi beberapa faksi. Mengenai adanya dugaan intimidasi terhadap para konstituen partai politik oleh Sekber Golkar, Yusuf hanya menyatakan "*Djangan salahkan kita kalau massa parpol masuk Golkar*."[972]

Di Kabupaten Buleleng Bali terjadi ratusan ekses yang dilakukan oleh Sekber Golkar dan para penguasa di daerah terhadap massa PNI.[973] Ketua III DPP PNI Hardjanto menyatakan bahwa ia akan melaporkan apa yang terjadi di Buleleng tersebut langsung kepada Soeharto. Apa yang terjadi di Buleleng adalah penarikan seluruh cabang PNI untuk masuk ke dalam Sekber Golkar. Guna

www.setabasri.org

[970] Moh. Rusnaizur dari Perti melukiskan pertemuan tersebut ibarat "pertemuan tikus2 menghadapi kutjing jang ganas … untuk menghadapi Golkar sebagai kutjing sebaiknja tikus2 memasang genta dileher kutjing sehingga djika ia akan menerkam tikus2 sudah siap." Perwakilan partai politik yang hadir dalam pertemuan Slipi adalah V.B. Da Costa dan R.G. Doeriat (Partai Katolik), M.A. Gani, Oesman J. Helmi, M. Ch. Ibrahim, dan Boestaman (PSII), Soebchan Zaenuri Ershan, Achmad Syaikhu, M. Jusuf Hasjim, H.M. Moenasir, Zulkiflik, dan Chalik Ali (Partai NU), Husnie Thamrin dan Ramli Harahap (Parmusi), J.C.T. Simorangki, V.E. Paath, Victor Matondang, dan Sabam Sirait (Parkindo), I.B.P. Mangaba dan Rasjid Si Radja Emas (PNI), Eddy A. Manaf, Amin Husein, dan M. Rusnaizur (Perti), serta Mustafa Supangat dan Adi H. Tagor (IPKI). Maruto dari Partai Murba rencananya akan hadir tetapi terhalang sakit. Lihat *KAMI*, 25 Maret 1971.

[971] Kemungkinan itu adalah Yusuf Wanandi sebab Sinar Harapan menyebut tokoh tersebut adalah "seorang sardjana hukum jang dikenal sebagai "otak" Golkar. Lihat *Sinar Harapan*, 25 Maret 1971.

[972] Sekjen KINO Gakarti Sekber Golkar yaitu Lumondong menambahkan bahwa ia tidak mengerti partai-partai politik kecewa dengan Sekber Golkar, sebab tindakan-tindakan Golkar "jang mereka anggap offensif sebenarnja hanjalah konsolidasi organisasi sadja. Parpol2 juga melakukan konsolidasi. Lihat *ibid.*

[973] *Sinar Harapan*, 29 Maret 1971.

mengatasi aneka ekses tersebut maka PNI terpaksa perlu mengadakan *commander call* pada tanggal 1 hingga 3 April 1971, yang akan dihadiri wakil aneka ormas dan DPD PNI se-Indonesia.

Sejumlah tokoh intelektual pun turut mendiskusikan fenomena pemaksaan massa di akar rumput untuk mendukung Sekber Golkar. Mereka memahami bahwa ABRI memainkan peranan penting dan partai-partai politik di masa lampau telah melakukan kesalahan. Mereka juga menandaskan bahwa semua pihak mendukung Pembangunan yang direncanakan Soeharto.[974] Rahman Tolleng mendukung Sekber Golkar dengan alasan bahwa kontestan ini adalah satu-satunya yang memberikan jalan guna memperjuangkan pembaharuan struktur politik, dan tidak yakin bahwa pembaruan hanya bisa dicapai melalui pembaruan di tingkat partai politik saja.[975]

Menanggapi dukungan Tolleng atas Sekber Golkar, Adnan Buyung Nasution melontarkan retorika apakah taktik "buldoser" dapat dihindarkan dalam melakukan pembaruan struktur politik. Nurcholish Madjid pun turut menyoroti bahwa koalisi yang terjadi antara ABRI dan Sekber Golkar, apabila memenangkan Pemilu, tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersifat "*check and balance*" melainkan malah memunculkan kekuasaan yang mutlak. Buyung juga menandaskan tidak ada manfaatnya untuk mendukung salah satu partai politik tetapi juga sebagai seorang "moralis" ia tidak bisa membenarkan taktik "buldoser" yang diterapkan Sekber Golkar untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya.

www.setabasri.org

[974] Tajuk Rencana Sinar Harapan. "Tiga Pilihan di antara Generasi Muda." *Sinar Harapan*, 30 Maret 1971.
[975] *ibid.*

PNI melalui surat kabarnya *Suluh Marhaen* mempersoalkan eksodus PNI ke Sekber Golkar di Buleleng.[976] Bukti dari tekanan tersebut adalah ditahannya seorang pimpinan cabang PNI oleh pihak Kodim dengan alasan kurang dapat dipertanggungjawabkan. *Suluh Marhaen* juga melaporkan bahwa pihak Kodam Siliwangi telah menghembuskan isu tidak benar mengenai "menyeberangnya" massa marhaen di Kabupaten Ciamis secara sukarela ke dalam Sekber Golkar.[977]

Di samping metode paksaan untuk mendukung Sekber Golkar, terdapat fenomena lain yaitu masuknya sekelompok orang ke dalam "partai" tersebut secara sukarela. Hal ini ditunjukkan oleh Sjaich Moh. Ali Alhabsji dari Masjid Kwitang Jakarta, yang sengaja datang untuk menemui Ketua Umum Sekber Golkar Pusat S. Sukowati (Letjen) untuk menyatakan bahwa jamaah masjidnya bernaung di bawah Sekber Golkar.[978]

Taktik "buldoser" Sekber Golkar akhirnya menghasilkan sikap keras PNI dalam *commander call* di Bandung pada tanggal 2 hingga 3 April 1971. Pimpinan pusat PNI telah mendengar bahwa di aneka daerah banyak massa PNI yang "dibuldoser." Atas aneka laporan tersebut, DPP PNI merancang memorandum kepada Soeharto, yang intinya adalah sebagai berikut:

www.setabasri.org

[976] PNI juga mengeluhkan pula bahwa di Subang, Jawa Barat, tengah terjadi tekanan-tekanan berat dan intimidasi atas PNI dan massa marhaen oleh oknum-oknum penguasa setempat. Suluh Marhaen secara lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak penguasa di Subang bahkan memanggil sejumlah tokoh PNI dan meminta daftar nama anggota PNI cabang Subang, tetapi permintaan ini ditolak karena dianggap tidak wajar. Lihat *Suluh Marhaen*, 2 April 1971.

[977] Pengakuan atas adanya intimidasi oleh Sekber Golkar ternyata diakui oleh Ketua I Sekber Golkar Pusat Sugandhi (Mayjen) dengan menyatakan bahwa memang terdapat oknum-oknum Sekber Golkar yang *over acting* sehingga menimbulkan tafsiran negatif atas "partai" tersebut. Peristiwa "penyeberangan" massa marhaen di Ciamis juga tidak masuk akal mengingat secara historis, PNI memiliki basis massa yang kuat di kawasan Priangan Timur. Lihat *Suluh Marhaen*, 2 April 1971.

[978] *Angkatan Bersendjata*, 2 April 1971.

> (1) Tetap mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto; (2) PNI Massa Marhaen bertekad bulat meningkatkan *usaha2* pembinaan stabilitas nasional bagi *kelantjaran* Pembangunan dan Pemilu, dan; (3) *Menjatakan* keprihatinan terhadap tindakan dari sementara unsur sesama *Pantja Sila jang* menimbulkan *kegontjangan2* dalam *masjarakat*, hal mana tidak menguntungkan bagi *kelantjaran* pelaksanaan Pembangunan dan Pemilu serta merugikan *kebidjaksanaan* Presiden Soeharto.[979]

Memorandum politik akan diserahkan DPP PNI kepada Soeharto, dengan melampirkan aneka laporan tertulis dari daerah-daerah konflik di mana massa PNI banyak mengalami tindakan-tindakan "a-demokratis." DPP PNI tetap menjalankan mekanisme *inclusive fitness* dengan menyebut salah satu alasan memorandum tersebut adalah untuk menyelamatkan kepemimpinan Soeharto sebelum dan setelah Pemilu.[980]

A. Sjaichu yang juga menjabat sebagai Ketua II PBNU mengemukakan bahwa NU tidak takut kalah dalam Pemilu 1971 dengan menyatakan:

> "*jang* kita takutkan adalah *gontok2an*, kita takut persatuan Nasional akan rontok kembali karena hal ini akan merusakan *mission* Pak Harto, Pelita, *mendjatuhkan* nama baik Indonesia diluar negeri dan *selandjutnya* akan mengadakan nama *baiknja* Gestapu."[981]

Sjaichu juga menginformasikan bahwa terdapat wilayah di mana kader-kader NU diisukan akan pula "di-Buleleng-kan", yaitu ditekan untuk masuk ke dalam Sekber Golkar, dengan rincian akan terjadi di wilayah-wilayah seperti

www.setabasri.org

[979] *Sinar Harapan*, 5 April 1971.
[980] Hadisubeno juga menyatakan bahwa "dalam minggu ini sudah ada "pendjernihan" terhadap semua persoalan termasuk soal Buleleng." Bahkan pernyataan ini dilontarkan langsung oleh Hadisubeno, Ketua Umum PNI. Lihat *ibid*.
[981] *Sinar Harapan*, 5 April 1971.

Cimahi, Indramayu, Lebak, Lumajang, Tuban, Lampung, Teluk Betung, dan sejumlah wilayah Kalimantan.[982]

Aneka intimidasi yang dilakukan pendukung Sekber Golkar (khususnya pemerintahan lokal dan angkatan bersenjata) mendorong munculnya semacam frustrasi di kalangan pimpinan partai politik. Hadisubeno menyatakan "*saja* mohon doa sama Tuhan *JME* lebih baik PNI dikalahkan *sadja* dalam Pemilu *jad*. Daripada Indonesia *djadi katjau* seperti Pakistan."[983] Sebagai bentuk kekesalannya Hadisubeno menyatakan PNI di daerah-daerah tidak perlu melakukan kampanye, terlebih aneka rapat.[984]

Soeharto akhirnya menerima perwakilan partai politik dan Sekber Golkar akibat aneka permasalahan di lapangan.[985] Inti pertemuan tersebut adalah persiapan Pemilu 1971 dan aneka ekses yang terjadi di lapangan.[986] Sebagai upaya menciptakan kepatuhan politik di kalangan partai politik yang telah mengeras sikapnya, Soeharto berencana memberikan *reward* kepada masing-masing partai

www.setabasri.org

[982] Sjaichu menyatakan mereka sudah melaporkan aneka tindakan kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib. Tindakan kekerasan tersebut terutama dilakukan oleh para penguasa daerah. Kategori intimidasi tersebut ada lima yaitu: (1) tidak dijamin keselamatannya; (2) akan dihancurkan kekayaannya; (3) kalau petani tidak akan diberi air irigasi; (4) kalau menjual tanah tidak akan diberi surat-suratnya; dan (5) tindakan fisik berupa penangkapan dan pemukulan. Lihat *Sinar Harapan*, 5 April 1971.
[983] *Sinar Harapan*, 5 April 1971.
[984] Hadisubeno menyerukan "itu pimpinan2 jang dipusat pergilah ke-daerah2, dan lihat sendiri bagaimana praktek2 jg kedjam dilakukan untuk memaksa massa PNI masuk kepada golongannja." Lihat *ibid.*
[985] Hadir dalam pertemuan tersebut Hadisubeno, M. Isnaeni, dan Hardjanto (PNI), Idham Chalid, A. Sjaichu, dan Subchan Zaenuri Ershan (NU), Mintaredja, Agus Sudono, Ramli Harahap, Husni Thamrin (Parmusi), A. Sukarmadidjaja, Mustafa Supangat, dan Tobing (IPKI); Sukarni dan Husein Jusuf (Murba); I.J. Kasimo, VB Da Costa, dan Doerjat (Partai Katolik); JCT Simorangkir, A. Wenas, Sabam Sirait, Soegaib, Z. Manusama, dan TAM Simatupang (Parkindo); Rusli Holil Saleh (Perti); Ibrahim, Imam Supardjan, dan MA Gani (PSII); dan S. Sokowati, Sumiskum, dan Murdopo (Sekber Golkar). Lihat *Sinar Harapan*, 7 April 1971.
[986] *ibid*.

politik dan Sekber Golkar uang Rp. 10.000.000,- dan sebuah unit mobil.[987] Di tengah agresivitas kampanye Sekber Golkar Soeharto tetap berupaya menciptakan *image* bahwa dirinya berdiri di atas semua kontestan.

Dalam suatu forum diskusi yang dimoderatori oleh Dorodjatun Koentjorojakti, Rahman Tolleng yang berposisi di pihak Sekber Golkar berupaya melakukan serangan balasan akibat aneka laporan intimidasi yang menimpa "partainya." Tolleng melakukan perlawanan dengan menyatakan bahwa pihaknya pun memiliki dokumen untuk melaporkan partai-partai politik. "Golkar *djuga* mempunjai dokumen2, terutama *kpd*. partai *jg memperdjuangkan* Piagam *Djakarta.*"[988] Tentu saja serangan ini terutama ia tujukan kepada NU maupun Parmusi, dengan mana Zamroni dari NU balas menyatakan "adalah kesalahan prinsipil sekali kalau ada perkiraan bahwa NU *memperdjuangkan* Piagam *Djakarta*."[989]

Masalah politik selama proses Pemilu 1971 pun ada yang sampai dibawa ke ranah hukum, yaitu ketika Majelis Permasyarakatan Buruh Indonesia (MPBI) membuat pelaporan kepada Mahkamah Agung perihal aneka tindakan pemerintah di sejumlah daerah atas organisasinya seperti di Cilacap, Tegal, Semarang, Banyuwangi, Lampung, dan Sumatera Utara.[990] Menjawab aneka protes partai

www.setabasri.org

[987] *ibid*.
[988] *ibid.*
[989] Tanpa diketahui siapa yang berteriak di dalam pertemuan tersebut, maka dari barisan belakang peserta diskusi terdengar lontaran kata-kata "Tolleng umumkan dokumen2 siapa itu, djangan2 seperti dokumen Aidit atau Subandrio nanti." Serangan lain atas Sekber Golkar disuarakan Raf Mufli, tokoh mahasiswa yang baru saja keluar dari keanggotaan DPR-GR, dengan menyatakan "saja peringatkan kepada Golkar … djanganlah terlampau memonopoli konsep pembaharuan politik, karena nanti itu bisa tertjela." Lihat *ibid.*
[990] Berdasarkan kasus-kasus di sejumlah daerah tersebut gugatan pokoknya adalah pemerintah setempat melakukan aneka pemaksaan kepada buruh setempat untuk membubarkan diri serta menyerahkan harta benda mereka kepada Kokarmendagri. MPBI yang terbentuk tanggal 1

politik pada pemerintah, Amir Machmud selaku Mendagri berupaya membenarkan tindakannya. Amir menuduh partai-partai politik "masih tenggelam dalam alam pikiran orde lama."[991] Menurut Amir tidak ada penyalahgunaan kekuasaan karena yang dilakukan pemerintah melainkan hanyalah "taktik perjuangan" untuk memenangkan Orde Baru.[992] Amir menegaskan bahwa pihak manapun yang tidak mau melaksanakan *mission* Orde Baru maka "mereka itu *sesungguhnja* telah menggali lubang kuburan sendiri."[993]

Hadisubeno sendiri tidak terlampau keberatan dengan adanya Gerakan Anti Amir Machmud (Gemud) yang muncul di Wonogiri, seperti dilaporkan oleh Pangdam Diponegoro Widodo (Mayjen), dan menyatakan bahwa gerakan itu adalah suara hati rakyat yang tertekan. Namun, ia tidak membenarkan apabila gerakan tersebut dilakukan oleh elemen partai politik.[994] Hadisubeno berupaya menunjukkan kepatuhan politiknya kepada Soeharto karena Amir adalah *bonding* Soeharto dalam Pemilu 1971 ini, sama seperti Ali Moertopo. Sebab itu ia melontarkan ancaman bahwa siapa pun yang mendiskreditkan para pembantu adalah sama dengan menjatuhkan kewibawaan Soeharto.[995]

www.setabasri.org

November 1969 merupakan organisasi yang ingin berkembang wajar, dan sebab itu menolak untuk dipaksa masuk ke dalam Kokarmendagri. Lihat *Suluh Marhaen*, 15 April 1971.

[991] *Sinar Harapan*, 15 April 1971.

[992] Di sini Amir menggunakan kata Orde Baru, bukan Sekber Golkar. Amir menjelaskan bahwa serangkaian tindakan pemerintah yang disebut sebagai paksaan, ancaman, dan intimidasi oleh sejumlah partai politik sesungguhnya akibat pemerintah sudah berpikir jauh ke depan untuk melaksanakan modernisasi seperti Ketetapan MPRS. Amir mengontraskan bahwa jika saat ini pemerintah tengah bekerja keras untuk kepentingan seluruh rakyat, maka partai-partai politik justru berjuang hanya untuk kepentingan golongannya.

[993] Amir juga menegaskan program "deparpolisasi pegawai negeri" akan terus dilakukan yaitu agar birokrat terbebaskan dari kepentingan politik yang sempit. Amir tidak melarang para pegawai negeri menjadi anggota organisasi yang terafiliasi dengan Sekber Golkar. Lihat *ibid*.

[994] *Merdeka*, 17 April 1971.

[995] *ibid*.

Upaya ancaman, paksaan, dan intimidasi tidak hanya mengarah pada massa partai-partai politik, melainkan juga surat-surat kabar. Sejumlah surat kabar independen di Jawa Tengah mendapat tekanan cukup keras dari Sekber Golkar. Tujuan tekanan tersebut adalah mengalihkan fungsi surat-surat kabar yang awalnya independen menjadi "corong" suara Sekber Golkar.[996]

Hal lain yang menjadi dinamika proses Pemilu 1971 adalah pencoretan kandidat partai politik. Parkindo memprotes bahwa terdapat dua orang anggotanya yang dicoret namanya oleh Kopkamtib akibat satu orang dituduh pernah terlibat sebagai anggota Permesta Daerah Sulawesi Utara dan seorang lagi pernah menjadi anggota Perbum yang terafiliasi dengan SOBSI.[997] Selain Parkindo, PNI juga menerima masalah serupa yaitu terdapat 20 kandidatnya yang dicoret oleh Kopkamtib.[998]

Permasalahan dalam proses kampanye Pemilu 1971 terus bertambah dan kini mencapai tahap penyiksaan secara fisik. Wartawan Harian KAMI yang mengikuti safari Ketua DPR-GR merangkap Ketua II PBNU di Jember, Probolinggo, Mojokerto, Kediri, Pacitan, Bojonegoro, dan Bangkalan Madura

www.setabasri.org

[996] Misalnya seorang pimpinan Sekber Golkar yang berpangkat Kolonel menawarkan bantuan sebesar Rp. 100.000,- kepada seorang pimpinan umum surat kabar agar mau menjadi "corong" organisasi ini. Sementara itu pimpinan redaksi Pos Minggu, juga mendapat tekanan hebat karena ia diharuskan keluar dari surat kabarnya. Keluarnya pimpinan redaksi tersebut diawali pemanggilan atas pimpinan umumnya agar menginstruksikan pimpinan redaksi mengubah haluan surat kabar agar beralih mendukung Sekber Golkar. Pimpinan redaksi tersebut menolak, yang kemudian datang instruksi kedua yang menyatakan bahwa pimpinan redaksi tersebut harus diganti. Lihat *Sinar Harapan*, 19 April 1971.

[997] Dalam tindak pencoretan nama tersebut Parkindo belum menerima surat penjelasan resmi serta bukti-bukti yang konkrit dari Kopkamtib melainkan hanya penjelasan lisan dari Soenandar sebagai Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum / LPU. Lihat *Sinar Harapan*, 20 April 1971.

[998] *Sinar Harapan*, 20 April 1971. Sama seperti Amir Machmud, dalam menyebut Sekber Golkar Panggabean menggunakan istilah Orde Baru, dan bahwa pencoretan kandidat tidak lain merupakan upaya untuk memenangkan Orde Baru.

memperoleh laporan warga seputar penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum Babinsa, lurah, dan Koramil terhadap anggota NU dan GP-Ansor. Motif penyiksaan berat tersebut adalah memaksa para korban untuk masuk ke dalam Sekber Golkar.[999]

Di Jombang, yaitu di Desa Murian, Kecamatan Mojoagung, seorang warga bernama A. Rachim yang menjabat Sekretaris Ranting NU bersama tiga orang rekannya diculik dari rumah pada tengah malam. Motif penculikan tersebut akibat mereka dituduh menghalangi sosialisasi bagi Sekber Golkar di daerahnya.[1000] Penahanan tanpa surat penangkapan itu dilakukan oleh Komandan Koramil bernama Sardjo (Lettu) bersama anak buahnya yang bersenjata lengkap.[1001] Dalam mengomentari kejadian tersebut, Ketua dan Sekretaris NU Cabang Jombang M. Baidlowi dan Ramli Arief yang didampingi Chairul Anwar selaku Wakil Ketua DPRD II Jombang menyatakan bahwa para korban "*diperlakukan lebih dari Kenpeitai*."[1002]

Aneka kekerasan politik yang terjadi mendorong sebuah delegasi bernama Angkatan Muda Oposisi menemui Mendagri / Ketua LPU yang diterima oleh Wakil Sekretaris Umum LPU Erman Moeljantoro di Gedung LPU Jalan Matraman Raya.[1003] Mereka mendesak agar hari pemungutan suara tanggal 3 Juli

www.setabasri.org

[999] *KAMI*, 22 April 1971.
[1000] *KAMI*, 22 April 1971.
[1001] A. Rachim ditahan tiga hari tiga malam, disiksa hingga babak-belur, tangannya dipelintir hingga hampir patah, tidak diberi makan dan minum, wajah dan tengkuknya dipukuli hingga berlumuran darah, dan berkali-kali kemaluannya ditendangi dengan sepatu tentara. Lihat *ibid*.
[1002] *KAMI*, 22 April 1971. Akhirnya A. Rachim pada hari ketiga dikurung dalam kamar yang penuh dengan tikus dan bau yang menyiksa, baru setelah itu disodori formulir untuk masuk Sekber Golkar dan terpaksa menandatanganinya.
[1003] Delegasi tersebut diantarainya terdiri atas Boetje Rumamuri, Toto Tjikrowijono, dan Julius Usman menyerahkan pernyataan dan memorandum politik "Golongan Oposisi." Lihat *ibid*.

1971 dinyatakan sebagai hari libur penuh juga menolak penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kantor-kantor, baik swasta maupun publik. Mereka mensinyalir adanya kecenderungan *Dictatory Plebiscitary* atau "Pemilu yang didikte."[1004] Mereka menambahkan bahwa "Pemilu 1971 hanja akan menghasilkan manusia2 jang naik kekuasaan jang tinggi, jang tidak disutjikan oleh tradisi, tidak dimuliakan oleh prinsip."[1005] Atas tuduhan Golongan Oposisi Erman Moerjantoro menyatakan "tapi kami telah mengetjek melalui Panitia Pemilihan Daerah ternjata paksaan dan penekanan2 itu tidak ada."[1006] Erman juga memperingatkan Golongan Oposisi bahwa pemerintah akan tetap mengesahkan hasil Pemilu 1971 apapun yang akan terjadi.[1007]

Di Sumatera Utara M.A. Gani, Wakil Presiden PSII yang juga anggota Panitia Pemilihan Indonesia, menyatakan bahwa sejumlah partai politik di Medan mendapat aneka tekanan baik secara halus maupun kasar.[1008] Tekanan dalam seperti diungkap Gani dikenal sebagai permainan "kuda kepang" yaitu seorang lurah di Sulawesi Selatan mengeluarkan instruksi bahwa para anggota partai politik tidak boleh dinikahkan di depan Kadi hingga Pemilu, kecuali mereka mau masuk Sekber Golkar.[1009]

www.setabasri.org

[1004] *ibid.*
[1005] *ibid*. Bagi "Gerakan Oposisi" Pemilu 1971 hanya akan menciptakan manusia-manusia oportunis yang kejam dan licik, yang dengan kasar merenggut hak orang tanpa rasa tanggung jawab dan dengan tujuan yang tidak menentu.
[1006] *Suara Pembaruan*, 14 Mei 1971.
[1007] *ibid.*
[1008] *Kompas*, 14 Mei 1971.
[1009] Gani juga memberi contoh lainnya yaitu seorang yang berprofesi "puter-puter" memanggil seorang anggota pimpinan anak cabang PSII dan memeriksanya, memasukkannya ke dalam sel, dan hanya diberi makan satu kali sehari. Setelah tiga hari anggota PSII itu akan dikeluarkan dengan syarat harus mau masuk Sekber Golkar. Lihat *ibid.*

Garda depan pemenangan Sekber Golkar, Amir Machmud, yang terus menjadi kontroversi menyatakan "asal berguna untuk menjelamatkan *Rakjat*, UUD 45 dan *Pantjasila djika* perlu *saja* akan main *kaju*."[1010] Pernyataan tersebut diungkap Amir di depan massa Kokarmendagri dan massa Sekber Golkar di Gedung Kertamukti Bandung. Bagi Amir, Pemilu 1971 juga dimaksudkan untuk menertibkan partai-partai politik agar mereka "mengorientasikan … kearah pembangunan agar tidak lagi main *politik2an* dan *rewel2an*."[1011] Dalam menjawab adanya Gemud, Amir menyatakan dapat menyelesaikannya sendiri, sementara mengenai tuduhan bahwa ia adalah "Komandan Garnisun" dan "Buldoser" maka ia akan membiarkannya saja dan akan terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan menyelamatkan Pancasila.[1012]

Mahasiswa sebagai salah satu elemen inti Orde Baru juga melakukan kritik atas aneka intimidasi yang terjadi di dalam masyarakat dalam proses Pemilu 1971. Dewan Mahasiswa (DM) Jawa Timur pada tanggal 17 Juni 1971 mengeluarkan sebuah petisi yang intinya berpendapat bahwa Pemilu harus dilaksanakan tanpa intimidasi, penindasan, dan cara-cara yang menyesatkan rakyat.[1013]

3. Prediktabilitas Spesies dalam Dominasi Soeharto

Prediktabilitas Spesies adalah kepastian posisi setiap individu di dalam mengakses aneka sumber daya dan melakukan reproduksi. Setiap pihak cenderung

[1010] *Sinar Harapan*, 24 Mei 1971.
[1011] *ibid*.
[1012] *Sinar Harapan*, 24 Mei 1971.
[1013] *Kompas*, 21 Juni 1971. DM Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam memorandum yang ditandatangani Tri Harwanto selaku Ketua Umum dan Theopilus Matasak selaku Sekretaris Umum, juga mendesak agar segala bentuk intimidasi atau tekanan kepada rakyat harus segera dihentikan karena akan menimbulkan salah pengertian pada diri mereka mengenai demokrasi.

www.setabasri.org

memahami posisi masing-masing serta kelayakan mereka dalam hal akses atas komoditas bernilai, termasuk juga reproduksi dalam kondisi hirarkis yang jelas. Dengan prediktabilitas spesies maka tidak ada lagi pertikaian berlarut-larut, terbuangnya energi yang bersifat terus-menerus, risiko luka fisik, bahkan kematian. Sehubungan dengan masalah prediktabilitas spesies dalam konteks kekuasaan Soeharto ini, maka menarik dicermati pendapat Marcus Mietzner yang menulis bahwa "kasus Indonesia memberikan bukti kuat tentang perlunya pemahaman teratur mengenai aneka bidang kapasitas negara yang memberi dukungan terhadap konsolidasi yang bersifat otoritarian".[1014] Kuatnya *state capacity* Indonesia pasca Sukarno adalah akibat kemampuan Soeharto memobilisasi kekuatan angkatan bersenjata, memanfaatkan kinerja para *bonding*, melakukan dominasi dalam hirarki *dyadic* maupun kompleks, memaksakan para lawan politik menerapkan mekanisme *inclusive fitness*, dan menciptakan kepatuhan politik.

Soeharto muncul ke kekuasaan melalui serangkaian peristiwa kekerasan berupa pembersihan kelompok kiri, tetapi tidak terlampau dipermasalahkan karena ditujukan atas musuh bersama. Pemungutan suara Pemilu 1971 dilaksanakan tanggal 5 Juli 1971 dengan masa kampanye sejak 29 April 1971 selama 60 hari. Jika diperbandingkan dengan hasil Pemilu 1955, maka hasil Pemilu 1971 tampak pada **Tabel 10** *Perolehan Suara Pemilu 1955 dan 1971*.

www.setabasri.org

[1014] Marcus Mietzner, Authoritarian …, *op. cit.* p. 3.

Tabel 10 Perolehan Suara Pemilu 1955 dan 1971
Sumber Tabel: Donald Hindley. Indonesia: 1971: Pantjasila Democracy and the Second Parliamentary Elections. 1972. *Asian Survey.* Vol. 12, No. 1, A Survey of Asia 1971: Part I (Jan.) pp. 56-68., p. 58

	1955			1971		
	Suara	%	Kursi	Suara	%	Kursi
Masyumi/Parmusi	7.903.886	20,9	57	2.930.746	5,4	24
Nahdlatul Ulama	6.955.141	18,4	45	10.213.650	18,7	58
PSSI	1.091.160	2,9	12	1.308.237	2,4	12
Perti	483.014	1,3		381.309	0,7	
PNI	8.434.653	22,3	57	3,793.266	6,9	20
Parkindo	1.003.325	2,7	14	733.359	1,3	10
Partai Katolik	770.740	2		603.740	1,1	
IP-KI	-	-	-	338.403	0,6	0
Partai Murba	-			48.126	0,1	
Sekber Golkar	-		-	34,348.673	62,8	227
PKI				-	-	-
TOTAL				54.699.509	100,0	351

Kembali ke masalah hasil Pemilu 1971, bahwa **Tabel 10** memperlihatkan terjadinya kemerosotan secara tajam suara Parmusi (wajah baru Masyumi), kecenderungan NU mengalami sedikit kenaikan, stagnasi suara Parkindo dan Partai Katolik, serta tentu saja kemenangan mutlak Sekber Golkar.

Melalui hasil reorganisasi ABRI oleh Soeharto, kekuatan militer yang dipimpinnya berhasil menjadi satu-satunya kekuatan di dalam masyarakat yang mampu menjamin keamanan dan stabilitas ekonomi.[1015] Prediktabilitas Soeharto ditandai hadirnya ekspresi kekuatan politik baru Indonesia yang terbentuk antara TNI-AD-Administrator Negara-Ekonom, dengan mana ketiga unsur tersebut menjadi bagian dari hirarki Soeharto dalam memanajemen Indonesia.[1016]

Allan Samson menyatakan bahwa pada tahun 1971 Indonesia berhasil mengendalikan inflasi, melanjutkan produktivitas pertanian, dan memulihkan

[1015] Allan A. Samson. Indonesia 1972: The Solidification of Military Control. 1973. *Asian Survey.* Vol. 13, No. 2 (Feb.), pp. 127-139, p. 127
[1016] *ibid*.

www.setabasi.org

kepercayaan para investor dan donatur asing bagi proyek-proyek Pembangunan di Indonesia.[1017] Pemilu 1971 merupakan hasil kepatuhan politik sehingga mewujud sebagai legitimasi simbolik kekuasaan Soeharto. Pemilu 1971 merupakan hasil tekanan kuat Sekber Golkar atas aneka konsep Modernisasi dan Pembangunan yang merupakan antitesis Orde Lama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa Pemilu 1971 adalah penyedia legitimasi bagi hirarki Soeharto secara lebih lanjut menciptakan prediktabilitas politik.[1018]

Untuk tingkat DPR, Soeharto berhasil menjamin prediktabilitas bagi program kerja Kabinet Pembangunan I yang tengah ia pimpin.[1019] Ali Moertopo menyatakan bahwa parlemen akan direstrukturisasi menjadi hanya sekitar empat atau lima fraksi saja sehingga lebih efektif dalam menyusun rancangan undang-undang mengenai pelaksanaan Pembangunan nasional selanjutnya.[1020] Restrukturisasi fraksi seperti dimaksudkan oleh Ali Moertopo didasarkan pada perhitungan sementara hasil Pemilu 1971, di mana hanya terdapat empat partai besar saja yaitu Sekber Golkar, NU, PNI, dan Parmusi, sementara partai-partai lainnya tidak terlampau signifikan.[1021]

Untuk tingkat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Soeharto menyepakati satu orang ketua yaitu K.H. Idham Chalid dari NU, dan empat Wakil Ketua yaitu secara berturut-turut Sumiskum dari Sekber Golkar, Domo Pranoto,

www.setabasri.org

[1017] *ibid*., p. 127
[1018] *ibid.,* p. 128.
[1019] Seorang *bonding* Soeharto yaitu Ali Moertopo menyatakan kemungkinan perubahan susunan kabinet. Selain itu Ali juga memprediksi akan adanya perombakan parlemen atau yang ia sebut "perubahan-perubahan ke dalam" yang akan berlangsung hingga tanggal 28 Oktober 1971. DPR hasil Pemilu 1971 sendiri baru akan terbentuk tanggal 6 Januari 1972. Lihat *Sinar Harapan*, 10 Juli 1971.
[1020] *Sinar Harapan*, 10 Juli 1971.
[1021] *ibid*.

Jailani Naro dari Parmusi, dan M.H. Isnaeni dari PNI.[1022] Sekber Golkar menang di hampir semua daerah pemilihan kecuali di Aceh (hanya 49,7%),[1023] Maluku (hanya 47,7%),[1024] dan Jakarta (hanya 46,7%).[1025] Hanya satu partai yang sanggup menghadapi Sekber Golkar yaitu NU. Dengan demikian maka prediktabilitas politik tahun 1971 berhasil diciptakan Soeharto menggunakan Sekber Golkar. Soeharto pun berhasil mempersatukan dua cabang kekuasaan yaitu legislatif dan eksekutif menjadi "satu paket" karena parlemen didominasi oleh Sekber Golkar.

Sekber Golkar menyerap semua potensi kelompok kepentingan yang ada dengan mengklaim bahwa mereka memiliki 269 organisasi kemasyarakatan di segala bidang.[1026] Soeharto berhasil mereproduksi kekuasaan dirinya di dalam Sekber Golkar dan Sekber Golkar sendiri menjadi bagian dari hirarki dominan Soeharto yang mampu menciptakan kepatuhan politik dengan cara menyerap massa partai-partai politik ke dalam tubuhnya.[1027]

www.setabasri.org

[1022] Sekretariat D.P.R. R.I., *Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat R.I. Hasil Pemilu 1971.* Jakarta: Sinar Hudaja Offset, tt., h. 5.
[1023] Di Aceh partai-partai politik Islam seperti Parmusi, NU, PSII, dan Perti masih mengakar kuat dan belum mampu digeser oleh kehadiran Sekber Golkar. Suara gabungan partai-partai Islam di Aceh mencapai 48,9% (tahun 1955 gabungan tersebut adalah 90,5% dengan porsi terbesar Masyumi). Lihat Yohan Wahyudi, "Berebut Nasionalisme di Kancah Lokal" dalam https://nasional.kompas.com/read/2009/04/03/03141250/berebut.nasionalisme.di.kancah.lokal Diakses 25 November 2021 pukul 19:51 WIB.
[1024] Di Maluku Sekber Golkar mendapat persaingan kuat sesuai belahan agama di Maluku saat itu (utara mayoritas Muslim, selatan mayoritas Kristen). Dari empat kursi yang diperebutkan Sekber Golkar hanya memperoleh 2 sementara dua kursi lainnya dibagi rata antara Parmusi dan Parkindo. Lihat Keputusan Presiden No. 107/M Tahun 1971.
[1025] Di Jakarta dari 9 kursi yang diperebutkan, Sekber Golkar hanya memperoleh 4 sementara lima lainnya terbagi antara NU (dua kursi), Parmusi (satu kursi), Parkindo (satu kursi), dan PNI (satu kursi). Lihat Keputusan Presiden No. 107/M Tahun 1971
[1026] Donald Hindley. Indonesia 1971 …, *op. cit.,* p. 59. Seperti petani, buruh, pemuda, mahasiswa dan pelajar, perempuan, pengemudi becak, nelayan, pelayan publik, intelektual, veteran, angkatan dan angkatan bersenjata.
[1027] *ibid.,* p. 59-60.

Untuk mendegradasi daya tarik kekuatan politik Islam, Sekber Golkar juga melakukan aneka proyek simpatik terhadap para guru agama (*ustadz*). Sekber Golkar bersama dengan militer dan birokrasi giat mengambil hati para pemimpin agama Islam dengan membangun tempat ibadah serta memberikan donasi untuk masjid maupun pesantren. Sekber Golkar sekurangnya memberikan donasi dan bantuan lain pada 12 organisasi Islam kendati memperoleh kritik dari surat kabar *Abadi* milik Parmusi.[1028] Salah satu organisasi Islam yang banyak menerima bantuan Sekber Golkar adalah Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI).[1029] Saat NU mengeluarkan fatwa mengenai berdosanya seorang Muslim apabila memilih partai selain partai Islam, maka K.H. Muhammad bin Ali dari Sekber Golkar membalas dengan fatwa yang menyebutkan bahwa diperbolehkan bagi kaum Muslim memberikan suara kepada Sekber Golkar. Kemenangan Sekber Golkar membuktikan bahwa spesies tidak lagi hendak masuk ke dalam pergolakan yang dipicu oleh persaingan antar partai politik.[1030] Selain itu tampak jelas bahwa spesies menghendaki pembaruan dalam kehidupan mereka sesuai apa yang disampaikan Sekber Golkar dalam proses kampanye.

Sinar Harapan menyatakan bahwa kemenangan Sekber Golkar pada satu sisi merupakan *doorbraak* dalam pola sistem kepartaian Indonesia dan di lain pihak kemenangan itu berati munculnya mitra sipil bagi ABRI dalam memimpin Republik Indonesia.[1031] Konklusi dari kedua hal tersebut terdiri atas dua perkara.

www.setabasri.org

[1028] *ibid.,* p. 60.
[1029] *ibid.*
[1030] Tadjuk Rentjana Sinar Harapan. "Apa Arti Kemenangan Golkar bagi Masa Depan Kita?" *Sinar Harapan*, 6 Juli 1971.
[1031] *ibid*.

Pertama, Sekber Golkar akan mengalami transformasi besar-besaran selama lima tahun mendatang untuk dapat menjalankan fungsi sebagai *doorbraak* dan mitra bagi ABRI dalam memimpin Indonesia. Kedua, Sekber Golkar kemungkinan hanya akan menjadi alat *machtvorming* dan *machtaanwending* belaka.[1032]

Amir Machmud menyatakan bahwa Pemilu 1971 berlangsung secara sah, karena baginya proses-proses Pemilu 1971 telah sesuai dengan hukum dan aneka peraturan yang berlaku sehingga hasilnya tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh siapa pun.[1033] Pada lain pihak Nasution menyatakan bahwa Pemilu 1971 memiliki sejumlah kekurangan.[1034]

Setelah pemungutan suara Pemilu 1971 selesai dilaksanakan, Sekber Golkar pun meresmikan struktur baru mereka dengan S. Sokowati tetap sebagai Ketua Umum.[1035] Struktur baru tersebut meliputi Organisasi dan Personalia Sekber Golkar Pusat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Sekber Golkar No. 101/VII/Golongan Karya/1971. Dalam struktur baru ini peran aneka KINO dan ormas-ormas di dalamnya hanya sebatas melakukan pembinaan teknis-administratif, sementara operasional ormas-ormas tersebut dikendalikan dalam koordinasi sesuai bidang-bidang mereka dan dilakukan oleh aneka sekretaris Dewan Pimpinan Pusat.[1036]

www.setabasri.org

[1032] *Machtvorming* adalah menghimpun kekuatan. *Machtaanwending* adalah menggunakan kekuasaan. Lihat Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Kumpulan Makalah: Issue 2.* Jakarta: Badan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991, h. 24.
[1033] *Sinar Harapan*, 10 Juli 1971.
[1034] Pertama, biaya penyelenggaraan Pemilu 1971 terlalu besar sehingga UU Pemilu harus diperbaiki melalui proses legislatif. Kedua, sebaiknya aneka berita mengenai penekanan, intimidasi, dan paksaan sebaiknya diinventarisasi untuk kemudian dibawa ke pengadilan apabila memenuhi unsur kriminal, dan ke lembaga-lembaga legislatif bila melanggar aneka peraturan administrasi dan disiplin Pemilu. Lihat *ibid*.
[1035] *Sinar Harapan*, 10 Juli 1971.
[1036] *ibid*.

Pimpinan Golkar lainnya adalah Amir Murtono sebagai Ketua (merangkap Asisten Pembinaan Sosial Politik dan Hankam) dengan anggota Dewan Pimpinan Pusat Golkar yaitu Amir Murtono, Martono Maskus Soepato, Sumiskun, Cosmas Batubara, dan David Napitupulu. Duduk sebagai Sekretaris Jenderal Golkar adalah Sapardjo dengan para Wakil Sekretaris Jenderal seperti Moerdopo, Rahardjo, dan Yusuf Wanandi.[1037] Dapat diperhatikan sekurangnya dua kader Pater Beek yaitu Cosmas Batubara dan Yusuf Wanandi memegang posisi penting di DPP Golkar.

Hal menarik lainnya adalah posisi Dewan Pembina yang terdiri atas tujuh belas orang dan sekaligus mereka ini bertindak sebagai Dewan Penasihat Golkar dengan fungsi memberikan *guidance policy*.[1038] Banyak dari anggota Dewan Pembina ini yang turut pula duduk di dalam Kabinet Pembangunan I Soeharto, sehingga tentu akan terjadi kerja sama yang bersifat saling menguntungkan antara Golkar dengan Kabinet. Terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang tengah menjabat sebagai Menteri Negara bidang Ekuin.[1039]

Pembangunan ekonomi Soeharto sebagian besar adalah hasil pemikiran dan perencanaan para teknokrat ekonomi yang berasal dari lingkaran sipil-militer Seskoad.[1040] Konsep ini mendapat dukungan dari Front Pancasila yang dipimpin

www.setabasri.org

[1037] *ibid*.
[1038] *Kompas*, 8 Oktober 1971. Mereka terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Maraden Panggabean (Jenderal), Sumitro (Jenderal), Amir Machmud (Letjen), Ali Moertopo (Brigjen), Adam Malik, Widjojo Nitisastro (Prof.), Tojib Hadiwidjaja (Prof), Djamin Ginting (Letjen), Sugandhi (Mayjen), Isman (Mayjen), Suhardiman (Mayjen), Radius Prawiro (Katolik), Mashuri, Siwabessy (Prof.), Darjatmo (Letjen), dan Amino Gondohutomo (Brigjen).
[1039] *Kompas*, 8 Oktober 1971. Untuk posisi Wakil Ketua terpilih Maraden Panggabean (Deputi Soeharto) yang tengah menjabat sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata.
[1040] J.B. Soedarmanta. Tengara …, *op. cit.,* h. 148.

Subchan Zaenuri Ershan dan Harry Tjan Silalahi. Sejak 1966 Soeharto menerapkan kebijakan anggaran belanja berimbang dengan jumlah total 81,3 milyar rupiah. Pengeluaran pemerintah terdiri atas pengeluaran rutin yang jumlahnya mencapai 66,65 milyar rupiah. Sementara itu untuk penerimaan berasal dari sektor pajak dan bea cukai sebesar 33 milyar, pinjaman luar negeri sebesar 29,5 milyar rupiah, dan penjualan kredit ekspor 14,2 milyar rupiah.[1041] Berdasarkan hasil Seminar KAMI tahun 1966, Soeharto juga menjalin kesepakatan bahwa tujuan pokok perjuangan ekonomi akan diarahkan bagi kepentingan tani, buruh, prajurit, dan rakyat kecil.[1042]

Dengan kekuasaan besar yang ada padanya, Soeharto berupaya mengembalikan Indonesia ke dalam pergaulan internasional dan ini mendorong peningkatan bantuan luar negeri yang masuk. Pada tahun 1967 sekitar 200 juta dolar bantuan asing memasuki Indonesia untuk keperluan rekonstruksi ekonomi. Pada tahun 1968 jumlah tersebut naik secara signifikan menjadi 325 juta dolar dan di tahun 1969 meningkat secara tajam menjadi 500 juta dolar.[1043]

Namun, Soeharto bukan orang yang selalu tunduk pada kepentingan asing, karena pada tanggal 4 Januari 1967 ia secara tegas menolak permintaan CALTEX agar Indonesia menurunkan harga ekspor minyak mentahnya dari 1,74 dolar menjadi 1,60 dolar.[1044] Pada sisi lain, Soeharto memberikan persetujuannya atas kontrak lepas pantai ke sejumlah perusahaan minyak asing dengan mana

www.setabasri.org

[1041] *ibid.,* h. 148.
[1042] *ibid*.
[1043] Leslie Palmier. Suharto's Indonesia. 1970. *Asian Affairs.* 1:3, pp. 275-284, p. 281.
[1044] G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin, eds. Jejak Langkah …1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968, *op. cit.,* h. 143.

Pertamina mengadakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan Independent Indonesia-America Petroleum Company (IIAPCO), JAPEX, FEFICAN, dan Kyusho Oil Company dari Jepang.[1045]

Untuk mendanai kegiatan ekonomi dalam negeri, Soeharto terlebih dahulu mengatur ulang Bank Sentral menggunakan UU No. 13/1968.[1046] Setelah bank sentral berhasil direstrukturisasi maka secara berturut-turut Soeharto melakukan reformasi atas bank-bank strategis milik negara seperti Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia.[1047]

Hingga tahun 1968 maka Indonesia di bawah kekuasaan Soeharto mulai mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk bidang kesehatan tercatat hingga bulan Oktober 1968, rasio jumlah dokter meningkat dari era sebelumnya yaitu 1 : 54.000 menjadi 1 : 30.000, termasuk jumlah paramedis. Pemerintah juga menyediakan 1 rumah sakit umum di setiap distrik atau kabupaten, 2 hingga 5 poliklinik di setiap sub distrik atau kecamatan, selain produksi obat dan penyediaan air bersih. Dalam hal produksi pangan khususnya beras, Soeharto menampakkan keberhasilan seperti tampak pada **Tabel 11** *Produksi Beras Pasca Keterlibatan Soeharto dalam Kekuasaan*.

www.setabasri.org

[1045] *ibid.*, h. 155.
[1046] UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Ini pelaksanaan dari TAP No. 33/MPRS/1966.
[1047] Lihat UU No. 17/1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946; UU No. 18/1968 tentang Bank Dagang Negara; UU No. 19/1968 tentang Bank Bumi Daya; UU No. 20/1968 tentang Bank Tabungan Negara; UU No. 21/1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, dan; UU No. 22/1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.

Tabel 11 Produksi Beras Pasca Keterlibatan Soeharto dalam Kekuasaan
Sumber Tabel : Guy J. Pauker, *The Indonesian Doctrine of Territorial Warfare and Territorial Management*. Santa Monica-California: The RAND Corporation, 1973., p. 133.

Tahun	Keterangan	Jumlah/Ton
1962	Ekspor dihentikan	-
1962	Surplus	150.928
1963	Minus	142.782 (efek 1962)
1964	Surplus	127.366
1965	Surplus	88.700
1966	Surplus	440.996
1967	Surplus	1.585.458
1968	Surplus	2.394.914

Salah satu pemicu munculnya prediktabilitas di sektor pangan adalah para teknokrat ekonomi Soeharto berhasil melakukan manajemen ulang atas program Bimbingan Massal (Bimas) dari masa sebelumnya.[1048] Tujuan langsung dari Bimas adalah peningkatan produksi beras dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu "ideologi" pertanian beras modern, pemberian kredit untuk membeli "paket" modal modern, dan bimbingan intensif.

Pada saat Soeharto mulai berkuasa, terjadi perubahan signifikan dalam program Bimas yaitu pada masalah pendanaan program dengan pengintegrasian antara Bimas dengan operasi Komando Logistik Nasional (Kolognas). Komando ini ditujukan untuk membeli dan mendistribusikan beras bagi kebutuhan sipil dan militer.[1049] Kolognas memperoleh pendanaan khusus dari anggaran negara, yang dari alokasi tersebut maka Kolognas mempergunakannya untuk pembelian beras. Namun, Kolognas menyisihkan 30% dana tersebut kepada Bimas untuk membiayai program-programnya. Kompensasi dari Bimas bagi Kolognas adalah

www.setabasri.org

[1048] Alexis Rieffel. The Bimas Program for Self-Sufficiency in Rice Production. 1969. *Indonesia.* Vol. 8 (Oct.) pp. 103-133., p. 133. Menurut Soedarsono Hadisapoetro pada tahun 1967, Bimas merupakan sistem perluasan pertanian yang direncanakan pada skala massal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara khusus dan masyarakat secara umum.
[1049] Alexis Rieffel. The Bimas …, *op.cit.*, p. 116-117.

peningkatan produksi beras nasional melalui program mereka.[1050] Dalam periode 1964/1965 hingga 1967/1968 program Bimas berhasil mengembangkan areal pertanian dari 11 ribu hektar menjadi 500 ribu hektar sawah.[1051] Bimas juga turut melibatkan sejumlah pihak yaitu pemerintah melalui koperasi, mahasiswa, dan petani yang pada gilirannya berhasil meningkatkan produksi pangan.[1052] Perkembangan program Bimas dapat diinterpretasikan sebagai indikasi positif kemampuan pemerintah Indonesia dalam menjalankan program-program Pembangunannya.[1053]

Donald Hindley menulis bahwa pada awal 1971, kepemimpinan Soeharto relatif sukses dalam lingkup ekonomi dan keberhasilan Soeharto membangun ekonomi Indonesia adalah "impresif."[1054] Kendati demikian masalah bukanlah tidak ada, karena pada tahun 1971 Indonesia sempat didera devaluasi rupiah sebagai respons atas inisiatif pemerintahan AS di bawah Richard M. Nixon serta membanjirnya karet AS ke pasar internasional akibat negara tersebut melepas stok mereka.

Pemerintah AS menilai Soeharto telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengatasi *chaos* ekonomi yang ia warisi dari Sukarno.[1055] Bagi AS, lingkaran inflasi berhasil diputuskan oleh Soeharto dengan fakta bahwa selama tahun 1969 harga-harga hanya naik sebesar 10% apabila diperbandingkan dengan

www.setabasri.org

[1050] *ibid.*, p. 117.
[1051] *ibid.,* p. 118.
[1052] *ibid.*, p. 132.
[1053] *ibid*.
[1054] Donald Hindley. Indonesia 1971: Pantjasila Democracy and the Second Parliamentary Elections. 1972. *Asian Survey.* Vol. 12, No. 1, A Survey of Asia in 1971: Part 1 (Jan.) pp. 56-68., p. 56
[1055] Central Intelligence Agency. *Indonesia Under Suharto: Economic Progress and Problems*. May 1970, pp. 1-13.

650% di tahun 1966, 120% di tahun 1967, dan 85% di tahun 1968. Inflasi ini berhasil diperkecil oleh Soeharto dengan cara meningkatkan kinerja moneter selama kurun 1966-1969, dengan mana lebih dari 900 juta dolar dana asing berhasil masuk ke Indonesia.

Soeharto duduk di puncak hirarki dan kedudukannya tersebut memicu munculnya prediktabilitas, bukan hanya bahwa ia mampu menundukkan aneka hirarki politik lain, melainkan juga kemampuannya mendistribusikan akses atas sumber daya kepada para pendukungnya. Mereka ini meliputi para menteri, birokrat senior, administrator pemerintahan dan para pimpinan perusahaan negara.[1056]

Secara resmi tim ekonomi Indonesia dikoordinasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tetapi secara informal mereka dikoordinasi oleh Alamsjah dan Soedjono Hoemardhani dengan menyediakan Kebijakan Ekonomi Baru yang diselaraskan dengan fundasi pembangunan hirarki politik yang hendak dibangun Soeharto.[1057] Bagi para teknokrat ini, Indonesia harus melakukan modernisasi di segala bidang. Konsep modern sendiri mereka operasionalisasikan sebagai "rasional-ilmiah, teknis, efisien, punya kalkulasi, *problem-solving,* realistis, dan tidak emosional."[1058] Sebagai anggota formasi koalisi Soeharto, mereka berhasil menutupi kekurangan penguasa Indonesia tersebut dalam hal popularitas politik, yaitu dengan memberinya kekuatan berupa prioritas Pembangunan ekonomi.[1059]

www.setabasri.org

[1056] Angus McIntyre. *The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005., p. 97.
[1057] John James MacDougall, The Tecnocratic …, *op. cit.,* p. 1167. Mereka adalah formasi koalisi baru Soeharto dalam menghadapi aneka hirarki lain yang mengelilinginya.
[1058] *ibid.,* p. 1169.
[1059] *ibid.,* p. 1170.

Akibat pengaruh lingkaran pemikir ini pula maka hampir di dalam setiap kesempatan Soeharto kerap menekankan aneka konsep baru yang kontras dengan Sukarno, di antaranya bahwa para rakyat-pekerja Indonesia harus bekerja keras, ulet, punya rasa tanggung jawab publik, berorientasi pekerjaan, berpikiran terbuka, percaya diri, berpikir rasional, dan disiplin.[1060] Dengan tercapainya stabilitas politik akibat berhasilnya dominasi Soeharto, maka gaji birokrat pun naik secara signifikan di tahun-tahun 1967, 1970, dan 1971, termasuk pemberian insentif bagi pejabat-pejabat tertentu.[1061]

Koalisi Soeharto dari tim ekonomi beranggapan bahwa segmen kelompok yang secara realistis mampu memberdayakan ekonomi Indonesia terdiri atas Soeharto dan loyalisnya, teknokrat ekonomi, dan pengusaha beretnis Cina.[1062] Para teknokrat ini memandang rendah para politisi partai yang menjadi anggota kabinet.[1063] Para teknokrat ekonomi Soeharto juga mengutarakan bahwa sikap politisi dan pimpinan partai dalam konteks ekonomi adalah irasional, tidak produktif, gagal bertindak atas dasar kepentingan publik, dan memiliki kekurangan dalam menyusun program praktis bagi Pembangunan ekonomi.[1064]

Pada bulan Maret 1967, Soeharto menugaskan salah satu *bonding*-nya yaitu Ali Moertopo untuk memulangkan Sumitro dari pengasingan dan akhirnya berhasil.[1065] Empat belas bulan setelah pertemuan pertama, Ali kemudian

www.setabasri.org

[1060] *ibid.*, p. 1176.
[1061] *ibid.*
[1062] *ibid.,* p. 1179.
[1063] John James MacDougall, The Tecnocratic …, *op. cit.,* p. 1179.
[1064] *ibid.*
[1065] *Tempo*, "Tugas Rahasia Sang Asisten Presiden" 20 Oktober 2013, h. 54. Dialog yang terjadi seperti diungkap Aloysius Sugiyanto: Sumitro saat itu tengah berada di Bangkok, Thailand, dan setelah bertemu dan mengobrol, Ali bertanya, "Apakah Pak Mitro bersedia kembali ke Tanah Air?" Setelah berpikir sejenak, Sumitro menyanggupi.

menugaskan asistennya yaitu Aloysius Sugiyanto, untuk menjemput Sumitro pulang ke Indonesia.[1066] Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1968 Soeharto mengangkat Sumitro menjadi Menteri Perdagangan. Keputusan itu diambil setelah sebelumnya Sumitro – ditemani Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani – datang menemui Soeharto di rumahnya.[1067]

Dengan demikian maka pengangkatan menteri yang cukup kontroversial oleh Soeharto adalah Sumitro Djojohadikusumo ini, dengan alasan bahwa ia membutuhkan individu kompeten guna membangun ekonomi Indonesia.[1068] Soeharto juga memberikan dukungan penuh atas Sumitro saat ekonom tersebut menjalankan pekerjaannya.[1069]

Kendati banyak belajar dari AS, cara pandang ekonomi Sumitro tetap berpijak di bumi Indonesia. Ia menciptakan sejumlah gagasan seputar peran pemerintah dalam Pembangunan ekonomi secara umum, dan secara khusus memanfaatkan perdagangan luar negeri sebagai instrumen kebijakan ekonomi.[1070] Dalam menerapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan penggunaan sumber daya pemerintah untuk mendorong Pembangunan ekonomi, Sumitro mendasarkan

www.setabasri.org

[1066] *ibid.,* h. 55. Operasi penjemputan Sumitro hanya diketahui Ali (dan asistennya) serta Soeharto. Di Jakarta, Sumitro terlebih dahulu disembunyikan selama 3 bulan agar tidak mudah ditemukan "orang-orang" Presiden Sukarno.
[1067] *ibid.*
[1068] John M. Allison. Indonesia: Year of the Pragmatists. 1969. *Asian Survey.* Vol. 9, No. 2, A Survey of Asia in 1968: Part II (Feb.), pp. 130-137, p. 131-132.
[1069] *ibid.,* p. 132.
[1070] Robert Rice, Sumitro's Role in Foreign Trade Policy. 1969. *Indonesia.* No. 8 (Oct.) pp. 183-211., p. 183.

diri pada kritiknya atas *comparative cost theory* dalam perdagangan internasional.[1071]

Teori tersebut bagi Sumitro memiliki empat kelemahan.[1072] Dengan demikian Sumitro tidak meyakini kompetisi penuh (pasar bebas) adalah pilihan cocok bagi Indonesia dalam perdagangan dunia. Bagi Sumitro, pemerintah harus mengambil peran aktif melalui kebijakan ekspor dan impor. Peran ini ditujukan guna meningkatkan posisi produk Indonesia di pasar dunia dan secara aktif mempromosikan produksi dalam negeri, termasuk perlindungan bagi aneka industri "lemah," dan bagi Sumitro pemerintah juga harus mengintervensi langsung produksi dan pemrosesan komoditas yang hendak dipasarkan ke pasar internasional.[1073]

Pembentukan Badan Tunggal Kopra juga aneka sindikat kopi yang semuanya diawasi oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan partisipasi pemerintah secara tidak langsung di aneka sektor perkebunan ini, sekaligus salah satu cara Sumitro menjamin keadilan dalam distribusi produk dan memastikan produsen, yaitu para petani Indonesia, menerima pendapatan yang cukup. Ia juga

www.setabasri.org

[1071] Bagi Sumitro, teori biaya komparatif tidak cocok bagi negara yang belum maju atau tengah berkembang karena sifat teori tersebut mengasumsikan kondisi statis perdagangan internasional. Padahal sebagai negara berkembang, Pembangunan Indonesia pasti akan bersifat dinamis.

[1072] Robert Rice, Sumitro's …, *op. cit.,* h. 184-185. Pertama, perdagangan internasional tidak dimaksudkan untuk dioperasionalisasikan di bawah kondisi kompetisi murni, melainkan dipengaruhi aneka elemen monopolistik dari negara-negara maju untuk mengendalikan negara berkembang. Kedua, teori tersebut tidak mampu menjelaskan kecenderungan kronis bagi harga-harga bahan mentah untuk secara relatif menurun bagi barang-barang industri. Ketiga, teori tersebut tidak mampu menjawab fakta bahwa akibat produktivitas dalam produksi primer adalah lebih rendah dan meningkat secara lambat ketimbang produksi industri, dan dengan demikian negara yang masih menyepesialisasikan diri dalam memperdagangkan bahan-bahan mentah berada dalam posisi lemah ketimbang posisi negara-negara industri. Keempat, kemanfaatan dari produktivitas yang meningkat di negara-negara industri tidak akan secara sukarela didistribusikan ke negara-negara berkembang.

[1073] Robert Rice. Sumitro's …, *op. cit.,* p. 185. Gagasan semacam ini adalah gagasan khas kaum sosialis demokrat yang mengambil jalan tengah antara peran negara dan peran pasar.

mendukung kebijakan pemerintah Soeharto yang menggunakan sektor impor sebagai sumber pendapatan pemerintah.

Sebagai catatan atas kinerja Sumitro dalam menjamin prediktabilitas ekonomi, bahwa terdapat dorongan untuk meningkatkan ekspor Indonesia yaitu berupa produk tradisional berupa kopra, kopi, tembakau dan karet yang tidak hanya mewakili program rehabilitasi jangka pendek tetapi juga termasuk investasi jangka panjang dalam penanaman kembali modal dan pembangunan pabrik pengolahan. Terbukti Sumitro berkeyakinan bahwa ekspor aneka produk ini akan menjadi penghasil devisa penting bagi Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Tentu saja faktor kunci dalam terciptanya prediktabilitas ekonomi Indonesia adalah dominasi Soeharto sendiri. Dalam masalah pilihan Pembangunan ekonomi Indonesia, William Liddle menulis

> "*… centers on the political choices of the key policy maker in the system, President Soeharto, in power from1966 to the present. It argues that Soeharto's Choices were voluntary or autonomous, not driven by some antecedent determinant*."[1074]
>
> "…berpusat pada pilihan politik pembuat kebijakan utama dalam sistem tersebut, yaitu Presiden Soeharto, yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga sekarang. Artikel ini berpendapat bahwa Pilihan Soeharto bersifat sukarela atau otonom, tidak didorong oleh beberapa determinan yang mendahuluinya."

Liddle mencoba untuk menganalisis tanggapan Soeharto terhadap krisis ekonomi pada tahun 1966 dengan fokus pada bagaimana pilihannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti krisis politik dan ekonomi, faktor ekonomi

[1074] R. William Liddle. The Relative Autonomy of the Third World Politican: Soeharto and Indonesia Economic Development in Comparative Perspective. 1991. *International Studies Quarterly.* Vol. 35, No. 4 (Dec.) pp. 403-427, p. 404.

www.setabasri.org

internasional, kuatnya persuasi para ekonom profesional (teknokrat ekonomi), kebutuhannya akan dukungan politik, dan budaya Indonesia yang cenderung memusuhi kapitalisme.

Seperti telah disampaikan pada Bab II, Soeharto memiliki aliansi dengan lingkaran pemikir sipil-militer di Seskoad dan dalam konteks pembahasan ini yang dimaksud adalah para pemikir sipil yang dikenal sebagai teknokrat ekonomi Soeharto seperti Sumitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Sadli, ataupun Saleh Afiff. Melalui medium Seskoad, para teknokrat ini banyak melakukan *sharing* informasi dengan para perwira, pejabat, dan politisi mengenai akan ke mana berakhirnya Pembangunan ekonomi Sukarno.

Para teknokrat tersebut mampu meyakinkan Soeharto akibat tiga sebab. Pertama, mereka adalah ekonom neoklasik sekaligus ekonom pembangunan yang terlatih secara baik. Mereka pun memiliki alat analisis yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia mengalami inflasi tak terkendali dan mengapa produktivitas ekonomi begitu rendah. Sebab-sebab inilah yang mendorong mereka mengambil kebijakan bantuan dan investasi asing.

Kedua, para ekonom tersebut adalah orang-orang nasionalis bukan para petualang intelektual terbaratkan, yang kerap mendekati permasalahan ekonomi Indonesia dengan pendekatan abstrak.[1075] Sebagai contoh, Widjojo Nitisastro dahulunya adalah seorang pejuang gerilya di Jawa Timur selama Revolusi

[1075] Untuk ekonom petualang ini dengan sangat baik dijelaskan John Perkins, *The Confession of the Economic Hitman: Pengakuan Seorang Ekonom Perusak*. Penerjemah Herman Tirtaatmadja dan Dwi Karyani. Cetakan 1. Jakarta: Abdi Tandur, 2005.

www.setabasri.org

Kemerdekaan.[1076] Usia Widjojo sekitar tiga tahun lebih muda dari Soeharto, dan lahir di Malang pada 23 September 1927.[1077] Sejak tahun 1966, Widjojo menjabat sebagai direktur Dewan Perencanaan Nasional sekaligus Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Soeharto.[1078] Selain Widjojo, teknokrat lain seperti Emil Salim ataupun Sadli mengalami masa dewasa di Indonesia selama fase gerakan nasionalis dan revolusi.[1079] Hal yang luput dari para pengkritik kebijakan Pembangunan Soeharto di awal Orde Baru adalah, para teknokrat ini rata-rata menerima konsep ekonomi campuran dengan mana peran negara harus dominan dalam perbankan, perusahaan negara yang produktif, dan pemasaran produk. Para teknokrat ini mewaspadai ketergantungan berlebihan atas bantuan dan investasi asing.[1080]

Ketiga, ternyata para teknokrat ekonomi tersebut adalah politisi yang baik. Aneka pernyataan publik yang mereka lontarkan membuktikan bahwa mereka memahami bagaimana harus memberikan penjelasan dan usulan yang mampu diterima, baik oleh kalangan nasionalis, populis, kolektivis dan bahkan kaum anti imperialis. Mereka juga mengidentifikasikan dirinya dengan tujuan utama budaya politik Indonesia modern yaitu kaum intelektual di dalam Kesatuan Aksi

www.setabasri.org

[1076] Widjojo juga pernah bergabung ke dala Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), ikut bertempur dalam Revolusi Fisik 1945-1949, menyaksikan kinerja rendah para penguasa Indonesia dalam memenuhi janji-janji revolusi mereka. Sumitro Djojohadikusumo menilai Widjojo sebagai "*not only first rate-intelligence but also leadership skills, tenacity, and an ease with rural life.*" Lihat Sony Karsono, Indonesia's New Order, 1966-1998: Its Social and Intellectual Origins. *Doctoral Dissertation.* The Faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University, August, 2013, p. 326.

[1077] *ibid.,* p. 322-324. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dari keluarga guru berkecenderungan politik nasionalis. Bersama ketujuh saudaranya, Widjojo menolak untuk bekerja sama dengan Belanda untuk kemudian malah memilih untuk mengajar di Taman Siswa. Cara berpikir Widjojo sekurangnya dipengaruhi visi Sjahrir seputar demokrasi sosial yang ia serap melalui mentornya yaitu Sumitro Djojohadikusumo.

[1078] Bruce Glassburner. Widjojo Nitisastro on Population Trends in Indonesia. 1970. *Indonesia.* Vol. 10 (Oct.) pp. 183-189., p. 183.

[1079] R. William Liddle. The Relative …, *op. cit.,* p. 408.

[1080] *ibid.*

Mahasiswa Indonesia (KAMI) sejak tahun 1966. Hal yang belum begitu populer dipahami publik adalah ternyata Widjojo Nitisastro memiliki pemahaman intuitif seputar apa yang Soeharto kehendaki dari para penasihat ekonominya. Inilah yang membuat Soeharto begitu mempercayai Widjojo hingga bertahun-tahun kemudian.[1081]

Dapat dikatakan bahwa koalisi antara Soeharto dengan para teknokrat ekonomi yang memiliki kecenderungan nasionalistis itulah yang mendorong koherennya Pembangunan ekonomi Indonesia sejak 1966 hingga 1971. Para teknokrat ekonomi Soeharto seluruhnya adalah orang Indonesia asli dan sekaligus mereka berpendirian nasionalis kendati dididik di Universitas Berkeley dan universitas lain di AS.[1082] Para teknokrat ini juga sangat dipengaruhi oleh warisan kebudayaan dari bangsa asal mereka sendiri.[1083]

Soeharto hendak membuktikan kepada para penantang hirarkinya bahwa ia tidak sekadar membangun kekuasaan dengan rakyat diposisikan sebagai penonton. Melalui program-program ekonomi dan kesejahteraannya, Soeharto hendak memperlihatkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menciptakan prediktabilitas bagi spesies atau rakyat banyak. Kecuali Adam Malik (Murba) dan Sumitro Djojohadikusumo (PSI), maka rata-rata anggota Kabinet Pembangunan Soeharto berasal dari militer atau non partai politik.

www.setabasri.org

[1081] *ibid*. p. 408-409.
[1082] Political Economy and the Soeharto Regime. 1978. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 14 No. 3, pp. 24-50, p. 28.
[1083] Sebagai misal Emil Salim dekat hubungannya dengan Hatta dan Hatta sendiri pemikiran ekonominya nasionalis bukan liberalis.

Melalui program Pembangunan Soeharto, investasi asing mulai banyak yang masuk ke Indonesia sehingga pada gilirannya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi investasi berlangsung. Melalui koalisi sipil-militernya di Seskoad, maka akses rakyat Indonesia atas sumber daya bernilai seperti makanan dan pakaian mulai terjamin prediktabilitasnya. Soeharto memindahkan potensi konflik ideologis Demokrasi Terpimpin ke arah kohesi masyarakat yang diikat mekanisme *inclusive fitness* seperti Supersemar, Pancasila, Dwifungsi ABRI, dan Pembangunan ekonomi.

Secara garis besar, Bab IV disertasi ini hendak menunjukkan bahwa di dalam menghadapi rivalitas dalam hirarki *dyadic,* Soeharto menggunakan kekuatan yang mungkin ia pergunakan, baik itu *bonding*nya sendiri atau kalangan luar *bonding* dengan catatan mereka mau mendukung kampanye Soeharto dalam mengeliminasi PKI maupun dalam menghadapi dualisme kepemimpinan nasional. Soeharto juga mencermati bahwa formasi koalisi yang dahulu membantunya di dalam hirarki *dyadic* kemudian pecah. Soeharto secara taktis mencari mitra koalisi baru guna mengatasi munculnya aneka hirarki baru yang tumbuh dengan masing-masing memiliki individu dominannya. Kendati terus menekankan tindakannya dalam menghadapi hirarki kompleks pada aspek konstitusional, tetapi Soeharto sebagai individu yang tengah berada dalam fase *survival of the fittest* tidak segan-segan melepas naluri kekuasaan menghadapi penantang yang ia anggap membahayakan kekuasaannya.

Soeharto sangat memahami bahwa individu maupun kelompok cenderung memiliki keinginan untuk bekerja sama yang secara Biopolitik disebut sebagai

www.setabasri.org

mekanisme *inclusive fitness.* Sebab itu ia kemudian mengedepankan Trilogi Pembangunan sebagai titik temu bagi para kawan dan lawan yang ingin bekerja sama dengan dirinya (mekanisme *inclusive fitness*). Para lawan Soeharto di dalam hirarki kompleks pun akhirnya mengakui bahwa apabila mereka ingin bekerja sama dengan Soeharto maka konsep yang prasyaratkan yaitu Trilogi Pembangunan harus diterima. Dengan mekanisme *inclusive fitness* Soeharto kemudian beranjak pada upaya penciptaan *political obedience* yang paling jelas terlihat dalam proses Pemilu 1971. Kesungguhan Soeharto menempuh aneka cara, baik legal maupun ilegal melalui para *bonding*nya memberi gambaran betapa serius Soeharto dalam upaya menciptakan kepatuhan politik. Kepatuhan politik ini pada akhirnya diproyeksikan Soeharto untuk menjamin kehadiran prediktabilitas bagi Indonesia.

www.setabasri.org

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Otoritarianisme yang dikembangkan Soeharto bersifat pilihan otomatis (*default option*) dan menyebabkan negara terhindar dari anarki akibat terjadinya persaingan terus-menerus antar kekuatan politik seperti masa Sukarno. Jika yang dikehendaki adalah Kediktatoran Militer maka potensinya untuk hadir di Indonesia cukup kecil mengingat adanya dua kondisi. Pertama, TNI-AD yang telah banyak berperan sejak era darurat negara dan banyak menduduki posisi sipil kurang populer karena fenomena korupsi yang ditunjukkannya. Kedua, tidak mudah bagi TNI-AD untuk memobilisasi kekuasaan koersif yang mencukupi bagi terciptanya kediktatoran. Dengan demikian jalan yang ditempuh oleh Soeharto untuk menciptakan prediktabilitas adalah memosisikan dirinya untuk berada baik di atas kelompok militer maupun partai-partai politik.

Jika sejumlah penelitian lain cenderung menganggap Otoritarianisme yang dikembangkan Soeharto 1965-1971 dari aspek ekses atau dampak negatif, disertasi ini menganggap bahwa Otoritarianisme yang dikembangkan Soeharto justru efektif dalam melakukan transisi politik penuh pergolakan dari akhir kekuasaan Sukarno menuju kepemimpinan baru politik nasional. Disertasi ini juga menganggap bahwa apabila yang dikembangkan oleh Soeharto di dalam periode penelitian adalah Demokrasi, maka kondisi pergolakan politik akan terus terjadi mengingat masih kuatnya politik aliran dari setiap kekuatan politik yang ada pada saat itu. Salah satu faktor kunci Soeharto dalam keberhasilannya menciptakan

www.setabasri.org

Otoritarianisme adalah reproduksi kekuasaan yang ia lakukan di tubuh angkatan bersenjata dan Sekber Golkar. Hal ini selain kemampuannya menundukkan aneka individu dominan kekuatan politik Islam dari Masyumi lama seperti M. Natsir, Prawoto Mangkusasmito, dan M. Roem dengan memaksa mereka untuk tidak memiliki peran politik signifikan dalam Parmusi. Hal ini ditambah kemampuannya menempatkan Hadisubeno sebagai individu dominan di PNI ketimbang Hardi yang lebih modernis dan cenderung tidak menyukai keterlibatan militer dalam politik.

Disertasi ini menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana Soeharto membangun kekuasaan antara 1965 hingga 1968 dikaitkan dengan konsep bonding, formasi koalisi, dan hirarki dyadic. Kedua, bagaimana upaya Soeharto melakukan dominasi politik nasional dikaitkan dengan konsep reproduksi kekuasaan dalam hirarki kompleks, dan mekanisme inclusive fitness. Ketiga, mengapa dominasi asimetris Soeharto atas aneka hirarki politik yang ada memungkinkannya menciptakan political obedience yang memungkinkan Pemilu 1971 dapat mendukung kekuasaannya untuk menjamin prediktabilitas spesies.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, peneliti telah mengajukan proposisi yang menyatakan bahwa sejak 1965 hingga 1968, Soeharto mendominasi Sukarno menggunakan para *bonding* dan formasi koalisinya guna mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional dalam hirarki *dyadic*, yang sebelum memperoleh submisi Sukarno dan pendukungnya, Soeharto terlebih dahulu mendominasi PKI dan organisasi afiliasinya. Proposisi ini belum terlalu tepat di dalam upaya menjawab pertanyaan pertama sehingga harus diberikan sejumlah catatan yang lebih rinci.

www.setabasri.org

Pertama, dualisme kepemimpinan nasional tidak segera berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 1965 antara Sukarno dan Soeharto. Setelah meletusnya G30S/PKI masalah utama yang dihadapi Soeharto adalah kepemimpinan di tubuh TNI-AD. Masih terdapat saingan seperti Jenderal A.H. Nasution yang berpangkat lebih tinggi dan punya pengalaman. Selain itu, Sukarno masih mampu melakukan intervensi terhadap TNI-AD, misalnya menunjuk Pranoto Reksosamudro sebagai *caretaker* Yani kendati kemudian ditolak oleh Soeharto. Dengan demikian maka hirarki *dyadic* Sukarno-Soeharto belum segera tercipta pasca 1 Oktober 1965. Dualisme baru mulai muncul ke permukaan setelah terjadi gerakan massa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok aksi yang menuntut pembubaran PKI, dan setelah itu, melangkah pada upaya pengurangan wibawa Sukarno. Fakta yang paling menguatkan terjadinya dualisme kepemimpinan nasional adalah setelah Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Sukarno.

Bonding penting Soeharto dalam fase ini adalah Yoga Sugama, Ali Moertopo, juga Sudjono Hoemardhani. Yoga Sugama adalah *bonding* dengan kompetensi khusus di masalah intelijen, dan bahkan menjadi bawahan Soeharto pertama yang berani menyimpulkan bahwa Gerakan 30 September melibatkan para pimpinan PKI. Pemahaman Yoga akan konfigurasi orientasi politik perwira, ditambah pula analisis-analisisnya atas infiltrasi Biro Chusus atas para perwira menengah dan tinggi, memberikan gambaran umum kepada Soeharto untuk kemudian mudah memutuskan tindakan pasca G30S/PKI.

Selain Yoga, Ali Moertopo yang cukup mahir dalam memahami gerakan-gerakan politik sipil sangat membantu Soeharto dalam melakukan pemantauan

www.setabasri.org

atas reaksi publik atas PKI maupun atas Sukarno. Ali mampu masuk melakukan penetrasi politik kepada para tokoh kekuatan massa radikal saat itu yang mulai mempermasalahkan kepemimpinan Sukarno seperti lingkaran Pater Beek maupun politisi radikal dari NU yaitu Subchan Zaenuri Ershan, juga tentunya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Pemetaan-pemetaan yang dilakukan Ali Moertopo kemudian sangat membantu Soeharto dalam memutuskan dengan kelompok sipil mana ia harus berkoalisi dan siapa lawan-lawannya. Sementara peran Sudjono Hoemardhani, selain kesamaan keyakinan religius dengan dirinya, juga menyediakan pendanaan yang perlu bagi pergerakan pasukan-pasukan Soeharto maupun memfasilitasi kelompok-kelompok demonstran sipil.

Saat melakukan eliminasi atas PKI, Soeharto melakukannya bukan tanpa hambatan. Segera setelah partai tersebut dinyatakan terlarang oleh Soeharto yang berposisi sebagai pengemban Supersemar, PKI mengubah pola gerakan mereka menjadi bawah tanah. Setelah D.N. Aidit berikut Dewan Harian Politbiro lainnya berhasil ditumpas, segera muncul kepemimpinan baru PKI seperti faksi Rewang-Ruslan Wijayasastra yang menekankan perjuangan bersenjata di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu PKI pun membentuk aneka organ baru guna mengadaptasi struktur partai sesuai kondisi represif akibat tekanan-tekanan militer Soeharto. Selain itu, sekurangnya hingga tahun 1966 Sudisman sendiri selaku Dewan Harian Politbiro berhasil menerapkan strategi politik baru bagi PKI di “bawah tanah” guna mempersiapkan diri bagi terbukanya kesempatan kebangkitan ulang partai. Selama Soeharto tengah melakukan reproduksi kekuasaan PKI pun terus bergerak, misalnya dengan mengadakan aneka serangan

www.setabasri.org

sporadis, baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, guna membuktikan bahwa eksistensi partai mereka masih merupakan kenyataan.

Kedua, muncul kenyataan bahwa Soeharto tidak pernah secara langsung memosisikan dirinya secara diametral dengan Sukarno untuk merebut kekuasaan, terkecuali di dalam masalah eksistensi PKI. Soeharto sendiri cenderung masih menerima kepemimpinan Sukarno. Dualisme kepemimpinan tidak dimunculkan oleh Soeharto secara pribadi, melainkan sebagai dampak sikap aneka kelompok aksi sipil juga kelompok perwira yang masuk kategori faksi radikal semisal Sarwo Edhie, Kemal Idris, maupun H.R. Dharsono. *Bonding* Soeharto tentu melihat kesempatan politik ini untuk kemudian masuk ke dalam pusaran wacana pergantian kepemimpinan nasional dari tangan Sukarno. Dapat diibaratkan bahwa Soeharto seperti pemain selancar air yang tentu tidak akan dapat melakukan manuver jika posisi gelombang laut tidak terlampau tinggi.

Disertasi ini berpendapat bahwa sikap moderat Soeharto atas Sukarno dipicu adanya kenyataan bahwa pada saat itu sikap kelompok militer belum padu dalam memandang posisi politik Sukarno. Sekurangnya terdapat tiga faksi militer dalam hal ini, yaitu faksi *status quo ante*, faksi moderat, dan faksi radikal. Faksi pertama terdiri atas para perwira yang terhitung Sukarnois kendati mereka cenderung menyatakan bahwa PKI merupakan sumber masalah. Panglima Angkatan Kepolisian Sutjipto Judodihardjo, Panglima Angkatan Laut R. Muljadi, serta komandan KKO (pasukan elit TNI-AL) Hartono adalah termasuk faksi ini. Selain itu juga dapat disebutkan mereka yang termasuk ke dalam faksi pertama ini adalah para perwira TNI-AD seperti Ibrahim Adjie, Mursyid, juga para perwira di

www.setabasri.org

Keluarga Besar Brawijaya pimpinan Sunarijadi yang menandatangani dukungan atas Sukarno tahun 1967.

Faksi moderat menganggap Sukarno sendiri sesungguhnya tidak perlu turun dari jabatan presiden, asalkan ia mau membubarkan PKI dan memodernisasi tata caranya dalam berkuasa, misalnya dengan menegakkan aturan konstitusional bernegara sesuai yang termaktub dalam UUD 1945. Faksi ini identik dengan faksi Diponegoro-Brawijaya, dengan mana Soeharto sendiri masuk ke dalamnya. Selain itu, Nasution sendiri pun termasuk ke dalam faksi yang tidak berkeberatan Sukarno untuk terus memerintah ini, kendatipun dalam perkembangan politik kemudian, Nasution agak menggeser posisinya sesuai perkembangan politik yang ada, demikian pula Soeharto.

Faksi radikal adalah faksi yang paling progresif di dalam mempromosikan perubahan kepemimpinan nasional, selain bersikap tegas dalam masalah PKI dan komunisme. Faksi ini terutama direpresentasikan oleh Divisi Siliwangi, dengan tokoh-tokoh mereka seperti Ishak Djuarsa, H.R. Dharsono, Kemal Idris, A.J. Witono, selain juga komandan kesatuan elit RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo. Faksi ini yang paling erat menjalin kerja sama dengan para demonstran mahasiswa dalam menuntut pembubaran PKI dan pelengseran Sukarno.

Dalam konteks adanya ketiga faksi militer dalam menyikapi Sukarno, Soeharto mengambil sikap hati-hati. Ia cenderung mengamati irama politik dan kecenderungan-kecenderungan opini publik sebelum mengambil sikap. Namun, Soeharto juga secara terselubung memanfaatkan sikap kelompok para perwira di

www.setabasri.org

satuan-satuan ini atas Sukarno. Dalam konteks menghadapi Sukarno maka dapat dijelaskan bahwa posisi orisinal Soeharto adalah memanfaatkan seluruh kecenderungan yang ada untuk kemudian memutuskan posisi seperti apa yang paling menguntungkan bagi dirinya. Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa Soeharto berposisi sebagai pihak oportunis dalam konteks peralihan kepemimpinan nasional saat itu.

Hal yang paling jelas dalam sikap politik Soeharto adalah posisi politik yang menentang bangkitnya kekuatan politik Islam. Hal ini berkaitan dengan unsur *nature* yang bersifat primordial dari Soeharto yang dapat dikategorikan sebagai Islam abangan ditambah ia pun seorang penganut Kejawen yang cukup baik. Secara *nurture* Soeharto berada dalam lingkaran Tradisionalis Jawa yang menganggap Islam, baik yang beraliran modern juga tradisional, sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup tradisi Jawa yang merupakan bagian unsur primordialnya.

Ketiga, apabila hendak ditegaskan seputar masalah dualisme kepemimpinan, sesungguhnya hal tersebut baru secara resmi mengemuka sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Kehadiran surat tersebut tentu tidak berlangsung di ruang vakum, melainkan akibat pergerakan dinamis politik sehari-hari pasca G30S/PKI. Terbitnya surat perintah tersebut juga diawali serangkaian peristiwa diskusi antara Sukarno dengan sejumlah panglima angkatan perang, Sukarno dengan M. Jusuf, dan Sukarno dengan Soeharto sendiri, untuk kemudian diakhiri oleh diberikannya Surat Perintah tersebut kepada M. Jusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Machmud di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Dalam

www.setabasri.org

aneka diskusi tersebut tidak terdapat klausul untuk secara diametral memperhadapkan Soeharto dengan Sukarno. Pertarungan kekuasaan dalam hirarki *dyadic* hanya terjadi setelah Surat Perintah 11 Maret 1966 dimanfaatkan baik oleh Soeharto, para *bonding*nya, juga anggota formasi koalisinya yang hendak menjadikan surat perintah sebagai dalih untuk melakukan perubahan politik secara lebih besar.

Keempat, proposisi ini juga dilingkupi suatu konteks pandangan yang diajukan oleh para perwira TNI-AD, terutama perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok kesatuan tentara yang tergabung dalam kelompok Diponegoro-Brawijaya dan Siliwangi-Kostrad-RPKAD, terhadap Sukarno. Perwira Diponegoro-Brawijaya setidaknya masih dapat menerima peran Sukarno (kendati tidak seluruh kebijakannya), sementara perwira Siliwangi-Kostrad-RPKAD cenderung menganggap Sukarno sebagai penghambat proses modernisasi Indonesia. Dalam dua spektrum ini, maka posisi Soeharto cenderung berada di tengah (moderat), dengan kecenderungan lebih dekat pada faksi Diponegoro-Brawijaya. Kendati demikian, Soeharto secara naluriah melihat celah keuntungan bagi posisinya sendiri dalam konteks sikap umum kelompok Siliwangi-Kostrad-RPKAD yang berupaya melakukan penggusuran atas peran politik Sukarno.

Untuk menjawab pertanyaan kedua, peneliti telah mengajukan proposisi kedua yang menyatakan bahwa setelah Soeharto berhasil mendominasi Sukarno, maka sejak tahun 1968 hingga 1971 Soeharto terus mereproduksi kekuasaan untuk mendominasi hirarki kompleks melalui mekanisme *inclusive fitness* agar

www.setabasri.org

dominasinya selalu bersifat asimetris di hadapan aneka individu dominan dalam setiap hirarki, baik bekerja sama dengan para *bonding*-nya maupun formasi koalisi baru yang terdiri atas lingkaran Soeharto Sentris, lingkaran sipil-militer di Seskoad, dan lingkaran Pater Beek. Sama halnya dengan proposisi pertama, proposisi kedua ini pun perlu diberikan sejumlah penjelasan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

Pertama, perlu dinyatakan bahwa dominasi Soeharto atas Sukarno sebenarnya telah cenderung rampung sejak tahun 1967, manakala ia diangkat sebagai pejabat presiden. Namun, bagi Soeharto dan para *bonding*nya, posisi sebagai Pejabat Presiden bukan merupakan suatu posisi aman bagi signifikansi politik Soeharto sebagai eksekutif. Apabila dinamika politik di dalam MPRS berubah, dapat saja posisi ini sewaktu-waktu dicabut manakala terjadi arus balik politik di dalam MPRS. Hal ini diperkuat fakta terjadinya aliansi antara kekuatan politik Islam dengan Nasution untuk memberdayakan Badan Pekerja MPRS agar diberi kewenangan untuk menilai kinerja eksekutif. Implikasinya adalah bahwa dapat saja apabila MPRS menilai Soeharto tidak berhasil dalam menjalankan aneka TAP MPRS, maka secara politik jabatan selaku "pejabat presiden" menjadi dicabut dan dialihkan kepada pihak lain. Kekhawatiran ini sesuai kenyataan bahwa Soeharto sendiri masih dipandang sebagai seorang perwira tinggi yang berstatus minor.

Oleh karena itu Soeharto fokus untuk melakukan reproduksi kekuasaan yang antaranya dengan bantuan para *bonding*-nya, guna meningkatkan status dari Pejabat Presiden menjadi Presiden pada tahun 1968. Selain itu para *bonding*

www.setabasri.org

Soeharto di MPRS pun melakukan penghambatan atas isu pembangkitan kembali Piagam Jakarta yang mungkin dikhawatirkan akan menarik dukungan publik Islam, terutama di luar Jawa dan para konstituen Masyumi.

Reproduksi kekuasaan adalah penting untuk dilakukan Soeharto mengingat formasi koalisi sebelumnya, yaitu tatkala membubarkan PKI, telah pecah sehingga memunculkan hirarki baru yang tersebar dan mulai mempersiapkan diri guna memenangkan Pemilu seperti telah diagendakan. Soeharto perlu memastikan agar dominasi antara hirarkinya dengan hirarki lain selalu bersifat asimetris, dengan terus melakukan proses akumulasi kekuasaan ke dalam jabatan personalnya. Hal ini terutama dilakukan dengan mereorganisasi angkatan bersenjata, sebagai basis kekuatan utamanya, dengan secara tegas memosisikan dirinya di pucuk komando. Hal lain yang dilakukan adalah menempatkan para perwira *bonding* dan lingkaran Soeharto sentris di posisi-posisi penting. Soeharto juga secara resmi meninggalkan kekuatan politik Islam untuk kemudian menjalin koalisi dengan lingkaran Pater Beek, suatu lingkaran yang secara kuantitas kecil, tetapi militan di dalam membendung arus politik Islam. Lingkaran Pater Beek ini banyak digunakan oleh Soeharto untuk melakukan pemberdayaan atas Sekber Golkar dan melakukan operasi politik di dalam DPR-GR maupun MPRS. Sementara itu *road map* politik Soeharto dalam rangka memimpin Indonesia dan bersifat strategis tidak ia ciptakan baik oleh dirinya sendiri maupun para *bonding*nya, melainkan memanfaatkan hasil-hasil kajian intelektual di dalam lingkaran sipil-militer dalam Seskoad. Figur utama yang banyak memberi pengaruh strategis atas Soeharto adalah Suwarto. Suwarto banyak memanfaatkan

www.setabasri.org

aneka lembaga kajian di AS sebagai model bagi kurikulum dan indoktrinasi dalam Seskoad.

Masih dalam konteks reproduksi kekuasaannya, Soeharto mereorganisasi Angkatan Bersenjata secara menyeluruh, yaitu dengan menggunakan kompetensi Sumitro, seorang perwira lingkaran Soeharto sentris, sehingga komando keempat matra yang awalnya relatif otonom menjadi tersubordinasi kepada diri dan jabatannya. Soeharto menempatkan para *bonding*-nya di aneka posisi strategis yang kurang diperhatikan publik, tetapi mampu secara efektif mereproduksi kekuasaannya. Hal ini diantaranya ia lakukan dalam menggembosi Parmusi agar tidak jatuh ke dalam kendali tokoh-tokoh eks Masyumi. Selain itu *bonding* Soeharto juga merekayasa agar kepemimpinan PNI beralih dari faksi Ali Sastroamidjojo yang dinilai kiri dan Sukarnois ke faksi yang lebih kanan yaitu faksi Osa Maliki. Setelah Osa Maliki meninggal dunia, kembali *bonding* Soeharto bekerja untuk memastikan bekas rekan Soeharto yaitu Hadisubeno yang abangan-nasionalis serta berkecenderungan pragmatis mampu menduduki jabatan Ketua Umum PNI melawan Hardi yang dinilai lebih rasional dan kurang dapat menerima peran militer dalam politik sipil.

Khusus mengenai sikap Soeharto yang memperlihatkan kecenderungan alamiah adalah sikapnya atas tokoh PSI dan Masyumi. Jika para tokoh Islam modernis yang dahulu pernah menjadi pimpinan Masyumi dihambat kesempatannya untuk duduk di kepengurusan Parmusi, maka hal demikian tidak berlaku bagi PSI. Bahkan tokoh PSI yang terlibat dalam PRRI/Permesta seperti Sumitro Djojohadikusumo diangkat sebagai Menteri Perdagangan sejak tahun

www.setabasri.org

1968. Hal ini dapat terjadi mengingat PSI merupakan partai yang kecil jumlah anggotanya sehingga dianggap bukan ancaman bagi Soeharto dalam Pemilu yang direncakanan. Hal lainnya adalah latar belakang Sumitro Djojohadikusumo yang priyai-abangan secara alamiah memiliki basis primordial yang serupa dengan Soeharto (kendati bukan priyai-nya). Pada lain pihak para pimpinan Masyumi dikhawatirkan mampu membangkitkan massa Masyumi sehingga keberhasilan partai tersebut menjadi pemenang kedua Pemilu 1955 dikhawatirkan akan terulang pada Parmusi. Hal ini ditambah secara alamiah nilai-nilai para mantan pimpinan Masyumi yang Islam santri modernis tidak kompatibel dan kejawen-abangan yang menjadi nilai primordial Soeharto.

Kedua, hirarki-hirarki lain yang terbentuk akibat pecahnya formasi koalisi awal Soeharto perlu untuk terus bertahan hidup. Mereka harus menerima bahwa kepemimpinan eksekutif nasional kini telah berada di tangan Soeharto, sehingga apabila aneka hirarki lain ingin terus melakukan akses terhadap aneka sumber daya dan melakukan reproduksi kekuasaan, maka mereka harus beradaptasi dengan politik kekuasaan Soeharto. Soeharto mengupayakan agar para pihak yang berpotensi melawannya untuk menerapkan mekanisme *inclusive fitness* yang berpilar kepada empat komponen yaitu Supersemar, Pancasila, Dwifungsi ABRI, dan Pembangunan. Keempat komponen ini adalah syarat dari Soeharto bagi aneka hirarki lain untuk mau bekerja sama apabila hendak terus bertahan hidup. Mekanisme *inclusive fitness* yang diterapkan aneka hirarki selain Soeharto justru membuat reproduksi kekuasaan Soeharto terus membesar sehingga dominasi asimetris berhasil dipastikan oleh Soeharto.

www.setabasri.org

Parmusi di bawah kepemimpinan Mintaredja dan John Naro merupakan contoh dari mereka yang menerapkan *inclusive fitness.* Soeharto pun memberikan *reward* berupa akses bagi mereka untuk memimpin Parmusi. Para individu lain seperti M. Natsir, M. Roem, serta elemen Masyumi lainnya yang tidak mau melakukan submisi kepada Soeharto otomatis tersingkir dari kekuasaan di dalam Parmusi. Hal serupa tetapi tidak sepenuhnya sama terjadi atas PNI. Soeharto cenderung memandang PNI sebagai mitra potensial guna menghadapi kebangkitan politik Islam, dan sebab itu Soeharto menekankan bahwa PNI perlu dipimpin oleh individu yang mau menerima dominasinya dengan persyaratan yang tidak sebanyak seperti ia ajukan atas Parmusi. Misalnya saja Soeharto tidak berkeberatan PNI melakukan kongres sebelum Pemilu dilangsungkan, hal mana tidak izinkan atas Parmusi. Tekanan Soeharto atas PNI hanyalah pada kepemimpinan partai yang tidak lagi berorientasi kiri dan tidak mempermasalahkan peran TNI-AD dalam politik nasional. Keduanya menurut Soeharto ditampakkan baik oleh Faksi Osa maupun Faksi Hadisubeno. Khusus bagi Hadisubeno, dukungan finansial diberikan kepadanya untuk operasional kegiatan partai.

Untuk menjawab pertanyaan ketiga, peneliti membangun proposisi bahwa setelah Soeharto berhasil menciptakan dominasi asimetris atas aneka hirarki politik yang ada, terciptalah *political obedience* yang memungkinkan Pemilu 1971 mampu memastikan dominasinya dalam politik nasional sehingga prediktabilitas bagi spesies dapat terjamin. Proposisi ini pun perlu untuk diberikan penjelasan praktisnya berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya.

www.setabasri.org

Pertama, dominasi asimetris Soeharto atas aneka hirarki politik yang ada berkaitan dengan proposisi kedua yaitu kemampuan Soeharto mereproduksi kekuasaan secara efektif, baik di kelompok sipil maupun militer. Dominasi asimetris menguntungkan posisi politik Soeharto karena ia dipicu oleh adanya mekanisme *inclusive fitness* yang inheren sebagai warisan proses evolusi. Setiap hirarki yang ada cenderung untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan oleh sebab itu mereka harus menerima bahwa *alpha male* baru yaitu Soeharto telah menjadi kenyataan politik.

Kedua, dengan berjalannya mekanisme *inclusive fitness*, Soeharto mampu menciptakan *political obedience.* Hal ini misalnya dilakukan Soeharto bahwa untuk menjamin Pancasila, Supersemar, Dwifungsi ABRI, dan Pembangunan maka Pemilu 1969 harus ditunda. Penundaan ini memungkinkan Soeharto agak leluasa dalam memberdayakan Sekber Golkar. Pemberdayaan Sekber Golkar dilakukan Soeharto melalui dua lini yaitu terbuka dan tertutup. Lini terbuka dilakukan Soeharto dengan mempekerjakan Amir Machmud guna mengonversi para anggota Parmusi, PNI, serta massa partai-partai politik lain agar terserap ke dalam Sekber Golkar. Amir Machmud membangun mesin penyelenggara Pemilu yang mampu memastikan kemenangan Sekber Golkar. Melalui Amir Machmud pula konsep kepatuhan politik menjadi nyata sehingga menjadi jembatan bagi monoloyalitas. Konstituen yang hendak mencari rasa aman dari trauma *political turmoil* masa lampau memilih Sekber Golkar dengan harapan situasi kehidupan akan lebih baik.

www.setabasri.org

Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan pemberdayaan atas Sekber Golkar terjadi aneka intimidasi dan paksaan yang sifatnya terorganisasi dan sistematis. Ekses-ekses ini dilakukan oleh koalisi sipil-militer pendukung Soeharto adalah khas unsur *innate* perilaku kekuasaan dalam kelompok. Kombinasi antara praktik intimidasi dan aturan-aturan Pemilu yang menguntungkan Sekber Golkar mendorong munculnya kepatuhan politik para pemilih. Kepatuhan ini kemudian mewujud dalam hasil Pemilu 1971 dengan mana Sekber Golkar memperoleh suara di atas 60%. Kepatuhan politik kemudian diyakini akan berpindah ke parlemen yang nantinya akan terisi oleh para legislator yang merupakan pendukung Soeharto. Hal ini merupakan modal yang sangat mencukupi bagi Soeharto untuk menciptakan prediktabilitas politik di tingkat nasional. Prediktabilitas politik ini mendorong Soeharto mampu mengamankan Kabinet Pembangunan yang sengaja ia rancang untuk melakukan Pembangunan ekonomi di Indonesia dari aneka gangguan politik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Soeharto, paling tidak secara teoretis, berhasil menciptakan prediktabilitas politik dan ekonomi melalui hasil Pemilu 1971.

www.setabasri.org

B. Implikasi Teori

Novelti atau kebaruan yang hendak dikemukakan dalam disertasi ini adalah bahwa di dalam mengembangkan kekuasaannya, Soeharto berbeda dengan Sukarno. Dalam cara pandang Biopolitik maka Soeharto cenderung menyerap (mengabsorpsi) aneka hirarki kompleks yang ada ke dalam hirarki kekuasaannya. Soeharto melakukan hal tersebut menggunakan kelihaiannya di dalam melakukan reproduksi kekuasaan baik terhadap kekuatan politik nasionalis, kekuatan politik

Islam, maupun angkatan bersenjata. Sukarno pada lain pihak cenderung melakukan sentralisasi kekuasaan dengan mana fokusnya adalah mengalahkan kekuatan politik yang menentangnya secara frontal agar tunduk di bawah dominasinya, bukan dengan cara mengabsorpsi seperti dilakukan Soeharto. Kemampuan Soeharto mengabsorpsi aneka kekuatan politik lawan ke dalam hirarkinya merupakan modalitasnya dalam menciptakan *political obedience* dan secara lebih lanjut memungkinkan Pemilu 1971 dimenangkan oleh Sekber Golkar sebagai organisasi politik "tentara" yang mampu mengamankan dominasinya di parlemen, baik itu DPR (hingga tingkat I dan II) serta MPR.

Secara umum maka teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini ada tiga yaitu teori kekuasaan, teori Otoritarianisme, dan Biopolitik. Untuk teori kekuasaan dari Roskin, et. al., Dahl, Bottomore, serta elemen kekuasaan menurut Hoffman and Graham, peneliti cenderung menyatakan bahwa pendapat keempatnya secara mudah dapat diaplikasikan dalam perilaku kekuasaan yang ditunjukkan Soeharto.

Roskin, et. al., menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok bertindak melalui orang lain. Soeharto selain bertindak sendiri, tetapi lebih banyak mengaplikasikan kekuasaannya melalui orang lain yaitu para *bonding*nya. Kekuasaan dalam konteks politik bukanlah perilaku individual murni melainkan perilaku kelompok dan sebab itu kendati Soeharto merupakan personal yang paling bertanggung jawab atas kekuasaan yang ia jalankan, terdapat pula keterlibatan pihak lain (aliansi atau formasi koalisi) dari dirinya yang turut mengaplikasikan kekuasaan.

www.setabasri.org

Juga kekuasaan menurut pendapat Dahl menegaskan bahwa kehendak pemberi pengaruh tidak akan melulu dituruti oleh orang atau kelompok yang diberi pengaruh. Bagi Dahl selalu ada kemungkinan resistensi dari orang atau kelompok yang diberi pengaruh. Ini terjadi misalnya manakala Soeharto hendak membersihkan PKI. Kendati PKI kalah dalam persenjataan tetapi mereka tetap melakukan perlawanan atas upaya pembersihan yang dilakukan Soeharto seperti tampak dalam kasus perlawanan Faksi Rewang-Wijayasastra di Blitar. Perlawanan PKI juga dilakukan oleh sisa-sisa PKI di luar negeri di bawah tokohnya Jusuf Adjitorop, kendati perlawanan mereka tidak terlampau signifikan.

Teori kekuasaan Dahl juga berlaku dalam konteks Soeharto ketika menghadapi hirarki kompleks. Saat Soeharto menghendaki agar Parmusi tidak mengadakan kongres sebelum Pemilu dan tidak memasukkan para pimpinan Masyumi lama ke dalam organisasinya, ternyata Parmusi mengadakan perlawanan. Bentuk perlawanan tersebut adalah dengan mengadakan kongres sebelum Pemilu 1971 dan terpilihnya M. Roem, seorang tokoh Masyumi, yang tidak dikehendaki Soeharto. Dalam menghadapi hal yang demikian, teori dari Hoffman dan Graham pun berlaku, yaitu Soeharto menerapkan *constraint, force, subordination,* dan *dependence.* Keempat teori dari Hoffman dan Graham ini teraplikasikan dalam perilaku kekuasaan Soeharto dalam menghadapi perlawanan Parmusi, dan juga tentu saja berlaku saat digunakan untuk menjelaskan masalah penentuan kepemimpinan di tubuh PNI hingga akhirnya terpilih Hadisubeno, bekas mitra Soeharto di Semarang, sebagai Ketua Umum PNI.

www.setabasri.org

Selain itu, berkenaan dengan teori kekuasaan dari Bottomore, penulis juga sepakat dengan pendapat Bottomore bahwa kekuasaan yang digunakan Soeharto berkenaan dengan penentuan agenda pengambilan keputusan. Lingkup penjelasan dari Bottomore cocok untuk menjelaskan bagaimana Soeharto memiliki agenda sendiri dalam sidang-sidang MPRS, terutama dalam hal melakukan penundaan atas Pemilu 1969 menjadi 1971, serta bagaimana Soeharto dan kelompoknya hendak menghentikan agenda pembahasan Piagam Jakarta dalam sesi-sesi Sidang MPRS tahun 1968, sidang mana yang kemudian mengantarkan Soeharto sebagai presiden "penuh" Indonesia.

Mengenai teori kedua yang digunakan yaitu Otoritarianisme sebagai *default option* pemerintahan, maka peneliti memiliki sejumlah catatan. Pertama, teori Otoritarianisme hanya cocok digunakan manakala demokrasi tidak menjadi pilihan bagi aktor politik yang dominan. Dalam hal ini, Soeharto yang seorang militer dan tidak memiliki hubungan dekat dengan partai politik tentu saja tidak melihat demokrasi sebagai sebuah pilihan. Otoritarianisme dalam politik selaras dengan latar belakang Soeharto sebagai seorang yang berprofesi militer sejak masa awal dewasa hingga kurun 1965-1971. Soeharto memiliki kesamaan pandangan dengan Sukarno yang sebelumnya juga hendak mengubur partai-partai politik karena dianggap sebagai penyebab terjadinya instabilitas politik dalam pemerintahan.

Namun, Otoritarianisme sebagai *default option* pemerintahan akan sulit untuk dipergunakan di suatu masyarakat dengan mana partai politik terlembaga secara baik, tingkat pendidikan rata-rata masyarakat relatif tinggi, kelas menengah

www.setabasri.org

cukup besar, dan arus informasi banyak menerpa warga negara. Pada kurun 1965-1971 memang telah ada suara-suara agar pemerintah menerapkan demokrasi, terutama dari kalangan intelektual dan mahasiswa. Namun, jumlah mereka masih relatif kecil jika dibandingkan proporsi penduduk Indonesia saat itu. Selain itu, partai-partai politik tengah tenggelam dalam dominasi eksekutif sejak era Demokrasi Terpimpin. Pada masa-masa kemudian, kekuasaan Soeharto terus menghadapi protes dari kalangan kelas menengah (khususnya mahasiswa) misalnya gerakan mahasiswa 1974, gerakan mahasiswa 1978, gerakan mahasiswa era 1980-an melalu aneka kelompok studi, gerakan mahasiswa era 1990-an yang akhirnya menjadi salah satu penyebab tumbangnya Otoritarianisme Soeharto. Dengan demikian, teori Otoritarianisme sebagai *default option* pilihan pemerintahan dalam disertasi ini hanya berlaku terbatas, yaitu di dalam kurun waktu Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaan 1965-1971. Di luar kurun waktu tersebut Soeharto harus menghadapi tuntutan demokrasi yang semakin lama semakin besar hingga akhirnya ia terpaksa harus mundur dari posisi presiden pada tahun 1998 dan Otoritarianismenya kemudian runtuh.

Sebagai catatan pelengkap, maka Biopolitik Neo Darwinis yang digunakan di dalam disertasi ini berkisar pada studi etologi dan neurobiologi. Dalam studi etologi, Biopolitik mengambil inspirasi dari fenomena kehidupan kelompok yang berlaku di dunia hewan yang dianggap sejumlah karakteristiknya juga berlaku di dunia kelompok manusia, khususnya dalam bidang politik. Dalam studi neurobiologi lokus kajiannya adalah otak manusia selaku pengendali tindakan, terdiri atas sejumlah bagian yang memiliki fungsi tertentu. Terdapat unsur

www.setabasri.org

genotipe dan fenotipe yang menentukan kinerja otak juga struktur limbik yang memiliki fungsi mempertahankan kebutuhan dasar individu untuk hidup dan menghadapi masalah di depan mata.

Dalam studi etologi maka dibedakan dua konsep besar yaitu konsep alamiah (*nature*) dan budaya (*nurture*). Secara teoretis, dinyatakan bahwa perilaku politik manusia merupakan perpaduan antara aspek *nature* dan *nurture* tersebut. Dalam konteks perilaku kekuasaan Soeharto, kedua aspek tersebut menampakkan dirinya hampir secara berimbang. Dalam aspek *nature* Soeharto memperlihatkan sejumlah perilaku yang juga berlaku di dunia primata besar seperti *bonding,* hirarki sederhana dan kompleks, dominasi-submisi, mekanisme *inclusive fitness,* pembentukan formasi koalisi, dan pentingnya prediktabilitas bagi spesies.

Hal yang menjadi catatan penting dalam penggunaan aneka konsep yang bernuansa unsur *nature* dalam menganalisis perilaku kekuasaan Soeharto adalah terlampau sederhananya perspektif Biopolitik di dalam menjelaskan sejumlah perilaku *nature* seperti telah disebutkan. Perilaku *bonding* hanya dijelaskan oleh perspektif ini sebagai bentuk ikatan di dalam kelompok, baik berupa pencarian aliansi dan pembentukan koalisi. Dalam kasus kekuasaan Soeharto, *bonding* ternyata tidak sesederhana seperti yang diutarakan oleh teori. Memang, sejumlah tokoh seperti Ali Moertopo, Sudjono Hoemardhani, ataupun Yoga Sugama dapat dengan mudah dinyatakan sebagai *bonding* Soeharto. Namun, dalam menganalisis keberadaan sejumlah tokoh seperti Sumitro, Maraden Panggabean, Amir Machmud, ataupun M. Jusuf, teori yang disediakan oleh perspektif Biopolitik

www.setabasri.org

tidak memiliki kategorisasi yang jelas apakah mereka dapat dikategorikan sebagai *bonding* Soeharto atau bukan.

Mengingat *bonding* merupakan salah satu konsep penting di dalam unsur *nature* manusia seperti dinyatakan oleh Biopolitik ini, maka ia tidaklah lengkap. Seharusnya terdapat kategorisasi atas *bonding* itu sendiri misalnya seperti kategori semacam adanya *bonding* "inti/dalam" atau *bonding* "luar. " Ini mengingat kerja-kerja dari Ali Moertopo yang banyak berlingkup di dalam "keremangan" memiliki perbedaan dengan, sebagai misal, kerja-kerja yang dilakukan Amir Machmud ataupun Sumitro yang dilakukan secara lebih banyak terang-terangan. Dengan demikian, konsep *bonding* merupakan hal pertama yang harus dikritisi dari perspektif Biopolitik ini.

Konsep lainnya adalah hirarki, dengan mana Somit dan Peterson membedakan antara hirarki sederhana (*dyadic*) dan hirarki kompleks. Dalam konteks politik kekuasaan Soeharto, masalah hirarki sederhana dan kompleks ini agak sulit untuk digunakan. Penggunaan hirarki sederhana untuk menjelaskan rivalitas antara Sukarno versus Soeharto sesungguhnya tidak mencukupi mengingat posisi Sukarno dan Soeharto tidaklah individual melainkan kompleks juga. Sukarno memiliki *bonding* dan aneka institusi yang mendukungnya, dan demikian pula halnya Soeharto. Dengan demikian, dalam kehidupan manusia pada hakikatnya tidak ada yang dinamakan hirarki sederhana (*dyadic*) melainkan yang berlaku adalah hirarki kompleks. Hirarki sederhana mungkin lebih tepat untuk menganalisis fenomena "politik" di dalam kelompok primata besar non manusia seperti gorila, bonobo, ataupun simpanse.

www.setabasri.org

Namun, penyebutan hirarki kompleks dalam melukiskan bagaimana Soeharto berhadapan dengan aneka hirarki seperti TNI-AD, angkatan bersenjata, Parmusi, ataupun PNI pun sesungguhnya agak sulit. Apakah yang dibicarakan adalah penghadapan Soeharto sebagai individu dengan aneka individu lain di TNI-AD, angkatan bersenjata, Parmusi, ataupun PNI, ataukah penghadapan Soeharto dengan lembaga. Disertasi ini akhirnya menempuh cara yang paling mudah, yaitu terpaksa mencampuradukkan antara Soeharto selaku personal dan Soeharto selaku lembaga (misalnya selaku pengemban Supersemar, pejabat presiden, dan presiden) manakala berhadapan dengan hirarki-hirarki lain. Dengan demikian hal yang patut dinyatakan di sini adalah, baik konsep hirarki *dyadic* maupun hirarki kompleks masih harus dioperasionalisasikan lagi, tidak sekadar cukup dengan mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Somit dan Peterson.

Untuk konsep dominasi-submisi pun sesungguhnya perlu dikritisi. Kedua konsep ini sebenarnya memiliki satu penjelasan bukan dua yaitu dominasi dan submisi. Kedua konsep ini cenderung hanya mempermasalahkan siapa subyek dan obyek. Dinyatakan dominasi adalah bila A mendominasi B, dan sebaliknya dinyatakan submisi bila B menerima dominasi A atau B menyerah kepada A. Jika A melakukan dominasi maka dapat dipastikan B melakukan submisi. Sebab itu, peneliti memberikan catatan bahwa konsep yang tepat dan tidak membingungkan dalam memecahkan persoalan dominasi-submisi ini adalah fokus pada penggunaan konsep dominasi, karena sifatnya pasti melibatkan minimal dua pihak: Pernyataan dominasi oleh satu pihak secara otomatis mengandung konsep submisi oleh pihak lain. Somit dan Peterson telah menjelaskan konsep dominasi

www.setabasri.org

secara relatif jelas, tetapi tidak mengenai konsep submisi. Konsep submisi hanya dinyatakan sambil lalu tanpa memberikan penjelasan teoretis yang cukup atas konsep tersebut.

Konsep lain yang perlu dikritisi dari perspektif Biopolitik ini adalah mekanisme *inclusive fitness. Inclusive fitness* adalah kecenderungan suatu spesies untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan perkembangan lingkungannya. Secara Biologi, konsep ini tentunya memiliki penjelasan yang jauh lebih rumit. Namun, saat digunakan sebagai sebuah konsep untuk menjelaskan fenomena politik maka *inclusive fitness* sesungguhnya dapat disederhanakan menjadi "adaptasi." Dengan demikian, apabila aneka hirarki yang berhadapan dengan Soeharto ingin terus bertahan hidup, maka mereka harus "beradaptasi" dengan batasan-batasan yang telah dibuat oleh Soeharto yaitu Trilogi Pembangunan. Dalam menghadapi posisi Soeharto yang semakin menguat, semua hirarki lain yang masih ingin bertahan hidup harus "beradaptasi" dengan Trilogi Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Soeharto.

Konsep terakhir yang hendak dikritisi adalah prediktabilitas. Prediktabilitas yang digunakan oleh Somit dan Peterson sesungguhnya masih terlalu abstrak. Prediktabilitas ini apakah merupakan sebuah *das Zein* (sesuatu yang nyata terjadi) ataukah *das sollen* (sesuatu yang dikehendaki untuk terjadi). Pertanyaan yang bersifat filosofis ini harus diajukan mengingat prediktabilitas adalah muara dari deretan konsep yang disusun oleh Somit dan Peterson sejak dari *bonding* hingga *inclusive fitness.* Disertasi ini akhirnya memutuskan bahwa prediktabilitas dihadirkan dalam bentuk *das Zein* berupa aneka stabilitas politik dan keberhasilan

www.setabasri.org

pembangunan ekonomi yang dilakukan Soeharto. Namun, hal ini menyisakan satu pertanyaan lagi apakah memang hal-hal yang telah Soeharto capai tersebut merupakan suatu bentuk prediktabilitas ataukah masih berada dalam konteks dominasi-submisi mengingat saat prediktabilitas terjadi, tidak seluruh spesies atau kekuatan politik yang ada menyepakati pencapaian-pencapaian Soeharto sebagai bentuk final kondisi yang dapat diterima oleh seluruh spesies (pihak).

Kemudian masalah lain yang perlu dibahas adalah aspek *nurture.* Bahwa dari hasil analisis perilaku kekuasaan Soeharto, hal yang lebih mengemuka adalah aspek *nurture* ini, dengan mana Soeharto sebagian besar banyak menekankan pada "penciptaan aturan main" ketimbang melakukan pertarungan hidup dan mati. Dalam melakukan pembersihan atas PKI sebagai misal, Soeharto lebih banyak terlebih dahulu membujuk Sukarno untuk mengeluarkan "aturan main" berupa Supersemar baru kemudian Soeharto melakukan langkah-langkah tegas atas PKI dan para pendukungnya. Hal lain yang mengemuka adalah penghindaran Soeharto memanfaatkan unsur naluriah lainnya yaitu mekanisme *trade-off* saat ia didekati oleh Sukarno untuk berbagi kekuasaan. Soeharto ternyata lebih memilih MPRS sebagai pemutus sengketa dualisme kepemimpinan antara dirinya dengan Sukarno ketimbang melakukan pertemuan antar dua pribadi guna memutuskan hal tersebut. Kendati demikian, kecenderungan *trade-off* Soeharto bukannya tidak ada seperti ditunjukkan oleh kasus YPTE yang melibatkannya ataupun pembunuhan langsung yang dilakukan atas Dewan Harian Politbiro PKI seperti D.N. Aidit, Muhammad Haris Lukman, ataupun Njoto tanpa melalui persidangan, seperti

www.setabasri.org

sebaliknya dilakukan atas para pimpinan sayap militer G30S/PKI seperti Untung, Latief, Suyono, dan Mustafa Sjarief Supardjo.

Aspek *nurture* lain menyangkut perilaku kekuasaan Soeharto adalah penolakannya untuk mengundurkan Pemilu 1971 sebagaimana dinasihati oleh para *bonding*nya. Kendati Soeharto belum memiliki partai atau mesin politik yang efektif, tetapi ia lebih menghormati keputusan MPRS yang sebelumnya telah bersedia mengundur waktu Pemilu sebanyak satu kali yaitu dari 1968 menjadi 1971. Soeharto tidak lagi bersedia mengundurkan Pemilu 1971 kendati pun *bonding*nya sendiri menyarankan. Hal ini mencerminkan kuatnya dimensi *nurture* dalam perilaku kekuasaan Soeharto ketimbang aspek *nature* (mekanisme *trade-off,* pengunduran Pemilu).

Secara umum, teori-teori dalam Biopolitik cukup menarik untuk dipergunakan dalam menganalisis perilaku kekuasaan Soeharto. Teori ini menghadirkan cara pandang baru mengenai posisi individual Soeharto dalam kurun 1965-1971, posisi orang-orang dekat dalam lingkaran Soeharto, akan tetapi sedikit agak sulit apabila diterapkan dalam suatu kompleksitas kondisi seperti melingkupi Soeharto yang tengah berada dalam proses peralihan kekuasaan politik nasional, karena konsep-konsep yang ditawarkan masih harus dicarikan operasionalisasinya secara lebih lanjut lagi.

Dengan demikian, setelah menggunakan tiga teori dalam disertasi ini teori kekuasaan sepenuhnya dapat diterima karena secara relatif mudah dapat menjelaskan interaksi kekuasaan Soeharto dengan pihak lain, baik dengan *bonding* maupun dengan para penentangnya. Untuk teori Otoritarianisme juga

www.setabasri.org

dapat memenuhi kebutuhan guna menjelaskan apa keuntungan dari Soeharto melanjutkan Otoritarianisme Sukarno secara lebih efektif. Untuk teori Biopolitik perlu dikembangkan aneka sub konsep yang merupakan turunan dari serangkaian konsep seperti *bonding* agar mampu menjelaskan tipologi hubungan antar personal antara yang paling "dekat" hingga paling "jauh." Selain itu perlu pula dinyatakan bahwa konsep hirarki kompleks lebih cocok untuk digunakan dalam kelompok manusia mengingat kemampuan spesies ini dalam menyusun struktur-struktur rumit dalam kelompok, berbeda dengan primata besar lain yang tentu saja hanya terdiri atas hirarki sederhana: Satu *alpha male,* individu lainnya adalah penantang. Juga konsep lain yang membutuhkan operasional yang lebih ketat seperti mekanisme *inclusive fitness* dan prediktabilitas spesies.

C. Reflektif

Disertasi ini memandang bahwa Otoritarianisme yang mulai dikembangkan Soeharto pada kurun 1965-1971 sebagai sesuatu hal yang wajar mengingat konteks pada periode penelitian. Masa pasca 1965 Indonesia adalah masa di mana potensi anarki begitu besar, sehingga dibutuhkan tindakan politik yang efektif dan tegas untuk mencegah pergolakan politik yang ada berubah menjadi perang saudara. Di sinilah peran signifikan dari seorang Soeharto, yang pada satu sisi ia mencoba mendengarkan seluruh suara dari arus bawah yang tidak lagi menghendaki PKI, dan hingga batas tertentu Sukarno, untuk menjadi aktor politik dalam bernegara di Indonesia. Namun, pada sisi lain Soeharto pun tidak mengambil langkah drastis seperti pengadilan resmi ataupun penjara atas Sukarno.

www.setabasri.org

Soeharto merupakan aktor politik yang menjalankan aspek *nature* dan *nurture* secara relatif berimbang di dalam mereproduksi kekuasaannya. Soeharto dapat secara tegas meluluh-lantakkan PKI, tetapi tidak Sukarno. Jalan yang ditempuh oleh Soeharto, entah karena rasa percaya diri yang kurang atau memang sesuai dengan karakternya, adalah ketaatan pada aspek *nurture* berupa aturan konstitusional yang mengikat kehidupan kelompok yang dalam hal ini diposisikan oleh MPRS sebagai lembaga kedaulatan tertinggi negara saat Sukarno mulai dipertanyakan kekuasaannya.

Otoritarianisme yang dikembangkan Soeharto saat itu dapat saja diterima sebagai kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) karena Indonesia menghadapi keraguan antara melanjutkan Demokrasi Terpimpin atau kembali masuk ke dalam Demokrasi Liberal dengan partai-partai politik memegang peranan utama. Pilihan Soeharto adalah membentuk sistem politik yang sedikit banyak mencerminkan apa yang paling ia kenali yaitu kehidupan kemiliteran yang mengandalkan pada hirarki dan ketegasan komando. Hal ini membuat dapat saja dikemukakan pernyataan bahwa Soeharto sekadar menyempurnakan Otoritarianisme yang lebih dahulu dikembangkan oleh Sukarno.

Tentu saja Soeharto tidak dapat menyenangkan seluruh pihak. Mereka yang mendukung demokrasi substansial tentu akan kecewa saat ia tampak begitu *all-out* berpihak kepada Sekber Golkar untuk memenangkan Pemilu dengan aneka ekses seperti intimidasi dan kekerasan struktural yang dilakukan terhadap kontestan pesaing dalam Pemilu. Pilihan untuk memberdayakan Sekber Golkar adalah pilihan pribadi Soeharto sendiri, bukan pilihan para *bonding*nya. Namun,

www.setabasri.org

apabila hal tersebut dipahami sebagai upaya Soeharto memenuhi hak warga negara Indonesia yang sejak kemerdekaan belum lagi merasakan pembangunan ekonomi yang signifikan, tentu saja penekanan Soeharto atas penciptaan stabilitas parlemen dapat saja dipahami.

Berbeda dengan Sukarno yang berkuasa atas dasar perimbangan kekuasaan yang selalu bergeser, yaitu dengan membiarkan masing-masing kekuatan politik saling berkompetisi satu sama lain (TNI-AD dan PKI), maka Soeharto cenderung menyerap seluruh kekuatan yang bertentangan ke bawah kendalinya. Misalnya Parmusi yang cenderung independen apabila dikuasai oleh tokoh Masyumi lama, secara langsung ia intervensi dengan mendukung orang-orang yang mau menerima jalan politiknya. Demikian pula dengan PNI, dengan mana ia tegas berpihak pada sayap kanan PNI yang anti komunis di bawah Faksi Osa, atau kemudian setelah Osa wafat ia mengajukan Hadisubeno, pimpinan PNI yang sikap-sikap politiknya banyak berkesesuaian dengan dirinya, ketimbang Hardi. Kendati tidak secara khusus dibahas, tetapi dapat ditambahkan bahwa Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga berusaha dikendalikan oleh Soeharto dengan merekrut satu individu dominannya yaitu Sumitro Djojohadikusumo pada tahun 1968 sebagai menteri perdagangan kabinetnya, setelah melalui mekanisme *trade-off*. Hal serupa juga terjadi pada tubuh angkatan bersenjata yang di masa Sukarno cenderung otonom dalam keempat matranya, dengan reorganisasi yang Soeharto lakukan maka segala potensi otonomi dalam setiap matra angkatan bersenjata ia tundukkan dengan memosisikan dirinya selaku pusat komando tertinggi.

www.setabasri.org

Otoritarianisme yang ditempuh oleh Soeharto dalam kurun 1965-1971 adalah pilihan yang paling mungkin dalam menghadapi situasi *turmoil* Indonesia pasca Sukarno. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Indonesia masih relatif rendah, status ekonomi rata-rata penduduk Indonesia masih relatif rendah, dan kelas menengah yang berposisi sebagai agen demokratisasi kuantitasnya belum lagi besar. Wajar apabila Soeharto tidak memilih demokrasi untuk dikembangkan dalam kurun 1965-1971 karena apabila itu ia kembangkan, maka instabilitas politik tentu akan terus mendera Indonesia melalui perdebatan dalam parlemen yang panjang. Sebagai ilustrasi kecil, bahwa salah satu hal yang membuat Athena kalah perang dari Sparta adalah, pihak Athena karena demokrasi yang mereka anut menjadikan keputusan untuk membangun pasukan perang menjadi lamban akibat perdebatan. Ini berbeda dengan Sparta yang militeristis dengan mana keputusan dapat dibuat secara cepat. Demikian pula Soeharto, yang baginya masalah krusial Indonesia saat itu bukanlah demokrasi melainkan "perut" orang banyak. Bagi Soeharto pula, semakin banyak "perut lapar" mendorong komunisme mendapat potensi untuk hidup. Pada saat Soeharto mulai menapak pada kekuasaan, maka hal yang mendesak adalah pembangunan ekonomi, bukan pembangunan demokrasi.

Sebagai catatan terakhir, Otoritarianisme yang dikembangkan oleh Soeharto tentu saja bersifat temporer. Ia memang merupakan pilihan tepat dalam periode 1965-1971, tetapi jawaban berbeda tentu berlaku untuk masa setelahnya. Pembangunan ekonomi yang digenjot oleh Soeharto dengan bantuan para teknokrat ekonominya serta perlindungan kebulatan suara dari parlemen hanya

www.setabasri.org

berlaku manakala tingkat pendidikan mayoritas rakyat Indonesia masih rendah, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia juga rendah, serta kelas menengah masih relatif kecil. Manakala Soeharto berhasil melakukan pembangunan ekonomi sehingga kelas menengah yang lebih besar kemudian tumbuh, demikian pula kemakmuran memacu kesempatan semakin banyaknya kelas terdidik, maka Otoritarianisme yang ia kembangkan akan memperoleh tantangan besar. Namun, hal sebaliknya pun dapat pula terjadi, jika sekalipun ternyata demokrasi tumbuh di Indonesia tetapi apabila kemakmuran rakyat yang merata tidak juga tercipta, maka Otoritarianisme sebagai *default option* bukan tidak mungkin tetap akan menjadi pilihan bahkan di masa kini. Ini akibat Otoritarianisme merupakan jenis kekuasaan yang sesuai dengan unsur *nature* di dalam aspek genetik manusia.

Banyak pihak menyatakan bahwa sejak tahun 1980-an seharusnya Soeharto mulai mengembangkan demokrasi di Indonesia mengingat pada saat itu kelas menengah (utamanya mahasiswa) telah semakin melimpah dan melalui program listrik masuk desa, arus informasi semakin deras menerpa sebagian besar rakyat Indonesia. Manakala kelas menengah sudah semakin besar maka seharusnya Soeharto mulai membuka keran demokrasi secara bertahap, yang salah satunya mungkin dapat ia lakukan dengan cara melepas Golkar untuk tumbuh menjadi partai politik yang otonom sehingga mampu menjaring kepentingan rakyat secara lebih aktual, bukan artifisial mengikuti kehendak Soeharto sendiri.

Dengan demikian, Biopolitik lebih cocok untuk digunakan dalam melakukan kajian terhadap situasi-situasi peralihan rezim di suatu masyarakat yang secara pendidikan dan ekonomi masih dalam kondisi rendah. Sebab dalam

www.setabasri.org

kondisi demikian maka pilihan yang paling mungkin adalah Otoritarianisme bukan demokrasi. Demikian pula, perspektif Biopolitik yang digunakan dalam disertasi ini akan sulit apabila digunakan untuk menganalisis perpolitikan Indonesia sejak tahun 2000 hingga kini mengingat demokrasi telah berkembang sedemikian rupa di Indonesia sehingga sebuah kekuasaan yang bersifat Otoritarian akan sulit apabila hendak dijadikan sebagai satu pilihan kekuasaan negara. Namun, suatu pengecualian tetap saja bisa terjadi mengingat Otoritarianisme, bukan Demokrasi, yang sesuai dengan aspek *nature* perilaku manusia.

www.setabasri.org

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Mudhofir. "Soeharto dan Ideologi Orde Baru." Dalam Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto. Cetakan 1. Baskara T. Wardaya SJ, et.al. Yogyakarta: Galangpress, 2007.

Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. *Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. California: Sage Publications, Inc., 1989.

Anderson, Benedict R. O'G. "The Idea of Power in Javanese Culture" dalam *Culture and Politics in Indonesia*, Claire Holt, ed., Singapore: Equinox Publishing, 2007. pp. 1-69.

Blank, Robert H. and Samuel M. Hines, Jnr. *Biology and Political Science*. London and New York: Routledge, 2001.

Boland, B. J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.

Budiardjo, Miriam, ed. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984

Corning, Peter A.. "The Evolution of Politics: A Biological Approach" dalam *Handbook of Biology and Politics*, Steven A. Peterson and Albert Somit. Cheltenham & Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2017, pp. 55-84.

Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia.* Singapore: Equinox Publishing, 2007.

Dennen, Johan M.G. van der. "The Biopolitics of the Primates" dalam *Biology and Politics: The Cutting Edge,* Steven A. Peterson and Albert Somit, eds., Bingley: Emerald Group Publishing, 2011. pp. 53-96.

Departemen Penerangan, *Pemilihan Umum 1971: Undang-undang dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannja*. Tjetakan ke II. Djakarta: Pantjuran Tudjuh, 1970.

----------, G. dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 – 27 Maret 1968*. Cetakan 1. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991.

www.setabasri.org

----------,, G. dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968 – 23 Maret 1973.* Cetakan 1. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1991.

Easton, David. "The Relevance of Biopolitics to Political Theory" dalam *Biology and Politics*, Albert Somit. Mouton – The Hague – Paris: International Social Science Council, 1976.

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project, 2011.

Eibl-Eibesfeldt, Irenaus. *Human Ethology*. London and New Yok: Routledge, 2017.

Elson, R. E. *Suharto: Sebuah Biografi Politik.* Penerjemah: Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.

Fattah, Abdoel. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Cetakan 1. Yogyakarta: LkiS, 2005.

Feith, Herbert and Lance Castle, eds. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Itacha and London: Cornell University Press, 1970.

----------,, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1962.

Geert Arend van Klinken, The Making of Middle Indonesia: Middle Classes in Kupang Town, 1930s-1980s. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2014.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1960.

Harari, Yuval Noah. *Sapiens*. Penerjemah: Yanto Mustopha. Cetakan 1. Tangerang Selatan: Alvabet, 2017.

Harrison, Lisa., et.al., *Politics: The Key Concepts*. London and New York: Routledge, 2015.

Hefner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Cetakan I. Penerjemah Ahmad Baso. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan The Asia Foundation, 2001.

Hoffmann, John and Paul Graham. *Introduction to Political Theory*, 3rd Edition. London and New York: Routledge, 2015.

Hunter, Hellen-Louise. *Sukarno and the Indonesia Coup: The Untold Story*. London: Praeger Security International, 2007.

www.setabasri.org

Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. Yale: Yale University Press, 2006.

Jarot, Eros, et.al., *Siapa Sebenarnya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*. Cetakan I. Tangerang: Mediakita, 2006.

Jenkins, David. *Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesian Project, 1984.

Kahin, George McTurnan, "Mohammad Natsir" dalam *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Yusuf A. Puar, ed. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Antara, 1978. h. 330-335.

Kingsbury, Damien, *Power Politics and the Indonesian Military*. New York: RoutledgeCurzon, 2003.

Lina, Juri. *Under the Sign of Scorpio: The Rise and Fall of the Soviet Empire*. Stockholm: Referent Publishing, 2002.

Lemke, Thomas. *Biopolitics: An Advanced Introduction*. New York and London: New York University Press, 2011.

Lemm, Vanessa and Miguel Vatter. "Michel Foucault's Perspective on Biopolitics" dalam *Handbook of Biology and Politics*, Steven A. Peterson and Albert Somit. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2017. pp. 40-52.

Ludwig, Arnold M. *Kings of the Mountain: The Nature of Political Leadership*. Lexington: The University Press of Kentucky, 2002.

Madinier, Remy. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. Translated by Jeremy Desmond. Singapore: National University of Singapore, 2015.

Magstadt, Thomas M. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. 10th Edition. Belmont: Wadsworth, 2013.

Masters, Roger D. "Conclusion" dalam *Primate Politics* Glendon Schubert and Roger D. Masters, eds.. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1991.

----------,, Roger D. *The Nature of Politics*. New Haven and London: Yale University Press, 1989.

May, Brian. *The Indonesian Tragedy*. Singapore: Routledge, 1978.

McAuley, James. *An Introduction to Politics, State, and Society*. London, Thousand Oaks New Delhi: Sage Publications, 2001.

www.setabasri.org

McDonald, Hamish. *Suharto's Indonesia*. Victoria: Fontana Books, 1980.

McIntyre, Angus. *The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005.

Mietzner, Marcus. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press, 2006.

Nishihara, Masashi. *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*. Modern Indonesia Project. Ithaca: Cornell University, 1972.

Noer, Deliar. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990.

----------,, Deliar. *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*. Bandung: Mizan, 1980.

Notosusanto, Nugroho ed. *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABR*I. Cetakan 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Pauker, Guy J. *The Indonesian Doctrine of Territorial Warfare and Territorial Management*. Santa Monica-California: The RAND Corporation, 1963.

Perkins, John, *The Confession of the Economic Hitman: Pengakuan Seorang Ekonom Perusak*. Penerjemah Herman Tirtaatmadja dan Dwi Karyani. Cetakan 1. Jakarta: Abdi Tandur, 2005.

Peterson, Steven A. and Albert Somit, "What is Biopolitics" dalam *Handbook of Biology and Politics*, Steven A. Peterson and Albert Somit, eds. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007. pp. 3-17.

Railon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Penerjemah Nasir Tamara. Jakarta: LP3ES, 1985.

Reeve, David. *Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika*. Penerjemah: Gatot Triwira. Depok: Komunitas Bambu, 2013.

Retnowati, Endang. *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila*. Jakarta: LIPI Press, 2018.

Ricklefs, M.C. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang*. Cetakan 1. Penerjemah FX Dono Sunardi & Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2013.

www.setabasri.org

Robison, Richard. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerjemah Harsutejo. Depok: Komunitas Bambu, 2012.

Roeder, O.G. *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*. Second Revised Edition. Djakarta: Gunung Agung, 1970.

Roosa, John. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Penerjemah: Hersri Setiawan. Jakarta: ISSI & Hasta Mitra, 2008.

Rose, Mavis. *Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta.* Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1987.

Roskin, Michael G. et.al. *An Introduction to Political Science: An Introduction*. 12th Edition. Boston: Longman, 2012.

Rousseau, Jean-Jacques. *Discourse on Political Economy and The Social Contract.* Translated with an Introduction and Notes by: Christopher Betts. New York: Oxford University Press.

Said, Salim Haji. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Cetakan 1. Bandung: Mizan, 2016.

----------,, Salim. *Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian*. Cetakan 2. Bandung: Mizan, 2014.

----------,, Salim. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Schubert, Glendon, "Primatological Theory" dalam Glendon Schubert and Roger D. Masters, *Primate Politics*. Illinois: Southern Illionis University, 1991, pp. 21-56.

Sekertariat D.P.R. R.I., *Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat R.I. Hasil Pemilu 1971*. Jakarta: Sinar Hudaja Offset, tt.

Silalahi, Harry Tjan. *Konsensus Politik Nasional Orde Baru: Ortodoksi dan Aktualisasinya*. Jakarta: CSIS, 1990.

Sjamsuddin, Nazaruddin. *PNI dan Kepolitikannya 1963-1969.* Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Soedarmanta, J.B. *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi*. Cetakan 1. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2004.

Somit, Albert and Steven Peterson. *Evolution and Democracy: The Challenge*. Paper at the Conference on Evolutionary Theory and Political Science, European University Institute, Florence, Italy, June 4-5, 2010.

www.setabasri.org

----------,, Albert and Steven A. Peterson, "From Human Nature to Public Policy: Evolutionary Theory Challenges the "Standard Model" dalam *Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach*, Albert Somit and Steven A. Peterson. eds. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

----------,, Albert and Steven A. Peterson. *The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution*. New York – Hampshire: Palgrave MacMillan, 2005.

----------,, Albert. "Biology and Political Science" dalam *Encyclopedia of Political Science*, Thomas Kurian, ed. Washington: CQ Press, 2011. pp. 138-9.

----------,, Albert. "Introduction" dalam *Biology and Politics: Recent Explorations*, International Social Science Council. Mouton-The Hague-Paris: International Social Science Council, No. 19, 1976.

Steenbrink, Karel. *Catholic in Independent Indonesia, 1945-2010*. Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, 2015.

Subanar, G. Budi, SJ. *Oase Drijarkara: Tafsir Gerakan Masa Kini*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2013.

Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Cetakan 1. Penerjemah Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1986.

Syam, Firdaus. *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik*. Cetakan 1. Jakarta: Millennium Publisher, 2004.

Sukarno, eds., et.al., *Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2009.

Taher, Yoseph Tugio. *Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: Ultimus, 2010

Takwin, Bagus, Niniek L. Karim, dan Hamdi Muluk. *Soeharto Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liat: Sebuah Kajian terhadap Hubungan antara Faktor-faktor Kepribadian dan Tingkah Laku Politik Soeharto*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2001.

Taylor, Steven J.; Robert Bogdan and Marjorie DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. 4th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2016.

Tiger, Lionel and Robin Fox, *The Imperial Animal*. London and New York: Routledge, 2017.

Tilly, Charles. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

www.setabasri.org

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi.* Edisi Revisi. Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2017.

Tornquist, Olle. *Penghancuran PKI*. Penerjemah: Harsutejo. Depok: Komunitas Bambu, 2017.

Turner, Barry. *A. H. Nasution and Indonesia's Elites: 'People's Resistance in the War of Independence and Postwar Politics*. Lanham-Boulder-New York-London: Lexington Books, 2018.

Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Kumpulan Makalah: Issue 2*. Jakarta: Badan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991.

Vatikiotis, Michael R.J., *The Rise and Fall of the New Order*. Third Edition. London and New York: Routledge, 1998.

Waal, Franz de. *Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes*. Revised Edition. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1998.

----------,, Franz de. *Peacemaking among Primates*. Cambridge and London: Harvard University Presss, 1989.

Wanandi, Yusuf. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Penerjemah Endi Bayuni. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.

Ward, Ken. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1970.

Widjajanto, Andi dan Artantri Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945 – 2004*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung & Pacivis, 2008.

Wilson, Edward O. *Sociobiology: The New Synthesis*. Twenty-Fifth Anniversary Edition. Cambridge-Massachusetts-London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000.

Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Penerjemah: Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Wiwoho, B. dan Banjar Chaeruddin. *Memori Jenderal Yoga*. Cetakan 1. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1990.

Yusuf, Ahmad Mukhlis. *Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita I (1965-1967).* Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008.

----------,, Ahmad Mukhlis. *Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita II (1968-1971).* Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008.

www.setabasi.org

Jurnal

Allison, John M. Indonesia: Year of the Pragmatists. 1969. *Asian Survey*. Vol. 9, No. 2, A Survey of Asia in 1968: Part II (Feb.), pp. 130-137

Anderson, Benedict R. O'G. Petrus Dadi Ratu. 2000. *Indonesia*. Vol. 70 (Oct.), pp. 1-7.

Ang Cheng Guan. United States-Indonesia Relations: The 1965 Coup and After. 2003. *War & Society*. 21:1. pp. 119-136.

Britton, Peter. Indonesia's Neo-Colonial Armed Forces. 1975. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 7:3, pp. 14-21.

Davidson, Jamie S. and Douglas Kammen. Indonesia's Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan. 2002. *Indonesia*. No. 73 (Apr.) pp. 53-87.

Dommen, Arthur J. The Attemp Coup in Indonesia. 1966. *The China Quarterly*. No. 25 (Jan. – Mar.) pp. 144-170.

Drakeley, Steven. Indonesia's Muslim Organisation and the Overthrow of Sukarno. 2014. *Studia Islamika*. Volume 21, Number 2, pp. 197-232.

Ebon, Martin. 1963. Indonesian Communism: From Failure to Success. *The Review of Politics*. Vol. 25, No. 1 (Jan.), pp. 91-109.

Editors, The. Continuity and Change: Four Indonesian Cabinets since October 1, 165, with Scattered Data on Their Members' Organizational and Ethnic Affiliations, Age and Place of Birth. 1966. *Indonesia*. No. 2. (Oct.) pp. 185-222.

----------,, The. Current Data on the Indonesian Army Elite. 1969. *Indonesia*. No. 7 (Apr.), pp. 195-201.

----------,, The. Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970. 1970. *Indonesia*. No. 10 (Oct.) pp. 194-208.

----------,, The. Data on the Current Military Elite. 1967. *Indonesia.* No. 3 (Apr.) pp. 205-216.

Farram, Steven. The PKI in West Timor and Nusa Tenggara Timur. 2010. *KITLV*. Vol. 166, No. 4., pp. 381-403.

www.setabasri.org

Fealy, Greg and Katharine McGregor. Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance. 2010. *Indonesia*. No. 89 (April) pp. 37-60.

Federspiel, Howard M. The Muhammadijah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia. 1970. *Indonesia*. No. 10 (Oct.) pp. 57-79.

Feith, Herbert. Suharto's Search for a Political Format. 1968. *Indonesia*. No. 6 (Oct.). pp. 88-105.

Glassburner, Bruce. Widjojo Nitisastro on Population Trends in Indonesia. 1970. *Indonesia*. Vol. 10 (Oct.) pp. 183-189.

Gunn, Geoffrey. Ideology and the Concept of Government in the Indonesian New Order. 1979. *Asian Survey*. Vol. 19, No. 8 (Aug.), pp. 751-769.

Hadiz, Vedi R. Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War. 2011. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 30, 1, pp. 3-38.,

Hearman, Vannessa. Guerrilas, Guns, and Knives? Debating Insurgency in South Blitar, East Java, 1967-8. 2010. *Indonesia*. No. 89 (April) pp. 61-91.

Hill, David T. Cold War Polarization, Delegated Party Authority, and Diminishing Exilic Options: The Dilemma of Indonesian Exiles in China after 1965. 2020. *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*. 176, pp. 338-372.

Hindley, Donald. Alirans and the Fall of the Old Order. 1970. *Indonesia*. No. 9 (Apr.) pp. 23-56.

----------,, Donald. Dilemmas of Consensus and Division: Indonesia's Search for a Political Format. 1969. *Government and Opposition*. Volume 4, Issue 1, pp. 70-99.

----------,, Donald. Indonesia 1970: The Workings of Pantjasila Democracy. 1971. *Asian Survey*. Vol. 11, No. 2., A Survey of Asian in 1970: Part II (Feb.), pp. 111-120.

----------,, Donald. Indonesia 1971: Pantjasila Democracy and the Second Parliamentary Elections. 1972. *Asian Survey*. Vol. 12, No. 1, A Survey of Asia in 1971: Part 1 (Jan.) pp. 56-68., p. 56

Hong Lan Oei. Indonesia's Economic Stabilization and Rehabilitation Program: An Evaluation. 1968. *Indonesia*. Vol. 5 (Apr.), pp. 135-174.

www.setabasri.org

Jenkins, David. The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi. 1983. *Southeast Asian Journal of Social Sciences*. Vol. 11, No. 2., pp. 15-30.

----------,, David. Soeharto and the Japanese Occupation. 2009. *Indonesia*. No. 88 (Oct.) pp. 1-103.

----------,, David. The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi. 1983. *Southeast Asian Journal of Social Sciences*. Vol. 11, No. 2.

Kian Wie Thee. Indonesia's Two Deep Economic Crises: The Mid 1960s and Late 1990s. 2009. *Journal of the Asia Pacific Economy*. 14:1, pp. 49-60.

Kroef, Justus M. van der. "Guided Democracy" in Indonesia." 1957. *Far Eastern Survey.* Vol. 26, No. 8 (Aug.). pp. 113-124.

----------,, Justus M. van der. Indonesia: The Battle of the 'Old' and the 'New' Order. 1967. *Australian Outlook*. 21:1., pp. 18-43.

----------,, Justus M. van der. Indonesian Communism since the 1965 Coup. 1970. *Pacific Affairs*. Vol. 43, No. 1 (Spring), pp. 34-60.

----------,, Justus M. van der. Nasution, Sukarno and the West New Guinea Dispute. *Asian Survey*. 1961. Vol. 1, No. 6 (Aug.) pp. 20-24.

----------,, Justus van der. "Disunited Indonesia." *Far Eastern Survey*, Vol. 27, No. 4 (Apr., 1958), pp. 49-63.

----------,, Justus van der. "Peasant and Land Reform in Indonesian Communism." *Journal of Southeast Asian History*. 1963. Vol. 4, No. 1 (Mar.) pp. 31-67.

Langenberg, Michael van. Dr. Subandrio-An Assessment. 1966. *The Australian Quarterly*. Vol. 38, No. 4 (December) pp. 67-80.

Legge, John. D. General Suharto's New Order. 1968. *International Affairs*. Vol. 44, No. 1 (Jan.) pp. 40-47.

Lemke. Thomas. From State Biology to the Government of Life: Historical Dimensions and Contemporary Perspectives of "Biopolitics." 2010. *Journal of Classical Sociology*. 10 (4), pp. 421-438.

Lev, Daniel S. Indonesia 1965: The Year of the Coup. 1966. *Asian Survey*. Vol. 6, No. 2 (Feb.). pp. 103-110.

----------,, Daniel S. Political Parties in Indonesia. 1967. *Journal of Southeast Asian History*. Vol. 8, No. 1 (Mar.) pp. 52-67.

www.sebabasi.org

----------,, Daniel S. The Political Role of the Army in Indonesia. 1964. *Pacific Affairs*. Vol. 36, No. 4 (Winter) pp. 349-364.

Liddle, R. William. Suharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions. 1985. *Pacific Affairs*. Vol. 58, No. 1 (Spring). pp. 68-90.

----------,, R. William. The Relative Autonomy of the Third World Politican: Soeharto and Indonesia Economic Development in Comparative Perspective. 1991. *International Studies Quarterly*. Vol. 35, No. 4 (Dec.) pp. 403-427.

MacDougall, John James. The Tecnocratic Model of Modernization: The Case of Indonesia's New Order. 1976. *Asian Survey*. Vol. 16, No. 12 (Dec.), pp. 1166-1183.

Mackie, J.A.C. Indonesian Politics under Guide Democracy. 1961. *Australian Outlook*. 15:3, pp. 260-279

Malley, Michael. Soedjono Hoemardhani and Indonesian-Japanese Relations. 1989. *Indonesia*. No. 48 (Oct.) pp. 47-64.

Masters, Roger D. Masters. The Biological Nature of the State. 1983. *World Politics*. Vol. 35, No. 2, Jan. pp. 161 – 193

McCawley, Peter. General Elections-Or an Election of Generals?. 1970. *The Australian Quarterly*. Vol. 42, No. 3 (Sep.), pp. 65- 74.

McIntyre, Angus. Division and Power in the Indonesian National Party, 1965-1966. 1972. *Indonesia*. No. 13 (Apr.) pp. 183-210.

McVey, Ruth T. The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army: Part II. 1972. *Indonesia*. No. 13 (Apr.), pp. 147-181.

Melvin, Jess. Mechanics of Mass Murder: A Case for Understanding the Indonesian Killings as Genocide. 2017. *Journal of Genocide Research*. 19:4., pp. 487-511.

Mietzner, Marcus. Authoritarian Elections, State Capacity, and Performance Legitimacy: Phases of Regime Consolidation and Decline in Suharto's Indonesia. 2017. *International Political Science Review* 00 (0)., pp. 1-14.

Monk, Paul M. Secret Intelligence and Escape Clauses: Australia and the Indonesian Annexation of East Timor 1963-1976. 2001. *Critical Asian Studies*. 33:2, pp. 181-208.

Mortimer, Rex. Class, Social Cleavage and Indonesian Communism. 1969. *Indonesia*. No. 8 (Oct.) pp. 1-20.

www.setabasri.org

Paget, Roger K. The Military in Indonesian Politics: The Burden of Power. 1968. *Pacific Affairs*. Vol. 40, No. 4/3 (Winter) pp. 294-314.

Palmier, Leslie. Suharto's Indonesia. 1970. *Asian Affairs*. 1:3, pp. 275-284, p. 281.

----------,, Leslie. The 30 September Movement in Indonesia. 1971. *Modern Asian Studies*. Vol. 5, No. 1, pp. 1-20.

Panglaykim, J. and K. D. Thomas, 1967. The New Order and the Economy. *Indonesia*. No. 3 (Apr.), pp. 73-120, p. 80.

Pauker, Ewa T. Has the Sukarno Regime Weakened the PKI? 1964. *Asian Survey.* Vol. 4, No. 9 (Sep.,) pp. 1058-1070.

Pauker, Guy J. General Nasution's Mission to Moscow. *Asian Survey*. 1961. Vol. 1, No. 1 (Mar.) pp. 13-22.

Pauker, Guy J. Indonesia: the Year of Transition. 1967. *Asian Survey*. Vol. 7, No. 2, A Survey of Asia in 1966: Part II (Feb.), pp. 138-150.

----------,, Guy J. The Rise and Fall of The Communist Party of Indonesia, Memorandum RM-5753-PR, February 1969.

Peterson, Steven A. In Memoriam: Albert Somit, PhD. 2021. *Politics and Life Sciences.* Spring, Vol. 40, No. 1. pp. 133-4.

Political Economy and the Soeharto Regime. 1978. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 14 No. 3, pp. 24-50, p. 28.

Raillon, Francois. The New Order and Islam, or the Imbroglio of Faith and Politics. 1993. *Indonesia*. No. 57, Archipel (Apr.) pp. 197-217.

Rice, Robert. Sumitro's Role in Foreign Trade Policy. 1969. *Indonesia*. No. 8 (Oct.) pp. 183-211.

Rieffel, Alexis. The Bimas Program for Self-Sufficiency in Rice Production. 1969. *Indonesia*. Vol. 8 (Oct.) pp. 103-133

Robinson, Geoffrey. "Down to the Very Roots": The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965-66. 2017. *Journal of Genocide Research*. 19:4, pp. 465-486.

Rocamora, J. Eliseo. The Partai Nasional Indonesia 1963-1965. 1970. *Indonesia*. No. 10 (Oct.) pp. 143-181.

Rogers, Marvin. Depoliticization of Indonesia's Political Parties: Attaining Military Stability. 1988. *Armed Forces & Society.* Vol. 14 No. 2, Winter, pp. 247-272.

www.setabasi.org

Roosa, John. The State of Knowledge about an Open Secret: Indonesia's Mass Disappearances of 1965-66. 2016. *The Journal of Asian Studies*. Vol. 75, No. 2 (May), pp. 281-297.

Samson, Allan A. Army and Islam in Indonesia, 1972. *Pacific Affairs*. Vol. 44, No. 4 (Winter), pp. 545-565.

----------,, Allan A. Indonesia 1972: The Solidification of Military Control. 1973. *Asian Survey*. Vol. 13, No. 2 (Feb.), pp. 127-139

----------,, Allan A. Islam in Indonesian Politics. 1968. *Asian Survey*. Vol. 8, No. 12 (Dec.) pp. 1001-1017.

Scott, James C. Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia. 1972. *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (Mar.) pp. 91-113.

Scott, Peter Dale. The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. 1985. *Pacific Affairs*. Vol. 58, No. 2 (Summer), pp. 239-264.

Soedjatmoko. Indonesia: Problems and Opportunities. 1967. *Australian Outlook*. 21:3, pp. 263-286

Soemardjan, Selo. Landreform in Indonesia. 1962. *Asian Survey*. Vol. 1, No. 12 (Feb.) pp. 23-30.

Somit, Albert and Steven A. Peterson, Introduction: Main Current in Biopolitics. 1987. *International Political Science Review.* Vol. 8, No.2. pp. 107-110.

Sugiyama, Akiko. Remembering and Forgetting Indonesia's Madiun Affair: Personal Narratives, Political Transition, and Historiography, 1948-2008. 2011. *Indonesia*. No. 92 (October) pp. 19-41.

Thomas, K.D. and J. Panglaykim. Indonesia's Development Cabinet, Background to Current Problems and the Five Year Plan. 1969. *Asian Survey*. Vol. 9, No. 4 (Apr.), pp. 223-238.

Utrecht, Ernst. Class Struggle and Politics in Java. 1972. *Journal of Contemporary Asia*. 2:3 pp. 274-282.

----------,, Ernst. Army and Islamic Opposition in Indonesia. 1979. *Journal of Contemporary Asia*. 9:2., pp. 175-186.

Uzair, Mohammad. Economic Development of Indonesia. 1970. *Pakistan Horizon*. Vol. 23, No. 2 (Second Quarter), pp. 123-137.

www.setabasri.org

Vengroff, Richard and Yung Mei Tsai. Food, Hunger, and Dependency: PL480 Aid to the Third World. 1982. *Journal of Asian and African Studies*. XVII, 3-4., pp. 250-265.

Wertheim, W.F. Indonesia Before and after the Untung Coup. 1966. *Pacific Affairs*. Vol. 39, No. 1:2 (Spring-Summer) pp. 115-127.

----------,, W.F. Suharto and the Untung Coup – the Missing Link. 1970. *Journal of Contemporary Asia*. 1:2, pp. 50-57.

Winward, Mark. Capture from Below: Civil-Military Relations during Indonesia's Anticommunist Violence, 1965-1966. 2018. *Indonesia*. Number 106, October, pp. 111-136.

Zhou, Taomo. China and the Thirtieth of September Movement. 2014. *Indonesia.* No. 98 (October) pp. 29-58., pp. 57-58.

Majalah

Historia, "Desas Desus Operasi Khusus." Historia, Nomor 9 Tahun 1, 2013.

Historia, "Jalan Mangkyo Dekat Soeharto." Historia. No. 9, Tahun 1, 2013.

Historia, "Taktik Cerdik Misi Diplomatik," Historia, No. 9, tahun I, 2013.

Ransom, David. "Ford Country: Building an Elite for Indonesia." 1975. Dalam *The Trojan Horse: A Radical Outlook at Foreign Aid*. Steve Weismann. Palo Alto: Ramparts Press, 1975. pp. 93-116.

Tempo, "Perintis Jalan Politik Soeharto" 20 Oktober 2013.

----------,, "Setelah Ali Menyikut Sumiskun", 20 Oktober 2013.

----------,, "Tugas Rahasia Sang Asisten Presiden" 20 Oktober 2013

www.setabasri.org

Surat Kabar

Abadi, 13 Oktober 1971.
----------,, 31 Mei 1969.
Angkatan Bersendjata, 14 Juni 1969.
----------,, 2 April 1971.
----------,, 2 Juni 1966.
----------,, 21 Agustus 1966.
----------,, 27 Januari 1969.
----------,, 3 Juni 1966.
----------,, 31 Januari 1969.
----------,, 4 Mei 1965.
----------,, 6 Juni 1966.
----------,, 6 Mei 1966.
----------,, 7 Juli 1966.
----------,, 8 Januari 1967.
Antara, 2 Juni 1966.
----------,, 26 Mei 1966.
Anwar, Rosihan. "Tentara Berhak Mendjalankan Peranan dalam Pemerintahan." *Kompas*, 11 November 1967.
Berita Buana, 9 Oktober 1971.
Berita Yudha, 10 Desember 1965.
----------, 10 Februari 1968.
----------, 10 Juni 1968.
----------, 12 Juli 1966.
----------, 12 Juli 1966.
----------, 14 Februari 1968.
----------, 15 Oktober 1965
----------, 18 November 1965.
----------, 19 Juni 1967.
----------, 19 Oktober 1965.
----------, 2 Januari 1970.
----------, 25 Mei 1966.
----------, 27 Mei 1967.
----------, 4 November 1965.
----------, 4 Oktober 1965
----------, 5 Juli 1968
----------, 5 November 1965.
----------, 6 Oktober 1965.
----------, 7 Juni 1968.
----------, 8 Oktober 1965.
----------, 9 Februari 1968.
----------, 9 Oktober 1971.
----------, 9 September 1966.

www.setabasri.org

Chandra, A.M. "Menjambut HUT ABRI ke-23: ABRI Lahir dari Rakjat jang Berdjuang." *Sinar Harapan*, 5 Oktober 1968.
Djajakarta, 11 Oktober 1971.
Duta Masyarakat, 21 Juni 1971.
IPMI, 11 Oktober 1971.
KAMI, 20 Mei 1971.
----------, 22 April 1971.
----------, 25 Maret 1971.
----------, 8 Oktober 1971.
----------, 9 Oktober 1971.
Kompas 23 Agustus 1968.
----------5 April 1968.
----------, 14 Mei 1971.
----------, 14 Oktober 1971.
----------, 15 Mei 1971.
----------, 17 Desember 1968.
----------, 2 Juni 1969.
----------, 2 September 1968.
----------, 20 Agustus 1968.
----------, 20 Oktober 1967.
----------, 21 Juni 1971.
----------, 21 November 1967.
----------, 22 Januari 1970.
----------, 27 September.
----------, 28 April 1968.
----------, 29 Agustus 1968.
----------, 30 November 1968.
----------, 31 Januari 1970.
----------, 5 Oktober 1970.
----------, 8 Oktober 1971.
----------, 9 Oktober 1971.
Merdeka, 17 April 1971.
Nusantara, 6 Oktober 1971.
----------, 7 Oktober 1971.
Pedoman, 6 Oktober 1971.
Pos Indonesia, 8 Oktober 1971.
Sinar Harapan , 10 Juli 1971.
----------, 7 Oktober 1971.
----------, 10 April 1971.
----------, 10 Juli 1971.
----------, 17 Desember 1968.
----------, 18 Maret 1971.
----------, 19 April 1971.
----------, 20 April 1971.
----------, 21 Juli 1971
----------, 24 Juli 1968.

www.setabasri.org

----------, 24 Mei 1971.
----------, 25 Maret 1971.
----------, 29 Maret 1971.
----------, 3 Oktober 1968.
----------, 5 April 1971.
----------, 6 Oktober 1971.
----------, 7 April 1971.
----------, 8 Oktober 1971.
Suara Pembaruan, 14 Mei 1971.
Suluh Marhaen, 15 April 1971.
----------, 2 April 1971.
Tadjuk Rentjana API. "Penjederhanaan Parpol utk. Sukseskan Pembangunan." *API*, 8 Oktober 1971.
Tadjuk Rentjana Sinar Harapan. "Apa Arti Kemenangan Golkar bagi Masa Depan Kita?" *Sinar Harapan*, 6 Juli 1971.
----------. "Tiga Pilihan di antara Generasi Muda." *Sinar Harapan*, 30 Maret 1971.
Warta Bhakti, 22 Juni 1967.
Widya. "Beban Dwi-Fungsi ABRI." *Angkatan Bersendjata*, 3 Maret 1969.
----------. "Komentar2 atas Seminar Angkatan Darat (2): Spirit Pembinaan Orde Baru."*Angkatan Bersendjata*, 6 September 1966

Disertasi

Dennen, Johan Matheus Gerardus van der. *The Origin of War: the Evolution of a Male-Coalitional Reproductive Strategy*, Doctoral Dissertation, University of Groningen, 1995.

Karsono, Sony. *Indonesia's New Order, 1966-1998: Its Social and Intellectual Origins*. Doctoral Dissertation, The Faculty of the College of Arts and Science of Ohio University, August 2013.

Putro, Robertus Anugerah Purwoko. *The Professionalisation of the Indonesian Military*. Doctoral Dissertation. University of New South Wales. 2012.

Tanter, Richard. *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia, 1966-1989, with Special Reference to South Korea, 1961-1989*. Doctoral Dissertation. Monash University, February 1991.

Turner, Barry. Nasution: *Total People's Resistance and Organicist Thinking in Indonesia*. Doctoral Dissertation. Swinburne University of Technology Melbourne, December 2005.

Wejak, Justin Laba. *Secular, Religious and Supernatural – An Eastern Indonesian Catholic Experience of Fear (Autoethnographic Reflections of the Reading*

www.setabasri.org

of a New Order-Era Propaganda Text). Doctoral Dissertation. The University of Melbourne, 2017.

Publikasi Elektronik

Arnold M. Ludwig. “Unintentional ASMR - Arnold Ludwig - Interview Excerpts - "The Nature Of Political Leadership" [Website] Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=ymKyZtSBDQc> Tanggal 1 Februari 2022 Pukul 11:45.

Association of Politics and Life Sciences. “About APLS.” [Website] Diakses dari: <www.aplsnet.org/about.html>. Tanggal 7 Mei 2021 Pukul 12:12.

Editors of Encyclopaedia Britannica. the. “Rudolf Kjellén: Swedish Political Scientist.” [Website] Diakses dari: <https://www.britannica.com/biography/Rudolf-Kjellen>. Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 01:44.

International Political Science Association. “RC12 – Biology and Politics.” Diakses dari: <www.ipsa.org/page/rc12-biology-and-politics>. Tanggal 7 Mei 2021 Pukul 12:09.

Ketetapan MPRS No. 12/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan No. 11/MPRS/1966 mengenai Pemilihan Umum. [Website] Diakses dari: <https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt507d230a5dc94/ketetapan-majelis-permusyawaratan-rakyat-sementara-nomor-xi-mprs-1966-tahun-1966/document#!> Tanggal 18 Mei 2021 Pukul 09:46.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. “Pemilu 1955” Diakses dari: <http://kpu-malukuprov.go.id/pemilu-1955/> Tanggal 1 Mei 2021 Pukul 22:55.

----------. “Pemilu 1971” Diakses dari: <http://kpu-malukuprov.go.id/pemilu-1971/> Tanggal 30 April 2021 Pukul 23:36.

Kopassus, “Sejarah Singkat Komando Pasukan Khusus.” [Website] Diakses dari < https://kopassus.mil.id/history/> Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 14:52.

Matanasi, Petrik. “HUT ke-73 Korps Marinir: Sejarah Pangkalan IV Tegal hingga KKO.” 15 November 2018. [Website] Diakses dari: <https://tirto.id/hut-ke-73-korps-marinir-sejarah-pangkalan-iv-tegal-hingga-kko-c9Wi>. Tanggal 25 Maret 2022 pukul 14:35.

www.setabasri.org

----------, Petrik. “Kostrad: Saksi Kecemerlangan Soeharto dan Redupnya Prabowo.” 6 Maret 2019. [Website] Diakses dari: <https://tirto.id/kostrad-saksi-kecemerlangan-soeharto-dan-redupnya-prabowo-cFzS> Tanggal 14 Mei 2021 pukul 12:32.

----------, Petrik. “Tragedi H.R. Dharsono: Kala Soeharto Menistakan Pengkritiknya.” 5 Juni 2020. [Website] Diakses dari: <https://tirto.id/tragedi-hr-dharsono-kala-soeharto-menistakan-pengkritiknya-fDBa> Tanggal 4 Agustus 2021 pukul 9:35 PM.

Putri, Farizqa Ayuluqyana. “Apa Itu Survival of the Fittest dan Maksudnya di Teori Evolusi” 21 Desember 2020. [Website] Diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-survival-of-the-fittest-dan-maksudnya-di-teori-evolusi-f8oZ> Tanggal 27 Juni 2021 Pukul 14:02.

Seskoad. “Sejarah Seskoad” [Website] Diakses dari: <https://Seskoad.mil.id/index.php/sejarah> Tanggal 19 Mei 2021 Pukul 03:19.

Sitompul, Martin. “H. R. Dharsono, Jenderal Terpidana.” 8 Januari 2018. [Website] Diakses dari: <https://historia.id/militer/articles/h-r-dharsono-jenderal-terpidana-vZ5qo/page/1> Tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 9:41 AM.

Wahyudi, Yohan. “Berebut Nasionalisme di Kancah Lokal.” 3 April 2009. [Website] Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/04/03/03141250/berebut.nasionalisme.di.kancah.lokal> Tanggal 25 November 2021 Pukul 7:51 PM.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen

Central Intelligence Agency. *Indonesia Under Suharto: Economic Progress and Problems*. May 1970, pp. 1-13.

Instruksi Presiden No. 2/1979 tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966. Tanggal 3 Oktober 1966.

Keputusan Presiden No. 163/1966 tentang Kabinet Ampera.

Keputusan Presiden No. 156/1960 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Tanggal 24 Juni 1960.

Keputusan Presiden No. 107/M Tahun 1971

Ketetapan MPRS No. 44/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor 9/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal 27 Maret 1968.

www.setabasri.org

---------- No. 11/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Tanggal 5 Juli 1966.

---------- No. 12/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Tanggal 5 Juli 1966.

---------- No. 13/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Tanggal 5 Juli 1966.

---------- No. 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1966. Tanggal 5 Juli 1966.

---------- No. 23/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Tanggal 5 Juli 1966.

---------- No. 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Tanggal 12 Maret 1967.

---------- No. 42/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum. Tanggal 27 Maret 1968.

---------- No. 43/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Tanggal 27 Maret 1968.

---------- No. 9/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Tanggal 21 Juni 1966.

---------- Nomor 44/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Indonesia. Tanggal 27 Maret 1968.

Lembaga Pemilihan Umum. Pemilihan Umum 1971., tt: tp, 1973.

Memorandum for the President*, Subject: Your Meeting with President Suharto*. The White House, Information, July 18, 1969.

Penjelasan Soeharto atas pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967. Tanggal 12 Maret 1967.

Presiden Republik Indonesia, *Pengumuman*, 20 Februari 1967.

----------, *Pidato – Amanat Pedjabat Presiden R. I. Djenderal Soeharto pada Musjawarah Kerdja Nasional ke-II Sekretariat Bersama Golongan Karya* tanggal 2 Nop. 1967 di Tjibogo.

Surat Perintah 11 Maret 1966

www.setahasri.org

Telegram from the Embassy in Indonesia to the Department of State. Djakarta, November 4, 1965, 0845Z.

The United States and Suharto: April 1966 – December 1968. Memorandum From Donald W. Ropa of the National Security Council Staff to the President's Special Assistant (Rostow). Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXVI.,

Undang-undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Tanggal 10 Januari 1967.

---------- No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Tanggal 7 Desember 1968.

---------- No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat. Tanggal 17 Desember 1969.

---------- No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Tanggal 17 Desember 1969.

---------- No. 17/1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Tanggal 18 Desember 1968.

---------- No. 18/1968 tentang Bank Dagang Negara. Tanggal 18 Desember 1968.

---------- No. 19/1968 tentang Bank Bumi Daya. Tanggal 18 Desember 1968.

---------- No. 2/1967 tentang Perubahan Undang-undang No. 91 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36). Tanggal 10 Januari 1967.

---------- No. 20/1968 tentang Bank Tabungan Negara. Tanggal 18 Desember 1968.

---------- No. 21/1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. Tanggal 18 Desember 1968.

---------- No. 22/1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia. Tanggal 18 Desember 1968.

---------- No. 3/1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association. Tanggal 17 Juni 1968.

---------- No. 5/1966 tentang Persetujuan-persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia. Tanggal 27 Oktober 1966.

www.setahasri.org

---------- No. 8/1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Tanggal 8 November 1966.

---------- No. 9/1968 tentang Keanggotaan kembali RI dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). Tanggal 25 Oktober 1968.

www.setabasri.org

LAMPIRAN

Lampiran 1: Tulisan Tangan Soeharto tanggal 27 Oktober 1965 Masih Mendukung Politik Kiri Sukarno.

Sumber:

J.B. Soedarmanta. *Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi*. Cetakan 1. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2004., h. 178.

Lampiran 2: Reproduksi Kekuasaan Awal dalam Hirarki TNI-AD

Sumber Tabel
The Editors, Data on Current Military Elite. 1967. *Indonesia.* No. 3 (Apr.) pp. 205-216

Posisi	Pejabat	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Yang Diganti
Komando Pusat AD				
Menteri/Pangad	Achmad Yani – Letjen – Diponegoro	25 Juni 1962	Deputi II Operasi Kepala Staf Angkatan Bersenjata	AH Nasution (Jenderal)
	Soeharto – Jenderal – Diponegoro	15 Oktober 1965	Pangkostrad	Achmad Yani (Letjen); Wafat akibat G30S
Deputi Menteri/Pangad	Maraden Panggabean – Letjen – TT/II Sumatera Selatan	15 Agustus 1966	Deputi Pangad/Komandan Antar Daerah Kalimantan	Jabatan Baru
Deputi I Operasi Pangad	Mursjid – Mayjen – Siliwangi	30 Juni 1962	Asisten II Kepala Staf AD	?
	Soerono – Mayjen – Diponegoro	26 Mei 1966	Gubernur Akademi Militer Magelang	Mursjid (Mayjen)
Deputi II Administrasi Pangad	Soeprapto – Mayjen – Diponegoro	30 Juni 1962	Deputi Wilayah Sumatera	Ahmad Jani (Kolonel)
	Maraden Panggabean – Letjen – TT/II Sumatera Selatan	25 Oktober 1965	Deputi Pangad/Komandan Antar Daerah Kalimantan	Soeprapto (Mayjen); Wafat akibat G30S
Deputi III Keuangan/Hubungan Sipil Pangad	Harjono MT – Mayjen – Tanpa Afiliasi	31 Agusutus 1965	Inspektur Jenderal AD	Jabatan Baru
	Basuki Rachmat – Mayjen – Brawijaya	25 Oktober 1965	Pangdam VIII	Harjono MT; Wafat akibat G30S
	Kusno Utomo Widjojokerto – Mayjen – Siliwangi	26 Mei 1966	Komandan Kodiklat AD	Basuki Rachmat (Mayjen)
Asisten I Intelijen	S Parman – Mayjen – Korps Polisi Militer	30 Juni 1962	Atase Militer di London	AEJ Magenda (Kolonel)
	R Sugih Arto – Mayjen – Siliwangi	3 November 1965	Dutabesar di Rangoon	S Parman; Wafat akibat G30S
	Sudirgo – Mayjen – Korps Polisi Militer	27 April 1966	Direktur Polisi Militer	R Sugih Arto (Mayjen)

www.setabasri.org

Posisi	Pejabat	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Yang Diganti
Asisten II Operasi	Djamin Gintings – Mayjen – Bukit Barisan	30 Juni 1962	Pangdam II	Mursjid (Brigjen)
	Sumitro – Mayjen – Brawijaya	3 November 1965	Pangdam IX	Djamin Gintings (Mayjen)
Asisten III Personil	Pranoto Reksosamudro – Mayjen – Diponegoro	30 Juni 1962	Pangdam VII	RA Kosasih (Brigjen; Pjs)
	Hartono Rekso Dharsono – Mayjen – Siliwangi	25 Oktober 1965	Kepala Staf Kodam VI	Pranoto Reksosamudro (Mayjen)
	Wahju Hagono – Mayjen – Siliwangi	26 Mei 1966	Ajudan Jenderal	Hartono Rekso Dharsono (Mayjen)
Asisten IV Logistik	DI Panjaitan – Brigjen – TT/II	30 Juni 1962	Atase Militer di Bonn	Achmad Jusuf (Kolonel)
	Hartono Wirjodiprodjo – Mayjen – Kops Teknik	25 Oktober 1965	Direktur Persediaan	DI Panjaitan; Wafat akibat G30S
Asisten V Hubungan Sipil dan Teritorial	Soeprapto Sokowati – Mayjen – Brawijaya	Januari 1962	?	?
	Soeharto – Mayjen - ?	25 Oktober 1965	Deputi Asisten V	Soeprapto Sokowati (Mayjen)
Asisten VI Kelompok Fungsional	Soedjono – Brigjen - ?	Kurang lebih 1963	?	?
	Darjatmo – Mayjen – Diponegoro	25 Oktober 1965	Deputi Asisten VII	Soedjono (Brigjen)
Asisten VII Audit, Comptroller	Alamsjah – Mayjen – Sriwijaya	15 Juli 1965	Deputi Asisten VII	Ashari Danudirdjo (Brigjen)
Pangkostrad	Soeharto – Mayjen – Diponegoro	1 Mei 1963	Deputi Kepala Staf AD/Komandan Koanda Indonesia Timur dan Panglima Mandala	Jabatan Baru
	Umar Wirahadikusumah – Letjen – Siliwangi	7 Desember 1965	Pangdam V	Soeharto (Mayjen); Menjadi Pangad
*Komando Antar Daerah (*Koanda*)*				
Deputi Pangad/Panglima Koanda Sumatera	Achmad Junus Mokoginta – Letjen – Siliwangi/Diponegoro	November 1964	Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata	RA Kosasih (Mayjen)
Deputi Pangad/Panglima Koanda Kalimantan	Maraden Panggabean – Mayjen – TT/II Sumatera Selatan	Sebelum 1964	?	H Hasan Basri (Brigjen)

www.setnbasri.org

Posisi	Pejabat	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Yang Diganti
	D Soemartono – Mayjen – Siliwangi	4 November 1965	Atase Militer di Washington DC	Maraden Panggabean (Mayjen)
Deputi Pangad/Panglima Koanda Indonesia Timur	U Rukman – Mayjen – Siliwangi	17 September 1963	Pangdam XVII	Soeharto (Mayjen)
	Askari – Mayjen – Siliwangi	10 Januari 1966	Panglima KORHANUD AD	U Rukman (Mayjen)
Komando Daerah Militer (Kodam)				
Pangdam I Iskandar Muda (Aceh)	Moch. Ishak Djuarsa – Brigjen – Siliwangi	21 September 1964	Kepala Staf Kodam VI	Njak Adam Kamil (Kolonel)
Pangdam II Bukit Barisan (Sumatera Utara dan Timur)	Darjatmo – Brigjen – Diponegoro	1 Agustus 1963	Direktur Korps Sinyal AD	Thalib (Kolonel); Pjs
	P Sobiran – Brigjen – Brawijaya?	29 Oktober 1965	Kepala Staf Koanda Sumatera	Darjatmo (Brigjen)
Pangdam III 17 Agustus (Sumatera Barat)	Panoedjoe – Brigjen – Diponegoro	20 April 1964	Kepala Staf Kodam VII	Suwito Harjoko (Kolonel)
	Poniman – Brigjen – Siliwangi	5 Februari 1966	Kepala Staf Kodam III	Panoedjoe (Brigjen)
Pangdam IV Sriwidjaja (Sumatera Selatan, Jambi, Lampung)	Makmun Murod – Brigjen – Siliwangi	28 Agustus 1962	Kepala Staf Kodam IV	Harun Sobar (Kolonel)
Pangdam V Djaya (Jakarta Raja)	R Umar Wirahadikusumah – Brigjen – Siliwangi	18 Januari 1960	Komandan Resimen 10 Garut	Jabatan Baru
	Amir Machmud – Mayjen – Siliwangi	7 Desember 1965	Pangdam X	R Umar Wirahadikusumah (Brigjen)
Pangdan VI Siliwangi (Jawa Barat)	Ibrahim Adjie – Mayjen – Siliwangi	18 Agustus 1960	Kepala Staf Kodam VI	RA Kosasih (Brigjen)
	Hartono Rekso Dharsono – Mayjen –	20 Juli 1966	Kepala Staf Kodam VI	Ibrahim Adjie (Mayjen)
Pangdam VII Diponegoro (Jawa Tengah)	Soerjosumpeno – Mayjen – Diponegoro	10 September 1964	Pangdam III	M Sarbini (Brigjen)
	Soerono – Mayjen – Diponegoro	18 Juni 1966 (pjs) 12 September 1966	Deputi I Operasai Pangad	Soerjosumpeno (Mayjen)
Pangdam VIII Brawidjaja (Jawa Timur)	Basuki Rachmat – Mayjen – Brawijaya	15 Desember 1962	Kepala Staf PEPERTI	Surachman (Brigjen)
	R Sunarijadi – Brigjen – Brawijaya	26 November 1965	Kepala Staf Kodam VIII	Basuki Rachmat (Mayjen)
	Sumitro – Mayjen – Brawijaya	17 Juni 1966	Asisten II Operasi Pangad	R Sunarijadi (Brigjen)

www.setabasri.org

Posisi	Pejabat	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Yang Diganti
Pangdam IX Mulawarman (Kalimantan Timur)	Sumitro – Brigjen – Brawijaya	16 Februari 1965	Komandan Pusat Pelatihan Infanteri	R Soeharjo (Brigjen)
	Mung Parhadimuljo – Brigjen – Diponegoro	5 November 1965	Komandan RPKAD	Sumitro (Brigjen)
Pangdam X Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Amir Machmud – Brigjen – Siliwangi	28 November 1962	Komandan Distrik Militer Kota Bandung	Piet Ngantung (Letkol); Pjs
	Sutopo Juwono – Kolonel – Siliwangi	15 November 1965	Kepala Staf Kodam X	Amir Machmud (Brigjen)
	Sabirin Mochtar – Brigjen –	9 Maret 1966	Pangdam XI	Sutopo Juwono (Kolonel); Pjs
Pangdam XI Tambun Bungai (Kalimantan Tengah)	Sabirin Mochtar – Brigjen – Brawijaya	Januari 1964	Komandan Brigade Garuda di Kongo	Dharsono (Kolonel)
	Agus Siswadi – Brigjen - ?	9 Maret 1966	Komandan Pusat Persenjataan Infanteri	Sabirin Mochtar (Brigjen)
Pangdan XII Tandjung Pura (Kalimantan Barat)	Ryacudu – Brigjen – Siliwangi/Sriwijaya	10 September 1963	Deputi Asisten V	Sudharmo (Kolonel)
Pangdam XIII Merdeka (Sulawe Utara dan Tengah)	Soenandar Prijosoedarmo- Brigjen- Brawijaya	1960	?	Sunarijadi (Kolonel)
	Soedharmono – Brigjen -?	22 Februari 1966	Aisten Menteri Industri Ringan	Soenandar Prijosoedarmo
Pangdam XIV Hasanuddin (Sulawesi Selatan dan Tenggara)	Solichin Gautama Purwanegara – Brigjen – Siliwangi	27 Juli 1965	Kepala Staf Kodam XIV	Andi M. Jusuf (Mayjen)
Pangdam XV Pattimura (Maluku)	Busjiri – Brigjen – Brawijaya	4 Januari 1961	Kepala Staf dan pejabat Pangdam Pattimura	Herman Pieters (Kolonel)
	R Djohari – Brigjen – Siliwangi	15 Februari 1966	Komandan Resort Militer 62 Garut	Busjiri (Brigjen)
Pangdam XVI Udayana (Sunda Kecil)	Sjafiuddin – Brigjen - ?	15 Februari 1966	Kepala Staf Kodam VIII	Supardi (Kolonel)
	Sukertijo – Brigjen – Brawijaya	21 Juni 1966	Kepala Staf Kodam VIII	Sjafiuddin (Brigjen)
Pangdam XVII Tjendrawasih (Irian Barat)	R Kartidjo – Brigjen – Brawijaya	17 April 1964	Sekretaris Staf Umum AD	U Rukman (Brigjen)
	Bintoro – Brigjen - ?	7 Maret 1966	?	R Kartidjo

www.setabasi.org

Lampiran 3: Reproduksi Kekuasaan dalam Hirarki TNI-AD setelah Soeharto Menjabat Presiden

Sumber Tabel
The Editors, Current Data on the Indonesian Army Elite. 1969. *Indonesia.* No. 7 (Apr.), pp. 195-201.

Posisi	Pejabat Baru	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Diganti
Komando AD Pusat				
Komandan AD (sejak 29 Mei 1967 telah bertindak sebagai pejabat komandan)	Maraden Panggabean - Jenderal – TT II Sumatera Selatan)	17 Mei 1968	Wakil Pangdam TT/II Sumatera Selatan	Soeharto (Jenderal)
Wakil Komandan AD	Umar Wirahadikusumah – Letjen – Siliwangi	29 Mei 1967	Pangkostrad	Maraden Panggabean (Letjen)
Deputi I Operasi Komandan AD	Soemitro – Mayjen – Brawijaya	11 Mei 1967	Asisten II Operasi Komandan AD; Pangdam VII	Soerono (Mayjen)
Deputi II Administrasi Komandan AD	Hartono Wirjodiprodjo – Mayjen – Korps Teknik	11 Mei 1967	Asisten IV Logistik Komandan AD	Maraden Panggabean (Letjen)
Deputi III Keuangan / Hubungan Sipil Komandan AD	Darjatmo – Mayjen – Diponegoro	27 Februari 1968	Asisten VI Kelompok Fungsional Komandan AD	Alamsjah (Mayjen)
Asisten I Intelijen	Sutopo Juwono – Brigjen – Diponegoro/Siliwangi	11 Mei 1967	Kepala Staf Kodam V	Sudirgo (Mayjen)
Asisten II Operasi	Makmun Murod – Mayjen – Siliwangi	18 Juli 1967 – 26 Januari 1969	Komandan Kodam IV	Soemitro (Mayjen)
Asisten III Personil	Wahju Hagono – Mayjen – Siliwangi	26 Mei 1966	Ajudan Jenderal	Dharsono (Brigjen)
Asisten IV Logistik	Sunggoro Notohamidjojo – Brigjen – ?	5 Agustus 1967	Atase Militer di Bonn	Hartono Wirjodiprodjo (Mayjen)
Asisten V Hubungan Sipil dan Teritorial	Suharto – Mayjen – Diponegoro	25 Oktober 1965	Deputi Asisten V	Soeprapto Sokowati (Mayjen)
Asisten VI Kelompok Fungsional	Isman – Mayjen – Eks-TRIP	16 Oktober 1968	Duta besar UAR	Darjatmo (Mayjen)

www.setabasi.org

Posisi	Pejabat Baru	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Diganti
Asisten VII Audit, Comptroller	Utojo Utomo – Mayjen – Siliwangi	11 Mei 1967	Kepala Pusat Koperasi AD (Inkopad)	Alamsjah (Mayjen)
Pangkostrad	Wahono – Brigjen – ?	11 Maret 1969	Kepala Staf Kostrad	Kemal Idris (Mayjen)
Komando Antar Daerah (Koanda)				
Deputi Komandan AD / Komanda Antar Daerah Sumatera	Kusno Utomo Widjojokerto – Mayjen – Siliwangi	18 Mei 1967	Deputi III Keuangan / Hubungan Sipil Komandan AD	Achmad Junus Mokoginta (Letjen)
Deputi Komandan AD / Komandan Antar Daerah Kalimantan	Soemartono – Mayjen – Siliwangi	4 November 1965	Atase Militer di Washington DC	Maraden Panggabean (Mayjen)
Deputi Komandan AD / Komandan Antar Daerah Indonesia Timur	Kemal Idris – Mayjen – Siliwangi	17 Februari 1969	Pangkostrad	Askari (Mayjen)
Komandan Daerah (Kodam)				
Pangdam I Iskandarmuda / Aceh	Teuku Hamzah – Mayjen – TT/I	12 Juni 1967	Atase Militer Washington DC	Ishak Djuarsa (Brigjen)
Pangdam II Bukit Barisan / Sumatera Utara dan Timur	Sarwo Edhie Wibowo – Brigjen – Diponegoro	26 Juni 1967	Komandan RPKAD	P. Sobiran (Brigjen)
	Leo Lopulisa – Brigjen – Siliwangi	2 Agustus 1968	Kepala Staf Kodam II	Sarwo Edhie Wibowo (Brigjen)
Pangdam III 17 Agustus / Sumatera Barat	Widodo – Brigjen – Diponegoro	9 Agustus 1968	Kepala Staf Kodam VII	Poniman (Brigjen)
Pangdam IV Sriwidjaja / Sumatera Selatan, Jambi, Lampung	Ishak Djuarsa – Mayjen – Siliwangi	17 Juni 1967	Komandan Kodam I	Makmun Murod (Brigjen)
Pangdam V Djaja / Djakarta Raja	Makmun Murod – Mayjen – Siliwangi	26 Januari 1969	Asisten II Operasi	Amir Machmud (Mayjen)
Pangdam VI Siliwangi / Jawa Barat)	Hartono Rekso Dharsono – Mayjen – Siliwangi	20 Juli 1966	Kepala Staf Kodam VI	Ibrahim Adjie (Mayjen)
Pangdam VII Diponegoro / Jawa Tengah	Soerono – Mayjen – Diponegoro	12 September 1966	Deputi I Operasi Komandan AD	Soerjosoempeno (Mayjen)

www.setabasi.org

Posisi	Pejabat Baru	Mulai Tugas	Jabatan Sebelumnya	Pejabat Diganti
Pangdam VIII Brawidjaja / Jawa Timur	Moch. Jasin – Mayjen – Brawijaya	15 April 1967	Atase Militer di Moskow	Soemitro (Mayjen)
Pangdam IX Mulawarman / Kalimantan Timur	Mung Parhadimuljo – Mayjen – Diponegoro	5 November 1965	Komandan RPKAD	Soemitro (Brigjen)
Pangdam X Lambung Mangkurat / Kalimantan Selatan	Sabirin Mochtar – Mayjen – Brawijaya	9 Maret 1966	Pangdam XI	Sutopo Juwono (Kolonel)
Pangdam XI Tambun Bungai / Kalimantan Tengah	Hadi Sujatno – Brigjen – Korps Teknik	6 Juli 1968	Direktur Palad	Agus Siswadi (Brigjen)
Pangdam XII Tandjungpura / Kalimantan Barat	Aloysius J. Witono – Brigjen – Siliwangi	29 Juni 1967	Deputi Asisten IV Logistik Komandan AD	Ryacudu (Brigjen)
Pangdam XIII Merdeka / Sulawesi Utara dan Tengah	Kaharuddin Nasution – Brigjen – Siliwangi	28 Oktober 1967	Gubernur Riau	Sudarmono (Brigjen)
Pangdam XIV Hasanuddin / Sulawesi Selatan	Sajidiman – Brigjen – Siliwangi	3 Agustus 1968	Deputi Asisten II Operasi	Solichin (Brigjen)
Pangdam XV Pattimura / Maluku	Poniman – Brigjen – Siliwangi	28 Agustus 1968	Pangdam III	Djohari (Brigjen)
Pangdam XVI Udayana / Sunda Kecil	Sukertijo – Brigjen – Brawijaya	21 Agustus 1966	Kepala Staf Kodam VIII	Sjafiudin (Brigjen)
Pangdam XVII Tjendrawasih / Irian Barat	Sarwo Edhie Wibowo – Brigjen – Diponegoro	2 Juli 1968	Pangdam II	Bintoro (Brigjen)

www.setabasri.org

Lampiran 4: Hasil Reproduksi Kekuasaan dalam TNI-AD setelah 5 Oktober 1969

Sumber Tabel
The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite After the Reorganization of 1969-1970. 1970. *Indonesia*. No. 10 (Oct.) pp. 194-208., p. 203-208

Posisi	Perwira Baru	TMT	Jabatan Lama	Perwira Lama
Asisten I Intelijen / Keamanan	Sutopo Yuwono – Mayjen – Diponegoro – Siliwangi – Etnis Jawa	11 Mei 1967	Kepala Staf Kodam V	Sudirgo (Mayjen)
	Charis Suhud – Brigjen Siliwangi	17 Maret 1970	Atase Militer di Washington DC	Sutopo Yuwono – Mayjen
Asisten II Operasi	Makmun Murod – Mayjen – Siliwangi – Etnis Lampung	18 Maret 1969	Pangdam IV	Sumitro – Mayjen –
	P. Sobiran – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa	Juli 1969	Kepala Inkopad	–
	A.Mudhar Amin – Brigjen	17 Maret 1970	Asisten Strategis (sebelum reorganisasi Dephankam)	–
Asisten III Personil	Wahju Hagono – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa	16 Mei 1966	Ajudan Jenderal	Dharsono (Brigjen)
	Mardanus – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa	17 Februari 1970	Deputi Ajudan Jenderal	Wahju Hagono – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa
Asisten IV Logistik	Sunggoro Notohamidjojo – Mayjen – Diponegoro – Etnis Jawa	5 Agustus 1967	Atase Militer di Bonn	Hartono Wirjodiprodjo – Mayjen
Asisten V Riset dan Pengembangan	Utojo Utomo – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa	17 Maret 1970	Asisten VII Kasad	–
Komandan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)	Wahono – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa	11 Maret 1969	Kepala Staf Kostrad	Kemal Idris – Mayjen – Siliwangi – Minangkabau
	Makmun Murod – Mayjen – Siliwangi – Etnis Lampung	20 November 1970	Pangdam V	–
Kodam I Iskandar Muda (Aceh)	Teuku Hamzah – Brigjen – Teritorial Tempur I – Etnis Aceh	12 Juni 1967	Atase Militer di Washington DC	Ishak Djuarsa – Brigjen – Siliwangi – Etnis Sunda
Kodam II Bukit Barisan (Sumatera Utara)	Leo Lopulisa – Brigjen – Siliwangi – Etnis Ambon	2 Juli 1968	Kepala Staf Kodam II	Sarwo Edhie Wibowo – Brigjen – Diponegoro – Etnis Jawa

www.setabasri.org

Posisi	Perwira Baru	TMT	Jabatan Lama	Perwira Lama
Kodam III 17 Agustus (Sumatera Barat)	Widodo – Brigjen – Diponegoro – Etnis Jawa	9 Agustus 1968	Kepala Staf Kodam VII	Poniman – Brigjen
	Sumantoro – Brigjen – Diponegoro – Etnis Jawa	17 April 1970	Atase Militer di Bonn	Widodo – Brigjen
Kodam IV Sriwijaya (Sumatera Selatan, Jambi, Lampung)	Ishak Djuarsa – Mayjen – Siliwangi – Etnis Sunda	17 Juni 1967	Pangdam I	Makmun Murod – Brigjen – Etnis Lampung
	Satibi Darwis – Brigjen – Siliwangi –	7 Februari 1970	Kepala Staf Kodam VI	Ishak Djuarsa – Mayjen – Siliwangi – Etnis Sunda
Kodam V Jaya (Jakarta Raya)	Makmun Murod – Mayjen – Siliwangi – Etnis Lampung	26 Januari 1969	Asisten II Operasi Pangad	Amir Machmud – Mayjen –
	Poniman – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa	23 Maret 1970	Pangdam XV	Makmun Murod – Mayjen – Siliwangi – Etnis Lampung
Kodam VI Siliwangi (Jawa Barat)	Hartono Rekso Dharsono – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa	20 Juli 1966	Kepala staf Kodam VI	Ibrahim Adjie – Mayjen
	Antonius Johannes Witono Sarsono – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa	19 April 1969	Pangdam XII	Hartono Rekso Dharsono – Mayjen – Siliwangi – Etnis Jawa
Kodam VII Diponegoro (Jawa Tengah)	Surono – Mayjen – Diponegoro – Etnis Jawa	12 September 1966	Deputi I Operasi Pangad	Surjosumpeno – Mayjen
	Widodo – Mayjen – Diponegoro – Etnis Jawa	23 April 1970	Pangdam III	Surono – Mayjen – Diponegoro
Kodam VIII Brawijaya (Jawa Timur)	M. Jasin – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa	15 April 1967	Atase Militer di Moskow	Sumitro – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa
	Wahono – Mayjen – Brawiaya – Etnis Jawa	22 Januari 1970	Pangkostrad	M. Jasin – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa
Kodam IX Mulawarman (Kalimantan Timur)	Mung Parhadimuljo – Mayjen – Diponegoro – Etnis Jawa	5 November 1965	Komandan RPKAD	Sumitro – Brigjen
	Sukertijo – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa	31 Maret 1970	Pangdam XVI	Mung Parhadimuljo – Mayjen – Diponegoro – Etnis Jawa
Kodam X Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Sabirin Mochtar – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa	9 Maret 1966	Pangdam XI	Sutopo Yuwono – Kolonel –
	Hadi Sujatno – Brigjen – Zeni Teknik – Etnis Jawa	19 Juli 1969	Pangdam XI	Sabirin Mochtar – Mayjen – Brawijaya – Etnis Jawa
Kodam XI Tambun Bungai (Kalimantan Tengah)	Hadi Sujatno – Brigjen – Zeni Teknik – Etnis Jawa	6 Juli 1968	Direktur Palad	Agus Siswadi – Brigjen –
	Alex Prawiraatmadja – Brigjen – Siliwangi – Etnis Sunda	26 Juli 1969	Kepala Staf Kodam XII	Hadi Sujatno – Brigjen – Zeni Teknik – Etnis Jawa

www.setabasri.org

Posisi	Perwira Baru	TMT	Jabatan Lama	Perwira Lama
Kodam XII Tanjungpura (Kalimantan Barat)	Antonius Johannes Witono Sarsono – Brigjen – Siliwangi – Etnis Jawa	29 Juni 1967	Deputi Asisten IV Logistik Pangad	Ryacudu – Brigjen –
	Sumadi – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa	28 April 1969	Deputi Kepala Staf Kodam VIII	Antonius Johannes Witono Sarsono – Brigjen – Siliwangi – Etnis Jawa
Kodam XIII Merdeka (Sulawesi Utara dan Tengah)	Kaharuddin Nasution – Mayjen – Siliwangi –	28 Oktober 1967	Gubernur Riau	Sudarmono – Brigjen
	Willy Widjojo Sujono – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa	23 Maret 1970	Komandan RPKAD	Kaharuddin Nasution – Mayjen – Siliwangi – Etnis Batak Mandailing
Kodam XIV Hasanuddin (Sulawesi Tengah dan Tenggara)	Sajidiman – Brigjen – Siliwangi – Etnis Jawa	3 Agustus 1968	Deputi Asisten II Operasi Pangad	Solichin – Brigjen
	Abdul Azis Bustam – Brigjen –	16 Maret 1970	Kepala Staf Kodam XIV	Sajidiman – Brigjen – Siliwangi – Etnis Jawa
Kodam XV Pattimura (Maluku)	Poniman – Brigjen – Siliwangi – Etnis Jawa	28 Agustus 1968	Pangdam III	Djohari – Brigjen
	Wing Wirjawan Wirjodiprodjo – Brigjen – Kavaleri – Etnis Jawa	23 Maret 1970	Komandan Kavaleri Pusat (Pussenkav)	Poniman – Brigjen – Siliwangi – Etnis Jawa
Kodam XVI Udayana (Sunda kecil)	Sukertijo – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa	21 Agustus 1966	Kepala staf Kodam VIII	Sjafiudin – Brigjen
	R. Suprapto – Brigjen – Diponegoro – Etnis Jawa	26 Maret 1970	Kepala staf Kodam XVII	Sukertijo – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa
Kodam VII Cendrawasih (Irian Barat)	Sarwo Edhie Wibowo – Brigjen – Diponegoro –	2 Juli 1968	Pangdam II	Bintoro – Brigjen
	Acub Zaenal – Brigjen – Brawijaya – Etnis Jawa	20 Februari 1970	Komandan Korem 084 Surabaya	Sarwo Edhie Wibowo – Brigjen – Diponegoro – Etnis Jawa

www.setabasri.org

Lampiran 5: Reproduksi Kekuasaan Soeharto dalam Tubuh Angkatan Bersenjata Tahun 1969

Sumber Gambar
The Editors, Current Data on the Indonesian Military Elite after the Reorganization of 1969-1970. 1970. *Indonesia.* No. 10 (Oct.), pp. 194-208, p. 194.

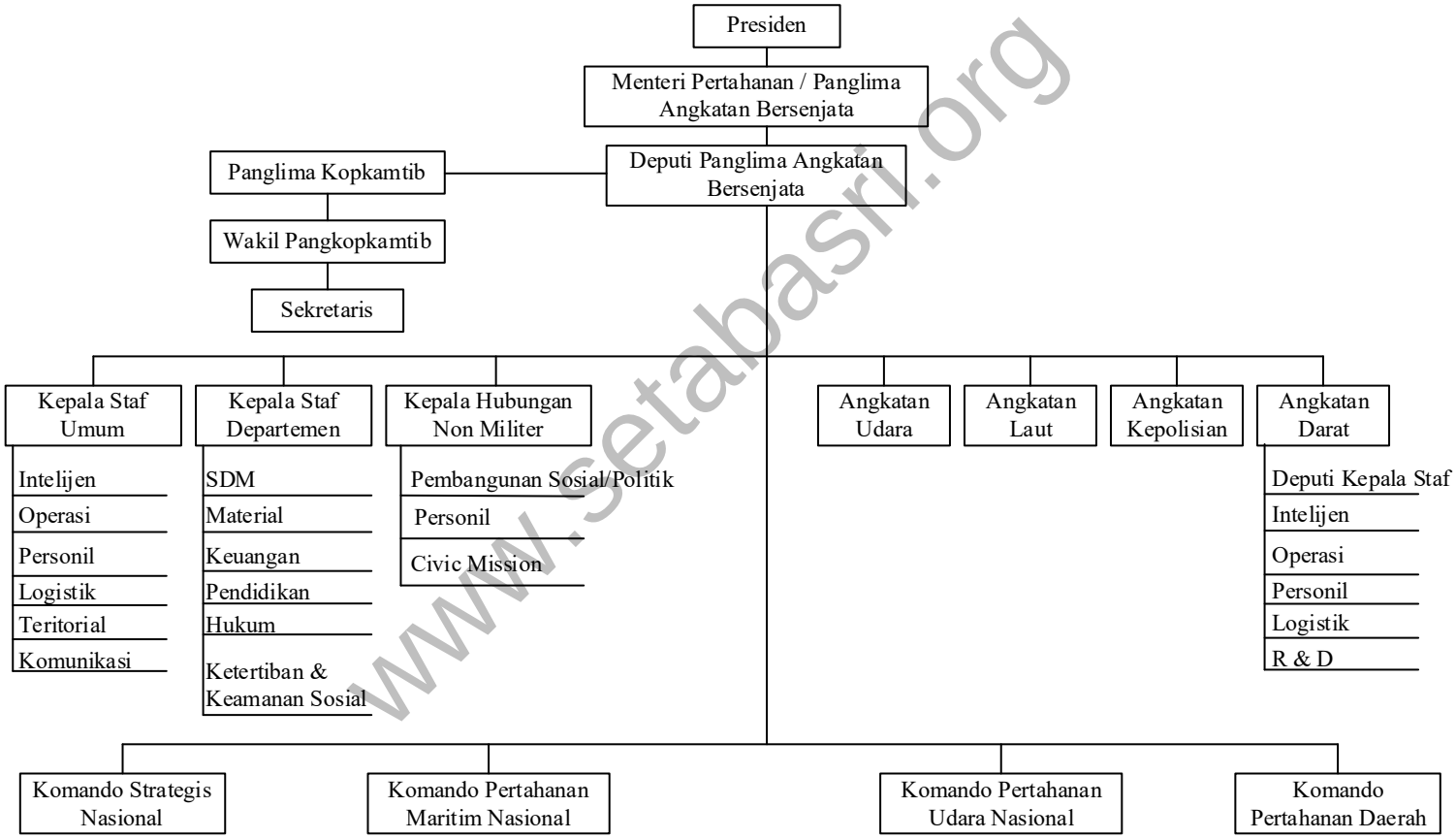

www.setabasri.org

Lampiran 6: Kabinet Dwikora Reshuffle Ketiga

Sumber Tabel
The Editors, Continuity and Change: Four Indonesian Cabinets since October 1, 165, with Scattered Data on Their Members' Organizational and Ethnic Affiliations, Age and Place of Birth. 1966. *Indonesia*. No. 2. (Oct.) pp. 185-222. p. 200-207.

Tingkat Kementerian			
Nama	**Jabatan**	**Asal Organisasi**	**Tanggal Efektif**
Jenderal AH. Nasution	Menteri/Deputi Komandan KOGAM	AD	30 Maret 1966
Umarjadi Njotowijono	Deputi Menteri Hubungan Ekonomi (di bawah Menteri Luar Negeri)	?	30 Maret 1966
Suwito Kusumowidagdo	Deputi Menteri Hubungan Politik (di bawah Menteri Luar Negeri)	?	30 Maret 1966
Radja Tumpal Durianus Pardede	Deputi Menteri di bawah Deputi IV PM	?	30 Maret 1966
Mayjen Mursyid	Deputi Menteri di bawah Deputi VI PM	AD	30 Maret 1966
Mayjen Wilujo Puspojudo (menggantikan Chaerul Saleh)	Menteri/*Caretaker* Ketua MPRS (dipilih oleh pimpinan MPRS)	AD	2 April 1966
Komodor Udara Rusmin Nurjadin (menggantikan Sri Muljono Herlambang)	Menteri/Panglima Angkatan Udara	Angkatan Udara	7 April 1966
Mayjen Basuki Rachmat	Deputi Menteri Otonomi Regional dan Hubungan Umum (di bawah Kementerian Dalam negeri yang dipegang oleh menterinya)	AD	21 April 1966
DPR-GR			
Kepemimpinan DPR-GR terdahulu diakhiri, lalu diganti 3 orang *caretaker*			
Nama	**Jabatan**	**Asal Organisasi**	**Tanggal Efektif**
K.H. Achmad Sjaichu	Deputi Menteri	NU	2 Mei 1966
Brigjen Teuku Sjarif Thajeb	Deputi Menteri	AD	2 Mei 1966
Laksamana Mursalin Daeng Mamanggung	Deputi Menteri	Angkatan Laut	2 Mei 1966
Subekti	Menteri/Ketua Mahkamah Agung	?	5 Mei 1966
Abimanju (menggantikan Wirjono Prodjodikoro sebagai *caretaker*)	Menteri Kehakiman	?	Sekitar Mei 1966
Sartono	Mengundurkan diri selaku Deputi I Ketua DPA		
Kepemimpinan baru DPRGR dipilih 17 Mei 1966			

www.setabasri.org

Tingkat Kementerian			
Nama	**Jabatan**	**Asal Organisasi**	**Tanggal Efektif**
Rachmad Wiradisurja (menggantikan David G. Cheng)	Deputi Menteri Perencanaan Kota & Konstruksi	?	21 Mei 1966
Osa Maliki (menggantikan Ali Sastroamidjojo, PNI)	Deputi Menteri/Wakil Ketua MPRS	PNI "Kanan"	7 Juni 1966
Pang Suparto (Kolonel, menggantikan Mayjen Achmad Tirtosudiro)	Deputi Menteri urusan Koperasi (di bawah Menteri Perdagangan)	AD	7 Juni 1966
Achmad Tirtosudiro (Mayjen)	Deputi Menteri di bawah Deputi IV PM	AD	7 Juni 1966
Oemar Senoadji (menggantikan Wirjono Prodjodikoro)	Menteri Kehakiman	IP-KI	9 Juni 1966
Subchan Zaenuri Erfan (menggantikan K.H. Idham Chalid, NU)	Deputi Menteri/Wakil Ketua MPRS	NU	14 Juni 1966
K.H. Achmad Sjaichu (NU)	Menteri/Ketua DPRGR	NU	15 Juni 1966
Brigjen Teuku Sjarif Thajeb	Deputi kementerian/Wakil ketua DPRGR	AD	15 Juni 1966
Admiral Mursalin Daeng Mamangung	Deputi kementerian/Wakil ketua DPRGR	Angkatan Laut	15 Juni 1966
Mang Reng Say	Deputi kementerian/Wakil ketua DPRGR	Katolik	15 Juni 1966
Mohammad Isnaeni	Deputi kementerian/Wakil ketua DPRGR	PNI "Kanan"	15 Juni 1966
Surjadi (menggantikan Subekti)	Menteri/Ketua Mahkamah Agung	?	21 Juni 1966
AH. Nasution (Jenderal)	Menteri/Ketua MPRS	AD	22 Juni 1966
Osa Maliki	Deputi Kementerian/Wakil Ketua MPRS	PNI "Kanan"	22 Juni 1966
Subchan Zaenuri Erfan	Deputi Kementerian/Wakil Ketua MPRS	NU	22 Juni 1966
Brigjen Mashudi	Deputi Kementerian/Wakil Ketua MPRS	AD	22 Juni 1966
Melanchton Siregar	Deputi Kementerian/Wakil Ketua MPRS	Parkindo	22 Juni 1966
Suhartono	Deputi Menteri/Jaksa Umum urusan Pengawasan Umum	?	23 Juni 1966
Sutrisno Hamidjojo	Deputi Menteri/ Jaksa Umum urusan Pengawasan Khusus	?	23 Juni 1966
Priatna Abdulrasjid	Deputi Menteri/ Jaksa Umum urusan Hubungan Organisasi	?	23 Juni 1966
Poerwosoenoe (Kolonel, CPM)	Deputi Menteri / Jaksa Umum urusan Operasi dan Intelijen	AD	23 Juni 1966
Sujono Hadinoto (menggantikan Sartono)	Menteri/Deputi I Ketua DPA	PNI "Kanan"	28 Juni 1966
Lasmidjah Hardi	Deputi Menteri urusan Kebudayaan (di bawah menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan)	PNI "Kanan"	13 Juli 1966

www.setneg.go.id